



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH	ASST. DAERAH	SEK. DAERAH	WABUP

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	DINAS/BLM KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	AS ST	SEKDA	WASUP
				

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikiasi dan Nomenkolatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

KABAG HUKUM	DINASIS KANTOR	ASST II	WABUP
			

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 318);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 323);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 38);

KABAG HUKUM	DINASRABUM KANTOR	ASS	SEKDA	KABUP
				

33. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor: 320/29/VIII/2024 Tanggal, 14 Agustus 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;

KABAG HUKUM	DEKASADAN KANTOR	ASS /	SEDA /	WAKIL /

- b. laporan perubahan SAL;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Boalemo Idaman Gorontalo (BIG) dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	795.109.891.976,97
b. belanja dan Transfer	Rp	<u>780.750.667.855,60</u>
Surplus /defisit	Rp	14.359.224.121,37
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp	30.677.911.688,79
2. pengeluaran	Rp	<u>-</u>
Pembiayaan netto	Rp	30.677.911.688,79

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(5.811.070.202,97) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	789.298.821.774,00
b. realisasi	Rp	<u>795.109.891.976,97</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	(5.811.070.202,97)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp37.668.155.939,40 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	701.292.287.268,00
b. realisasi	Rp	<u>663.624.131.328,60</u>

KABUPATEN KORUM	DINAS/SEKDA MANTOR	ASS	SEKDA	WALU

Selisih lebih/(kurang)	Rp	37.668.155.939,40
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp(16.318.687.567,63) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|
| a. anggaran surplus/defisit | | |
| setelah perubahan | Rp | (30.677.911.689,00) |
| b. realisasi | Rp | <u>14.359.224.121,37</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp | (16.318.687.567,63) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp0,21 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|----|--------------------------|
| a. anggaran penerimaan pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp | 30.677.911.689,00 |
| b. realisasi | Rp | <u>30.677.911.688,79</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,21 |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp-
dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|----|----------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp | - |
| b. realisasi | Rp | <u>-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | - |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,21
dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp | 30.677.911.689,00 |
| b. realisasi | Rp | <u>30.677.911.688,79</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,21 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	30.677.911.688,79
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	<u>30.677.911.688,79</u>
c. sub total	Rp	0,00

KECAMATAN HUKUM	DINAS KANTOR	ASSISTEN	SEKDA	WAKIL

d. sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran SiLPA/SiKPA	Rp	45.037.135.810,16
e. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
f. lain-lain	Rp	<u>0,00</u>
g. saldo anggaran lebih akhir	Rp	45.037.135.810,16

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	1.527.596.948.960,49
b. jumlah kewajiban	Rp	<u>31.361.776.560,00</u>
c. jumlah ekuitas	Rp	1.496.235.172.400,49

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. pendapatan – LO	Rp	773.252.123.587,87
b. beban - LO	Rp	<u>730.303.421.442,63</u>
c. surplus/Defisit dari Operasional	Rp	42.948.702.145,24
d. surplus/Defisit Non Operasional	Rp	-
e. pos luar biasa	Rp	<u>(339.885.000,00)</u>
f. surplus/Defisit – LO	Rp	42.608.817.145,24

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. saldo awal kas per 1 Januari tahun 2023	Rp	31.696.505.821,16
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	146.142.588.046,37
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(131.783.363.925,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	-
e. arus kas bersih aktivitas transitoris	Rp	(824.725.995,87)

KU-34-C HUKUM	DINAS/BAGIAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAKUP

f. saldo akhir kas per 31 Desember
tahun 2023.

Rp 45.231.003.946,66

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2023 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 1.456.442.680.956,57
b. surplus/Defisit – LO	Rp 42.608.817.145,24
c. koreksi ekuitas - Piutang	Rp 159.780.965,90
d. koreksi ekuitas - Persediaan	Rp 157.865.117,78
e. koreksi ekuitas – Aset Tetap	Rp 93.478.191,00
f. koreksi ekuitas – Aset Lainnya	Rp (515.118.500,00)
g. koreksi ekuitas - Kewajiban	Rp (2.712.331.476,00)
h. selisih revaluasi Aset Tetap	Rp -
i. koreksi Ekuitas lainnya	<u>Rp -</u>
j. ekuitas akhir	Rp 1.496.235.172.400,49

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran
peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
bidang pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi program dan kegiatan.

KEPALA DAERAH	UNAB/SEKDA	ASS	SEKDA	WAKIL
				

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati Boalemo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian

KABAG HUKUM	DINASRADM KANTOR	ASS	SEDA	WAKIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

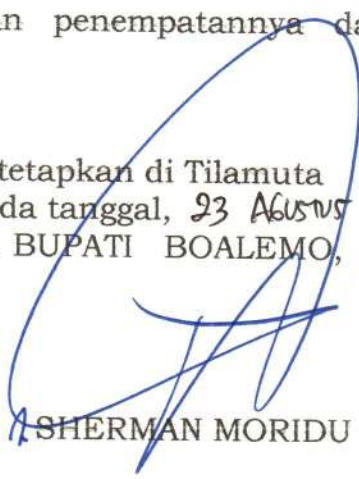
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


RAHMAT BIYA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR ²)

NOMOR REG PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 : (.....² / ⁶ / 2024)



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	789.298.821.774,00	795.109.891.976,97	5.811.070.202,97	100,74
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43.421.269.916,00	48.605.924.835,82	5.184.654.919,82	111,94
4.1.01	PENDIDIKAN	0,00	241.439.174,82	241.439.174,82	0
4.1.01.1-01.2-19.2-22.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	241.439.174,82	241.439.174,82	0
4.1.02	KESEHATAN	43.143.298.136,00	47.843.466.529,00	4.700.168.393,00	110,89
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	43.143.298.136,00	47.843.466.529,00	4.700.168.393,00	110,89
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	277.971.780,00	278.059.121,00	87.341,00	100,03
4.1.03.1-03.1-04.2-10.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	277.971.780,00	278.059.121,00	87.341,00	100,03
4.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	242.960.011,00	242.960.011,00	0
4.1.04.1-04.2-15.2-10.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan	0,00	242.960.011,00	242.960.011,00	0
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	973.327.500,00	690.168.000,00	(283.159.500,00)	70,91
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	129.727.500,00	37.480.000,00	(92.247.500,00)	28,89
4.2.11.2-11.0-00.2-15.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perhubungan	129.727.500,00	37.480.000,00	(92.247.500,00)	28,89
4.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	0,00	22.288.000,00	22.288.000,00	0
4.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	22.288.000,00	22.288.000,00	0
4.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	843.600.000,00	630.400.000,00	(213.200.000,00)	74,73
4.2.17.2-17.3-30.3-31.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	843.600.000,00	630.400.000,00	(213.200.000,00)	74,73
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	462.628.000,00	474.224.550,00	11.596.550,00	102,51
4.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.800.000,00	104.889.550,00	4.089.550,00	104,06
4.3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.800.000,00	104.889.550,00	4.089.550,00	104,06
4.3.26	PARIWISATA	321.748.000,00	330.665.000,00	8.917.000,00	102,77
4.3.26.3-26.2-22.2-19.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (old)	321.748.000,00	330.665.000,00	8.917.000,00	102,77
4.3.27	PERTANIAN	40.080.000,00	38.670.000,00	(1.410.000,00)	96,48
4.3.27.3-27.2-09.0-00.01	Dinas Pertanian	40.080.000,00	38.670.000,00	(1.410.000,00)	96,48
4.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.000.000,00	4.750.000,00	750.000,00	118,75
4.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.000.000,00	4.750.000,00	750.000,00	118,75
4.4.01.4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	4.000.000,00	4.750.000,00	750.000,00	118,75
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	744.430.596.358,00	745.332.924.591,15	902.328.233,15	100,12
4.5.02	KEUANGAN	744.430.596.358,00	745.332.924.591,15	902.328.233,15	100,12
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	744.430.596.358,00	745.332.924.591,15	902.328.233,15	100,12



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.000.000,00	1.900.000,00	(5.100.000,00)	27,14
4.7.01	KECAMATAN	7.000.000,00	1.900.000,00	(5.100.000,00)	27,14
4.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Paguyaman	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0
4.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Tilamuta	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Mananggu	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0
4.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Wonosari	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0
4.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Dulupi	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Paguyaman Pantai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0
4.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Botumoito	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0
5	BELANJA DAERAH	819.976.733.463,00	780.750.667.855,60	(39.226.065.607,40)	95,22
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	496.113.815.659,00	477.373.857.164,60	(18.739.958.494,40)	96,22
5.1.01	PENDIDIKAN	223.964.638.212,00	214.837.862.392,00	(9.126.775.820,00)	95,92
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	223.964.638.212,00	214.837.862.392,00	(9.126.775.820,00)	95,92
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01.1	BELANJA OPERASI	190.865.315.979,00	183.447.360.945,00	(7.417.955.034,00)	96,11
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01.1.01	Belanja Pegawai	143.321.173.033,00	139.032.681.376,00	(4.288.491.657,00)	97,01
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.394.142.946,00	41.074.729.075,00	(6.319.413.871,00)	86,67
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	3.339.950.494,00	3.189.950.494,00	2.226,63
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01.2	BELANJA MODAL	33.099.322.233,00	31.390.501.447,00	(1.708.820.786,00)	94,84
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01.2.01	Belanja Modal Tanah	94.790.000,00	94.517.300,00	(272.700,00)	99,71
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.760.598.467,00	8.274.497.908,00	513.899.441,00	106,62
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.549.232.225,00	18.175.980.550,00	(2.373.251.675,00)	88,45
5.1.01.1-01.2-19.2-22.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.694.701.541,00	4.845.505.689,00	150.804.148,00	103,21
5.1.02	KESEHATAN	149.905.662.083,00	145.492.797.470,60	(4.412.864.612,40)	97,06
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	149.905.662.083,00	145.492.797.470,60	(4.412.864.612,40)	97,06
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	138.299.879.510,00	134.161.819.316,60	(4.138.060.193,40)	97,01
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	69.921.871.158,00	82.382.807.362,60	12.460.936.204,60	117,82
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.228.008.352,00	51.629.011.954,00	(16.598.996.398,00)	75,67
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	11.605.782.573,00	11.330.978.154,00	(274.804.419,00)	97,63
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	216.082.566,00	0,00	(216.082.566,00)	0
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.052.456.570,00	4.955.712.735,00	(96.743.835,00)	98,09
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.448.081.250,00	5.487.150.812,00	39.069.562,00	100,72
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	839.162.187,00	838.614.607,00	(547.580,00)	99,93
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	102.912.648.665,00	98.494.463.770,00	(4.418.184.895,00)	95,71
5.1.03.1-03.1-04.2-10.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102.912.648.665,00	98.494.463.770,00	(4.418.184.895,00)	95,71
5.1.03.1-03.1-04.2-10.01.1	BELANJA OPERASI	17.402.722.745,00	16.019.169.735,00	(1.383.553.010,00)	92,05
5.1.03.1-03.1-04.2-10.01.1.01	Belanja Pegawai	3.347.528.197,00	3.233.797.295,00	(113.730.902,00)	96,60
5.1.03.1-03.1-04.2-10.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.055.194.548,00	12.785.372.440,00	(1.269.822.108,00)	90,97



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03.1-03.1-04.2-10.01.2	BELANJA MODAL	85.509.925.920,00	82.475.294.035,00	(3.034.631.885,00)	96,45
5.1.03.1-03.1-04.2-10.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.207.100,00	117.805.000,00	(65.402.100,00)	64,30
5.1.03.1-03.1-04.2-10.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	318.108.294,00	217.790.000,00	(100.318.294,00)	68,46
5.1.03.1-03.1-04.2-10.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.008.610.526,00	82.139.699.035,00	(2.868.911.491,00)	96,63
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.388.720.576,00	4.377.739.507,00	(10.981.069,00)	99,75
5.1.04.1-04.2-15.2-10.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan	4.388.720.576,00	4.377.739.507,00	(10.981.069,00)	99,75
5.1.04.1-04.2-15.2-10.01.1	BELANJA OPERASI	4.307.924.576,00	4.296.943.507,00	(10.981.069,00)	99,75
5.1.04.1-04.2-15.2-10.01.1.01	Belanja Pegawai	3.419.955.119,00	3.419.955.118,00	(1,00)	100,00
5.1.04.1-04.2-15.2-10.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	887.969.457,00	876.988.389,00	(10.981.068,00)	98,76
5.1.04.1-04.2-15.2-10.01.2	BELANJA MODAL	80.796.000,00	80.796.000,00	0,00	100,00
5.1.04.1-04.2-15.2-10.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.446.000,00	48.446.000,00	0,00	100,00
5.1.04.1-04.2-15.2-10.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.253.051.995,00	9.674.730.021,00	(578.321.974,00)	94,36
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	7.027.338.899,00	6.552.648.651,00	(474.690.248,00)	93,25
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.003.838.899,00	6.529.148.651,00	(474.690.248,00)	93,22
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.774.821.967,00	3.687.340.335,00	(87.481.632,00)	97,68
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.229.016.932,00	2.841.808.316,00	(387.208.616,00)	88,01
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.225.713.096,00	3.122.081.370,00	(103.631.726,00)	96,79
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	3.194.713.096,00	3.091.141.370,00	(103.571.726,00)	96,76
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.498.374.007,00	2.433.440.491,00	(64.933.516,00)	97,40
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.339.089,00	657.700.879,00	(38.638.210,00)	94,45
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	31.000.000,00	30.940.000,00	(60.000,00)	99,81
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.000.000,00	30.940.000,00	(60.000,00)	99,81
5.1.06	SOSIAL	4.689.094.128,00	4.496.264.004,00	(192.830.124,00)	95,89
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.689.094.128,00	4.496.264.004,00	(192.830.124,00)	95,89
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.665.594.128,00	4.473.264.524,00	(192.329.604,00)	95,88
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.809.972.046,00	2.732.544.680,00	(77.427.366,00)	97,24
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.855.622.082,00	1.740.719.844,00	(114.902.238,00)	93,81
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.2	BELANJA MODAL	23.500.000,00	22.999.480,00	(500.520,00)	97,87
5.1.06.1-06.2-13.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.500.000,00	22.999.480,00	(500.520,00)	97,87
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.403.624.029,00	30.420.162.351,00	(1.983.461.678,00)	93,88
5.2.09	PANGAN	1.688.495.208,00	1.687.782.708,00	(712.500,00)	99,96
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01	Dinas Pangan	1.688.495.208,00	1.687.782.708,00	(712.500,00)	99,96
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	1.688.495.208,00	1.687.782.708,00	(712.500,00)	99,96
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.298.252.370,00	1.298.252.370,00	0,00	100,00
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.242.838,00	389.530.338,00	(712.500,00)	99,82
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	5.891.154.351,00	5.487.375.873,00	(403.778.478,00)	93,15
5.2.11.2-11.0-00.2-15.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perhubungan	5.891.154.351,00	5.487.375.873,00	(403.778.478,00)	93,15



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.11.2-11.0-00.2-15.01.1	BELANJA OPERASI	5.891.154.351,00	5.487.375.873,00	(403.778.478,00)	93,15
5.2.11.2-11.0-00.2-15.01.1.01	Belanja Pegawai	2.989.048.679,00	2.783.399.995,00	(205.648.684,00)	93,12
5.2.11.2-11.0-00.2-15.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.902.105.672,00	2.703.975.878,00	(198.129.794,00)	93,17
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.627.778.365,00	3.560.548.054,00	(67.230.311,00)	98,15
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.627.778.365,00	3.560.548.054,00	(67.230.311,00)	98,15
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.464.766.365,00	3.397.816.554,00	(66.949.811,00)	98,07
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.657.909.441,00	2.594.468.252,00	(63.441.189,00)	97,61
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.856.924,00	803.348.302,00	(3.508.622,00)	99,57
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	163.012.000,00	162.731.500,00	(280.500,00)	99,83
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.012.000,00	162.731.500,00	(280.500,00)	99,83
5.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.206.986.072,00	5.606.190.723,00	(600.795.349,00)	90,32
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.206.986.072,00	5.606.190.723,00	(600.795.349,00)	90,32
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.206.986.072,00	5.606.190.723,00	(600.795.349,00)	90,32
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.121.690.573,00	1.983.498.999,00	(138.191.574,00)	93,49
5.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.085.295.499,00	3.622.691.724,00	(462.603.775,00)	88,68
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	3.498.562.709,00	3.328.897.671,00	(169.665.038,00)	95,15
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.498.562.709,00	3.328.897.671,00	(169.665.038,00)	95,15
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	3.498.562.709,00	3.328.897.671,00	(169.665.038,00)	95,15
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	1.952.860.786,00	1.851.908.903,00	(100.951.883,00)	94,83
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.545.701.923,00	1.476.988.768,00	(68.713.155,00)	95,55
5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.944.456.233,00	4.469.729.688,00	(474.726.545,00)	90,40
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.944.456.233,00	4.469.729.688,00	(474.726.545,00)	90,40
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.1	BELANJA OPERASI	4.927.306.233,00	4.455.853.568,00	(471.452.665,00)	90,43
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.1.01	Belanja Pegawai	3.314.324.830,00	3.213.837.764,00	(100.487.066,00)	96,97
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.612.981.403,00	1.242.015.804,00	(370.965.599,00)	77,00
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.2	BELANJA MODAL	17.150.000,00	13.876.120,00	(3.273.880,00)	80,91
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.150.000,00	13.876.120,00	(3.273.880,00)	80,91
5.2.18	PENANAMAN MODAL	3.468.059.523,00	3.307.082.823,00	(160.976.700,00)	95,36
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral	3.468.059.523,00	3.307.082.823,00	(160.976.700,00)	95,36
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.322.059.523,00	3.162.531.323,00	(159.528.200,00)	95,20
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.371.927.377,00	2.304.747.934,00	(67.179.443,00)	97,17
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.132.146,00	857.783.389,00	(92.348.757,00)	90,28
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.2	BELANJA MODAL	146.000.000,00	144.551.500,00	(1.448.500,00)	99,01
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000,00	94.751.500,00	(1.248.500,00)	98,70
5.2.18.2-18.3-29.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60
5.2.23	PERPUSTAKAAN	3.078.131.568,00	2.972.554.811,00	(105.576.757,00)	96,57
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.078.131.568,00	2.972.554.811,00	(105.576.757,00)	96,57
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.049.806.568,00	2.945.379.811,00	(104.426.757,00)	96,58
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.301.644.069,00	2.219.174.252,00	(82.469.817,00)	96,42



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.162.499,00	726.205.559,00	(21.956.940,00)	97,07
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	28.325.000,00	27.175.000,00	(1.150.000,00)	95,94
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.325.000,00	2.325.000,00	(1.000.000,00)	69,92
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.778.891.806,00	41.818.366.784,00	(3.960.525.022,00)	91,35
5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.611.613.792,00	13.138.216.184,00	(1.473.397.608,00)	89,92
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.611.613.792,00	13.138.216.184,00	(1.473.397.608,00)	89,92
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.838.685.272,00	12.510.782.999,00	(1.327.902.273,00)	90,40
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.057.552.124,00	2.982.570.830,00	(74.981.294,00)	97,55
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.781.133.148,00	9.528.212.169,00	(1.252.920.979,00)	88,38
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	772.928.520,00	627.433.185,00	(145.495.335,00)	81,18
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	772.928.520,00	627.433.185,00	(145.495.335,00)	81,18
5.3.26	PARIWISATA	7.736.840.378,00	6.604.731.023,00	(1.132.109.355,00)	85,37
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (old)	7.736.840.378,00	6.604.731.023,00	(1.132.109.355,00)	85,37
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1	BELANJA OPERASI	7.383.629.503,00	6.183.432.293,00	(1.200.197.210,00)	83,75
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1.01	Belanja Pegawai	2.776.334.405,00	2.613.833.333,00	(162.501.072,00)	94,15
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.057.295.098,00	3.569.598.960,00	(487.696.138,00)	87,98
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1.05	Belanja Hibah	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	0
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.2	BELANJA MODAL	353.210.875,00	421.298.730,00	68.087.855,00	119,28
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.300.000,00	(200.000,00)	98,40
5.3.26.3-26.2-22.2-19.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.710.875,00	408.998.730,00	68.287.855,00	120,04
5.3.27	PERTANIAN	19.952.629.846,00	18.680.172.937,00	(1.272.456.909,00)	93,62
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01	Dinas Pertanian	19.952.629.846,00	18.680.172.937,00	(1.272.456.909,00)	93,62
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	16.446.457.246,00	15.750.785.963,00	(695.671.283,00)	95,77
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.741.883.357,00	8.649.747.136,00	(92.136.221,00)	98,95
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.704.573.889,00	7.101.038.827,00	(603.535.062,00)	92,17
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.506.172.600,00	2.929.386.974,00	(576.785.626,00)	83,55
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	637.531.600,00	558.789.600,00	(78.742.000,00)	87,65
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.243.641.000,00	1.748.722.374,00	(494.918.626,00)	77,94
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	625.000.000,00	621.875.000,00	(3.125.000,00)	99,50
5.3.32	TRANSMIGRASI	3.477.807.790,00	3.395.246.640,00	(82.561.150,00)	97,63
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.477.807.790,00	3.395.246.640,00	(82.561.150,00)	97,63
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.477.807.790,00	3.395.246.640,00	(82.561.150,00)	97,63
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.304.116.134,00	2.234.164.260,00	(69.951.874,00)	96,96
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.691.656,00	1.161.082.380,00	(12.609.276,00)	98,93
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	47.659.567.761,00	43.553.089.931,00	(4.106.477.830,00)	91,38
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	22.143.437.361,00	19.963.552.245,00	(2.179.885.116,00)	90,16
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	22.143.437.361,00	19.963.552.245,00	(2.179.885.116,00)	90,16
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	21.891.897.361,00	19.720.063.245,00	(2.171.834.116,00)	90,08
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	10.429.509.441,00	10.058.036.722,00	(371.472.719,00)	96,44



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.392.387.920,00	9.662.026.523,00	(1.730.361.397,00)	84,81
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	251.540.000,00	243.489.000,00	(8.051.000,00)	96,80
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.540.000,00	243.489.000,00	(8.051.000,00)	96,80
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	25.516.130.400,00	23.589.537.686,00	(1.926.592.714,00)	92,45
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	25.516.130.400,00	23.589.537.686,00	(1.926.592.714,00)	92,45
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	25.299.130.400,00	23.375.365.686,00	(1.923.764.714,00)	92,40
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	14.312.467.080,00	13.748.194.750,00	(564.272.330,00)	96,06
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.986.663.320,00	9.627.170.936,00	(1.359.492.384,00)	87,63
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	217.000.000,00	214.172.000,00	(2.828.000,00)	98,70
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	217.000.000,00	214.172.000,00	(2.828.000,00)	98,70
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	157.875.886.808,00	147.874.637.718,00	(10.001.249.090,00)	93,67
5.5.01	PERENCANAAN	5.975.029.038,00	5.319.162.634,00	(655.866.404,00)	89,02
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA)	5.975.029.038,00	5.319.162.634,00	(655.866.404,00)	89,02
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.403.529.038,00	4.749.162.634,00	(654.366.404,00)	87,89
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.032.209.963,00	2.915.849.278,00	(116.360.685,00)	96,16
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.371.319.075,00	1.833.313.356,00	(538.005.719,00)	77,31
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	571.500.000,00	570.000.000,00	(1.500.000,00)	99,74
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.500.000,00	20.000.000,00	(1.500.000,00)	93,02
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00
5.5.02	KEUANGAN	147.109.756.952,00	138.036.481.294,00	(9.073.275.658,00)	93,83
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	147.109.756.952,00	138.036.481.294,00	(9.073.275.658,00)	93,83
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	27.188.868.057,00	19.968.947.267,00	(7.219.920.790,00)	73,45
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	10.878.302.383,00	10.051.495.242,00	(826.807.141,00)	92,40
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.310.565.674,00	9.917.452.025,00	(6.393.113.649,00)	60,80
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	624.187.700,00	601.112.500,00	(23.075.200,00)	96,30
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426.237.700,00	403.712.500,00	(22.525.200,00)	94,72
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.950.000,00	197.400.000,00	(550.000,00)	99,72
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	612.255.000,00	339.885.000,00	(272.370.000,00)	55,51
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	612.255.000,00	339.885.000,00	(272.370.000,00)	55,51
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	118.684.446.195,00	117.126.536.527,00	(1.557.909.668,00)	98,69
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.546.026.095,00	207.684.603,00	(1.338.341.492,00)	13,43
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.138.420.100,00	116.918.851.924,00	(219.568.176,00)	99,81
5.5.03	KEPEGAWAIAN	4.791.100.818,00	4.518.993.790,00	(272.107.028,00)	94,32
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	4.791.100.818,00	4.518.993.790,00	(272.107.028,00)	94,32
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.778.100.818,00	4.506.043.790,00	(272.057.028,00)	94,31
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.831.316.704,00	2.726.616.623,00	(104.700.081,00)	96,30
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.946.784.114,00	1.779.427.167,00	(167.356.947,00)	91,40
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	12.950.000,00	(50.000,00)	99,62
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	12.950.000,00	(50.000,00)	99,62



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.786.706.703,00	5.644.408.138,00	(142.298.565,00)	97,54
5.6.01	INSPEKTORAT	5.786.706.703,00	5.644.408.138,00	(142.298.565,00)	97,54
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat Daerah	5.786.706.703,00	5.644.408.138,00	(142.298.565,00)	97,54
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.766.706.703,00	5.624.408.138,00	(142.298.565,00)	97,53
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.568.939.663,00	3.501.990.778,00	(66.948.885,00)	98,12
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.197.767.040,00	2.122.417.360,00	(75.349.680,00)	96,57
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	17.315.790.023,00	16.321.254.823,00	(994.535.200,00)	94,26
5.7.01	KECAMATAN	17.315.790.023,00	16.321.254.823,00	(994.535.200,00)	94,26
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Paguyaman	3.181.334.052,00	2.942.947.881,00	(238.386.171,00)	92,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.999.334.052,00	2.773.247.281,00	(226.086.771,00)	92,46
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.493.466.433,00	2.420.465.831,00	(73.000.602,00)	97,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.867.619,00	352.781.450,00	(153.086.169,00)	69,74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	182.000.000,00	169.700.600,00	(12.299.400,00)	93,24
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	19.980.000,00	(12.020.000,00)	62,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.720.600,00	(279.400,00)	99,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Tilamuta	2.212.618.335,00	2.114.552.017,00	(98.066.318,00)	95,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	2.212.618.335,00	2.114.552.017,00	(98.066.318,00)	95,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	1.661.996.335,00	1.654.063.044,00	(7.933.291,00)	99,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.622.000,00	460.488.973,00	(90.133.027,00)	83,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Mananggu	2.339.880.591,00	2.260.816.805,00	(79.063.786,00)	96,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	2.139.380.591,00	2.061.439.105,00	(77.941.486,00)	96,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.798.238.500,00	1.765.820.913,00	(32.417.587,00)	98,20
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.142.091,00	295.618.192,00	(45.523.899,00)	86,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	200.500.000,00	199.377.700,00	(1.122.300,00)	99,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	37.450.000,00	(50.000,00)	99,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.000.000,00	161.927.700,00	(1.072.300,00)	99,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Wonosari	2.416.863.705,00	2.250.929.049,00	(165.934.656,00)	93,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	2.377.813.705,00	2.230.929.049,00	(146.884.656,00)	93,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1.853.416.830,00	1.808.374.292,00	(45.042.538,00)	97,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.396.875,00	422.554.757,00	(101.842.118,00)	80,58
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	39.050.000,00	20.000.000,00	(19.050.000,00)	51,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.050.000,00	20.000.000,00	(19.050.000,00)	51,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Dulupi	2.482.232.362,00	2.397.136.491,00	(85.095.871,00)	96,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	2.438.132.362,00	2.353.036.491,00	(85.095.871,00)	96,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	1.950.932.362,00	1.894.428.108,00	(56.504.254,00)	97,10
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.200.000,00	458.608.383,00	(28.591.617,00)	94,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Paguyaman Pantai	2.052.014.486,00	1.853.320.517,00	(198.693.969,00)	90,32
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	2.052.014.486,00	1.853.320.517,00	(198.693.969,00)	90,32
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	1.500.314.677,00	1.409.592.734,00	(90.721.943,00)	93,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.699.809,00	443.727.783,00	(107.972.026,00)	80,43
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Botumoito	2.630.846.492,00	2.501.552.063,00	(129.294.429,00)	95,09
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	2.630.846.492,00	2.501.552.063,00	(129.294.429,00)	95,09
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	2.129.177.335,00	2.081.856.726,00	(47.320.609,00)	97,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.669.157,00	419.695.337,00	(81.973.820,00)	83,66
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	17.042.450.674,00	17.744.890.946,00	702.440.272,00	104,12
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.042.450.674,00	17.744.890.946,00	702.440.272,00	104,12
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	Kesbang Politik dan Limnas	17.042.450.674,00	17.744.890.946,00	702.440.272,00	104,12
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	17.028.450.674,00	17.737.890.946,00	709.440.272,00	104,17
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.686.201.717,00	1.568.044.931,00	(118.156.786,00)	92,99
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.366.718.981,00	3.520.316.039,00	(846.402.942,00)	80,62
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	10.975.529.976,00	12.649.529.976,00	1.674.000.000,00	115,25
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	50,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	50,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0
6.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.653.902.896,00	-1.656.040.175.161,23	(1.657.694.078.057,23)	0
6.1.01	PENDIDIKAN	962.033.902,00	-812.457.666.760,80	(813.419.700.662,80)	0
6.1.01.1-01.2-19.2-22.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	962.033.902,00	-812.457.666.760,80	(813.419.700.662,80)	0
6.1.01.1-01.2-19.2-22.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	962.033.902,00	-812.457.666.760,80	(813.419.700.662,80)	0
6.1.01.1-01.2-19.2-22.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	962.033.902,00	-812.457.666.760,80	(813.419.700.662,80)	0
6.1.02	KESEHATAN	691.868.994,00	-479.412.432.415,70	(480.104.301.409,70)	0
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	691.868.994,00	-479.412.432.415,70	(480.104.301.409,70)	0
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	691.868.994,00	-479.412.432.415,70	(480.104.301.409,70)	0
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	691.868.994,00	-479.412.432.415,70	(480.104.301.409,70)	0
6.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	-158.434.629.330,00	(158.434.629.330,00)	0
6.1.03.1-03.1-04.2-10.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	-158.434.629.330,00	(158.434.629.330,00)	0
6.1.03.1-03.1-04.2-10.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-158.434.629.330,00	(158.434.629.330,00)	0
6.1.03.1-03.1-04.2-10.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-158.434.629.330,00	(158.434.629.330,00)	0
6.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	-120.991.743.107,73	(120.991.743.107,73)	0
6.1.04.1-04.2-15.2-10.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanian	0,00	-120.991.743.107,73	(120.991.743.107,73)	0
6.1.04.1-04.2-15.2-10.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-120.991.743.107,73	(120.991.743.107,73)	0
6.1.04.1-04.2-15.2-10.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-120.991.743.107,73	(120.991.743.107,73)	0
6.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	-55.952.679.858,00	(55.952.679.858,00)	0
6.1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	-31.055.238.787,00	(31.055.238.787,00)	0
6.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-31.055.238.787,00	(31.055.238.787,00)	0
6.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-31.055.238.787,00	(31.055.238.787,00)	0
6.1.05.1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	-24.897.441.071,00	(24.897.441.071,00)	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-24.897.441.071,00	(24.897.441.071,00)	0
6.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-24.897.441.071,00	(24.897.441.071,00)	0
6.1.06	SOSIAL	0,00	-28.791.023.689,00	(28.791.023.689,00)	0
6.1.06.1-06.2-13.0-00.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	-28.791.023.689,00	(28.791.023.689,00)	0
6.1.06.1-06.2-13.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-28.791.023.689,00	(28.791.023.689,00)	0
6.1.06.1-06.2-13.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-28.791.023.689,00	(28.791.023.689,00)	0
6.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	-176.502.793.285,00	(176.502.793.285,00)	0
6.2.09	PANGAN	0,00	-20.145.422.794,00	(20.145.422.794,00)	0
6.2.09.2-09.0-00.0-00.01	Dinas Pangan	0,00	-20.145.422.794,00	(20.145.422.794,00)	0
6.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-20.145.422.794,00	(20.145.422.794,00)	0
6.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-20.145.422.794,00	(20.145.422.794,00)	0
6.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	0,00	-33.452.161.088,00	(33.452.161.088,00)	0
6.2.11.2-11.0-00.2-15.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perhubungan	0,00	-33.452.161.088,00	(33.452.161.088,00)	0
6.2.11.2-11.0-00.2-15.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-33.452.161.088,00	(33.452.161.088,00)	0
6.2.11.2-11.0-00.2-15.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-33.452.161.088,00	(33.452.161.088,00)	0
6.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	-18.738.424.895,00	(18.738.424.895,00)	0
6.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	-18.738.424.895,00	(18.738.424.895,00)	0
6.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-18.738.424.895,00	(18.738.424.895,00)	0
6.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-18.738.424.895,00	(18.738.424.895,00)	0
6.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	-30.522.448.875,00	(30.522.448.875,00)	0
6.2.14.2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	-30.522.448.875,00	(30.522.448.875,00)	0
6.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-30.522.448.875,00	(30.522.448.875,00)	0
6.2.14.2-14.2-08.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-30.522.448.875,00	(30.522.448.875,00)	0
6.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	0,00	-17.790.860.581,00	(17.790.860.581,00)	0
6.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	-17.790.860.581,00	(17.790.860.581,00)	0
6.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-17.790.860.581,00	(17.790.860.581,00)	0
6.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-17.790.860.581,00	(17.790.860.581,00)	0
6.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	-28.429.486.443,00	(28.429.486.443,00)	0
6.2.17.2-17.3-30.3-31.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	-28.429.486.443,00	(28.429.486.443,00)	0
6.2.17.2-17.3-30.3-31.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-28.429.486.443,00	(28.429.486.443,00)	0
6.2.17.2-17.3-30.3-31.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-28.429.486.443,00	(28.429.486.443,00)	0
6.2.18	PENANAMAN MODAL	0,00	-14.125.298.994,00	(14.125.298.994,00)	0
6.2.18.2-18.3-29.0-00.01	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	-14.125.298.994,00	(14.125.298.994,00)	0
6.2.18.2-18.3-29.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-14.125.298.994,00	(14.125.298.994,00)	0
6.2.18.2-18.3-29.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-14.125.298.994,00	(14.125.298.994,00)	0
6.2.23	PERPUSTAKAAN	0,00	-13.298.689.615,00	(13.298.689.615,00)	0
6.2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	-13.298.689.615,00	(13.298.689.615,00)	0
6.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-13.298.689.615,00	(13.298.689.615,00)	0
6.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-13.298.689.615,00	(13.298.689.615,00)	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	-202.738.179.809,00	(202.738.179.809,00)	0
6.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	-42.034.750.165,00	(42.034.750.165,00)	0
6.3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	-42.034.750.165,00	(42.034.750.165,00)	0
6.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-42.034.750.165,00	(42.034.750.165,00)	0
6.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-42.034.750.165,00	(42.034.750.165,00)	0
6.3.26	PARIWISATA	0,00	-27.791.572.124,00	(27.791.572.124,00)	0
6.3.26.3-26.2-22.2-19.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (old)	0,00	-27.791.572.124,00	(27.791.572.124,00)	0
6.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-27.791.572.124,00	(27.791.572.124,00)	0
6.3.26.3-26.2-22.2-19.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-27.791.572.124,00	(27.791.572.124,00)	0
6.3.27	PERTANIAN	0,00	-113.143.526.876,00	(113.143.526.876,00)	0
6.3.27.3-27.2-09.0-00.01	Dinas Pertanian	0,00	-113.143.526.876,00	(113.143.526.876,00)	0
6.3.27.3-27.2-09.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-113.143.526.876,00	(113.143.526.876,00)	0
6.3.27.3-27.2-09.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-113.143.526.876,00	(113.143.526.876,00)	0
6.3.32	TRANSMIGRASI	0,00	-19.768.330.644,00	(19.768.330.644,00)	0
6.3.32.3-32.2-07.0-00.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	-19.768.330.644,00	(19.768.330.644,00)	0
6.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-19.768.330.644,00	(19.768.330.644,00)	0
6.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-19.768.330.644,00	(19.768.330.644,00)	0
6.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	-259.180.376.777,00	(259.180.376.777,00)	0
6.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	-130.820.594.068,00	(130.820.594.068,00)	0
6.4.01.4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	0,00	-130.820.594.068,00	(130.820.594.068,00)	0
6.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-130.820.594.068,00	(130.820.594.068,00)	0
6.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-130.820.594.068,00	(130.820.594.068,00)	0
6.4.02	SEKRETARIAT DPRD	0,00	-128.359.782.709,00	(128.359.782.709,00)	0
6.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	0,00	-128.359.782.709,00	(128.359.782.709,00)	0
6.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-128.359.782.709,00	(128.359.782.709,00)	0
6.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-128.359.782.709,00	(128.359.782.709,00)	0
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	29.024.008.793,00	2.453.248.477.944,02	2.424.224.469.151,02	8.452,48
6.5.01	PERENCANAAN	0,00	-25.011.750.172,00	(25.011.750.172,00)	0
6.5.01.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA)	0,00	-25.011.750.172,00	(25.011.750.172,00)	0
6.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-25.011.750.172,00	(25.011.750.172,00)	0
6.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-25.011.750.172,00	(25.011.750.172,00)	0
6.5.02	KEUANGAN	29.024.008.793,00	2.501.269.252.364,02	2.472.245.243.571,02	8.617,93
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	29.024.008.793,00	2.501.269.252.364,02	2.472.245.243.571,02	8.617,93
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.024.008.793,00	2.501.269.252.364,02	2.472.245.243.571,02	8.617,93
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.024.008.793,00	2.501.269.252.364,02	2.472.245.243.571,02	8.617,93





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	789.298.821.774,00	795.109.891.976,97	100,74	765.631.327.348,24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76.427.488.262,00	70.432.804.771,97	92,16	42.511.113.115,44
4.1.01	Pajak Daerah	10.913.012.729,00	7.817.681.452,25	71,64	6.707.510.440,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.444.944.030,00	2.599.421.824,00	106,32	4.844.139.560,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.478.040.721,00	8.478.040.721,00	100,00	5.712.369.797,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.591.490.782,00	51.537.660.774,72	94,41	25.247.093.318,44
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	712.871.333.512,00	724.257.090.105,00	101,60	711.562.111.995,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	687.484.333.512,00	701.030.290.389,00	101,97	687.265.248.753,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	614.767.308.512,00	618.628.103.989,00	100,63	604.673.639.020,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0	5.202.254.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	72.717.025.000,00	72.534.933.400,00	99,75	77.389.355.733,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	9.867.253.000,00	0	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.387.000.000,00	23.226.799.716,00	91,49	24.296.863.242,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.212.000.000,00	23.051.799.716,00	91,43	24.296.863.242,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	419.997.100,00	0	11.558.102.237,80
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	419.997.100,00	0	1.500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0	10.058.102.237,80
5	BELANJA DAERAH	819.976.733.463,00	780.750.667.855,60	95,22	786.872.439.275,00
5.1	BELANJA OPERASI	563.142.528.847,00	531.500.882.403,60	94,38	554.903.623.687,00
5.1.01	Belanja Pegawai	325.107.729.095,00	329.257.000.657,60	101,28	326.529.165.149,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.139.269.776,00	186.104.401.276,00	82,30	226.781.428.562,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.895.529.976,00	16.139.480.470,00	135,68	1.593.029.976,00
5.2	BELANJA MODAL	137.537.503.421,00	131.783.363.925,00	95,82	109.217.782.609,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	310.872.566,00	94.517.300,00	30,40	561.411.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.104.154.437,00	15.297.638.343,00	101,28	29.863.665.883,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.423.723.644,00	26.560.640.766,00	90,27	31.779.801.422,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.309.051.233,00	84.290.911.827,00	96,54	44.350.093.675,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.369.701.541,00	5.519.655.689,00	102,79	2.662.810.629,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	612.255.000,00	339.885.000,00	55,51	2.083.119.354,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	612.255.000,00	339.885.000,00	55,51	2.083.119.354,00
5.4	BELANJA TRANSFER	118.684.446.195,00	117.126.536.527,00	98,69	120.667.913.625,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.546.026.095,00	207.684.603,00	13,43	934.274.892,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.138.420.100,00	116.918.851.924,00	99,81	119.733.638.733,00
	SURPLUS / DEFISIT	(30.677.911.689,00)	14.359.224.121,37	0	(21.241.111.926,76)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.677.911.689,00	30.677.911.688,79	100,00	53.419.023.615,55
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.677.911.689,00	30.677.911.688,79	100,00	53.419.023.615,55
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0	1.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	30.677.911.689,00	30.677.911.688,79	100,00	51.919.023.615,55
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	45.037.135.810,16	0	30.677.911.688,79

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIYU, S.Pd. MM



 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2023							
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	789.298.821.774,00	795.109.891.976,97	5.811.070.202,97	100,74		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76.427.488.262,00	70.432.804.771,97	(5.994.683.490,03)	92,16		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	10.913.012.729,00	7.817.681.452,25	(3.095.331.276,75)	71,64		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	2.444.944.030,00	2.599.421.824,00	154.477.794,00	106,32		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.478.040.721,00	8.478.040.721,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.591.490.782,00	51.537.660.774,72	(3.053.830.007,28)	94,41		
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	712.871.333.512,00	724.257.090.105,00	11.385.756.593,00	101,60		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	687.484.333.512,00	701.030.290.389,00	13.545.956.877,00	101,97		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.387.000.000,00	23.226.799.716,00	(2.160.200.284,00)	91,49		
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	819.976.733.463,00	780.750.667.855,60	(39.226.065.607,40)	95,22		
00	Non Program	0,00	76.196.612.473,60	76.196.612.473,60	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	76.196.612.473,60	76.196.612.473,60	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	76.196.612.473,60	76.196.612.473,60	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	3.241.681.973,60	3.241.681.973,60	0		
00.0.00.00.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	54.803.136,60	54.803.136,60	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	-3.071.657,00	(3.071.657,00)	0		
00.0.00.00.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	3.189.950.494,00	3.189.950.494,00	0		
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00.00.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00.00.5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	72.534.933.400,00	72.534.933.400,00	0		
00.0.00.00.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	72.534.933.400,00	72.534.933.400,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.522.557.545,00	378.267.083.302,00	(22.255.474.243,00)	94,44		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.080.212.654,00	1.853.712.246,00	(226.500.408,00)	89,11		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	221.504.236,00	195.099.600,00	(26.404.636,00)	88,08		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	221.504.236,00	195.099.600,00	(26.404.636,00)	88,08		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.504.236,00	195.099.600,00	(26.404.636,00)	88,08		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.179.785.339,00	1.049.312.828,00	(130.472.511,00)	88,94		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.179.785.339,00	1.049.312.828,00	(130.472.511,00)	88,94		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.179.785.339,00	1.049.312.828,00	(130.472.511,00)	88,94		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	678.923.079,00	609.299.818,00	(69.623.261,00)	89,75		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	678.923.079,00	609.299.818,00	(69.623.261,00)	89,75		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.923.079,00	609.299.818,00	(69.623.261,00)	89,75		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	296.358.031.533,00	287.438.701.823,00	(8.919.329.710,00)	96,99		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	296.226.792.769,00	287.351.749.113,00	(8.875.043.656,00)	97,00		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	296.226.792.769,00	287.351.749.113,00	(8.875.043.656,00)	97,00		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	296.226.792.769,00	287.351.749.113,00	(8.875.043.656,00)	97,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.016.545,00	0,00	(25.016.545,00)	0		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.016.545,00	0,00	(25.016.545,00)	0		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.016.545,00	0,00	(25.016.545,00)	0		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	106.222.219,00	86.952.710,00	(19.269.509,00)	81,86		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	106.222.219,00	86.952.710,00	(19.269.509,00)	81,86		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.862.219,00	85.592.710,00	(19.269.509,00)	81,62		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.133.706,00	18.210.000,00	(3.923.706,00)	82,27		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.133.706,00	18.210.000,00	(3.923.706,00)	82,27		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	22.133.706,00	18.210.000,00	(3.923.706,00)	82,27		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.133.706,00	18.210.000,00	(3.923.706,00)	82,27		
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.878.000,00	4.778.600,00	(1.099.400,00)	81,30		
01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5.878.000,00	4.778.600,00	(1.099.400,00)	81,30		
01.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.878.000,00	4.778.600,00	(1.099.400,00)	81,30		
01.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.878.000,00	4.778.600,00	(1.099.400,00)	81,30		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	826.993.005,00	676.561.980,00	(150.431.025,00)	81,81		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	184.900.000,00	167.300.000,00	(17.600.000,00)	90,48		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	184.900.000,00	167.300.000,00	(17.600.000,00)	90,48		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.900.000,00	167.300.000,00	(17.600.000,00)	90,48		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.508.879,00	20.587.500,00	(18.921.379,00)	52,11		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.508.879,00	20.587.500,00	(18.921.379,00)	52,11		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.508.879,00	20.587.500,00	(18.921.379,00)	52,11		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	229.085.005,00	121.838.980,00	(107.246.025,00)	53,19		
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	208.085.005,00	106.858.980,00	(101.226.025,00)	51,35		
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.085.005,00	106.858.980,00	(101.226.025,00)	51,35		
01.2.05.04.5.2	BELANJA MODAL	21.000.000,00	14.980.000,00	(6.020.000,00)	71,33		
01.2.05.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	14.980.000,00	(6.020.000,00)	71,33		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.902.751,00	5.136.000,00	(2.766.751,00)	64,99		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.902.751,00	5.136.000,00	(2.766.751,00)	64,99		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.902.751,00	5.136.000,00	(2.766.751,00)	64,99		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	365.596.370,00	361.699.500,00	(3.896.870,00)	98,93		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	365.596.370,00	361.699.500,00	(3.896.870,00)	98,93		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.596.370,00	361.699.500,00	(3.896.870,00)	98,93		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.679.001.181,00	6.839.340.995,00	(839.660.186,00)	89,07		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	528.247.800,00	417.739.120,00	(110.508.680,00)	79,08		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	528.247.800,00	417.739.120,00	(110.508.680,00)	79,08		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.247.800,00	417.739.120,00	(110.508.680,00)	79,08		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.409.978.659,00	2.189.153.712,00	(220.824.947,00)	90,84		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.923.978.659,00	1.745.121.712,00	(178.856.947,00)	90,70		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.923.978.659,00	1.745.121.712,00	(178.856.947,00)	90,70		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	486.000.000,00	444.032.000,00	(41.968.000,00)	91,36		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.000.000,00	348.192.000,00	(31.808.000,00)	91,63		
01.2.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	12.950.000,00	(50.000,00)	99,62		
01.2.06.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.000.000,00	17.890.000,00	(110.000,00)	99,39		
01.2.06.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	86,67		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.450.000,00	11.750.000,00	(700.000,00)	94,38		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.450.000,00	11.750.000,00	(700.000,00)	94,38		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	11.750.000,00	(700.000,00)	94,38		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.408.354,00	33.267.000,00	(4.141.354,00)	88,93		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	37.408.354,00	33.267.000,00	(4.141.354,00)	88,93		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.408.354,00	33.267.000,00	(4.141.354,00)	88,93		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.798.500,00	6.798.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.798.500,00	6.798.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.798.500,00	6.798.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.684.117.868,00	4.180.632.663,00	(503.485.205,00)	89,25		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.684.117.868,00	4.180.632.663,00	(503.485.205,00)	89,25		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.684.117.868,00	4.180.632.663,00	(503.485.205,00)	89,25		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700.887.700,00	662.013.480,00	(38.874.220,00)	94,45		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.600.000,00	78.080.000,00	(1.520.000,00)	98,09		
01.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.600.000,00	54.000.000,00	(600.000,00)	98,90		
01.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	54.000.000,00	(600.000,00)	98,90		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.080.000,00	(920.000,00)	96,32		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.080.000,00	(920.000,00)	96,32		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	42.500.000,00	40.000.000,00	(2.500.000,00)	94,12		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	42.500.000,00	40.000.000,00	(2.500.000,00)	94,12		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.500.000,00	40.000.000,00	(2.500.000,00)	94,12		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.050.000,00	117.700.980,00	(18.349.020,00)	86,51		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	136.050.000,00	117.700.980,00	(18.349.020,00)	86,51		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.050.000,00	117.700.980,00	(18.349.020,00)	86,51		
01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.08.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.08.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	398.637.700,00	382.132.500,00	(16.505.200,00)	95,86		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	385.237.700,00	368.732.500,00	(16.505.200,00)	95,72		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	385.237.700,00	368.732.500,00	(16.505.200,00)	95,72		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.469.006.133,00	25.364.906.330,00	(5.104.099.803,00)	83,25		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.287.264,00	58.447.516,00	(15.839.748,00)	78,68		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.287.264,00	58.447.516,00	(15.839.748,00)	78,68		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.287.264,00	58.447.516,00	(15.839.748,00)	78,68		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.876.855.168,00	1.727.712.490,00	(149.142.678,00)	92,05		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.876.855.168,00	1.727.712.490,00	(149.142.678,00)	92,05		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.876.855.168,00	1.727.712.490,00	(149.142.678,00)	92,05		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.801.248.720,00	9.045.681.005,00	(755.567.715,00)	92,29		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.765.163.720,00	9.010.754.885,00	(754.408.835,00)	92,27		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	55.820.000,00	55.820.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.709.343.720,00	8.954.934.885,00	(754.408.835,00)	92,23		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	36.085.000,00	34.926.120,00	(1.158.880,00)	96,79		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.085.000,00	34.926.120,00	(1.158.880,00)	96,79		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.716.614.981,00	14.533.065.319,00	(4.183.549.662,00)	77,65		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.716.614.981,00	14.533.065.319,00	(4.183.549.662,00)	77,65		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	36.480.000,00	34.760.000,00	(1.720.000,00)	95,29		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.680.134.981,00	14.498.305.319,00	(4.181.829.662,00)	77,61		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.526.803.690,00	2.210.705.129,00	(316.098.561,00)	87,49		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	771.488.293,00	633.140.190,00	(138.348.103,00)	82,07		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	771.488.293,00	633.140.190,00	(138.348.103,00)	82,07		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.488.293,00	633.140.190,00	(138.348.103,00)	82,07		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	915.130.617,00	793.689.699,00	(121.440.918,00)	86,73		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	915.130.617,00	793.689.699,00	(121.440.918,00)	86,73		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.130.617,00	793.689.699,00	(121.440.918,00)	86,73		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0		
01.2.09.05.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0		
01.2.09.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.660.780,00	150.386.940,00	(34.273.840,00)	81,44		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	152.660.780,00	130.406.940,00	(22.253.840,00)	85,42		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.660.780,00	130.406.940,00	(22.253.840,00)	85,42		
01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	32.000.000,00	19.980.000,00	(12.020.000,00)	62,44		
01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	19.980.000,00	(12.020.000,00)	62,44		
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.920.000,00	2.900.000,00	(20.000,00)	99,32		
01.2.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	2.900.000,00	(20.000,00)	99,32		
01.2.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.900.000,00	(20.000,00)	99,32		
01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	22.000.000,00	18.203.000,00	(3.797.000,00)	82,74		
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	18.203.000,00	(3.797.000,00)	82,74		
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	18.203.000,00	(3.797.000,00)	82,74		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.274.000,00	404.985.300,00	(15.288.700,00)	96,36		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	107.274.000,00	93.337.000,00	(13.937.000,00)	87,01		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.274.000,00	93.337.000,00	(13.937.000,00)	87,01		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	313.000.000,00	311.648.300,00	(1.351.700,00)	99,57		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.000.000,00	311.648.300,00	(1.351.700,00)	99,57		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.730.000,00	207.400.000,00	(1.330.000,00)	99,36		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.780.000,00	10.000.000,00	(780.000,00)	92,76		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.780.000,00	10.000.000,00	(780.000,00)	92,76		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	197.950.000,00	197.400.000,00	(550.000,00)	99,72		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.950.000,00	197.400.000,00	(550.000,00)	99,72		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	42.574.413.709,00	37.339.430.764,00	(5.234.982.945,00)	87,70		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	42.574.413.709,00	37.339.430.764,00	(5.234.982.945,00)	87,70		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.184.822.456,00	36.309.386.529,00	(4.875.435.927,00)	88,16		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.127.835.813,00	19.645.310.106,00	10.517.474.293,00	215,22		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.056.986.643,00	16.664.076.423,00	(15.392.910.220,00)	51,98		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	1.389.591.253,00	1.030.044.235,00	(359.547.018,00)	74,13		
01.2.10.01.5.2.01	Belanja Modal Tanah	216.082.566,00	0,00	(216.082.566,00)	0		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.153.508.687,00	970.094.235,00	(183.414.452,00)	84,10		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	59.950.000,00	39.950.000,00	299,75		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.212.658.467,00	2.730.740.566,00	(481.917.901,00)	85,00		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	330.200.054,00	282.919.992,00	(47.280.062,00)	85,68		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	330.200.054,00	282.919.992,00	(47.280.062,00)	85,68		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	330.200.054,00	282.919.992,00	(47.280.062,00)	85,68		
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.882.458.413,00	2.447.820.574,00	(434.637.839,00)	84,92		
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.877.958.413,00	2.444.320.574,00	(433.637.839,00)	84,93		
01.2.11.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.877.958.413,00	2.444.320.574,00	(433.637.839,00)	84,93		
01.2.11.04.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	77,78		
01.2.11.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	77,78		
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	48.036.186,00	48.035.500,00	(686,00)	100,00		
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	48.036.186,00	48.035.500,00	(686,00)	100,00		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.836.186,00	3.835.500,00	(686,00)	99,98		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.836.186,00	3.835.500,00	(686,00)	99,98		
01.2.12.01.5.2	BELANJA MODAL	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.12.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.13	Penataan Organisasi	808.098.170,00	471.185.553,00	(336.912.617,00)	58,31		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	161.849.800,00	127.999.400,00	(33.850.400,00)	79,09		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	144.264.800,00	110.414.400,00	(33.850.400,00)	76,54		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.264.800,00	110.414.400,00	(33.850.400,00)	76,54		
01.2.13.01.5.2	BELANJA MODAL	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	257.437.000,00	181.870.100,00	(75.566.900,00)	70,65		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	257.437.000,00	181.870.100,00	(75.566.900,00)	70,65		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.437.000,00	181.870.100,00	(75.566.900,00)	70,65		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	245.976.370,00	59.714.863,00	(186.261.507,00)	24,28		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	228.391.370,00	42.129.863,00	(186.261.507,00)	18,45		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.391.370,00	42.129.863,00	(186.261.507,00)	18,45		
01.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	18.190.000,00	4.290.000,00	(13.900.000,00)	23,58		
01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.190.000,00	4.290.000,00	(13.900.000,00)	23,58		
01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.190.000,00	4.290.000,00	(13.900.000,00)	23,58		
01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	124.645.000,00	97.311.190,00	(27.333.810,00)	78,07		
01.2.13.05.5.1	BELANJA OPERASI	107.060.000,00	79.726.190,00	(27.333.810,00)	74,47		
01.2.13.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.060.000,00	79.726.190,00	(27.333.810,00)	74,47		
01.2.13.05.5.2	BELANJA MODAL	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	474.277.466,00	467.563.273,00	(6.714.193,00)	98,58		
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	163.149.491,00	161.997.683,00	(1.151.808,00)	99,29		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	163.149.491,00	161.997.683,00	(1.151.808,00)	99,29		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.149.491,00	161.997.683,00	(1.151.808,00)	99,29		
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	152.829.775,00	147.596.990,00	(5.232.785,00)	96,58		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	152.829.775,00	147.596.990,00	(5.232.785,00)	96,58		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.829.775,00	147.596.990,00	(5.232.785,00)	96,58		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	158.298.200,00	157.968.600,00	(329.600,00)	99,79		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	138.298.200,00	137.968.600,00	(329.600,00)	99,76		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.298.200,00	137.968.600,00	(329.600,00)	99,76		
01.2.14.03.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.14.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.483.687.945,00	10.962.465.439,00	(521.222.506,00)	95,46		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.483.687.945,00	10.962.465.439,00	(521.222.506,00)	95,46		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.483.687.945,00	10.962.465.439,00	(521.222.506,00)	95,46		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.483.687.945,00	10.962.465.439,00	(521.222.506,00)	95,46		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.252.438.000,00	1.178.731.624,00	(73.706.376,00)	94,11		
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	129.238.000,00	56.242.624,00	(72.995.376,00)	43,52		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	129.238.000,00	56.242.624,00	(72.995.376,00)	43,52		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.238.000,00	56.242.624,00	(72.995.376,00)	43,52		
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.123.200.000,00	1.122.489.000,00	(711.000,00)	99,94		
01.2.16.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.123.200.000,00	1.122.489.000,00	(711.000,00)	99,94		
01.2.16.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.200.000,00	1.122.489.000,00	(711.000,00)	99,94		
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.993.348.587,00	64.121.462.682,00	(7.871.885.905,00)	89,07		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.257.641.614,00	35.257.019.294,00	(2.000.622.320,00)	94,63		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	400.001.200,00	399.616.000,00	(385.200,00)	99,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	400.001.200,00	399.616.000,00	(385.200,00)	99,90		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.001.200,00	399.616.000,00	(385.200,00)	99,90		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.652.064.665,00	6.095.764.825,00	(556.299.840,00)	91,64		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	379.772.665,00	378.092.000,00	(1.680.665,00)	99,56		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.772.665,00	378.092.000,00	(1.680.665,00)	99,56		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	6.272.292.000,00	5.717.672.825,00	(554.619.175,00)	91,16		
02.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.500.000,00	52.000.000,00	(500.000,00)	99,05		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.219.792.000,00	5.665.672.825,00	(554.119.175,00)	91,09		
02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	740.000.000,00	739.436.000,00	(564.000,00)	99,92		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	740.000.000,00	739.436.000,00	(564.000,00)	99,92		
02.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	740.000.000,00	739.436.000,00	(564.000,00)	99,92		
02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	1.000.000.000,00	999.326.200,00	(673.800,00)	99,93		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	999.326.200,00	(673.800,00)	99,93		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	999.326.200,00	(673.800,00)	99,93		
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.242.333.600,00	1.239.579.600,00	(2.754.000,00)	99,78		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	628.033.600,00	626.763.800,00	(1.269.800,00)	99,80		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.033.600,00	626.763.800,00	(1.269.800,00)	99,80		
02.2.01.21.5.2	BELANJA MODAL	614.300.000,00	612.815.800,00	(1.484.200,00)	99,76		
02.2.01.21.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	614.300.000,00	612.815.800,00	(1.484.200,00)	99,76		
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	775.000.000,00	873.659.332,00	98.659.332,00	112,73		
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	775.000.000,00	873.659.332,00	98.659.332,00	112,73		
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	475.000.000,00	574.493.332,00	99.493.332,00	120,95		
02.2.01.22.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	299.166.000,00	(834.000,00)	99,72		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	124.645.224,00	124.411.640,00	(233.584,00)	99,81		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	124.645.224,00	124.411.640,00	(233.584,00)	99,81		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.645.224,00	124.411.640,00	(233.584,00)	99,81		
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.684.196.494,00	7.871.635.712,00	(1.812.560.782,00)	81,28		
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	9.684.196.494,00	7.871.635.712,00	(1.812.560.782,00)	81,28		
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.684.196.494,00	7.871.635.712,00	(1.812.560.782,00)	81,28		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	148.998.000,00	148.338.589,00	(659.411,00)	99,56		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	148.998.000,00	148.338.589,00	(659.411,00)	99,56		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.998.000,00	148.338.589,00	(659.411,00)	99,56		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.859.916.799,00	14.162.296.561,00	302.379.762,00	102,18		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	9.263.353.961,00	9.737.929.841,00	474.575.880,00	105,12		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.263.353.961,00	9.737.929.841,00	474.575.880,00	105,12		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	4.596.562.838,00	4.424.366.720,00	(172.196.118,00)	96,25		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.527.819.297,00	2.414.215.231,00	(113.604.066,00)	95,51		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.068.743.541,00	2.010.151.489,00	(58.592.052,00)	97,17		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	782.500.000,00	781.782.550,00	(717.450,00)	99,91		
02.2.01.32.5.2	BELANJA MODAL	782.500.000,00	781.782.550,00	(717.450,00)	99,91		
02.2.01.32.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	782.500.000,00	781.782.550,00	(717.450,00)	99,91		
02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.296.377.989,00	1.277.547.285,00	(18.830.704,00)	98,55		
02.2.01.38.5.1	BELANJA OPERASI	1.263.877.989,00	1.248.547.285,00	(15.330.704,00)	98,79		
02.2.01.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.263.877.989,00	1.248.547.285,00	(15.330.704,00)	98,79		
02.2.01.38.5.2	BELANJA MODAL	32.500.000,00	29.000.000,00	(3.500.000,00)	89,23		
02.2.01.38.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.500.000,00	29.000.000,00	(3.500.000,00)	89,23		
02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	551.607.643,00	543.625.000,00	(7.982.643,00)	98,55		
02.2.01.40.5.1	BELANJA OPERASI	386.607.643,00	383.625.000,00	(2.982.643,00)	99,23		
02.2.01.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.607.643,00	383.625.000,00	(2.982.643,00)	99,23		
02.2.01.40.5.2	BELANJA MODAL	165.000.000,00	160.000.000,00	(5.000.000,00)	96,97		
02.2.01.40.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.000.000,00	160.000.000,00	(5.000.000,00)	96,97		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.999.164.781,00	21.312.323.468,00	(2.686.841.313,00)	88,80		
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	380.000.001,00	303.984.000,00	(76.016.001,00)	80,00		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	380.000.001,00	303.984.000,00	(76.016.001,00)	80,00		
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.001,00	303.984.000,00	(76.016.001,00)	80,00		
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.156.568.000,00	925.152.500,00	(231.415.500,00)	79,99		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	1.156.568.000,00	925.152.500,00	(231.415.500,00)	79,99		
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.156.568.000,00	925.152.500,00	(231.415.500,00)	79,99		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	6.231.336.899,00	4.960.888.700,00	(1.270.448.199,00)	79,61		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	6.231.336.899,00	4.960.888.700,00	(1.270.448.199,00)	79,61		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.231.336.899,00	4.960.888.700,00	(1.270.448.199,00)	79,61		
02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.844.137.100,00	1.587.003.750,00	(257.133.350,00)	86,06		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	135.602.100,00	104.870.500,00	(30.731.600,00)	77,34		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.602.100,00	104.870.500,00	(30.731.600,00)	77,34		
02.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	1.708.535.000,00	1.482.133.250,00	(226.401.750,00)	86,75		
02.2.02.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.708.535.000,00	1.482.133.250,00	(226.401.750,00)	86,75		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.178.250.000,00	1.152.745.350,00	(25.504.650,00)	97,84		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	50.705.000,00	(24.295.000,00)	67,61		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	50.705.000,00	(24.295.000,00)	67,61		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	1.103.250.000,00	1.102.040.350,00	(1.209.650,00)	99,89		
02.2.02.12.5.2.01	Belanja Modal Tanah	82.250.000,00	82.239.300,00	(10.700,00)	99,99		
02.2.02.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	946.000.000,00	944.801.050,00	(1.198.950,00)	99,87		
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	550.000.000,00	546.360.800,00	(3.639.200,00)	99,34		
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	550.000.000,00	546.360.800,00	(3.639.200,00)	99,34		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	546.360.800,00	(3.639.200,00)	99,34		
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	694.818.075,00	692.052.600,00	(2.765.475,00)	99,60		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	371.822.075,00	370.491.400,00	(1.330.675,00)	99,64		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.822.075,00	370.491.400,00	(1.330.675,00)	99,64		
02.2.02.32.5.2	BELANJA MODAL	322.996.000,00	321.561.200,00	(1.434.800,00)	99,56		
02.2.02.32.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	322.996.000,00	321.561.200,00	(1.434.800,00)	99,56		
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	475.000.000,00	574.040.000,00	99.040.000,00	120,85		
02.2.02.35.5.2	BELANJA MODAL	475.000.000,00	574.040.000,00	99.040.000,00	120,85		
02.2.02.35.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	199.648.000,00	99.648.000,00	199,65		
02.2.02.35.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	375.000.000,00	374.392.000,00	(608.000,00)	99,84		
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	168.351.753,00	167.510.829,00	(840.924,00)	99,50		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	168.351.753,00	167.510.829,00	(840.924,00)	99,50		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.351.753,00	167.510.829,00	(840.924,00)	99,50		
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.194.765.151,00	1.635.425.000,00	(559.340.151,00)	74,51		
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	2.194.765.151,00	1.635.425.000,00	(559.340.151,00)	74,51		
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.194.765.151,00	1.635.425.000,00	(559.340.151,00)	74,51		
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300.144.730,00	296.805.200,00	(3.339.530,00)	98,89		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	240.144.730,00	236.805.200,00	(3.339.530,00)	98,61		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.144.730,00	236.805.200,00	(3.339.530,00)	98,61		
02.2.02.41.5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.41.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.637.680.835,00	7.083.032.602,00	(554.648.233,00)	92,74		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	5.810.466.865,00	5.304.907.757,00	(505.559.108,00)	91,30		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.810.466.865,00	5.304.907.757,00	(505.559.108,00)	91,30		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	1.827.213.970,00	1.778.124.845,00	(49.089.125,00)	97,31		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	987.364.170,00	954.010.645,00	(33.353.525,00)	96,62		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	839.849.800,00	824.114.200,00	(15.735.600,00)	98,13		
02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	941.365.419,00	1.149.248.637,00	207.883.218,00	122,08		
02.2.02.51.5.1	BELANJA OPERASI	941.365.419,00	1.149.248.637,00	207.883.218,00	122,08		
02.2.02.51.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	941.365.419,00	1.149.248.637,00	207.883.218,00	122,08		
02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	246.746.818,00	238.073.500,00	(8.673.318,00)	96,48		
02.2.02.53.5.1	BELANJA OPERASI	246.746.818,00	238.073.500,00	(8.673.318,00)	96,48		
02.2.02.53.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.746.818,00	238.073.500,00	(8.673.318,00)	96,48		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.800.796.852,00	6.918.019.512,00	(2.882.777.340,00)	70,59		
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	429.135.000,00	428.357.400,00	(777.600,00)	99,82		
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	429.135.000,00	428.357.400,00	(777.600,00)	99,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	429.135.000,00	428.357.400,00	(777.600,00)	99,82		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	337.692.200,00	330.751.620,00	(6.940.580,00)	97,94		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	215.277.200,00	215.094.720,00	(182.480,00)	99,92		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.277.200,00	215.094.720,00	(182.480,00)	99,92		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	122.415.000,00	115.656.900,00	(6.758.100,00)	94,48		
02.2.03.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.540.000,00	12.278.000,00	(262.000,00)	97,91		
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.875.000,00	103.378.900,00	(6.496.100,00)	94,09		
02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	564.950.000,00	563.877.450,00	(1.072.550,00)	99,81		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	564.950.000,00	563.877.450,00	(1.072.550,00)	99,81		
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	564.950.000,00	563.877.450,00	(1.072.550,00)	99,81		
02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	600.000.000,00	598.860.000,00	(1.140.000,00)	99,81		
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	600.000.000,00	598.860.000,00	(1.140.000,00)	99,81		
02.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	598.860.000,00	(1.140.000,00)	99,81		
02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.386.600.000,00	1.383.180.000,00	(3.420.000,00)	99,75		
02.2.03.12.5.2	BELANJA MODAL	1.386.600.000,00	1.383.180.000,00	(3.420.000,00)	99,75		
02.2.03.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.386.600.000,00	1.383.180.000,00	(3.420.000,00)	99,75		
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	433.699.990,00	430.644.411,00	(3.055.579,00)	99,30		
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	344.887.790,00	341.986.411,00	(2.901.379,00)	99,16		
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.887.790,00	341.986.411,00	(2.901.379,00)	99,16		
02.2.03.13.5.2	BELANJA MODAL	88.812.200,00	88.658.000,00	(154.200,00)	99,83		
02.2.03.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.13.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.812.200,00	80.658.000,00	(154.200,00)	99,81		
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	37.350.000,00	34.350.000,00	(3.000.000,00)	91,97		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	37.350.000,00	34.350.000,00	(3.000.000,00)	91,97		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.350.000,00	34.350.000,00	(3.000.000,00)	91,97		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	44.592.000,00	32.957.980,00	(11.634.020,00)	73,91		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	44.592.000,00	32.957.980,00	(11.634.020,00)	73,91		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.592.000,00	32.957.980,00	(11.634.020,00)	73,91		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.768.470.000,00	2.046.316.593,00	(2.722.153.407,00)	42,91		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	4.768.470.000,00	1.422.880.093,00	(3.345.589.907,00)	29,84		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.768.470.000,00	1.422.880.093,00	(3.345.589.907,00)	29,84		
02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	0,00	623.436.500,00	623.436.500,00	0		
02.2.03.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	456.947.500,00	456.947.500,00	0		
02.2.03.18.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	166.489.000,00	166.489.000,00	0		
02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	654.994.443,00	543.583.058,00	(111.411.385,00)	82,99		
02.2.03.25.5.1	BELANJA OPERASI	520.994.443,00	414.601.058,00	(106.393.385,00)	79,58		
02.2.03.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.994.443,00	414.601.058,00	(106.393.385,00)	79,58		
02.2.03.25.5.2	BELANJA MODAL	134.000.000,00	128.982.000,00	(5.018.000,00)	96,26		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.000.000,00	128.982.000,00	(5.018.000,00)	96,26		
02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	543.313.219,00	525.141.000,00	(18.172.219,00)	96,66		
02.2.03.27.5.1	BELANJA OPERASI	543.313.219,00	525.141.000,00	(18.172.219,00)	96,66		
02.2.03.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.313.219,00	525.141.000,00	(18.172.219,00)	96,66		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	935.745.340,00	634.100.408,00	(301.644.932,00)	67,76		
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	89.218.350,00	88.553.160,00	(665.190,00)	99,25		
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	89.218.350,00	88.553.160,00	(665.190,00)	99,25		
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.218.350,00	88.553.160,00	(665.190,00)	99,25		
02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	380.256.990,00	378.467.248,00	(1.789.742,00)	99,53		
02.2.04.13.5.1	BELANJA OPERASI	380.256.990,00	378.467.248,00	(1.789.742,00)	99,53		
02.2.04.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.256.990,00	378.467.248,00	(1.789.742,00)	99,53		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	466.270.000,00	167.080.000,00	(299.190.000,00)	35,83		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	466.270.000,00	67.942.000,00	(398.328.000,00)	14,57		
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.270.000,00	67.942.000,00	(398.328.000,00)	14,57		
02.2.04.17.5.2	BELANJA MODAL	0,00	99.138.000,00	99.138.000,00	0		
02.2.04.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	25.980.000,00	25.980.000,00	0		
02.2.04.17.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	73.158.000,00	73.158.000,00	0		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40.944.917.200,00	42.991.272.514,00	2.046.355.314,00	105,00		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.765.360.437,00	13.665.312.193,00	(1.100.048.244,00)	92,55		
02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	5.734.059.735,00	5.732.096.250,00	(1.963.485,00)	99,97		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	143.153.485,00	141.835.000,00	(1.318.485,00)	99,08		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.153.485,00	141.835.000,00	(1.318.485,00)	99,08		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	5.590.906.250,00	5.590.261.250,00	(645.000,00)	99,99		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.825.000,00	388.480.000,00	(345.000,00)	99,91		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.527.081.250,00	4.527.081.250,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	675.000.000,00	674.700.000,00	(300.000,00)	99,96		
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	99.955.500,00	(44.500,00)	99,96		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.955.500,00	(44.500,00)	99,96		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.955.500,00	(44.500,00)	99,96		
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	200.000.000,00	199.753.000,00	(247.000,00)	99,88		
02.2.01.05.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.753.000,00	(247.000,00)	99,88		
02.2.01.05.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.753.000,00	(247.000,00)	99,88		
02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	745.890.584,00	727.491.169,00	(18.399.415,00)	97,53		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	53.728.397,00	35.800.000,00	(17.928.397,00)	66,63		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.728.397,00	35.800.000,00	(17.928.397,00)	66,63		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	692.162.187,00	691.691.169,00	(471.018,00)	99,93		
02.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	501.000.000,00	500.666.562,00	(333.438,00)	99,93		
02.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.162.187,00	146.024.607,00	(137.580,00)	99,91		
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.577.642.729,00	2.277.700.000,00	(299.942.729,00)	88,36		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	2.577.642.729,00	2.277.700.000,00	(299.942.729,00)	88,36		
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.377.642.729,00	2.078.000.000,00	(299.642.729,00)	87,40		
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	777.589.154,00	647.682.000,00	(129.907.154,00)	83,29		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	777.589.154,00	647.682.000,00	(129.907.154,00)	83,29		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	777.589.154,00	647.682.000,00	(129.907.154,00)	83,29		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.600.822.020,00	1.442.179.962,00	(158.642.058,00)	90,09		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.822.020,00	1.442.179.962,00	(158.642.058,00)	90,09		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.822.020,00	1.442.179.962,00	(158.642.058,00)	90,09		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.820.658.488,00	2.334.044.290,00	(486.614.198,00)	82,75		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.820.658.488,00	2.334.044.290,00	(486.614.198,00)	82,75		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.820.658.488,00	2.334.044.290,00	(486.614.198,00)	82,75		
02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	63.583.727,00	59.893.000,00	(3.690.727,00)	94,20		
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	63.583.727,00	59.893.000,00	(3.690.727,00)	94,20		
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.583.727,00	59.893.000,00	(3.690.727,00)	94,20		
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.355.000,00	92.142.522,00	(212.478,00)	99,77		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	92.355.000,00	92.142.522,00	(212.478,00)	99,77		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.355.000,00	92.142.522,00	(212.478,00)	99,77		
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	52.759.000,00	52.374.500,00	(384.500,00)	99,27		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	52.759.000,00	52.374.500,00	(384.500,00)	99,27		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.759.000,00	52.374.500,00	(384.500,00)	99,27		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.221.190.045,00	27.384.681.985,00	3.163.491.940,00	113,06		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.048.666.828,00	1.023.854.000,00	(24.812.828,00)	97,63		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.048.666.828,00	1.023.854.000,00	(24.812.828,00)	97,63		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.666.828,00	1.023.854.000,00	(24.812.828,00)	97,63		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	174.830.654,00	111.257.000,00	(63.573.654,00)	63,64		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	174.830.654,00	111.257.000,00	(63.573.654,00)	63,64		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.830.654,00	111.257.000,00	(63.573.654,00)	63,64		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34.490.000,00	25.200.000,00	(9.290.000,00)	73,06		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.490.000,00	25.200.000,00	(9.290.000,00)	73,06		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.490.000,00	25.200.000,00	(9.290.000,00)	73,06		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	539.670.300,00	484.450.000,00	(55.220.300,00)	89,77		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	539.670.300,00	484.450.000,00	(55.220.300,00)	89,77		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.670.300,00	484.450.000,00	(55.220.300,00)	89,77		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	237.524.000,00	234.514.000,00	(3.010.000,00)	98,73		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	237.524.000,00	234.514.000,00	(3.010.000,00)	98,73		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.524.000,00	234.514.000,00	(3.010.000,00)	98,73		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	180.466.000,00	176.086.000,00	(4.380.000,00)	97,57		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	180.466.000,00	176.086.000,00	(4.380.000,00)	97,57		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.466.000,00	176.086.000,00	(4.380.000,00)	97,57		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	164.170.000,00	149.423.000,00	(14.747.000,00)	91,02		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	164.170.000,00	149.423.000,00	(14.747.000,00)	91,02		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.170.000,00	149.423.000,00	(14.747.000,00)	91,02		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	71.760.000,00	71.760.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	71.760.000,00	71.760.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.760.000,00	71.760.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	185.299.200,00	179.492.000,00	(5.807.200,00)	96,87		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	185.299.200,00	179.492.000,00	(5.807.200,00)	96,87		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.299.200,00	179.492.000,00	(5.807.200,00)	96,87		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	162.310.000,00	156.880.000,00	(5.430.000,00)	96,65		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	162.310.000,00	156.880.000,00	(5.430.000,00)	96,65		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.310.000,00	156.880.000,00	(5.430.000,00)	96,65		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	473.600.000,00	195.190.000,00	(278.410.000,00)	41,21		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	473.600.000,00	195.190.000,00	(278.410.000,00)	41,21		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.600.000,00	195.190.000,00	(278.410.000,00)	41,21		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	132.790.000,00	112.240.000,00	(20.550.000,00)	84,52		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	132.790.000,00	112.240.000,00	(20.550.000,00)	84,52		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.790.000,00	112.240.000,00	(20.550.000,00)	84,52		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	138.400.000,00	104.450.000,00	(33.950.000,00)	75,47		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	138.400.000,00	104.450.000,00	(33.950.000,00)	75,47		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.400.000,00	104.450.000,00	(33.950.000,00)	75,47		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.059.265.000,00	1.372.264.202,00	(687.000.798,00)	66,64		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	2.059.265.000,00	1.372.264.202,00	(687.000.798,00)	66,64		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.059.265.000,00	1.372.264.202,00	(687.000.798,00)	66,64		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	164.552.600,00	153.285.000,00	(11.267.600,00)	93,15		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	164.552.600,00	153.285.000,00	(11.267.600,00)	93,15		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.552.600,00	153.285.000,00	(11.267.600,00)	93,15		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	574.069.470,00	509.093.841,00	(64.975.629,00)	88,68		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	574.069.470,00	509.093.841,00	(64.975.629,00)	88,68		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.069.470,00	509.093.841,00	(64.975.629,00)	88,68		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	605.271.170,00	526.941.060,00	(78.330.110,00)	87,06		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	605.271.170,00	526.941.060,00	(78.330.110,00)	87,06		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.271.170,00	526.941.060,00	(78.330.110,00)	87,06		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.595.000,00	1.320.000,00	(275.000,00)	82,76		
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	1.595.000,00	1.320.000,00	(275.000,00)	82,76		
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	1.320.000,00	(275.000,00)	82,76		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	431.981.000,00	344.995.000,00	(86.986.000,00)	79,86		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	431.981.000,00	344.995.000,00	(86.986.000,00)	79,86		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.981.000,00	344.995.000,00	(86.986.000,00)	79,86		
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0		
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0		
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.951.112.662,00	1.848.008.870,00	(103.103.792,00)	94,72		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.951.112.662,00	1.848.008.870,00	(103.103.792,00)	94,72		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.951.112.662,00	1.848.008.870,00	(103.103.792,00)	94,72		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.632.512.500,00	15.122.153.429,00	5.489.640.929,00	156,99		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	9.632.512.500,00	15.004.579.429,00	5.372.066.929,00	155,77		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	5.799.872.500,00	8.773.869.466,00	2.973.996.966,00	151,28		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.682.640.000,00	6.080.709.963,00	2.398.069.963,00	165,12		
02.2.02.26.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	0,00	117.574.000,00	117.574.000,00	0		
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	117.574.000,00	117.574.000,00	0		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	70.280.000,00	53.870.000,00	(16.410.000,00)	76,65		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	70.280.000,00	53.870.000,00	(16.410.000,00)	76,65		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.280.000,00	53.870.000,00	(16.410.000,00)	76,65		
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	502.687.697,00	470.260.527,00	(32.427.170,00)	93,55		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	502.687.697,00	470.260.527,00	(32.427.170,00)	93,55		
02.2.02.32.5.1.01	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.887.697,00	463.460.527,00	(32.427.170,00)	93,46		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.232.896.857,00	3.525.630.611,00	(707.266.246,00)	83,29		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	3.975.296.857,00	3.268.945.211,00	(706.351.646,00)	82,23		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	1.139.495.083,00	1.269.582.591,00	130.087.508,00	111,42		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.835.801.774,00	1.999.362.620,00	(836.439.154,00)	70,50		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	257.600.000,00	256.685.400,00	(914.600,00)	99,64		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.600.000,00	256.685.400,00	(914.600,00)	99,64		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	224.125.107,00	221.815.595,00	(2.309.512,00)	98,97		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	197.834.107,00	195.615.595,00	(2.218.512,00)	98,88		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.834.107,00	195.615.595,00	(2.218.512,00)	98,88		
02.2.02.34.5.2	BELANJA MODAL	26.291.000,00	26.200.000,00	(91.000,00)	99,65		
02.2.02.34.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.291.000,00	26.200.000,00	(91.000,00)	99,65		
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	36.844.000,00	36.844.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	36.844.000,00	36.844.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.844.000,00	36.844.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	19.860.000,00	17.360.000,00	(2.500.000,00)	87,41		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	19.860.000,00	17.360.000,00	(2.500.000,00)	87,41		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.860.000,00	17.360.000,00	(2.500.000,00)	87,41		
02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	5.120.000,00	3.120.000,00	(2.000.000,00)	60,94		
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	5.120.000,00	3.120.000,00	(2.000.000,00)	60,94		
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	3.120.000,00	(2.000.000,00)	60,94		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	137.000.000,00	136.883.850,00	(116.150,00)	99,92		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	137.000.000,00	136.883.850,00	(116.150,00)	99,92		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.000.000,00	136.883.850,00	(116.150,00)	99,92		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.349.881.713,00	1.336.594.336,00	(13.287.377,00)	99,02		
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.349.881.713,00	1.336.594.336,00	(13.287.377,00)	99,02		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.293.881.713,00	1.281.094.336,00	(12.787.377,00)	99,01		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.293.881.713,00	1.281.094.336,00	(12.787.377,00)	99,01		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	56.000.000,00	55.500.000,00	(500.000,00)	99,11		
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	608.485.005,00	604.684.000,00	(3.801.005,00)	99,38		
02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.470.000,00	188.410.000,00	(60.000,00)	99,97		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	188.470.000,00	188.410.000,00	(60.000,00)	99,97		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.470.000,00	188.410.000,00	(60.000,00)	99,97		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	420.015.005,00	416.274.000,00	(3.741.005,00)	99,11		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	420.015.005,00	416.274.000,00	(3.741.005,00)	99,11		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.015.005,00	416.274.000,00	(3.741.005,00)	99,11		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.324.205.799,00	7.247.599.084,00	(76.606.715,00)	98,95		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.873.415.661,00	4.824.649.239,00	(48.766.422,00)	99,00		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	394.168.900,00	386.756.303,00	(7.412.597,00)	98,12		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	394.168.900,00	386.756.303,00	(7.412.597,00)	98,12		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.168.900,00	386.756.303,00	(7.412.597,00)	98,12		
02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	1.234.389.000,00	1.224.242.413,00	(10.146.587,00)	99,18		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	1.234.389.000,00	1.224.242.413,00	(10.146.587,00)	99,18		
02.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.234.389.000,00	1.224.242.413,00	(10.146.587,00)	99,18		
02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	911.058.900,00	907.107.887,00	(3.951.013,00)	99,57		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	911.058.900,00	907.107.887,00	(3.951.013,00)	99,57		
02.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	911.058.900,00	907.107.887,00	(3.951.013,00)	99,57		
02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.183.798.861,00	2.158.385.436,00	(25.413.425,00)	98,84		
02.2.01.46.5.1	BELANJA OPERASI	2.183.798.861,00	2.158.385.436,00	(25.413.425,00)	98,84		
02.2.01.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.183.798.861,00	2.158.385.436,00	(25.413.425,00)	98,84		
02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	150.000.000,00	148.157.200,00	(1.842.800,00)	98,77		
02.2.01.65.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	148.157.200,00	(1.842.800,00)	98,77		
02.2.01.65.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	148.157.200,00	(1.842.800,00)	98,77		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.450.790.138,00	2.422.949.845,00	(27.840.293,00)	98,86		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	446.218.198,00	418.940.005,00	(27.278.193,00)	93,89		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	446.218.198,00	418.940.005,00	(27.278.193,00)	93,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.218.198,00	418.940.005,00	(27.278.193,00)	93,89		
02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.604.571.940,00	1.604.359.840,00	(212.100,00)	99,99		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.604.571.940,00	1.604.359.840,00	(212.100,00)	99,99		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.552.100,00	14.540.000,00	(12.100,00)	99,92		
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.590.019.840,00	1.589.819.840,00	(200.000,00)	99,99		
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	190.679.000,00	121.128.080,00	(69.550.920,00)	63,52		
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	82.039.000,00	80.398.080,00	(1.640.920,00)	98,00		
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	82.039.000,00	80.398.080,00	(1.640.920,00)	98,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.039.000,00	80.398.080,00	(1.640.920,00)	98,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.039.000,00	80.398.080,00	(1.640.920,00)	98,00		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	108.640.000,00	40.730.000,00	(67.910.000,00)	37,49		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	108.640.000,00	40.730.000,00	(67.910.000,00)	37,49		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	108.640.000,00	40.730.000,00	(67.910.000,00)	37,49		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.640.000,00	40.730.000,00	(67.910.000,00)	37,49		
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	495.343.904,00	89.607.501,00	(405.736.403,00)	18,09		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	467.599.904,00	62.390.000,00	(405.209.904,00)	13,34		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	404.999.904,00	0,00	(404.999.904,00)	0		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	404.999.904,00	0,00	(404.999.904,00)	0		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.999.904,00	0,00	(404.999.904,00)	0		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.600.000,00	12.470.000,00	(130.000,00)	98,97		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.470.000,00	(130.000,00)	98,97		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.470.000,00	(130.000,00)	98,97		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7.744.000,00	7.217.501,00	(526.499,00)	93,20		
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	7.744.000,00	7.217.501,00	(526.499,00)	93,20		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.744.000,00	7.217.501,00	(526.499,00)	93,20		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.744.000,00	7.217.501,00	(526.499,00)	93,20		
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	208.839.800,00	185.181.850,00	(23.657.950,00)	88,67		
02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	101.003.400,00	100.131.850,00	(871.550,00)	99,14		
02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	16.000.000,00	15.830.000,00	(170.000,00)	98,94		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.830.000,00	(170.000,00)	98,94		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.830.000,00	(170.000,00)	98,94		
02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	85.003.400,00	84.301.850,00	(701.550,00)	99,17		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.003.400,00	84.301.850,00	(701.550,00)	99,17		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.003.400,00	84.301.850,00	(701.550,00)	99,17		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	107.836.400,00	85.050.000,00	(22.786.400,00)	78,87		
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	107.836.400,00	85.050.000,00	(22.786.400,00)	78,87		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	107.836.400,00	85.050.000,00	(22.786.400,00)	78,87		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.836.400,00	85.050.000,00	(22.786.400,00)	78,87		
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	41.690.000,00	40.950.000,00	(740.000,00)	98,22		
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.540.000,00	20.800.000,00	(740.000,00)	96,56		
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	21.540.000,00	20.800.000,00	(740.000,00)	96,56		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.540.000,00	20.800.000,00	(740.000,00)	96,56		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	20.800.000,00	(740.000,00)	96,56		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	72.580.000,00	72.580.000,00	0,00	100,00		
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	72.580.000,00	72.580.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	70.348.000,00	70.348.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.348.000,00	70.348.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.348.000,00	70.348.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	378.136.675,00	377.854.000,00	(282.675,00)	99,93		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	378.136.675,00	377.854.000,00	(282.675,00)	99,93		
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	378.136.675,00	377.854.000,00	(282.675,00)	99,93		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	215.124.675,00	215.122.500,00	(2.175,00)	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.124.675,00	215.122.500,00	(2.175,00)	100,00		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	163.012.000,00	162.731.500,00	(280.500,00)	99,83		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.012.000,00	162.731.500,00	(280.500,00)	99,83		
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	813.414.024,00	631.165.200,00	(182.248.824,00)	77,59		
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	125.064.024,00	54.210.000,00	(70.854.024,00)	43,35		
02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	45.064.024,00	32.990.000,00	(12.074.024,00)	73,21		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	45.064.024,00	32.990.000,00	(12.074.024,00)	73,21		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.064.024,00	32.990.000,00	(12.074.024,00)	73,21		
02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	21.220.000,00	(58.780.000,00)	26,53		
02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	21.220.000,00	(58.780.000,00)	26,53		
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	21.220.000,00	(58.780.000,00)	26,53		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	688.350.000,00	576.955.200,00	(111.394.800,00)	83,82		
02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	342.000.000,00	235.100.000,00	(106.900.000,00)	68,74		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	342.000.000,00	235.100.000,00	(106.900.000,00)	68,74		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.000.000,00	235.100.000,00	(106.900.000,00)	68,74		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	133.150.000,00	128.655.200,00	(4.494.800,00)	96,62		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	133.150.000,00	128.655.200,00	(4.494.800,00)	96,62		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.150.000,00	128.655.200,00	(4.494.800,00)	96,62		
02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	233.969.650,00	156.100.709,00	(77.868.941,00)	66,72		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	233.969.650,00	156.100.709,00	(77.868.941,00)	66,72		
02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	113.523.650,00	107.654.709,00	(5.868.941,00)	94,83		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	113.523.650,00	107.654.709,00	(5.868.941,00)	94,83		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.523.650,00	107.654.709,00	(5.868.941,00)	94,83		
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.446.000,00	48.446.000,00	(72.000.000,00)	40,22		
02.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	0		
02.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	0		
02.2.05.07.5.2	BELANJA MODAL	48.446.000,00	48.446.000,00	0,00	100,00		
02.2.05.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.446.000,00	48.446.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	497.750.000,00	458.550.000,00	(39.200.000,00)	92,12		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	497.750.000,00	458.550.000,00	(39.200.000,00)	92,12		
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	66,67		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	66,67		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	66,67		
02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	484.250.000,00	449.550.000,00	(34.700.000,00)	92,83		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	484.250.000,00	449.550.000,00	(34.700.000,00)	92,83		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.250.000,00	449.550.000,00	(34.700.000,00)	92,83		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.377.878.424,00	1.149.538.660,00	(228.339.764,00)	83,43		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.377.878.424,00	1.149.538.660,00	(228.339.764,00)	83,43		
02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	673.978.624,00	672.011.660,00	(1.966.964,00)	99,71		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	673.978.624,00	672.011.660,00	(1.966.964,00)	99,71		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.978.624,00	672.011.660,00	(1.966.964,00)	99,71		
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	620.000.000,00	451.827.000,00	(168.173.000,00)	72,88		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	620.000.000,00	451.827.000,00	(168.173.000,00)	72,88		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.000.000,00	451.827.000,00	(168.173.000,00)	72,88		
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	83.899.800,00	25.700.000,00	(58.199.800,00)	30,63		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	83.899.800,00	25.700.000,00	(58.199.800,00)	30,63		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.899.800,00	25.700.000,00	(58.199.800,00)	30,63		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	416.312.485,00	392.695.700,00	(23.616.785,00)	94,33		
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.803.660,00	57.018.200,00	(5.785.460,00)	90,79		
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	62.803.660,00	57.018.200,00	(5.785.460,00)	90,79		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.803.660,00	57.018.200,00	(5.785.460,00)	90,79		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.803.660,00	57.018.200,00	(5.785.460,00)	90,79		
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	353.508.825,00	335.677.500,00	(17.831.325,00)	94,96		
02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	353.508.825,00	335.677.500,00	(17.831.325,00)	94,96		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	295.508.825,00	278.637.500,00	(16.871.325,00)	94,29		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.508.825,00	278.637.500,00	(16.871.325,00)	94,29		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	58.000.000,00	57.040.000,00	(960.000,00)	98,34		
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.040.000,00	(960.000,00)	97,60		
02.2.03.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	267.432.394,00	262.446.946,00	(4.985.448,00)	98,14		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.244.735,00	84.864.500,00	(3.380.235,00)	96,17		
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	63.244.735,00	60.014.500,00	(3.230.235,00)	94,89		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	63.244.735,00	60.014.500,00	(3.230.235,00)	94,89		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.244.735,00	60.014.500,00	(3.230.235,00)	94,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40		
02.2.01.09.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40		
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	179.187.659,00	177.582.446,00	(1.605.213,00)	99,10		
02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	39.416.881,00	39.091.446,00	(325.435,00)	99,17		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	37.091.881,00	36.766.446,00	(325.435,00)	99,12		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.091.881,00	36.766.446,00	(325.435,00)	99,12		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.770.778,00	38.591.000,00	(1.179.778,00)	97,03		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	39.770.778,00	38.591.000,00	(1.179.778,00)	97,03		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.770.778,00	38.591.000,00	(1.179.778,00)	97,03		
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.094.981.616,00	1.813.938.154,00	(281.043.462,00)	86,58		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.092.555.000,00	815.355.800,00	(277.199.200,00)	74,63		
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	730.105.000,00	725.355.800,00	(4.749.200,00)	99,35		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	730.105.000,00	725.355.800,00	(4.749.200,00)	99,35		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.105.000,00	725.355.800,00	(4.749.200,00)	99,35		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	362.450.000,00	90.000.000,00	(272.450.000,00)	24,83		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	362.450.000,00	90.000.000,00	(272.450.000,00)	24,83		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.450.000,00	90.000.000,00	(272.450.000,00)	24,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	969.641.999,00	966.542.580,00	(3.099.419,00)	99,68		
02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	969.641.999,00	966.542.580,00	(3.099.419,00)	99,68		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	969.641.999,00	966.542.580,00	(3.099.419,00)	99,68		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.641.999,00	966.542.580,00	(3.099.419,00)	99,68		
02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.227.000,00	30.066.774,00	(160.226,00)	99,47		
02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	30.227.000,00	30.066.774,00	(160.226,00)	99,47		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.227.000,00	30.066.774,00	(160.226,00)	99,47		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.227.000,00	30.066.774,00	(160.226,00)	99,47		
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.557.617,00	1.973.000,00	(584.617,00)	77,14		
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.557.617,00	1.973.000,00	(584.617,00)	77,14		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.557.617,00	1.973.000,00	(584.617,00)	77,14		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.557.617,00	1.973.000,00	(584.617,00)	77,14		
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	60.450.000,00	59.488.000,00	(962.000,00)	98,41		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	60.450.000,00	59.488.000,00	(962.000,00)	98,41		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	33.037.000,00	32.075.000,00	(962.000,00)	97,09		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.037.000,00	32.075.000,00	(962.000,00)	97,09		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.037.000,00	32.075.000,00	(962.000,00)	97,09		
02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	27.413.000,00	27.413.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	27.413.000,00	27.413.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.413.000,00	27.413.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.725.159.218,00	2.549.314.876,00	(175.844.342,00)	93,55		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	451.525.553,00	416.997.341,00	(34.528.212,00)	92,35		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	109.848.758,00	89.959.766,00	(19.888.992,00)	81,89		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	109.848.758,00	89.959.766,00	(19.888.992,00)	81,89		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.848.758,00	89.959.766,00	(19.888.992,00)	81,89		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	101.685.000,00	87.769.000,00	(13.916.000,00)	86,31		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.685.000,00	87.769.000,00	(13.916.000,00)	86,31		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.685.000,00	87.769.000,00	(13.916.000,00)	86,31		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	239.991.795,00	239.268.575,00	(723.220,00)	99,70		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	239.991.795,00	239.268.575,00	(723.220,00)	99,70		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.991.795,00	239.268.575,00	(723.220,00)	99,70		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.570.444.415,00	1.454.735.300,00	(115.709.115,00)	92,63		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.499.111.615,00	1.454.735.300,00	(44.376.315,00)	97,04		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.499.111.615,00	1.454.735.300,00	(44.376.315,00)	97,04		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.111.615,00	1.454.735.300,00	(44.376.315,00)	97,04		
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	70.666.400,00	0,00	(70.666.400,00)	0		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.666.400,00	0,00	(70.666.400,00)	0		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.400,00	0,00	(666.400,00)	0		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	666.400,00	0,00	(666.400,00)	0		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	666.400,00	0,00	(666.400,00)	0		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.400,00	0,00	(666.400,00)	0		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	669.319.250,00	645.552.235,00	(23.767.015,00)	96,45		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	177.124.000,00	177.040.000,00	(84.000,00)	99,95		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	177.124.000,00	177.040.000,00	(84.000,00)	99,95		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.124.000,00	177.040.000,00	(84.000,00)	99,95		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	388.852.975,00	382.894.500,00	(5.958.475,00)	98,47		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	388.852.975,00	382.894.500,00	(5.958.475,00)	98,47		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.852.975,00	382.894.500,00	(5.958.475,00)	98,47		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	103.342.275,00	85.617.735,00	(17.724.540,00)	82,85		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	67.342.275,00	49.617.735,00	(17.724.540,00)	73,68		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.342.275,00	49.617.735,00	(17.724.540,00)	73,68		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	33.870.000,00	32.030.000,00	(1.840.000,00)	94,57		
02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	33.870.000,00	32.030.000,00	(1.840.000,00)	94,57		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.870.000,00	32.030.000,00	(1.840.000,00)	94,57		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.870.000,00	32.030.000,00	(1.840.000,00)	94,57		
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.570.067.919,00	5.571.858.309,00	(998.209.610,00)	84,81		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	203.194.440,00	170.391.000,00	(32.803.440,00)	83,86		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	203.194.440,00	170.391.000,00	(32.803.440,00)	83,86		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	203.194.440,00	170.391.000,00	(32.803.440,00)	83,86		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.194.440,00	170.391.000,00	(32.803.440,00)	83,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	470.950.000,00	420.765.000,00	(50.185.000,00)	89,34		
02.2.02.03	Pembahasan APBD	470.950.000,00	420.765.000,00	(50.185.000,00)	89,34		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	470.950.000,00	420.765.000,00	(50.185.000,00)	89,34		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.950.000,00	420.765.000,00	(50.185.000,00)	89,34		
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	169.209.000,00	78.850.000,00	(90.359.000,00)	46,60		
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	169.209.000,00	78.850.000,00	(90.359.000,00)	46,60		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	169.209.000,00	78.850.000,00	(90.359.000,00)	46,60		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.209.000,00	78.850.000,00	(90.359.000,00)	46,60		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.261.623.132,00	1.210.916.520,00	(50.706.612,00)	95,98		
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	232.000.000,00	217.000.000,00	(15.000.000,00)	93,53		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	232.000.000,00	217.000.000,00	(15.000.000,00)	93,53		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.000.000,00	217.000.000,00	(15.000.000,00)	93,53		
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	427.700.000,00	408.100.000,00	(19.600.000,00)	95,42		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	427.700.000,00	408.100.000,00	(19.600.000,00)	95,42		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.700.000,00	408.100.000,00	(19.600.000,00)	95,42		
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	413.923.132,00	397.816.520,00	(16.106.612,00)	96,11		
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	413.923.132,00	397.816.520,00	(16.106.612,00)	96,11		
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.923.132,00	397.816.520,00	(16.106.612,00)	96,11		
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	357.899.347,00	269.680.000,00	(88.219.347,00)	75,35		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	357.899.347,00	269.680.000,00	(88.219.347,00)	75,35		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	357.899.347,00	269.680.000,00	(88.219.347,00)	75,35		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.899.347,00	269.680.000,00	(88.219.347,00)	75,35		
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.107.192.000,00	3.421.255.789,00	(685.936.211,00)	83,30		
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.107.192.000,00	3.421.255.789,00	(685.936.211,00)	83,30		
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.107.192.000,00	3.421.255.789,00	(685.936.211,00)	83,30		
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.107.192.000,00	3.421.255.789,00	(685.936.211,00)	83,30		
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	473.797.130,00	293.546.754,00	(180.250.376,00)	61,96		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	197.015.275,00	126.432.000,00	(70.583.275,00)	64,17		
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	16.434.840,00	0,00	(16.434.840,00)	0		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.434.840,00	0,00	(16.434.840,00)	0		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.434.840,00	0,00	(16.434.840,00)	0		
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	21.565.506,00	20.284.500,00	(1.281.006,00)	94,06		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.565.506,00	20.284.500,00	(1.281.006,00)	94,06		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.565.506,00	20.284.500,00	(1.281.006,00)	94,06		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	18.906.310,00	14.923.000,00	(3.983.310,00)	78,93		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.906.310,00	14.923.000,00	(3.983.310,00)	78,93		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.906.310,00	14.923.000,00	(3.983.310,00)	78,93		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	34.084.687,00	31.079.500,00	(3.005.187,00)	91,18		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	34.084.687,00	31.079.500,00	(3.005.187,00)	91,18		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.084.687,00	31.079.500,00	(3.005.187,00)	91,18		
02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.212.882,00	2.155.000,00	(2.057.882,00)	51,15		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.212.882,00	2.155.000,00	(2.057.882,00)	51,15		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.212.882,00	2.155.000,00	(2.057.882,00)	51,15		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	101.811.050,00	57.990.000,00	(43.821.050,00)	56,96		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	101.811.050,00	57.990.000,00	(43.821.050,00)	56,96		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.811.050,00	57.990.000,00	(43.821.050,00)	56,96		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	155.358.795,00	125.046.754,00	(30.312.041,00)	80,49		
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30.601.740,00	10.000.000,00	(20.601.740,00)	32,68		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.601.740,00	10.000.000,00	(20.601.740,00)	32,68		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.601.740,00	10.000.000,00	(20.601.740,00)	32,68		
02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	111.404.992,00	104.056.754,00	(7.348.238,00)	93,40		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	111.404.992,00	104.056.754,00	(7.348.238,00)	93,40		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.404.992,00	104.056.754,00	(7.348.238,00)	93,40		
02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	13.352.063,00	10.990.000,00	(2.362.063,00)	82,31		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.352.063,00	10.990.000,00	(2.362.063,00)	82,31		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.352.063,00	10.990.000,00	(2.362.063,00)	82,31		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.423.060,00	42.068.000,00	(79.355.060,00)	34,65		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	98.690.105,00	29.118.000,00	(69.572.105,00)	29,50		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.690.105,00	29.118.000,00	(69.572.105,00)	29,50		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.690.105,00	29.118.000,00	(69.572.105,00)	29,50		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	22.732.955,00	12.950.000,00	(9.782.955,00)	56,97		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.732.955,00	12.950.000,00	(9.782.955,00)	56,97		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.732.955,00	12.950.000,00	(9.782.955,00)	56,97		
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	122.872.217.177,00	47.168.608.562,00	(75.703.608.615,00)	38,39		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.729.935.475,00	954.402.521,00	(775.532.954,00)	55,17		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	446.746.200,00	161.937.558,00	(284.808.642,00)	36,25		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	446.746.200,00	161.937.558,00	(284.808.642,00)	36,25		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.746.200,00	161.937.558,00	(284.808.642,00)	36,25		
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	374.581.945,00	151.814.600,00	(222.767.345,00)	40,53		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	374.581.945,00	151.814.600,00	(222.767.345,00)	40,53		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.581.945,00	151.814.600,00	(222.767.345,00)	40,53		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	584.085.170,00	390.635.670,00	(193.449.500,00)	66,88		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	584.085.170,00	390.635.670,00	(193.449.500,00)	66,88		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.085.170,00	390.635.670,00	(193.449.500,00)	66,88		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	324.522.160,00	250.014.693,00	(74.507.467,00)	77,04		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	324.522.160,00	250.014.693,00	(74.507.467,00)	77,04		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.522.160,00	250.014.693,00	(74.507.467,00)	77,04		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	969.082.755,00	693.021.655,00	(276.061.100,00)	71,51		
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	335.811.180,00	176.240.755,00	(159.570.425,00)	52,48		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	335.811.180,00	176.240.755,00	(159.570.425,00)	52,48		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.811.180,00	176.240.755,00	(159.570.425,00)	52,48		
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	126.066.550,00	100.589.000,00	(25.477.550,00)	79,79		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	126.066.550,00	100.589.000,00	(25.477.550,00)	79,79		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.066.550,00	100.589.000,00	(25.477.550,00)	79,79		
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	109.952.685,00	59.747.800,00	(50.204.885,00)	54,34		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	109.952.685,00	59.747.800,00	(50.204.885,00)	54,34		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.952.685,00	59.747.800,00	(50.204.885,00)	54,34		
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	397.252.340,00	356.444.100,00	(40.808.240,00)	89,73		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	397.252.340,00	356.444.100,00	(40.808.240,00)	89,73		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.252.340,00	356.444.100,00	(40.808.240,00)	89,73		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	876.497.752,00	589.696.259,00	(286.801.493,00)	67,28		
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	290.039.802,00	238.543.320,00	(51.496.482,00)	82,25		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	280.039.802,00	228.543.320,00	(51.496.482,00)	81,61		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.039.802,00	228.543.320,00	(51.496.482,00)	81,61		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	203.420.630,00	180.354.225,00	(23.066.405,00)	88,66		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	203.420.630,00	180.354.225,00	(23.066.405,00)	88,66		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.420.630,00	180.354.225,00	(23.066.405,00)	88,66		
02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	86.307.830,00	9.589.955,00	(76.717.875,00)	11,11		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	86.307.830,00	9.589.955,00	(76.717.875,00)	11,11		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.307.830,00	9.589.955,00	(76.717.875,00)	11,11		
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	90.571.490,00	56.613.609,00	(33.957.881,00)	62,51		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	90.571.490,00	56.613.609,00	(33.957.881,00)	62,51		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.571.490,00	56.613.609,00	(33.957.881,00)	62,51		
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.131.000,00	39.783.350,00	(60.347.650,00)	39,73		
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	100.131.000,00	39.783.350,00	(60.347.650,00)	39,73		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.131.000,00	39.783.350,00	(60.347.650,00)	39,73		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	106.027.000,00	64.811.800,00	(41.215.200,00)	61,13		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	106.027.000,00	64.811.800,00	(41.215.200,00)	61,13		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.027.000,00	64.811.800,00	(41.215.200,00)	61,13		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	119.296.701.195,00	44.931.488.127,00	(74.365.213.068,00)	37,66		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	117.138.420.100,00	44.383.918.524,00	(72.754.501.576,00)	37,89		
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	117.138.420.100,00	44.383.918.524,00	(72.754.501.576,00)	37,89		
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.138.420.100,00	44.383.918.524,00	(72.754.501.576,00)	37,89		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	612.255.000,00	339.885.000,00	(272.370.000,00)	55,51		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	612.255.000,00	339.885.000,00	(272.370.000,00)	55,51		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	612.255.000,00	339.885.000,00	(272.370.000,00)	55,51		
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.546.026.095,00	207.684.603,00	(1.338.341.492,00)	13,43		
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	1.546.026.095,00	207.684.603,00	(1.338.341.492,00)	13,43		
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.546.026.095,00	207.684.603,00	(1.338.341.492,00)	13,43		
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	271.497.923,00	211.282.326,00	(60.215.597,00)	77,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	174.635.955,00	147.108.000,00	(27.527.955,00)	84,24		
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	156.649.811,00	133.305.500,00	(23.344.311,00)	85,10		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	156.649.811,00	133.305.500,00	(23.344.311,00)	85,10		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.649.811,00	133.305.500,00	(23.344.311,00)	85,10		
02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	528.360,00	0,00	(528.360,00)	0		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	528.360,00	0,00	(528.360,00)	0		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.360,00	0,00	(528.360,00)	0		
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.457.784,00	13.802.500,00	(3.655.284,00)	79,06		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	17.457.784,00	13.802.500,00	(3.655.284,00)	79,06		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.457.784,00	13.802.500,00	(3.655.284,00)	79,06		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	46.406.648,00	22.282.056,00	(24.124.592,00)	48,01		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	46.406.648,00	22.282.056,00	(24.124.592,00)	48,01		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.406.648,00	22.282.056,00	(24.124.592,00)	48,01		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.406.648,00	22.282.056,00	(24.124.592,00)	48,01		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	29.198.821,00	24.650.100,00	(4.548.721,00)	84,42		
02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	29.198.821,00	24.650.100,00	(4.548.721,00)	84,42		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.198.821,00	24.650.100,00	(4.548.721,00)	84,42		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.198.821,00	24.650.100,00	(4.548.721,00)	84,42		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.256.499,00	17.242.170,00	(4.014.329,00)	81,11		
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8.866.000,00	8.434.792,00	(431.208,00)	95,14		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.866.000,00	8.434.792,00	(431.208,00)	95,14		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.866.000,00	8.434.792,00	(431.208,00)	95,14		
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	12.390.499,00	8.807.378,00	(3.583.121,00)	71,08		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.390.499,00	8.807.378,00	(3.583.121,00)	71,08		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.390.499,00	8.807.378,00	(3.583.121,00)	71,08		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.212.803.075,00	1.165.883.393,00	(46.919.682,00)	96,13		
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	364.363.800,00	362.604.500,00	(1.759.300,00)	99,52		
02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	364.363.800,00	362.604.500,00	(1.759.300,00)	99,52		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	264.363.800,00	262.604.500,00	(1.759.300,00)	99,33		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.363.800,00	262.604.500,00	(1.759.300,00)	99,33		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	308.250.000,00	307.107.400,00	(1.142.600,00)	99,63		
02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00	199.431.900,00	(568.100,00)	99,72		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.431.900,00	(568.100,00)	98,86		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.431.900,00	(568.100,00)	98,86		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	108.250.000,00	107.675.500,00	(574.500,00)	99,47		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	33.250.000,00	32.675.500,00	(574.500,00)	98,27		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.250.000,00	32.675.500,00	(574.500,00)	98,27		
02.2.02.05.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	321.674.275,00	318.217.993,00	(3.456.282,00)	98,93		
02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	120.215.000,00	117.690.000,00	(2.525.000,00)	97,90		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.215.000,00	17.690.000,00	(2.525.000,00)	87,51		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.215.000,00	17.690.000,00	(2.525.000,00)	87,51		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	201.459.275,00	200.527.993,00	(931.282,00)	99,54		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	76.459.275,00	75.527.993,00	(931.282,00)	98,78		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.459.275,00	75.527.993,00	(931.282,00)	98,78		
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.07.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	218.515.000,00	177.953.500,00	(40.561.500,00)	81,44		
02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	145.258.571,00	142.029.000,00	(3.229.571,00)	97,78		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	145.258.571,00	142.029.000,00	(3.229.571,00)	97,78		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.258.571,00	142.029.000,00	(3.229.571,00)	97,78		
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	73.256.429,00	35.924.500,00	(37.331.929,00)	49,04		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	73.256.429,00	35.924.500,00	(37.331.929,00)	49,04		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.256.429,00	35.924.500,00	(37.331.929,00)	49,04		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.157.856.705,00	1.102.457.000,00	(55.399.705,00)	95,22		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.118.406.705,00	1.064.657.000,00	(53.749.705,00)	95,19		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	164.775.000,00	144.000.000,00	(20.775.000,00)	87,39		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	164.775.000,00	144.000.000,00	(20.775.000,00)	87,39		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.775.000,00	144.000.000,00	(20.775.000,00)	87,39		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	294.075.000,00	253.725.000,00	(40.350.000,00)	86,28		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	294.075.000,00	253.725.000,00	(40.350.000,00)	86,28		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.075.000,00	253.725.000,00	(40.350.000,00)	86,28		
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	200.017.095,00	199.841.000,00	(176.095,00)	99,91		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	200.017.095,00	199.841.000,00	(176.095,00)	99,91		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.017.095,00	199.841.000,00	(176.095,00)	99,91		
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	207.289.610,00	207.191.000,00	(98.610,00)	99,95		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	207.289.610,00	207.191.000,00	(98.610,00)	99,95		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.289.610,00	207.191.000,00	(98.610,00)	99,95		
02.2.01.05	Pengawasan Desa	126.750.000,00	126.600.000,00	(150.000,00)	99,88		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	126.750.000,00	126.600.000,00	(150.000,00)	99,88		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.750.000,00	126.600.000,00	(150.000,00)	99,88		
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	95.200.000,00	103.090.000,00	7.890.000,00	108,29		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	95.200.000,00	103.090.000,00	7.890.000,00	108,29		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.200.000,00	103.090.000,00	7.890.000,00	108,29		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30.300.000,00	30.210.000,00	(90.000,00)	99,70		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	30.300.000,00	30.210.000,00	(90.000,00)	99,70		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	30.210.000,00	(90.000,00)	99,70		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39.450.000,00	37.800.000,00	(1.650.000,00)	95,82		
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.250.000,00	25.800.000,00	(1.450.000,00)	94,68		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.250.000,00	25.800.000,00	(1.450.000,00)	94,68		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	25.800.000,00	(1.450.000,00)	94,68		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12.200.000,00	12.000.000,00	(200.000,00)	98,36		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	12.000.000,00	(200.000,00)	98,36		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.000.000,00	(200.000,00)	98,36		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	335.483.603,00	268.465.300,00	(67.018.303,00)	80,02		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	197.537.650,00	135.875.300,00	(61.662.350,00)	68,78		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	127.670.400,00	117.474.300,00	(10.196.100,00)	92,01		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	127.670.400,00	117.474.300,00	(10.196.100,00)	92,01		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.670.400,00	117.474.300,00	(10.196.100,00)	92,01		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	69.867.250,00	18.401.000,00	(51.466.250,00)	26,34		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	69.867.250,00	18.401.000,00	(51.466.250,00)	26,34		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.867.250,00	18.401.000,00	(51.466.250,00)	26,34		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27.245.953,00	22.590.000,00	(4.655.953,00)	82,91		
02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	17.594.503,00	17.318.000,00	(276.503,00)	98,43		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.594.503,00	17.318.000,00	(276.503,00)	98,43		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.594.503,00	17.318.000,00	(276.503,00)	98,43		
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	555.000,00	0,00	(555.000,00)	0		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	555.000,00	0,00	(555.000,00)	0		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	0,00	(555.000,00)	0		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.096.450,00	5.272.000,00	(3.824.450,00)	57,96		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.096.450,00	5.272.000,00	(3.824.450,00)	57,96		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.096.450,00	5.272.000,00	(3.824.450,00)	57,96		
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	110.700.000,00	110.000.000,00	(700.000,00)	99,37		
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0		
02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	110.400.000,00	110.000.000,00	(400.000,00)	99,64		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	110.400.000,00	110.000.000,00	(400.000,00)	99,64		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000,00	110.000.000,00	(400.000,00)	99,64		
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.186.889.790,00	853.238.200,00	(333.651.590,00)	71,89		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.186.889.790,00	853.238.200,00	(333.651.590,00)	71,89		
02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.799.615,00	0,00	(4.799.615,00)	0		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.799.615,00	0,00	(4.799.615,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.799.615,00	0,00	(4.799.615,00)	0		
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.182.090.175,00	853.238.200,00	(328.851.975,00)	72,18		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.182.090.175,00	853.238.200,00	(328.851.975,00)	72,18		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.090.175,00	853.238.200,00	(328.851.975,00)	72,18		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	50.283.899,00	43.234.500,00	(7.049.399,00)	85,98		
03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	50.283.899,00	43.234.500,00	(7.049.399,00)	85,98		
03.2.02.05	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.283.899,00	43.234.500,00	(7.049.399,00)	85,98		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	26.283.899,00	19.234.500,00	(7.049.399,00)	73,18		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.283.899,00	19.234.500,00	(7.049.399,00)	73,18		
03.2.02.05.5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.108.743.970,00	7.858.408.544,00	(250.335.426,00)	96,91		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.993.983.891,00	6.824.171.320,00	(169.812.571,00)	97,57		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.831.871.931,00	6.664.067.320,00	(167.804.611,00)	97,54		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.831.871.931,00	6.664.067.320,00	(167.804.611,00)	97,54		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	621.304.931,00	609.480.814,00	(11.824.117,00)	98,10		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.210.567.000,00	6.054.586.506,00	(155.980.494,00)	97,49		
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	162.111.960,00	160.104.000,00	(2.007.960,00)	98,76		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	162.111.960,00	160.104.000,00	(2.007.960,00)	98,76		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.111.960,00	160.104.000,00	(2.007.960,00)	98,76		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.114.760.079,00	1.034.237.224,00	(80.522.855,00)	92,78		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.114.760.079,00	1.034.237.224,00	(80.522.855,00)	92,78		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.114.760.079,00	1.034.237.224,00	(80.522.855,00)	92,78		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.760.079,00	1.034.237.224,00	(80.522.855,00)	92,78		
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.072.631.812,00	934.014.437,00	(138.617.375,00)	87,08		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.072.631.812,00	934.014.437,00	(138.617.375,00)	87,08		
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	170.000.000,00	91.749.825,00	(78.250.175,00)	53,97		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	91.749.825,00	(78.250.175,00)	53,97		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	91.749.825,00	(78.250.175,00)	53,97		
03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50.000.000,00	45.389.000,00	(4.611.000,00)	90,78		
03.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	45.389.000,00	(4.611.000,00)	90,78		
03.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	45.389.000,00	(4.611.000,00)	90,78		
03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100.000.000,00	93.916.750,00	(6.083.250,00)	93,92		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	93.916.750,00	(6.083.250,00)	93,92		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	93.916.750,00	(6.083.250,00)	93,92		
03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	502.631.812,00	453.249.541,00	(49.382.271,00)	90,18		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	492.631.812,00	443.434.541,00	(49.197.271,00)	90,01		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.631.812,00	443.434.541,00	(49.197.271,00)	90,01		
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.815.000,00	(185.000,00)	98,15		
03.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.815.000,00	(185.000,00)	98,15		
03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	250.000.000,00	249.709.321,00	(290.679,00)	99,88		
03.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.709.321,00	(290.679,00)	99,88		
03.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.709.321,00	(290.679,00)	99,88		
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	285.005.350,00	281.129.735,00	(3.875.615,00)	98,64		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	164.699.292,00	163.749.160,00	(950.132,00)	99,42		
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	164.699.292,00	163.749.160,00	(950.132,00)	99,42		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	164.699.292,00	163.749.160,00	(950.132,00)	99,42		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.699.292,00	163.749.160,00	(950.132,00)	99,42		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80.306.058,00	77.440.575,00	(2.865.483,00)	96,43		
03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	31.111.058,00	30.228.575,00	(882.483,00)	97,16		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.111.058,00	30.228.575,00	(882.483,00)	97,16		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.111.058,00	30.228.575,00	(882.483,00)	97,16		
03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	49.195.000,00	47.212.000,00	(1.983.000,00)	95,97		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	49.195.000,00	47.212.000,00	(1.983.000,00)	95,97		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.195.000,00	47.212.000,00	(1.983.000,00)	95,97		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	39.940.000,00	(60.000,00)	99,85		
03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.940.000,00	(60.000,00)	99,85		
03.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.06.5.2	BELANJA MODAL	31.000.000,00	30.940.000,00	(60.000,00)	99,81		
03.2.04.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.000.000,00	30.940.000,00	(60.000,00)	99,81		
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	121.294.250,00	85.127.000,00	(36.167.250,00)	70,18		
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.960.000,00	25.660.000,00	(300.000,00)	98,84		
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.960.000,00	25.660.000,00	(300.000,00)	98,84		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.960.000,00	25.660.000,00	(300.000,00)	98,84		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.960.000,00	25.660.000,00	(300.000,00)	98,84		
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58.036.250,00	23.602.000,00	(34.434.250,00)	40,67		
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.036.250,00	23.602.000,00	(34.434.250,00)	40,67		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.036.250,00	23.602.000,00	(34.434.250,00)	40,67		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.036.250,00	23.602.000,00	(34.434.250,00)	40,67		
03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.442.889.699,00	1.320.628.400,00	(122.261.299,00)	91,53		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	337.838.789,00	311.092.900,00	(26.745.889,00)	92,08		
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	19.409.589,00	13.138.000,00	(6.271.589,00)	67,69		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.409.589,00	13.138.000,00	(6.271.589,00)	67,69		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.409.589,00	13.138.000,00	(6.271.589,00)	67,69		
03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	30.000.000,00	19.940.000,00	(10.060.000,00)	66,47		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	19.940.000,00	(10.060.000,00)	66,47		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	19.940.000,00	(10.060.000,00)	66,47		
03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	120.000.000,00	119.949.400,00	(50.600,00)	99,96		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.949.400,00	(50.600,00)	99,96		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.949.400,00	(50.600,00)	99,96		
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	91.000.000,00	87.499.000,00	(3.501.000,00)	96,15		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	91.000.000,00	87.499.000,00	(3.501.000,00)	96,15		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	87.499.000,00	(3.501.000,00)	96,15		
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	54.600.000,00	50.670.500,00	(3.929.500,00)	92,80		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	54.600.000,00	50.670.500,00	(3.929.500,00)	92,80		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	50.670.500,00	(3.929.500,00)	92,80		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	22.829.200,00	19.896.000,00	(2.933.200,00)	87,15		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.829.200,00	19.896.000,00	(2.933.200,00)	87,15		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.829.200,00	19.896.000,00	(2.933.200,00)	87,15		
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	282.450.000,00	277.200.000,00	(5.250.000,00)	98,14		
03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	49.000.000,00	47.250.000,00	(1.750.000,00)	96,43		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.000.000,00	47.250.000,00	(1.750.000,00)	96,43		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	47.250.000,00	(1.750.000,00)	96,43		
03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	82.250.000,00	78.750.000,00	(3.500.000,00)	95,74		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	82.250.000,00	78.750.000,00	(3.500.000,00)	95,74		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.250.000,00	78.750.000,00	(3.500.000,00)	95,74		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	514.450.910,00	453.885.500,00	(60.565.410,00)	88,23		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	365.187.000,00	311.900.000,00	(53.287.000,00)	85,41		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	365.187.000,00	311.900.000,00	(53.287.000,00)	85,41		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.187.000,00	311.900.000,00	(53.287.000,00)	85,41		
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	38.127.910,00	35.592.500,00	(2.535.410,00)	93,35		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	38.127.910,00	35.592.500,00	(2.535.410,00)	93,35		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.127.910,00	35.592.500,00	(2.535.410,00)	93,35		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26.700.000,00	26.080.000,00	(620.000,00)	97,68		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	26.700.000,00	26.080.000,00	(620.000,00)	97,68		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	26.080.000,00	(620.000,00)	97,68		
03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	70.036.000,00	65.913.000,00	(4.123.000,00)	94,11		
03.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	70.036.000,00	65.913.000,00	(4.123.000,00)	94,11		
03.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.036.000,00	65.913.000,00	(4.123.000,00)	94,11		
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	308.150.000,00	278.450.000,00	(29.700.000,00)	90,36		
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	225.000.000,00	204.300.000,00	(20.700.000,00)	90,80		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	204.300.000,00	(20.700.000,00)	90,80		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	204.300.000,00	(20.700.000,00)	90,80		
03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	63.000.000,00	54.000.000,00	(9.000.000,00)	85,71		
03.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	63.000.000,00	54.000.000,00	(9.000.000,00)	85,71		
03.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	54.000.000,00	(9.000.000,00)	85,71		
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	417.110.592,00	416.818.592,00	(292.000,00)	99,93		
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	376.760.592,00	376.760.592,00	0,00	100,00		
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	376.760.592,00	376.760.592,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	376.760.592,00	376.760.592,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.760.592,00	376.760.592,00	0,00	100,00		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.350.000,00	40.058.000,00	(292.000,00)	99,28		
03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	40.350.000,00	40.058.000,00	(292.000,00)	99,28		
03.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	40.350.000,00	40.058.000,00	(292.000,00)	99,28		
03.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.350.000,00	40.058.000,00	(292.000,00)	99,28		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.343.123.269,00	1.930.596.521,00	(412.526.748,00)	82,39		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.343.123.269,00	1.930.596.521,00	(412.526.748,00)	82,39		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	305.987.324,00	304.738.484,00	(1.248.840,00)	99,59		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	305.987.324,00	304.738.484,00	(1.248.840,00)	99,59		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.987.324,00	304.738.484,00	(1.248.840,00)	99,59		
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	588.135.945,00	510.925.105,00	(77.210.840,00)	86,87		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	588.135.945,00	510.925.105,00	(77.210.840,00)	86,87		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.135.945,00	510.925.105,00	(77.210.840,00)	86,87		
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.449.000.000,00	1.114.932.932,00	(334.067.068,00)	76,94		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	977.750.000,00	575.236.000,00	(402.514.000,00)	58,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.750.000,00	575.236.000,00	(2.514.000,00)	99,56		
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	0		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	471.250.000,00	539.696.932,00	68.446.932,00	114,52		
03.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	471.250.000,00	539.696.932,00	68.446.932,00	114,52		
03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	64.182.350,00	62.180.000,00	(2.002.350,00)	96,88		
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	64.182.350,00	62.180.000,00	(2.002.350,00)	96,88		
03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	64.182.350,00	62.180.000,00	(2.002.350,00)	96,88		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.182.350,00	62.180.000,00	(1.002.350,00)	98,41		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.182.350,00	62.180.000,00	(1.002.350,00)	98,41		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.235.786.535,00	4.376.184.085,00	(859.602.450,00)	83,58		
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.518.617.555,00	3.845.219.435,00	(673.398.120,00)	85,10		
03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.779.244.555,00	1.506.244.555,00	(273.000.000,00)	84,66		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.779.244.555,00	1.506.244.555,00	(273.000.000,00)	84,66		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.779.244.555,00	1.506.244.555,00	(273.000.000,00)	84,66		
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.739.373.000,00	2.338.974.880,00	(400.398.120,00)	85,38		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.966.444.480,00	1.711.541.695,00	(254.902.785,00)	87,04		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.966.444.480,00	1.711.541.695,00	(254.902.785,00)	87,04		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	772.928.520,00	627.433.185,00	(145.495.335,00)	81,18		
03.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	772.928.520,00	627.433.185,00	(145.495.335,00)	81,18		
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	717.168.980,00	530.964.650,00	(186.204.330,00)	74,04		
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	717.168.980,00	530.964.650,00	(186.204.330,00)	74,04		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	717.168.980,00	530.964.650,00	(186.204.330,00)	74,04		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	717.168.980,00	530.964.650,00	(186.204.330,00)	74,04		
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.655.904.000,00	1.535.325.000,00	(120.579.000,00)	92,72		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.655.904.000,00	1.535.325.000,00	(120.579.000,00)	92,72		
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	964.750.000,00	885.950.000,00	(78.800.000,00)	91,83		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	964.750.000,00	885.950.000,00	(78.800.000,00)	91,83		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.750.000,00	885.950.000,00	(78.800.000,00)	91,83		
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	625.000.000,00	621.875.000,00	(3.125.000,00)	99,50		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	625.000.000,00	621.875.000,00	(3.125.000,00)	99,50		
03.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	625.000.000,00	621.875.000,00	(3.125.000,00)	99,50		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	66.154.000,00	27.500.000,00	(38.654.000,00)	41,57		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	27.513.000,00	27.500.000,00	(13.000,00)	99,95		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.513.000,00	27.500.000,00	(13.000,00)	99,95		
03.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	38.641.000,00	0,00	(38.641.000,00)	0		
03.2.02.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.641.000,00	0,00	(38.641.000,00)	0		
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.672.939.237,00	1.427.621.824,00	(245.317.413,00)	85,34		
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	271.294.946,00	193.474.360,00	(77.820.586,00)	71,32		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	142.092.806,00	130.224.360,00	(11.868.446,00)	91,65		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.092.806,00	130.224.360,00	(11.868.446,00)	91,65		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.092.806,00	130.224.360,00	(11.868.446,00)	91,65		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	43.339.800,00	0,00	(43.339.800,00)	0		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	43.339.800,00	0,00	(43.339.800,00)	0		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.339.800,00	0,00	(43.339.800,00)	0		
03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	70.862.340,00	48.250.000,00	(22.612.340,00)	68,09		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	70.862.340,00	48.250.000,00	(22.612.340,00)	68,09		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.862.340,00	48.250.000,00	(22.612.340,00)	68,09		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	587.417.096,00	425.432.394,00	(161.984.702,00)	72,42		
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	191.298.901,00	109.659.391,00	(81.639.510,00)	57,32		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	191.298.901,00	109.659.391,00	(81.639.510,00)	57,32		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.298.901,00	109.659.391,00	(81.639.510,00)	57,32		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	73.588.000,00	53.887.503,00	(19.700.497,00)	73,23		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.588.000,00	53.887.503,00	(19.700.497,00)	73,23		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.588.000,00	53.887.503,00	(19.700.497,00)	73,23		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	322.530.195,00	261.885.500,00	(60.644.695,00)	81,20		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	305.530.195,00	251.885.500,00	(53.644.695,00)	82,44		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.530.195,00	251.885.500,00	(53.644.695,00)	82,44		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	58,82		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	58,82		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	771.149.195,00	769.095.070,00	(2.054.125,00)	99,73		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	285.225.000,00	285.147.160,00	(77.840,00)	99,97		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	285.225.000,00	285.147.160,00	(77.840,00)	99,97		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	81.147.160,00	(77.840,00)	99,90		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	369.590.000,00	367.714.500,00	(1.875.500,00)	99,49		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	328.590.000,00	326.730.500,00	(1.859.500,00)	99,43		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.590.000,00	326.730.500,00	(1.859.500,00)	99,43		
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	41.000.000,00	40.984.000,00	(16.000,00)	99,96		
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.000.000,00	40.984.000,00	(16.000,00)	99,96		
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	116.334.195,00	116.233.410,00	(100.785,00)	99,91		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	116.334.195,00	116.233.410,00	(100.785,00)	99,91		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.334.195,00	116.233.410,00	(100.785,00)	99,91		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	43.078.000,00	39.620.000,00	(3.458.000,00)	91,97		
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	21.133.000,00	21.100.000,00	(33.000,00)	99,84		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.133.000,00	21.100.000,00	(33.000,00)	99,84		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.133.000,00	21.100.000,00	(33.000,00)	99,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	3.425.000,00	0,00	(3.425.000,00)	0		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.425.000,00	0,00	(3.425.000,00)	0		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	0,00	(3.425.000,00)	0		
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	525.000.000,00	333.803.400,00	(191.196.600,00)	63,58		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	203.863.052,00	135.436.900,00	(68.426.152,00)	66,44		
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.235.397,00	10.178.000,00	(8.057.397,00)	55,81		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.235.397,00	10.178.000,00	(8.057.397,00)	55,81		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.235.397,00	10.178.000,00	(8.057.397,00)	55,81		
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.485.000,00	14.095.000,00	(390.000,00)	97,31		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.485.000,00	14.095.000,00	(390.000,00)	97,31		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.485.000,00	14.095.000,00	(390.000,00)	97,31		
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	66.669.692,00	42.423.500,00	(24.246.192,00)	63,63		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	66.669.692,00	42.423.500,00	(24.246.192,00)	63,63		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.669.692,00	42.423.500,00	(24.246.192,00)	63,63		
03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10.658.197,00	0,00	(10.658.197,00)	0		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.658.197,00	0,00	(10.658.197,00)	0		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.658.197,00	0,00	(10.658.197,00)	0		
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.640.000,00	42.170.000,00	(3.470.000,00)	92,40		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	45.640.000,00	42.170.000,00	(3.470.000,00)	92,40		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.640.000,00	42.170.000,00	(3.470.000,00)	92,40		
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.992.228,00	11.840.000,00	(5.152.228,00)	69,68		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.992.228,00	11.840.000,00	(5.152.228,00)	69,68		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.992.228,00	11.840.000,00	(5.152.228,00)	69,68		
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.697.538,00	4.619.000,00	(12.078.538,00)	27,66		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	16.697.538,00	4.619.000,00	(12.078.538,00)	27,66		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.697.538,00	4.619.000,00	(12.078.538,00)	27,66		
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.485.000,00	10.111.400,00	(4.373.600,00)	69,81		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	14.485.000,00	10.111.400,00	(4.373.600,00)	69,81		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.485.000,00	10.111.400,00	(4.373.600,00)	69,81		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	71.136.948,00	32.350.000,00	(38.786.948,00)	45,48		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.163.355,00	1.145.000,00	(4.018.355,00)	22,18		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.163.355,00	1.145.000,00	(4.018.355,00)	22,18		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.163.355,00	1.145.000,00	(4.018.355,00)	22,18		
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.869.150,00	8.020.000,00	(849.150,00)	90,43		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.869.150,00	8.020.000,00	(849.150,00)	90,43		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.869.150,00	8.020.000,00	(849.150,00)	90,43		
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.131.400,00	4.270.000,00	(24.861.400,00)	14,66		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.131.400,00	4.270.000,00	(24.861.400,00)	14,66		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.131.400,00	4.270.000,00	(24.861.400,00)	14,66		
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3.658.435,00	2.480.000,00	(1.178.435,00)	67,79		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.658.435,00	2.480.000,00	(1.178.435,00)	67,79		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.658.435,00	2.480.000,00	(1.178.435,00)	67,79		
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.520.704,00	1.335.000,00	(5.185.704,00)	20,47		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.520.704,00	1.335.000,00	(5.185.704,00)	20,47		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.520.704,00	1.335.000,00	(5.185.704,00)	20,47		
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.768.200,00	2.850.000,00	(918.200,00)	75,63		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.768.200,00	2.850.000,00	(918.200,00)	75,63		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.768.200,00	2.850.000,00	(918.200,00)	75,63		
03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.755.704,00	3.710.000,00	(1.045.704,00)	78,01		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.755.704,00	3.710.000,00	(1.045.704,00)	78,01		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.755.704,00	3.710.000,00	(1.045.704,00)	78,01		
03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	9.270.000,00	8.540.000,00	(730.000,00)	92,13		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.270.000,00	8.540.000,00	(730.000,00)	92,13		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000,00	8.540.000,00	(730.000,00)	92,13		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.000.000,00	166.016.500,00	(83.983.500,00)	66,41		
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.000.000,00	25.292.500,00	(9.707.500,00)	72,26		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	25.292.500,00	(9.707.500,00)	72,26		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	25.292.500,00	(9.707.500,00)	72,26		
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.000.000,00	22.419.000,00	(7.581.000,00)	74,73		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	22.419.000,00	(7.581.000,00)	74,73		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.419.000,00	(7.581.000,00)	74,73		
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.000.000,00	23.760.500,00	(6.239.500,00)	79,20		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	23.760.500,00	(6.239.500,00)	79,20		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	23.760.500,00	(6.239.500,00)	79,20		
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	30.000.000,00	17.082.000,00	(12.918.000,00)	56,94		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	17.082.000,00	(12.918.000,00)	56,94		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	17.082.000,00	(12.918.000,00)	56,94		
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000,00	17.958.000,00	(12.042.000,00)	59,86		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	17.958.000,00	(12.042.000,00)	59,86		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	17.958.000,00	(12.042.000,00)	59,86		
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.000.000,00	22.502.000,00	(7.498.000,00)	75,01		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	22.502.000,00	(7.498.000,00)	75,01		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.502.000,00	(7.498.000,00)	75,01		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.000.000,00	23.472.500,00	(6.527.500,00)	78,24		
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	23.472.500,00	(6.527.500,00)	78,24		
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	23.472.500,00	(6.527.500,00)	78,24		
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	35.000.000,00	13.530.000,00	(21.470.000,00)	38,66		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	13.530.000,00	(21.470.000,00)	38,66		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	13.530.000,00	(21.470.000,00)	38,66		
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	707.107.297,00	543.652.866,00	(163.454.431,00)	76,88		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	707.107.297,00	543.652.866,00	(163.454.431,00)	76,88		
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	206.879.747,00	157.706.174,00	(49.173.573,00)	76,23		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	206.879.747,00	157.706.174,00	(49.173.573,00)	76,23		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.879.747,00	157.706.174,00	(49.173.573,00)	76,23		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	99.924.160,00	81.532.000,00	(18.392.160,00)	81,59		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	99.924.160,00	81.532.000,00	(18.392.160,00)	81,59		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.924.160,00	81.532.000,00	(18.392.160,00)	81,59		
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	147.192.105,00	99.206.877,00	(47.985.228,00)	67,40		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	147.192.105,00	99.206.877,00	(47.985.228,00)	67,40		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.192.105,00	99.206.877,00	(47.985.228,00)	67,40		
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	103.745.595,00	62.978.770,00	(40.766.825,00)	60,71		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	103.745.595,00	62.978.770,00	(40.766.825,00)	60,71		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.745.595,00	62.978.770,00	(40.766.825,00)	60,71		
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	149.365.690,00	142.229.045,00	(7.136.645,00)	95,22		
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	149.365.690,00	142.229.045,00	(7.136.645,00)	95,22		
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.365.690,00	142.229.045,00	(7.136.645,00)	95,22		
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	257.681.000,00	252.675.400,00	(5.005.600,00)	98,06		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	257.681.000,00	252.675.400,00	(5.005.600,00)	98,06		
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	219.231.000,00	214.250.400,00	(4.980.600,00)	97,73		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	219.231.000,00	214.250.400,00	(4.980.600,00)	97,73		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.231.000,00	214.250.400,00	(4.980.600,00)	97,73		
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30.800.000,00	30.775.000,00	(25.000,00)	99,92		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.800.000,00	30.775.000,00	(25.000,00)	99,92		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	30.775.000,00	(25.000,00)	99,92		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	159.990.135,00	119.481.885,00	(40.508.250,00)	74,68		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.924.835,00	77.922.885,00	(8.001.950,00)	90,69		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	56.574.835,00	48.586.885,00	(7.987.950,00)	85,88		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.574.835,00	48.586.885,00	(7.987.950,00)	85,88		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.574.835,00	48.586.885,00	(7.987.950,00)	85,88		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.350.000,00	29.336.000,00	(14.000,00)	99,95		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.350.000,00	29.336.000,00	(14.000,00)	99,95		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.350.000,00	29.336.000,00	(14.000,00)	99,95		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	74.065.300,00	41.559.000,00	(32.506.300,00)	56,11		
03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	11.810.300,00	11.000.000,00	(810.300,00)	93,14		
03.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.810.300,00	11.000.000,00	(810.300,00)	93,14		
03.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.810.300,00	11.000.000,00	(810.300,00)	93,14		
03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.682.400,00	6.646.000,00	(36.400,00)	99,46		
03.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.682.400,00	6.646.000,00	(36.400,00)	99,46		
03.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.682.400,00	6.646.000,00	(36.400,00)	99,46		
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36.672.800,00	5.215.000,00	(31.457.800,00)	14,22		
03.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	36.672.800,00	5.215.000,00	(31.457.800,00)	14,22		
03.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.672.800,00	5.215.000,00	(31.457.800,00)	14,22		
03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12.299.800,00	12.098.000,00	(201.800,00)	98,36		
03.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.299.800,00	12.098.000,00	(201.800,00)	98,36		
03.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.299.800,00	12.098.000,00	(201.800,00)	98,36		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	9.933.799.619,00	11.449.639.976,00	1.515.840.357,00	115,26		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	9.933.799.619,00	11.449.639.976,00	1.515.840.357,00	115,26		
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.578.550,00	99.140.000,00	(16.438.550,00)	85,78		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.578.550,00	99.140.000,00	(16.438.550,00)	85,78		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.578.550,00	99.140.000,00	(16.438.550,00)	85,78		
03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9.818.221.069,00	11.350.499.976,00	1.532.278.907,00	115,61		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.818.221.069,00	11.350.499.976,00	1.532.278.907,00	115,61		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.691.093,00	80.970.000,00	(191.721.093,00)	29,69		
03.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	9.545.529.976,00	11.269.529.976,00	1.724.000.000,00	118,06		
04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	3.330.394.406,00	3.284.714.897,00	(45.679.509,00)	98,63		
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.330.394.406,00	3.284.714.897,00	(45.679.509,00)	98,63		
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.403.143.384,00	1.370.481.156,00	(32.662.228,00)	97,67		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.403.143.384,00	1.370.481.156,00	(32.662.228,00)	97,67		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.143.384,00	1.370.481.156,00	(32.662.228,00)	97,67		
04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.927.251.022,00	1.914.233.741,00	(13.017.281,00)	99,32		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.854.436.022,00	1.841.418.741,00	(13.017.281,00)	99,30		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.704.436.022,00	1.691.418.741,00	(13.017.281,00)	99,24		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	72.815.000,00	72.815.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.815.000,00	72.815.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	259.109.299,00	209.088.300,00	(50.020.999,00)	80,70		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.332.200,00	98.854.600,00	(17.477.600,00)	84,98		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.332.200,00	98.854.600,00	(17.477.600,00)	84,98		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	116.332.200,00	98.854.600,00	(17.477.600,00)	84,98		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.332.200,00	98.854.600,00	(17.477.600,00)	84,98		
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	142.777.099,00	110.233.700,00	(32.543.399,00)	77,21		
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	142.777.099,00	110.233.700,00	(32.543.399,00)	77,21		
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	142.777.099,00	110.233.700,00	(32.543.399,00)	77,21		
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.777.099,00	110.233.700,00	(32.543.399,00)	77,21		
04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	55.000.000,00	54.970.000,00	(30.000,00)	99,95		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	54.970.000,00	(30.000,00)	99,95		
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	433.893.470,00	406.964.756,00	(26.928.714,00)	93,79		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	433.893.470,00	406.964.756,00	(26.928.714,00)	93,79		
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	10.006.750,00	9.882.000,00	(124.750,00)	98,75		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.006.750,00	9.882.000,00	(124.750,00)	98,75		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.006.750,00	9.882.000,00	(124.750,00)	98,75		
04.2.01.02	Penyediaan Sandang	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0		
04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.795.000,00	3.810.000,00	(1.985.000,00)	65,75		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.795.000,00	3.810.000,00	(1.985.000,00)	65,75		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	3.810.000,00	(1.985.000,00)	65,75		
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	372.081.720,00	361.372.756,00	(10.708.964,00)	97,12		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	369.581.720,00	358.872.756,00	(10.708.964,00)	97,10		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.581.720,00	358.872.756,00	(10.708.964,00)	97,10		
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	35.000.000,00	24.670.000,00	(10.330.000,00)	70,49		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	24.670.000,00	(10.330.000,00)	70,49		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	24.670.000,00	(10.330.000,00)	70,49		
04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.050.000,00	2.790.000,00	(260.000,00)	91,48		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	2.790.000,00	(260.000,00)	91,48		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	2.790.000,00	(260.000,00)	91,48		
04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	4.560.000,00	4.440.000,00	(120.000,00)	97,37		
04.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	4.560.000,00	4.440.000,00	(120.000,00)	97,37		
04.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.440.000,00	(120.000,00)	97,37		
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		
04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	37.222.960,00	29.822.000,00	(7.400.960,00)	80,12		
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.222.960,00	29.822.000,00	(7.400.960,00)	80,12		
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.222.960,00	29.822.000,00	(7.400.960,00)	80,12		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.222.960,00	29.822.000,00	(7.400.960,00)	80,12		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.222.960,00	29.822.000,00	(7.400.960,00)	80,12		
04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	9.382.000,00	4.130.000,00	(5.252.000,00)	44,02		
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.382.000,00	4.130.000,00	(5.252.000,00)	44,02		
04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.382.000,00	4.130.000,00	(5.252.000,00)	44,02		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.382.000,00	4.130.000,00	(5.252.000,00)	44,02		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.382.000,00	4.130.000,00	(5.252.000,00)	44,02		
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	83.370.000,00	82.610.000,00	(760.000,00)	99,09		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	83.370.000,00	82.610.000,00	(760.000,00)	99,09		
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	16.170.000,00	15.410.000,00	(760.000,00)	95,30		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.170.000,00	15.410.000,00	(760.000,00)	95,30		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.170.000,00	15.410.000,00	(760.000,00)	95,30		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	895.400.000,00	866.912.500,00	(28.487.500,00)	96,82		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	815.400.000,00	805.887.500,00	(9.512.500,00)	98,83		
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	352.440.000,00	(7.560.000,00)	97,90		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	352.440.000,00	(7.560.000,00)	97,90		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	352.440.000,00	(7.560.000,00)	97,90		
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	455.400.000,00	453.447.500,00	(1.952.500,00)	99,57		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	455.400.000,00	453.447.500,00	(1.952.500,00)	99,57		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.400.000,00	453.447.500,00	(1.952.500,00)	99,57		
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80.000.000,00	61.025.000,00	(18.975.000,00)	76,28		
04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80.000.000,00	61.025.000,00	(18.975.000,00)	76,28		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	61.025.000,00	(18.975.000,00)	76,28		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	61.025.000,00	(18.975.000,00)	76,28		
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.049.321.941,00	835.329.501,00	(213.992.440,00)	79,61		
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.049.321.941,00	835.329.501,00	(213.992.440,00)	79,61		
04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000,00	199.840.923,00	(150.159.077,00)	57,10		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0		
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0		
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.840.923,00	(159.077,00)	99,92		
04.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.840.923,00	(159.077,00)	99,92		
04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	699.321.941,00	635.488.578,00	(63.833.363,00)	90,87		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	695.821.941,00	631.988.578,00	(63.833.363,00)	90,83		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.821.941,00	631.988.578,00	(63.833.363,00)	90,83		
04.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.382.307.355,00	3.346.516.418,00	(35.790.937,00)	98,94		
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	52.442.980,00	52.436.480,00	(6.500,00)	99,99		
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	52.442.980,00	52.436.480,00	(6.500,00)	99,99		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.442.980,00	52.436.480,00	(6.500,00)	99,99		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.442.980,00	52.436.480,00	(6.500,00)	99,99		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.329.864.375,00	3.294.079.938,00	(35.784.437,00)	98,93		
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	254.864.375,00	254.864.372,00	(3,00)	100,00		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	254.864.375,00	254.864.372,00	(3,00)	100,00		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.864.375,00	254.864.372,00	(3,00)	100,00		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.075.000.000,00	3.039.215.566,00	(35.784.434,00)	98,84		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.075.000.000,00	3.039.215.566,00	(35.784.434,00)	98,84		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000.000,00	3.039.215.566,00	(35.784.434,00)	98,84		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
04.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
04.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	150.575.000,00	37.905.000,00	(112.670.000,00)	25,17		
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000,00	37.905.000,00	(112.670.000,00)	25,17		
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000,00	37.905.000,00	(112.670.000,00)	25,17		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	148.043.400,00	37.905.000,00	(110.138.400,00)	25,60		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.043.400,00	37.905.000,00	(110.138.400,00)	25,60		
04.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	2.531.600,00	0,00	(2.531.600,00)	0		
04.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.531.600,00	0,00	(2.531.600,00)	0		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.892.000,00	49.042.000,00	(850.000,00)	98,30		
04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	49.892.000,00	49.042.000,00	(850.000,00)	98,30		
04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	39.278.000,00	38.478.000,00	(800.000,00)	97,96		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.278.000,00	38.478.000,00	(800.000,00)	97,96		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.278.000,00	38.478.000,00	(800.000,00)	97,96		
04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	10.614.000,00	10.564.000,00	(50.000,00)	99,53		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.614.000,00	10.564.000,00	(50.000,00)	99,53		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.614.000,00	10.564.000,00	(50.000,00)	99,53		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.482.106.576,00	889.925.675,00	(592.180.901,00)	60,04		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.482.106.576,00	889.925.675,00	(592.180.901,00)	60,04		
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	348.049.429,00	299.263.500,00	(48.785.929,00)	85,98		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	348.049.429,00	299.263.500,00	(48.785.929,00)	85,98		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.049.429,00	299.263.500,00	(48.785.929,00)	85,98		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	205.859.230,00	113.772.575,00	(92.086.655,00)	55,27		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	205.859.230,00	113.772.575,00	(92.086.655,00)	55,27		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.859.230,00	113.772.575,00	(92.086.655,00)	55,27		
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	302.677.350,00	213.775.100,00	(88.902.250,00)	70,63		
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	302.677.350,00	213.775.100,00	(88.902.250,00)	70,63		
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.677.350,00	213.775.100,00	(88.902.250,00)	70,63		
04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	625.520.567,00	263.114.500,00	(362.406.067,00)	42,06		
04.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	625.520.567,00	263.114.500,00	(362.406.067,00)	42,06		
04.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.520.567,00	263.114.500,00	(362.406.067,00)	42,06		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.943.455,00	14.089.300,00	(41.854.155,00)	25,18		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.865.455,00	9.135.300,00	(17.730.155,00)	34,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.830.300,00	3.830.300,00	(1.000.000,00)	79,30		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.830.300,00	3.830.300,00	(1.000.000,00)	79,30		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.300,00	3.830.300,00	(1.000.000,00)	79,30		
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.035.155,00	5.305.000,00	(16.730.155,00)	24,08		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.035.155,00	5.305.000,00	(16.730.155,00)	24,08		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.035.155,00	5.305.000,00	(16.730.155,00)	24,08		
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.078.000,00	4.954.000,00	(24.124.000,00)	17,04		
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	29.078.000,00	4.954.000,00	(24.124.000,00)	17,04		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.078.000,00	4.954.000,00	(24.124.000,00)	17,04		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.078.000,00	4.954.000,00	(24.124.000,00)	17,04		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	661.939.460,00	565.009.000,00	(96.930.460,00)	85,36		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	661.939.460,00	565.009.000,00	(96.930.460,00)	85,36		
04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.262.660,00	0,00	(12.262.660,00)	0		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.262.660,00	0,00	(12.262.660,00)	0		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.262.660,00	0,00	(12.262.660,00)	0		
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	425.515.320,00	425.109.000,00	(406.320,00)	99,90		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	425.515.320,00	425.109.000,00	(406.320,00)	99,90		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.515.320,00	425.109.000,00	(406.320,00)	99,90		
04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	224.161.480,00	139.900.000,00	(84.261.480,00)	62,41		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	224.161.480,00	139.900.000,00	(84.261.480,00)	62,41		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.161.480,00	9.900.000,00	(34.261.480,00)	22,42		
04.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	130.000.000,00	(50.000.000,00)	72,22		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	761.968.705,00	647.158.382,00	(114.810.323,00)	84,93		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.166.000,00	97.250.000,00	(6.916.000,00)	93,36		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	104.166.000,00	97.250.000,00	(6.916.000,00)	93,36		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	104.166.000,00	97.250.000,00	(6.916.000,00)	93,36		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.166.000,00	97.250.000,00	(6.916.000,00)	93,36		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	399.496.800,00	316.303.882,00	(83.192.918,00)	79,18		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	399.496.800,00	316.303.882,00	(83.192.918,00)	79,18		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	399.496.800,00	316.303.882,00	(83.192.918,00)	79,18		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.496.800,00	316.303.882,00	(83.192.918,00)	79,18		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	258.305.905,00	233.604.500,00	(24.701.405,00)	90,44		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	258.305.905,00	233.604.500,00	(24.701.405,00)	90,44		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	258.305.905,00	233.604.500,00	(24.701.405,00)	90,44		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.305.905,00	233.604.500,00	(24.701.405,00)	90,44		
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.497.563.642,00	3.287.310.594,00	(210.253.048,00)	93,99		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.497.563.642,00	3.287.310.594,00	(210.253.048,00)	93,99		
05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	276.066.535,00	225.294.698,00	(50.771.837,00)	81,61		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	276.066.535,00	225.294.698,00	(50.771.837,00)	81,61		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.066.535,00	225.294.698,00	(50.771.837,00)	81,61		
05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.093.499.765,00	2.982.226.896,00	(111.272.869,00)	96,40		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.093.499.765,00	2.982.226.896,00	(111.272.869,00)	96,40		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.093.499.765,00	2.982.226.896,00	(111.272.869,00)	96,40		
05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	127.997.342,00	79.789.000,00	(48.208.342,00)	62,34		
05.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	127.997.342,00	79.789.000,00	(48.208.342,00)	62,34		
05.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.997.342,00	79.789.000,00	(48.208.342,00)	62,34		
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	343.575.000,00	343.316.750,00	(258.250,00)	99,92		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	343.575.000,00	343.316.750,00	(258.250,00)	99,92		
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	31.200.000,00	31.100.000,00	(100.000,00)	99,68		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	31.100.000,00	(100.000,00)	99,68		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.100.000,00	(100.000,00)	99,68		
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	237.375.000,00	237.360.000,00	(15.000,00)	99,99		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	237.375.000,00	237.360.000,00	(15.000,00)	99,99		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.375.000,00	237.360.000,00	(15.000,00)	99,99		
05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	60.000.000,00	59.856.750,00	(143.250,00)	99,76		
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.856.750,00	(143.250,00)	99,76		
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.856.750,00	(143.250,00)	99,76		
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		
05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	42.110.000,00	29.550.000,00	(12.560.000,00)	70,17		
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.110.000,00	29.550.000,00	(12.560.000,00)	70,17		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.110.000,00	29.550.000,00	(12.560.000,00)	70,17		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.110.000,00	29.550.000,00	(12.560.000,00)	70,17		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.110.000,00	29.550.000,00	(12.560.000,00)	70,17		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	169.252.789,00	147.141.000,00	(22.111.789,00)	86,94		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	169.252.789,00	147.141.000,00	(22.111.789,00)	86,94		
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.956.400,00	40.760.000,00	(196.400,00)	99,52		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.956.400,00	40.760.000,00	(196.400,00)	99,52		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.956.400,00	40.760.000,00	(196.400,00)	99,52		
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	128.296.389,00	106.381.000,00	(21.915.389,00)	82,92		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	128.296.389,00	106.381.000,00	(21.915.389,00)	82,92		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.296.389,00	106.381.000,00	(21.915.389,00)	82,92		
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	469.500.000,00	441.977.250,00	(27.522.750,00)	94,14		
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	469.500.000,00	441.977.250,00	(27.522.750,00)	94,14		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	177.619.200,00	173.702.950,00	(3.916.250,00)	97,80		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	177.619.200,00	173.702.950,00	(3.916.250,00)	97,80		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.619.200,00	173.702.950,00	(3.916.250,00)	97,80		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	291.880.800,00	268.274.300,00	(23.606.500,00)	91,91		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	291.880.800,00	268.274.300,00	(23.606.500,00)	91,91		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.880.800,00	268.274.300,00	(23.606.500,00)	91,91		
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		
05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	353.176.000,00	338.041.000,00	(15.135.000,00)	95,71		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	353.176.000,00	338.041.000,00	(15.135.000,00)	95,71		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	74.487.000,00	74.055.000,00	(432.000,00)	99,42		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	74.487.000,00	74.055.000,00	(432.000,00)	99,42		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.487.000,00	74.055.000,00	(432.000,00)	99,42		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	223.234.000,00	211.281.000,00	(11.953.000,00)	94,65		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	223.234.000,00	211.281.000,00	(11.953.000,00)	94,65		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.234.000,00	211.281.000,00	(11.953.000,00)	94,65		
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.990.000,00	1.240.000,00	(2.750.000,00)	31,08		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.990.000,00	1.240.000,00	(2.750.000,00)	31,08		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	1.240.000,00	(2.750.000,00)	31,08		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.465.000,00	39.465.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	39.465.000,00	39.465.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.465.000,00	39.465.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	228.718.440,00	149.671.750,00	(79.046.690,00)	65,44		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	228.718.440,00	149.671.750,00	(79.046.690,00)	65,44		
05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	13.205.030,00	12.000.000,00	(1.205.030,00)	90,87		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.205.030,00	12.000.000,00	(1.205.030,00)	90,87		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.205.030,00	12.000.000,00	(1.205.030,00)	90,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	215.513.410,00	137.671.750,00	(77.841.660,00)	63,88		
	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	215.513.410,00	137.671.750,00	(77.841.660,00)	63,88		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.513.410,00	137.671.750,00	(77.841.660,00)	63,88		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.027.000.000,00	3.989.443.700,00	(37.556.300,00)	99,07		
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.027.000.000,00	3.989.443.700,00	(37.556.300,00)	99,07		
06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,86		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,86		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,86		
06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	893.438.000,00	891.957.400,00	(1.480.600,00)	99,83		
06.2.01.05.2	BELANJA MODAL	893.438.000,00	891.957.400,00	(1.480.600,00)	99,83		
06.2.01.05.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	893.438.000,00	891.957.400,00	(1.480.600,00)	99,83		
06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	157.088.000,00	156.590.930,00	(497.070,00)	99,68		
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	157.088.000,00	156.590.930,00	(497.070,00)	99,68		
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.088.000,00	156.590.930,00	(497.070,00)	99,68		
06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.678.340.000,00	2.648.342.300,00	(29.997.700,00)	98,88		
06.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	2.678.340.000,00	2.648.342.300,00	(29.997.700,00)	98,88		
06.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.678.340.000,00	2.648.342.300,00	(29.997.700,00)	98,88		
06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	228.134.000,00	222.653.070,00	(5.480.930,00)	97,60		
06.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	121.134.000,00	120.274.495,00	(859.505,00)	99,29		
06.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.134.000,00	120.274.495,00	(859.505,00)	99,29		
06.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	107.000.000,00	102.378.575,00	(4.621.425,00)	95,68		
06.2.01.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.000.000,00	102.378.575,00	(4.621.425,00)	95,68		
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	51.800.000,00	51.278.909,00	(521.091,00)	98,99		
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.800.000,00	51.278.909,00	(521.091,00)	98,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51.800.000,00	51.278.909,00	(521.091,00)	98,99		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.478.909,00	(321.091,00)	82,16		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.478.909,00	(321.091,00)	82,16		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60		
06.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60		
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06.2.03.02	Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06.2.03.02.5.1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06.2.03.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	71.370.000,00	68.359.500,00	(3.010.500,00)	95,78		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	71.370.000,00	68.359.500,00	(3.010.500,00)	95,78		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	71.370.000,00	68.359.500,00	(3.010.500,00)	95,78		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.220.000,00	68.359.500,00	(860.500,00)	98,76		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.220.000,00	68.359.500,00	(860.500,00)	98,76		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.513.265,00	21.053.265,00	(14.460.000,00)	59,28		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.513.265,00	21.053.265,00	(14.460.000,00)	59,28		
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.723.265,00	3.813.265,00	(2.910.000,00)	56,72		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.723.265,00	3.813.265,00	(2.910.000,00)	56,72		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.723.265,00	3.813.265,00	(2.910.000,00)	56,72		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0		
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.594.633.400,00	2.506.398.175,00	(88.235.225,00)	96,60		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.594.633.400,00	2.506.398.175,00	(88.235.225,00)	96,60		
06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.768.090,00	0,00	(6.768.090,00)	0		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.768.090,00	0,00	(6.768.090,00)	0		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.768.090,00	0,00	(6.768.090,00)	0		
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.329.040.310,00	2.267.838.595,00	(61.201.715,00)	97,37		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.329.040.310,00	2.267.838.595,00	(61.201.715,00)	97,37		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.079.040.310,00	1.017.838.595,00	(61.201.715,00)	94,33		
06.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	258.825.000,00	238.559.580,00	(20.265.420,00)	92,17		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	258.825.000,00	238.559.580,00	(20.265.420,00)	92,17		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.825.000,00	238.559.580,00	(20.265.420,00)	92,17		
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	317.505.750,00	254.291.855,00	(63.213.895,00)	80,09		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.740.000,00	77.715.000,00	(6.025.000,00)	92,81		
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	83.740.000,00	77.715.000,00	(6.025.000,00)	92,81		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.740.000,00	77.715.000,00	(6.025.000,00)	92,81		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.740.000,00	77.715.000,00	(6.025.000,00)	92,81		
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.467.750,00	140.711.855,00	(55.755.895,00)	71,62		
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	196.467.750,00	140.711.855,00	(55.755.895,00)	71,62		
07.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	196.467.750,00	140.711.855,00	(55.755.895,00)	71,62		
07.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.467.750,00	140.711.855,00	(55.755.895,00)	71,62		
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
07.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
07.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6.260.122.019,00	5.649.304.939,00	(610.817.080,00)	90,24		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	6.260.122.019,00	5.649.304.939,00	(610.817.080,00)	90,24		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	138.711.490,00	130.647.785,00	(8.063.705,00)	94,19		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	138.711.490,00	130.647.785,00	(8.063.705,00)	94,19		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.711.490,00	130.647.785,00	(8.063.705,00)	94,19		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	60.074.000,00	44.725.000,00	(15.349.000,00)	74,45		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.074.000,00	44.725.000,00	(15.349.000,00)	74,45		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.074.000,00	44.725.000,00	(15.349.000,00)	74,45		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.840.950.000,00	2.308.301.974,00	(532.648.026,00)	81,25		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.950.000,00	35.590.000,00	(360.000,00)	99,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	35.590.000,00	(360.000,00)	99,00		
07.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	2.805.000.000,00	2.272.711.974,00	(532.288.026,00)	81,02		
07.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	523.989.600,00	(76.010.400,00)	87,33		
07.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.205.000.000,00	1.748.722.374,00	(456.277.626,00)	79,31		
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3.220.386.529,00	3.165.630.180,00	(54.756.349,00)	98,30		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.220.386.529,00	3.165.630.180,00	(54.756.349,00)	98,30		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.220.386.529,00	3.165.630.180,00	(54.756.349,00)	98,30		
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	90.600.000,00	38.315.000,00	(52.285.000,00)	42,29		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	90.600.000,00	38.315.000,00	(52.285.000,00)	42,29		
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	90.600.000,00	38.315.000,00	(52.285.000,00)	42,29		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.600.000,00	23.375.000,00	(52.225.000,00)	30,92		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	23.375.000,00	(52.225.000,00)	30,92		
08.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.940.000,00	(60.000,00)	99,60		
08.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.940.000,00	(60.000,00)	99,60		
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	318.000.000,00	217.790.000,00	(100.210.000,00)	68,49		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	318.000.000,00	217.790.000,00	(100.210.000,00)	68,49		
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	318.000.000,00	217.790.000,00	(100.210.000,00)	68,49		
09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0		
09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0		
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	218.000.000,00	217.790.000,00	(210.000,00)	99,90		
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.000.000,00	217.790.000,00	(210.000,00)	99,90		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	81.505.633.035,00	78.077.805.997,00	(3.427.827.038,00)	95,79		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	81.505.633.035,00	78.077.805.997,00	(3.427.827.038,00)	95,79		
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.213.550.000,00	1.183.464.704,00	(30.085.296,00)	97,52		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.213.550.000,00	1.183.464.704,00	(30.085.296,00)	97,52		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.550.000,00	1.183.464.704,00	(30.085.296,00)	97,52		
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	625.060.203,00	599.586.813,00	(25.473.390,00)	95,92		
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	625.060.203,00	599.586.813,00	(25.473.390,00)	95,92		
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.060.203,00	599.586.813,00	(25.473.390,00)	95,92		
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	69.397.527.643,00	66.379.711.909,00	(3.017.815.734,00)	95,65		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	778.729.243,00	487.682.413,00	(291.046.830,00)	62,63		
10.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	74.080.000,00	4.080.000,00	(70.000.000,00)	5,51		
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.649.243,00	483.602.413,00	(221.046.830,00)	68,63		
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	68.618.798.400,00	65.892.029.496,00	(2.726.768.904,00)	96,03		
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.618.798.400,00	65.892.029.496,00	(2.726.768.904,00)	96,03		
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	631.488.451,00	478.003.931,00	(153.484.520,00)	75,69		
10.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	478.380.157,00	478.003.931,00	(376.226,00)	99,92		
10.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.380.157,00	478.003.931,00	(376.226,00)	99,92		
10.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	153.108.294,00	0,00	(153.108.294,00)	0		
10.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	0		
10.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.108.294,00	0,00	(100.108.294,00)	0		
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	6.785.421.386,00	6.652.852.711,00	(132.568.675,00)	98,05		
10.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	50.800.000,00	12.800.000,00	(38.000.000,00)	25,20		
10.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	12.800.000,00	(38.000.000,00)	25,20		
10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	6.734.621.386,00	6.640.052.711,00	(94.568.675,00)	98,60		
10.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.655.000,00	78.510.000,00	(12.145.000,00)	86,60		
10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.643.966.386,00	6.561.542.711,00	(82.423.675,00)	98,76		
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	1.887.300.000,00	1.861.357.322,00	(25.942.678,00)	98,63		
10.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	25.700.000,00	3.850.000,00	(21.850.000,00)	14,98		
10.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	3.850.000,00	(21.850.000,00)	14,98		
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	1.861.600.000,00	1.857.507.322,00	(4.092.678,00)	99,78		
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.861.600.000,00	1.857.507.322,00	(4.092.678,00)	99,78		
10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	250.000.000,00	249.263.676,00	(736.324,00)	99,71		
10.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.792.735,00	(207.265,00)	99,59		
10.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.792.735,00	(207.265,00)	99,59		
10.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.470.941,00	(529.059,00)	99,74		
10.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.470.941,00	(529.059,00)	99,74		
10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	495.285.352,00	453.653.781,00	(41.631.571,00)	91,59		
10.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	495.285.352,00	453.653.781,00	(41.631.571,00)	91,59		
10.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.285.352,00	453.653.781,00	(41.631.571,00)	91,59		
10.2.01.26	Pembangunan Jembatan Gantung	220.000.000,00	219.911.150,00	(88.850,00)	99,96		
10.2.01.26.5.2	BELANJA MODAL	220.000.000,00	219.911.150,00	(88.850,00)	99,96		
10.2.01.26.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.000.000,00	219.911.150,00	(88.850,00)	99,96		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	889.403.626,00	675.906.455,00	(213.497.171,00)	76,00		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	779.045.626,00	587.164.110,00	(191.881.516,00)	75,37		
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	779.045.626,00	587.164.110,00	(191.881.516,00)	75,37		
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	779.045.626,00	587.164.110,00	(191.881.516,00)	75,37		
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.045.626,00	587.164.110,00	(191.881.516,00)	75,37		
12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	110.358.000,00	88.742.345,00	(21.615.655,00)	80,41		
12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	110.358.000,00	88.742.345,00	(21.615.655,00)	80,41		
12.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	110.358.000,00	88.742.345,00	(21.615.655,00)	80,41		
12.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.358.000,00	88.742.345,00	(21.615.655,00)	80,41		
	SURPLUS / DEFISIT	(30.677.911.689,00)	14.359.224.121,37	45.037.135.810,37	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.677.911.689,00	30.677.911.688,79	(0,21)	100,00		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.677.911.689,00	30.677.911.688,79	(0,21)	100,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	30.677.911.689,00	30.677.911.688,79	(0,21)	100,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	45.037.135.810,16	45.037.135.810,16	0		

Tilamaja, 23 Agustus 2024
Wakil Bupati BOALEMO
Dr. S. JERMAN KORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
SKPD : 1-01.2-19.2-22.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit Organisasi : 1-01.2-19.2-22.01.001 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1-01.2-19.2-22.01.001.000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	241.439.174,82	241.439.174,82	0		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	241.439.174,82	241.439.174,82	0		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	241.439.174,82	241.439.174,82	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	223.964.638.212,00	214.837.862.392,00	(9.126.775.820,00)	95,92		
00	Non Program	0,00	3.187.999.820,00	3.187.999.820,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	3.187.999.820,00	3.187.999.820,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	3.187.999.820,00	3.187.999.820,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	3.187.999.820,00	3.187.999.820,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	-1.950.674,00	(1.950.674,00)	0		
00.0.00.00.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	3.189.950.494,00	3.189.950.494,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.120.984.202,00	142.771.135.377,00	(4.349.848.825,00)	97,04		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.346.189.578,00	139.032.681.376,00	(4.313.508.202,00)	96,99		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.321.173.033,00	139.032.681.376,00	(4.288.491.657,00)	97,01		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	143.321.173.033,00	139.032.681.376,00	(4.288.491.657,00)	97,01		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	143.321.173.033,00	139.032.681.376,00	(4.288.491.657,00)	97,01		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.016.545,00	0,00	(25.016.545,00)	0		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.016.545,00	0,00	(25.016.545,00)	0		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.016.545,00	0,00	(25.016.545,00)	0		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.700.000,00	10.590.000,00	(110.000,00)	98,97		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.700.000,00	10.590.000,00	(110.000,00)	98,97		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.700.000,00	10.590.000,00	(110.000,00)	98,97		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	10.590.000,00	(110.000,00)	98,97		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.697.500,00	339.499.275,00	(36.198.225,00)	90,37		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.000.000,00	84.000.000,00	(11.000.000,00)	88,42		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	95.000.000,00	84.000.000,00	(11.000.000,00)	88,42		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00		
01.2.06.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	86,67		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.697.500,00	255.499.275,00	(25.198.225,00)	91,02		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	280.697.500,00	255.499.275,00	(25.198.225,00)	91,02		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.697.500,00	255.499.275,00	(25.198.225,00)	91,02		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.388.397.124,00	3.388.364.726,00	(32.398,00)	100,00		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.388.397.124,00	3.388.364.726,00	(32.398,00)	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.388.397.124,00	3.388.364.726,00	(32.398,00)	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.388.397.124,00	3.388.364.726,00	(32.398,00)	100,00		
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.993.348.587,00	64.121.462.682,00	(7.871.885.905,00)	89,07		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.257.641.614,00	35.257.019.294,00	(2.000.622.320,00)	94,63		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	400.001.200,00	399.616.000,00	(385.200,00)	99,90		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	400.001.200,00	399.616.000,00	(385.200,00)	99,90		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.001.200,00	399.616.000,00	(385.200,00)	99,90		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.652.064.665,00	6.095.764.825,00	(556.299.840,00)	91,64		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	379.772.665,00	378.092.000,00	(1.680.665,00)	99,56		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.772.665,00	378.092.000,00	(1.680.665,00)	99,56		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	6.272.292.000,00	5.717.672.825,00	(554.619.175,00)	91,16		
02.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.500.000,00	52.000.000,00	(500.000,00)	99,05		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.219.792.000,00	5.665.672.825,00	(554.119.175,00)	91,09		
02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	740.000.000,00	739.436.000,00	(564.000,00)	99,92		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	740.000.000,00	739.436.000,00	(564.000,00)	99,92		
02.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	740.000.000,00	739.436.000,00	(564.000,00)	99,92		
02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	1.000.000.000,00	999.326.200,00	(673.800,00)	99,93		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	999.326.200,00	(673.800,00)	99,93		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	999.326.200,00	(673.800,00)	99,93		
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.242.333.600,00	1.239.579.600,00	(2.754.000,00)	99,78		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	628.033.600,00	626.763.800,00	(1.269.800,00)	99,80		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.033.600,00	626.763.800,00	(1.269.800,00)	99,80		
02.2.01.21.5.2	BELANJA MODAL	614.300.000,00	612.815.800,00	(1.484.200,00)	99,76		
02.2.01.21.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	614.300.000,00	612.815.800,00	(1.484.200,00)	99,76		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	775.000.000,00	873.659.332,00	98.659.332,00	112,73		
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	775.000.000,00	873.659.332,00	98.659.332,00	112,73		
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	475.000.000,00	574.493.332,00	99.493.332,00	120,95		
02.2.01.22.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	299.166.000,00	(834.000,00)	99,72		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	124.645.224,00	124.411.640,00	(233.584,00)	99,81		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	124.645.224,00	124.411.640,00	(233.584,00)	99,81		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.645.224,00	124.411.640,00	(233.584,00)	99,81		
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.684.196.494,00	7.871.635.712,00	(1.812.560.782,00)	81,28		
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	9.684.196.494,00	7.871.635.712,00	(1.812.560.782,00)	81,28		
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.684.196.494,00	7.871.635.712,00	(1.812.560.782,00)	81,28		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	148.998.000,00	148.338.589,00	(659.411,00)	99,56		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	148.998.000,00	148.338.589,00	(659.411,00)	99,56		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.998.000,00	148.338.589,00	(659.411,00)	99,56		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.859.916.799,00	14.162.296.561,00	302.379.762,00	102,18		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	9.263.353.961,00	9.737.929.841,00	474.575.880,00	105,12		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.263.353.961,00	9.737.929.841,00	474.575.880,00	105,12		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	4.596.562.838,00	4.424.366.720,00	(172.196.118,00)	96,25		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.527.819.297,00	2.414.215.231,00	(113.604.066,00)	95,51		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.068.743.541,00	2.010.151.489,00	(58.592.052,00)	97,17		
02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	782.500.000,00	781.782.550,00	(717.450,00)	99,91		
02.2.01.32.5.2	BELANJA MODAL	782.500.000,00	781.782.550,00	(717.450,00)	99,91		
02.2.01.32.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	782.500.000,00	781.782.550,00	(717.450,00)	99,91		
02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.296.377.989,00	1.277.547.285,00	(18.830.704,00)	98,55		
02.2.01.38.5.1	BELANJA OPERASI	1.263.877.989,00	1.248.547.285,00	(15.330.704,00)	98,79		
02.2.01.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.263.877.989,00	1.248.547.285,00	(15.330.704,00)	98,79		
02.2.01.38.5.2	BELANJA MODAL	32.500.000,00	29.000.000,00	(3.500.000,00)	89,23		
02.2.01.38.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.500.000,00	29.000.000,00	(3.500.000,00)	89,23		
02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	551.607.643,00	543.625.000,00	(7.982.643,00)	98,55		
02.2.01.40.5.1	BELANJA OPERASI	386.607.643,00	383.625.000,00	(2.982.643,00)	99,23		
02.2.01.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.607.643,00	383.625.000,00	(2.982.643,00)	99,23		
02.2.01.40.5.2	BELANJA MODAL	165.000.000,00	160.000.000,00	(5.000.000,00)	96,97		
02.2.01.40.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.000.000,00	160.000.000,00	(5.000.000,00)	96,97		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.999.164.781,00	21.312.323.468,00	(2.686.841.313,00)	88,80		
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	380.000.001,00	303.984.000,00	(76.016.001,00)	80,00		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	380.000.001,00	303.984.000,00	(76.016.001,00)	80,00		
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.001,00	303.984.000,00	(76.016.001,00)	80,00		
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.156.568.000,00	925.152.500,00	(231.415.500,00)	79,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	1.156.568.000,00	925.152.500,00	(231.415.500,00)	79,99		
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.156.568.000,00	925.152.500,00	(231.415.500,00)	79,99		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	6.231.336.899,00	4.960.888.700,00	(1.270.448.199,00)	79,61		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	6.231.336.899,00	4.960.888.700,00	(1.270.448.199,00)	79,61		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.231.336.899,00	4.960.888.700,00	(1.270.448.199,00)	79,61		
02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.844.137.100,00	1.587.003.750,00	(257.133.350,00)	86,06		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	135.602.100,00	104.870.500,00	(30.731.600,00)	77,34		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.602.100,00	104.870.500,00	(30.731.600,00)	77,34		
02.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	1.708.535.000,00	1.482.133.250,00	(226.401.750,00)	86,75		
02.2.02.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.708.535.000,00	1.482.133.250,00	(226.401.750,00)	86,75		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.178.250.000,00	1.152.745.350,00	(25.504.650,00)	97,84		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	50.705.000,00	(24.295.000,00)	67,61		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	50.705.000,00	(24.295.000,00)	67,61		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	1.103.250.000,00	1.102.040.350,00	(1.209.650,00)	99,89		
02.2.02.12.5.2.01	Belanja Modal Tanah	82.250.000,00	82.239.300,00	(10.700,00)	99,99		
02.2.02.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	946.000.000,00	944.801.050,00	(1.198.950,00)	99,87		
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	550.000.000,00	546.360.800,00	(3.639.200,00)	99,34		
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	550.000.000,00	546.360.800,00	(3.639.200,00)	99,34		
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	546.360.800,00	(3.639.200,00)	99,34		
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	694.818.075,00	692.052.600,00	(2.765.475,00)	99,60		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	371.822.075,00	370.491.400,00	(1.330.675,00)	99,64		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.822.075,00	370.491.400,00	(1.330.675,00)	99,64		
02.2.02.32.5.2	BELANJA MODAL	322.996.000,00	321.561.200,00	(1.434.800,00)	99,56		
02.2.02.32.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	322.996.000,00	321.561.200,00	(1.434.800,00)	99,56		
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	475.000.000,00	574.040.000,00	99.040.000,00	120,85		
02.2.02.35.5.2	BELANJA MODAL	475.000.000,00	574.040.000,00	99.040.000,00	120,85		
02.2.02.35.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	199.648.000,00	99.648.000,00	199,65		
02.2.02.35.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	375.000.000,00	374.392.000,00	(608.000,00)	99,84		
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	168.351.753,00	167.510.829,00	(840.924,00)	99,50		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	168.351.753,00	167.510.829,00	(840.924,00)	99,50		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.351.753,00	167.510.829,00	(840.924,00)	99,50		
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.194.765.151,00	1.635.425.000,00	(559.340.151,00)	74,51		
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	2.194.765.151,00	1.635.425.000,00	(559.340.151,00)	74,51		
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.194.765.151,00	1.635.425.000,00	(559.340.151,00)	74,51		
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300.144.730,00	296.805.200,00	(3.339.530,00)	98,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	240.144.730,00	236.805.200,00	(3.339.530,00)	98,61		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.144.730,00	236.805.200,00	(3.339.530,00)	98,61		
02.2.02.41.5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.41.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.637.680.835,00	7.083.032.602,00	(554.648.233,00)	92,74		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	5.810.466.865,00	5.304.907.757,00	(505.559.108,00)	91,30		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.810.466.865,00	5.304.907.757,00	(505.559.108,00)	91,30		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	1.827.213.970,00	1.778.124.845,00	(49.089.125,00)	97,31		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	987.364.170,00	954.010.645,00	(33.353.525,00)	96,62		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	839.849.800,00	824.114.200,00	(15.735.600,00)	98,13		
02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	941.365.419,00	1.149.248.637,00	207.883.218,00	122,08		
02.2.02.51.5.1	BELANJA OPERASI	941.365.419,00	1.149.248.637,00	207.883.218,00	122,08		
02.2.02.51.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	941.365.419,00	1.149.248.637,00	207.883.218,00	122,08		
02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	246.746.818,00	238.073.500,00	(8.673.318,00)	96,48		
02.2.02.53.5.1	BELANJA OPERASI	246.746.818,00	238.073.500,00	(8.673.318,00)	96,48		
02.2.02.53.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.746.818,00	238.073.500,00	(8.673.318,00)	96,48		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.800.796.852,00	6.918.019.512,00	(2.882.777.340,00)	70,59		
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	429.135.000,00	428.357.400,00	(777.600,00)	99,82		
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	429.135.000,00	428.357.400,00	(777.600,00)	99,82		
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	429.135.000,00	428.357.400,00	(777.600,00)	99,82		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	337.692.200,00	330.751.620,00	(6.940.580,00)	97,94		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	215.277.200,00	215.094.720,00	(182.480,00)	99,92		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.277.200,00	215.094.720,00	(182.480,00)	99,92		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	122.415.000,00	115.656.900,00	(6.758.100,00)	94,48		
02.2.03.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.540.000,00	12.278.000,00	(262.000,00)	97,91		
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.875.000,00	103.378.900,00	(6.496.100,00)	94,09		
02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	564.950.000,00	563.877.450,00	(1.072.550,00)	99,81		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	564.950.000,00	563.877.450,00	(1.072.550,00)	99,81		
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	564.950.000,00	563.877.450,00	(1.072.550,00)	99,81		
02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	600.000.000,00	598.860.000,00	(1.140.000,00)	99,81		
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	600.000.000,00	598.860.000,00	(1.140.000,00)	99,81		
02.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	598.860.000,00	(1.140.000,00)	99,81		
02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.386.600.000,00	1.383.180.000,00	(3.420.000,00)	99,75		
02.2.03.12.5.2	BELANJA MODAL	1.386.600.000,00	1.383.180.000,00	(3.420.000,00)	99,75		
02.2.03.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.386.600.000,00	1.383.180.000,00	(3.420.000,00)	99,75		
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	433.699.990,00	430.644.411,00	(3.055.579,00)	99,30		
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	344.887.790,00	341.986.411,00	(2.901.379,00)	99,16		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.887.790,00	341.986.411,00	(2.901.379,00)	99,16		
02.2.03.13.5.2	BELANJA MODAL	88.812.200,00	88.658.000,00	(154.200,00)	99,83		
02.2.03.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.13.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.812.200,00	80.658.000,00	(154.200,00)	99,81		
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	37.350.000,00	34.350.000,00	(3.000.000,00)	91,97		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	37.350.000,00	34.350.000,00	(3.000.000,00)	91,97		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.350.000,00	34.350.000,00	(3.000.000,00)	91,97		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	44.592.000,00	32.957.980,00	(11.634.020,00)	73,91		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	44.592.000,00	32.957.980,00	(11.634.020,00)	73,91		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.592.000,00	32.957.980,00	(11.634.020,00)	73,91		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.768.470.000,00	2.046.316.593,00	(2.722.153.407,00)	42,91		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	4.768.470.000,00	1.422.880.093,00	(3.345.589.907,00)	29,84		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.768.470.000,00	1.422.880.093,00	(3.345.589.907,00)	29,84		
02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	0,00	623.436.500,00	623.436.500,00	0		
02.2.03.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	456.947.500,00	456.947.500,00	0		
02.2.03.18.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	166.489.000,00	166.489.000,00	0		
02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	654.994.443,00	543.583.058,00	(111.411.385,00)	82,99		
02.2.03.25.5.1	BELANJA OPERASI	520.994.443,00	414.601.058,00	(106.393.385,00)	79,58		
02.2.03.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.994.443,00	414.601.058,00	(106.393.385,00)	79,58		
02.2.03.25.5.2	BELANJA MODAL	134.000.000,00	128.982.000,00	(5.018.000,00)	96,26		
02.2.03.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.000.000,00	128.982.000,00	(5.018.000,00)	96,26		
02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	543.313.219,00	525.141.000,00	(18.172.219,00)	96,66		
02.2.03.27.5.1	BELANJA OPERASI	543.313.219,00	525.141.000,00	(18.172.219,00)	96,66		
02.2.03.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.313.219,00	525.141.000,00	(18.172.219,00)	96,66		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	935.745.340,00	634.100.408,00	(301.644.932,00)	67,76		
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	89.218.350,00	88.553.160,00	(665.190,00)	99,25		
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	89.218.350,00	88.553.160,00	(665.190,00)	99,25		
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.218.350,00	88.553.160,00	(665.190,00)	99,25		
02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	380.256.990,00	378.467.248,00	(1.789.742,00)	99,53		
02.2.04.13.5.1	BELANJA OPERASI	380.256.990,00	378.467.248,00	(1.789.742,00)	99,53		
02.2.04.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.256.990,00	378.467.248,00	(1.789.742,00)	99,53		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	466.270.000,00	167.080.000,00	(299.190.000,00)	35,83		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	466.270.000,00	67.942.000,00	(398.328.000,00)	14,57		
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.270.000,00	67.942.000,00	(398.328.000,00)	14,57		
02.2.04.17.5.2	BELANJA MODAL	0,00	99.138.000,00	99.138.000,00	0		
02.2.04.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	25.980.000,00	25.980.000,00	0		
02.2.04.17.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	73.158.000,00	73.158.000,00	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	241.069.000,00	240.919.000,00	(150.000,00)	99,94		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	241.069.000,00	240.919.000,00	(150.000,00)	99,94		
02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	215.369.000,00	215.219.000,00	(150.000,00)	99,93		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	215.369.000,00	215.219.000,00	(150.000,00)	99,93		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.369.000,00	215.219.000,00	(150.000,00)	99,93		
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	304.272.585,00	280.656.000,00	(23.616.585,00)	92,24		
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	52.287.260,00	46.502.000,00	(5.785.260,00)	88,94		
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	52.287.260,00	46.502.000,00	(5.785.260,00)	88,94		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.287.260,00	46.502.000,00	(5.785.260,00)	88,94		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.287.260,00	46.502.000,00	(5.785.260,00)	88,94		
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.985.325,00	234.154.000,00	(17.831.325,00)	92,92		
02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	251.985.325,00	234.154.000,00	(17.831.325,00)	92,92		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	193.985.325,00	177.114.000,00	(16.871.325,00)	91,30		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.985.325,00	177.114.000,00	(16.871.325,00)	91,30		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	58.000.000,00	57.040.000,00	(960.000,00)	98,34		
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.040.000,00	(960.000,00)	97,60		
02.2.03.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	50.283.899,00	43.234.500,00	(7.049.399,00)	85,98		
03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	50.283.899,00	43.234.500,00	(7.049.399,00)	85,98		
03.2.02.05	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.283.899,00	43.234.500,00	(7.049.399,00)	85,98		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	26.283.899,00	19.234.500,00	(7.049.399,00)	73,18		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.283.899,00	19.234.500,00	(7.049.399,00)	73,18		
03.2.02.05.5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	513.007.298,00	496.507.298,00	(16.500.000,00)	96,78		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	513.007.298,00	496.507.298,00	(16.500.000,00)	96,78		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	85.727.484,00	85.727.484,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.727.484,00	85.727.484,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.727.484,00	85.727.484,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	160.803.580,00	144.303.580,00	(16.500.000,00)	89,74		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	160.803.580,00	144.303.580,00	(16.500.000,00)	89,74		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.803.580,00	144.303.580,00	(16.500.000,00)	89,74		
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	266.476.234,00	266.476.234,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.857.349,00	34.857.349,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.857.349,00	34.857.349,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	231.618.885,00	231.618.885,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	231.618.885,00	231.618.885,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	3.330.394.406,00	3.284.714.897,00	(45.679.509,00)	98,63		
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.330.394.406,00	3.284.714.897,00	(45.679.509,00)	98,63		
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.403.143.384,00	1.370.481.156,00	(32.662.228,00)	97,67		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.403.143.384,00	1.370.481.156,00	(32.662.228,00)	97,67		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.143.384,00	1.370.481.156,00	(32.662.228,00)	97,67		
04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.927.251.022,00	1.914.233.741,00	(13.017.281,00)	99,32		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.854.436.022,00	1.841.418.741,00	(13.017.281,00)	99,30		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.704.436.022,00	1.691.418.741,00	(13.017.281,00)	99,24		
04.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	72.815.000,00	72.815.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.815.000,00	72.815.000,00	0,00	100,00		





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Kesehatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	83.267.000,00	95.547.000,00	12.280.000,00	114,75		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.267.000,00	95.547.000,00	12.280.000,00	114,75		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	83.267.000,00	95.547.000,00	12.280.000,00	114,75		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	45.832.620.373,00	43.498.575.402,00	(2.334.044.971,00)	94,91		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.625.833.215,00	15.949.766.693,00	(676.066.522,00)	95,93		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.192.774.344,00	13.580.498.997,00	(612.275.347,00)	95,69		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.192.774.344,00	13.580.498.997,00	(612.275.347,00)	95,69		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.192.774.344,00	13.580.498.997,00	(612.275.347,00)	95,69		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	14.192.774.344,00	13.580.498.997,00	(612.275.347,00)	95,69		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.058.871,00	482.558.438,00	(56.500.433,00)	89,52		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	539.058.871,00	482.558.438,00	(56.500.433,00)	89,52		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	501.058.871,00	464.668.438,00	(36.390.433,00)	92,74		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.058.871,00	464.668.438,00	(36.390.433,00)	92,74		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	38.000.000,00	17.890.000,00	(20.110.000,00)	47,08		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0		
01.2.06.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.000.000,00	17.890.000,00	(110.000,00)	99,39		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.000.000,00	1.886.709.258,00	(7.290.742,00)	99,62		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.894.000.000,00	1.886.709.258,00	(7.290.742,00)	99,62		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.894.000.000,00	1.886.709.258,00	(7.290.742,00)	99,62		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.894.000.000,00	1.886.709.258,00	(7.290.742,00)	99,62		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.593.675.915,00	24.236.892.721,00	(1.356.783.194,00)	94,70		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.126.833.416,00	11.717.723.473,00	(409.109.943,00)	96,63		
02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	5.734.059.735,00	5.732.096.250,00	(1.963.485,00)	99,97		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	143.153.485,00	141.835.000,00	(1.318.485,00)	99,08		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.153.485,00	141.835.000,00	(1.318.485,00)	99,08		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	5.590.906.250,00	5.590.261.250,00	(645.000,00)	99,99		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.825.000,00	388.480.000,00	(345.000,00)	99,91		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.527.081.250,00	4.527.081.250,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	675.000.000,00	674.700.000,00	(300.000,00)	99,96		
02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	728.162.187,00	727.491.169,00	(671.018,00)	99,91		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.800.000,00	(200.000,00)	99,44		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.800.000,00	(200.000,00)	99,44		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	692.162.187,00	691.691.169,00	(471.018,00)	99,93		
02.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	501.000.000,00	500.666.562,00	(333.438,00)	99,93		
02.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.162.187,00	146.024.607,00	(137.580,00)	99,91		
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.377.642.729,00	2.078.000.000,00	(299.642.729,00)	87,40		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	2.377.642.729,00	2.078.000.000,00	(299.642.729,00)	87,40		
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.377.642.729,00	2.078.000.000,00	(299.642.729,00)	87,40		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	687.784.000,00	595.764.000,00	(92.020.000,00)	86,62		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	687.784.000,00	595.764.000,00	(92.020.000,00)	86,62		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	687.784.000,00	595.764.000,00	(92.020.000,00)	86,62		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	924.213.000,00	911.153.920,00	(13.059.080,00)	98,59		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	924.213.000,00	911.153.920,00	(13.059.080,00)	98,59		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	924.213.000,00	911.153.920,00	(13.059.080,00)	98,59		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.570.107.765,00	1.568.951.112,00	(1.156.653,00)	99,93		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.570.107.765,00	1.568.951.112,00	(1.156.653,00)	99,93		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.107.765,00	1.568.951.112,00	(1.156.653,00)	99,93		
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	52.105.000,00	51.892.522,00	(212.478,00)	99,59		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	52.105.000,00	51.892.522,00	(212.478,00)	99,59		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.105.000,00	51.892.522,00	(212.478,00)	99,59		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	52.759.000,00	52.374.500,00	(384.500,00)	99,27		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	52.759.000,00	52.374.500,00	(384.500,00)	99,27		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.759.000,00	52.374.500,00	(384.500,00)	99,27		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.508.475.781,00	10.577.890.912,00	(930.584.869,00)	91,91		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	181.840.000,00	181.585.000,00	(255.000,00)	99,86		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	181.840.000,00	181.585.000,00	(255.000,00)	99,86		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.840.000,00	181.585.000,00	(255.000,00)	99,86		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	56.151.704,00	0,00	(56.151.704,00)	0		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.151.704,00	0,00	(56.151.704,00)	0		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.151.704,00	0,00	(56.151.704,00)	0		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	102.220.300,00	98.375.000,00	(3.845.300,00)	96,24		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	102.220.300,00	98.375.000,00	(3.845.300,00)	96,24		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.220.300,00	98.375.000,00	(3.845.300,00)	96,24		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	156.499.200,00	150.692.000,00	(5.807.200,00)	96,29		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	156.499.200,00	150.692.000,00	(5.807.200,00)	96,29		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.499.200,00	150.692.000,00	(5.807.200,00)	96,29		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	254.580.000,00	0,00	(254.580.000,00)	0		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	254.580.000,00	0,00	(254.580.000,00)	0		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.580.000,00	0,00	(254.580.000,00)	0		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	196.010.000,00	194.295.500,00	(1.714.500,00)	99,13		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	196.010.000,00	194.295.500,00	(1.714.500,00)	99,13		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.010.000,00	194.295.500,00	(1.714.500,00)	99,13		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.002.600,00	8.606.000,00	(396.600,00)	95,59		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	9.002.600,00	8.606.000,00	(396.600,00)	95,59		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.002.600,00	8.606.000,00	(396.600,00)	95,59		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	57.794.115,00	57.784.000,00	(10.115,00)	99,98		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	57.794.115,00	57.784.000,00	(10.115,00)	99,98		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.794.115,00	57.784.000,00	(10.115,00)	99,98		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	114.286.670,00	96.396.810,00	(17.889.860,00)	84,35		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	114.286.670,00	96.396.810,00	(17.889.860,00)	84,35		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.286.670,00	96.396.810,00	(17.889.860,00)	84,35		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.580.000,00	29.550.000,00	(30.000,00)	99,90		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	29.580.000,00	29.550.000,00	(30.000,00)	99,90		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.580.000,00	29.550.000,00	(30.000,00)	99,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	567.358.692,00	555.416.150,00	(11.942.542,00)	97,90		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	567.358.692,00	555.416.150,00	(11.942.542,00)	97,90		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.358.692,00	555.416.150,00	(11.942.542,00)	97,90		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.632.512.500,00	9.054.666.602,00	(577.845.898,00)	94,00		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	9.632.512.500,00	9.054.666.602,00	(577.845.898,00)	94,00		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	5.799.872.500,00	5.734.863.106,00	(65.009.394,00)	98,88		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.682.640.000,00	3.169.803.496,00	(512.836.504,00)	86,07		
02.2.02.26.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	137.000.000,00	136.883.850,00	(116.150,00)	99,92		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	137.000.000,00	136.883.850,00	(116.150,00)	99,92		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.000.000,00	136.883.850,00	(116.150,00)	99,92		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.349.881.713,00	1.336.594.336,00	(13.287.377,00)	99,02		
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.349.881.713,00	1.336.594.336,00	(13.287.377,00)	99,02		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.293.881.713,00	1.281.094.336,00	(12.787.377,00)	99,01		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.293.881.713,00	1.281.094.336,00	(12.787.377,00)	99,01		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	56.000.000,00	55.500.000,00	(500.000,00)	99,11		
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	608.485.005,00	604.684.000,00	(3.801.005,00)	99,38		
02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.470.000,00	188.410.000,00	(60.000,00)	99,97		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	188.470.000,00	188.410.000,00	(60.000,00)	99,97		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.470.000,00	188.410.000,00	(60.000,00)	99,97		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	420.015.005,00	416.274.000,00	(3.741.005,00)	99,11		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	420.015.005,00	416.274.000,00	(3.741.005,00)	99,11		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.015.005,00	416.274.000,00	(3.741.005,00)	99,11		
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.087.760.039,00	2.863.239.188,00	(224.520.851,00)	92,73		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.042.011.960,00	1.847.820.500,00	(194.191.460,00)	90,49		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.879.900.000,00	1.687.716.500,00	(192.183.500,00)	89,78		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.879.900.000,00	1.687.716.500,00	(192.183.500,00)	89,78		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.879.900.000,00	1.687.716.500,00	(192.183.500,00)	89,78		
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	162.111.960,00	160.104.000,00	(2.007.960,00)	98,76		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	162.111.960,00	160.104.000,00	(2.007.960,00)	98,76		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.111.960,00	160.104.000,00	(2.007.960,00)	98,76		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.045.748.079,00	1.015.418.688,00	(30.329.391,00)	97,10		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.045.748.079,00	1.015.418.688,00	(30.329.391,00)	97,10		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.045.748.079,00	1.015.418.688,00	(30.329.391,00)	97,10		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.045.748.079,00	1.015.418.688,00	(30.329.391,00)	97,10		
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	259.109.299,00	209.088.300,00	(50.020.999,00)	80,70		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.332.200,00	98.854.600,00	(17.477.600,00)	84,98		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.332.200,00	98.854.600,00	(17.477.600,00)	84,98		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	116.332.200,00	98.854.600,00	(17.477.600,00)	84,98		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.332.200,00	98.854.600,00	(17.477.600,00)	84,98		
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	142.777.099,00	110.233.700,00	(32.543.399,00)	77,21		
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	142.777.099,00	110.233.700,00	(32.543.399,00)	77,21		
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	142.777.099,00	110.233.700,00	(32.543.399,00)	77,21		
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.777.099,00	110.233.700,00	(32.543.399,00)	77,21		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	266.241.905,00	239.588.500,00	(26.653.405,00)	89,99		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.956.000,00	69.040.000,00	(2.916.000,00)	95,95		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	71.956.000,00	69.040.000,00	(2.916.000,00)	95,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	71.956.000,00	69.040.000,00	(2.916.000,00)	95,95		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.956.000,00	69.040.000,00	(2.916.000,00)	95,95		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	194.285.905,00	170.548.500,00	(23.737.405,00)	87,78		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	194.285.905,00	170.548.500,00	(23.737.405,00)	87,78		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	194.285.905,00	170.548.500,00	(23.737.405,00)	87,78		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.285.905,00	170.548.500,00	(23.737.405,00)	87,78		
	SURPLUS / DEFISIT	(45.749.353.373,00)	(43.403.028.402,00)	2.346.324.971,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-202.001.846.170,30	(202.001.846.170,30)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-202.001.846.170,30	(202.001.846.170,30)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(202.001.846.170,30)	(202.001.846.170,30)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(45.749.353.373,00)	(245.404.874.572,30)	(199.655.521.199,30)	0		



Tikunguta, 23 Agustus 2024
BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.001 Rumah Sakit Tani dan Nelayan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.001.000 Rumah Sakit Tani dan Nelayan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	24.000.000.000,00	28.993.595.447,00	4.993.595.447,00	120,81		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.000.000.000,00	28.993.595.447,00	4.993.595.447,00	120,81		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.000.000.000,00	28.993.595.447,00	4.993.595.447,00	120,81		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	47.869.854.400,00	49.805.400.145,00	1.935.545.745,00	104,04		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.186.701.492,00	46.437.267.830,00	2.250.566.338,00	105,09		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.797.067.994,00	18.579.476.580,00	(217.591.414,00)	98,84		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.797.067.994,00	18.579.476.580,00	(217.591.414,00)	98,84		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.797.067.994,00	18.579.476.580,00	(217.591.414,00)	98,84		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	18.797.067.994,00	18.579.476.580,00	(217.591.414,00)	98,84		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.165.177.548,00	1.162.629.997,00	(2.547.551,00)	99,78		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.003.548,00	328.858.548,00	(145.000,00)	99,96		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	329.003.548,00	328.858.548,00	(145.000,00)	99,96		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.003.548,00	328.858.548,00	(145.000,00)	99,96		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	836.174.000,00	833.771.449,00	(2.402.551,00)	99,71		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	836.174.000,00	833.771.449,00	(2.402.551,00)	99,71		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.174.000,00	833.771.449,00	(2.402.551,00)	99,71		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.455.950,00	219.448.892,00	(5.007.058,00)	97,77		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.455.950,00	219.448.892,00	(5.007.058,00)	97,77		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	224.455.950,00	219.448.892,00	(5.007.058,00)	97,77		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.455.950,00	219.448.892,00	(5.007.058,00)	97,77		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	24.000.000.000,00	26.475.712.361,00	2.475.712.361,00	110,32		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.000.000.000,00	26.475.712.361,00	2.475.712.361,00	110,32		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.335.869.910,00	25.992.622.643,00	2.656.752.733,00	111,38		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	13.816.431.133,00	13.816.431.133,00	0		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.335.869.910,00	12.176.191.510,00	(11.159.678.400,00)	52,18		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	664.130.090,00	483.089.718,00	(181.040.372,00)	72,74		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	644.130.090,00	483.089.718,00	(161.040.372,00)	75,00		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	804.215.908,00	490.788.779,00	(313.427.129,00)	61,03		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	698.506.795,00	394.489.850,00	(304.016.945,00)	56,48		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	697.661.795,00	393.644.850,00	(304.016.945,00)	56,42		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	697.661.795,00	393.644.850,00	(304.016.945,00)	56,42		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.661.795,00	393.644.850,00	(304.016.945,00)	56,42		
02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	845.000,00	845.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	845.000,00	845.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	845.000,00	845.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.709.113,00	96.298.929,00	(9.410.184,00)	91,10		
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	105.709.113,00	96.298.929,00	(9.410.184,00)	91,10		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	105.709.113,00	96.298.929,00	(9.410.184,00)	91,10		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.709.113,00	96.298.929,00	(9.410.184,00)	91,10		
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.878.937.000,00	2.877.343.536,00	(1.593.464,00)	99,94		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.809.925.000,00	2.858.525.000,00	48.600.000,00	101,73		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.809.925.000,00	2.858.525.000,00	48.600.000,00	101,73		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.809.925.000,00	2.858.525.000,00	48.600.000,00	101,73		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.809.925.000,00	2.858.525.000,00	48.600.000,00	101,73		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.012.000,00	18.818.536,00	(50.193.464,00)	27,27		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.012.000,00	18.818.536,00	(50.193.464,00)	27,27		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.012.000,00	18.818.536,00	(50.193.464,00)	27,27		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.012.000,00	18.818.536,00	(50.193.464,00)	27,27		
	SURPLUS / DEFISIT	(23.869.854.400,00)	(20.811.804.698,00)	3.058.049.702,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	540.736.670,00	-170.599.535.657,00	(171.140.272.327,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	540.736.670,00	-170.599.535.657,00	(171.140.272.327,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	540.736.670,00	(170.599.535.657,00)	(171.140.272.327,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(23.329.117.730,00)	(191.411.340.355,00)	(168.082.222.625,00)	0		



Tilamuta, 23 Agustus 2024
P. BUPATI BOALEMO
Dr.SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.002 Rumah Sakit Iwan Bokings
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.002.000 Rumah Sakit Iwan Bokings

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	4.631.102.150,00	6.203.243.389,00	1.572.141.239,00	133,95		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.631.102.150,00	5.783.246.289,00	1.152.144.139,00	124,88		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	352.658.150,00	360.049.992,00	7.391.842,00	102,10		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.278.444.000,00	5.423.196.297,00	1.144.752.297,00	126,76		
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.626.221.207,00	10.404.662.352,00	778.441.145,00	108,09		
00	Non Program	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
00.0.00.00.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	419.997.100,00	419.997.100,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.787.593.656,00	6.321.970.281,00	534.376.625,00	109,23		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.300.535.656,00	1.092.884.502,00	(207.651.154,00)	84,03		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.300.535.656,00	1.092.884.502,00	(207.651.154,00)	84,03		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.535.656,00	1.092.884.502,00	(207.651.154,00)	84,03		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.535.656,00	1.092.884.502,00	(207.651.154,00)	84,03		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.742.000,00	42.742.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.742.000,00	42.742.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	42.742.000,00	42.742.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.742.000,00	42.742.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.872.000,00	162.667.734,00	(3.204.266,00)	98,07		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.512.000,00	39.407.734,00	(104.266,00)	99,74		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.512.000,00	39.407.734,00	(104.266,00)	99,74		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.512.000,00	39.407.734,00	(104.266,00)	99,74		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.360.000,00	123.260.000,00	(3.100.000,00)	97,55		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	126.360.000,00	123.260.000,00	(3.100.000,00)	97,55		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	121.900.000,00	(3.100.000,00)	97,52		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.278.444.000,00	5.023.676.045,00	745.232.045,00	117,42		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.278.444.000,00	5.023.676.045,00	745.232.045,00	117,42		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.062.361.434,00	4.733.528.345,00	671.166.911,00	116,52		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.907.424.901,00	3.257.418.391,00	349.993.490,00	112,04		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.936.533,00	1.476.109.954,00	321.173.421,00	127,81		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	216.082.566,00	290.147.700,00	74.065.134,00	134,28		
01.2.10.01.5.2.01	Belanja Modal Tanah	216.082.566,00	0,00	(216.082.566,00)	0		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	230.197.700,00	230.197.700,00	0		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	59.950.000,00	59.950.000,00	0		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.827.992.620,00	1.653.822.968,00	(174.169.652,00)	90,47		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.431.014.036,00	1.279.861.370,00	(151.152.666,00)	89,44		
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	200.000.000,00	199.753.000,00	(247.000,00)	99,88		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.753.000,00	(247.000,00)	99,88		
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.753.000,00	(247.000,00)	99,88		
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	676.609.020,00	531.026.042,00	(145.582.978,00)	78,48		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	676.609.020,00	531.026.042,00	(145.582.978,00)	78,48		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.609.020,00	531.026.042,00	(145.582.978,00)	78,48		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	292.886.289,00	291.554.328,00	(1.331.961,00)	99,55		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	292.886.289,00	291.554.328,00	(1.331.961,00)	99,55		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.886.289,00	291.554.328,00	(1.331.961,00)	99,55		
02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	61.518.727,00	57.828.000,00	(3.690.727,00)	94,00		
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	61.518.727,00	57.828.000,00	(3.690.727,00)	94,00		
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.518.727,00	57.828.000,00	(3.690.727,00)	94,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	396.978.584,00	373.961.598,00	(23.016.986,00)	94,20		
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	396.978.584,00	373.961.598,00	(23.016.986,00)	94,20		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	396.978.584,00	373.961.598,00	(23.016.986,00)	94,20		
02.2.02.32.5.1.01	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.178.584,00	367.161.598,00	(23.016.986,00)	94,10		
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.010.634.931,00	2.008.872.003,00	(1.762.928,00)	99,91		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.010.634.931,00	2.008.872.003,00	(1.762.928,00)	99,91		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.010.634.931,00	2.008.872.003,00	(1.762.928,00)	99,91		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.010.634.931,00	2.008.872.003,00	(1.762.928,00)	99,91		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	531.304.931,00	531.292.003,00	(12.928,00)	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.479.330.000,00	1.477.580.000,00	(1.750.000,00)	99,88		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.995.119.057,00)	(4.201.418.963,00)	793.700.094,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-13.989.048.781,00	(13.989.048.781,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-13.989.048.781,00	(13.989.048.781,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(13.989.048.781,00)	(13.989.048.781,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.995.119.057,00)	(18.190.467.744,00)	(13.195.348.687,00)	0		



Tanaraja, 23 Agustus 2024
PI. BUPATI BOALEMO

Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.003 Puskesmas Paguyaman
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.003.000 Puskesmas Paguyaman

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.561.793.183,00	1.427.152.647,00	(134.640.536,00)	91,38		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.561.793.183,00	1.427.152.647,00	(134.640.536,00)	91,38		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	50.010.000,00	59.937.500,00	9.927.500,00	119,85		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.511.783.183,00	1.367.215.147,00	(144.568.036,00)	90,44		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.656.064.338,00	5.294.139.468,00	(361.924.870,00)	93,60		
00	Non Program	0,00	2.417.299,00	2.417.299,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	2.417.299,00	2.417.299,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	2.417.299,00	2.417.299,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	2.417.299,00	2.417.299,00	0		
00.0.00.00.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.828.336,00	1.828.336,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	588.963,00	588.963,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.372.521.346,00	4.125.326.008,00	(247.195.338,00)	94,35		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.841.712.845,00	2.821.399.045,00	(20.313.800,00)	99,29		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.841.712.845,00	2.821.399.045,00	(20.313.800,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.841.712.845,00	2.821.399.045,00	(20.313.800,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.841.712.845,00	2.821.399.045,00	(20.313.800,00)	99,29		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.530.808.501,00	1.303.926.963,00	(226.881.538,00)	85,18		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.530.808.501,00	1.303.926.963,00	(226.881.538,00)	85,18		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.452.564.501,00	1.280.658.946,00	(171.905.555,00)	88,17		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	563.572.834,00	481.021.294,00	(82.551.540,00)	85,35		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	888.991.667,00	799.637.652,00	(89.354.015,00)	89,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	78.244.000,00	23.268.017,00	(54.975.983,00)	29,74		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.244.000,00	23.268.017,00	(54.975.983,00)	29,74		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.148.326.992,00	1.084.006.161,00	(64.320.831,00)	94,40		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.728.397,00	0,00	(17.728.397,00)	0		
02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.728.397,00	0,00	(17.728.397,00)	0		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	17.728.397,00	0,00	(17.728.397,00)	0		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.728.397,00	0,00	(17.728.397,00)	0		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.130.598.595,00	1.084.006.161,00	(46.592.434,00)	95,88		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	113.820.000,00	137.515.000,00	23.695.000,00	120,82		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	113.820.000,00	137.515.000,00	23.695.000,00	120,82		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.820.000,00	137.515.000,00	23.695.000,00	120,82		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.340.000,00	26.790.000,00	(5.550.000,00)	82,84		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.340.000,00	26.790.000,00	(5.550.000,00)	82,84		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.340.000,00	26.790.000,00	(5.550.000,00)	82,84		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.635.000,00	14.620.000,00	(15.000,00)	99,90		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	14.635.000,00	14.620.000,00	(15.000,00)	99,90		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.635.000,00	14.620.000,00	(15.000,00)	99,90		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.880.000,00	34.880.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	34.880.000,00	34.880.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.880.000,00	34.880.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.720.000,00	11.160.000,00	(560.000,00)	95,22		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	11.720.000,00	11.160.000,00	(560.000,00)	95,22		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.720.000,00	11.160.000,00	(560.000,00)	95,22		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.760.000,00	17.680.000,00	(80.000,00)	99,55		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	17.760.000,00	17.680.000,00	(80.000,00)	99,55		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	17.680.000,00	(80.000,00)	99,55		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	27.750.000,00	20.040.000,00	(7.710.000,00)	72,22		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	27.750.000,00	20.040.000,00	(7.710.000,00)	72,22		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	20.040.000,00	(7.710.000,00)	72,22		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.000.000,00	18.560.000,00	10.560.000,00	232,00		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	18.560.000,00	10.560.000,00	232,00		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	18.560.000,00	10.560.000,00	232,00		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200.805.000,00	131.753.400,00	(69.051.600,00)	65,61		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	200.805.000,00	131.753.400,00	(69.051.600,00)	65,61		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.805.000,00	131.753.400,00	(69.051.600,00)	65,61		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54.674.355,00	42.115.000,00	(12.559.355,00)	77,03		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	54.674.355,00	42.115.000,00	(12.559.355,00)	77,03		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.674.355,00	42.115.000,00	(12.559.355,00)	77,03		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.595.000,00	1.320.000,00	(275.000,00)	82,76		
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	1.595.000,00	1.320.000,00	(275.000,00)	82,76		
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	1.320.000,00	(275.000,00)	82,76		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128.340.000,00	135.465.000,00	7.125.000,00	105,55		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	128.340.000,00	135.465.000,00	7.125.000,00	105,55		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.340.000,00	135.465.000,00	7.125.000,00	105,55		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	0		
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	0		
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	0		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12.000.000,00	8.640.000,00	(3.360.000,00)	72,00		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	8.640.000,00	(3.360.000,00)	72,00		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.640.000,00	(3.360.000,00)	72,00		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	400.529.240,00	360.017.761,00	(40.511.479,00)	89,89		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	400.529.240,00	360.017.761,00	(40.511.479,00)	89,89		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	138.430.194,00	130.999.147,00	(7.431.047,00)	94,63		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.099.046,00	229.018.614,00	(33.080.432,00)	87,38		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	135.216.000,00	82.390.000,00	(52.826.000,00)	60,93		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.216.000,00	82.390.000,00	(52.826.000,00)	60,93		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	135.216.000,00	82.390.000,00	(52.826.000,00)	60,93		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	135.216.000,00	82.390.000,00	(52.826.000,00)	60,93		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.216.000,00	82.390.000,00	(52.826.000,00)	60,93		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.094.271.155,00)	(3.866.986.821,00)	227.284.334,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.025.318,00	-12.905.921.290,00	(12.924.946.608,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.025.318,00	-12.905.921.290,00	(12.924.946.608,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	19.025.318,00	(12.905.921.290,00)	(12.924.946.608,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.075.245.837,00)	(16.772.908.111,00)	(12.697.662.274,00)	0		

Boalemo, 23 Agustus 2024
BUPATI BOALEMO
B. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.004 Puskesmas Tilamuta
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.004.000 Puskesmas Tilamuta

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.524.196.399,00	2.054.756.084,00	(469.440.315,00)	81,40		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.524.196.399,00	2.054.756.084,00	(469.440.315,00)	81,40		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	50.064.000,00	54.542.000,00	4.478.000,00	108,94		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.474.132.399,00	2.000.214.084,00	(473.918.315,00)	80,85		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.507.796.955,00	5.732.158.640,00	(775.638.315,00)	88,08		
00	Non Program	0,00	-27.001,00	(27.001,00)	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	-27.001,00	(27.001,00)	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	-27.001,00	(27.001,00)	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	-27.001,00	(27.001,00)	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	-27.001,00	(27.001,00)	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.939.873.863,00	3.148.092.845,00	(1.791.781.018,00)	63,73		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.465.730.367,00	2.454.820.660,00	(10.909.707,00)	99,56		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.465.730.367,00	2.454.820.660,00	(10.909.707,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.465.730.367,00	2.454.820.660,00	(10.909.707,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.465.730.367,00	2.454.820.660,00	(10.909.707,00)	99,56		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.474.143.496,00	693.272.185,00	(1.780.871.311,00)	28,02		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.474.143.496,00	693.272.185,00	(1.780.871.311,00)	28,02		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.443.567.496,00	690.428.435,00	(1.753.139.061,00)	28,25		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.136.790.380,00	337.565.063,00	(799.225.317,00)	29,69		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.777.116,00	352.863.372,00	(953.913.744,00)	27,00		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	30.576.000,00	2.843.750,00	(27.732.250,00)	9,30		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.576.000,00	2.843.750,00	(27.732.250,00)	9,30		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.477.462.292,00	2.497.924.396,00	1.020.462.104,00	169,07		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.477.462.292,00	2.497.924.396,00	1.020.462.104,00	169,07		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	136.225.000,00	133.997.000,00	(2.228.000,00)	98,36		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	136.225.000,00	133.997.000,00	(2.228.000,00)	98,36		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.225.000,00	133.997.000,00	(2.228.000,00)	98,36		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	54.170.000,00	52.325.000,00	(1.845.000,00)	96,59		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	54.170.000,00	52.325.000,00	(1.845.000,00)	96,59		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.170.000,00	52.325.000,00	(1.845.000,00)	96,59		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.680.000,00	21.680.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.680.000,00	21.680.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.680.000,00	21.680.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	26.640.000,00	26.625.000,00	(15.000,00)	99,94		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	26.640.000,00	26.625.000,00	(15.000,00)	99,94		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.640.000,00	26.625.000,00	(15.000,00)	99,94		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.980.000,00	18.450.000,00	(530.000,00)	97,21		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	18.980.000,00	18.450.000,00	(530.000,00)	97,21		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.980.000,00	18.450.000,00	(530.000,00)	97,21		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.040.000,00	32.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	32.040.000,00	32.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.040.000,00	32.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.040.000,00	8.640.000,00	(2.400.000,00)	78,26		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	11.040.000,00	8.640.000,00	(2.400.000,00)	78,26		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	8.640.000,00	(2.400.000,00)	78,26		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	24.400.000,00	20.640.000,00	(3.760.000,00)	84,59		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	24.400.000,00	20.640.000,00	(3.760.000,00)	84,59		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	20.640.000,00	(3.760.000,00)	84,59		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	188.705.000,00	122.385.750,00	(66.319.250,00)	64,86		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	188.705.000,00	122.385.750,00	(66.319.250,00)	64,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.705.000,00	122.385.750,00	(66.319.250,00)	64,86		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	40.670.000,00	37.790.000,00	(2.880.000,00)	92,92		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	40.670.000,00	37.790.000,00	(2.880.000,00)	92,92		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.670.000,00	37.790.000,00	(2.880.000,00)	92,92		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	83.684.000,00	82.070.900,00	(1.613.100,00)	98,07		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	83.684.000,00	82.070.900,00	(1.613.100,00)	98,07		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.684.000,00	82.070.900,00	(1.613.100,00)	98,07		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	32.632.000,00	32.380.000,00	(252.000,00)	99,23		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	32.632.000,00	32.380.000,00	(252.000,00)	99,23		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.632.000,00	32.380.000,00	(252.000,00)	99,23		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.680.000,00	12.320.000,00	(3.360.000,00)	78,57		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	15.680.000,00	12.320.000,00	(3.360.000,00)	78,57		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.680.000,00	12.320.000,00	(3.360.000,00)	78,57		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	241.480.000,00	236.920.000,00	(4.560.000,00)	98,11		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	241.480.000,00	236.920.000,00	(4.560.000,00)	98,11		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.480.000,00	236.920.000,00	(4.560.000,00)	98,11		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	1.211.881.095,00	1.211.881.095,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.189.881.095,00	1.189.881.095,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	629.010.848,00	629.010.848,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	560.870.247,00	560.870.247,00	0		
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0		
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	16.560.000,00	10.240.000,00	(6.320.000,00)	61,84		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	16.560.000,00	10.240.000,00	(6.320.000,00)	61,84		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00	10.240.000,00	(6.320.000,00)	61,84		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	513.196.292,00	417.859.651,00	(95.336.641,00)	81,42		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	448.096.292,00	353.609.651,00	(94.486.641,00)	78,91		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	153.615.557,00	191.355.406,00	37.739.849,00	124,57		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.480.735,00	162.254.245,00	(132.226.490,00)	55,10		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	65.100.000,00	64.250.000,00	(850.000,00)	98,69		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.100.000,00	64.250.000,00	(850.000,00)	98,69		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	90.460.800,00	86.168.400,00	(4.292.400,00)	95,25		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.510.800,00	56.498.400,00	(4.012.400,00)	93,37		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.510.800,00	56.498.400,00	(4.012.400,00)	93,37		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.510.800,00	56.498.400,00	(4.012.400,00)	93,37		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.510.800,00	56.498.400,00	(4.012.400,00)	93,37		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.950.000,00	29.670.000,00	(280.000,00)	99,07		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29.950.000,00	29.670.000,00	(280.000,00)	99,07		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.950.000,00	29.670.000,00	(280.000,00)	99,07		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000,00	29.670.000,00	(280.000,00)	99,07		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.983.600.556,00)	(3.677.402.556,00)	306.198.000,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.097,00	-10.996.593.715,00	(10.996.604.812,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.097,00	-10.996.593.715,00	(10.996.604.812,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	11.097,00	(10.996.593.715,00)	(10.996.604.812,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.983.589.459,00)	(14.673.996.271,00)	(10.690.406.812,00)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
P. BUPATI BOALEMO

P. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.005 Puskesmas Dulupi
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.005.000 Puskesmas Dulupi

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	814.950.000,00	794.507.266,00	(20.442.734,00)	97,49		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	814.950.000,00	794.507.266,00	(20.442.734,00)	97,49		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	16.950.000,00	17.022.500,00	72.500,00	100,43		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	798.000.000,00	777.484.766,00	(20.515.234,00)	97,43		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.227.684.076,00	2.999.997.087,00	(227.686.989,00)	92,95		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.235.408.076,00	1.660.273.738,00	(575.134.338,00)	74,27		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.435.538.756,00	1.430.051.465,00	(5.487.291,00)	99,62		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.538.756,00	1.430.051.465,00	(5.487.291,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.435.538.756,00	1.430.051.465,00	(5.487.291,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.435.538.756,00	1.430.051.465,00	(5.487.291,00)	99,62		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	799.869.320,00	230.222.273,00	(569.647.047,00)	28,78		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	799.869.320,00	230.222.273,00	(569.647.047,00)	28,78		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	772.869.320,00	230.222.273,00	(542.647.047,00)	29,79		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	374.296.932,00	143.758.597,00	(230.538.335,00)	38,41		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.572.388,00	86.463.676,00	(312.108.712,00)	21,69		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	0		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	0		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	862.781.000,00	1.219.637.867,00	356.856.867,00	141,36		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	862.781.000,00	1.219.637.867,00	356.856.867,00	141,36		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.361.000,00	58.369.000,00	(992.000,00)	98,33		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	59.361.000,00	58.369.000,00	(992.000,00)	98,33		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.361.000,00	58.369.000,00	(992.000,00)	98,33		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.160.000,00	1.800.000,00	(360.000,00)	83,33		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	1.800.000,00	(360.000,00)	83,33		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	1.800.000,00	(360.000,00)	83,33		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.260.000,00	3.960.000,00	(300.000,00)	92,96		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.260.000,00	3.960.000,00	(300.000,00)	92,96		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	3.960.000,00	(300.000,00)	92,96		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34.495.000,00	25.970.000,00	(8.525.000,00)	75,29		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.495.000,00	25.970.000,00	(8.525.000,00)	75,29		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.495.000,00	25.970.000,00	(8.525.000,00)	75,29		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.360.000,00	19.560.000,00	(1.800.000,00)	91,57		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.360.000,00	19.560.000,00	(1.800.000,00)	91,57		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000,00	19.560.000,00	(1.800.000,00)	91,57		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	37.090.000,00	28.710.000,00	(8.380.000,00)	77,41		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	37.090.000,00	28.710.000,00	(8.380.000,00)	77,41		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.090.000,00	28.710.000,00	(8.380.000,00)	77,41		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.800.000,00	9.840.000,00	(960.000,00)	91,11		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	9.840.000,00	(960.000,00)	91,11		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	9.840.000,00	(960.000,00)	91,11		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.200.000,00	6.960.000,00	(240.000,00)	96,67		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	6.960.000,00	(240.000,00)	96,67		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	6.960.000,00	(240.000,00)	96,67		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	125.971.000,00	69.280.468,00	(56.690.532,00)	55,00		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	125.971.000,00	69.280.468,00	(56.690.532,00)	55,00		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.971.000,00	69.280.468,00	(56.690.532,00)	55,00		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.900.000,00	33.640.000,00	(260.000,00)	99,23		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	33.900.000,00	33.640.000,00	(260.000,00)	99,23		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	33.640.000,00	(260.000,00)	99,23		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.280.000,00	14.400.000,00	(2.880.000,00)	83,33		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	17.280.000,00	14.400.000,00	(2.880.000,00)	83,33		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	14.400.000,00	(2.880.000,00)	83,33		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	75.480.000,00	76.250.000,00	770.000,00	101,02		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	75.480.000,00	76.250.000,00	770.000,00	101,02		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.480.000,00	76.250.000,00	770.000,00	101,02		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	497.746.643,00	497.746.643,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	470.762.643,00	470.762.643,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	240.680.601,00	240.680.601,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	230.082.042,00	230.082.042,00	0		
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	0,00	26.984.000,00	26.984.000,00	0		
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	26.984.000,00	26.984.000,00	0		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	11.160.000,00	7.200.000,00	(3.960.000,00)	64,52		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	11.160.000,00	7.200.000,00	(3.960.000,00)	64,52		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	7.200.000,00	(3.960.000,00)	64,52		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	359.264.000,00	302.951.756,00	(56.312.244,00)	84,33		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	349.264.000,00	293.001.756,00	(56.262.244,00)	83,89		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	82.515.000,00	108.282.686,00	25.767.686,00	131,23		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.749.000,00	184.719.070,00	(82.029.930,00)	69,25		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	129.495.000,00	120.085.482,00	(9.409.518,00)	92,73		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.495.000,00	120.085.482,00	(9.409.518,00)	92,73		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	129.495.000,00	120.085.482,00	(9.409.518,00)	92,73		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	129.495.000,00	120.085.482,00	(9.409.518,00)	92,73		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.495.000,00	120.085.482,00	(9.409.518,00)	92,73		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.412.734.076,00)	(2.205.489.821,00)	207.244.255,00	0		
	PEMBIAYAAN						



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.869.320,00	-5.976.444.271,00	(5.978.313.591,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.869.320,00	-5.976.444.271,00	(5.978.313.591,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	1.869.320,00	(5.976.444.271,00)	(5.978.313.591,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.410.864.756,00)	(8.181.934.092,00)	(5.771.069.336,00)	0		



Tilamuta, 23 Agustus 2024

B. BUPATI BOALEMO

D. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.006 Puskesmas Mananggu
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.006.000 Puskesmas Mananggu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.308.468.600,00	2.003.771.494,00	(304.697.106,00)	86,80		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.308.468.600,00	2.003.771.494,00	(304.697.106,00)	86,80		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	42.933.600,00	59.788.400,00	16.854.800,00	139,26		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.265.535.000,00	1.943.983.094,00	(321.551.906,00)	85,81		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.710.586.719,00	5.208.266.605,00	(502.320.114,00)	91,20		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.526.950.969,00	3.351.552.558,00	(1.175.398.411,00)	74,04		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.259.508.140,00	2.250.778.238,00	(8.729.902,00)	99,61		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.259.508.140,00	2.250.778.238,00	(8.729.902,00)	99,61		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.259.508.140,00	2.250.778.238,00	(8.729.902,00)	99,61		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.259.508.140,00	2.250.778.238,00	(8.729.902,00)	99,61		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.267.442.829,00	1.100.774.320,00	(1.166.668.509,00)	48,55		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.267.442.829,00	1.100.774.320,00	(1.166.668.509,00)	48,55		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.117.442.829,00	1.016.143.398,00	(1.101.299.431,00)	47,99		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.207.699.600,00	591.878.396,00	(615.821.204,00)	49,01		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.743.229,00	424.265.002,00	(485.478.227,00)	46,64		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	84.630.922,00	(65.369.078,00)	56,42		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	84.630.922,00	(65.369.078,00)	56,42		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.183.635.750,00	1.856.714.047,00	673.078.297,00	156,87		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.183.635.750,00	1.856.714.047,00	673.078.297,00	156,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95.639.300,00	86.600.000,00	(9.039.300,00)	90,55		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	95.639.300,00	86.600.000,00	(9.039.300,00)	90,55		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.639.300,00	86.600.000,00	(9.039.300,00)	90,55		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	35.103.950,00	34.560.000,00	(543.950,00)	98,45		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.103.950,00	34.560.000,00	(543.950,00)	98,45		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.103.950,00	34.560.000,00	(543.950,00)	98,45		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.480.000,00	20.840.000,00	(2.640.000,00)	88,76		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	23.480.000,00	20.840.000,00	(2.640.000,00)	88,76		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.480.000,00	20.840.000,00	(2.640.000,00)	88,76		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	38.520.000,00	33.320.000,00	(5.200.000,00)	86,50		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	38.520.000,00	33.320.000,00	(5.200.000,00)	86,50		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.520.000,00	33.320.000,00	(5.200.000,00)	86,50		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.600.000,00	960.000,00	(2.640.000,00)	26,67		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	960.000,00	(2.640.000,00)	26,67		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	960.000,00	(2.640.000,00)	26,67		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	57.900.000,00	55.800.000,00	(2.100.000,00)	96,37		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	57.900.000,00	55.800.000,00	(2.100.000,00)	96,37		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.900.000,00	55.800.000,00	(2.100.000,00)	96,37		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	164.063.000,00	82.973.780,00	(81.089.220,00)	50,57		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	164.063.000,00	82.973.780,00	(81.089.220,00)	50,57		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.063.000,00	82.973.780,00	(81.089.220,00)	50,57		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.560.000,00	6.240.000,00	(320.000,00)	95,12		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	6.560.000,00	6.240.000,00	(320.000,00)	95,12		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	6.240.000,00	(320.000,00)	95,12		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56.772.000,00	48.170.000,00	(8.602.000,00)	84,85		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	56.772.000,00	48.170.000,00	(8.602.000,00)	84,85		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.772.000,00	48.170.000,00	(8.602.000,00)	84,85		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	95.837.500,00	94.240.000,00	(1.597.500,00)	98,33		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	95.837.500,00	94.240.000,00	(1.597.500,00)	98,33		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.837.500,00	94.240.000,00	(1.597.500,00)	98,33		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	62.600.000,00	58.640.000,00	(3.960.000,00)	93,67		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	62.600.000,00	58.640.000,00	(3.960.000,00)	93,67		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.600.000,00	58.640.000,00	(3.960.000,00)	93,67		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60.560.000,00	60.160.000,00	(400.000,00)	99,34		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	60.560.000,00	60.160.000,00	(400.000,00)	99,34		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.560.000,00	60.160.000,00	(400.000,00)	99,34		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	842.280.541,00	842.280.541,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	842.280.541,00	842.280.541,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	498.547.187,00	498.547.187,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	343.733.354,00	343.733.354,00	0		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	400.080.000,00	349.009.726,00	(51.070.274,00)	87,23		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	348.080.000,00	297.009.726,00	(51.070.274,00)	85,33		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	166.420.000,00	126.557.416,00	(39.862.584,00)	76,05		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.660.000,00	170.452.310,00	(11.207.690,00)	93,83		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.402.118.119,00)	(3.204.495.111,00)	197.623.008,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.907.829,00	-8.404.039.286,20	(8.405.947.115,20)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.907.829,00	-8.404.039.286,20	(8.405.947.115,20)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	1.907.829,00	(8.404.039.286,20)	(8.405.947.115,20)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.400.210.290,00)	(11.608.534.397,20)	(8.208.324.107,20)	0		





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.007 Puskesmas Botumoito
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.007.000 Puskesmas Botumoito

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.430.375.884,00	1.183.726.925,00	(246.648.959,00)	82,76		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.430.375.884,00	1.183.726.925,00	(246.648.959,00)	82,76		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	11.802.000,00	12.629.000,00	827.000,00	107,01		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.418.573.884,00	1.171.097.925,00	(247.475.959,00)	82,55		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.708.779.914,00	4.184.941.364,00	(523.838.550,00)	88,88		
00	Non Program	0,00	-4.130.800,00	(4.130.800,00)	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	-4.130.800,00	(4.130.800,00)	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	-4.130.800,00	(4.130.800,00)	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	-4.130.800,00	(4.130.800,00)	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	-4.130.800,00	(4.130.800,00)	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.428.763.914,00	2.441.375.807,00	(987.388.107,00)	71,20		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.992.819.410,00	1.985.234.076,00	(7.585.334,00)	99,62		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.992.819.410,00	1.985.234.076,00	(7.585.334,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.992.819.410,00	1.985.234.076,00	(7.585.334,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.992.819.410,00	1.985.234.076,00	(7.585.334,00)	99,62		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.435.944.504,00	456.141.731,00	(979.802.773,00)	31,77		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.435.944.504,00	456.141.731,00	(979.802.773,00)	31,77		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.372.975.104,00	428.591.731,00	(944.383.373,00)	31,22		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	611.154.000,00	219.432.735,00	(391.721.265,00)	35,90		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.821.104,00	209.158.996,00	(552.662.108,00)	27,46		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	62.969.400,00	27.550.000,00	(35.419.400,00)	43,75		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.969.400,00	27.550.000,00	(35.419.400,00)	43,75		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.280.016.000,00	1.747.696.357,00	467.680.357,00	136,54		
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN						
	MASYARAKAT						
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.280.016.000,00	1.747.696.357,00	467.680.357,00	136,54		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.610.000,00	36.430.000,00	(180.000,00)	99,51		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.610.000,00	36.430.000,00	(180.000,00)	99,51		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.610.000,00	36.430.000,00	(180.000,00)	99,51		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.760.000,00	15.560.000,00	(200.000,00)	98,73		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.760.000,00	15.560.000,00	(200.000,00)	98,73		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.760.000,00	15.560.000,00	(200.000,00)	98,73		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.526.000,00	17.446.000,00	(80.000,00)	99,54		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.526.000,00	17.446.000,00	(80.000,00)	99,54		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.526.000,00	17.446.000,00	(80.000,00)	99,54		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.260.000,00	1.100.000,00	(160.000,00)	87,30		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.260.000,00	1.100.000,00	(160.000,00)	87,30		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.100.000,00	(160.000,00)	87,30		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	34.880.000,00	2.160.000,00	(32.720.000,00)	6,19		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	34.880.000,00	2.160.000,00	(32.720.000,00)	6,19		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.880.000,00	2.160.000,00	(32.720.000,00)	6,19		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.561.000,00	176.590.000,00	(61.971.000,00)	74,02		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	238.561.000,00	176.590.000,00	(61.971.000,00)	74,02		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.561.000,00	176.590.000,00	(61.971.000,00)	74,02		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	47.520.000,00	43.920.000,00	(3.600.000,00)	92,42		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	47.520.000,00	43.920.000,00	(3.600.000,00)	92,42		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.520.000,00	43.920.000,00	(3.600.000,00)	92,42		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	74.385.000,00	74.005.000,00	(380.000,00)	99,49		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	74.385.000,00	74.005.000,00	(380.000,00)	99,49		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.385.000,00	74.005.000,00	(380.000,00)	99,49		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	52.736.000,00	51.988.000,00	(748.000,00)	98,58		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	52.736.000,00	51.988.000,00	(748.000,00)	98,58		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.736.000,00	51.988.000,00	(748.000,00)	98,58		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	111.720.000,00	90.480.000,00	(21.240.000,00)	80,99		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	111.720.000,00	90.480.000,00	(21.240.000,00)	80,99		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.720.000,00	90.480.000,00	(21.240.000,00)	80,99		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156.110.000,00	120.944.000,00	(35.166.000,00)	77,47		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	156.110.000,00	120.944.000,00	(35.166.000,00)	77,47		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.110.000,00	120.944.000,00	(35.166.000,00)	77,47		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	677.910.051,00	677.910.051,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	677.910.051,00	677.910.051,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	361.101.774,00	361.101.774,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	316.808.277,00	316.808.277,00	0		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	423.538.000,00	369.753.306,00	(53.784.694,00)	87,30		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	423.538.000,00	369.753.306,00	(53.784.694,00)	87,30		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	109.807.800,00	147.123.024,00	37.315.224,00	133,98		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.730.200,00	222.630.282,00	(91.099.918,00)	70,96		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.278.404.030,00)	(3.001.214.439,00)	277.189.591,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.370.620,00	-8.914.994.070,00	(8.932.364.690,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.370.620,00	-8.914.994.070,00	(8.932.364.690,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	17.370.620,00	(8.914.994.070,00)	(8.932.364.690,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.261.033.410,00)	(11.916.208.509,00)	(8.655.175.099,00)	0		

Tanggal: 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
Dr.SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.008 Puskesmas Paguyaman Pantai
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.008.000 Puskesmas Paguyaman Pantai

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	680.996.330,00	676.352.221,00	(4.644.109,00)	99,32		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	680.996.330,00	676.352.221,00	(4.644.109,00)	99,32		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	8.898.000,00	9.894.500,00	996.500,00	111,20		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	672.098.330,00	666.457.721,00	(5.640.609,00)	99,16		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.640.385.629,00	2.408.742.854,00	(231.642.775,00)	91,23		
00	Non Program	0,00	-2.400.000,00	(2.400.000,00)	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	-2.400.000,00	(2.400.000,00)	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	-2.400.000,00	(2.400.000,00)	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	-2.400.000,00	(2.400.000,00)	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	-2.400.000,00	(2.400.000,00)	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.686.419.208,00	1.341.531.577,00	(344.887.631,00)	79,55		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.013.251.328,00	1.009.259.757,00	(3.991.571,00)	99,61		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.013.251.328,00	1.009.259.757,00	(3.991.571,00)	99,61		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.013.251.328,00	1.009.259.757,00	(3.991.571,00)	99,61		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.013.251.328,00	1.009.259.757,00	(3.991.571,00)	99,61		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	673.167.880,00	332.271.820,00	(340.896.060,00)	49,36		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	673.167.880,00	332.271.820,00	(340.896.060,00)	49,36		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	653.480.080,00	319.096.981,00	(334.383.099,00)	48,83		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	262.997.749,00	153.234.173,00	(109.763.576,00)	58,26		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.482.331,00	165.862.808,00	(224.619.523,00)	42,48		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	19.687.800,00	13.174.839,00	(6.512.961,00)	66,92		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.687.800,00	13.174.839,00	(6.512.961,00)	66,92		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	822.554.421,00	960.657.460,00	138.103.039,00	116,79		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	822.554.421,00	960.657.460,00	138.103.039,00	116,79		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.645.960,00	31.125.000,00	(1.520.960,00)	95,34		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.645.960,00	31.125.000,00	(1.520.960,00)	95,34		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.645.960,00	31.125.000,00	(1.520.960,00)	95,34		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.445.000,00	7.427.000,00	(2.018.000,00)	78,63		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.445.000,00	7.427.000,00	(2.018.000,00)	78,63		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.445.000,00	7.427.000,00	(2.018.000,00)	78,63		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.110.000,00	120.000,00	(8.990.000,00)	1,32		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.110.000,00	120.000,00	(8.990.000,00)	1,32		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.110.000,00	120.000,00	(8.990.000,00)	1,32		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	47.350.000,00	45.140.000,00	(2.210.000,00)	95,33		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	47.350.000,00	45.140.000,00	(2.210.000,00)	95,33		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.350.000,00	45.140.000,00	(2.210.000,00)	95,33		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.704.000,00	19.344.000,00	640.000,00	103,42		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	18.704.000,00	19.344.000,00	640.000,00	103,42		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.704.000,00	19.344.000,00	640.000,00	103,42		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	18.880.000,00	18.400.000,00	(480.000,00)	97,46		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	18.880.000,00	18.400.000,00	(480.000,00)	97,46		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.880.000,00	18.400.000,00	(480.000,00)	97,46		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.465.000,00	16.448.000,00	(17.000,00)	99,90		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	16.465.000,00	16.448.000,00	(17.000,00)	99,90		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.465.000,00	16.448.000,00	(17.000,00)	99,90		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.560.000,00	19.400.000,00	(1.160.000,00)	94,36		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.560.000,00	19.400.000,00	(1.160.000,00)	94,36		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.560.000,00	19.400.000,00	(1.160.000,00)	94,36		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	10.370.000,00	(430.000,00)	96,02		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.370.000,00	(430.000,00)	96,02		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.370.000,00	(430.000,00)	96,02		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.420.000,00	2.490.000,00	(5.930.000,00)	29,57		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	8.420.000,00	2.490.000,00	(5.930.000,00)	29,57		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	2.490.000,00	(5.930.000,00)	29,57		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	131.298.000,00	91.013.000,00	(40.285.000,00)	69,32		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	131.298.000,00	91.013.000,00	(40.285.000,00)	69,32		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.298.000,00	91.013.000,00	(40.285.000,00)	69,32		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.120.000,00	14.480.000,00	(640.000,00)	95,77		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	15.120.000,00	14.480.000,00	(640.000,00)	95,77		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	14.480.000,00	(640.000,00)	95,77		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.600.000,00	16.870.000,00	(730.000,00)	95,85		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	17.600.000,00	16.870.000,00	(730.000,00)	95,85		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	16.870.000,00	(730.000,00)	95,85		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	98.659.000,00	55.508.000,00	(43.151.000,00)	56,26		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	98.659.000,00	55.508.000,00	(43.151.000,00)	56,26		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.659.000,00	55.508.000,00	(43.151.000,00)	56,26		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.840.000,00	29.520.000,00	(4.320.000,00)	87,23		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	33.840.000,00	29.520.000,00	(4.320.000,00)	87,23		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.840.000,00	29.520.000,00	(4.320.000,00)	87,23		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.246.220,00	83.681.220,00	(17.565.000,00)	82,65		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	101.246.220,00	83.681.220,00	(17.565.000,00)	82,65		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.246.220,00	83.681.220,00	(17.565.000,00)	82,65		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	276.641.851,00	276.641.851,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	276.641.851,00	276.641.851,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	108.414.370,00	108.414.370,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	168.227.481,00	168.227.481,00	0		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	228.571.241,00	218.839.389,00	(9.731.852,00)	95,74		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	204.071.241,00	194.339.389,00	(9.731.852,00)	95,23		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.071.241,00	194.339.389,00	(9.731.852,00)	95,23		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	131.412.000,00	108.953.817,00	(22.458.183,00)	82,91		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	131.412.000,00	108.953.817,00	(22.458.183,00)	82,91		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	131.412.000,00	108.953.817,00	(22.458.183,00)	82,91		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	131.412.000,00	108.953.817,00	(22.458.183,00)	82,91		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	90.000.000,00	78.188.811,00	(11.811.189,00)	86,88		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.412.000,00	30.765.006,00	(10.646.994,00)	74,29		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.959.389.299,00)	(1.732.390.633,00)	226.998.666,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.069.550,00	-6.744.658.231,00	(6.745.727.781,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.069.550,00	-6.744.658.231,00	(6.745.727.781,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	1.069.550,00	(6.744.658.231,00)	(6.745.727.781,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.958.319.749,00)	(8.477.048.864,00)	(6.518.729.115,00)	0		


Boalemo, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
B. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.009 Puskesmas Bongo II
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.009.000 Puskesmas Bongo II

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.146.060.241,00	2.033.362.603,00	(112.697.638,00)	94,75		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.146.060.241,00	2.033.362.603,00	(112.697.638,00)	94,75		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	50.016.000,00	35.975.000,00	(14.041.000,00)	71,93		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.096.044.241,00	1.997.387.603,00	(98.656.638,00)	95,29		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.369.456.494,00	6.091.464.480,20	(277.992.013,80)	95,64		
00	Non Program	0,00	-449.999,80	(449.999,80)	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	-449.999,80	(449.999,80)	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	-449.999,80	(449.999,80)	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	-449.999,80	(449.999,80)	0		
00.0.00.00.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,20	0,20	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	-450.000,00	(450.000,00)	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.077.425.830,00	3.952.242.819,00	(1.125.183.011,00)	77,84		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.974.559.868,00	2.960.971.370,00	(13.588.498,00)	99,54		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.974.559.868,00	2.960.971.370,00	(13.588.498,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.974.559.868,00	2.960.971.370,00	(13.588.498,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.974.559.868,00	2.960.971.370,00	(13.588.498,00)	99,54		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.102.865.962,00	991.271.449,00	(1.111.594.513,00)	47,14		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.102.865.962,00	991.271.449,00	(1.111.594.513,00)	47,14		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.024.997.565,00	922.197.160,00	(1.102.800.405,00)	45,54		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	933.457.425,00	362.303.566,00	(571.153.859,00)	38,81		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.091.540.140,00	559.893.594,00	(531.646.546,00)	51,29		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	77.868.397,00	69.074.289,00	(8.794.108,00)	88,71		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.868.397,00	69.074.289,00	(8.794.108,00)	88,71		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.267.410.664,00	2.115.735.661,00	848.324.997,00	166,93		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.267.410.664,00	2.115.735.661,00	848.324.997,00	166,93		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.855.000,00	96.492.000,00	(363.000,00)	99,63		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	96.855.000,00	96.492.000,00	(363.000,00)	99,63		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.855.000,00	96.492.000,00	(363.000,00)	99,63		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	80.360.000,00	79.335.000,00	(1.025.000,00)	98,72		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	80.360.000,00	79.335.000,00	(1.025.000,00)	98,72		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.360.000,00	79.335.000,00	(1.025.000,00)	98,72		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.920.000,00	26.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	26.920.000,00	26.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.920.000,00	26.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.600.000,00	11.920.000,00	(1.680.000,00)	87,65		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	11.920.000,00	(1.680.000,00)	87,65		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	11.920.000,00	(1.680.000,00)	87,65		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.180.000,00	13.700.000,00	(2.480.000,00)	84,67		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	16.180.000,00	13.700.000,00	(2.480.000,00)	84,67		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.180.000,00	13.700.000,00	(2.480.000,00)	84,67		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32.480.000,00	24.120.000,00	(8.360.000,00)	74,26		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	32.480.000,00	24.120.000,00	(8.360.000,00)	74,26		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.480.000,00	24.120.000,00	(8.360.000,00)	74,26		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200.127.000,00	128.855.000,00	(71.272.000,00)	64,39		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	200.127.000,00	128.855.000,00	(71.272.000,00)	64,39		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.127.000,00	128.855.000,00	(71.272.000,00)	64,39		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.760.000,00	16.689.000,00	(71.000,00)	99,58		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	16.760.000,00	16.689.000,00	(71.000,00)	99,58		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.760.000,00	16.689.000,00	(71.000,00)	99,58		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	38.260.000,00	36.780.000,00	(1.480.000,00)	96,13		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	38.260.000,00	36.780.000,00	(1.480.000,00)	96,13		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.260.000,00	36.780.000,00	(1.480.000,00)	96,13		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	132.660.000,00	123.138.250,00	(9.521.750,00)	92,82		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	132.660.000,00	123.138.250,00	(9.521.750,00)	92,82		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.660.000,00	123.138.250,00	(9.521.750,00)	92,82		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.960.000,00	24.000.000,00	40.000,00	100,17		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	23.960.000,00	24.000.000,00	40.000,00	100,17		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.960.000,00	24.000.000,00	40.000,00	100,17		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	95.820.000,00	87.360.000,00	(8.460.000,00)	91,17		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	95.820.000,00	87.360.000,00	(8.460.000,00)	91,17		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.820.000,00	87.360.000,00	(8.460.000,00)	91,17		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	1.000.303.197,00	1.000.303.197,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.000.303.197,00	1.000.303.197,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	559.660.721,00	559.660.721,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	440.642.476,00	440.642.476,00	0		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	456.768.664,00	409.463.214,00	(47.305.450,00)	89,64		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	450.268.664,00	402.963.214,00	(47.305.450,00)	89,49		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	133.044.646,00	159.503.544,00	26.458.898,00	119,89		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.224.018,00	243.459.670,00	(73.764.348,00)	76,75		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.620.000,00	23.936.000,00	(684.000,00)	97,22		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.620.000,00	23.936.000,00	(684.000,00)	97,22		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.620.000,00	23.936.000,00	(684.000,00)	97,22		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.620.000,00	23.936.000,00	(684.000,00)	97,22		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.620.000,00	23.936.000,00	(684.000,00)	97,22		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.223.396.253,00)	(4.058.101.877,20)	165.294.375,80	0		
	PEMBIAYAAN						



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.821.722,00	-13.730.810.156,80	(13.737.631.878,80)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.821.722,00	-13.730.810.156,80	(13.737.631.878,80)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	6.821.722,00	(13.730.810.156,80)	(13.737.631.878,80)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.216.574.531,00)	(17.788.912.034,00)	(13.572.337.503,00)	0		

Tilamata, 23 Agustus 2024
BUPATI BOALEMO

DES HERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.010 Puskesmas Berlian
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.010.000 Puskesmas Berlian

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	459.408.400,00	439.447.228,00	(19.961.172,00)	95,66		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	459.408.400,00	439.447.228,00	(19.961.172,00)	95,66		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	14.454.000,00	18.010.500,00	3.556.500,00	124,61		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	444.954.400,00	421.436.728,00	(23.517.672,00)	94,71		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.910.338.184,00	2.716.681.983,00	(193.656.201,00)	93,35		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.952.795.866,00	1.696.712.469,00	(256.083.397,00)	86,89		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.504.175.518,00	1.497.383.824,00	(6.791.694,00)	99,55		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.504.175.518,00	1.497.383.824,00	(6.791.694,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.504.175.518,00	1.497.383.824,00	(6.791.694,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.504.175.518,00	1.497.383.824,00	(6.791.694,00)	99,55		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	448.620.348,00	199.328.645,00	(249.291.703,00)	44,43		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	448.620.348,00	199.328.645,00	(249.291.703,00)	44,43		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	447.979.348,00	198.863.645,00	(249.115.703,00)	44,39		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	177.448.865,00	85.690.113,00	(91.758.752,00)	48,29		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.530.483,00	113.173.532,00	(157.356.951,00)	41,83		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	641.000,00	465.000,00	(176.000,00)	72,54		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	641.000,00	465.000,00	(176.000,00)	72,54		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	925.332.318,00	991.759.514,00	66.427.196,00	107,18		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	925.307.318,00	991.759.514,00	66.452.196,00	107,18		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.518.318,00	78.620.000,00	(8.898.318,00)	89,83		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.518.318,00	78.620.000,00	(8.898.318,00)	89,83		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.518.318,00	78.620.000,00	(8.898.318,00)	89,83		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	95,00		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	95,00		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	95,00		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.760.000,00	28.560.000,00	(1.200.000,00)	95,97		
02.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	29.760.000,00	28.560.000,00	(1.200.000,00)	95,97		
02.2.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.760.000,00	28.560.000,00	(1.200.000,00)	95,97		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.600.000,00	12.920.000,00	(2.680.000,00)	82,82		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	12.920.000,00	(2.680.000,00)	82,82		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	12.920.000,00	(2.680.000,00)	82,82		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	55.600.000,00	39.960.000,00	(15.640.000,00)	71,87		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	55.600.000,00	39.960.000,00	(15.640.000,00)	71,87		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.600.000,00	39.960.000,00	(15.640.000,00)	71,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142.970.000,00	96.140.593,00	(46.829.407,00)	67,25		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	142.970.000,00	96.140.593,00	(46.829.407,00)	67,25		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.970.000,00	96.140.593,00	(46.829.407,00)	67,25		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34.840.000,00	30.320.000,00	(4.520.000,00)	87,03		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	34.840.000,00	30.320.000,00	(4.520.000,00)	87,03		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.840.000,00	30.320.000,00	(4.520.000,00)	87,03		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.777.000,00	15.880.000,00	(8.897.000,00)	64,09		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	24.777.000,00	15.880.000,00	(8.897.000,00)	64,09		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.777.000,00	15.880.000,00	(8.897.000,00)	64,09		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	111.080.000,00	104.680.000,00	(6.400.000,00)	94,24		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	111.080.000,00	104.680.000,00	(6.400.000,00)	94,24		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.080.000,00	104.680.000,00	(6.400.000,00)	94,24		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	214.961.878,00	214.961.878,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	214.961.878,00	214.961.878,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	75.653.658,00	75.653.658,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	139.308.220,00	139.308.220,00	0		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	353.842.000,00	301.797.043,00	(52.044.957,00)	85,29		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	341.842.000,00	289.797.043,00	(52.044.957,00)	84,78		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	80.748.463,00	108.760.653,00	28.012.190,00	134,69		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.093.537,00	181.036.390,00	(80.057.147,00)	69,34		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.520.000,00	10.720.000,00	(800.000,00)	93,06		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	11.520.000,00	10.720.000,00	(800.000,00)	93,06		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	10.720.000,00	(800.000,00)	93,06		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32.210.000,00	28.210.000,00	(4.000.000,00)	87,58		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.210.000,00	28.210.000,00	(4.000.000,00)	87,58		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	32.210.000,00	28.210.000,00	(4.000.000,00)	87,58		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.210.000,00	28.210.000,00	(4.000.000,00)	87,58		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.210.000,00	28.210.000,00	(4.000.000,00)	87,58		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.450.929.784,00)	(2.277.234.755,00)	173.695.029,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.665.948,00	-8.840.841.921,00	(8.844.507.869,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.665.948,00	-8.840.841.921,00	(8.844.507.869,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	3.665.948,00	(8.840.841.921,00)	(8.844.507.869,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.447.263.836,00)	(11.118.076.676,00)	(8.670.812.840,00)	0		

Tianmu, 23 Agustus 2024
D. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.011 Puskesmas Bongo Nol
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.011.000 Puskesmas Bongo Nol

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.316.256.431,00	782.142.505,00	(534.113.926,00)	59,42		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.316.256.431,00	782.142.505,00	(534.113.926,00)	59,42		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	16.302.000,00	28.706.750,00	12.404.750,00	176,09		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.299.954.431,00	753.435.755,00	(546.518.676,00)	57,96		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.647.808.262,00	2.702.537.924,40	(945.270.337,60)	74,09		
00	Non Program	0,00	-1.644,60	(1.644,60)	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	-1.644,60	(1.644,60)	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	-1.644,60	(1.644,60)	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	-1.644,60	(1.644,60)	0		
00.0.00.00.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	-1.644,60	(1.644,60)	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.591.129.842,00	1.559.500.069,00	(1.031.629.773,00)	60,19		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.218.068.689,00	1.211.900.766,00	(6.167.923,00)	99,49		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.218.068.689,00	1.211.900.766,00	(6.167.923,00)	99,49		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.218.068.689,00	1.211.900.766,00	(6.167.923,00)	99,49		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.218.068.689,00	1.211.900.766,00	(6.167.923,00)	99,49		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.373.061.153,00	347.599.303,00	(1.025.461.850,00)	25,32		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.373.061.153,00	347.599.303,00	(1.025.461.850,00)	25,32		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.339.561.153,00	323.799.303,00	(1.015.761.850,00)	24,17		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	464.984.050,00	137.090.275,00	(327.893.775,00)	29,48		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.577.103,00	186.709.028,00	(687.868.075,00)	21,35		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	33.500.000,00	23.800.000,00	(9.700.000,00)	71,04		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.500.000,00	23.800.000,00	(9.700.000,00)	71,04		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.047.228.420,00	1.133.589.500,00	86.361.080,00	108,25		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.047.228.420,00	1.133.589.500,00	86.361.080,00	108,25		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.680.000,00	60.075.000,00	(22.605.000,00)	72,66		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.680.000,00	60.075.000,00	(22.605.000,00)	72,66		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.680.000,00	60.075.000,00	(22.605.000,00)	72,66		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.240.000,00	43.320.000,00	(25.920.000,00)	62,56		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	69.240.000,00	43.320.000,00	(25.920.000,00)	62,56		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.240.000,00	43.320.000,00	(25.920.000,00)	62,56		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.700.000,00	31.250.000,00	(450.000,00)	98,58		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	31.700.000,00	31.250.000,00	(450.000,00)	98,58		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.700.000,00	31.250.000,00	(450.000,00)	98,58		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	65.680.000,00	64.720.000,00	(960.000,00)	98,54		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	65.680.000,00	64.720.000,00	(960.000,00)	98,54		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.680.000,00	64.720.000,00	(960.000,00)	98,54		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.760.000,00	4.800.000,00	(960.000,00)	83,33		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	4.800.000,00	(960.000,00)	83,33		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	4.800.000,00	(960.000,00)	83,33		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	180.653.000,00	135.619.213,00	(45.033.787,00)	75,07		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	180.653.000,00	135.619.213,00	(45.033.787,00)	75,07		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.653.000,00	135.619.213,00	(45.033.787,00)	75,07		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.370.000,00	2.810.000,00	(560.000,00)	83,38		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	3.370.000,00	2.810.000,00	(560.000,00)	83,38		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.370.000,00	2.810.000,00	(560.000,00)	83,38		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.655.000,00	13.408.941,00	(246.059,00)	98,20		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	13.655.000,00	13.408.941,00	(246.059,00)	98,20		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.655.000,00	13.408.941,00	(246.059,00)	98,20		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17.395.000,00	13.675.000,00	(3.720.000,00)	78,61		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	17.395.000,00	13.675.000,00	(3.720.000,00)	78,61		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.395.000,00	13.675.000,00	(3.720.000,00)	78,61		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	47.744.000,00	15.605.000,00	(32.139.000,00)	32,68		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	47.744.000,00	15.605.000,00	(32.139.000,00)	32,68		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.744.000,00	15.605.000,00	(32.139.000,00)	32,68		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	129.758.000,00	117.019.000,00	(12.739.000,00)	90,18		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	129.758.000,00	117.019.000,00	(12.739.000,00)	90,18		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.758.000,00	117.019.000,00	(12.739.000,00)	90,18		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	403.949.368,00	403.949.368,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	403.949.368,00	403.949.368,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	195.480.065,00	195.480.065,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	208.469.303,00	208.469.303,00	0		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.610.000,00	0,00	(2.610.000,00)	0		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	2.610.000,00	0,00	(2.610.000,00)	0		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	0,00	(2.610.000,00)	0		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	375.843.420,00	207.897.978,00	(167.945.442,00)	55,32		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	375.843.420,00	207.897.978,00	(167.945.442,00)	55,32		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	95.285.592,00	88.982.668,00	(6.302.924,00)	93,39		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.557.828,00	118.915.310,00	(161.642.518,00)	42,39		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.900.000,00	1.200.000,00	(1.700.000,00)	41,38		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	1.200.000,00	(1.700.000,00)	41,38		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	1.200.000,00	(1.700.000,00)	41,38		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.331.551.831,00)	(1.920.395.419,40)	411.156.411,60	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.106.722,00	-6.858.112.019,60	(6.931.218.741,60)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.106.722,00	-6.858.112.019,60	(6.931.218.741,60)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	73.106.722,00	(6.858.112.019,60)	(6.931.218.741,60)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.258.445.109,00)	(8.778.507.439,00)	(6.520.062.330,00)	0		



Tianmuta, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM



 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2023							
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.012 Puskesmas Pangli Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.012.000 Puskesmas Pangli							
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	589.949.710,00	560.561.388,00	(29.388.322,00)	95,02		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	589.949.710,00	560.561.388,00	(29.388.322,00)	95,02		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	11.964.000,00	16.540.500,00	4.576.500,00	138,25		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	577.985.710,00	544.020.888,00	(33.964.822,00)	94,12		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.745.041.083,00	2.540.859.909,00	(204.181.174,00)	92,56		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.809.442.083,00	1.394.177.103,00	(415.264.980,00)	77,05		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.229.459.916,00	1.220.943.434,00	(8.516.482,00)	99,31		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.229.459.916,00	1.220.943.434,00	(8.516.482,00)	99,31		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.229.459.916,00	1.220.943.434,00	(8.516.482,00)	99,31		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.229.459.916,00	1.220.943.434,00	(8.516.482,00)	99,31		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	579.982.167,00	173.233.669,00	(406.748.498,00)	29,87		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	579.982.167,00	173.233.669,00	(406.748.498,00)	29,87		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	568.982.167,00	173.233.669,00	(395.748.498,00)	30,45		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	181.412.480,00	59.486.370,00	(121.926.110,00)	32,79		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.569.687,00	113.747.299,00	(273.822.388,00)	29,35		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	935.599.000,00	1.146.682.806,00	211.083.806,00	122,56		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	935.599.000,00	1.146.682.806,00	211.083.806,00	122,56		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.406.250,00	72.646.000,00	(3.760.250,00)	95,08		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.406.250,00	72.646.000,00	(3.760.250,00)	95,08		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.406.250,00	72.646.000,00	(3.760.250,00)	95,08		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28.860.000,00	27.880.000,00	(980.000,00)	96,60		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	28.860.000,00	27.880.000,00	(980.000,00)	96,60		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.860.000,00	27.880.000,00	(980.000,00)	96,60		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.430.000,00	15.530.000,00	1.100.000,00	107,62		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	14.430.000,00	15.530.000,00	1.100.000,00	107,62		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.430.000,00	15.530.000,00	1.100.000,00	107,62		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	160.480.000,00	89.432.718,00	(71.047.282,00)	55,73		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	160.480.000,00	89.432.718,00	(71.047.282,00)	55,73		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.480.000,00	89.432.718,00	(71.047.282,00)	55,73		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.920.000,00	1.760.000,00	(160.000,00)	91,67		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	1.920.000,00	1.760.000,00	(160.000,00)	91,67		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.760.000,00	(160.000,00)	91,67		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42.765.000,00	40.090.000,00	(2.675.000,00)	93,74		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	42.765.000,00	40.090.000,00	(2.675.000,00)	93,74		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.765.000,00	40.090.000,00	(2.675.000,00)	93,74		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	61.065.000,00	59.615.000,00	(1.450.000,00)	97,63		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	61.065.000,00	59.615.000,00	(1.450.000,00)	97,63		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.065.000,00	59.615.000,00	(1.450.000,00)	97,63		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.800.000,00	18.600.000,00	(2.200.000,00)	89,42		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	20.800.000,00	18.600.000,00	(2.200.000,00)	89,42		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	18.600.000,00	(2.200.000,00)	89,42		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	152.193.750,00	141.873.500,00	(10.320.250,00)	93,22		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	152.193.750,00	141.873.500,00	(10.320.250,00)	93,22		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.193.750,00	141.873.500,00	(10.320.250,00)	93,22		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	358.141.016,00	358.141.016,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	347.141.016,00	347.141.016,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	91.228.310,00	91.228.310,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	255.912.706,00	255.912.706,00	0		
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0		
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.000.000,00	3.840.000,00	(160.000,00)	96,00		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.840.000,00	(160.000,00)	96,00		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.840.000,00	(160.000,00)	96,00		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	348.084.000,00	292.679.572,00	(55.404.428,00)	84,08		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	307.584.000,00	252.179.572,00	(55.404.428,00)	81,99		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	85.000.000,00	88.035.032,00	3.035.032,00	103,57		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.584.000,00	164.144.540,00	(58.439.460,00)	73,74		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.155.091.373,00)	(1.980.298.521,00)	174.792.852,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.996.457,00	-6.512.891.826,60	(6.514.888.283,60)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.996.457,00	-6.512.891.826,60	(6.514.888.283,60)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	1.996.457,00	(6.512.891.826,60)	(6.514.888.283,60)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.153.094.916,00)	(8.493.190.347,60)	(6.340.095.431,60)	0		

Tiamote, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO

Dr. SHEPHERD MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.013 Puskesmas Sari Tani
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.013.000 Puskesmas Sari Tani

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	596.473.808,00	595.300.332,00	(1.173.476,00)	99,80		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	596.473.808,00	595.300.332,00	(1.173.476,00)	99,80		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	10.698.000,00	13.716.500,00	3.018.500,00	128,22		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	585.775.808,00	581.583.832,00	(4.191.976,00)	99,28		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.676.852.549,00	1.348.522.162,00	(328.330.387,00)	80,42		
00	Non Program	0,00	-20.325.020,00	(20.325.020,00)	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	-20.325.020,00	(20.325.020,00)	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	-20.325.020,00	(20.325.020,00)	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	-20.325.020,00	(20.325.020,00)	0		
00.0.00.00.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	-21.025.020,00	(21.025.020,00)	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	700.000,00	700.000,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	610.063.549,00	12.000.000,00	(598.063.549,00)	1,97		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	610.063.549,00	12.000.000,00	(598.063.549,00)	1,97		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	610.063.549,00	12.000.000,00	(598.063.549,00)	1,97		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	592.171.549,00	0,00	(592.171.549,00)	0		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	306.596.597,00	0,00	(306.596.597,00)	0		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.574.952,00	0,00	(285.574.952,00)	0		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	17.892.000,00	12.000.000,00	(5.892.000,00)	67,07		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.892.000,00	12.000.000,00	(5.892.000,00)	67,07		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	992.514.000,00	1.299.517.182,00	307.003.182,00	130,93		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	992.514.000,00	1.299.517.182,00	307.003.182,00	130,93		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.066.000,00	50.400.000,00	1.334.000,00	102,72		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.066.000,00	50.400.000,00	1.334.000,00	102,72		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.066.000,00	50.400.000,00	1.334.000,00	102,72		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.280.000,00	6.780.000,00	(4.500.000,00)	60,11		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.280.000,00	6.780.000,00	(4.500.000,00)	60,11		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	6.780.000,00	(4.500.000,00)	60,11		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	76.300.000,00	73.240.000,00	(3.060.000,00)	95,99		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	76.300.000,00	73.240.000,00	(3.060.000,00)	95,99		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.300.000,00	73.240.000,00	(3.060.000,00)	95,99		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.480.000,00	8.280.000,00	(200.000,00)	97,64		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.480.000,00	8.280.000,00	(200.000,00)	97,64		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	8.280.000,00	(200.000,00)	97,64		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	23.040.000,00	16.880.000,00	(6.160.000,00)	73,26		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	23.040.000,00	16.880.000,00	(6.160.000,00)	73,26		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.040.000,00	16.880.000,00	(6.160.000,00)	73,26		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.440.000,00	12.800.000,00	(640.000,00)	95,24		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.440.000,00	12.800.000,00	(640.000,00)	95,24		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	12.800.000,00	(640.000,00)	95,24		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.200.000,00	4.960.000,00	1.760.000,00	155,00		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	4.960.000,00	1.760.000,00	155,00		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	4.960.000,00	1.760.000,00	155,00		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	129.622.000,00	53.924.780,00	(75.697.220,00)	41,60		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	129.622.000,00	53.924.780,00	(75.697.220,00)	41,60		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.622.000,00	53.924.780,00	(75.697.220,00)	41,60		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.920.000,00	15.280.000,00	(2.640.000,00)	85,27		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	17.920.000,00	15.280.000,00	(2.640.000,00)	85,27		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.920.000,00	15.280.000,00	(2.640.000,00)	85,27		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	65.740.000,00	33.840.000,00	(31.900.000,00)	51,48		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	65.740.000,00	33.840.000,00	(31.900.000,00)	51,48		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.740.000,00	33.840.000,00	(31.900.000,00)	51,48		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44.000.000,00	36.000.000,00	(8.000.000,00)	81,82		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	36.000.000,00	(8.000.000,00)	81,82		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	36.000.000,00	(8.000.000,00)	81,82		
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0		
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0		
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	131.686.000,00	128.240.000,00	(3.446.000,00)	97,38		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	131.686.000,00	128.240.000,00	(3.446.000,00)	97,38		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.686.000,00	128.240.000,00	(3.446.000,00)	97,38		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	531.971.187,00	531.971.187,00	0		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	526.081.187,00	526.081.187,00	0		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	279.228.826,00	279.228.826,00	0		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	246.852.361,00	246.852.361,00	0		
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	0,00	5.890.000,00	5.890.000,00	0		
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	5.890.000,00	5.890.000,00	0		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	373.180.000,00	295.361.215,00	(77.818.785,00)	79,15		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	326.180.000,00	248.375.815,00	(77.804.185,00)	76,15		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	94.627.831,00	119.983.015,00	25.355.184,00	126,79		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.552.169,00	128.392.800,00	(103.159.369,00)	55,45		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	47.000.000,00	46.985.400,00	(14.600,00)	99,97		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.000.000,00	46.985.400,00	(14.600,00)	99,97		
02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	5.120.000,00	3.120.000,00	(2.000.000,00)	60,94		
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	5.120.000,00	3.120.000,00	(2.000.000,00)	60,94		
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	3.120.000,00	(2.000.000,00)	60,94		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	74.275.000,00	57.330.000,00	(16.945.000,00)	77,19		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.275.000,00	57.330.000,00	(16.945.000,00)	77,19		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	74.275.000,00	57.330.000,00	(16.945.000,00)	77,19		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.275.000,00	57.330.000,00	(16.945.000,00)	77,19		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.275.000,00	57.330.000,00	(16.945.000,00)	77,19		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.080.378.741,00)	(753.221.830,00)	327.156.911,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.287.741,00	-2.936.695.020,20	(2.960.982.761,20)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.287.741,00	-2.936.695.020,20	(2.960.982.761,20)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	24.287.741,00	(2.936.695.020,20)	(2.960.982.761,20)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.056.091.000,00)	(3.689.916.850,20)	(2.633.825.850,20)	0		



Tanamuta, 23 Agustus 2024

P. BUPATI BOALEMO

DR. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.014 Laboratorium Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.014.000 Laboratorium Kesehatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	776.171.900,00	555.847.095,00	(220.324.805,00)	71,61		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	776.171.900,00	555.847.095,00	(220.324.805,00)	71,61		
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN						
	MASYARAKAT						
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	491.252.793,00	273.237.500,00	(218.015.293,00)	55,62		
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	99.955.500,00	(44.500,00)	99,96		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.955.500,00	(44.500,00)	99,96		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.955.500,00	(44.500,00)	99,96		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	89.805.154,00	51.918.000,00	(37.887.154,00)	57,81		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	89.805.154,00	51.918.000,00	(37.887.154,00)	57,81		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.805.154,00	51.918.000,00	(37.887.154,00)	57,81		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	259.977.639,00	79.894.000,00	(180.083.639,00)	30,73		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	259.977.639,00	79.894.000,00	(180.083.639,00)	30,73		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.977.639,00	79.894.000,00	(180.083.639,00)	30,73		
02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	284.919.107,00	282.609.595,00	(2.309.512,00)	99,19		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	224.125.107,00	221.815.595,00	(2.309.512,00)	98,97		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	197.834.107,00	195.615.595,00	(2.218.512,00)	98,88		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.834.107,00	195.615.595,00	(2.218.512,00)	98,88		
02.2.02.34.5.2	BELANJA MODAL	26.291.000,00	26.200.000,00	(91.000,00)	99,65		
02.2.02.34.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.291.000,00	26.200.000,00	(91.000,00)	99,65		
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	36.844.000,00	36.844.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	36.844.000,00	36.844.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.844.000,00	36.844.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(776.171.900,00)	(555.847.095,00)	220.324.805,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(776.171.900,00)	(555.847.095,00)	220.324.805,00	0		

Boalemo, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
Dr. HERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1-03.1-04.2-10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1-03.1-04.2-10.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1-03.1-04.2-10.01.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	277.971.780,00	278.059.121,00	87.341,00	100,03		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277.971.780,00	278.059.121,00	87.341,00	100,03		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	277.971.780,00	278.059.121,00	87.341,00	100,03		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	102.912.648.665,00	98.494.463.770,00	(4.418.184.895,00)	95,71		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.069.864.751,00	3.994.158.503,00	(75.706.248,00)	98,14		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	473.067.600,00	459.451.865,00	(13.615.735,00)	97,12		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.100.000,00	10.745.500,00	(354.500,00)	96,81		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.100.000,00	10.745.500,00	(354.500,00)	96,81		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	10.745.500,00	(354.500,00)	96,81		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	166.317.600,00	153.056.365,00	(13.261.235,00)	92,03		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	166.317.600,00	153.056.365,00	(13.261.235,00)	92,03		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.317.600,00	153.056.365,00	(13.261.235,00)	92,03		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	295.650.000,00	295.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	295.650.000,00	295.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.650.000,00	295.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.285.211.636,00	3.241.426.795,00	(43.784.841,00)	98,67		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.272.088.197,00	3.228.357.295,00	(43.730.902,00)	98,66		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.272.088.197,00	3.228.357.295,00	(43.730.902,00)	98,66		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.272.088.197,00	3.228.357.295,00	(43.730.902,00)	98,66		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.123.439,00	13.069.500,00	(53.939,00)	99,59		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.123.439,00	13.069.500,00	(53.939,00)	99,59		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.763.439,00	11.709.500,00	(53.939,00)	99,54		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.414.306,00	12.533.500,00	(2.880.806,00)	81,31		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.414.306,00	12.533.500,00	(2.880.806,00)	81,31		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.414.306,00	12.533.500,00	(2.880.806,00)	81,31		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.414.306,00	12.533.500,00	(2.880.806,00)	81,31		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.075.162,00	198.900.701,00	(11.174.461,00)	94,68		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.825.323,00	21.375.323,00	(3.450.000,00)	86,10		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.825.323,00	21.375.323,00	(3.450.000,00)	86,10		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.825.323,00	21.375.323,00	(3.450.000,00)	86,10		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.450.000,00	11.750.000,00	(700.000,00)	94,38		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.450.000,00	11.750.000,00	(700.000,00)	94,38		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	11.750.000,00	(700.000,00)	94,38		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.704.379,00	9.717.000,00	(987.379,00)	90,78		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	10.704.379,00	9.717.000,00	(987.379,00)	90,78		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.704.379,00	9.717.000,00	(987.379,00)	90,78		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.798.500,00	6.798.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.798.500,00	6.798.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.798.500,00	6.798.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.296.960,00	149.259.878,00	(6.037.082,00)	96,11		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	155.296.960,00	149.259.878,00	(6.037.082,00)	96,11		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.296.960,00	149.259.878,00	(6.037.082,00)	96,11		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.665.127,00	64.664.722,00	(3.000.405,00)	95,57		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.045.127,00	56.044.722,00	(3.000.405,00)	94,92		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.045.127,00	56.044.722,00	(3.000.405,00)	94,92		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.045.127,00	56.044.722,00	(3.000.405,00)	94,92		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.430.920,00	17.180.920,00	(1.250.000,00)	93,22		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.112.000,00	9.112.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.112.000,00	9.112.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.112.000,00	9.112.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.318.920,00	8.068.920,00	(1.250.000,00)	86,59		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.318.920,00	8.068.920,00	(1.250.000,00)	86,59		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.318.920,00	8.068.920,00	(1.250.000,00)	86,59		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.324.205.799,00	7.247.599.084,00	(76.606.715,00)	98,95		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.873.415.661,00	4.824.649.239,00	(48.766.422,00)	99,00		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	394.168.900,00	386.756.303,00	(7.412.597,00)	98,12		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	394.168.900,00	386.756.303,00	(7.412.597,00)	98,12		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.168.900,00	386.756.303,00	(7.412.597,00)	98,12		
02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	1.234.389.000,00	1.224.242.413,00	(10.146.587,00)	99,18		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	1.234.389.000,00	1.224.242.413,00	(10.146.587,00)	99,18		
02.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.234.389.000,00	1.224.242.413,00	(10.146.587,00)	99,18		
02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	911.058.900,00	907.107.887,00	(3.951.013,00)	99,57		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	911.058.900,00	907.107.887,00	(3.951.013,00)	99,57		
02.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	911.058.900,00	907.107.887,00	(3.951.013,00)	99,57		
02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.183.798.861,00	2.158.385.436,00	(25.413.425,00)	98,84		
02.2.01.46.5.1	BELANJA OPERASI	2.183.798.861,00	2.158.385.436,00	(25.413.425,00)	98,84		
02.2.01.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.183.798.861,00	2.158.385.436,00	(25.413.425,00)	98,84		
02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	150.000.000,00	148.157.200,00	(1.842.800,00)	98,77		
02.2.01.65.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	148.157.200,00	(1.842.800,00)	98,77		
02.2.01.65.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	148.157.200,00	(1.842.800,00)	98,77		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.450.790.138,00	2.422.949.845,00	(27.840.293,00)	98,86		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	446.218.198,00	418.940.005,00	(27.278.193,00)	93,89		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	446.218.198,00	418.940.005,00	(27.278.193,00)	93,89		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.218.198,00	418.940.005,00	(27.278.193,00)	93,89		
02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.604.571.940,00	1.604.359.840,00	(212.100,00)	99,99		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.604.571.940,00	1.604.359.840,00	(212.100,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.552.100,00	14.540.000,00	(12.100,00)	99,92		
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.590.019.840,00	1.589.819.840,00	(200.000,00)	99,99		
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	97.000.000,00	29.180.000,00	(67.820.000,00)	30,08		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	97.000.000,00	29.180.000,00	(67.820.000,00)	30,08		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	97.000.000,00	29.180.000,00	(67.820.000,00)	30,08		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	97.000.000,00	29.180.000,00	(67.820.000,00)	30,08		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	29.180.000,00	(67.820.000,00)	30,08		
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.072.631.812,00	934.014.437,00	(138.617.375,00)	87,08		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.072.631.812,00	934.014.437,00	(138.617.375,00)	87,08		
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	170.000.000,00	91.749.825,00	(78.250.175,00)	53,97		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	91.749.825,00	(78.250.175,00)	53,97		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	91.749.825,00	(78.250.175,00)	53,97		
03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50.000.000,00	45.389.000,00	(4.611.000,00)	90,78		
03.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	45.389.000,00	(4.611.000,00)	90,78		
03.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	45.389.000,00	(4.611.000,00)	90,78		
03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100.000.000,00	93.916.750,00	(6.083.250,00)	93,92		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	93.916.750,00	(6.083.250,00)	93,92		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	93.916.750,00	(6.083.250,00)	93,92		
03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	502.631.812,00	453.249.541,00	(49.382.271,00)	90,18		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	492.631.812,00	443.434.541,00	(49.197.271,00)	90,01		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.631.812,00	443.434.541,00	(49.197.271,00)	90,01		
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.815.000,00	(185.000,00)	98,15		
03.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.815.000,00	(185.000,00)	98,15		
03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	250.000.000,00	249.709.321,00	(290.679,00)	99,88		
03.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.709.321,00	(290.679,00)	99,88		
03.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.709.321,00	(290.679,00)	99,88		
04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	5.246.000,00	0,00	(5.246.000,00)	0		
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.246.000,00	0,00	(5.246.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.246.000,00	0,00	(5.246.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.246.000,00	0,00	(5.246.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.246.000,00	0,00	(5.246.000,00)	0		
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.497.563.642,00	3.287.310.594,00	(210.253.048,00)	93,99		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.497.563.642,00	3.287.310.594,00	(210.253.048,00)	93,99		
05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	276.066.535,00	225.294.698,00	(50.771.837,00)	81,61		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	276.066.535,00	225.294.698,00	(50.771.837,00)	81,61		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.066.535,00	225.294.698,00	(50.771.837,00)	81,61		
05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.093.499.765,00	2.982.226.896,00	(111.272.869,00)	96,40		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.093.499.765,00	2.982.226.896,00	(111.272.869,00)	96,40		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.093.499.765,00	2.982.226.896,00	(111.272.869,00)	96,40		
05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	127.997.342,00	79.789.000,00	(48.208.342,00)	62,34		
05.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	127.997.342,00	79.789.000,00	(48.208.342,00)	62,34		
05.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.997.342,00	79.789.000,00	(48.208.342,00)	62,34		
05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	15.500.000,00	2.940.000,00	(12.560.000,00)	18,97		
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.500.000,00	2.940.000,00	(12.560.000,00)	18,97		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.500.000,00	2.940.000,00	(12.560.000,00)	18,97		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	2.940.000,00	(12.560.000,00)	18,97		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	2.940.000,00	(12.560.000,00)	18,97		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.027.000.000,00	3.989.443.700,00	(37.556.300,00)	99,07		
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.027.000.000,00	3.989.443.700,00	(37.556.300,00)	99,07		
06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,86		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,86		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,86		
06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	893.438.000,00	891.957.400,00	(1.480.600,00)	99,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	893.438.000,00	891.957.400,00	(1.480.600,00)	99,83		
06.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	893.438.000,00	891.957.400,00	(1.480.600,00)	99,83		
06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	157.088.000,00	156.590.930,00	(497.070,00)	99,68		
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	157.088.000,00	156.590.930,00	(497.070,00)	99,68		
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.088.000,00	156.590.930,00	(497.070,00)	99,68		
06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.678.340.000,00	2.648.342.300,00	(29.997.700,00)	98,88		
06.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	2.678.340.000,00	2.648.342.300,00	(29.997.700,00)	98,88		
06.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.678.340.000,00	2.648.342.300,00	(29.997.700,00)	98,88		
06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	228.134.000,00	222.653.070,00	(5.480.930,00)	97,60		
06.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	121.134.000,00	120.274.495,00	(859.505,00)	99,29		
06.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.134.000,00	120.274.495,00	(859.505,00)	99,29		
06.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	107.000.000,00	102.378.575,00	(4.621.425,00)	95,68		
06.2.01.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.000.000,00	102.378.575,00	(4.621.425,00)	95,68		
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	90.600.000,00	38.315.000,00	(52.285.000,00)	42,29		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	90.600.000,00	38.315.000,00	(52.285.000,00)	42,29		
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	90.600.000,00	38.315.000,00	(52.285.000,00)	42,29		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.600.000,00	23.375.000,00	(52.225.000,00)	30,92		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	23.375.000,00	(52.225.000,00)	30,92		
08.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.940.000,00	(60.000,00)	99,60		
08.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.940.000,00	(60.000,00)	99,60		
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	318.000.000,00	217.790.000,00	(100.210.000,00)	68,49		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	318.000.000,00	217.790.000,00	(100.210.000,00)	68,49		
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	318.000.000,00	217.790.000,00	(100.210.000,00)	68,49		
09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0		
09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0		
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	218.000.000,00	217.790.000,00	(210.000,00)	99,90		
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.000.000,00	217.790.000,00	(210.000,00)	99,90		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	81.505.633.035,00	78.077.805.997,00	(3.427.827.038,00)	95,79		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	81.505.633.035,00	78.077.805.997,00	(3.427.827.038,00)	95,79		
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.213.550.000,00	1.183.464.704,00	(30.085.296,00)	97,52		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.213.550.000,00	1.183.464.704,00	(30.085.296,00)	97,52		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.550.000,00	1.183.464.704,00	(30.085.296,00)	97,52		
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	625.060.203,00	599.586.813,00	(25.473.390,00)	95,92		
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	625.060.203,00	599.586.813,00	(25.473.390,00)	95,92		
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.060.203,00	599.586.813,00	(25.473.390,00)	95,92		
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	69.397.527.643,00	66.379.711.909,00	(3.017.815.734,00)	95,65		
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	778.729.243,00	487.682.413,00	(291.046.830,00)	62,63		
10.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	74.080.000,00	4.080.000,00	(70.000.000,00)	5,51		
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.649.243,00	483.602.413,00	(221.046.830,00)	68,63		
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	68.618.798.400,00	65.892.029.496,00	(2.726.768.904,00)	96,03		
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.618.798.400,00	65.892.029.496,00	(2.726.768.904,00)	96,03		
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	631.488.451,00	478.003.931,00	(153.484.520,00)	75,69		
10.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	478.380.157,00	478.003.931,00	(376.226,00)	99,92		
10.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.380.157,00	478.003.931,00	(376.226,00)	99,92		
10.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	153.108.294,00	0,00	(153.108.294,00)	0		
10.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	0		
10.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.108.294,00	0,00	(100.108.294,00)	0		
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	6.785.421.386,00	6.652.852.711,00	(132.568.675,00)	98,05		
10.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	50.800.000,00	12.800.000,00	(38.000.000,00)	25,20		
10.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	12.800.000,00	(38.000.000,00)	25,20		
10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	6.734.621.386,00	6.640.052.711,00	(94.568.675,00)	98,60		
10.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.655.000,00	78.510.000,00	(12.145.000,00)	86,60		
10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.643.966.386,00	6.561.542.711,00	(82.423.675,00)	98,76		
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	1.887.300.000,00	1.861.357.322,00	(25.942.678,00)	98,63		
10.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	25.700.000,00	3.850.000,00	(21.850.000,00)	14,98		
10.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	3.850.000,00	(21.850.000,00)	14,98		
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	1.861.600.000,00	1.857.507.322,00	(4.092.678,00)	99,78		
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.861.600.000,00	1.857.507.322,00	(4.092.678,00)	99,78		
10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	250.000.000,00	249.263.676,00	(736.324,00)	99,71		
10.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.792.735,00	(207.265,00)	99,59		
10.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.792.735,00	(207.265,00)	99,59		
10.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.470.941,00	(529.059,00)	99,74		
10.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.470.941,00	(529.059,00)	99,74		
10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	495.285.352,00	453.653.781,00	(41.631.571,00)	91,59		
10.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	495.285.352,00	453.653.781,00	(41.631.571,00)	91,59		
10.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.285.352,00	453.653.781,00	(41.631.571,00)	91,59		
10.2.01.26	Pembangunan Jembatan Gantung	220.000.000,00	219.911.150,00	(88.850,00)	99,96		
10.2.01.26.5.2	BELANJA MODAL	220.000.000,00	219.911.150,00	(88.850,00)	99,96		
10.2.01.26.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.000.000,00	219.911.150,00	(88.850,00)	99,96		
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	889.403.626,00	675.906.455,00	(213.497.171,00)	76,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	779.045.626,00	587.164.110,00	(191.881.516,00)	75,37		
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	779.045.626,00	587.164.110,00	(191.881.516,00)	75,37		
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	779.045.626,00	587.164.110,00	(191.881.516,00)	75,37		
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.045.626,00	587.164.110,00	(191.881.516,00)	75,37		
12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	110.358.000,00	88.742.345,00	(21.615.655,00)	80,41		
12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	110.358.000,00	88.742.345,00	(21.615.655,00)	80,41		
12.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	110.358.000,00	88.742.345,00	(21.615.655,00)	80,41		
12.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.358.000,00	88.742.345,00	(21.615.655,00)	80,41		
	SURPLUS / DEFISIT	(102.634.676.885,00)	(98.216.404.649,00)	4.418.272.236,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-158.434.629.330,00	(158.434.629.330,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-158.434.629.330,00	(158.434.629.330,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(158.434.629.330,00)	(158.434.629.330,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(102.634.676.885,00)	(256.651.033.979,00)	(154.016.357.094,00)	0		



Mamuta, 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOALEMO

DNS HERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SKPD : 1-04.2-15.2-10.01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan
Unit Organisasi : 1-04.2-15.2-10.01.000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1-04.2-15.2-10.01.000.000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	242.960.011,00	242.960.011,00	0		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	242.960.011,00	242.960.011,00	0		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	242.960.011,00	242.960.011,00	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.388.720.576,00	4.377.739.507,00	(10.981.069,00)	99,75		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.088.494.367,00	4.079.400.218,00	(9.094.149,00)	99,78		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.418.455.119,00	3.418.455.118,00	(1,00)	100,00		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.418.455.119,00	3.418.455.118,00	(1,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.418.455.119,00	3.418.455.118,00	(1,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.418.455.119,00	3.418.455.118,00	(1,00)	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.674.545,00	117.792.045,00	(1.882.500,00)	98,43		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.674.545,00	117.792.045,00	(1.882.500,00)	98,43		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	119.674.545,00	117.792.045,00	(1.882.500,00)	98,43		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.674.545,00	117.792.045,00	(1.882.500,00)	98,43		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.364.703,00	543.153.055,00	(7.211.648,00)	98,69		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	489.188.372,00	483.675.857,00	(5.512.515,00)	98,87		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	489.188.372,00	483.675.857,00	(5.512.515,00)	98,87		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.188.372,00	483.675.857,00	(5.512.515,00)	98,87		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.176.331,00	59.477.198,00	(1.699.133,00)	97,22		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	61.176.331,00	59.477.198,00	(1.699.133,00)	97,22		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.676.331,00	57.977.198,00	(1.699.133,00)	97,15		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	93.679.000,00	91.948.080,00	(1.730.920,00)	98,15		
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	82.039.000,00	80.398.080,00	(1.640.920,00)	98,00		
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	82.039.000,00	80.398.080,00	(1.640.920,00)	98,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.039.000,00	80.398.080,00	(1.640.920,00)	98,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.039.000,00	80.398.080,00	(1.640.920,00)	98,00		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.640.000,00	11.550.000,00	(90.000,00)	99,23		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	11.640.000,00	11.550.000,00	(90.000,00)	99,23		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.640.000,00	11.550.000,00	(90.000,00)	99,23		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.640.000,00	11.550.000,00	(90.000,00)	99,23		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	103.451.209,00	103.451.209,00	0,00	100,00		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	103.451.209,00	103.451.209,00	0,00	100,00		
02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.005.209,00	55.005.209,00	0,00	100,00		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.005.209,00	55.005.209,00	0,00	100,00		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.005.209,00	55.005.209,00	0,00	100,00		
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	48.446.000,00	48.446.000,00	0,00	100,00		
02.2.05.07.5.2	BELANJA MODAL	48.446.000,00	48.446.000,00	0,00	100,00		
02.2.05.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.446.000,00	48.446.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,63		
04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	4.136.000,00	4.130.000,00	(6.000,00)	99,85		
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.136.000,00	4.130.000,00	(6.000,00)	99,85		
04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.136.000,00	4.130.000,00	(6.000,00)	99,85		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.136.000,00	4.130.000,00	(6.000,00)	99,85		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.136.000,00	4.130.000,00	(6.000,00)	99,85		
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.388.720.576,00)	(4.134.779.496,00)	253.941.080,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-120.991.743.107,73	(120.991.743.107,73)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-120.991.743.107,73	(120.991.743.107,73)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(120.991.743.107,73)	(120.991.743.107,73)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.388.720.576,00)	(125.126.522.603,73)	(120.737.802.027,73)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
LESTERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.027.338.899,00	6.552.648.651,00	(474.690.248,00)	93,25		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.476.994.995,00	6.408.071.150,00	(68.923.845,00)	98,94		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.769.381.967,00	3.683.340.335,00	(86.041.632,00)	97,72		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.769.381.967,00	3.683.340.335,00	(86.041.632,00)	97,72		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.769.381.967,00	3.683.340.335,00	(86.041.632,00)	97,72		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.769.381.967,00	3.683.340.335,00	(86.041.632,00)	97,72		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.440.344,00	360.100.351,00	1.660.007,00	100,46		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.738.344,00	183.707.230,00	1.968.886,00	101,08		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	158.238.344,00	160.207.230,00	1.968.886,00	101,24		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.238.344,00	160.207.230,00	1.968.886,00	101,24		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.702.000,00	176.393.121,00	(308.879,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	176.702.000,00	176.393.121,00	(308.879,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.702.000,00	176.393.121,00	(308.879,00)	99,83		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.288.414.684,00	2.304.130.464,00	15.715.780,00	100,69		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.826.684,00	3.556.934,00	(2.269.750,00)	61,05		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.826.684,00	3.556.934,00	(2.269.750,00)	61,05		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.826.684,00	3.556.934,00	(2.269.750,00)	61,05		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.282.588.000,00	2.300.573.530,00	17.985.530,00	100,79		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.282.588.000,00	2.300.573.530,00	17.985.530,00	100,79		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	5.440.000,00	4.000.000,00	(1.440.000,00)	73,53		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.277.148.000,00	2.296.573.530,00	19.425.530,00	100,85		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.758.000,00	60.500.000,00	(258.000,00)	99,58		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.000.000,00	43.748.000,00	(252.000,00)	99,43		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	43.748.000,00	(252.000,00)	99,43		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	43.748.000,00	(252.000,00)	99,43		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.758.000,00	16.752.000,00	(6.000,00)	99,96		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.758.000,00	16.752.000,00	(6.000,00)	99,96		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.758.000,00	16.752.000,00	(6.000,00)	99,96		
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	495.343.904,00	89.607.501,00	(405.736.403,00)	18,09		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	467.599.904,00	62.390.000,00	(405.209.904,00)	13,34		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	404.999.904,00	0,00	(404.999.904,00)	0		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	404.999.904,00	0,00	(404.999.904,00)	0		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.999.904,00	0,00	(404.999.904,00)	0		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.600.000,00	12.470.000,00	(130.000,00)	98,97		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.470.000,00	(130.000,00)	98,97		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.470.000,00	(130.000,00)	98,97		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7.744.000,00	7.217.501,00	(526.499,00)	93,20		
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	7.744.000,00	7.217.501,00	(526.499,00)	93,20		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.744.000,00	7.217.501,00	(526.499,00)	93,20		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.744.000,00	7.217.501,00	(526.499,00)	93,20		
04	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	55.000.000,00	54.970.000,00	(30.000,00)	99,95		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	54.970.000,00	(30.000,00)	99,95		
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.985.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.027.338.899,00)	(6.552.648.651,00)	474.690.248,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-31.055.238.787,00	(31.055.238.787,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-31.055.238.787,00	(31.055.238.787,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(31.055.238.787,00)	(31.055.238.787,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.027.338.899,00)	(37.607.887.438,00)	(30.580.548.539,00)	0		



Ilamuta, 23 Agustus 2024

P. BUPATI BOALEMO

D. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.02.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.02.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.225.713.096,00	3.122.081.370,00	(103.631.726,00)	96,79		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.940.707.746,00	2.840.951.635,00	(99.756.111,00)	96,61		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.808.710,00	56.802.900,00	(3.005.810,00)	94,97		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.399.710,00	11.452.900,00	(2.946.810,00)	79,54		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.399.710,00	11.452.900,00	(2.946.810,00)	79,54		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.399.710,00	11.452.900,00	(2.946.810,00)	79,54		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.109.000,00	43.050.000,00	(59.000,00)	99,86		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	43.109.000,00	43.050.000,00	(59.000,00)	99,86		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.109.000,00	43.050.000,00	(59.000,00)	99,86		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.498.374.007,00	2.433.440.491,00	(64.933.516,00)	97,40		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.498.374.007,00	2.433.440.491,00	(64.933.516,00)	97,40		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.498.374.007,00	2.433.440.491,00	(64.933.516,00)	97,40		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.498.374.007,00	2.433.440.491,00	(64.933.516,00)	97,40		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.764.000,00	66.720.000,00	(44.000,00)	99,93		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.764.000,00	66.720.000,00	(44.000,00)	99,93		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	66.764.000,00	66.720.000,00	(44.000,00)	99,93		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.764.000,00	66.720.000,00	(44.000,00)	99,93		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.495.172,00	175.118.947,00	(4.376.225,00)	97,56		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.576.172,00	44.230.047,00	(4.346.125,00)	91,05		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.576.172,00	44.230.047,00	(4.346.125,00)	91,05		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.576.172,00	44.230.047,00	(4.346.125,00)	91,05		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.919.000,00	130.888.900,00	(30.100,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	130.919.000,00	130.888.900,00	(30.100,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.919.000,00	130.888.900,00	(30.100,00)	99,98		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.941.107,00	80.064.297,00	(23.876.810,00)	77,03		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.916.485,00	2.300.000,00	(6.616.485,00)	25,79		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.916.485,00	2.300.000,00	(6.616.485,00)	25,79		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.916.485,00	2.300.000,00	(6.616.485,00)	25,79		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.199.622,00	26.439.297,00	(5.760.325,00)	82,11		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.199.622,00	26.439.297,00	(5.760.325,00)	82,11		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.199.622,00	26.439.297,00	(5.760.325,00)	82,11		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.825.000,00	51.325.000,00	(11.500.000,00)	81,70		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	62.825.000,00	51.325.000,00	(11.500.000,00)	81,70		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.825.000,00	51.325.000,00	(11.500.000,00)	81,70		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.324.750,00	28.805.000,00	(3.519.750,00)	89,11		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.397.350,00	13.450.000,00	(2.947.350,00)	82,03		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.397.350,00	13.450.000,00	(2.947.350,00)	82,03		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.397.350,00	13.450.000,00	(2.947.350,00)	82,03		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.927.400,00	5.355.000,00	(572.400,00)	90,34		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.927.400,00	5.355.000,00	(572.400,00)	90,34		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.927.400,00	5.355.000,00	(572.400,00)	90,34		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	285.005.350,00	281.129.735,00	(3.875.615,00)	98,64		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	164.699.292,00	163.749.160,00	(950.132,00)	99,42		
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	164.699.292,00	163.749.160,00	(950.132,00)	99,42		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	164.699.292,00	163.749.160,00	(950.132,00)	99,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.699.292,00	163.749.160,00	(950.132,00)	99,42		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80.306.058,00	77.440.575,00	(2.865.483,00)	96,43		
03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	31.111.058,00	30.228.575,00	(882.483,00)	97,16		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.111.058,00	30.228.575,00	(882.483,00)	97,16		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.111.058,00	30.228.575,00	(882.483,00)	97,16		
03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	49.195.000,00	47.212.000,00	(1.983.000,00)	95,97		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	49.195.000,00	47.212.000,00	(1.983.000,00)	95,97		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.195.000,00	47.212.000,00	(1.983.000,00)	95,97		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	39.940.000,00	(60.000,00)	99,85		
03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.940.000,00	(60.000,00)	99,85		
03.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.06.5.2	BELANJA MODAL	31.000.000,00	30.940.000,00	(60.000,00)	99,81		
03.2.04.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.000.000,00	30.940.000,00	(60.000,00)	99,81		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.225.713.096,00)	(3.122.081.370,00)	103.631.726,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-24.897.441.071,00	(24.897.441.071,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-24.897.441.071,00	(24.897.441.071,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(24.897.441.071,00)	(24.897.441.071,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.225.713.096,00)	(28.019.522.441,00)	(24.793.809.345,00)	0		



Tikemuta, 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOALEMO

Dr. SRI RMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
SKPD : 1-06.2-13.0-00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unit Organisasi : 1-06.2-13.0-00.01.000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1-06.2-13.0-00.01.000.000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.689.094.128,00	4.496.264.004,00	(192.830.124,00)	95,89		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.409.282.919,00	3.293.184.648,00	(116.098.271,00)	96,59		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.724.000,00	70.493.000,00	(231.000,00)	99,67		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.950.000,00	32.739.000,00	(211.000,00)	99,36		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.950.000,00	32.739.000,00	(211.000,00)	99,36		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.950.000,00	32.739.000,00	(211.000,00)	99,36		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.774.000,00	37.754.000,00	(20.000,00)	99,95		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	37.774.000,00	37.754.000,00	(20.000,00)	99,95		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.774.000,00	37.754.000,00	(20.000,00)	99,95		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.804.212.046,00	2.726.784.680,00	(77.427.366,00)	97,24		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.804.212.046,00	2.726.784.680,00	(77.427.366,00)	97,24		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.804.212.046,00	2.726.784.680,00	(77.427.366,00)	97,24		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.804.212.046,00	2.726.784.680,00	(77.427.366,00)	97,24		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.700.000,00	4.990.000,00	(710.000,00)	87,54		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.700.000,00	4.990.000,00	(710.000,00)	87,54		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	4.990.000,00	(710.000,00)	87,54		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	4.990.000,00	(710.000,00)	87,54		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.666.281,00	137.814.756,00	(14.851.525,00)	90,27		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.223.281,00	52.402.500,00	(14.820.781,00)	77,95		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.223.281,00	52.402.500,00	(14.820.781,00)	77,95		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.223.281,00	52.402.500,00	(14.820.781,00)	77,95		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.443.000,00	85.412.256,00	(30.744,00)	99,96		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	85.443.000,00	85.412.256,00	(30.744,00)	99,96		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.443.000,00	85.412.256,00	(30.744,00)	99,96		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.000.000,00	20.499.480,00	(500.520,00)	97,62		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000,00	20.499.480,00	(500.520,00)	97,62		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	21.000.000,00	20.499.480,00	(500.520,00)	97,62		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	20.499.480,00	(500.520,00)	97,62		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.036.192,00	303.962.072,00	(3.074.120,00)	99,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.326.192,00	23.252.072,00	(3.074.120,00)	88,32		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.326.192,00	23.252.072,00	(3.074.120,00)	88,32		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.326.192,00	23.252.072,00	(3.074.120,00)	88,32		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.710.000,00	280.710.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	280.710.000,00	280.710.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.950.000,00	274.950.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.944.400,00	28.640.660,00	(19.303.740,00)	59,74		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.584.400,00	26.690.660,00	(13.893.740,00)	65,77		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.584.400,00	26.690.660,00	(13.893.740,00)	65,77		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.584.400,00	26.690.660,00	(13.893.740,00)	65,77		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.730.000,00	0,00	(3.730.000,00)	0		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.730.000,00	0,00	(3.730.000,00)	0		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	0,00	(3.730.000,00)	0		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000,00	1.950.000,00	(80.000,00)	96,06		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.030.000,00	1.950.000,00	(80.000,00)	96,06		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	1.950.000,00	(80.000,00)	96,06		
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	208.839.800,00	185.181.850,00	(23.657.950,00)	88,67		



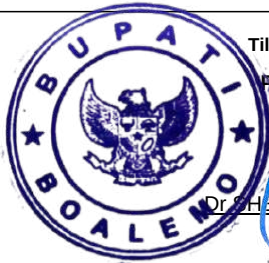
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	101.003.400,00	100.131.850,00	(871.550,00)	99,14		
02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	16.000.000,00	15.830.000,00	(170.000,00)	98,94		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.830.000,00	(170.000,00)	98,94		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.830.000,00	(170.000,00)	98,94		
02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	85.003.400,00	84.301.850,00	(701.550,00)	99,17		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.003.400,00	84.301.850,00	(701.550,00)	99,17		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.003.400,00	84.301.850,00	(701.550,00)	99,17		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	107.836.400,00	85.050.000,00	(22.786.400,00)	78,87		
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	107.836.400,00	85.050.000,00	(22.786.400,00)	78,87		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	107.836.400,00	85.050.000,00	(22.786.400,00)	78,87		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.836.400,00	85.050.000,00	(22.786.400,00)	78,87		
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	433.893.470,00	406.964.756,00	(26.928.714,00)	93,79		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	433.893.470,00	406.964.756,00	(26.928.714,00)	93,79		
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	10.006.750,00	9.882.000,00	(124.750,00)	98,75		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.006.750,00	9.882.000,00	(124.750,00)	98,75		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.006.750,00	9.882.000,00	(124.750,00)	98,75		
04.2.01.02	Penyediaan Sandang	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0		
04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.795.000,00	3.810.000,00	(1.985.000,00)	65,75		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.795.000,00	3.810.000,00	(1.985.000,00)	65,75		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	3.810.000,00	(1.985.000,00)	65,75		
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	372.081.720,00	361.372.756,00	(10.708.964,00)	97,12		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	369.581.720,00	358.872.756,00	(10.708.964,00)	97,10		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.581.720,00	358.872.756,00	(10.708.964,00)	97,10		
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	35.000.000,00	24.670.000,00	(10.330.000,00)	70,49		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	24.670.000,00	(10.330.000,00)	70,49		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	24.670.000,00	(10.330.000,00)	70,49		
04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.050.000,00	2.790.000,00	(260.000,00)	91,48		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	2.790.000,00	(260.000,00)	91,48		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	2.790.000,00	(260.000,00)	91,48		
04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	4.560.000,00	4.440.000,00	(120.000,00)	97,37		
04.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	4.560.000,00	4.440.000,00	(120.000,00)	97,37		
04.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.440.000,00	(120.000,00)	97,37		
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	83.370.000,00	82.610.000,00	(760.000,00)	99,09		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	83.370.000,00	82.610.000,00	(760.000,00)	99,09		
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	16.170.000,00	15.410.000,00	(760.000,00)	95,30		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.170.000,00	15.410.000,00	(760.000,00)	95,30		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.170.000,00	15.410.000,00	(760.000,00)	95,30		
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	343.575.000,00	343.316.750,00	(258.250,00)	99,92		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	343.575.000,00	343.316.750,00	(258.250,00)	99,92		
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	31.200.000,00	31.100.000,00	(100.000,00)	99,68		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	31.100.000,00	(100.000,00)	99,68		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.100.000,00	(100.000,00)	99,68		
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	237.375.000,00	237.360.000,00	(15.000,00)	99,99		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	237.375.000,00	237.360.000,00	(15.000,00)	99,99		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.375.000,00	237.360.000,00	(15.000,00)	99,99		
05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	60.000.000,00	59.856.750,00	(143.250,00)	99,76		
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.856.750,00	(143.250,00)	99,76		
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.856.750,00	(143.250,00)	99,76		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	169.252.789,00	147.141.000,00	(22.111.789,00)	86,94		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	169.252.789,00	147.141.000,00	(22.111.789,00)	86,94		
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.956.400,00	40.760.000,00	(196.400,00)	99,52		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.956.400,00	40.760.000,00	(196.400,00)	99,52		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.956.400,00	40.760.000,00	(196.400,00)	99,52		
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	128.296.389,00	106.381.000,00	(21.915.389,00)	82,92		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	128.296.389,00	106.381.000,00	(21.915.389,00)	82,92		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.296.389,00	106.381.000,00	(21.915.389,00)	82,92		
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.880.150,00	37.865.000,00	(3.015.150,00)	92,62		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.689.094.128,00)	(4.496.264.004,00)	192.830.124,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-28.791.023.689,00	(28.791.023.689,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-28.791.023.689,00	(28.791.023.689,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(28.791.023.689,00)	(28.791.023.689,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.689.094.128,00)	(33.287.287.693,00)	(28.598.193.565,00)	0		



Tilamuta, 28 November 2024

Pj. BUPATI BOALEMO

DR. HERMAN MORIDU, S.Pd. MM



 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2023							
Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN SKPD : 2-09.0-00.0-00.01 Dinas Pangan Unit Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.000 Dinas Pangan Sub Unit Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Pangan							
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.688.495.208,00	1.687.782.708,00	(712.500,00)	99,96		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.550.886.208,00	1.550.173.708,00	(712.500,00)	99,95		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.765.000,00	30.765.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.765.000,00	30.765.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	30.765.000,00	30.765.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.765.000,00	30.765.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.314.232.370,00	1.314.232.370,00	0,00	100,00		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.294.172.370,00	1.294.172.370,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.294.172.370,00	1.294.172.370,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.294.172.370,00	1.294.172.370,00	0,00	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.060.000,00	20.060.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.060.000,00	20.060.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.060.000,00	20.060.000,00	0,00	100,00		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.472.975,00	41.472.975,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.899.775,00	9.899.775,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.899.775,00	9.899.775,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.899.775,00	9.899.775,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.573.200,00	31.573.200,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	31.573.200,00	31.573.200,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.573.200,00	31.573.200,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.211.627,00	150.499.127,00	(712.500,00)	99,53		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.663.452,00	1.663.452,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.663.452,00	1.663.452,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.663.452,00	1.663.452,00	0,00	100,00		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.123.175,00	144.410.675,00	(712.500,00)	99,51		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	145.123.175,00	144.410.675,00	(712.500,00)	99,51		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.043.175,00	140.330.675,00	(712.500,00)	99,49		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.584.236,00	7.584.236,00	0,00	100,00		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.584.236,00	7.584.236,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.584.236,00	7.584.236,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.584.236,00	7.584.236,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	72.580.000,00	72.580.000,00	0,00	100,00		
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	72.580.000,00	72.580.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	70.348.000,00	70.348.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.348.000,00	70.348.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.348.000,00	70.348.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	23.240.000,00	23.240.000,00	0,00	100,00		
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.240.000,00	23.240.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.240.000,00	23.240.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.240.000,00	23.240.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.240.000,00	23.240.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.688.495.208,00)	(1.687.782.708,00)	712.500,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-20.145.422.794,00	(20.145.422.794,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-20.145.422.794,00	(20.145.422.794,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(20.145.422.794,00)	(20.145.422.794,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.688.495.208,00)	(21.833.205.502,00)	(20.144.710.294,00)	0		

Boalemo, 23 Agustus 2024
R. BUPATI BOALEMO
D. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2-11.0-00.2-15.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perhubungan
Unit Organisasi : 2-11.0-00.2-15.01.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.2-15.01.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perhubungan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	129.727.500,00	37.480.000,00	(92.247.500,00)	28,89		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	129.727.500,00	37.480.000,00	(92.247.500,00)	28,89		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	129.727.500,00	37.480.000,00	(92.247.500,00)	28,89		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.891.154.351,00	5.487.375.873,00	(403.778.478,00)	93,15		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.854.666.854,00	3.635.979.293,00	(218.687.561,00)	94,33		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.989.048.679,00	2.783.399.995,00	(205.648.684,00)	93,12		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.989.048.679,00	2.783.399.995,00	(205.648.684,00)	93,12		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.989.048.679,00	2.783.399.995,00	(205.648.684,00)	93,12		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.989.048.679,00	2.783.399.995,00	(205.648.684,00)	93,12		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.618.175,00	852.579.298,00	(13.038.877,00)	98,49		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	865.618.175,00	852.579.298,00	(13.038.877,00)	98,49		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	865.618.175,00	852.579.298,00	(13.038.877,00)	98,49		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.618.175,00	852.579.298,00	(13.038.877,00)	98,49		
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	130.518.441,00	52.649.500,00	(77.868.941,00)	40,34		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	130.518.441,00	52.649.500,00	(77.868.941,00)	40,34		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	58.518.441,00	52.649.500,00	(5.868.941,00)	89,97		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.518.441,00	52.649.500,00	(5.868.941,00)	89,97		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.518.441,00	52.649.500,00	(5.868.941,00)	89,97		
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	0		
02.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	0		
02.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	0		
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.530.056,00	1.070.868.080,00	(88.661.976,00)	92,35		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.439.000,00	707.879.000,00	(18.560.000,00)	97,45		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.761.426.851,00)	(5.449.895.873,00)	311.530.978,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-33.452.161.088,00	(33.452.161.088,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-33.452.161.088,00	(33.452.161.088,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(33.452.161.088,00)	(33.452.161.088,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.761.426.851,00)	(38.902.056.961,00)	(33.140.630.110,00)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.627.778.365,00	3.560.548.054,00	(67.230.311,00)	98,15		
00	Non Program	0,00	3.774.500,00	3.774.500,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	3.774.500,00	3.774.500,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	3.774.500,00	3.774.500,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	3.774.500,00	3.774.500,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.774.500,00	3.774.500,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.212.709.690,00	3.142.010.554,00	(70.699.136,00)	97,80		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.657.909.441,00	2.594.468.252,00	(63.441.189,00)	97,61		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.657.909.441,00	2.594.468.252,00	(63.441.189,00)	97,61		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.657.909.441,00	2.594.468.252,00	(63.441.189,00)	97,61		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.657.909.441,00	2.594.468.252,00	(63.441.189,00)	97,61		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.928.467,00	280.240.073,00	(4.688.394,00)	98,35		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.248.467,00	103.745.930,00	(1.502.537,00)	98,57		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	105.248.467,00	103.745.930,00	(1.502.537,00)	98,57		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.248.467,00	103.745.930,00	(1.502.537,00)	98,57		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.680.000,00	176.494.143,00	(3.185.857,00)	98,23		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	179.680.000,00	176.494.143,00	(3.185.857,00)	98,23		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.680.000,00	176.494.143,00	(3.185.857,00)	98,23		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.729.982,00	222.240.229,00	(2.489.753,00)	98,89		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.669.980,00	32.180.227,00	(2.489.753,00)	92,82		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.669.980,00	32.180.227,00	(2.489.753,00)	92,82		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.669.980,00	32.180.227,00	(2.489.753,00)	92,82		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.127.370,00	168.127.370,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	168.127.370,00	168.127.370,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.127.370,00	168.127.370,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.932.632,00	18.932.632,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.932.632,00	18.932.632,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.932.632,00	18.932.632,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.141.800,00	45.062.000,00	(79.800,00)	99,82		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.391.800,00	39.312.000,00	(79.800,00)	99,80		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.391.800,00	39.312.000,00	(79.800,00)	99,80		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.391.800,00	39.312.000,00	(79.800,00)	99,80		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	378.136.675,00	377.854.000,00	(282.675,00)	99,93		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	378.136.675,00	377.854.000,00	(282.675,00)	99,93		
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	378.136.675,00	377.854.000,00	(282.675,00)	99,93		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	215.124.675,00	215.122.500,00	(2.175,00)	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.124.675,00	215.122.500,00	(2.175,00)	100,00		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	163.012.000,00	162.731.500,00	(280.500,00)	99,83		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.012.000,00	162.731.500,00	(280.500,00)	99,83		
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.932.000,00	36.909.000,00	(23.000,00)	99,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.627.778.365,00)	(3.560.548.054,00)	67.230.311,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-18.738.424.895,00	(18.738.424.895,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-18.738.424.895,00	(18.738.424.895,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(18.738.424.895,00)	(18.738.424.895,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.627.778.365,00)	(22.298.972.949,00)	(18.671.194.584,00)	0		



Tilamuta, 23 Agustus 2024
B. BUPATI BOALEMO
D. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SKPD : 2-14.2-08.0-00.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi : 2-14.2-08.0-00.01.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2-14.2-08.0-00.01.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.206.986.072,00	5.606.190.723,00	(600.795.349,00)	90,32		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.574.792.349,00	2.407.115.768,00	(167.676.581,00)	93,49		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.942.000,00	112.206.000,00	(1.736.000,00)	98,48		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.894.000,00	32.224.000,00	(1.670.000,00)	95,07		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.894.000,00	32.224.000,00	(1.670.000,00)	95,07		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.894.000,00	32.224.000,00	(1.670.000,00)	95,07		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.048.000,00	79.982.000,00	(66.000,00)	99,92		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	80.048.000,00	79.982.000,00	(66.000,00)	99,92		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.048.000,00	79.982.000,00	(66.000,00)	99,92		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.113.530.573,00	1.975.338.999,00	(138.191.574,00)	93,46		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.113.530.573,00	1.975.338.999,00	(138.191.574,00)	93,46		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.113.530.573,00	1.975.338.999,00	(138.191.574,00)	93,46		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.113.530.573,00	1.975.338.999,00	(138.191.574,00)	93,46		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.251.658,00	68.163.564,00	(6.088.094,00)	91,80		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.191.658,00	6.171.650,00	(6.020.008,00)	50,62		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.191.658,00	6.171.650,00	(6.020.008,00)	50,62		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.191.658,00	6.171.650,00	(6.020.008,00)	50,62		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.060.000,00	61.991.914,00	(68.086,00)	99,89		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	62.060.000,00	61.991.914,00	(68.086,00)	99,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.060.000,00	61.991.914,00	(68.086,00)	99,89		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.961.805,00	158.728.600,00	(7.233.205,00)	95,64		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.844.500,00	20.943.600,00	(900.900,00)	95,88		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.844.500,00	20.943.600,00	(900.900,00)	95,88		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.844.500,00	20.943.600,00	(900.900,00)	95,88		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.142.305,00	18.810.000,00	(6.332.305,00)	74,81		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.142.305,00	18.810.000,00	(6.332.305,00)	74,81		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.982.305,00	10.650.000,00	(6.332.305,00)	62,71		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.975.000,00	118.975.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	118.975.000,00	118.975.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.975.000,00	118.975.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.106.313,00	92.678.605,00	(14.427.708,00)	86,53		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.915.097,00	42.589.907,00	(7.325.190,00)	85,32		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.915.097,00	42.589.907,00	(7.325.190,00)	85,32		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.915.097,00	42.589.907,00	(7.325.190,00)	85,32		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.191.216,00	30.138.698,00	(7.052.518,00)	81,04		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.191.216,00	30.138.698,00	(7.052.518,00)	81,04		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.191.216,00	30.138.698,00	(7.052.518,00)	81,04		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75		
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	41.690.000,00	40.950.000,00	(740.000,00)	98,22		
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.540.000,00	20.800.000,00	(740.000,00)	96,56		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	21.540.000,00	20.800.000,00	(740.000,00)	96,56		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.540.000,00	20.800.000,00	(740.000,00)	96,56		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	20.800.000,00	(740.000,00)	96,56		
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	813.414.024,00	631.165.200,00	(182.248.824,00)	77,59		
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	125.064.024,00	54.210.000,00	(70.854.024,00)	43,35		
02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	45.064.024,00	32.990.000,00	(12.074.024,00)	73,21		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	45.064.024,00	32.990.000,00	(12.074.024,00)	73,21		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.064.024,00	32.990.000,00	(12.074.024,00)	73,21		
02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KBPK	80.000.000,00	21.220.000,00	(58.780.000,00)	26,53		
02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	21.220.000,00	(58.780.000,00)	26,53		
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	21.220.000,00	(58.780.000,00)	26,53		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	688.350.000,00	576.955.200,00	(111.394.800,00)	83,82		
02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	342.000.000,00	235.100.000,00	(106.900.000,00)	68,74		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	342.000.000,00	235.100.000,00	(106.900.000,00)	68,74		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.000.000,00	235.100.000,00	(106.900.000,00)	68,74		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	133.150.000,00	128.655.200,00	(4.494.800,00)	96,62		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	133.150.000,00	128.655.200,00	(4.494.800,00)	96,62		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.150.000,00	128.655.200,00	(4.494.800,00)	96,62		
02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KBPK	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	121.294.250,00	85.127.000,00	(36.167.250,00)	70,18		
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.960.000,00	25.660.000,00	(300.000,00)	98,84		
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.960.000,00	25.660.000,00	(300.000,00)	98,84		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.960.000,00	25.660.000,00	(300.000,00)	98,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.960.000,00	25.660.000,00	(300.000,00)	98,84		
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58.036.250,00	23.602.000,00	(34.434.250,00)	40,67		
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.036.250,00	23.602.000,00	(34.434.250,00)	40,67		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.036.250,00	23.602.000,00	(34.434.250,00)	40,67		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.036.250,00	23.602.000,00	(34.434.250,00)	40,67		
03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.442.889.699,00	1.320.628.400,00	(122.261.299,00)	91,53		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	337.838.789,00	311.092.900,00	(26.745.889,00)	92,08		
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	19.409.589,00	13.138.000,00	(6.271.589,00)	67,69		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.409.589,00	13.138.000,00	(6.271.589,00)	67,69		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.409.589,00	13.138.000,00	(6.271.589,00)	67,69		
03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	30.000.000,00	19.940.000,00	(10.060.000,00)	66,47		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	19.940.000,00	(10.060.000,00)	66,47		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	19.940.000,00	(10.060.000,00)	66,47		
03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	120.000.000,00	119.949.400,00	(50.600,00)	99,96		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.949.400,00	(50.600,00)	99,96		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.949.400,00	(50.600,00)	99,96		
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	91.000.000,00	87.499.000,00	(3.501.000,00)	96,15		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	91.000.000,00	87.499.000,00	(3.501.000,00)	96,15		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	87.499.000,00	(3.501.000,00)	96,15		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	54.600.000,00	50.670.500,00	(3.929.500,00)	92,80		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	54.600.000,00	50.670.500,00	(3.929.500,00)	92,80		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	50.670.500,00	(3.929.500,00)	92,80		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	22.829.200,00	19.896.000,00	(2.933.200,00)	87,15		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.829.200,00	19.896.000,00	(2.933.200,00)	87,15		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.829.200,00	19.896.000,00	(2.933.200,00)	87,15		
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	282.450.000,00	277.200.000,00	(5.250.000,00)	98,14		
03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	49.000.000,00	47.250.000,00	(1.750.000,00)	96,43		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.000.000,00	47.250.000,00	(1.750.000,00)	96,43		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	47.250.000,00	(1.750.000,00)	96,43		
03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	82.250.000,00	78.750.000,00	(3.500.000,00)	95,74		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	82.250.000,00	78.750.000,00	(3.500.000,00)	95,74		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.250.000,00	78.750.000,00	(3.500.000,00)	95,74		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	514.450.910,00	453.885.500,00	(60.565.410,00)	88,23		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	365.187.000,00	311.900.000,00	(53.287.000,00)	85,41		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	365.187.000,00	311.900.000,00	(53.287.000,00)	85,41		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.187.000,00	311.900.000,00	(53.287.000,00)	85,41		
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	38.127.910,00	35.592.500,00	(2.535.410,00)	93,35		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	38.127.910,00	35.592.500,00	(2.535.410,00)	93,35		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.127.910,00	35.592.500,00	(2.535.410,00)	93,35		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26.700.000,00	26.080.000,00	(620.000,00)	97,68		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	26.700.000,00	26.080.000,00	(620.000,00)	97,68		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	26.080.000,00	(620.000,00)	97,68		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	70.036.000,00	65.913.000,00	(4.123.000,00)	94,11		
03.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	70.036.000,00	65.913.000,00	(4.123.000,00)	94,11		
03.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.036.000,00	65.913.000,00	(4.123.000,00)	94,11		
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	308.150.000,00	278.450.000,00	(29.700.000,00)	90,36		
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	225.000.000,00	204.300.000,00	(20.700.000,00)	90,80		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	204.300.000,00	(20.700.000,00)	90,80		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	204.300.000,00	(20.700.000,00)	90,80		
03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	63.000.000,00	54.000.000,00	(9.000.000,00)	85,71		
03.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	63.000.000,00	54.000.000,00	(9.000.000,00)	85,71		
03.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	54.000.000,00	(9.000.000,00)	85,71		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	895.400.000,00	866.912.500,00	(28.487.500,00)	96,82		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	815.400.000,00	805.887.500,00	(9.512.500,00)	98,83		
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	352.440.000,00	(7.560.000,00)	97,90		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	352.440.000,00	(7.560.000,00)	97,90		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	352.440.000,00	(7.560.000,00)	97,90		
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	455.400.000,00	453.447.500,00	(1.952.500,00)	99,57		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	455.400.000,00	453.447.500,00	(1.952.500,00)	99,57		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.400.000,00	453.447.500,00	(1.952.500,00)	99,57		
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80.000.000,00	61.025.000,00	(18.975.000,00)	76,28		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80.000.000,00	61.025.000,00	(18.975.000,00)	76,28		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	61.025.000,00	(18.975.000,00)	76,28		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	61.025.000,00	(18.975.000,00)	76,28		
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	317.505.750,00	254.291.855,00	(63.213.895,00)	80,09		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.740.000,00	77.715.000,00	(6.025.000,00)	92,81		
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	83.740.000,00	77.715.000,00	(6.025.000,00)	92,81		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.740.000,00	77.715.000,00	(6.025.000,00)	92,81		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.740.000,00	77.715.000,00	(6.025.000,00)	92,81		
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.467.750,00	140.711.855,00	(55.755.895,00)	71,62		
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	196.467.750,00	140.711.855,00	(55.755.895,00)	71,62		
07.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	196.467.750,00	140.711.855,00	(55.755.895,00)	71,62		
07.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.467.750,00	140.711.855,00	(55.755.895,00)	71,62		
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
07.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
07.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.298.000,00	35.865.000,00	(1.433.000,00)	96,16		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.206.986.072,00)	(5.606.190.723,00)	600.795.349,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-30.522.448.875,00	(30.522.448.875,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-30.522.448.875,00	(30.522.448.875,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(30.522.448.875,00)	(30.522.448.875,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.206.986.072,00)	(36.128.639.598,00)	(29.921.653.526,00)	0		



Tilamuta, 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOALEMO

Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

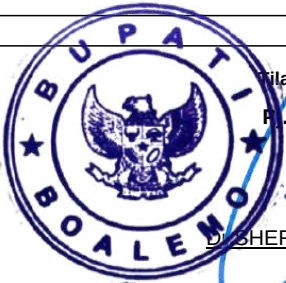
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	22.288.000,00	22.288.000,00	0		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	22.288.000,00	22.288.000,00	0		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	22.288.000,00	22.288.000,00	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.498.562.709,00	3.328.897.671,00	(169.665.038,00)	95,15		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.583.702.117,00	2.453.529.079,00	(130.173.038,00)	94,96		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.596.970,00	67.031.000,00	(565.970,00)	99,16		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.178.970,00	11.821.000,00	(357.970,00)	97,06		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.178.970,00	11.821.000,00	(357.970,00)	97,06		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.178.970,00	11.821.000,00	(357.970,00)	97,06		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.418.000,00	55.210.000,00	(208.000,00)	99,62		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	55.418.000,00	55.210.000,00	(208.000,00)	99,62		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.418.000,00	55.210.000,00	(208.000,00)	99,62		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.950.140.786,00	1.849.188.903,00	(100.951.883,00)	94,82		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.950.140.786,00	1.849.188.903,00	(100.951.883,00)	94,82		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.950.140.786,00	1.849.188.903,00	(100.951.883,00)	94,82		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.950.140.786,00	1.849.188.903,00	(100.951.883,00)	94,82		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	432.900,00	0,00	(432.900,00)	0		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	432.900,00	0,00	(432.900,00)	0		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	432.900,00	0,00	(432.900,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.900,00	0,00	(432.900,00)	0		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.884.522,00	148.736.543,00	(11.147.979,00)	93,03		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.620.522,00	4.933.500,00	(3.687.022,00)	57,23		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.620.522,00	4.933.500,00	(3.687.022,00)	57,23		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.620.522,00	4.933.500,00	(3.687.022,00)	57,23		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.264.000,00	143.803.043,00	(7.460.957,00)	95,07		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	151.264.000,00	143.803.043,00	(7.460.957,00)	95,07		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.264.000,00	143.803.043,00	(7.460.957,00)	95,07		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.334.940,00	269.938.075,00	(13.396.865,00)	95,27		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.585.470,00	1.500.000,00	(85.470,00)	94,61		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.585.470,00	1.500.000,00	(85.470,00)	94,61		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.585.470,00	1.500.000,00	(85.470,00)	94,61		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.655.216,00	17.867.075,00	(1.788.141,00)	90,90		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.655.216,00	17.867.075,00	(1.788.141,00)	90,90		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.655.216,00	17.867.075,00	(1.788.141,00)	90,90		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.089.254,00	66.566.000,00	(11.523.254,00)	85,24		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	78.089.254,00	66.566.000,00	(11.523.254,00)	85,24		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.369.254,00	63.846.000,00	(11.523.254,00)	84,71		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.005.000,00	184.005.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	184.005.000,00	184.005.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.005.000,00	184.005.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.311.999,00	118.634.558,00	(3.677.441,00)	96,99		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.311.999,00	103.831.558,00	(3.480.441,00)	96,76		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	107.311.999,00	103.831.558,00	(3.480.441,00)	96,76		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.311.999,00	103.831.558,00	(3.480.441,00)	96,76		
01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	15.000.000,00	14.803.000,00	(197.000,00)	98,69		
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.803.000,00	(197.000,00)	98,69		
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.803.000,00	(197.000,00)	98,69		
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	497.750.000,00	458.550.000,00	(39.200.000,00)	92,12		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	497.750.000,00	458.550.000,00	(39.200.000,00)	92,12		
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	66,67		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	66,67		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	66,67		
02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	484.250.000,00	449.550.000,00	(34.700.000,00)	92,83		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	484.250.000,00	449.550.000,00	(34.700.000,00)	92,83		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.250.000,00	449.550.000,00	(34.700.000,00)	92,83		
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	417.110.592,00	416.818.592,00	(292.000,00)	99,93		
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	376.760.592,00	376.760.592,00	0,00	100,00		
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	376.760.592,00	376.760.592,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	376.760.592,00	376.760.592,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.760.592,00	376.760.592,00	0,00	100,00		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.350.000,00	40.058.000,00	(292.000,00)	99,28		
03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	40.350.000,00	40.058.000,00	(292.000,00)	99,28		
03.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	40.350.000,00	40.058.000,00	(292.000,00)	99,28		
03.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.350.000,00	40.058.000,00	(292.000,00)	99,28		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.498.562.709,00)	(3.306.609.671,00)	191.953.038,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-17.790.860.581,00	(17.790.860.581,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-17.790.860.581,00	(17.790.860.581,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(17.790.860.581,00)	(17.790.860.581,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.498.562.709,00)	(21.097.470.252,00)	(17.598.907.543,00)	0		



Mulanuta, 23 Agustus 2024

B. BUPATI BOALEMO

D. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SKPD : 2-17.3-30.3-31.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Unit Organisasi : 2-17.3-30.3-31.01.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2-17.3-30.3-31.01.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	843.600.000,00	630.400.000,00	(213.200.000,00)	74,73		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	843.600.000,00	630.400.000,00	(213.200.000,00)	74,73		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	843.600.000,00	630.400.000,00	(213.200.000,00)	74,73		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.944.456.233,00	4.469.729.688,00	(474.726.545,00)	90,40		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.093.942.233,00	3.970.653.688,00	(123.288.545,00)	96,99		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.714.816,00	62.570.000,00	(144.816,00)	99,77		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.714.816,00	62.570.000,00	(144.816,00)	99,77		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	62.714.816,00	62.570.000,00	(144.816,00)	99,77		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.714.816,00	62.570.000,00	(144.816,00)	99,77		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.314.324.830,00	3.213.837.764,00	(100.487.066,00)	96,97		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.314.324.830,00	3.213.837.764,00	(100.487.066,00)	96,97		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.314.324.830,00	3.213.837.764,00	(100.487.066,00)	96,97		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.314.324.830,00	3.213.837.764,00	(100.487.066,00)	96,97		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.090.975,00	116.316.000,00	(774.975,00)	99,34		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.723.975,00	5.980.000,00	(743.975,00)	88,94		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.723.975,00	5.980.000,00	(743.975,00)	88,94		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.723.975,00	5.980.000,00	(743.975,00)	88,94		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.367.000,00	110.336.000,00	(31.000,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	110.367.000,00	110.336.000,00	(31.000,00)	99,97		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.367.000,00	110.336.000,00	(31.000,00)	99,97		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.811.612,00	577.929.924,00	(21.881.688,00)	96,35		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	599.811.612,00	577.929.924,00	(21.881.688,00)	96,35		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	584.811.612,00	564.053.804,00	(20.757.808,00)	96,45		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.811.612,00	564.053.804,00	(20.757.808,00)	96,45		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	13.876.120,00	(1.123.880,00)	92,51		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	13.876.120,00	(1.123.880,00)	92,51		
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	60.450.000,00	59.488.000,00	(962.000,00)	98,41		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	60.450.000,00	59.488.000,00	(962.000,00)	98,41		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	33.037.000,00	32.075.000,00	(962.000,00)	97,09		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.037.000,00	32.075.000,00	(962.000,00)	97,09		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.037.000,00	32.075.000,00	(962.000,00)	97,09		
02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	27.413.000,00	27.413.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	27.413.000,00	27.413.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.413.000,00	27.413.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.165.000,00	54.775.000,00	(390.000,00)	99,29		
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	71.370.000,00	68.359.500,00	(3.010.500,00)	95,78		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	71.370.000,00	68.359.500,00	(3.010.500,00)	95,78		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	71.370.000,00	68.359.500,00	(3.010.500,00)	95,78		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.220.000,00	68.359.500,00	(860.500,00)	98,76		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.220.000,00	68.359.500,00	(860.500,00)	98,76		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0		
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.529.000,00	316.453.500,00	(347.075.500,00)	47,69		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.100.856.233,00)	(3.839.329.688,00)	261.526.545,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-28.429.486.443,00	(28.429.486.443,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-28.429.486.443,00	(28.429.486.443,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(28.429.486.443,00)	(28.429.486.443,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.100.856.233,00)	(32.268.816.131,00)	(28.167.959.898,00)	0		



Tilamuta, 23 Agustus 2024
P. BUPATI BOALEMO

D. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL
SKPD : 2-18.3-29.0-00.01 Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral
Unit Organisasi : 2-18.3-29.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 2-18.3-29.0-00.01.000.000 Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral

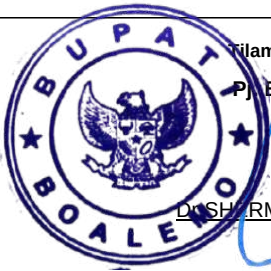
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.468.059.523,00	3.307.082.823,00	(160.976.700,00)	95,36		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.912.268.123,00	2.786.557.664,00	(125.710.459,00)	95,68		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.678.910,00	2.066.100,00	(612.810,00)	77,12		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.678.910,00	2.066.100,00	(612.810,00)	77,12		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.678.910,00	2.066.100,00	(612.810,00)	77,12		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.678.910,00	2.066.100,00	(612.810,00)	77,12		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.363.767.377,00	2.296.587.934,00	(67.179.443,00)	97,16		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.363.767.377,00	2.296.587.934,00	(67.179.443,00)	97,16		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.363.767.377,00	2.296.587.934,00	(67.179.443,00)	97,16		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.363.767.377,00	2.296.587.934,00	(67.179.443,00)	97,16		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.694.000,00	143.694.000,00	(27.000.000,00)	84,18		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.694.000,00	108.694.000,00	(27.000.000,00)	80,10		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	135.694.000,00	108.694.000,00	(27.000.000,00)	80,10		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.694.000,00	108.694.000,00	(27.000.000,00)	80,10		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.000.000,00	59.751.500,00	(1.248.500,00)	97,95		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.000.000,00	59.751.500,00	(1.248.500,00)	97,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	61.000.000,00	59.751.500,00	(1.248.500,00)	97,95		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.000.000,00	59.751.500,00	(1.248.500,00)	97,95		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.127.836,00	284.458.130,00	(29.669.706,00)	90,55		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	314.127.836,00	284.458.130,00	(29.669.706,00)	90,55		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	314.127.836,00	284.458.130,00	(29.669.706,00)	90,55		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.967.836,00	276.298.130,00	(29.669.706,00)	90,30		
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		
	Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi						
	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		
	Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan						
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.491.400,00	27.269.000,00	(7.222.400,00)	79,06		
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	469.500.000,00	441.977.250,00	(27.522.750,00)	94,14		
	PENANAMAN MODAL						
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	469.500.000,00	441.977.250,00	(27.522.750,00)	94,14		
	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan	177.619.200,00	173.702.950,00	(3.916.250,00)	97,80		
	Penanaman Modal						
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	177.619.200,00	173.702.950,00	(3.916.250,00)	97,80		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.619.200,00	173.702.950,00	(3.916.250,00)	97,80		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	291.880.800,00	268.274.300,00	(23.606.500,00)	91,91		
	Penanaman Modal						
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	291.880.800,00	268.274.300,00	(23.606.500,00)	91,91		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.880.800,00	268.274.300,00	(23.606.500,00)	91,91		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	51.800.000,00	51.278.909,00	(521.091,00)	98,99		
	INFORMASI PENANAMAN MODAL						
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	51.800.000,00	51.278.909,00	(521.091,00)	98,99		
	Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah						
	Kabupaten/Kota						
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	51.800.000,00	51.278.909,00	(521.091,00)	98,99		
	Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem						
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara						
	Elektronik						
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.478.909,00	(321.091,00)	82,16		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.478.909,00	(321.091,00)	82,16		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.468.059.523,00)	(3.307.082.823,00)	160.976.700,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-14.125.298.994,00	(14.125.298.994,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-14.125.298.994,00	(14.125.298.994,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(14.125.298.994,00)	(14.125.298.994,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.468.059.523,00)	(17.432.381.817,00)	(13.964.322.294,00)	0		



Matamora, 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOALEMO

Drs. SH. IRMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN
SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unit Organisasi : 2-23.2-24.0-00.01.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2-23.2-24.0-00.01.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.078.131.568,00	2.972.554.811,00	(105.576.757,00)	96,57		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.699.516.824,00	2.603.308.865,00	(96.207.959,00)	96,44		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.301.644.069,00	2.219.174.252,00	(82.469.817,00)	96,42		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.301.644.069,00	2.219.174.252,00	(82.469.817,00)	96,42		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.301.644.069,00	2.219.174.252,00	(82.469.817,00)	96,42		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.301.644.069,00	2.219.174.252,00	(82.469.817,00)	96,42		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.963.213,00	224.963.213,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.963.213,00	224.963.213,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	224.963.213,00	224.963.213,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.963.213,00	224.963.213,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.909.542,00	159.171.400,00	(13.738.142,00)	92,05		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.909.542,00	93.171.400,00	(13.738.142,00)	87,15		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	106.909.542,00	93.171.400,00	(13.738.142,00)	87,15		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.909.542,00	93.171.400,00	(13.738.142,00)	87,15		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	267.432.394,00	262.446.946,00	(4.985.448,00)	98,14		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.244.735,00	84.864.500,00	(3.380.235,00)	96,17		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	63.244.735,00	60.014.500,00	(3.230.235,00)	94,89		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	63.244.735,00	60.014.500,00	(3.230.235,00)	94,89		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.244.735,00	60.014.500,00	(3.230.235,00)	94,89		
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40		
02.2.01.09.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40		
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	179.187.659,00	177.582.446,00	(1.605.213,00)	99,10		
02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	39.416.881,00	39.091.446,00	(325.435,00)	99,17		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	37.091.881,00	36.766.446,00	(325.435,00)	99,12		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.091.881,00	36.766.446,00	(325.435,00)	99,12		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.770.778,00	38.591.000,00	(1.179.778,00)	97,03		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	39.770.778,00	38.591.000,00	(1.179.778,00)	97,03		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.770.778,00	38.591.000,00	(1.179.778,00)	97,03		
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	44.619.000,00	(2.381.000,00)	94,93		
03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	64.182.350,00	62.180.000,00	(2.002.350,00)	96,88		
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	64.182.350,00	62.180.000,00	(2.002.350,00)	96,88		
03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	64.182.350,00	62.180.000,00	(2.002.350,00)	96,88		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.182.350,00	62.180.000,00	(1.002.350,00)	98,41		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.182.350,00	62.180.000,00	(1.002.350,00)	98,41		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.078.131.568,00)	(2.972.554.811,00)	105.576.757,00	0		
	PEMBIAYAAN						



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-13.298.689.615,00	(13.298.689.615,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-13.298.689.615,00	(13.298.689.615,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(13.298.689.615,00)	(13.298.689.615,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.078.131.568,00)	(16.271.244.426,00)	(13.193.112.858,00)	0		



Tijamuta, 23 Agustus 2024
Bupati Boalemo

D. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	100.800.000,00	104.889.550,00	4.089.550,00	104,06		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.800.000,00	104.889.550,00	4.089.550,00	104,06		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	100.800.000,00	104.889.550,00	4.089.550,00	104,06		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	14.611.613.792,00	13.138.216.184,00	(1.473.397.608,00)	89,92		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.055.604.914,00	3.804.922.435,00	(250.682.479,00)	93,82		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.659.800,00	102.483.768,00	(41.176.032,00)	71,34		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	143.659.800,00	102.483.768,00	(41.176.032,00)	71,34		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	143.659.800,00	102.483.768,00	(41.176.032,00)	71,34		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.659.800,00	102.483.768,00	(41.176.032,00)	71,34		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.049.392.124,00	2.974.410.830,00	(74.981.294,00)	97,54		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.049.392.124,00	2.974.410.830,00	(74.981.294,00)	97,54		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.049.392.124,00	2.974.410.830,00	(74.981.294,00)	97,54		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.049.392.124,00	2.974.410.830,00	(74.981.294,00)	97,54		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.037.708,00	241.671.212,00	(95.366.496,00)	71,70		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.493.708,00	23.749.372,00	(4.744.336,00)	83,35		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.493.708,00	23.749.372,00	(4.744.336,00)	83,35		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.493.708,00	23.749.372,00	(4.744.336,00)	83,35		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.544.000,00	217.921.840,00	(90.622.160,00)	70,63		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	308.544.000,00	217.921.840,00	(90.622.160,00)	70,63		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.544.000,00	217.921.840,00	(90.622.160,00)	70,63		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.032.682,00	409.695.905,00	(30.336.777,00)	93,11		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.544.920,00	5.995.425,00	(4.549.495,00)	56,86		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.544.920,00	5.995.425,00	(4.549.495,00)	56,86		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.544.920,00	5.995.425,00	(4.549.495,00)	56,86		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.344.843,00	81.286.480,00	(5.058.363,00)	94,14		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	86.344.843,00	81.286.480,00	(5.058.363,00)	94,14		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.344.843,00	81.286.480,00	(5.058.363,00)	94,14		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.982.919,00	65.704.000,00	(20.278.919,00)	76,42		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.982.919,00	65.704.000,00	(20.278.919,00)	76,42		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.822.919,00	57.544.000,00	(20.278.919,00)	73,94		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.160.000,00	256.710.000,00	(450.000,00)	99,83		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	257.160.000,00	256.710.000,00	(450.000,00)	99,83		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.160.000,00	256.710.000,00	(450.000,00)	99,83		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.482.600,00	22.660.720,00	(8.821.880,00)	71,98		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.482.600,00	22.660.720,00	(8.821.880,00)	71,98		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.482.600,00	22.660.720,00	(8.821.880,00)	71,98		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.482.600,00	22.660.720,00	(8.821.880,00)	71,98		
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.235.786.535,00	4.376.184.085,00	(859.602.450,00)	83,58		
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.518.617.555,00	3.845.219.435,00	(673.398.120,00)	85,10		
03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.779.244.555,00	1.506.244.555,00	(273.000.000,00)	84,66		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.779.244.555,00	1.506.244.555,00	(273.000.000,00)	84,66		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.779.244.555,00	1.506.244.555,00	(273.000.000,00)	84,66		
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.739.373.000,00	2.338.974.880,00	(400.398.120,00)	85,38		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.966.444.480,00	1.711.541.695,00	(254.902.785,00)	87,04		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.966.444.480,00	1.711.541.695,00	(254.902.785,00)	87,04		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	772.928.520,00	627.433.185,00	(145.495.335,00)	81,18		
03.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	772.928.520,00	627.433.185,00	(145.495.335,00)	81,18		
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	717.168.980,00	530.964.650,00	(186.204.330,00)	74,04		
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	717.168.980,00	530.964.650,00	(186.204.330,00)	74,04		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	717.168.980,00	530.964.650,00	(186.204.330,00)	74,04		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	717.168.980,00	530.964.650,00	(186.204.330,00)	74,04		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.382.307.355,00	3.346.516.418,00	(35.790.937,00)	98,94		
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	52.442.980,00	52.436.480,00	(6.500,00)	99,99		
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	52.442.980,00	52.436.480,00	(6.500,00)	99,99		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.442.980,00	52.436.480,00	(6.500,00)	99,99		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.442.980,00	52.436.480,00	(6.500,00)	99,99		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.329.864.375,00	3.294.079.938,00	(35.784.437,00)	98,93		
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	254.864.375,00	254.864.372,00	(3,00)	100,00		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	254.864.375,00	254.864.372,00	(3,00)	100,00		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.864.375,00	254.864.372,00	(3,00)	100,00		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.075.000.000,00	3.039.215.566,00	(35.784.434,00)	98,84		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.075.000.000,00	3.039.215.566,00	(35.784.434,00)	98,84		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000.000,00	3.039.215.566,00	(35.784.434,00)	98,84		
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06.2.03.02	Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06.2.03.02.5.1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06.2.03.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.937.914.988,00	1.610.593.246,00	(327.321.742,00)	83,11		
	SURPLUS / DEFISIT	(14.510.813.792,00)	(13.033.326.634,00)	1.477.487.158,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-42.034.750.165,00	(42.034.750.165,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-42.034.750.165,00	(42.034.750.165,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(42.034.750.165,00)	(42.034.750.165,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.510.813.792,00)	(55.068.076.799,00)	(40.557.263.007,00)	0		

Tirumuta, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
DASHIRMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA
SKPD : 3-26.2-22.2-19.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (old)
Unit Organisasi : 3-26.2-22.2-19.01.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (old)
Sub Unit Organisasi : 3-26.2-22.2-19.01.000.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (old)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	321.748.000,00	330.665.000,00	8.917.000,00	102,77		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	321.748.000,00	330.665.000,00	8.917.000,00	102,77		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	321.748.000,00	330.665.000,00	8.917.000,00	102,77		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.736.840.378,00	6.604.731.023,00	(1.132.109.355,00)	85,37		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.400.185.720,00	3.140.565.994,00	(259.619.726,00)	92,36		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.358.600,00	42.474.800,00	(34.883.800,00)	54,91		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.700.400,00	12.968.800,00	(5.731.600,00)	69,35		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.700.400,00	12.968.800,00	(5.731.600,00)	69,35		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.400,00	12.968.800,00	(5.731.600,00)	69,35		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.149.000,00	29.506.000,00	(25.643.000,00)	53,50		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	55.149.000,00	29.506.000,00	(25.643.000,00)	53,50		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.149.000,00	29.506.000,00	(25.643.000,00)	53,50		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.509.200,00	0,00	(3.509.200,00)	0		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.509.200,00	0,00	(3.509.200,00)	0		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.509.200,00	0,00	(3.509.200,00)	0		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.791.040.405,00	2.615.553.333,00	(175.487.072,00)	93,71		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.772.934.405,00	2.610.433.333,00	(162.501.072,00)	94,14		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.772.934.405,00	2.610.433.333,00	(162.501.072,00)	94,14		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.772.934.405,00	2.610.433.333,00	(162.501.072,00)	94,14		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.106.000,00	5.120.000,00	(12.986.000,00)	28,28		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	18.106.000,00	5.120.000,00	(12.986.000,00)	28,28		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.106.000,00	5.120.000,00	(12.986.000,00)	28,28		
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.878.000,00	4.778.600,00	(1.099.400,00)	81,30		
01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5.878.000,00	4.778.600,00	(1.099.400,00)	81,30		
01.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.878.000,00	4.778.600,00	(1.099.400,00)	81,30		
01.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.878.000,00	4.778.600,00	(1.099.400,00)	81,30		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.944.239,00	159.295.345,00	(20.648.894,00)	88,52		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.600.239,00	59.575.000,00	(11.025.239,00)	84,38		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	61.600.239,00	50.775.000,00	(10.825.239,00)	82,43		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.600.239,00	50.775.000,00	(10.825.239,00)	82,43		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,78		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,78		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.344.000,00	99.720.345,00	(9.623.655,00)	91,20		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	109.344.000,00	99.720.345,00	(9.623.655,00)	91,20		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.344.000,00	99.720.345,00	(9.623.655,00)	91,20		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.190.836,00	284.557.041,00	(6.633.795,00)	97,72		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.046.486,00	1.269.486,00	(777.000,00)	62,03		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.046.486,00	1.269.486,00	(777.000,00)	62,03		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.046.486,00	1.269.486,00	(777.000,00)	62,03		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.893.350,00	12.653.055,00	(3.240.295,00)	79,61		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.893.350,00	12.653.055,00	(3.240.295,00)	79,61		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.893.350,00	12.653.055,00	(3.240.295,00)	79,61		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.348.000,00	10.824.000,00	(1.524.000,00)	87,66		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.348.000,00	10.824.000,00	(1.524.000,00)	87,66		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.348.000,00	10.824.000,00	(1.524.000,00)	87,66		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.903.000,00	259.810.500,00	(1.092.500,00)	99,58		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	260.903.000,00	259.810.500,00	(1.092.500,00)	99,58		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.503.000,00	256.410.500,00	(1.092.500,00)	99,58		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.773.640,00	33.906.875,00	(20.866.765,00)	61,90		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.963.640,00	19.506.875,00	(3.456.765,00)	84,95		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.963.640,00	19.506.875,00	(3.456.765,00)	84,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.963.640,00	19.506.875,00	(3.456.765,00)	84,95		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.010.000,00	11.000.000,00	(10.000,00)	99,91		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.010.000,00	11.000.000,00	(10.000,00)	99,91		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.010.000,00	11.000.000,00	(10.000,00)	99,91		
01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	7.000.000,00	3.400.000,00	(3.600.000,00)	48,57		
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	3.400.000,00	(3.600.000,00)	48,57		
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	3.400.000,00	(3.600.000,00)	48,57		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	0		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	0		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	0		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.136.809.424,00	908.619.660,00	(228.189.764,00)	79,93		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.136.809.424,00	908.619.660,00	(228.189.764,00)	79,93		
02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	458.609.624,00	456.792.660,00	(1.816.964,00)	99,60		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	458.609.624,00	456.792.660,00	(1.816.964,00)	99,60		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.609.624,00	456.792.660,00	(1.816.964,00)	99,60		
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	620.000.000,00	451.827.000,00	(168.173.000,00)	72,88		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	620.000.000,00	451.827.000,00	(168.173.000,00)	72,88		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.000.000,00	451.827.000,00	(168.173.000,00)	72,88		
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	58.199.800,00	0,00	(58.199.800,00)	0		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	58.199.800,00	0,00	(58.199.800,00)	0		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.199.800,00	0,00	(58.199.800,00)	0		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	112.039.900,00	112.039.700,00	(200,00)	100,00		
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.516.400,00	10.516.200,00	(200,00)	100,00		
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10.516.400,00	10.516.200,00	(200,00)	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.516.400,00	10.516.200,00	(200,00)	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.516.400,00	10.516.200,00	(200,00)	100,00		
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	101.523.500,00	101.523.500,00	0,00	100,00		
02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	101.523.500,00	101.523.500,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.523.500,00	101.523.500,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.523.500,00	101.523.500,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.905.657,00	566.621.363,00	(24.284.294,00)	95,89		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.830.115.971,00	1.434.089.223,00	(396.026.748,00)	78,36		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.830.115.971,00	1.434.089.223,00	(396.026.748,00)	78,36		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	220.259.840,00	219.011.000,00	(1.248.840,00)	99,43		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	220.259.840,00	219.011.000,00	(1.248.840,00)	99,43		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.259.840,00	219.011.000,00	(1.248.840,00)	99,43		
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	427.332.365,00	366.621.525,00	(60.710.840,00)	85,79		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	427.332.365,00	366.621.525,00	(60.710.840,00)	85,79		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.332.365,00	366.621.525,00	(60.710.840,00)	85,79		
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.182.523.766,00	848.456.698,00	(334.067.068,00)	71,75		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	942.892.651,00	540.378.651,00	(402.514.000,00)	57,31		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.892.651,00	540.378.651,00	(2.514.000,00)	99,54		
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	0		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	239.631.115,00	308.078.047,00	68.446.932,00	128,56		
03.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.631.115,00	308.078.047,00	68.446.932,00	128,56		
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	638.043.706,00	424.096.683,00	(213.947.023,00)	66,47		
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	638.043.706,00	424.096.683,00	(213.947.023,00)	66,47		
04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	251.079.760,00	100.920.683,00	(150.159.077,00)	40,19		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0		
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0		
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	101.079.760,00	100.920.683,00	(159.077,00)	99,84		
04.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.079.760,00	100.920.683,00	(159.077,00)	99,84		
04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	386.963.946,00	323.176.000,00	(63.787.946,00)	83,52		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	383.463.946,00	319.676.000,00	(63.787.946,00)	83,37		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.463.946,00	319.676.000,00	(63.787.946,00)	83,37		
04.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
04.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
04.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	13.698.400,00	(41.600,00)	99,70		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.415.092.378,00)	(6.274.066.023,00)	1.141.026.355,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-27.791.572.124,00	(27.791.572.124,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-27.791.572.124,00	(27.791.572.124,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(27.791.572.124,00)	(27.791.572.124,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.415.092.378,00)	(34.065.638.147,00)	(26.650.545.769,00)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM



 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2023							
Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN SKPD : 3-27.2-09.0-00.01 Dinas Pertanian Unit Organisasi : 3-27.2-09.0-00.01.000 Dinas Pertanian Sub Unit Organisasi : 3-27.2-09.0-00.01.000.000 Dinas Pertanian							
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	40.080.000,00	38.670.000,00	(1.410.000,00)	96,48		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.080.000,00	38.670.000,00	(1.410.000,00)	96,48		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	40.080.000,00	38.670.000,00	(1.410.000,00)	96,48		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	19.952.629.846,00	18.680.172.937,00	(1.272.456.909,00)	93,62		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.743.289.028,00	9.609.215.444,00	(134.073.584,00)	98,62		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.247.417,00	46.138.000,00	(1.109.417,00)	97,65		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.643.417,00	22.534.000,00	(1.109.417,00)	95,31		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.643.417,00	22.534.000,00	(1.109.417,00)	95,31		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.643.417,00	22.534.000,00	(1.109.417,00)	95,31		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.604.000,00	23.604.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.604.000,00	23.604.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.604.000,00	23.604.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.738.883.357,00	8.647.027.136,00	(91.856.221,00)	98,95		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.738.883.357,00	8.647.027.136,00	(91.856.221,00)	98,95		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.738.883.357,00	8.647.027.136,00	(91.856.221,00)	98,95		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.738.883.357,00	8.647.027.136,00	(91.856.221,00)	98,95		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.657.751,00	3.213.000,00	(1.444.751,00)	68,98		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.657.751,00	3.213.000,00	(1.444.751,00)	68,98		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.657.751,00	3.213.000,00	(1.444.751,00)	68,98		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.657.751,00	3.213.000,00	(1.444.751,00)	68,98		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.896.600,00	147.014.255,00	(882.345,00)	99,40		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.928.600,00	50.535.855,00	(392.745,00)	99,23		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.928.600,00	15.735.855,00	(192.745,00)	98,79		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.928.600,00	15.735.855,00	(192.745,00)	98,79		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	34.800.000,00	(200.000,00)	99,43		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.800.000,00	(200.000,00)	99,43		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.968.000,00	96.478.400,00	(489.600,00)	99,50		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	96.968.000,00	96.478.400,00	(489.600,00)	99,50		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.968.000,00	96.478.400,00	(489.600,00)	99,50		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.083.903,00	745.831.916,00	(36.251.987,00)	95,36		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.583.903,00	27.422.605,00	(161.298,00)	99,42		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.583.903,00	27.422.605,00	(161.298,00)	99,42		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.583.903,00	27.422.605,00	(161.298,00)	99,42		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.275.000,00	63.754.311,00	(11.520.689,00)	84,70		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.275.000,00	63.754.311,00	(11.520.689,00)	84,70		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.275.000,00	63.754.311,00	(11.520.689,00)	84,70		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.500.000,00	85.860.000,00	(23.640.000,00)	78,41		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	109.500.000,00	85.860.000,00	(23.640.000,00)	78,41		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.500.000,00	85.860.000,00	(23.640.000,00)	78,41		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	569.725.000,00	568.795.000,00	(930.000,00)	99,84		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	569.725.000,00	568.795.000,00	(930.000,00)	99,84		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.720.000,00	(280.000,00)	90,67		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.725.000,00	566.075.000,00	(650.000,00)	99,89		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.520.000,00	19.991.137,00	(2.528.863,00)	88,77		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.500.000,00	18.191.137,00	(308.863,00)	98,33		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.500.000,00	18.191.137,00	(308.863,00)	98,33		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.191.137,00	(308.863,00)	98,33		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.020.000,00	1.800.000,00	(2.220.000,00)	44,78		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.020.000,00	1.800.000,00	(2.220.000,00)	44,78		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	1.800.000,00	(2.220.000,00)	44,78		
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.094.981.616,00	1.813.938.154,00	(281.043.462,00)	86,58		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.092.555.000,00	815.355.800,00	(277.199.200,00)	74,63		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	730.105.000,00	725.355.800,00	(4.749.200,00)	99,35		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	730.105.000,00	725.355.800,00	(4.749.200,00)	99,35		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.105.000,00	725.355.800,00	(4.749.200,00)	99,35		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	362.450.000,00	90.000.000,00	(272.450.000,00)	24,83		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	362.450.000,00	90.000.000,00	(272.450.000,00)	24,83		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.450.000,00	90.000.000,00	(272.450.000,00)	24,83		
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	969.641.999,00	966.542.580,00	(3.099.419,00)	99,68		
02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	969.641.999,00	966.542.580,00	(3.099.419,00)	99,68		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	969.641.999,00	966.542.580,00	(3.099.419,00)	99,68		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.641.999,00	966.542.580,00	(3.099.419,00)	99,68		
02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.227.000,00	30.066.774,00	(160.226,00)	99,47		
02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	30.227.000,00	30.066.774,00	(160.226,00)	99,47		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.227.000,00	30.066.774,00	(160.226,00)	99,47		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.227.000,00	30.066.774,00	(160.226,00)	99,47		
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.557.617,00	1.973.000,00	(584.617,00)	77,14		
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.557.617,00	1.973.000,00	(584.617,00)	77,14		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.557.617,00	1.973.000,00	(584.617,00)	77,14		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.557.617,00	1.973.000,00	(584.617,00)	77,14		
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.655.904.000,00	1.535.325.000,00	(120.579.000,00)	92,72		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.655.904.000,00	1.535.325.000,00	(120.579.000,00)	92,72		
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	964.750.000,00	885.950.000,00	(78.800.000,00)	91,83		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	964.750.000,00	885.950.000,00	(78.800.000,00)	91,83		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.750.000,00	885.950.000,00	(78.800.000,00)	91,83		
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	625.000.000,00	621.875.000,00	(3.125.000,00)	99,50		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	625.000.000,00	621.875.000,00	(3.125.000,00)	99,50		
03.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	625.000.000,00	621.875.000,00	(3.125.000,00)	99,50		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	66.154.000,00	27.500.000,00	(38.654.000,00)	41,57		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	27.513.000,00	27.500.000,00	(13.000,00)	99,95		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.513.000,00	27.500.000,00	(13.000,00)	99,95		
03.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	38.641.000,00	0,00	(38.641.000,00)	0		
03.2.02.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.641.000,00	0,00	(38.641.000,00)	0		
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	13.982.960,00	6.582.000,00	(7.400.960,00)	47,07		
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	13.982.960,00	6.582.000,00	(7.400.960,00)	47,07		
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.982.960,00	6.582.000,00	(7.400.960,00)	47,07		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.982.960,00	6.582.000,00	(7.400.960,00)	47,07		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.982.960,00	6.582.000,00	(7.400.960,00)	47,07		
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	150.575.000,00	37.905.000,00	(112.670.000,00)	25,17		
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000,00	37.905.000,00	(112.670.000,00)	25,17		
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000,00	37.905.000,00	(112.670.000,00)	25,17		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	148.043.400,00	37.905.000,00	(110.138.400,00)	25,60		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.043.400,00	37.905.000,00	(110.138.400,00)	25,60		
04.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	2.531.600,00	0,00	(2.531.600,00)	0		
04.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.531.600,00	0,00	(2.531.600,00)	0		
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		
05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.775.223,00	27.902.400,00	(5.872.823,00)	82,61		
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6.260.122.019,00	5.649.304.939,00	(610.817.080,00)	90,24		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	6.260.122.019,00	5.649.304.939,00	(610.817.080,00)	90,24		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	138.711.490,00	130.647.785,00	(8.063.705,00)	94,19		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	138.711.490,00	130.647.785,00	(8.063.705,00)	94,19		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.711.490,00	130.647.785,00	(8.063.705,00)	94,19		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	60.074.000,00	44.725.000,00	(15.349.000,00)	74,45		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.074.000,00	44.725.000,00	(15.349.000,00)	74,45		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.074.000,00	44.725.000,00	(15.349.000,00)	74,45		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	2.840.950.000,00	2.308.301.974,00	(532.648.026,00)	81,25		
	Penyuluhan Pertanian						
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.950.000,00	35.590.000,00	(360.000,00)	99,00		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	35.590.000,00	(360.000,00)	99,00		
07.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	2.805.000.000,00	2.272.711.974,00	(532.288.026,00)	81,02		
07.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	523.989.600,00	(76.010.400,00)	87,33		
07.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.205.000.000,00	1.748.722.374,00	(456.277.626,00)	79,31		
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang	3.220.386.529,00	3.165.630.180,00	(54.756.349,00)	98,30		
	Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota						
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.220.386.529,00	3.165.630.180,00	(54.756.349,00)	98,30		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.220.386.529,00	3.165.630.180,00	(54.756.349,00)	98,30		
	SURPLUS / DEFISIT	(19.912.549.846,00)	(18.641.502.937,00)	1.271.046.909,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-113.143.526.876,00	(113.143.526.876,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-113.143.526.876,00	(113.143.526.876,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(113.143.526.876,00)	(113.143.526.876,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(19.912.549.846,00)	(131.785.029.813,00)	(111.872.479.967,00)	0		

Tanjung, 23 Agustus 2024

Pt. BUPATI BOALEMO

DR. S. FERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.32 TRANSMIGRASI
SKPD : 3-32.2-07.0-00.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Unit Organisasi : 3-32.2-07.0-00.01.000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3-32.2-07.0-00.01.000.000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.477.807.790,00	3.395.246.640,00	(82.561.150,00)	97,63		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.908.909.935,00	2.833.352.340,00	(75.557.595,00)	97,40		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.434.000,00	48.214.000,00	(220.000,00)	99,55		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.434.000,00	48.214.000,00	(220.000,00)	99,55		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	48.434.000,00	48.214.000,00	(220.000,00)	99,55		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.434.000,00	48.214.000,00	(220.000,00)	99,55		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.301.396.134,00	2.231.444.260,00	(69.951.874,00)	96,96		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.301.396.134,00	2.231.444.260,00	(69.951.874,00)	96,96		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.301.396.134,00	2.231.444.260,00	(69.951.874,00)	96,96		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.301.396.134,00	2.231.444.260,00	(69.951.874,00)	96,96		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.126.000,00	10.110.000,00	(16.000,00)	99,84		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.126.000,00	10.110.000,00	(16.000,00)	99,84		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.126.000,00	10.110.000,00	(16.000,00)	99,84		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.126.000,00	10.110.000,00	(16.000,00)	99,84		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.176.000,00	119.979.748,00	(196.252,00)	99,84		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.176.000,00	119.979.748,00	(196.252,00)	99,84		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	120.176.000,00	119.979.748,00	(196.252,00)	99,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.176.000,00	119.979.748,00	(196.252,00)	99,84		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.777.801,00	423.604.332,00	(5.173.469,00)	98,79		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	428.777.801,00	423.604.332,00	(5.173.469,00)	98,79		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	428.777.801,00	423.604.332,00	(5.173.469,00)	98,79		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.057.801,00	420.884.332,00	(5.173.469,00)	98,79		
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.910.255,00	145.250.300,00	(4.659.955,00)	96,89		
03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.097.600,00	48.622.000,00	(475.600,00)	99,03		
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		
04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	289.000.000,00	(1.000.000,00)	99,66		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.892.000,00	49.042.000,00	(850.000,00)	98,30		
04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	49.892.000,00	49.042.000,00	(850.000,00)	98,30		
04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	39.278.000,00	38.478.000,00	(800.000,00)	97,96		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.278.000,00	38.478.000,00	(800.000,00)	97,96		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.278.000,00	38.478.000,00	(800.000,00)	97,96		
04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	10.614.000,00	10.564.000,00	(50.000,00)	99,53		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.614.000,00	10.564.000,00	(50.000,00)	99,53		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.614.000,00	10.564.000,00	(50.000,00)	99,53		
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		
05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.000,00	29.980.000,00	(18.000,00)	99,94		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.477.807.790,00)	(3.395.246.640,00)	82.561.150,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-19.768.330.644,00	(19.768.330.644,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-19.768.330.644,00	(19.768.330.644,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(19.768.330.644,00)	(19.768.330.644,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.477.807.790,00)	(23.163.577.284,00)	(19.685.769.494,00)	0		



Tilamuta, 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOALEMO

Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	4.000.000,00	4.750.000,00	750.000,00	118,75		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.000.000,00	4.750.000,00	750.000,00	118,75		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	4.000.000,00	4.750.000,00	750.000,00	118,75		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	22.143.437.361,00	19.963.552.245,00	(2.179.885.116,00)	90,16		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.745.338.906,00	15.986.615.545,00	(1.758.723.361,00)	90,09		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.887.829.387,00	9.563.636.730,00	(324.192.657,00)	96,72		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.887.829.387,00	9.563.636.730,00	(324.192.657,00)	96,72		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.887.829.387,00	9.563.636.730,00	(324.192.657,00)	96,72		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.887.829.387,00	9.563.636.730,00	(324.192.657,00)	96,72		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.657.050,00	425.142.620,00	(110.514.430,00)	79,37		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	528.247.800,00	417.739.120,00	(110.508.680,00)	79,08		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	528.247.800,00	417.739.120,00	(110.508.680,00)	79,08		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.247.800,00	417.739.120,00	(110.508.680,00)	79,08		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.409.250,00	7.403.500,00	(5.750,00)	99,92		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.409.250,00	7.403.500,00	(5.750,00)	99,92		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.409.250,00	7.403.500,00	(5.750,00)	99,92		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.778.782.180,00	2.280.311.303,00	(498.470.877,00)	82,06		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.778.782.180,00	2.280.311.303,00	(498.470.877,00)	82,06		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.757.697.180,00	2.259.261.303,00	(498.435.877,00)	81,93		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.217.180,00	2.251.781.303,00	(498.435.877,00)	81,88		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	21.085.000,00	21.050.000,00	(35.000,00)	99,83		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.085.000,00	21.050.000,00	(35.000,00)	99,83		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.212.658.467,00	2.730.740.566,00	(481.917.901,00)	85,00		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	330.200.054,00	282.919.992,00	(47.280.062,00)	85,68		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	330.200.054,00	282.919.992,00	(47.280.062,00)	85,68		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	330.200.054,00	282.919.992,00	(47.280.062,00)	85,68		
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.882.458.413,00	2.447.820.574,00	(434.637.839,00)	84,92		
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.877.958.413,00	2.444.320.574,00	(433.637.839,00)	84,93		
01.2.11.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.877.958.413,00	2.444.320.574,00	(433.637.839,00)	84,93		
01.2.11.04.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	77,78		
01.2.11.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	77,78		
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	48.036.186,00	48.035.500,00	(686,00)	100,00		
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	48.036.186,00	48.035.500,00	(686,00)	100,00		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.836.186,00	3.835.500,00	(686,00)	99,98		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.836.186,00	3.835.500,00	(686,00)	99,98		
01.2.12.01.5.2	BELANJA MODAL	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.12.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.13	Penataan Organisasi	808.098.170,00	471.185.553,00	(336.912.617,00)	58,31		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	161.849.800,00	127.999.400,00	(33.850.400,00)	79,09		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	144.264.800,00	110.414.400,00	(33.850.400,00)	76,54		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.264.800,00	110.414.400,00	(33.850.400,00)	76,54		
01.2.13.01.5.2	BELANJA MODAL	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	257.437.000,00	181.870.100,00	(75.566.900,00)	70,65		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	257.437.000,00	181.870.100,00	(75.566.900,00)	70,65		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.437.000,00	181.870.100,00	(75.566.900,00)	70,65		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	245.976.370,00	59.714.863,00	(186.261.507,00)	24,28		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	228.391.370,00	42.129.863,00	(186.261.507,00)	18,45		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.391.370,00	42.129.863,00	(186.261.507,00)	18,45		
01.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	18.190.000,00	4.290.000,00	(13.900.000,00)	23,58		
01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.190.000,00	4.290.000,00	(13.900.000,00)	23,58		
01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.190.000,00	4.290.000,00	(13.900.000,00)	23,58		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	124.645.000,00	97.311.190,00	(27.333.810,00)	78,07		
01.2.13.05.5.1	BELANJA OPERASI	107.060.000,00	79.726.190,00	(27.333.810,00)	74,47		
01.2.13.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.060.000,00	79.726.190,00	(27.333.810,00)	74,47		
01.2.13.05.5.2	BELANJA MODAL	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	100,00		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	474.277.466,00	467.563.273,00	(6.714.193,00)	98,58		
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	163.149.491,00	161.997.683,00	(1.151.808,00)	99,29		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	163.149.491,00	161.997.683,00	(1.151.808,00)	99,29		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.149.491,00	161.997.683,00	(1.151.808,00)	99,29		
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	152.829.775,00	147.596.990,00	(5.232.785,00)	96,58		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	152.829.775,00	147.596.990,00	(5.232.785,00)	96,58		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.829.775,00	147.596.990,00	(5.232.785,00)	96,58		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	158.298.200,00	157.968.600,00	(329.600,00)	99,79		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	138.298.200,00	137.968.600,00	(329.600,00)	99,76		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.298.200,00	137.968.600,00	(329.600,00)	99,76		
01.2.14.03.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.14.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.725.159.218,00	2.549.314.876,00	(175.844.342,00)	93,55		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	451.525.553,00	416.997.341,00	(34.528.212,00)	92,35		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	109.848.758,00	89.959.766,00	(19.888.992,00)	81,89		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	109.848.758,00	89.959.766,00	(19.888.992,00)	81,89		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.848.758,00	89.959.766,00	(19.888.992,00)	81,89		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	101.685.000,00	87.769.000,00	(13.916.000,00)	86,31		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.685.000,00	87.769.000,00	(13.916.000,00)	86,31		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.685.000,00	87.769.000,00	(13.916.000,00)	86,31		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	239.991.795,00	239.268.575,00	(723.220,00)	99,70		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	239.991.795,00	239.268.575,00	(723.220,00)	99,70		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.991.795,00	239.268.575,00	(723.220,00)	99,70		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.570.444.415,00	1.454.735.300,00	(115.709.115,00)	92,63		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.499.111.615,00	1.454.735.300,00	(44.376.315,00)	97,04		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.499.111.615,00	1.454.735.300,00	(44.376.315,00)	97,04		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.111.615,00	1.454.735.300,00	(44.376.315,00)	97,04		
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	70.666.400,00	0,00	(70.666.400,00)	0		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.666.400,00	0,00	(70.666.400,00)	0		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.400,00	0,00	(666.400,00)	0		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	666.400,00	0,00	(666.400,00)	0		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	666.400,00	0,00	(666.400,00)	0		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.400,00	0,00	(666.400,00)	0		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	669.319.250,00	645.552.235,00	(23.767.015,00)	96,45		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	177.124.000,00	177.040.000,00	(84.000,00)	99,95		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	177.124.000,00	177.040.000,00	(84.000,00)	99,95		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.124.000,00	177.040.000,00	(84.000,00)	99,95		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	388.852.975,00	382.894.500,00	(5.958.475,00)	98,47		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	388.852.975,00	382.894.500,00	(5.958.475,00)	98,47		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.852.975,00	382.894.500,00	(5.958.475,00)	98,47		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	103.342.275,00	85.617.735,00	(17.724.540,00)	82,85		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	67.342.275,00	49.617.735,00	(17.724.540,00)	73,68		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.342.275,00	49.617.735,00	(17.724.540,00)	73,68		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	33.870.000,00	32.030.000,00	(1.840.000,00)	94,57		
02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	33.870.000,00	32.030.000,00	(1.840.000,00)	94,57		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.870.000,00	32.030.000,00	(1.840.000,00)	94,57		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.870.000,00	32.030.000,00	(1.840.000,00)	94,57		
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.672.939.237,00	1.427.621.824,00	(245.317.413,00)	85,34		
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	271.294.946,00	193.474.360,00	(77.820.586,00)	71,32		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	142.092.806,00	130.224.360,00	(11.868.446,00)	91,65		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.092.806,00	130.224.360,00	(11.868.446,00)	91,65		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.092.806,00	130.224.360,00	(11.868.446,00)	91,65		
03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	43.339.800,00	0,00	(43.339.800,00)	0		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	43.339.800,00	0,00	(43.339.800,00)	0		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.339.800,00	0,00	(43.339.800,00)	0		
03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	70.862.340,00	48.250.000,00	(22.612.340,00)	68,09		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	70.862.340,00	48.250.000,00	(22.612.340,00)	68,09		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.862.340,00	48.250.000,00	(22.612.340,00)	68,09		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	587.417.096,00	425.432.394,00	(161.984.702,00)	72,42		
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	191.298.901,00	109.659.391,00	(81.639.510,00)	57,32		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	191.298.901,00	109.659.391,00	(81.639.510,00)	57,32		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.298.901,00	109.659.391,00	(81.639.510,00)	57,32		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	73.588.000,00	53.887.503,00	(19.700.497,00)	73,23		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.588.000,00	53.887.503,00	(19.700.497,00)	73,23		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.588.000,00	53.887.503,00	(19.700.497,00)	73,23		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	322.530.195,00	261.885.500,00	(60.644.695,00)	81,20		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	305.530.195,00	251.885.500,00	(53.644.695,00)	82,44		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.530.195,00	251.885.500,00	(53.644.695,00)	82,44		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	58,82		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	58,82		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	771.149.195,00	769.095.070,00	(2.054.125,00)	99,73		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	285.225.000,00	285.147.160,00	(77.840,00)	99,97		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	285.225.000,00	285.147.160,00	(77.840,00)	99,97		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	81.147.160,00	(77.840,00)	99,90		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	369.590.000,00	367.714.500,00	(1.875.500,00)	99,49		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	328.590.000,00	326.730.500,00	(1.859.500,00)	99,43		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.590.000,00	326.730.500,00	(1.859.500,00)	99,43		
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	41.000.000,00	40.984.000,00	(16.000,00)	99,96		
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.000.000,00	40.984.000,00	(16.000,00)	99,96		
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	116.334.195,00	116.233.410,00	(100.785,00)	99,91		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	116.334.195,00	116.233.410,00	(100.785,00)	99,91		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.334.195,00	116.233.410,00	(100.785,00)	99,91		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	43.078.000,00	39.620.000,00	(3.458.000,00)	91,97		
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	21.133.000,00	21.100.000,00	(33.000,00)	99,84		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.133.000,00	21.100.000,00	(33.000,00)	99,84		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.133.000,00	21.100.000,00	(33.000,00)	99,84		
03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	3.425.000,00	0,00	(3.425.000,00)	0		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.425.000,00	0,00	(3.425.000,00)	0		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	0,00	(3.425.000,00)	0		
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(22.139.437.361,00)	(19.958.802.245,00)	2.180.635.116,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-130.820.594.068,00	(130.820.594.068,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-130.820.594.068,00	(130.820.594.068,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(130.820.594.068,00)	(130.820.594.068,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(22.139.437.361,00)	(150.779.396.313,00)	(128.639.958.952,00)	0		



Tijamuta, 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOALEMO

Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	25.516.130.400,00	23.589.537.686,00	(1.926.592.714,00)	92,45		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.946.062.481,00	18.017.679.377,00	(928.383.104,00)	95,10		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.764.000,00	183.777.600,00	(41.986.400,00)	81,40		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.860.000,00	3.900.000,00	(9.960.000,00)	28,14		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.860.000,00	3.900.000,00	(9.960.000,00)	28,14		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	3.900.000,00	(9.960.000,00)	28,14		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.724.000,00	46.197.600,00	(18.526.400,00)	71,38		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	64.724.000,00	46.197.600,00	(18.526.400,00)	71,38		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.724.000,00	46.197.600,00	(18.526.400,00)	71,38		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.180.000,00	133.680.000,00	(13.500.000,00)	90,83		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	147.180.000,00	133.680.000,00	(13.500.000,00)	90,83		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.180.000,00	133.680.000,00	(13.500.000,00)	90,83		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.828.779.135,00	2.785.729.311,00	(43.049.824,00)	98,48		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.828.779.135,00	2.785.729.311,00	(43.049.824,00)	98,48		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.828.779.135,00	2.785.729.311,00	(43.049.824,00)	98,48		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.828.779.135,00	2.785.729.311,00	(43.049.824,00)	98,48		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.808.000,00	125.113.000,00	(3.695.000,00)	97,13		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.400.000,00	85.150.000,00	(3.250.000,00)	96,32		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	88.400.000,00	85.150.000,00	(3.250.000,00)	96,32		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	85.150.000,00	(3.250.000,00)	96,32		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.408.000,00	39.963.000,00	(445.000,00)	98,90		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	40.408.000,00	39.963.000,00	(445.000,00)	98,90		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.408.000,00	39.963.000,00	(445.000,00)	98,90		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.260.753,00	412.669.107,00	(20.591.646,00)	95,25		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.260.753,00	412.669.107,00	(20.591.646,00)	95,25		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	241.260.753,00	222.577.107,00	(18.683.646,00)	92,26		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.260.753,00	222.577.107,00	(18.683.646,00)	92,26		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	192.000.000,00	190.092.000,00	(1.908.000,00)	99,01		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.000.000,00	190.092.000,00	(1.908.000,00)	99,01		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	24.080.000,00	(920.000,00)	96,32		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	24.080.000,00	(920.000,00)	96,32		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.080.000,00	(920.000,00)	96,32		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.080.000,00	(920.000,00)	96,32		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.927.148.248,00	1.801.442.391,00	(125.705.857,00)	93,48		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.997.248,00	249.194.853,00	(65.802.395,00)	79,11		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	314.997.248,00	249.194.853,00	(65.802.395,00)	79,11		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.997.248,00	249.194.853,00	(65.802.395,00)	79,11		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.612.151.000,00	1.552.247.538,00	(59.903.462,00)	96,28		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.612.151.000,00	1.552.247.538,00	(59.903.462,00)	96,28		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.612.151.000,00	1.552.247.538,00	(59.903.462,00)	96,28		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.176.400,00	543.670.905,00	(97.505.495,00)	84,79		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.091.600,00	268.234.603,00	(50.856.997,00)	84,06		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	319.091.600,00	268.234.603,00	(50.856.997,00)	84,06		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.091.600,00	268.234.603,00	(50.856.997,00)	84,06		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.053.500,00	179.231.302,00	(41.822.198,00)	81,08		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	221.053.500,00	179.231.302,00	(41.822.198,00)	81,08		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.053.500,00	179.231.302,00	(41.822.198,00)	81,08		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.031.300,00	96.205.000,00	(4.826.300,00)	95,22		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	101.031.300,00	96.205.000,00	(4.826.300,00)	95,22		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.031.300,00	96.205.000,00	(4.826.300,00)	95,22		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.483.687.945,00	10.962.465.439,00	(521.222.506,00)	95,46		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.483.687.945,00	10.962.465.439,00	(521.222.506,00)	95,46		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.483.687.945,00	10.962.465.439,00	(521.222.506,00)	95,46		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.483.687.945,00	10.962.465.439,00	(521.222.506,00)	95,46		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.252.438.000,00	1.178.731.624,00	(73.706.376,00)	94,11		
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	129.238.000,00	56.242.624,00	(72.995.376,00)	43,52		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	129.238.000,00	56.242.624,00	(72.995.376,00)	43,52		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.238.000,00	56.242.624,00	(72.995.376,00)	43,52		
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.123.200.000,00	1.122.489.000,00	(711.000,00)	99,94		
01.2.16.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.123.200.000,00	1.122.489.000,00	(711.000,00)	99,94		
01.2.16.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.200.000,00	1.122.489.000,00	(711.000,00)	99,94		
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.570.067.919,00	5.571.858.309,00	(998.209.610,00)	84,81		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	203.194.440,00	170.391.000,00	(32.803.440,00)	83,86		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	203.194.440,00	170.391.000,00	(32.803.440,00)	83,86		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	203.194.440,00	170.391.000,00	(32.803.440,00)	83,86		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.194.440,00	170.391.000,00	(32.803.440,00)	83,86		
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	470.950.000,00	420.765.000,00	(50.185.000,00)	89,34		
02.2.02.03	Pembahasan APBD	470.950.000,00	420.765.000,00	(50.185.000,00)	89,34		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	470.950.000,00	420.765.000,00	(50.185.000,00)	89,34		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.950.000,00	420.765.000,00	(50.185.000,00)	89,34		
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	169.209.000,00	78.850.000,00	(90.359.000,00)	46,60		
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	169.209.000,00	78.850.000,00	(90.359.000,00)	46,60		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	169.209.000,00	78.850.000,00	(90.359.000,00)	46,60		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.209.000,00	78.850.000,00	(90.359.000,00)	46,60		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.261.623.132,00	1.210.916.520,00	(50.706.612,00)	95,98		
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	232.000.000,00	217.000.000,00	(15.000.000,00)	93,53		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	232.000.000,00	217.000.000,00	(15.000.000,00)	93,53		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.000.000,00	217.000.000,00	(15.000.000,00)	93,53		
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	427.700.000,00	408.100.000,00	(19.600.000,00)	95,42		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	427.700.000,00	408.100.000,00	(19.600.000,00)	95,42		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.700.000,00	408.100.000,00	(19.600.000,00)	95,42		
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	413.923.132,00	397.816.520,00	(16.106.612,00)	96,11		
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	413.923.132,00	397.816.520,00	(16.106.612,00)	96,11		
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.923.132,00	397.816.520,00	(16.106.612,00)	96,11		
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	357.899.347,00	269.680.000,00	(88.219.347,00)	75,35		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	357.899.347,00	269.680.000,00	(88.219.347,00)	75,35		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	357.899.347,00	269.680.000,00	(88.219.347,00)	75,35		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.899.347,00	269.680.000,00	(88.219.347,00)	75,35		
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.107.192.000,00	3.421.255.789,00	(685.936.211,00)	83,30		
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.107.192.000,00	3.421.255.789,00	(685.936.211,00)	83,30		
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.107.192.000,00	3.421.255.789,00	(685.936.211,00)	83,30		
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.107.192.000,00	3.421.255.789,00	(685.936.211,00)	83,30		
	SURPLUS / DEFISIT	(25.516.130.400,00)	(23.589.537.686,00)	1.926.592.714,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-128.359.782.709,00	(128.359.782.709,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-128.359.782.709,00	(128.359.782.709,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(128.359.782.709,00)	(128.359.782.709,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(25.516.130.400,00)	(151.949.320.395,00)	(126.433.189.995,00)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Rt. BUPATI BOALEMO
Dr.SHERMAN MCFIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA)
Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA)
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000.000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.975.029.038,00	5.319.162.634,00	(655.866.404,00)	89,02		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.763.428.833,00	3.525.929.087,00	(237.499.746,00)	93,69		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.820.817,00	120.190.500,00	(33.630.317,00)	78,14		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.399.772,00	38.985.000,00	(414.772,00)	98,95		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.399.772,00	38.985.000,00	(414.772,00)	98,95		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.399.772,00	38.985.000,00	(414.772,00)	98,95		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.611.824,00	38.834.500,00	(18.777.324,00)	67,41		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	57.611.824,00	38.834.500,00	(18.777.324,00)	67,41		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.611.824,00	38.834.500,00	(18.777.324,00)	67,41		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.809.221,00	42.371.000,00	(14.438.221,00)	74,58		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	56.809.221,00	42.371.000,00	(14.438.221,00)	74,58		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.809.221,00	42.371.000,00	(14.438.221,00)	74,58		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.064.984.373,00	2.947.949.278,00	(117.035.095,00)	96,18		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.024.049.963,00	2.907.689.278,00	(116.360.685,00)	96,15		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.024.049.963,00	2.907.689.278,00	(116.360.685,00)	96,15		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.024.049.963,00	2.907.689.278,00	(116.360.685,00)	96,15		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.934.410,00	40.260.000,00	(674.410,00)	98,35		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.934.410,00	40.260.000,00	(674.410,00)	98,35		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.934.410,00	40.260.000,00	(674.410,00)	98,35		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.710.280,00	8.501.500,00	(19.208.780,00)	30,68		
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27.710.280,00	8.501.500,00	(19.208.780,00)	30,68		
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	27.710.280,00	8.501.500,00	(19.208.780,00)	30,68		
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.710.280,00	8.501.500,00	(19.208.780,00)	30,68		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.922.825,00	80.453.500,00	(29.469.325,00)	73,19		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.438.825,00	24.433.500,00	(2.005.325,00)	92,42		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.938.825,00	4.433.500,00	(505.325,00)	89,77		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.938.825,00	4.433.500,00	(505.325,00)	89,77		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	21.500.000,00	20.000.000,00	(1.500.000,00)	93,02		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.500.000,00	20.000.000,00	(1.500.000,00)	93,02		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.484.000,00	56.020.000,00	(27.464.000,00)	67,10		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	83.484.000,00	56.020.000,00	(27.464.000,00)	67,10		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.484.000,00	56.020.000,00	(27.464.000,00)	67,10		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.133.338,00	325.082.019,00	(25.051.319,00)	92,85		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.980.468,00	94.452.019,00	(6.528.449,00)	93,53		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.980.468,00	94.452.019,00	(6.528.449,00)	93,53		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.980.468,00	94.452.019,00	(6.528.449,00)	93,53		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.152.870,00	230.630.000,00	(18.522.870,00)	92,57		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	249.152.870,00	230.630.000,00	(18.522.870,00)	92,57		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.992.870,00	222.470.000,00	(18.522.870,00)	92,31		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.857.200,00	43.752.290,00	(13.104.910,00)	76,95		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.167.200,00	22.115.500,00	(2.051.700,00)	91,51		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.167.200,00	22.115.500,00	(2.051.700,00)	91,51		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.167.200,00	22.115.500,00	(2.051.700,00)	91,51		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.690.000,00	21.636.790,00	(11.053.210,00)	66,19		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.690.000,00	21.636.790,00	(11.053.210,00)	66,19		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.690.000,00	21.636.790,00	(11.053.210,00)	66,19		
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	473.797.130,00	293.546.754,00	(180.250.376,00)	61,96		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	197.015.275,00	126.432.000,00	(70.583.275,00)	64,17		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	16.434.840,00	0,00	(16.434.840,00)	0		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.434.840,00	0,00	(16.434.840,00)	0		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.434.840,00	0,00	(16.434.840,00)	0		
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	21.565.506,00	20.284.500,00	(1.281.006,00)	94,06		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.565.506,00	20.284.500,00	(1.281.006,00)	94,06		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.565.506,00	20.284.500,00	(1.281.006,00)	94,06		
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	18.906.310,00	14.923.000,00	(3.983.310,00)	78,93		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.906.310,00	14.923.000,00	(3.983.310,00)	78,93		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.906.310,00	14.923.000,00	(3.983.310,00)	78,93		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	34.084.687,00	31.079.500,00	(3.005.187,00)	91,18		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	34.084.687,00	31.079.500,00	(3.005.187,00)	91,18		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.084.687,00	31.079.500,00	(3.005.187,00)	91,18		
02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.212.882,00	2.155.000,00	(2.057.882,00)	51,15		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.212.882,00	2.155.000,00	(2.057.882,00)	51,15		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.212.882,00	2.155.000,00	(2.057.882,00)	51,15		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	101.811.050,00	57.990.000,00	(43.821.050,00)	56,96		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	101.811.050,00	57.990.000,00	(43.821.050,00)	56,96		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.811.050,00	57.990.000,00	(43.821.050,00)	56,96		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	155.358.795,00	125.046.754,00	(30.312.041,00)	80,49		
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30.601.740,00	10.000.000,00	(20.601.740,00)	32,68		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.601.740,00	10.000.000,00	(20.601.740,00)	32,68		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.601.740,00	10.000.000,00	(20.601.740,00)	32,68		
02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	111.404.992,00	104.056.754,00	(7.348.238,00)	93,40		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	111.404.992,00	104.056.754,00	(7.348.238,00)	93,40		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.404.992,00	104.056.754,00	(7.348.238,00)	93,40		
02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	13.352.063,00	10.990.000,00	(2.362.063,00)	82,31		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.352.063,00	10.990.000,00	(2.362.063,00)	82,31		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.352.063,00	10.990.000,00	(2.362.063,00)	82,31		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.423.060,00	42.068.000,00	(79.355.060,00)	34,65		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	98.690.105,00	29.118.000,00	(69.572.105,00)	29,50		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.690.105,00	29.118.000,00	(69.572.105,00)	29,50		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.690.105,00	29.118.000,00	(69.572.105,00)	29,50		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	22.732.955,00	12.950.000,00	(9.782.955,00)	56,97		
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.732.955,00	12.950.000,00	(9.782.955,00)	56,97		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.732.955,00	12.950.000,00	(9.782.955,00)	56,97		
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.212.803.075,00	1.165.883.393,00	(46.919.682,00)	96,13		
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	364.363.800,00	362.604.500,00	(1.759.300,00)	99,52		
02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	364.363.800,00	362.604.500,00	(1.759.300,00)	99,52		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	264.363.800,00	262.604.500,00	(1.759.300,00)	99,33		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.363.800,00	262.604.500,00	(1.759.300,00)	99,33		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	308.250.000,00	307.107.400,00	(1.142.600,00)	99,63		
02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00	199.431.900,00	(568.100,00)	99,72		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.431.900,00	(568.100,00)	98,86		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.431.900,00	(568.100,00)	98,86		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	108.250.000,00	107.675.500,00	(574.500,00)	99,47		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	33.250.000,00	32.675.500,00	(574.500,00)	98,27		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.250.000,00	32.675.500,00	(574.500,00)	98,27		
02.2.02.05.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.05.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	321.674.275,00	318.217.993,00	(3.456.282,00)	98,93		
02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	120.215.000,00	117.690.000,00	(2.525.000,00)	97,90		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.215.000,00	17.690.000,00	(2.525.000,00)	87,51		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.215.000,00	17.690.000,00	(2.525.000,00)	87,51		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	201.459.275,00	200.527.993,00	(931.282,00)	99,54		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	76.459.275,00	75.527.993,00	(931.282,00)	98,78		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.459.275,00	75.527.993,00	(931.282,00)	98,78		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.07.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	218.515.000,00	177.953.500,00	(40.561.500,00)	81,44		
02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	145.258.571,00	142.029.000,00	(3.229.571,00)	97,78		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	145.258.571,00	142.029.000,00	(3.229.571,00)	97,78		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.258.571,00	142.029.000,00	(3.229.571,00)	97,78		
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	73.256.429,00	35.924.500,00	(37.331.929,00)	49,04		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	73.256.429,00	35.924.500,00	(37.331.929,00)	49,04		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.256.429,00	35.924.500,00	(37.331.929,00)	49,04		
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	525.000.000,00	333.803.400,00	(191.196.600,00)	63,58		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	203.863.052,00	135.436.900,00	(68.426.152,00)	66,44		
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.235.397,00	10.178.000,00	(8.057.397,00)	55,81		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.235.397,00	10.178.000,00	(8.057.397,00)	55,81		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.235.397,00	10.178.000,00	(8.057.397,00)	55,81		
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.485.000,00	14.095.000,00	(390.000,00)	97,31		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.485.000,00	14.095.000,00	(390.000,00)	97,31		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.485.000,00	14.095.000,00	(390.000,00)	97,31		
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	66.669.692,00	42.423.500,00	(24.246.192,00)	63,63		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	66.669.692,00	42.423.500,00	(24.246.192,00)	63,63		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.669.692,00	42.423.500,00	(24.246.192,00)	63,63		
03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10.658.197,00	0,00	(10.658.197,00)	0		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.658.197,00	0,00	(10.658.197,00)	0		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.658.197,00	0,00	(10.658.197,00)	0		
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.640.000,00	42.170.000,00	(3.470.000,00)	92,40		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	45.640.000,00	42.170.000,00	(3.470.000,00)	92,40		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.640.000,00	42.170.000,00	(3.470.000,00)	92,40		
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.992.228,00	11.840.000,00	(5.152.228,00)	69,68		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.992.228,00	11.840.000,00	(5.152.228,00)	69,68		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.992.228,00	11.840.000,00	(5.152.228,00)	69,68		
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.697.538,00	4.619.000,00	(12.078.538,00)	27,66		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	16.697.538,00	4.619.000,00	(12.078.538,00)	27,66		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.697.538,00	4.619.000,00	(12.078.538,00)	27,66		
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.485.000,00	10.111.400,00	(4.373.600,00)	69,81		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	14.485.000,00	10.111.400,00	(4.373.600,00)	69,81		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.485.000,00	10.111.400,00	(4.373.600,00)	69,81		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	71.136.948,00	32.350.000,00	(38.786.948,00)	45,48		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.163.355,00	1.145.000,00	(4.018.355,00)	22,18		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.163.355,00	1.145.000,00	(4.018.355,00)	22,18		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.163.355,00	1.145.000,00	(4.018.355,00)	22,18		
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.869.150,00	8.020.000,00	(849.150,00)	90,43		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.869.150,00	8.020.000,00	(849.150,00)	90,43		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.869.150,00	8.020.000,00	(849.150,00)	90,43		
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.131.400,00	4.270.000,00	(24.861.400,00)	14,66		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.131.400,00	4.270.000,00	(24.861.400,00)	14,66		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.131.400,00	4.270.000,00	(24.861.400,00)	14,66		
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3.658.435,00	2.480.000,00	(1.178.435,00)	67,79		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.658.435,00	2.480.000,00	(1.178.435,00)	67,79		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.658.435,00	2.480.000,00	(1.178.435,00)	67,79		
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.520.704,00	1.335.000,00	(5.185.704,00)	20,47		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.520.704,00	1.335.000,00	(5.185.704,00)	20,47		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.520.704,00	1.335.000,00	(5.185.704,00)	20,47		
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	3.768.200,00	2.850.000,00	(918.200,00)	75,63		
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.768.200,00	2.850.000,00	(918.200,00)	75,63		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.768.200,00	2.850.000,00	(918.200,00)	75,63		
03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	4.755.704,00	3.710.000,00	(1.045.704,00)	78,01		
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat						
	Daerah Bidang SDA						
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.755.704,00	3.710.000,00	(1.045.704,00)	78,01		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.755.704,00	3.710.000,00	(1.045.704,00)	78,01		
03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	9.270.000,00	8.540.000,00	(730.000,00)	92,13		
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.270.000,00	8.540.000,00	(730.000,00)	92,13		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000,00	8.540.000,00	(730.000,00)	92,13		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	250.000.000,00	166.016.500,00	(83.983.500,00)	66,41		
	Kewilayahan						
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	35.000.000,00	25.292.500,00	(9.707.500,00)	72,26		
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,						
	RPJMD dan RKPD)						
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	25.292.500,00	(9.707.500,00)	72,26		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	25.292.500,00	(9.707.500,00)	72,26		
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	30.000.000,00	22.419.000,00	(7.581.000,00)	74,73		
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	22.419.000,00	(7.581.000,00)	74,73		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.419.000,00	(7.581.000,00)	74,73		
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	30.000.000,00	23.760.500,00	(6.239.500,00)	79,20		
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat						
	Daerah Bidang Infrastruktur						
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	23.760.500,00	(6.239.500,00)	79,20		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	23.760.500,00	(6.239.500,00)	79,20		
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	30.000.000,00	17.082.000,00	(12.918.000,00)	56,94		
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	17.082.000,00	(12.918.000,00)	56,94		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	17.082.000,00	(12.918.000,00)	56,94		
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	30.000.000,00	17.958.000,00	(12.042.000,00)	59,86		
	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,						
	RPJMD dan RKPD)						
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	17.958.000,00	(12.042.000,00)	59,86		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	17.958.000,00	(12.042.000,00)	59,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	30.000.000,00	22.502.000,00	(7.498.000,00)	75,01		
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	22.502.000,00	(7.498.000,00)	75,01		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.502.000,00	(7.498.000,00)	75,01		
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	30.000.000,00	23.472.500,00	(6.527.500,00)	78,24		
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat						
	Daerah Bidang Kewilayahan						
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	23.472.500,00	(6.527.500,00)	78,24		
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	23.472.500,00	(6.527.500,00)	78,24		
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	35.000.000,00	13.530.000,00	(21.470.000,00)	38,66		
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang						
	Kewilayahan						
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	13.530.000,00	(21.470.000,00)	38,66		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	13.530.000,00	(21.470.000,00)	38,66		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.975.029.038,00)	(5.319.162.634,00)	655.866.404,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-25.011.750.172,00	(25.011.750.172,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-25.011.750.172,00	(25.011.750.172,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(25.011.750.172,00)	(25.011.750.172,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.975.029.038,00)	(30.330.912.806,00)	(24.355.883.768,00)	0		

Tianmuta, 23 Agustus 2024
Di: BUPATI BOALEMO

Drs. HERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	744.430.596.358,00	745.332.924.591,15	902.328.233,15	100,12		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.559.262.846,00	21.075.834.486,15	(10.483.428.359,85)	66,78		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	10.913.012.729,00	7.817.681.452,25	(3.095.331.276,75)	71,64		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.478.040.721,00	8.478.040.721,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.168.209.396,00	4.655.112.312,90	(7.513.097.083,10)	38,26		
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	712.871.333.512,00	724.257.090.105,00	11.385.756.593,00	101,60		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	687.484.333.512,00	701.030.290.389,00	13.545.956.877,00	101,97		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.387.000.000,00	23.226.799.716,00	(2.160.200.284,00)	91,49		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	147.109.756.952,00	138.036.481.294,00	(9.073.275.658,00)	93,83		
00	Non Program	0,00	72.534.933.400,00	72.534.933.400,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	72.534.933.400,00	72.534.933.400,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	72.534.933.400,00	72.534.933.400,00	0		
00.0.00.00.5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	72.534.933.400,00	72.534.933.400,00	0		
00.0.00.00.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	72.534.933.400,00	72.534.933.400,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.048.325.902,00	16.899.360.791,00	(5.148.965.111,00)	76,65		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	453.337.920,00	430.757.595,00	(22.580.325,00)	95,02		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	286.252.320,00	296.287.595,00	10.035.275,00	103,51		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	286.252.320,00	296.287.595,00	10.035.275,00	103,51		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.252.320,00	296.287.595,00	10.035.275,00	103,51		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.085.600,00	134.470.000,00	(32.615.600,00)	80,48		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	167.085.600,00	134.470.000,00	(32.615.600,00)	80,48		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.085.600,00	134.470.000,00	(32.615.600,00)	80,48		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.869.302.383,00	10.042.495.242,00	(826.807.141,00)	92,39		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.869.302.383,00	10.042.495.242,00	(826.807.141,00)	92,39		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.869.302.383,00	10.042.495.242,00	(826.807.141,00)	92,39		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.869.302.383,00	10.042.495.242,00	(826.807.141,00)	92,39		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	201.374.725,00	113.337.480,00	(88.037.245,00)	56,28		
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	201.374.725,00	113.337.480,00	(88.037.245,00)	56,28		
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	180.374.725,00	98.357.480,00	(82.017.245,00)	54,53		
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.374.725,00	98.357.480,00	(82.017.245,00)	54,53		
01.2.05.04.5.2	BELANJA MODAL	21.000.000,00	14.980.000,00	(6.020.000,00)	71,33		
01.2.05.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	14.980.000,00	(6.020.000,00)	71,33		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.720.000,00	393.470.380,00	(23.249.620,00)	94,42		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.200.000,00	91.190.000,00	(2.010.000,00)	97,84		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.200.000,00	81.190.000,00	(2.010.000,00)	97,58		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.200.000,00	81.190.000,00	(2.010.000,00)	97,58		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.520.000,00	302.280.380,00	(21.239.620,00)	93,43		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	323.520.000,00	302.280.380,00	(21.239.620,00)	93,43		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.520.000,00	302.280.380,00	(21.239.620,00)	93,43		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398.637.700,00	382.132.500,00	(16.505.200,00)	95,86		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	398.637.700,00	382.132.500,00	(16.505.200,00)	95,86		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	385.237.700,00	368.732.500,00	(16.505.200,00)	95,72		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	385.237.700,00	368.732.500,00	(16.505.200,00)	95,72		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.353.398.174,00	5.227.329.408,00	(4.126.068.766,00)	55,89		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.353.398.174,00	5.227.329.408,00	(4.126.068.766,00)	55,89		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.353.398.174,00	5.227.329.408,00	(4.126.068.766,00)	55,89		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.344.398.174,00	5.218.329.408,00	(4.126.068.766,00)	55,84		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.555.000,00	309.838.186,00	(45.716.814,00)	87,14		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.825.000,00	102.438.186,00	(44.386.814,00)	69,77		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	146.825.000,00	102.438.186,00	(44.386.814,00)	69,77		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.825.000,00	102.438.186,00	(44.386.814,00)	69,77		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.730.000,00	207.400.000,00	(1.330.000,00)	99,36		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.780.000,00	10.000.000,00	(780.000,00)	92,76		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.780.000,00	10.000.000,00	(780.000,00)	92,76		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	197.950.000,00	197.400.000,00	(550.000,00)	99,72		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.950.000,00	197.400.000,00	(550.000,00)	99,72		
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	122.872.217.177,00	47.168.608.562,00	(75.703.608.615,00)	38,39		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.729.935.475,00	954.402.521,00	(775.532.954,00)	55,17		
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	446.746.200,00	161.937.558,00	(284.808.642,00)	36,25		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	446.746.200,00	161.937.558,00	(284.808.642,00)	36,25		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.746.200,00	161.937.558,00	(284.808.642,00)	36,25		
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	374.581.945,00	151.814.600,00	(222.767.345,00)	40,53		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	374.581.945,00	151.814.600,00	(222.767.345,00)	40,53		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.581.945,00	151.814.600,00	(222.767.345,00)	40,53		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	584.085.170,00	390.635.670,00	(193.449.500,00)	66,88		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	584.085.170,00	390.635.670,00	(193.449.500,00)	66,88		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.085.170,00	390.635.670,00	(193.449.500,00)	66,88		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	324.522.160,00	250.014.693,00	(74.507.467,00)	77,04		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	324.522.160,00	250.014.693,00	(74.507.467,00)	77,04		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.522.160,00	250.014.693,00	(74.507.467,00)	77,04		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	969.082.755,00	693.021.655,00	(276.061.100,00)	71,51		
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	335.811.180,00	176.240.755,00	(159.570.425,00)	52,48		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	335.811.180,00	176.240.755,00	(159.570.425,00)	52,48		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.811.180,00	176.240.755,00	(159.570.425,00)	52,48		
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	126.066.550,00	100.589.000,00	(25.477.550,00)	79,79		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	126.066.550,00	100.589.000,00	(25.477.550,00)	79,79		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.066.550,00	100.589.000,00	(25.477.550,00)	79,79		
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	109.952.685,00	59.747.800,00	(50.204.885,00)	54,34		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	109.952.685,00	59.747.800,00	(50.204.885,00)	54,34		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.952.685,00	59.747.800,00	(50.204.885,00)	54,34		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	397.252.340,00	356.444.100,00	(40.808.240,00)	89,73		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	397.252.340,00	356.444.100,00	(40.808.240,00)	89,73		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.252.340,00	356.444.100,00	(40.808.240,00)	89,73		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	876.497.752,00	589.696.259,00	(286.801.493,00)	67,28		
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	290.039.802,00	238.543.320,00	(51.496.482,00)	82,25		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	280.039.802,00	228.543.320,00	(51.496.482,00)	81,61		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.039.802,00	228.543.320,00	(51.496.482,00)	81,61		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	203.420.630,00	180.354.225,00	(23.066.405,00)	88,66		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	203.420.630,00	180.354.225,00	(23.066.405,00)	88,66		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.420.630,00	180.354.225,00	(23.066.405,00)	88,66		
02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	86.307.830,00	9.589.955,00	(76.717.875,00)	11,11		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	86.307.830,00	9.589.955,00	(76.717.875,00)	11,11		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.307.830,00	9.589.955,00	(76.717.875,00)	11,11		
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	90.571.490,00	56.613.609,00	(33.957.881,00)	62,51		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	90.571.490,00	56.613.609,00	(33.957.881,00)	62,51		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.571.490,00	56.613.609,00	(33.957.881,00)	62,51		
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.131.000,00	39.783.350,00	(60.347.650,00)	39,73		
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	100.131.000,00	39.783.350,00	(60.347.650,00)	39,73		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.131.000,00	39.783.350,00	(60.347.650,00)	39,73		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	106.027.000,00	64.811.800,00	(41.215.200,00)	61,13		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	106.027.000,00	64.811.800,00	(41.215.200,00)	61,13		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.027.000,00	64.811.800,00	(41.215.200,00)	61,13		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	119.296.701.195,00	44.931.488.127,00	(74.365.213.068,00)	37,66		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	117.138.420.100,00	44.383.918.524,00	(72.754.501.576,00)	37,89		
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	117.138.420.100,00	44.383.918.524,00	(72.754.501.576,00)	37,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.138.420.100,00	44.383.918.524,00	(72.754.501.576,00)	37,89		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	612.255.000,00	339.885.000,00	(272.370.000,00)	55,51		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	612.255.000,00	339.885.000,00	(272.370.000,00)	55,51		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	612.255.000,00	339.885.000,00	(272.370.000,00)	55,51		
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.546.026.095,00	207.684.603,00	(1.338.341.492,00)	13,43		
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	1.546.026.095,00	207.684.603,00	(1.338.341.492,00)	13,43		
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.546.026.095,00	207.684.603,00	(1.338.341.492,00)	13,43		
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	707.107.297,00	543.652.866,00	(163.454.431,00)	76,88		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	707.107.297,00	543.652.866,00	(163.454.431,00)	76,88		
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	206.879.747,00	157.706.174,00	(49.173.573,00)	76,23		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	206.879.747,00	157.706.174,00	(49.173.573,00)	76,23		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.879.747,00	157.706.174,00	(49.173.573,00)	76,23		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	99.924.160,00	81.532.000,00	(18.392.160,00)	81,59		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	99.924.160,00	81.532.000,00	(18.392.160,00)	81,59		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.924.160,00	81.532.000,00	(18.392.160,00)	81,59		
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	147.192.105,00	99.206.877,00	(47.985.228,00)	67,40		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	147.192.105,00	99.206.877,00	(47.985.228,00)	67,40		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.192.105,00	99.206.877,00	(47.985.228,00)	67,40		
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	103.745.595,00	62.978.770,00	(40.766.825,00)	60,71		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	103.745.595,00	62.978.770,00	(40.766.825,00)	60,71		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.745.595,00	62.978.770,00	(40.766.825,00)	60,71		
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	149.365.690,00	142.229.045,00	(7.136.645,00)	95,22		
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	149.365.690,00	142.229.045,00	(7.136.645,00)	95,22		
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.365.690,00	142.229.045,00	(7.136.645,00)	95,22		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.482.106.576,00	889.925.675,00	(592.180.901,00)	60,04		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.482.106.576,00	889.925.675,00	(592.180.901,00)	60,04		
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	348.049.429,00	299.263.500,00	(48.785.929,00)	85,98		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	348.049.429,00	299.263.500,00	(48.785.929,00)	85,98		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.049.429,00	299.263.500,00	(48.785.929,00)	85,98		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	205.859.230,00	113.772.575,00	(92.086.655,00)	55,27		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	205.859.230,00	113.772.575,00	(92.086.655,00)	55,27		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.859.230,00	113.772.575,00	(92.086.655,00)	55,27		
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	302.677.350,00	213.775.100,00	(88.902.250,00)	70,63		
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	302.677.350,00	213.775.100,00	(88.902.250,00)	70,63		
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.677.350,00	213.775.100,00	(88.902.250,00)	70,63		
04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	625.520.567,00	263.114.500,00	(362.406.067,00)	42,06		
04.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	625.520.567,00	263.114.500,00	(362.406.067,00)	42,06		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.520.567,00	263.114.500,00	(362.406.067,00)	42,06		
	SURPLUS / DEFISIT	597.320.839.406,00	607.296.443.297,15	9.975.603.891,15	101,67		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.024.008.793,00	2.501.269.252.364,02	2.472.245.243.571,02	8.617,93		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.024.008.793,00	2.501.269.252.364,02	2.472.245.243.571,02	8.617,93		
	PEMBIAYAAN NETTO	29.024.008.793,00	2.501.269.252.364,02	2.472.245.243.571,02	8.617,93		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	626.344.848.199,00	3.108.565.695.661,17	2.482.220.847.462,17	496,30		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
DR. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000.000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.791.100.818,00	4.518.993.790,00	(272.107.028,00)	94,32		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.308.353.011,00	3.125.913.506,00	(182.439.505,00)	94,49		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.276.704,00	2.724.576.623,00	(104.700.081,00)	96,30		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.829.276.704,00	2.724.576.623,00	(104.700.081,00)	96,30		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.829.276.704,00	2.724.576.623,00	(104.700.081,00)	96,30		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.829.276.704,00	2.724.576.623,00	(104.700.081,00)	96,30		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.897.572,00	187.543.367,00	(75.354.205,00)	71,34		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.924.572,00	47.831.475,00	(9.093.097,00)	84,03		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.924.572,00	34.881.475,00	(9.043.097,00)	79,41		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.924.572,00	34.881.475,00	(9.043.097,00)	79,41		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	12.950.000,00	(50.000,00)	99,62		
01.2.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	12.950.000,00	(50.000,00)	99,62		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.980.000,00	17.570.000,00	(2.410.000,00)	87,94		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.980.000,00	17.570.000,00	(2.410.000,00)	87,94		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	17.570.000,00	(2.410.000,00)	87,94		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.993.000,00	122.141.892,00	(63.851.108,00)	65,67		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	185.993.000,00	122.141.892,00	(63.851.108,00)	65,67		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.993.000,00	122.141.892,00	(63.851.108,00)	65,67		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.008.735,00	204.091.106,00	(917.629,00)	99,55		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.133.735,00	70.216.106,00	(917.629,00)	98,71		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.133.735,00	70.216.106,00	(917.629,00)	98,71		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.133.735,00	70.216.106,00	(917.629,00)	98,71		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.875.000,00	133.875.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	133.875.000,00	133.875.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.835.000,00	131.835.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.170.000,00	9.702.410,00	(1.467.590,00)	86,86		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.250.000,00	6.802.410,00	(1.447.590,00)	82,45		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.250.000,00	6.802.410,00	(1.447.590,00)	82,45		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	6.802.410,00	(1.447.590,00)	82,45		
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.920.000,00	2.900.000,00	(20.000,00)	99,32		
01.2.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	2.900.000,00	(20.000,00)	99,32		
01.2.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.900.000,00	(20.000,00)	99,32		
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	271.497.923,00	211.282.326,00	(60.215.597,00)	77,82		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	174.635.955,00	147.108.000,00	(27.527.955,00)	84,24		
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	156.649.811,00	133.305.500,00	(23.344.311,00)	85,10		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	156.649.811,00	133.305.500,00	(23.344.311,00)	85,10		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.649.811,00	133.305.500,00	(23.344.311,00)	85,10		
02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	528.360,00	0,00	(528.360,00)	0		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	528.360,00	0,00	(528.360,00)	0		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.360,00	0,00	(528.360,00)	0		
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.457.784,00	13.802.500,00	(3.655.284,00)	79,06		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	17.457.784,00	13.802.500,00	(3.655.284,00)	79,06		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.457.784,00	13.802.500,00	(3.655.284,00)	79,06		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	46.406.648,00	22.282.056,00	(24.124.592,00)	48,01		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	46.406.648,00	22.282.056,00	(24.124.592,00)	48,01		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.406.648,00	22.282.056,00	(24.124.592,00)	48,01		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.406.648,00	22.282.056,00	(24.124.592,00)	48,01		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	29.198.821,00	24.650.100,00	(4.548.721,00)	84,42		
02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	29.198.821,00	24.650.100,00	(4.548.721,00)	84,42		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.198.821,00	24.650.100,00	(4.548.721,00)	84,42		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.198.821,00	24.650.100,00	(4.548.721,00)	84,42		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.256.499,00	17.242.170,00	(4.014.329,00)	81,11		
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8.866.000,00	8.434.792,00	(431.208,00)	95,14		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.866.000,00	8.434.792,00	(431.208,00)	95,14		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.866.000,00	8.434.792,00	(431.208,00)	95,14		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	12.390.499,00	8.807.378,00	(3.583.121,00)	71,08		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.390.499,00	8.807.378,00	(3.583.121,00)	71,08		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.390.499,00	8.807.378,00	(3.583.121,00)	71,08		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.211.249.884,00	1.181.797.958,00	(29.451.926,00)	97,57		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.791.100.818,00)	(4.518.993.790,00)	272.107.028,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-23.009.024.248,00	(23.009.024.248,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-23.009.024.248,00	(23.009.024.248,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(23.009.024.248,00)	(23.009.024.248,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.791.100.818,00)	(27.528.018.038,00)	(22.736.917.220,00)	0		

Tila nuta, 23 Agustus 2024

W. BUPATI BOALEMO

D. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat Daerah
Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000.000 Inspektorat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.786.706.703,00	5.644.408.138,00	(142.298.565,00)	97,54		
00	Non Program	0,00	823.355,00	823.355,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	823.355,00	823.355,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	823.355,00	823.355,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	823.355,00	823.355,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	823.355,00	823.355,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.371.168.998,00	4.288.452.383,00	(82.716.615,00)	98,11		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.275.622,00	7.235.300,00	(40.322,00)	99,45		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.275.622,00	7.235.300,00	(40.322,00)	99,45		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.275.622,00	7.235.300,00	(40.322,00)	99,45		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.275.622,00	7.235.300,00	(40.322,00)	99,45		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.560.779.663,00	3.493.830.778,00	(66.948.885,00)	98,12		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.560.779.663,00	3.493.830.778,00	(66.948.885,00)	98,12		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.560.779.663,00	3.493.830.778,00	(66.948.885,00)	98,12		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.560.779.663,00	3.493.830.778,00	(66.948.885,00)	98,12		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	222.450.370,00	222.406.500,00	(43.870,00)	99,98		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	199.500.370,00	199.456.500,00	(43.870,00)	99,98		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	199.500.370,00	199.456.500,00	(43.870,00)	99,98		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.500.370,00	199.456.500,00	(43.870,00)	99,98		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.538.555,00	255.405.111,00	(10.133.444,00)	96,18		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.622.555,00	46.500.035,00	(10.122.520,00)	82,12		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.622.555,00	46.500.035,00	(10.122.520,00)	82,12		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.622.555,00	46.500.035,00	(10.122.520,00)	82,12		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.916.000,00	208.905.076,00	(10.924,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	208.916.000,00	208.905.076,00	(10.924,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.916.000,00	208.905.076,00	(10.924,00)	99,99		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.08.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.08.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.214.578,00	247.407.914,00	5.193.336,00	102,14		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.626.243,00	22.397.114,00	(229.129,00)	98,99		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.626.243,00	22.397.114,00	(229.129,00)	98,99		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.626.243,00	22.397.114,00	(229.129,00)	98,99		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.618.335,00	47.290.800,00	(12.327.535,00)	79,32		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.618.335,00	47.290.800,00	(12.327.535,00)	79,32		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.618.335,00	47.290.800,00	(12.327.535,00)	79,32		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.260.000,00	175.010.000,00	17.750.000,00	111,29		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	157.260.000,00	175.010.000,00	17.750.000,00	111,29		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.100.000,00	166.850.000,00	17.750.000,00	111,90		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.910.210,00	42.166.780,00	(10.743.430,00)	79,69		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.910.210,00	18.458.110,00	(7.452.100,00)	71,24		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.910.210,00	18.458.110,00	(7.452.100,00)	71,24		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.910.210,00	18.458.110,00	(7.452.100,00)	71,24		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000,00	23.708.670,00	(3.291.330,00)	87,81		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	23.708.670,00	(3.291.330,00)	87,81		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	23.708.670,00	(3.291.330,00)	87,81		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.157.856.705,00	1.102.457.000,00	(55.399.705,00)	95,22		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.118.406.705,00	1.064.657.000,00	(53.749.705,00)	95,19		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	164.775.000,00	144.000.000,00	(20.775.000,00)	87,39		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	164.775.000,00	144.000.000,00	(20.775.000,00)	87,39		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.775.000,00	144.000.000,00	(20.775.000,00)	87,39		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	294.075.000,00	253.725.000,00	(40.350.000,00)	86,28		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	294.075.000,00	253.725.000,00	(40.350.000,00)	86,28		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.075.000,00	253.725.000,00	(40.350.000,00)	86,28		
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	200.017.095,00	199.841.000,00	(176.095,00)	99,91		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	200.017.095,00	199.841.000,00	(176.095,00)	99,91		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.017.095,00	199.841.000,00	(176.095,00)	99,91		
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	207.289.610,00	207.191.000,00	(98.610,00)	99,95		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	207.289.610,00	207.191.000,00	(98.610,00)	99,95		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.289.610,00	207.191.000,00	(98.610,00)	99,95		
02.2.01.05	Pengawasan Desa	126.750.000,00	126.600.000,00	(150.000,00)	99,88		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	126.750.000,00	126.600.000,00	(150.000,00)	99,88		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.750.000,00	126.600.000,00	(150.000,00)	99,88		
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	95.200.000,00	103.090.000,00	7.890.000,00	108,29		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	95.200.000,00	103.090.000,00	7.890.000,00	108,29		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.200.000,00	103.090.000,00	7.890.000,00	108,29		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30.300.000,00	30.210.000,00	(90.000,00)	99,70		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	30.300.000,00	30.210.000,00	(90.000,00)	99,70		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	30.210.000,00	(90.000,00)	99,70		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39.450.000,00	37.800.000,00	(1.650.000,00)	95,82		
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.250.000,00	25.800.000,00	(1.450.000,00)	94,68		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.250.000,00	25.800.000,00	(1.450.000,00)	94,68		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	25.800.000,00	(1.450.000,00)	94,68		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12.200.000,00	12.000.000,00	(200.000,00)	98,36		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	12.000.000,00	(200.000,00)	98,36		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.000.000,00	(200.000,00)	98,36		
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	257.681.000,00	252.675.400,00	(5.005.600,00)	98,06		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	257.681.000,00	252.675.400,00	(5.005.600,00)	98,06		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	219.231.000,00	214.250.400,00	(4.980.600,00)	97,73		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	219.231.000,00	214.250.400,00	(4.980.600,00)	97,73		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.231.000,00	214.250.400,00	(4.980.600,00)	97,73		
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30.800.000,00	30.775.000,00	(25.000,00)	99,92		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.800.000,00	30.775.000,00	(25.000,00)	99,92		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	30.775.000,00	(25.000,00)	99,92		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.786.706.703,00)	(5.644.408.138,00)	142.298.565,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-27.854.320.361,00	(27.854.320.361,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-27.854.320.361,00	(27.854.320.361,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(27.854.320.361,00)	(27.854.320.361,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.786.706.703,00)	(33.498.728.499,00)	(27.712.021.796,00)	0		

Tijamuta, 23 Agustus 2024

Pi. BUPATI BOALEMO

DR. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Paguyaman
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Paguyaman
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.000 Kecamatan Paguyaman

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.181.334.052,00	2.942.947.881,00	(238.386.171,00)	92,51		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.090.053.747,00	2.889.006.881,00	(201.046.866,00)	93,49		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.493.466.433,00	2.420.465.831,00	(73.000.602,00)	97,07		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.493.466.433,00	2.420.465.831,00	(73.000.602,00)	97,07		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.493.466.433,00	2.420.465.831,00	(73.000.602,00)	97,07		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.493.466.433,00	2.420.465.831,00	(73.000.602,00)	97,07		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.107.914,00	194.855.395,00	(96.252.519,00)	66,94		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.780.914,00	27.295.481,00	(9.485.433,00)	74,21		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.780.914,00	27.295.481,00	(9.485.433,00)	74,21		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.780.914,00	27.295.481,00	(9.485.433,00)	74,21		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.327.000,00	167.559.914,00	(86.767.086,00)	65,88		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	254.327.000,00	167.559.914,00	(86.767.086,00)	65,88		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.327.000,00	167.559.914,00	(86.767.086,00)	65,88		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.650.000,00	55.694.204,00	(5.955.796,00)	90,34		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	2.650.000,00	(2.150.000,00)	55,21		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	2.650.000,00	(2.150.000,00)	55,21		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	2.650.000,00	(2.150.000,00)	55,21		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.780.000,00	14.974.204,00	(3.805.796,00)	79,73		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.780.000,00	14.974.204,00	(3.805.796,00)	79,73		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.780.000,00	14.974.204,00	(3.805.796,00)	79,73		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.070.000,00	38.070.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.070.000,00	38.070.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.070.000,00	38.070.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.829.400,00	217.991.451,00	(25.837.949,00)	89,40		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.009.400,00	21.215.851,00	(8.793.549,00)	70,70		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.009.400,00	21.215.851,00	(8.793.549,00)	70,70		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.009.400,00	21.215.851,00	(8.793.549,00)	70,70		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.670.000,00	19.980.000,00	(16.690.000,00)	54,49		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.670.000,00	0,00	(4.670.000,00)	0		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	0,00	(4.670.000,00)	0		
01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	32.000.000,00	19.980.000,00	(12.020.000,00)	62,44		
01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	19.980.000,00	(12.020.000,00)	62,44		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.150.000,00	176.795.600,00	(354.400,00)	99,80		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	27.150.000,00	27.075.000,00	(75.000,00)	99,72		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000,00	27.075.000,00	(75.000,00)	99,72		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.720.600,00	(279.400,00)	99,81		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.720.600,00	(279.400,00)	99,81		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.585.000,00	0,00	(2.585.000,00)	0		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.585.000,00	0,00	(2.585.000,00)	0		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.585.000,00	0,00	(2.585.000,00)	0		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.585.000,00	0,00	(2.585.000,00)	0		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.585.000,00	0,00	(2.585.000,00)	0		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.185.150,00	14.939.000,00	(16.246.150,00)	47,90		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.685.150,00	14.939.000,00	(2.746.150,00)	84,47		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.685.150,00	14.939.000,00	(2.746.150,00)	84,47		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.685.150,00	14.939.000,00	(2.746.150,00)	84,47		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.685.150,00	14.939.000,00	(2.746.150,00)	84,47		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0		
03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0		
03.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0		
03.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.410.155,00	0,00	(12.410.155,00)	0		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.410.155,00	0,00	(12.410.155,00)	0		
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.410.155,00	0,00	(12.410.155,00)	0		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.410.155,00	0,00	(12.410.155,00)	0		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.410.155,00	0,00	(12.410.155,00)	0		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.050.000,00	39.002.000,00	(48.000,00)	99,88		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.050.000,00	39.002.000,00	(48.000,00)	99,88		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8.800.000,00	8.772.000,00	(28.000,00)	99,68		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	8.772.000,00	(28.000,00)	99,68		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.772.000,00	(28.000,00)	99,68		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.250.000,00	30.230.000,00	(20.000,00)	99,93		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.250.000,00	30.230.000,00	(20.000,00)	99,93		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	30.230.000,00	(20.000,00)	99,93		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.180.334.052,00)	(2.942.947.881,00)	237.386.171,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-13.320.255.325,00	(13.320.255.325,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-13.320.255.325,00	(13.320.255.325,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(13.320.255.325,00)	(13.320.255.325,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.180.334.052,00)	(16.263.203.206,00)	(13.082.869.154,00)	0		

Tiamuta, 23 Agustus 2024
Pi. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM



 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2023							
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Tilamuta Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Tilamuta Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.000 Kecamatan Tilamuta							
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.212.618.335,00	2.114.552.017,00	(98.066.318,00)	95,57		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.126.475.535,00	2.045.521.017,00	(80.954.518,00)	96,19		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.998.000,00	1.885.000,00	(113.000,00)	94,34		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.998.000,00	1.885.000,00	(113.000,00)	94,34		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.998.000,00	1.885.000,00	(113.000,00)	94,34		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.000,00	1.885.000,00	(113.000,00)	94,34		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.661.996.335,00	1.654.063.044,00	(7.933.291,00)	99,52		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.661.996.335,00	1.654.063.044,00	(7.933.291,00)	99,52		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.661.996.335,00	1.654.063.044,00	(7.933.291,00)	99,52		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.661.996.335,00	1.654.063.044,00	(7.933.291,00)	99,52		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.435.425,00	294.515.375,00	(61.920.050,00)	82,63		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.455.425,00	184.767.375,00	(6.688.050,00)	96,51		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	191.455.425,00	184.767.375,00	(6.688.050,00)	96,51		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.455.425,00	184.767.375,00	(6.688.050,00)	96,51		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.980.000,00	109.748.000,00	(55.232.000,00)	66,52		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	164.980.000,00	109.748.000,00	(55.232.000,00)	66,52		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.980.000,00	109.748.000,00	(55.232.000,00)	66,52		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.950.000,00	74.203.848,00	(8.746.152,00)	89,46		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.450.000,00	21.328.848,00	(1.121.152,00)	95,01		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.450.000,00	21.328.848,00	(1.121.152,00)	95,01		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	21.328.848,00	(1.121.152,00)	95,01		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.500.000,00	52.875.000,00	(7.625.000,00)	87,40		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.500.000,00	52.875.000,00	(7.625.000,00)	87,40		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	52.875.000,00	(7.625.000,00)	87,40		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.095.775,00	20.853.750,00	(2.242.025,00)	90,29		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.095.775,00	20.853.750,00	(2.242.025,00)	90,29		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.095.775,00	20.853.750,00	(2.242.025,00)	90,29		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.095.775,00	20.853.750,00	(2.242.025,00)	90,29		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.530.000,00	13.522.000,00	(8.000,00)	99,94		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.280.000,00	5.272.000,00	(8.000,00)	99,85		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.280.000,00	5.272.000,00	(8.000,00)	99,85		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.280.000,00	5.272.000,00	(8.000,00)	99,85		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.272.000,00	(8.000,00)	99,85		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.132.800,00	5.215.000,00	(15.917.800,00)	24,68		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	21.132.800,00	5.215.000,00	(15.917.800,00)	24,68		
03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	21.132.800,00	5.215.000,00	(15.917.800,00)	24,68		
03.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	21.132.800,00	5.215.000,00	(15.917.800,00)	24,68		
03.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.132.800,00	5.215.000,00	(15.917.800,00)	24,68		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.240.000,00	44.054.000,00	(1.186.000,00)	97,38		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	45.240.000,00	44.054.000,00	(1.186.000,00)	97,38		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	44.000.000,00	42.814.000,00	(1.186.000,00)	97,30		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	42.814.000,00	(1.186.000,00)	97,30		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	42.814.000,00	(1.186.000,00)	97,30		
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.211.618.335,00)	(2.113.552.017,00)	98.066.318,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-9.702.035.491,00	(9.702.035.491,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-9.702.035.491,00	(9.702.035.491,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(9.702.035.491,00)	(9.702.035.491,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.211.618.335,00)	(11.815.587.508,00)	(9.603.969.173,00)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
PJ. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Mananggu
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Mananggu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.000 Kecamatan Mananggu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.339.880.591,00	2.260.816.805,00	(79.063.786,00)	96,62		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.283.602.053,00	2.206.361.770,00	(77.240.283,00)	96,62		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	0		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	0		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	0		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	0		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.807.731.710,00	1.771.264.123,00	(36.467.587,00)	97,98		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.795.238.500,00	1.762.820.913,00	(32.417.587,00)	98,19		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.795.238.500,00	1.762.820.913,00	(32.417.587,00)	98,19		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.795.238.500,00	1.762.820.913,00	(32.417.587,00)	98,19		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.493.210,00	8.443.210,00	(4.050.000,00)	67,58		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.493.210,00	8.443.210,00	(4.050.000,00)	67,58		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.493.210,00	8.443.210,00	(4.050.000,00)	67,58		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.755.975,00	4.953.000,00	(5.802.975,00)	46,05		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.255.975,00	4.953.000,00	(1.302.975,00)	79,17		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.255.975,00	4.953.000,00	(1.302.975,00)	79,17		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.255.975,00	4.953.000,00	(1.302.975,00)	79,17		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.642.869,00	146.148.369,00	(6.494.500,00)	95,75		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.962.869,00	59.898.369,00	(64.500,00)	99,89		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.962.869,00	59.898.369,00	(64.500,00)	99,89		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.962.869,00	59.898.369,00	(64.500,00)	99,89		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.680.000,00	86.250.000,00	(6.430.000,00)	93,06		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	92.680.000,00	86.250.000,00	(6.430.000,00)	93,06		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.680.000,00	86.250.000,00	(6.430.000,00)	93,06		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.500.000,00	37.450.000,00	(50.000,00)	99,87		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000,00	17.450.000,00	(50.000,00)	99,71		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	17.500.000,00	17.450.000,00	(50.000,00)	99,71		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.450.000,00	(50.000,00)	99,71		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.799.919,00	66.419.928,00	(10.379.991,00)	86,48		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.149.919,00	18.769.928,00	(10.379.991,00)	64,39		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.149.919,00	18.769.928,00	(10.379.991,00)	64,39		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.149.919,00	18.769.928,00	(10.379.991,00)	64,39		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.546.580,00	180.126.350,00	(12.420.230,00)	93,55		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.367.100,00	15.856.710,00	(6.510.390,00)	70,89		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.367.100,00	15.856.710,00	(6.510.390,00)	70,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.367.100,00	15.856.710,00	(6.510.390,00)	70,89		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.179.480,00	2.341.940,00	(4.837.540,00)	32,62		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.179.480,00	2.341.940,00	(4.837.540,00)	32,62		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.179.480,00	2.341.940,00	(4.837.540,00)	32,62		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.000.000,00	161.927.700,00	(1.072.300,00)	99,34		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	163.000.000,00	161.927.700,00	(1.072.300,00)	99,34		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.000.000,00	161.927.700,00	(1.072.300,00)	99,34		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.137.903,00	10.861.400,00	(276.503,00)	97,52		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.013.400,00	8.013.400,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.013.400,00	8.013.400,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.013.400,00	8.013.400,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.013.400,00	8.013.400,00	0,00	100,00		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.124.503,00	2.848.000,00	(276.503,00)	91,15		
02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.124.503,00	2.848.000,00	(276.503,00)	91,15		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.124.503,00	2.848.000,00	(276.503,00)	91,15		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.124.503,00	2.848.000,00	(276.503,00)	91,15		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.372.070,00	1.985.070,00	(387.000,00)	83,69		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.372.070,00	1.985.070,00	(387.000,00)	83,69		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.372.070,00	1.985.070,00	(387.000,00)	83,69		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.372.070,00	1.985.070,00	(387.000,00)	83,69		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.372.070,00	1.985.070,00	(387.000,00)	83,69		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.830.300,00	3.830.300,00	(1.000.000,00)	79,30		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.830.300,00	3.830.300,00	(1.000.000,00)	79,30		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.830.300,00	3.830.300,00	(1.000.000,00)	79,30		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.830.300,00	3.830.300,00	(1.000.000,00)	79,30		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.300,00	3.830.300,00	(1.000.000,00)	79,30		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.965.000,00	33.965.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.965.000,00	33.965.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.965.000,00	33.965.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	33.965.000,00	33.965.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.965.000,00	33.965.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.973.265,00	3.813.265,00	(160.000,00)	95,97		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.973.265,00	3.813.265,00	(160.000,00)	95,97		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.973.265,00	3.813.265,00	(160.000,00)	95,97		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.973.265,00	3.813.265,00	(160.000,00)	95,97		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.973.265,00	3.813.265,00	(160.000,00)	95,97		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.338.880.591,00)	(2.260.816.805,00)	78.063.786,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-10.348.751.475,00	(10.348.751.475,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-10.348.751.475,00	(10.348.751.475,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(10.348.751.475,00)	(10.348.751.475,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.338.880.591,00)	(12.609.568.280,00)	(10.270.687.689,00)	0		

Ilamuta, 23 Agustus 2024
P. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Wonosari
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Wonosari
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.000 Kecamatan Wonosari

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.416.863.705,00	2.250.929.049,00	(165.934.656,00)	93,13		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.301.504.055,00	2.156.671.049,00	(144.833.006,00)	93,71		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.695.069,00	0,00	(5.695.069,00)	0		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.900.869,00	0,00	(1.900.869,00)	0		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.900.869,00	0,00	(1.900.869,00)	0		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.869,00	0,00	(1.900.869,00)	0		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.144.200,00	0,00	(2.144.200,00)	0		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.144.200,00	0,00	(2.144.200,00)	0		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.144.200,00	0,00	(2.144.200,00)	0		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.854.921.990,00	1.808.374.292,00	(46.547.698,00)	97,49		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.853.416.830,00	1.808.374.292,00	(45.042.538,00)	97,57		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.853.416.830,00	1.808.374.292,00	(45.042.538,00)	97,57		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.853.416.830,00	1.808.374.292,00	(45.042.538,00)	97,57		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.505.160,00	0,00	(1.505.160,00)	0		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.505.160,00	0,00	(1.505.160,00)	0		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.505.160,00	0,00	(1.505.160,00)	0		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	774.306,00	0,00	(774.306,00)	0		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	774.306,00	0,00	(774.306,00)	0		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	774.306,00	0,00	(774.306,00)	0		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	774.306,00	0,00	(774.306,00)	0		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.541.300,00	4.500.000,00	(12.041.300,00)	27,20		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.300.000,00	4.500.000,00	(9.800.000,00)	31,47		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.300.000,00	4.500.000,00	(9.800.000,00)	31,47		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	4.500.000,00	(9.800.000,00)	31,47		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	921.300,00	0,00	(921.300,00)	0		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	921.300,00	0,00	(921.300,00)	0		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	921.300,00	0,00	(921.300,00)	0		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.628.124,00	185.708.100,00	(47.920.024,00)	79,49		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.555.624,00	11.111.000,00	(18.444.624,00)	37,59		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.555.624,00	11.111.000,00	(18.444.624,00)	37,59		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.555.624,00	11.111.000,00	(18.444.624,00)	37,59		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.072.500,00	174.597.100,00	(29.475.400,00)	85,56		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	204.072.500,00	174.597.100,00	(29.475.400,00)	85,56		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.072.500,00	174.597.100,00	(29.475.400,00)	85,56		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.050.000,00	20.000.000,00	(19.050.000,00)	51,22		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22.500.000,00	20.000.000,00	(2.500.000,00)	88,89		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	22.500.000,00	20.000.000,00	(2.500.000,00)	88,89		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	20.000.000,00	(2.500.000,00)	88,89		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.550.000,00	0,00	(16.550.000,00)	0		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	16.550.000,00	0,00	(16.550.000,00)	0		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.550.000,00	0,00	(16.550.000,00)	0		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.512.316,00	83.152.407,00	(7.359.909,00)	91,87		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.562.316,00	19.702.407,00	(5.859.909,00)	77,08		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.562.316,00	19.702.407,00	(5.859.909,00)	77,08		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.562.316,00	19.702.407,00	(5.859.909,00)	77,08		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.380.950,00	54.936.250,00	(5.444.700,00)	90,98		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.254.950,00	24.156.250,00	(4.098.700,00)	85,49		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.254.950,00	24.156.250,00	(4.098.700,00)	85,49		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.254.950,00	24.156.250,00	(4.098.700,00)	85,49		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.560.000,00	1.220.000,00	(1.340.000,00)	47,66		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.560.000,00	1.220.000,00	(1.340.000,00)	47,66		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	1.220.000,00	(1.340.000,00)	47,66		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.566.000,00	29.560.000,00	(6.000,00)	99,98		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	29.566.000,00	29.560.000,00	(6.000,00)	99,98		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.566.000,00	29.560.000,00	(6.000,00)	99,98		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.141.450,00	14.470.000,00	(4.671.450,00)	75,60		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.841.450,00	14.470.000,00	(4.371.450,00)	76,80		
02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	555.000,00	0,00	(555.000,00)	0		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	555.000,00	0,00	(555.000,00)	0		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	0,00	(555.000,00)	0		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.816.450,00	0,00	(3.816.450,00)	0		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.816.450,00	0,00	(3.816.450,00)	0		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.816.450,00	0,00	(3.816.450,00)	0		
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.756.200,00	19.198.000,00	(2.558.200,00)	88,24		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.416.400,00	7.100.000,00	(316.400,00)	95,73		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.416.400,00	7.100.000,00	(316.400,00)	95,73		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.416.400,00	7.100.000,00	(316.400,00)	95,73		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.416.400,00	7.100.000,00	(316.400,00)	95,73		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	14.339.800,00	12.098.000,00	(2.241.800,00)	84,37		
03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0		
03.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0		
03.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0		
03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12.299.800,00	12.098.000,00	(201.800,00)	98,36		
03.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.299.800,00	12.098.000,00	(201.800,00)	98,36		
03.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.299.800,00	12.098.000,00	(201.800,00)	98,36		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.325.000,00	0,00	(6.325.000,00)	0		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	0		
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	0		
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.387.000,00	60.590.000,00	(4.797.000,00)	92,66		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65.387.000,00	60.590.000,00	(4.797.000,00)	92,66		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	9.683.000,00	9.350.000,00	(333.000,00)	96,56		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.683.000,00	9.350.000,00	(333.000,00)	96,56		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.683.000,00	9.350.000,00	(333.000,00)	96,56		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	52.954.000,00	51.240.000,00	(1.714.000,00)	96,76		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	52.954.000,00	51.240.000,00	(1.714.000,00)	96,76		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.954.000,00	51.240.000,00	(1.714.000,00)	96,76		
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.415.863.705,00)	(2.250.929.049,00)	164.934.656,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-10.643.926.268,00	(10.643.926.268,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-10.643.926.268,00	(10.643.926.268,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(10.643.926.268,00)	(10.643.926.268,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.415.863.705,00)	(12.894.855.317,00)	(10.478.991.612,00)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pi. BUPATI BOALEMO
DR. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Dulupi
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000 Kecamatan Dulupi
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000.000 Kecamatan Dulupi

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.482.232.362,00	2.397.136.491,00	(85.095.871,00)	96,57		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.355.694.562,00	2.271.835.491,00	(83.859.071,00)	96,44		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.950.932.362,00	1.894.428.108,00	(56.504.254,00)	97,10		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.950.932.362,00	1.894.428.108,00	(56.504.254,00)	97,10		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.950.932.362,00	1.894.428.108,00	(56.504.254,00)	97,10		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.950.932.362,00	1.894.428.108,00	(56.504.254,00)	97,10		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.775.000,00	12.773.000,00	(2.000,00)	99,98		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.925.000,00	1.923.000,00	(2.000,00)	99,90		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.925.000,00	1.923.000,00	(2.000,00)	99,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	1.923.000,00	(2.000,00)	99,90		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.903.259,00	240.750.000,00	(18.153.259,00)	92,99		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.423.259,00	72.817.000,00	(606.259,00)	99,17		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.423.259,00	72.817.000,00	(606.259,00)	99,17		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.423.259,00	72.817.000,00	(606.259,00)	99,17		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.480.000,00	167.933.000,00	(17.547.000,00)	90,54		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	185.480.000,00	167.933.000,00	(17.547.000,00)	90,54		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.480.000,00	167.933.000,00	(17.547.000,00)	90,54		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.387.412,00	48.634.229,00	(5.753.183,00)	89,42		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.487.412,00	12.734.229,00	(5.753.183,00)	68,88		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.487.412,00	12.734.229,00	(5.753.183,00)	68,88		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.487.412,00	12.734.229,00	(5.753.183,00)	68,88		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.331.529,00	29.885.154,00	(3.446.375,00)	89,66		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.441.529,00	23.995.154,00	(3.446.375,00)	87,44		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.441.529,00	23.995.154,00	(3.446.375,00)	87,44		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.441.529,00	23.995.154,00	(3.446.375,00)	87,44		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.453.800,00	41.975.000,00	(478.800,00)	98,87		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.171.400,00	17.729.000,00	(442.400,00)	97,57		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.571.400,00	4.143.000,00	(428.400,00)	90,63		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.571.400,00	4.143.000,00	(428.400,00)	90,63		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.571.400,00	4.143.000,00	(428.400,00)	90,63		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.600.000,00	13.586.000,00	(14.000,00)	99,90		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.586.000,00	(14.000,00)	99,90		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.586.000,00	(14.000,00)	99,90		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24.282.400,00	24.246.000,00	(36.400,00)	99,85		
03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.682.400,00	6.646.000,00	(36.400,00)	99,46		
03.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.682.400,00	6.646.000,00	(36.400,00)	99,46		
03.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.682.400,00	6.646.000,00	(36.400,00)	99,46		
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.050.000,00	5.305.000,00	(745.000,00)	87,69		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.050.000,00	5.305.000,00	(745.000,00)	87,69		
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.050.000,00	5.305.000,00	(745.000,00)	87,69		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.050.000,00	5.305.000,00	(745.000,00)	87,69		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	5.305.000,00	(745.000,00)	87,69		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	67.034.000,00	67.021.000,00	(13.000,00)	99,98		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	67.034.000,00	67.021.000,00	(13.000,00)	99,98		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.004.000,00	15.000.000,00	(4.000,00)	99,97		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.004.000,00	15.000.000,00	(4.000,00)	99,97		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.004.000,00	15.000.000,00	(4.000,00)	99,97		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	52.030.000,00	52.021.000,00	(9.000,00)	99,98		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	52.030.000,00	52.021.000,00	(9.000,00)	99,98		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.030.000,00	52.021.000,00	(9.000,00)	99,98		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.481.232.362,00)	(2.396.236.491,00)	84.995.871,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-10.172.730.697,00	(10.172.730.697,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-10.172.730.697,00	(10.172.730.697,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(10.172.730.697,00)	(10.172.730.697,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.481.232.362,00)	(12.568.967.188,00)	(10.087.734.826,00)	0		

Mamuta, 23 Agustus 2024
Di: BUPATI BOALEMO

D. SNEERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Paguyaman Pantai
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06.000 Kecamatan Paguyaman Pantai
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06.000.000 Kecamatan Paguyaman Pantai

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.052.014.486,00	1.853.320.517,00	(198.693.969,00)	90,32		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.714.843.471,00	1.584.355.802,00	(130.487.669,00)	92,39		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.108.858,00	7.904.818,00	(7.204.040,00)	52,32		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.280.000,00	5.278.000,00	(2.000,00)	99,96		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.280.000,00	5.278.000,00	(2.000,00)	99,96		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.278.000,00	(2.000,00)	99,96		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,00	1.798.000,00	(7.202.000,00)	19,98		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	1.798.000,00	(7.202.000,00)	19,98		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	1.798.000,00	(7.202.000,00)	19,98		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	828.858,00	828.818,00	(40,00)	100,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	828.858,00	828.818,00	(40,00)	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.858,00	828.818,00	(40,00)	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.314.677,00	1.409.592.734,00	(90.721.943,00)	93,95		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.314.677,00	1.409.592.734,00	(90.721.943,00)	93,95		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.314.677,00	1.409.592.734,00	(90.721.943,00)	93,95		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.314.677,00	1.409.592.734,00	(90.721.943,00)	93,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.950.000,00	(50.000,00)	99,80		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000,00	24.950.000,00	(50.000,00)	99,80		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.950.000,00	(50.000,00)	99,80		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.950.000,00	(50.000,00)	99,80		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.225.378,00	41.580.750,00	(20.644.628,00)	66,82		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.425.378,00	10.024.750,00	(3.400.628,00)	74,67		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.425.378,00	10.024.750,00	(3.400.628,00)	74,67		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.425.378,00	10.024.750,00	(3.400.628,00)	74,67		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.800.000,00	31.556.000,00	(17.244.000,00)	64,66		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	48.800.000,00	31.556.000,00	(17.244.000,00)	64,66		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	31.556.000,00	(17.244.000,00)	64,66		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.387.084,00	70.370.500,00	(3.016.584,00)	95,89		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.091.280,00	15.173.000,00	(2.918.280,00)	83,87		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.091.280,00	15.173.000,00	(2.918.280,00)	83,87		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.091.280,00	15.173.000,00	(2.918.280,00)	83,87		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.095.804,00	1.997.500,00	(98.304,00)	95,31		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.095.804,00	1.997.500,00	(98.304,00)	95,31		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.095.804,00	1.997.500,00	(98.304,00)	95,31		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.807.474,00	29.957.000,00	(8.850.474,00)	77,19		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.807.474,00	29.957.000,00	(8.850.474,00)	77,19		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.807.474,00	29.957.000,00	(8.850.474,00)	77,19		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.807.474,00	29.957.000,00	(8.850.474,00)	77,19		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	287.141.200,00	229.611.900,00	(57.529.300,00)	79,96		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	176.741.200,00	119.611.900,00	(57.129.300,00)	67,68		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	117.072.000,00	109.460.900,00	(7.611.100,00)	93,50		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	117.072.000,00	109.460.900,00	(7.611.100,00)	93,50		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.072.000,00	109.460.900,00	(7.611.100,00)	93,50		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	59.669.200,00	10.151.000,00	(49.518.200,00)	17,01		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.669.200,00	10.151.000,00	(49.518.200,00)	17,01		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.669.200,00	10.151.000,00	(49.518.200,00)	17,01		
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	110.400.000,00	110.000.000,00	(400.000,00)	99,64		
02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	110.400.000,00	110.000.000,00	(400.000,00)	99,64		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	110.400.000,00	110.000.000,00	(400.000,00)	99,64		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000,00	110.000.000,00	(400.000,00)	99,64		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.029.815,00	6.419.815,00	(1.610.000,00)	79,95		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.029.815,00	6.419.815,00	(1.610.000,00)	79,95		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.029.815,00	6.419.815,00	(1.610.000,00)	79,95		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.029.815,00	6.419.815,00	(1.610.000,00)	79,95		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.029.815,00	6.419.815,00	(1.610.000,00)	79,95		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.000.000,00	32.933.000,00	(9.067.000,00)	78,41		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.000.000,00	32.933.000,00	(9.067.000,00)	78,41		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13.500.000,00	13.433.000,00	(67.000,00)	99,50		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.433.000,00	(67.000,00)	99,50		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.433.000,00	(67.000,00)	99,50		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.000.000,00	2.000.000,00	(9.000.000,00)	18,18		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	2.000.000,00	(9.000.000,00)	18,18		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	2.000.000,00	(9.000.000,00)	18,18		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.051.014.486,00)	(1.853.320.517,00)	197.693.969,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-8.772.857.958,00	(8.772.857.958,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-8.772.857.958,00	(8.772.857.958,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(8.772.857.958,00)	(8.772.857.958,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.051.014.486,00)	(10.626.178.475,00)	(8.575.163.989,00)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Rj. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Botumoito
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.07.000 Kecamatan Botumoito
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.07.000.000 Kecamatan Botumoito

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.630.846.492,00	2.501.552.063,00	(129.294.429,00)	95,09		
00	Non Program	0,00	74.001.465,00	74.001.465,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	74.001.465,00	74.001.465,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	74.001.465,00	74.001.465,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	74.001.465,00	74.001.465,00	0		
00.0.00.00.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	74.001.465,00	74.001.465,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.503.510.142,00	2.332.370.598,00	(171.139.544,00)	93,16		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.129.177.335,00	2.007.855.261,00	(121.322.074,00)	94,30		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.177.335,00	2.007.855.261,00	(121.322.074,00)	94,30		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.129.177.335,00	2.007.855.261,00	(121.322.074,00)	94,30		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.129.177.335,00	2.007.855.261,00	(121.322.074,00)	94,30		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.203.350,00	2.000.000,00	(203.350,00)	90,77		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.203.350,00	2.000.000,00	(203.350,00)	90,77		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.203.350,00	2.000.000,00	(203.350,00)	90,77		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.203.350,00	2.000.000,00	(203.350,00)	90,77		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.917.298,00	3.101.000,00	(13.816.298,00)	18,33		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.917.298,00	3.101.000,00	(13.816.298,00)	18,33		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.917.298,00	3.101.000,00	(13.816.298,00)	18,33		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.917.298,00	3.101.000,00	(13.816.298,00)	18,33		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.844.275,00	172.127.500,00	(21.716.775,00)	88,80		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.114.275,00	24.327.500,00	(15.786.775,00)	60,65		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.114.275,00	24.327.500,00	(15.786.775,00)	60,65		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.114.275,00	24.327.500,00	(15.786.775,00)	60,65		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.730.000,00	147.800.000,00	(5.930.000,00)	96,14		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	153.730.000,00	147.800.000,00	(5.930.000,00)	96,14		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.730.000,00	147.800.000,00	(5.930.000,00)	96,14		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.559.320,00	124.555.837,00	(6.003.483,00)	95,40		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.919.320,00	19.864.508,00	(1.054.812,00)	94,96		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.919.320,00	19.864.508,00	(1.054.812,00)	94,96		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.919.320,00	19.864.508,00	(1.054.812,00)	94,96		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.640.000,00	104.691.329,00	(4.948.671,00)	95,49		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	109.640.000,00	104.691.329,00	(4.948.671,00)	95,49		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.640.000,00	104.691.329,00	(4.948.671,00)	95,49		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.808.564,00	22.731.000,00	(8.077.564,00)	73,78		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.538.564,00	22.731.000,00	(3.807.564,00)	85,65		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.538.564,00	22.731.000,00	(3.807.564,00)	85,65		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.538.564,00	22.731.000,00	(3.807.564,00)	85,65		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.270.000,00	0,00	(4.270.000,00)	0		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.270.000,00	0,00	(4.270.000,00)	0		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	0,00	(4.270.000,00)	0		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.948.050,00	0,00	(1.948.050,00)	0		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.948.050,00	0,00	(1.948.050,00)	0		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.948.050,00	0,00	(1.948.050,00)	0		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.948.050,00	0,00	(1.948.050,00)	0		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.948.050,00	0,00	(1.948.050,00)	0		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.060.300,00	29.750.000,00	(3.310.300,00)	89,99		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.250.000,00	29.750.000,00	(2.500.000,00)	92,25		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000,00	14.000.000,00	(2.500.000,00)	84,85		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	14.000.000,00	(2.500.000,00)	84,85		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	14.000.000,00	(2.500.000,00)	84,85		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	810.300,00	0,00	(810.300,00)	0		
03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	810.300,00	0,00	(810.300,00)	0		
03.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	810.300,00	0,00	(810.300,00)	0		
03.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.300,00	0,00	(810.300,00)	0		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.328.000,00	4.954.000,00	(21.374.000,00)	18,82		
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	26.328.000,00	4.954.000,00	(21.374.000,00)	18,82		
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	26.328.000,00	4.954.000,00	(21.374.000,00)	18,82		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.328.000,00	4.954.000,00	(21.374.000,00)	18,82		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.328.000,00	4.954.000,00	(21.374.000,00)	18,82		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.500.000,00	60.476.000,00	(24.000,00)	99,96		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.500.000,00	60.476.000,00	(24.000,00)	99,96		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	33.000.000,00	32.976.000,00	(24.000,00)	99,93		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	32.976.000,00	(24.000,00)	99,93		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	32.976.000,00	(24.000,00)	99,93		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.629.846.492,00)	(2.501.552.063,00)	128.294.429,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-11.380.167.108,00	(11.380.167.108,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-11.380.167.108,00	(11.380.167.108,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(11.380.167.108,00)	(11.380.167.108,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.629.846.492,00)	(13.881.719.171,00)	(11.251.872.679,00)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Bj. BUPATI BOALEMO
Dr. SHIRMAN MORIDU, S.Pd. MM



 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2023							
Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 Kesbang Politik dan Limnas Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000 Kesbang Politik dan Limnas Sub Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000.000 Kesbang Politik dan Limnas							
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	17.042.450.674,00	17.744.890.946,00	702.440.272,00	104,12		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.436.469.965,00	2.220.933.845,00	(215.536.120,00)	91,15		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.324.545,00	0,00	(12.324.545,00)	0		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.230.435,00	0,00	(1.230.435,00)	0		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.230.435,00	0,00	(1.230.435,00)	0		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.435,00	0,00	(1.230.435,00)	0		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.678.110,00	0,00	(7.678.110,00)	0		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.678.110,00	0,00	(7.678.110,00)	0		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.678.110,00	0,00	(7.678.110,00)	0		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.416.000,00	0,00	(3.416.000,00)	0		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.416.000,00	0,00	(3.416.000,00)	0		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.416.000,00	0,00	(3.416.000,00)	0		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.686.201.717,00	1.568.044.931,00	(118.156.786,00)	92,99		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.686.201.717,00	1.568.044.931,00	(118.156.786,00)	92,99		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.686.201.717,00	1.568.044.931,00	(118.156.786,00)	92,99		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.686.201.717,00	1.568.044.931,00	(118.156.786,00)	92,99		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.403.150,00	0,00	(2.403.150,00)	0		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.403.150,00	0,00	(2.403.150,00)	0		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.403.150,00	0,00	(2.403.150,00)	0		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.403.150,00	0,00	(2.403.150,00)	0		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.998.000,00	59.360.000,00	(2.638.000,00)	95,75		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.098.000,00	40.460.000,00	(2.638.000,00)	93,88		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	43.098.000,00	40.460.000,00	(2.638.000,00)	93,88		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.098.000,00	40.460.000,00	(2.638.000,00)	93,88		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.026.950,00	262.897.980,00	(7.128.970,00)	97,36		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	50,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	50,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	50,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.026.950,00	255.897.980,00	(128.970,00)	99,95		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	256.026.950,00	255.897.980,00	(128.970,00)	99,95		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.026.950,00	255.897.980,00	(128.970,00)	99,95		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0		
01.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0		
01.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.415.603,00	320.630.934,00	(70.784.669,00)	81,92		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.741.341,00	16.729.644,00	(11.697,00)	99,93		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.741.341,00	16.729.644,00	(11.697,00)	99,93		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.741.341,00	16.729.644,00	(11.697,00)	99,93		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.424.262,00	60.912.290,00	(77.511.972,00)	44,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	138.424.262,00	60.912.290,00	(77.511.972,00)	44,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.424.262,00	60.912.290,00	(77.511.972,00)	44,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.250.000,00	242.989.000,00	6.739.000,00	102,85		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	236.250.000,00	242.989.000,00	6.739.000,00	102,85		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.250.000,00	242.989.000,00	6.739.000,00	102,85		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.500.000,00	10.000.000,00	(1.500.000,00)	86,96		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.500.000,00	10.000.000,00	(1.500.000,00)	86,96		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	10.000.000,00	(1.500.000,00)	86,96		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	10.000.000,00	(1.500.000,00)	86,96		
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.186.889.790,00	853.238.200,00	(333.651.590,00)	71,89		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.186.889.790,00	853.238.200,00	(333.651.590,00)	71,89		
02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.799.615,00	0,00	(4.799.615,00)	0		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.799.615,00	0,00	(4.799.615,00)	0		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.799.615,00	0,00	(4.799.615,00)	0		
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.182.090.175,00	853.238.200,00	(328.851.975,00)	72,18		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.182.090.175,00	853.238.200,00	(328.851.975,00)	72,18		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.090.175,00	853.238.200,00	(328.851.975,00)	72,18		
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	9.933.799.619,00	11.449.639.976,00	1.515.840.357,00	115,26		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	9.933.799.619,00	11.449.639.976,00	1.515.840.357,00	115,26		
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.578.550,00	99.140.000,00	(16.438.550,00)	85,78		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.578.550,00	99.140.000,00	(16.438.550,00)	85,78		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.578.550,00	99.140.000,00	(16.438.550,00)	85,78		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9.818.221.069,00	11.350.499.976,00	1.532.278.907,00	115,61		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.818.221.069,00	11.350.499.976,00	1.532.278.907,00	115,61		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.691.093,00	80.970.000,00	(191.721.093,00)	29,69		
03.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	9.545.529.976,00	11.269.529.976,00	1.724.000.000,00	118,06		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	661.939.460,00	565.009.000,00	(96.930.460,00)	85,36		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	661.939.460,00	565.009.000,00	(96.930.460,00)	85,36		
04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.262.660,00	0,00	(12.262.660,00)	0		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.262.660,00	0,00	(12.262.660,00)	0		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.262.660,00	0,00	(12.262.660,00)	0		
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	425.515.320,00	425.109.000,00	(406.320,00)	99,90		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	425.515.320,00	425.109.000,00	(406.320,00)	99,90		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.515.320,00	425.109.000,00	(406.320,00)	99,90		
04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	224.161.480,00	139.900.000,00	(84.261.480,00)	62,41		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	224.161.480,00	139.900.000,00	(84.261.480,00)	62,41		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.161.480,00	9.900.000,00	(34.261.480,00)	22,42		
04.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	130.000.000,00	(50.000.000,00)	72,22		
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	228.718.440,00	149.671.750,00	(79.046.690,00)	65,44		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	228.718.440,00	149.671.750,00	(79.046.690,00)	65,44		
05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	13.205.030,00	12.000.000,00	(1.205.030,00)	90,87		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.205.030,00	12.000.000,00	(1.205.030,00)	90,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.205.030,00	12.000.000,00	(1.205.030,00)	90,87		
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	215.513.410,00	137.671.750,00	(77.841.660,00)	63,88		
05.2.01.03.5.1	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
05.2.01.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	215.513.410,00	137.671.750,00	(77.841.660,00)	63,88		
06	Belanja Barang dan Jasa	215.513.410,00	137.671.750,00	(77.841.660,00)	63,88		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.594.633.400,00	2.506.398.175,00	(88.235.225,00)	96,60		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.594.633.400,00	2.506.398.175,00	(88.235.225,00)	96,60		
06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.768.090,00	0,00	(6.768.090,00)	0		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.768.090,00	0,00	(6.768.090,00)	0		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.768.090,00	0,00	(6.768.090,00)	0		
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.329.040.310,00	2.267.838.595,00	(61.201.715,00)	97,37		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.329.040.310,00	2.267.838.595,00	(61.201.715,00)	97,37		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.079.040.310,00	1.017.838.595,00	(61.201.715,00)	94,33		
06.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	258.825.000,00	238.559.580,00	(20.265.420,00)	92,17		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	258.825.000,00	238.559.580,00	(20.265.420,00)	92,17		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.825.000,00	238.559.580,00	(20.265.420,00)	92,17		
	SURPLUS / DEFISIT	(17.042.450.674,00)	(17.744.890.946,00)	(702.440.272,00)	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-25.913.996.540,00	(25.913.996.540,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-25.913.996.540,00	(25.913.996.540,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(25.913.996.540,00)	(25.913.996.540,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(17.042.450.674,00)	(43.658.887.486,00)	(26.616.436.812,00)	0		

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pi. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO					
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN					
Tahun Anggaran 2023					
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	364.299.780.942,00	129.936.841.601,00	0,00	0,00
		350.658.675.848,60	124.918.983.991,00	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	189.784.227.986,00	32.710.783.108,00	0,00	0,00
		182.405.624.954,00	31.002.922.322,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	189.784.227.986,00	32.710.783.108,00	0,00	0,00
		182.405.624.954,00	31.002.922.322,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.187.999.820,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.187.999.820,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.187.999.820,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.025.984.202,00	95.000.000,00	0,00	0,00
		142.687.135.377,00	84.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.346.189.578,00	0,00	0,00	0,00
		139.032.681.376,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.321.173.033,00	0,00	0,00	0,00
		139.032.681.376,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.016.545,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.590.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.590.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.697.500,00	95.000.000,00	0,00	0,00
		255.499.275,00	84.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	84.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.697.500,00	0,00	0,00	0,00
		255.499.275,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.388.397.124,00	0,00	0,00	0,00
		3.388.364.726,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.388.397.124,00	0,00	0,00	0,00
		3.388.364.726,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	39.474.380.479,00	32.518.968.108,00	0,00	0,00
		33.299.355.360,00	30.822.107.322,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.879.485.576,00	15.378.156.038,00	0,00	0,00
		20.519.343.867,00	14.737.675.427,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	400.001.200,00	0,00	0,00
		0,00	399.616.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	379.772.665,00	6.272.292.000,00	0,00	0,00
		378.092.000,00	5.717.672.825,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	740.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	739.436.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	999.326.200,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	628.033.600,00	614.300.000,00	0,00	0,00
		626.763.800,00	612.815.800,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	775.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	873.659.332,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	124.645.224,00	0,00	0,00	0,00
		124.411.640,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.684.196.494,00	0,00	0,00	0,00
		7.871.635.712,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	148.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.338.589,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.263.353.961,00	4.596.562.838,00	0,00	0,00
		9.737.929.841,00	4.424.366.720,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	782.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	781.782.550,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.263.877.989,00	32.500.000,00	0,00	0,00
		1.248.547.285,00	29.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	386.607.643,00	165.000.000,00	0,00	0,00
		383.625.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.184.264.911,00	13.814.899.870,00	0,00	0,00
		9.258.037.823,00	12.054.285.645,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	380.000.001,00	0,00	0,00
		0,00	303.984.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	1.156.568.000,00	0,00	0,00
		0,00	925.152.500,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0,00	6.231.336.899,00	0,00	0,00
		0,00	4.960.888.700,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	135.602.100,00	1.708.535.000,00	0,00	0,00
		104.870.500,00	1.482.133.250,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	75.000.000,00	1.103.250.000,00	0,00	0,00
		50.705.000,00	1.102.040.350,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	546.360.800,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	371.822.075,00	322.996.000,00	0,00	0,00
		370.491.400,00	321.561.200,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	475.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	574.040.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	168.351.753,00	0,00	0,00	0,00
		167.510.829,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.194.765.151,00	0,00	0,00	0,00
		1.635.425.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	240.144.730,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		236.805.200,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.810.466.865,00	1.827.213.970,00	0,00	0,00
		5.304.907.757,00	1.778.124.845,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	941.365.419,00	0,00	0,00	0,00
		1.149.248.637,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	246.746.818,00	0,00	0,00	0,00
		238.073.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.474.884.652,00	3.325.912.200,00	0,00	0,00
		2.987.011.262,00	3.931.008.250,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	429.135.000,00	0,00	0,00
		0,00	428.357.400,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	215.277.200,00	122.415.000,00	0,00	0,00
		215.094.720,00	115.656.900,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	564.950.000,00	0,00	0,00
		0,00	563.877.450,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	598.860.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,00	1.386.600.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.383.180.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	344.887.790,00	88.812.200,00	0,00	0,00
		341.986.411,00	88.658.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	37.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	44.592.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.957.980,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.768.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.422.880.093,00	623.436.500,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	520.994.443,00	134.000.000,00	0,00	0,00
		414.601.058,00	128.982.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	543.313.219,00	0,00	0,00	0,00
		525.141.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	935.745.340,00	0,00	0,00	0,00
		534.962.408,00	99.138.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	89.218.350,00	0,00	0,00	0,00
		88.553.160,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	380.256.990,00	0,00	0,00	0,00
		378.467.248,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	466.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.942.000,00	99.138.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	26.283.899,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		19.234.500,00	24.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	26.283.899,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		19.234.500,00	24.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.03.2.02.05	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	26.283.899,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		19.234.500,00	24.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	3.257.579.406,00	72.815.000,00	0,00	0,00
		3.211.899.897,00	72.815.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.1-01.2-19.2-22.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.257.579.406,00	72.815.000,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.211.899.897,00	72.815.000,00	0,00	0,00
		1.403.143.384,00	0,00	0,00	0,00
		1.370.481.156,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.2-19.2-22.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.854.436.022,00	72.815.000,00	0,00	0,00
1.02	KESEHATAN	1.841.418.741,00	72.815.000,00	0,00	0,00
		138.299.879.510,00	11.605.782.573,00	0,00	0,00
		134.161.819.316,60	11.330.978.154,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	138.299.879.510,00	11.605.782.573,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.00	Non Program	134.161.819.316,60	11.330.978.154,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		-24.917.166,40	419.997.100,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	-24.917.166,40	419.997.100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		-24.917.166,40	419.997.100,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.403.331.656,00	1.427.591.253,00	0,00	0,00
92.343.855.562,00		1.047.934.235,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00
	1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00
	1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.225.202.831,00	0,00
52.095.602.714,00		0,00		0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		53.225.202.831,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.095.602.714,00	0,00	0,00	0,00
		543.800.871,00	38.000.000,00	0,00	0,00
		507.410.438,00	17.890.000,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	501.058.871,00	38.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.668.438,00	17.890.000,00	0,00	0,00
		42.742.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.742.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.225.049.548,00	0,00	0,00	0,00
		3.212.006.989,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.003.548,00	0,00	0,00	0,00
		328.858.548,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.512.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.407.734,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.856.534.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.843.740.707,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.455.950,00	0,00	0,00	0,00
		219.448.892,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.455.950,00	0,00	0,00	0,00
		219.448.892,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	41.184.822.456,00	1.389.591.253,00	0,00	0,00
		36.309.386.529,00	1.030.044.235,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	41.184.822.456,00	1.389.591.253,00	0,00	0,00
		36.309.386.529,00	1.030.044.235,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.766.725.880,00	10.178.191.320,00	0,00	0,00
		33.128.225.695,00	9.863.046.819,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.927.060.117,00	9.838.300.320,00	0,00	0,00
		4.258.224.774,00	9.407.087.419,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	143.153.485,00	5.590.906.250,00	0,00	0,00
		141.835.000,00	5.590.261.250,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.955.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	199.753.000,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	53.728.397,00	692.162.187,00	0,00	0,00
		35.800.000,00	691.691.169,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	2.577.642.729,00	0,00	0,00
		0,00	2.277.700.000,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	777.589.154,00	0,00	0,00
		0,00	647.682.000,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.600.822.020,00	0,00	0,00	0,00
		1.442.179.962,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.820.658.488,00	0,00	0,00	0,00
		2.334.044.290,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	63.583.727,00	0,00	0,00	0,00
		59.893.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.355.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.142.522,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	52.759.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.374.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.937.299.045,00	283.891.000,00	0,00	0,00
		26.984.222.585,00	400.459.400,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.048.666.828,00	0,00	0,00	0,00
		1.023.854.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	174.830.654,00	0,00	0,00	0,00
		111.257.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	539.670.300,00	0,00	0,00	0,00
		484.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	237.524.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.514.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	180.466.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.086.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	164.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.423.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	71.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.760.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	185.299.200,00	0,00	0,00	0,00
		179.492.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	162.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	473.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		195.190.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	132.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	138.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.450.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.059.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.372.264.202,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	164.552.600,00	0,00	0,00	0,00
		153.285.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	574.069.470,00	0,00	0,00	0,00
		509.093.841,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	605.271.170,00	0,00	0,00	0,00
		526.941.060,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	431.981.000,00	0,00	0,00	0,00
		344.995.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.951.112.662,00	0,00	0,00	0,00
		1.848.008.870,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.632.512.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.004.579.429,00	117.574.000,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	70.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	502.687.697,00	0,00	0,00	0,00
		470.260.527,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.975.296.857,00	257.600.000,00	0,00	0,00
		3.268.945.211,00	256.685.400,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	197.834.107,00	26.291.000,00	0,00	0,00
		195.615.595,00	26.200.000,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	36.844.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.844.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	19.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.360.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	137.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.883.850,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.293.881.713,00	56.000.000,00	0,00	0,00
		1.281.094.336,00	55.500.000,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.293.881.713,00	56.000.000,00	0,00	0,00
		1.281.094.336,00	55.500.000,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	608.485.005,00	0,00	0,00	0,00
		604.684.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.410.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	420.015.005,00	0,00	0,00	0,00
		416.274.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.108.743.970,00	0,00	0,00	0,00
		7.858.408.544,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.993.983.891,00	0,00	0,00	0,00
		6.824.171.320,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.831.871.931,00	0,00	0,00	0,00
		6.664.067.320,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	162.111.960,00	0,00	0,00	0,00
		160.104.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.114.760.079,00	0,00	0,00	0,00
		1.034.237.224,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.114.760.079,00	0,00	0,00	0,00
		1.034.237.224,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	259.109.299,00	0,00	0,00	0,00
		209.088.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.332.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	98.854.600,00	0,00	0,00	0,00
		116.332.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	98.854.600,00	0,00	0,00	0,00
		142.777.099,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	110.233.700,00	0,00	0,00	0,00
		142.777.099,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	110.233.700,00	0,00	0,00	0,00
		761.968.705,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	647.158.382,00	0,00	0,00	0,00
		104.166.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	97.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.166.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		399.496.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	316.303.882,00	0,00	0,00	0,00
		399.496.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	316.303.882,00	0,00	0,00	0,00
		258.305.905,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	233.604.500,00	0,00	0,00	0,00
		258.305.905,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	233.604.500,00	0,00	0,00	0,00
		17.284.976.745,00	85.509.925.920,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.987.049.735,00	82.475.294.035,00	0,00	0,00
		17.284.976.745,00	85.509.925.920,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.987.049.735,00	82.475.294.035,00	0,00	0,00
		4.069.864.751,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.994.158.503,00	0,00	0,00	0,00
		473.067.600,00	0,00	0,00	0,00
		459.451.865,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.745.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	166.317.600,00	0,00	0,00	0,00
		153.056.365,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	295.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		295.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.285.211.636,00	0,00	0,00	0,00
		3.241.426.795,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.272.088.197,00	0,00	0,00	0,00
		3.228.357.295,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.123.439,00	0,00	0,00	0,00
		13.069.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.414.306,00	0,00	0,00	0,00
		12.533.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.414.306,00	0,00	0,00	0,00
		12.533.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.075.162,00	0,00	0,00	0,00
		198.900.701,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.825.323,00	0,00	0,00	0,00
		21.375.323,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.704.379,00	0,00	0,00	0,00
		9.717.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.798.500,00	0,00	0,00	0,00
		6.798.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.296.960,00	0,00	0,00	0,00
		149.259.878,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.665.127,00	0,00	0,00	0,00
		64.664.722,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.045.127,00	0,00	0,00	0,00
		56.044.722,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.430.920,00	0,00	0,00	0,00
		17.180.920,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.112.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.112.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.318.920,00	0,00	0,00	0,00
		8.068.920,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.574.185.959,00	3.750.019.840,00	0,00	0,00
		3.511.888.944,00	3.735.710.140,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.727.967.761,00	2.145.447.900,00	0,00	0,00
		2.693.298.939,00	2.131.350.300,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	394.168.900,00	0,00	0,00	0,00
		386.756.303,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	0,00	1.234.389.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.224.242.413,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0,00	911.058.900,00	0,00	0,00
		0,00	907.107.887,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.183.798.861,00	0,00	0,00	0,00
		2.158.385.436,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.157.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	846.218.198,00	1.604.571.940,00	0,00	0,00
		818.590.005,00	1.604.359.840,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	446.218.198,00	0,00	0,00	0,00
		418.940.005,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	1.604.571.940,00	0,00	0,00
		0,00	1.604.359.840,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		399.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.012.631.812,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		878.810.437,00	55.204.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.012.631.812,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		878.810.437,00	55.204.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.749.825,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.1-03.1-04.2-10.01.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	45.389.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.916.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	492.631.812,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		443.434.541,00	9.815.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		249.709.321,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.497.563.642,00	0,00	0,00	0,00
		3.287.310.594,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.497.563.642,00	0,00	0,00	0,00
		3.287.310.594,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	276.066.535,00	0,00	0,00	0,00
		225.294.698,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.093.499.765,00	0,00	0,00	0,00
		2.982.226.896,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	127.997.342,00	0,00	0,00	0,00
		79.789.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	348.222.000,00	3.678.778.000,00	0,00	0,00
		346.765.425,00	3.642.678.275,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	348.222.000,00	3.678.778.000,00	0,00	0,00
		346.765.425,00	3.642.678.275,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	893.438.000,00	0,00	0,00
		0,00	891.957.400,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	157.088.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.590.930,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0,00	2.678.340.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.648.342.300,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	121.134.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00
		120.274.495,00	102.378.575,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	75.600.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		23.375.000,00	14.940.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	75.600.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		23.375.000,00	14.940.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.1-03.1-04.2-10.01.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	75.600.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	23.375.000,00	14.940.000,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	217.790.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	0,00	217.790.000,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	217.790.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.717.504.955,00	77.788.128.080,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.268.834.377,00	74.808.971.620,00	0,00	0,00
		3.717.504.955,00	77.788.128.080,00	0,00	0,00
		3.268.834.377,00	74.808.971.620,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.213.550.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.183.464.704,00	0,00	0,00	0,00
		625.060.203,00	0,00	0,00	0,00
		599.586.813,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	778.729.243,00	68.618.798.400,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	487.682.413,00	65.892.029.496,00	0,00	0,00
		478.380.157,00	153.108.294,00	0,00	0,00
		478.003.931,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	50.800.000,00	6.734.621.386,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	12.800.000,00	6.640.052.711,00	0,00	0,00
		25.700.000,00	1.861.600.000,00	0,00	0,00
		3.850.000,00	1.857.507.322,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	50.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	49.792.735,00	199.470.941,00	0,00	0,00
		495.285.352,00	0,00	0,00	0,00
		453.653.781,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.10.2.01.26	Pembangunan Jembatan Gantung	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	219.911.150,00	0,00	0,00
		889.403.626,00	0,00	0,00	0,00
		675.906.455,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	779.045.626,00	0,00	0,00	0,00
		587.164.110,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.1-03.1-04.2-10.01.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	779.045.626,00	0,00	0,00	0,00
		587.164.110,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	110.358.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.742.345,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.1-04.2-10.01.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	110.358.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.742.345,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.319.173.367,00	32.350.000,00	0,00	0,00
		4.240.378.298,00	32.350.000,00	0,00	0,00
1.04.1-03.1-04.2-10.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-03.1-04.2-10.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-03.1-04.2-10.01.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-03.1-04.2-10.01.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan	4.222.173.367,00	32.350.000,00	0,00	0,00
		4.211.198.298,00	32.350.000,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.088.494.367,00	0,00	0,00	0,00
		4.079.400.218,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.418.455.119,00	0,00	0,00	0,00
		3.418.455.118,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.418.455.119,00	0,00	0,00	0,00
		3.418.455.118,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.674.545,00	0,00	0,00	0,00
		117.792.045,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.674.545,00	0,00	0,00	0,00
		117.792.045,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.364.703,00	0,00	0,00	0,00
		543.153.055,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	489.188.372,00	0,00	0,00	0,00
		483.675.857,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.176.331,00	0,00	0,00	0,00
		59.477.198,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	93.679.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.948.080,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.1-04.2-15.2-10.01.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	82.039.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	80.398.080,00	0,00	0,00	0,00
		82.039.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	80.398.080,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	39.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	39.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	39.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.350.000,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	0,00	32.350.000,00	0,00	0,00
		0,00	32.350.000,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	0,00	32.350.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.2-15.2-10.01.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.350.000,00	0,00	0,00
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	32.350.000,00	0,00	0,00
		10.198.551.995,00	54.500.000,00	0,00	0,00
		9.620.290.021,00	54.440.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	7.003.838.899,00	23.500.000,00	0,00	0,00
		6.529.148.651,00	23.500.000,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.453.494.995,00	23.500.000,00	0,00	0,00
		6.384.571.150,00	23.500.000,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.769.381.967,00	0,00	0,00	0,00
		3.683.340.335,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.769.381.967,00	0,00	0,00	0,00
		3.683.340.335,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.940.344,00	23.500.000,00	0,00	0,00
		336.600.351,00	23.500.000,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.238.344,00	23.500.000,00	0,00	0,00
		160.207.230,00	23.500.000,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.702.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.393.121,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.288.414.684,00	0,00	0,00	0,00
		2.304.130.464,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.826.684,00	0,00	0,00	0,00
		3.556.934,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.282.588.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.300.573.530,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.758.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.748.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.758.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.752.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	495.343.904,00	0,00	0,00	0,00
		89.607.501,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	467.599.904,00	0,00	0,00	0,00
		62.390.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.920.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	404.999.904,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.470.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7.744.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.217.501,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	7.744.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.217.501,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.970.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.970.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.985.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.985.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.194.713.096,00	31.000.000,00	0,00	0,00
		3.091.141.370,00	30.940.000,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.940.707.746,00	0,00	0,00	0,00
		2.840.951.635,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.808.710,00	0,00	0,00	0,00
		56.802.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.399.710,00	0,00	0,00	0,00
		11.452.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.109.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.498.374.007,00	0,00	0,00	0,00
		2.433.440.491,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.498.374.007,00	0,00	0,00	0,00
		2.433.440.491,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.764.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.764.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.495.172,00	0,00	0,00	0,00
		175.118.947,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.576.172,00	0,00	0,00	0,00
		44.230.047,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.919.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.888.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.941.107,00	0,00	0,00	0,00
		80.064.297,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.916.485,00	0,00	0,00	0,00
		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.199.622,00	0,00	0,00	0,00
		26.439.297,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.325.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.324.750,00	0,00	0,00	0,00
		28.805.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.397.350,00	0,00	0,00	0,00
		13.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.927.400,00	0,00	0,00	0,00
		5.355.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	254.005.350,00	31.000.000,00	0,00	0,00
		250.189.735,00	30.940.000,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	164.699.292,00	0,00	0,00	0,00
		163.749.160,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	164.699.292,00	0,00	0,00	0,00
		163.749.160,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80.306.058,00	0,00	0,00	0,00
		77.440.575,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	31.111.058,00	0,00	0,00	0,00
		30.228.575,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	49.195.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.212.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
		9.000.000,00	30.940.000,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	9.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
		9.000.000,00	30.940.000,00	0,00	0,00
1.06	SOSIAL	4.412.971.339,00	23.500.000,00	0,00	0,00
		4.243.513.524,00	22.999.480,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.412.971.339,00	23.500.000,00	0,00	0,00
		4.243.513.524,00	22.999.480,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.388.282.919,00	21.000.000,00	0,00	0,00
		3.272.685.168,00	20.499.480,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.724.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.493.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.739.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.774.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.754.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.804.212.046,00	0,00	0,00	0,00
		2.726.784.680,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.804.212.046,00	0,00	0,00	0,00
		2.726.784.680,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.990.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.990.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.666.281,00	0,00	0,00	0,00
		137.814.756,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.223.281,00	0,00	0,00	0,00
		52.402.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.443.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.412.256,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.499.480,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.499.480,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.036.192,00	0,00	0,00	0,00
		303.962.072,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.326.192,00	0,00	0,00	0,00
		23.252.072,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		280.710.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.944.400,00	0,00	0,00	0,00
		28.640.660,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.584.400,00	0,00	0,00	0,00
		26.690.660,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	208.839.800,00	0,00	0,00	0,00
		185.181.850,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	101.003.400,00	0,00	0,00	0,00
		100.131.850,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	85.003.400,00	0,00	0,00	0,00
		84.301.850,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	107.836.400,00	0,00	0,00	0,00
		85.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	107.836.400,00	0,00	0,00	0,00
		85.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	431.393.470,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		404.464.756,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	431.393.470,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		404.464.756,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	10.006.750,00	0,00	0,00	0,00
		9.882.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.795.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.810.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	369.581.720,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		358.872.756,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.670.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.790.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.440.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	343.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		343.316.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	343.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		343.316.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	237.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.360.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.856.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	40.880.150,00	0,00	0,00	0,00
		37.865.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	40.880.150,00	0,00	0,00	0,00
		37.865.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	40.880.150,00	0,00	0,00	0,00
		37.865.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-13.0-00.01.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37.161.199.361,00	1.133.533.000,00	0,00	0,00
		34.186.536.767,00	1.196.857.975,00	0,00	0,00
2.07	TENAGA KERJA	469.908.255,00	0,00	0,00	0,00
		464.230.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	469.908.255,00	0,00	0,00	0,00
		464.230.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	149.910.255,00	0,00	0,00	0,00
		145.250.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	149.910.255,00	0,00	0,00	0,00
		145.250.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	149.910.255,00	0,00	0,00	0,00
		145.250.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		289.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		289.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		289.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	29.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.980.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.3-32.2-07.0-00.01.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.3-32.2-07.0-00.01.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	29.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	480.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		380.368.855,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	480.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		380.368.855,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	41.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	21.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	121.294.250,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.127.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.960.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.660.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58.036.250,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.602.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.036.250,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.865.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.298.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.865.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.2-14.2-08.0-00.01.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	317.505.750,00	0,00	0,00	0,00
		254.291.855,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.715.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	83.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.715.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.467.750,00	0,00	0,00	0,00
		140.711.855,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	196.467.750,00	0,00	0,00	0,00
		140.711.855,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.865.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2-14.2-08.0-00.01.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.865.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PANGAN	1.702.478.168,00	0,00	0,00	0,00
		1.694.364.708,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01	Dinas Pangan	1.688.495.208,00	0,00	0,00	0,00
		1.687.782.708,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.550.886.208,00	0,00	0,00	0,00
		1.550.173.708,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.765.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.765.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.314.232.370,00	0,00	0,00	0,00
		1.314.232.370,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.294.172.370,00	0,00	0,00	0,00
		1.294.172.370,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.060.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.620.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.620.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.472.975,00	0,00	0,00	0,00
		41.472.975,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.899.775,00	0,00	0,00	0,00
		9.899.775,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.573.200,00	0,00	0,00	0,00
		31.573.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.211.627,00	0,00	0,00	0,00
		150.499.127,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.663.452,00	0,00	0,00	0,00
		1.663.452,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.425.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.425.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.123.175,00	0,00	0,00	0,00
		144.410.675,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.584.236,00	0,00	0,00	0,00
		7.584.236,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.584.236,00	0,00	0,00	0,00
		7.584.236,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	72.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.580.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	72.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.580.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.232.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	70.348.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.348.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.050.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	23.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	24.739.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.739.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	24.739.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.739.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	24.739.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.739.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.3-27.2-09.0-00.01	Dinas Pertanian	13.982.960,00	0,00	0,00	0,00
		6.582.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.3-27.2-09.0-00.01.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	13.982.960,00	0,00	0,00	0,00
		6.582.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.3-27.2-09.0-00.01.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	13.982.960,00	0,00	0,00	0,00
		6.582.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.3-27.2-09.0-00.01.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.982.960,00	0,00	0,00	0,00
		6.582.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10	PERTANAHAN	51.492.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.680.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.10.1-03.1-04.2-10.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.746.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-03.1-04.2-10.01.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.246.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-03.1-04.2-10.01.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.246.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-03.1-04.2-10.01.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.246.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-03.1-04.2-10.01.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-03.1-04.2-10.01.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-03.1-04.2-10.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan	30.746.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.740.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	4.136.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.136.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.136.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	26.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.610.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.610.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.610.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.10.1-04.2-15.2-10.01.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1-04.2-15.2-10.01.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	5.760.635.910,00	0,00	0,00	0,00
		5.434.726.373,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perhubungan	5.760.635.910,00	0,00	0,00	0,00
		5.434.726.373,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.854.666.854,00	0,00	0,00	0,00
		3.635.979.293,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.989.048.679,00	0,00	0,00	0,00
		2.783.399.995,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.989.048.679,00	0,00	0,00	0,00
		2.783.399.995,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.618.175,00	0,00	0,00	0,00
		852.579.298,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	865.618.175,00	0,00	0,00	0,00
		852.579.298,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.159.530.056,00	0,00	0,00	0,00
		1.070.868.080,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.159.530.056,00	0,00	0,00	0,00
		1.070.868.080,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.2-11.0-00.2-15.01.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.159.530.056,00	0,00	0,00	0,00
		1.070.868.080,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	726.439.000,00	0,00	0,00	0,00
		707.879.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.11.2.01	Pengelolaan Sampah	726.439.000,00	0,00	0,00	0,00
		707.879.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	726.439.000,00	0,00	0,00	0,00
		707.879.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2-11.0-00.2-15.01.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.464.766.365,00	163.012.000,00	0,00	0,00
		3.397.816.554,00	162.731.500,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.464.766.365,00	163.012.000,00	0,00	0,00
		3.397.816.554,00	162.731.500,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.774.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.774.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.774.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.212.709.690,00	0,00	0,00	0,00
		3.142.010.554,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.657.909.441,00	0,00	0,00	0,00
		2.594.468.252,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.657.909.441,00	0,00	0,00	0,00
		2.594.468.252,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.928.467,00	0,00	0,00	0,00
		280.240.073,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.248.467,00	0,00	0,00	0,00
		103.745.930,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.494.143,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.729.982,00	0,00	0,00	0,00
		222.240.229,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.669.980,00	0,00	0,00	0,00
		32.180.227,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.127.370,00	0,00	0,00	0,00
		168.127.370,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.932.632,00	0,00	0,00	0,00
		18.932.632,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.141.800,00	0,00	0,00	0,00
		45.062.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.391.800,00	0,00	0,00	0,00
		39.312.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	215.124.675,00	163.012.000,00	0,00	0,00
		215.122.500,00	162.731.500,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	215.124.675,00	163.012.000,00	0,00	0,00
		215.122.500,00	162.731.500,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	215.124.675,00	163.012.000,00	0,00	0,00
		215.122.500,00	162.731.500,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	36.932.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.909.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.932.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.909.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.932.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.909.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	252.622.789,00	0,00	0,00	0,00
		229.751.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	252.622.789,00	0,00	0,00	0,00
		229.751.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.1-06.2-13.0-00.01.02	PROGRAM PENATAAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	83.370.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	82.610.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	83.370.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	82.610.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	169.252.789,00	0,00	0,00	0,00
		147.141.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	169.252.789,00	0,00	0,00	0,00
		147.141.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.956.400,00	0,00	0,00	0,00
		40.760.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1-06.2-13.0-00.01.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	128.296.389,00	0,00	0,00	0,00
		106.381.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.726.496.072,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.225.821.868,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.726.496.072,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01		5.225.821.868,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.574.792.349,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.407.115.768,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.942.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.206.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.894.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.224.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.048.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	79.982.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.251.658,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.163.564,00	0,00	0,00	0,00
		12.191.658,00	0,00	0,00	0,00
		6.171.650,00	0,00	0,00	0,00
		62.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.991.914,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.961.805,00	0,00	0,00	0,00
		158.728.600,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.844.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.943.600,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.142.305,00	0,00	0,00	0,00
		18.810.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.975.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.975.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.106.313,00	0,00	0,00	0,00
		92.678.605,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.915.097,00	0,00	0,00	0,00
		42.589.907,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.191.216,00	0,00	0,00	0,00
		30.138.698,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	813.414.024,00	0,00	0,00	0,00
		631.165.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	125.064.024,00	0,00	0,00	0,00
		54.210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	45.064.024,00	0,00	0,00	0,00
		32.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.220.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	688.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		576.955.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	342.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		235.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	133.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.655.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	164.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		164.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.442.889.699,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.628.400,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	337.838.789,00	0,00	0,00	0,00
		311.092.900,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	19.409.589,00	0,00	0,00	0,00
		13.138.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.940.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		119.949.400,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	91.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.499.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.670.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	22.829.200,00	0,00	0,00	0,00
		19.896.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	282.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		277.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	151.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	82.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	514.450.910,00	0,00	0,00	0,00
		453.885.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	365.187.000,00	0,00	0,00	0,00
		311.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	38.127.910,00	0,00	0,00	0,00
		35.592.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.080.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	70.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.913.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	308.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		278.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	895.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		866.912.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	815.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		805.887.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		352.440.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	455.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		453.447.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2-14.2-08.0-00.01.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PERHUBUNGAN	185.523.650,00	48.446.000,00	0,00	0,00
2.15.1-04.2-15.2-10.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan	107.654.709,00	48.446.000,00	0,00	0,00
2.15.1-04.2-15.2-10.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	55.005.209,00	48.446.000,00	0,00	0,00
2.15.1-04.2-15.2-10.01.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	55.005.209,00	48.446.000,00	0,00	0,00
2.15.1-04.2-15.2-10.01.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.1-04.2-15.2-10.01.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.1-04.2-15.2-10.01.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.005.209,00	48.446.000,00	0,00	0,00
2.15.1-04.2-15.2-10.01.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.005.209,00	0,00	0,00	0,00
2.15.1-04.2-15.2-10.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	48.446.000,00	0,00	0,00
2.15.1-04.2-15.2-10.01.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	48.446.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.1-04.2-15.2-10.01.03.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2-11.0-00.2-15.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perhubungan	130.518.441,00	0,00	0,00	0,00
		52.649.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2-11.0-00.2-15.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	130.518.441,00	0,00	0,00	0,00
		52.649.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2-11.0-00.2-15.01.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	130.518.441,00	0,00	0,00	0,00
		52.649.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2-11.0-00.2-15.01.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	58.518.441,00	0,00	0,00	0,00
		52.649.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2-11.0-00.2-15.01.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	3.498.562.709,00	0,00	0,00	0,00
		3.328.897.671,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.498.562.709,00	0,00	0,00	0,00
		3.328.897.671,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.583.702.117,00	0,00	0,00	0,00
		2.453.529.079,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.596.970,00	0,00	0,00	0,00
		67.031.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.178.970,00	0,00	0,00	0,00
		11.821.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.418.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.950.140.786,00	0,00	0,00	0,00
		1.849.188.903,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.950.140.786,00	0,00	0,00	0,00
		1.849.188.903,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	432.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	432.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.884.522,00	0,00	0,00	0,00
		148.736.543,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.620.522,00	0,00	0,00	0,00
		4.933.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.264.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.803.043,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.334.940,00	0,00	0,00	0,00
		269.938.075,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.585.470,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.655.216,00	0,00	0,00	0,00
		17.867.075,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.089.254,00	0,00	0,00	0,00
		66.566.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.005.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.005.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.311.999,00	0,00	0,00	0,00
		118.634.558,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.311.999,00	0,00	0,00	0,00
		103.831.558,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.803.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	497.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		458.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	497.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		458.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	484.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		449.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	417.110.592,00	0,00	0,00	0,00
		416.818.592,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	376.760.592,00	0,00	0,00	0,00
		376.760.592,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	376.760.592,00	0,00	0,00	0,00
		376.760.592,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.058.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	40.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.058.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.742.471.233,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		4.273.231.068,00	13.876.120,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.2-17.3-30.3-31.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.742.471.233,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		4.273.231.068,00	13.876.120,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.078.942.233,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		3.956.777.568,00	13.876.120,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.714.816,00	0,00	0,00	0,00
		62.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.714.816,00	0,00	0,00	0,00
		62.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.314.324.830,00	0,00	0,00	0,00
		3.213.837.764,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.314.324.830,00	0,00	0,00	0,00
		3.213.837.764,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.090.975,00	0,00	0,00	0,00
		116.316.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.723.975,00	0,00	0,00	0,00
		5.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.367.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.336.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.811.612,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		564.053.804,00	13.876.120,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	584.811.612,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		564.053.804,00	13.876.120,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.2-17.3-30.3-31.01.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.2-17.3-30.3-31.01.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	0,00	0,00	0,00
		663.529.000,00	0,00	0,00	0,00
		316.453.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	663.529.000,00	0,00	0,00	0,00
		316.453.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	663.529.000,00	0,00	0,00	0,00
		316.453.500,00	0,00	0,00	0,00
		316.453.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.3-31.01.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.322.059.523,00	146.000.000,00	0,00	0,00
		3.162.531.323,00	144.551.500,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral	3.322.059.523,00	146.000.000,00	0,00	0,00
		3.162.531.323,00	144.551.500,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.816.268.123,00	96.000.000,00	0,00	0,00
		2.691.806.164,00	94.751.500,00	0,00	0,00
		2.678.910,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.066.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.678.910,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.066.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.363.767.377,00	0,00	0,00	0,00
		2.296.587.934,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.363.767.377,00	0,00	0,00	0,00
		2.296.587.934,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.694.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.694.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.694.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.694.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	61.000.000,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	59.751.500,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	61.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	59.751.500,00	0,00	0,00
		314.127.836,00	0,00	0,00	0,00
		284.458.130,00	0,00	0,00	0,00
		314.127.836,00	0,00	0,00	0,00
		284.458.130,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.2-18.3-29.0-00.01.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	34.491.400,00	0,00	0,00	0,00
		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	34.491.400,00	0,00	0,00	0,00
		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	34.491.400,00	0,00	0,00	0,00
		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	469.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		441.977.250,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	469.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		441.977.250,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.2-18.3-29.0-00.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	177.619.200,00	0,00	0,00	0,00
		173.702.950,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	291.880.800,00	0,00	0,00	0,00
		268.274.300,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.800.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		1.478.909,00	49.800.000,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		1.478.909,00	49.800.000,00	0,00	0,00
2.18.2-18.3-29.0-00.01.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.800.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		1.478.909,00	49.800.000,00	0,00	0,00
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.095.573.634,00	674.750.000,00	0,00	0,00
		3.172.426.827,00	743.037.855,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	834.815.408,00	330.539.125,00	0,00	0,00
		818.119.991,00	330.539.125,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	241.069.000,00	0,00	0,00	0,00
		240.919.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	241.069.000,00	0,00	0,00	0,00
		240.919.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	215.369.000,00	0,00	0,00	0,00
		215.219.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	25.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	281.388.413,00	231.618.885,00	0,00	0,00
		264.888.413,00	231.618.885,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	281.388.413,00	231.618.885,00	0,00	0,00
		264.888.413,00	231.618.885,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	85.727.484,00	0,00	0,00	0,00
		85.727.484,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.1-01.2-19.2-22.01.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	160.803.580,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	144.303.580,00	0,00	0,00	0,00
		34.857.349,00	231.618.885,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.857.349,00	231.618.885,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	312.357.995,00	98.920.240,00	0,00	0,00
		312.312.578,00	98.920.240,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	312.357.995,00	98.920.240,00	0,00	0,00
		312.312.578,00	98.920.240,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	0,00	98.920.240,00	0,00	0,00
		0,00	98.920.240,00	0,00	0,00
2.19.1-01.2-19.2-22.01.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	312.357.995,00	0,00	0,00	0,00
		312.312.578,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (old)	3.260.758.226,00	344.210.875,00	0,00	0,00
		2.354.306.836,00	412.498.730,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.136.809.424,00	0,00	0,00	0,00
		908.619.660,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.136.809.424,00	0,00	0,00	0,00
		908.619.660,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	458.609.624,00	0,00	0,00	0,00
		456.792.660,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	620.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		451.827.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	58.199.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.590.484.856,00	239.631.115,00	0,00	0,00
		1.126.011.176,00	308.078.047,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.3-26.2-22.2-19.01.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.590.484.856,00	239.631.115,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.126.011.176,00	308.078.047,00	0,00	0,00
		220.259.840,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	219.011.000,00	0,00	0,00	0,00
		427.332.365,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	366.621.525,00	0,00	0,00	0,00
		942.892.651,00	239.631.115,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	540.378.651,00	308.078.047,00	0,00	0,00
		533.463.946,00	104.579.760,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	319.676.000,00	104.420.683,00	0,00	0,00
		533.463.946,00	104.579.760,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	319.676.000,00	104.420.683,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	101.079.760,00	0,00	0,00
2.19.3-26.2-22.2-19.01.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	0,00	100.920.683,00	0,00	0,00
		383.463.946,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2.20	STATISTIK	319.676.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2-16.2-20.2-21.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	PERSANDIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.21.2-16.2-20.2-21.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1-01.2-19.2-22.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	358.312.485,00	58.000.000,00	0,00	0,00
2.22.1-01.2-19.2-22.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	335.655.700,00	57.040.000,00	0,00	0,00
2.22.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.272.585,00	58.000.000,00	0,00	0,00
2.22.1-01.2-19.2-22.01.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	223.616.000,00	57.040.000,00	0,00	0,00
2.22.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.272.585,00	58.000.000,00	0,00	0,00
2.22.1-01.2-19.2-22.01.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	223.616.000,00	57.040.000,00	0,00	0,00
2.22.3-26.2-22.2-19.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (old)	52.287.260,00	0,00	0,00	0,00
2.22.3-26.2-22.2-19.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	46.502.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.3-26.2-22.2-19.01.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	52.287.260,00	0,00	0,00	0,00
2.22.3-26.2-22.2-19.01.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	46.502.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.3-26.2-22.2-19.01.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	193.985.325,00	58.000.000,00	0,00	0,00
2.22.3-26.2-22.2-19.01.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	177.114.000,00	57.040.000,00	0,00	0,00
2.23	PERPUSTAKAAN	193.985.325,00	58.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	177.114.000,00	57.040.000,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.039.900,00	0,00	0,00	0,00
		112.039.700,00	0,00	0,00	0,00
		112.039.900,00	0,00	0,00	0,00
		112.039.700,00	0,00	0,00	0,00
		10.516.400,00	0,00	0,00	0,00
		10.516.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.516.400,00	0,00	0,00	0,00
		10.516.200,00	0,00	0,00	0,00
		101.523.500,00	0,00	0,00	0,00
		101.523.500,00	0,00	0,00	0,00
		101.523.500,00	0,00	0,00	0,00
		101.523.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.002.806.568,00	28.325.000,00	0,00	0,00
		2.900.760.811,00	27.175.000,00	0,00	0,00
		3.002.806.568,00	28.325.000,00	0,00	0,00
		2.900.760.811,00	27.175.000,00	0,00	0,00
		2.699.516.824,00	0,00	0,00	0,00
		2.603.308.865,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.301.644.069,00	0,00	0,00	0,00
		2.219.174.252,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.301.644.069,00	0,00	0,00	0,00
		2.219.174.252,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.963.213,00	0,00	0,00	0,00
		224.963.213,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.963.213,00	0,00	0,00	0,00
		224.963.213,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.909.542,00	0,00	0,00	0,00
		159.171.400,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.909.542,00	0,00	0,00	0,00
		93.171.400,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	240.107.394,00	27.325.000,00	0,00	0,00
		235.271.946,00	27.175.000,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.244.735,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		60.014.500,00	24.850.000,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	63.244.735,00	0,00	0,00	0,00
		60.014.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	24.850.000,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.862.659,00	2.325.000,00	0,00	0,00
		175.257.446,00	2.325.000,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	37.091.881,00	2.325.000,00	0,00	0,00
		36.766.446,00	2.325.000,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.770.778,00	0,00	0,00	0,00
		38.591.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	63.182.350,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		62.180.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	63.182.350,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		62.180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	63.182.350,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		62.180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.01.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	KEARSIPAN	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.619.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.619.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.619.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.619.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.619.000,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	37.474.725.470,00	4.290.251.120,00	0,00	0,00
		35.085.711.559,00	3.565.620.159,00	0,00	0,00
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.838.685.272,00	772.928.520,00	0,00	0,00
		12.510.782.999,00	627.433.185,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.838.685.272,00	772.928.520,00	0,00	0,00
		12.510.782.999,00	627.433.185,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.055.604.914,00	0,00	0,00	0,00
		3.804.922.435,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.659.800,00	0,00	0,00	0,00
		102.483.768,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	143.659.800,00	0,00	0,00	0,00
		102.483.768,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.049.392.124,00	0,00	0,00	0,00
		2.974.410.830,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.049.392.124,00	0,00	0,00	0,00
		2.974.410.830,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.037.708,00	0,00	0,00	0,00
		241.671.212,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.493.708,00	0,00	0,00	0,00
		23.749.372,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.544.000,00	0,00	0,00	0,00
		217.921.840,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.032.682,00	0,00	0,00	0,00
		409.695.905,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.544.920,00	0,00	0,00	0,00
		5.995.425,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.344.843,00	0,00	0,00	0,00
		81.286.480,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.982.919,00	0,00	0,00	0,00
		65.704.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		256.710.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.482.600,00	0,00	0,00	0,00
		22.660.720,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.482.600,00	0,00	0,00	0,00
		22.660.720,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.462.858.015,00	772.928.520,00	0,00	0,00
		3.748.750.900,00	627.433.185,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.745.689.035,00	772.928.520,00	0,00	0,00
		3.217.786.250,00	627.433.185,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.779.244.555,00	0,00	0,00	0,00
		1.506.244.555,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.966.444.480,00	772.928.520,00	0,00	0,00
		1.711.541.695,00	627.433.185,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	717.168.980,00	0,00	0,00	0,00
		530.964.650,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	717.168.980,00	0,00	0,00	0,00
		530.964.650,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.382.307.355,00	0,00	0,00	0,00
		3.346.516.418,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	52.442.980,00	0,00	0,00	0,00
		52.436.480,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	52.442.980,00	0,00	0,00	0,00
		52.436.480,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.329.864.375,00	0,00	0,00	0,00
		3.294.079.938,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	254.864.375,00	0,00	0,00	0,00
		254.864.372,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.075.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.039.215.566,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.937.914.988,00	0,00	0,00	0,00
		1.610.593.246,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.937.914.988,00	0,00	0,00	0,00
		1.610.593.246,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.937.914.988,00	0,00	0,00	0,00
		1.610.593.246,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26	PARIWISATA	4.010.831.377,00	9.000.000,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (old)	3.717.085.757,00	8.800.000,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.010.831.377,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		3.717.085.757,00	8.800.000,00	0,00	0,00
		3.391.185.720,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		3.131.765.994,00	8.800.000,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.358.600,00	0,00	0,00	0,00
		42.474.800,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.700.400,00	0,00	0,00	0,00
		12.968.800,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.506.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.509.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.791.040.405,00	0,00	0,00	0,00
		2.615.553.333,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.772.934.405,00	0,00	0,00	0,00
		2.610.433.333,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.106.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.878.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.778.600,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5.878.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.778.600,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.944.239,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		150.495.345,00	8.800.000,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.600.239,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		50.775.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.344.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.720.345,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.190.836,00	0,00	0,00	0,00
		284.557.041,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.046.486,00	0,00	0,00	0,00
		1.269.486,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.893.350,00	0,00	0,00	0,00
		12.653.055,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.348.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.824.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.903.000,00	0,00	0,00	0,00
		259.810.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.773.640,00	0,00	0,00	0,00
		33.906.875,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.963.640,00	0,00	0,00	0,00
		19.506.875,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	590.905.657,00	0,00	0,00	0,00
		566.621.363,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	590.905.657,00	0,00	0,00	0,00
		566.621.363,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	590.905.657,00	0,00	0,00	0,00
		566.621.363,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.698.400,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.3-26.2-22.2-19.01.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	13.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.698.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3-26.2-22.2-19.01.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	13.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.698.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PERTANIAN	16.432.474.286,00	3.506.172.600,00	0,00	0,00
		15.744.203.963,00	2.929.386.974,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01	Dinas Pertanian	16.432.474.286,00	3.506.172.600,00	0,00	0,00
		15.744.203.963,00	2.929.386.974,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.708.289.028,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		9.574.415.444,00	34.800.000,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.247.417,00	0,00	0,00	0,00
		46.138.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.643.417,00	0,00	0,00	0,00
		22.534.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.604.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.604.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.738.883.357,00	0,00	0,00	0,00
		8.647.027.136,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.738.883.357,00	0,00	0,00	0,00
		8.647.027.136,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.657.751,00	0,00	0,00	0,00
		3.213.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.657.751,00	0,00	0,00	0,00
		3.213.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.896.600,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		112.214.255,00	34.800.000,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.928.600,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		15.735.855,00	34.800.000,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.968.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.478.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.083.903,00	0,00	0,00	0,00
		745.831.916,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.583.903,00	0,00	0,00	0,00
		27.422.605,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.275.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.754.311,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.860.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	569.725.000,00	0,00	0,00	0,00
		568.795.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.991.137,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.191.137,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.094.981.616,00	0,00	0,00	0,00
		1.813.938.154,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.092.555.000,00	0,00	0,00	0,00
		815.355.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	730.105.000,00	0,00	0,00	0,00
		725.355.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	362.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	969.641.999,00	0,00	0,00	0,00
		966.542.580,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	969.641.999,00	0,00	0,00	0,00
		966.542.580,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.227.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.066.774,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	30.227.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.066.774,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.557.617,00	0,00	0,00	0,00
		1.973.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.557.617,00	0,00	0,00	0,00
		1.973.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	992.263.000,00	663.641.000,00	0,00	0,00
		913.450.000,00	621.875.000,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	992.263.000,00	663.641.000,00	0,00	0,00
		913.450.000,00	621.875.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.3-27.2-09.0-00.01.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	964.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		885.950.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	625.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	621.875.000,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	27.513.000,00	38.641.000,00	0,00	0,00
		27.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	148.043.400,00	2.531.600,00	0,00	0,00
		37.905.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	148.043.400,00	2.531.600,00	0,00	0,00
		37.905.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	148.043.400,00	2.531.600,00	0,00	0,00
		37.905.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	33.775.223,00	0,00	0,00	0,00
		27.902.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	33.775.223,00	0,00	0,00	0,00
		27.902.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	33.775.223,00	0,00	0,00	0,00
		27.902.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.455.122.019,00	2.805.000.000,00	0,00	0,00
		3.376.592.965,00	2.272.711.974,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.455.122.019,00	2.805.000.000,00	0,00	0,00
		3.376.592.965,00	2.272.711.974,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	138.711.490,00	0,00	0,00	0,00
		130.647.785,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	60.074.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.725.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	35.950.000,00	2.805.000.000,00	0,00	0,00
		35.590.000,00	2.272.711.974,00	0,00	0,00
3.27.3-27.2-09.0-00.01.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3.220.386.529,00	0,00	0,00	0,00
		3.165.630.180,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PERDAGANGAN	124.385.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
		123.134.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.2-17.3-30.3-31.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	124.385.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
		123.134.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	55.165.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.775.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	55.165.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.775.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	55.165.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.775.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.2-17.3-30.3-31.01.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	69.220.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
		68.359.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	69.220.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
		68.359.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	69.220.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
		68.359.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2-17.3-30.3-31.01.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PERINDUSTRIAN	60.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.488.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	60.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.488.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	60.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.488.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	60.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.488.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	33.037.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.075.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	27.413.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.413.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.2-17.3-30.3-31.01.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2-17.3-30.3-31.01.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	TRANSMIGRASI	3.007.899.535,00	0,00	0,00	0,00
		2.931.016.340,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.007.899.535,00	0,00	0,00	0,00
		2.931.016.340,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.908.909.935,00	0,00	0,00	0,00
		2.833.352.340,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.434.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.214.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.434.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.214.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.301.396.134,00	0,00	0,00	0,00
		2.231.444.260,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.301.396.134,00	0,00	0,00	0,00
		2.231.444.260,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.126.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.110.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.126.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.176.000,00	0,00	0,00	0,00
		119.979.748,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.176.000,00	0,00	0,00	0,00
		119.979.748,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.777.801,00	0,00	0,00	0,00
		423.604.332,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	428.777.801,00	0,00	0,00	0,00
		423.604.332,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.097.600,00	0,00	0,00	0,00
		48.622.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.097.600,00	0,00	0,00	0,00
		48.622.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.097.600,00	0,00	0,00	0,00
		48.622.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.892.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.042.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	49.892.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.042.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	39.278.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.478.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.3-32.2-07.0-00.01.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	10.614.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.564.000,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	47.191.027.761,00	468.540.000,00	0,00	0,00
		43.095.428.931,00	457.661.000,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	21.891.897.361,00	251.540.000,00	0,00	0,00
		19.720.063.245,00	243.489.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	21.891.897.361,00	251.540.000,00	0,00	0,00
		19.720.063.245,00	243.489.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.602.798.906,00	142.540.000,00	0,00	0,00
		15.845.110.545,00	141.505.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.887.829.387,00	0,00	0,00	0,00
		9.563.636.730,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.887.829.387,00	0,00	0,00	0,00
		9.563.636.730,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.657.050,00	0,00	0,00	0,00
		425.142.620,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	528.247.800,00	0,00	0,00	0,00
		417.739.120,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.409.250,00	0,00	0,00	0,00
		7.403.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.757.697.180,00	21.085.000,00	0,00	0,00
		2.259.261.303,00	21.050.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.757.697.180,00	21.085.000,00	0,00	0,00
		2.259.261.303,00	21.050.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.208.158.467,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		2.727.240.566,00	3.500.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	330.200.054,00	0,00	0,00	0,00
		282.919.992,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.877.958.413,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		2.444.320.574,00	3.500.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.836.186,00	44.200.000,00	0,00	0,00
		3.835.500,00	44.200.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.836.186,00	44.200.000,00	0,00	0,00
		3.835.500,00	44.200.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13	Penataan Organisasi	755.343.170,00	52.755.000,00	0,00	0,00
		418.430.553,00	52.755.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	144.264.800,00	17.585.000,00	0,00	0,00
		110.414.400,00	17.585.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	257.437.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.870.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	228.391.370,00	17.585.000,00	0,00	0,00
		42.129.863,00	17.585.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	18.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.290.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	107.060.000,00	17.585.000,00	0,00	0,00
		79.726.190,00	17.585.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	454.277.466,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		447.563.273,00	20.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	163.149.491,00	0,00	0,00	0,00
		161.997.683,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	152.829.775,00	0,00	0,00	0,00
		147.596.990,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	138.298.200,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		137.968.600,00	20.000.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.689.159.218,00	36.000.000,00	0,00	0,00
		2.513.314.876,00	36.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	451.525.553,00	0,00	0,00	0,00
		416.997.341,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	109.848.758,00	0,00	0,00	0,00
		89.959.766,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	101.685.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.769.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	239.991.795,00	0,00	0,00	0,00
		239.268.575,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.570.444.415,00	0,00	0,00	0,00
		1.454.735.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.499.111.615,00	0,00	0,00	0,00
		1.454.735.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	70.666.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	666.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	633.319.250,00	36.000.000,00	0,00	0,00
		609.552.235,00	36.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	177.124.000,00	0,00	0,00	0,00
		177.040.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	388.852.975,00	0,00	0,00	0,00
		382.894.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	67.342.275,00	36.000.000,00	0,00	0,00
		49.617.735,00	36.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	33.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.030.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	33.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.030.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.599.939.237,00	73.000.000,00	0,00	0,00
		1.361.637.824,00	65.984.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	256.294.946,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		178.474.360,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	142.092.806,00	0,00	0,00	0,00
		130.224.360,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	43.339.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	70.862.340,00	0,00	0,00	0,00
		48.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	570.417.096,00	17.000.000,00	0,00	0,00
		415.432.394,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	191.298.901,00	0,00	0,00	0,00
		109.659.391,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	73.588.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.887.503,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	305.530.195,00	17.000.000,00	0,00	0,00
		251.885.500,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	730.149.195,00	41.000.000,00	0,00	0,00
		728.111.070,00	40.984.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	285.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		285.147.160,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	328.590.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00
		326.730.500,00	40.984.000,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	116.334.195,00	0,00	0,00	0,00
		116.233.410,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	43.078.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.620.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	21.133.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	18.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.520.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	25.299.130.400,00	217.000.000,00	0,00	0,00
		23.375.365.686,00	214.172.000,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	25.299.130.400,00	217.000.000,00	0,00	0,00
		23.375.365.686,00	214.172.000,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.729.062.481,00	217.000.000,00	0,00	0,00
		17.803.507.377,00	214.172.000,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.764.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.777.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.724.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.197.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		133.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.828.779.135,00	0,00	0,00	0,00
		2.785.729.311,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.828.779.135,00	0,00	0,00	0,00
		2.785.729.311,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.808.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.113.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.408.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.963.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.260.753,00	192.000.000,00	0,00	0,00
		222.577.107,00	190.092.000,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.260.753,00	192.000.000,00	0,00	0,00
		222.577.107,00	190.092.000,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	24.080.000,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	24.080.000,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.927.148.248,00	0,00	0,00	0,00
		1.801.442.391,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.997.248,00	0,00	0,00	0,00
		249.194.853,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.612.151.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.552.247.538,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.176.400,00	0,00	0,00	0,00
		543.670.905,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.091.600,00	0,00	0,00	0,00
		268.234.603,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.053.500,00	0,00	0,00	0,00
		179.231.302,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.031.300,00	0,00	0,00	0,00
		96.205.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.483.687.945,00	0,00	0,00	0,00
		10.962.465.439,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.483.687.945,00	0,00	0,00	0,00
		10.962.465.439,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.252.438.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.178.731.624,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	129.238.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.242.624,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.123.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.122.489.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.570.067.919,00	0,00	0,00	0,00
		5.571.858.309,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	203.194.440,00	0,00	0,00	0,00
		170.391.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	203.194.440,00	0,00	0,00	0,00
		170.391.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	470.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		420.765.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pembahasan APBD	470.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		420.765.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	169.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.850.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	169.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.850.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.261.623.132,00	0,00	0,00	0,00
		1.210.916.520,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	232.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		217.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	427.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		408.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	188.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	413.923.132,00	0,00	0,00	0,00
		397.816.520,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	357.899.347,00	0,00	0,00	0,00
		269.680.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	357.899.347,00	0,00	0,00	0,00
		269.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.107.192.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.421.255.789,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.107.192.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.421.255.789,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	37.370.497.913,00	1.208.687.700,00	612.255.000,00	118.684.446.195,00
		29.224.153.691,00	1.184.062.500,00	339.885.000,00	117.126.536.527,00
5.01	PERENCANAAN	4.740.725.963,00	21.500.000,00	0,00	0,00
		4.133.279.241,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA)	4.740.725.963,00	21.500.000,00	0,00	0,00
		4.133.279.241,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.741.928.833,00	21.500.000,00	0,00	0,00
		3.505.929.087,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.820.817,00	0,00	0,00	0,00
		120.190.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.399.772,00	0,00	0,00	0,00
		38.985.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.611.824,00	0,00	0,00	0,00
		38.834.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.809.221,00	0,00	0,00	0,00
		42.371.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.064.984.373,00	0,00	0,00	0,00
		2.947.949.278,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.024.049.963,00	0,00	0,00	0,00
		2.907.689.278,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.934.410,00	0,00	0,00	0,00
		40.260.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.710.280,00	0,00	0,00	0,00
		8.501.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27.710.280,00	0,00	0,00	0,00
		8.501.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.422.825,00	21.500.000,00	0,00	0,00
		60.453.500,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.938.825,00	21.500.000,00	0,00	0,00
		4.433.500,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.484.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.020.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.133.338,00	0,00	0,00	0,00
		325.082.019,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.980.468,00	0,00	0,00	0,00
		94.452.019,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.152.870,00	0,00	0,00	0,00
		230.630.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.857.200,00	0,00	0,00	0,00
		43.752.290,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.167.200,00	0,00	0,00	0,00
		22.115.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.636.790,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	473.797.130,00	0,00	0,00	0,00
		293.546.754,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	197.015.275,00	0,00	0,00	0,00
		126.432.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	16.434.840,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	21.565.506,00	0,00	0,00	0,00
		20.284.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	18.906.310,00	0,00	0,00	0,00
		14.923.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	34.084.687,00	0,00	0,00	0,00
		31.079.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.212.882,00	0,00	0,00	0,00
		2.155.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	101.811.050,00	0,00	0,00	0,00
		57.990.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	155.358.795,00	0,00	0,00	0,00
		125.046.754,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30.601.740,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	111.404.992,00	0,00	0,00	0,00
		104.056.754,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	13.352.063,00	0,00	0,00	0,00
		10.990.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.423.060,00	0,00	0,00	0,00
		42.068.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	98.690.105,00	0,00	0,00	0,00
		29.118.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	22.732.955,00	0,00	0,00	0,00
		12.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	525.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		333.803.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	203.863.052,00	0,00	0,00	0,00
		135.436.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.235.397,00	0,00	0,00	0,00
		10.178.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.485.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.095.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	66.669.692,00	0,00	0,00	0,00
		42.423.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10.658.197,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.170.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.992.228,00	0,00	0,00	0,00
		11.840.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.697.538,00	0,00	0,00	0,00
		4.619.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.485.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.111.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	71.136.948,00	0,00	0,00	0,00
		32.350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.163.355,00	0,00	0,00	0,00
		1.145.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.869.150,00	0,00	0,00	0,00
		8.020.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.131.400,00	0,00	0,00	0,00
		4.270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3.658.435,00	0,00	0,00	0,00
		2.480.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.520.704,00	0,00	0,00	0,00
		1.335.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.768.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.755.704,00	0,00	0,00	0,00
		3.710.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	9.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.540.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.016.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.292.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.419.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.760.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.082.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.958.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.502.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.472.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.530.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	27.188.868.057,00	624.187.700,00	612.255.000,00	118.684.446.195,00
		19.968.947.267,00	601.112.500,00	339.885.000,00	117.126.536.527,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	27.188.868.057,00	624.187.700,00	612.255.000,00	118.684.446.195,00
		19.968.947.267,00	601.112.500,00	339.885.000,00	117.126.536.527,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	72.534.933.400,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	72.534.933.400,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	72.534.933.400,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.434.138.202,00	614.187.700,00	0,00	0,00
		16.308.248.291,00	591.112.500,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	453.337.920,00	0,00	0,00	0,00
		430.757.595,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	286.252.320,00	0,00	0,00	0,00
		296.287.595,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.085.600,00	0,00	0,00	0,00
		134.470.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.869.302.383,00	0,00	0,00	0,00
		10.042.495.242,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.869.302.383,00	0,00	0,00	0,00
		10.042.495.242,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.374.725,00	21.000.000,00	0,00	0,00
		98.357.480,00	14.980.000,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	180.374.725,00	21.000.000,00	0,00	0,00
		98.357.480,00	14.980.000,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.720.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		383.470.380,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.200.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		81.190.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		302.280.380,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.400.000,00	385.237.700,00	0,00	0,00
		13.400.000,00	368.732.500,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.400.000,00	385.237.700,00	0,00	0,00
		13.400.000,00	368.732.500,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.353.398.174,00	0,00	0,00	0,00
		5.227.329.408,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.353.398.174,00	0,00	0,00	0,00
		5.227.329.408,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.605.000,00	197.950.000,00	0,00	0,00
		112.438.186,00	197.400.000,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.438.186,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.780.000,00	197.950.000,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	197.400.000,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.565.515.982,00	10.000.000,00	612.255.000,00	118.684.446.195,00
		2.227.120.435,00	10.000.000,00	339.885.000,00	44.591.603.127,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.729.935.475,00	0,00	0,00	0,00
		954.402.521,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	446.746.200,00	0,00	0,00	0,00
		161.937.558,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	374.581.945,00	0,00	0,00	0,00
		151.814.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	584.085.170,00	0,00	0,00	0,00
		390.635.670,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	324.522.160,00	0,00	0,00	0,00
		250.014.693,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	969.082.755,00	0,00	0,00	0,00
		693.021.655,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	335.811.180,00	0,00	0,00	0,00
		176.240.755,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	126.066.550,00	0,00	0,00	0,00
		100.589.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	109.952.685,00	0,00	0,00	0,00
		59.747.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	397.252.340,00	0,00	0,00	0,00
		356.444.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	866.497.752,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		579.696.259,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	280.039.802,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		228.543.320,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	203.420.630,00	0,00	0,00	0,00
		180.354.225,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	86.307.830,00	0,00	0,00	0,00
		9.589.955,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	90.571.490,00	0,00	0,00	0,00
		56.613.609,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.131.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.783.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	106.027.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.811.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	612.255.000,00	118.684.446.195,00
		0,00	0,00	339.885.000,00	44.591.603.127,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	117.138.420.100,00
		0,00	0,00	0,00	44.383.918.524,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	612.255.000,00	0,00
		0,00	0,00	339.885.000,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	1.546.026.095,00
		0,00	0,00	0,00	207.684.603,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	707.107.297,00	0,00	0,00	0,00
		543.652.866,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	707.107.297,00	0,00	0,00	0,00
		543.652.866,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	206.879.747,00	0,00	0,00	0,00
		157.706.174,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	99.924.160,00	0,00	0,00	0,00
		81.532.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	147.192.105,00	0,00	0,00	0,00
		99.206.877,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	103.745.595,00	0,00	0,00	0,00
		62.978.770,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	149.365.690,00	0,00	0,00	0,00
		142.229.045,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.482.106.576,00	0,00	0,00	0,00
		889.925.675,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.482.106.576,00	0,00	0,00	0,00
		889.925.675,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	348.049.429,00	0,00	0,00	0,00
		299.263.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	205.859.230,00	0,00	0,00	0,00
		113.772.575,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	302.677.350,00	0,00	0,00	0,00
		213.775.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	625.520.567,00	0,00	0,00	0,00
		263.114.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	3.566.850.934,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		3.324.245.832,00	12.950.000,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	3.566.850.934,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		3.324.245.832,00	12.950.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.295.353.011,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		3.112.963.506,00	12.950.000,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.276.704,00	0,00	0,00	0,00
		2.724.576.623,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.829.276.704,00	0,00	0,00	0,00
		2.724.576.623,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.897.572,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		174.593.367,00	12.950.000,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.924.572,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		34.881.475,00	12.950.000,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.570.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.993.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.141.892,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.008.735,00	0,00	0,00	0,00
		204.091.106,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.133.735,00	0,00	0,00	0,00
		70.216.106,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		133.875.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.702.410,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.802.410,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	271.497.923,00	0,00	0,00	0,00
		211.282.326,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	174.635.955,00	0,00	0,00	0,00
		147.108.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	156.649.811,00	0,00	0,00	0,00
		133.305.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	528.360,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.457.784,00	0,00	0,00	0,00
		13.802.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	46.406.648,00	0,00	0,00	0,00
		22.282.056,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	46.406.648,00	0,00	0,00	0,00
		22.282.056,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	29.198.821,00	0,00	0,00	0,00
		24.650.100,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	29.198.821,00	0,00	0,00	0,00
		24.650.100,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.256.499,00	0,00	0,00	0,00
		17.242.170,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8.866.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.434.792,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	12.390.499,00	0,00	0,00	0,00
		8.807.378,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.211.249.884,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.797.958,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	1.211.249.884,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.797.958,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.211.249.884,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.797.958,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.211.249.884,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.797.958,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5-03.5-04.0-00.01.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.211.249.884,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.797.958,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	662.803.075,00	550.000.000,00	0,00	0,00
		615.883.393,00	550.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA)	662.803.075,00	550.000.000,00	0,00	0,00
		615.883.393,00	550.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	662.803.075,00	550.000.000,00	0,00	0,00
		615.883.393,00	550.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	264.363.800,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		262.604.500,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	264.363.800,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		262.604.500,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	83.250.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
		82.107.400,00	225.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		49.431.900,00	150.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	33.250.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		32.675.500,00	75.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	96.674.275,00	225.000.000,00	0,00	0,00
		93.217.993,00	225.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	20.215.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		17.690.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	76.459.275,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		75.527.993,00	125.000.000,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	218.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		177.953.500,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	145.258.571,00	0,00	0,00	0,00
		142.029.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5-01.5-05.0-00.01.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	73.256.429,00	0,00	0,00	0,00
		35.924.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.766.706.703,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		5.624.408.138,00	20.000.000,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT	5.766.706.703,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		5.624.408.138,00	20.000.000,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat Daerah	5.766.706.703,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		5.624.408.138,00	20.000.000,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		823.355,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		823.355,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		823.355,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.351.168.998,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		4.268.452.383,00	20.000.000,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.275.622,00	0,00	0,00	0,00
		7.235.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.275.622,00	0,00	0,00	0,00
		7.235.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.560.779.663,00	0,00	0,00	0,00
		3.493.830.778,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.560.779.663,00	0,00	0,00	0,00
		3.493.830.778,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	222.450.370,00	0,00	0,00	0,00
		222.406.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.950.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	199.500.370,00	0,00	0,00	0,00
		199.456.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.538.555,00	0,00	0,00	0,00
		255.405.111,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.622.555,00	0,00	0,00	0,00
		46.500.035,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.916.000,00	0,00	0,00	0,00
		208.905.076,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.214.578,00	0,00	0,00	0,00
		247.407.914,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.710.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.626.243,00	0,00	0,00	0,00
		22.397.114,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.618.335,00	0,00	0,00	0,00
		47.290.800,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.010.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.910.210,00	0,00	0,00	0,00
		42.166.780,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.910.210,00	0,00	0,00	0,00
		18.458.110,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.708.670,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.157.856.705,00	0,00	0,00	0,00
		1.102.457.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.118.406.705,00	0,00	0,00	0,00
		1.064.657.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	164.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	294.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		253.725.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	200.017.095,00	0,00	0,00	0,00
		199.841.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	207.289.610,00	0,00	0,00	0,00
		207.191.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	126.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.600.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	95.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.090.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.210.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.800.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.800.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	257.681.000,00	0,00	0,00	0,00
		252.675.400,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	257.681.000,00	0,00	0,00	0,00
		252.675.400,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	219.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		214.250.400,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.775.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	16.850.140.023,00	465.650.000,00	0,00	0,00
		15.888.076.523,00	433.178.300,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	16.850.140.023,00	465.650.000,00	0,00	0,00
		15.888.076.523,00	433.178.300,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Paguyaman	2.999.334.052,00	182.000.000,00	0,00	0,00
		2.773.247.281,00	169.700.600,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.908.053.747,00	182.000.000,00	0,00	0,00
		2.719.306.281,00	169.700.600,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.493.466.433,00	0,00	0,00	0,00
		2.420.465.831,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.493.466.433,00	0,00	0,00	0,00
		2.420.465.831,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.107.914,00	0,00	0,00	0,00
		194.855.395,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.780.914,00	0,00	0,00	0,00
		27.295.481,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.327.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.559.914,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.694.204,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.974.204,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.070.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.829.400,00	182.000.000,00	0,00	0,00
		48.290.851,00	169.700.600,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.009.400,00	0,00	0,00	0,00
		21.215.851,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.670.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	19.980.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.150.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		27.075.000,00	149.720.600,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.185.150,00	0,00	0,00	0,00
		14.939.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.685.150,00	0,00	0,00	0,00
		14.939.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.685.150,00	0,00	0,00	0,00
		14.939.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.410.155,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.410.155,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.410.155,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.050.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.002.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	39.050.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	39.002.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.772.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Tilamuta	30.230.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.212.618.335,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.114.552.017,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.126.475.535,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.045.521.017,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.885.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.885.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.661.996.335,00	0,00	0,00	0,00
		1.654.063.044,00	0,00	0,00	0,00
		1.661.996.335,00	0,00	0,00	0,00
		1.654.063.044,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		356.435.425,00	0,00	0,00	0,00
		294.515.375,00	0,00	0,00	0,00
		191.455.425,00	0,00	0,00	0,00
		184.767.375,00	0,00	0,00	0,00
		164.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.203.848,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.328.848,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.875.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.095.775,00	0,00	0,00	0,00
		20.853.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.095.775,00	0,00	0,00	0,00
		20.853.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.522.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.272.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.272.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.132.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.215.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	21.132.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.215.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	21.132.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.215.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.054.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	45.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.054.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.814.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.240.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.240.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.240.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Mananggu	2.139.380.591,00	200.500.000,00	0,00	0,00
		2.061.439.105,00	199.377.700,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.083.102.053,00	200.500.000,00	0,00	0,00
		2.006.984.070,00	199.377.700,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.807.731.710,00	0,00	0,00	0,00
		1.771.264.123,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.795.238.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.762.820.913,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.493.210,00	0,00	0,00	0,00
		8.443.210,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.755.975,00	0,00	0,00	0,00
		4.953.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.255.975,00	0,00	0,00	0,00
		4.953.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.642.869,00	0,00	0,00	0,00
		146.148.369,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.962.869,00	0,00	0,00	0,00
		59.898.369,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.250.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	37.450.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	17.450.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.799.919,00	0,00	0,00	0,00
		66.419.928,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.149.919,00	0,00	0,00	0,00
		18.769.928,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.650.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.546.580,00	163.000.000,00	0,00	0,00
		18.198.650,00	161.927.700,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.367.100,00	0,00	0,00	0,00
		15.856.710,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.179.480,00	0,00	0,00	0,00
		2.341.940,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	163.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	161.927.700,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.137.903,00	0,00	0,00	0,00
		10.861.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.013.400,00	0,00	0,00	0,00
		8.013.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.013.400,00	0,00	0,00	0,00
		8.013.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.124.503,00	0,00	0,00	0,00
		2.848.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.124.503,00	0,00	0,00	0,00
		2.848.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.372.070,00	0,00	0,00	0,00
		1.985.070,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.372.070,00	0,00	0,00	0,00
		1.985.070,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.372.070,00	0,00	0,00	0,00
		1.985.070,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.830.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.830.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.830.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.830.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.830.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.830.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.965.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.965.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.965.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.965.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.965.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.965.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.973.265,00	0,00	0,00	0,00
		3.813.265,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.973.265,00	0,00	0,00	0,00
		3.813.265,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.973.265,00	0,00	0,00	0,00
		3.813.265,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Wonosari	2.377.813.705,00	39.050.000,00	0,00	0,00
		2.230.929.049,00	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.262.454.055,00	39.050.000,00	0,00	0,00
		2.136.671.049,00	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.695.069,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.900.869,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.144.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.854.921.990,00	0,00	0,00	0,00
		1.808.374.292,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.853.416.830,00	0,00	0,00	0,00
		1.808.374.292,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.505.160,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	774.306,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	774.306,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.541.300,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	921.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.628.124,00	0,00	0,00	0,00
		185.708.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.555.624,00	0,00	0,00	0,00
		11.111.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.072.500,00	0,00	0,00	0,00
		174.597.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	39.050.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	16.550.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.512.316,00	0,00	0,00	0,00
		83.152.407,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.562.316,00	0,00	0,00	0,00
		19.702.407,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.450.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.380.950,00	0,00	0,00	0,00
		54.936.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.254.950,00	0,00	0,00	0,00
		24.156.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.566.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.560.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.141.450,00	0,00	0,00	0,00
		14.470.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.841.450,00	0,00	0,00	0,00
		14.470.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.470.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	555.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.816.450,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.756.200,00	0,00	0,00	0,00
		19.198.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.416.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.416.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	14.339.800,00	0,00	0,00	0,00
		12.098.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12.299.800,00	0,00	0,00	0,00
		12.098.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.387.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.590.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65.387.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.590.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	9.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.350.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	52.954.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.240.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Dulupi	2.438.132.362,00	44.100.000,00	0,00	0,00
		2.353.036.491,00	44.100.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.311.594.562,00	44.100.000,00	0,00	0,00
		2.227.735.491,00	44.100.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.950.932.362,00	0,00	0,00	0,00
		1.894.428.108,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.950.932.362,00	0,00	0,00	0,00
		1.894.428.108,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.773.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.850.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.923.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.903.259,00	0,00	0,00	0,00
		240.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.423.259,00	0,00	0,00	0,00
		72.817.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.933.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	44.100.000,00	0,00	0,00
		0,00	44.100.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	24.100.000,00	0,00	0,00
		0,00	24.100.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.387.412,00	0,00	0,00	0,00
		48.634.229,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.487.412,00	0,00	0,00	0,00
		12.734.229,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.900.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.331.529,00	0,00	0,00	0,00
		29.885.154,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.441.529,00	0,00	0,00	0,00
		23.995.154,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.890.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.453.800,00	0,00	0,00	0,00
		41.975.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.171.400,00	0,00	0,00	0,00
		17.729.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.571.400,00	0,00	0,00	0,00
		4.143.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.586.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24.282.400,00	0,00	0,00	0,00
		24.246.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.682.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.646.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.305.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.305.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.305.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	67.034.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.021.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	67.034.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.021.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.004.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	52.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.021.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Paguyaman Pantai	2.052.014.486,00	0,00	0,00	0,00
		1.853.320.517,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.714.843.471,00	0,00	0,00	0,00
		1.584.355.802,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.108.858,00	0,00	0,00	0,00
		7.904.818,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.278.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.798.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	828.858,00	0,00	0,00	0,00
		828.818,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.314.677,00	0,00	0,00	0,00
		1.409.592.734,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.314.677,00	0,00	0,00	0,00
		1.409.592.734,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.950.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.950.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.225.378,00	0,00	0,00	0,00
		41.580.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.425.378,00	0,00	0,00	0,00
		10.024.750,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.556.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.387.084,00	0,00	0,00	0,00
		70.370.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.091.280,00	0,00	0,00	0,00
		15.173.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.095.804,00	0,00	0,00	0,00
		1.997.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.700.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.807.474,00	0,00	0,00	0,00
		29.957.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.807.474,00	0,00	0,00	0,00
		29.957.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	287.141.200,00	0,00	0,00	0,00
		229.611.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	176.741.200,00	0,00	0,00	0,00
		119.611.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	117.072.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.460.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	59.669.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.151.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	110.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	110.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.029.815,00	0,00	0,00	0,00
		6.419.815,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.029.815,00	0,00	0,00	0,00
		6.419.815,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.029.815,00	0,00	0,00	0,00
		6.419.815,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.933.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.933.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.433.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Botumoito	2.630.846.492,00	0,00	0,00	0,00
		2.501.552.063,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.001.465,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.001.465,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.001.465,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.503.510.142,00	0,00	0,00	0,00
		2.332.370.598,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.129.177.335,00	0,00	0,00	0,00
		2.007.855.261,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.177.335,00	0,00	0,00	0,00
		2.007.855.261,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.203.350,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.203.350,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.917.298,00	0,00	0,00	0,00
		3.101.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.917.298,00	0,00	0,00	0,00
		3.101.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.844.275,00	0,00	0,00	0,00
		172.127.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.114.275,00	0,00	0,00	0,00
		24.327.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.559.320,00	0,00	0,00	0,00
		124.555.837,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.919.320,00	0,00	0,00	0,00
		19.864.508,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.691.329,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.808.564,00	0,00	0,00	0,00
		22.731.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.538.564,00	0,00	0,00	0,00
		22.731.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.948.050,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.948.050,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.948.050,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.060.300,00	0,00	0,00	0,00
		29.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	810.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	810.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.328.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.954.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	26.328.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.954.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.476.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.976.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	17.028.450.674,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		17.737.890.946,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.028.450.674,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		17.737.890.946,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01	Kesbang Politik dan Limnas	17.028.450.674,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		17.737.890.946,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.422.469.965,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		2.213.933.845,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.324.545,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.230.435,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.678.110,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.686.201.717,00	0,00	0,00	0,00
		1.568.044.931,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.686.201.717,00	0,00	0,00	0,00
		1.568.044.931,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.403.150,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.403.150,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.360.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.900.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.098.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.460.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.026.950,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		255.897.980,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.026.950,00	0,00	0,00	0,00
		255.897.980,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.415.603,00	0,00	0,00	0,00
		320.630.934,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.741.341,00	0,00	0,00	0,00
		16.729.644,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.424.262,00	0,00	0,00	0,00
		60.912.290,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		242.989.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.186.889.790,00	0,00	0,00	0,00
		853.238.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.186.889.790,00	0,00	0,00	0,00
		853.238.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.799.615,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.182.090.175,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	853.238.200,00	0,00	0,00	0,00
		9.933.799.619,00	0,00	0,00	0,00
		11.449.639.976,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	9.933.799.619,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.449.639.976,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.578.550,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	99.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.818.221.069,00	0,00	0,00	0,00
		11.350.499.976,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	661.939.460,00	0,00	0,00	0,00
565.009.000,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	661.939.460,00	0,00	0,00
	565.009.000,00		0,00	0,00	0,00
	8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.262.660,00	0,00
0,00		0,00		0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		425.515.320,00	0,00
	425.109.000,00		0,00	0,00	0,00
	8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	224.161.480,00	0,00
139.900.000,00		0,00		0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	228.718.440,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	149.671.750,00	0,00	0,00	0,00
		228.718.440,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	149.671.750,00	0,00	0,00	0,00
		13.205.030,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		215.513.410,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	137.671.750,00	0,00	0,00	0,00
		2.594.633.400,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.506.398.175,00	0,00	0,00	0,00
		2.594.633.400,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.506.398.175,00	0,00	0,00	0,00
		6.768.090,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.329.040.310,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.267.838.595,00	0,00	0,00	0,00
		258.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		238.559.580,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		563.142.528.847,00	137.537.503.421,00	612.255.000,00	118.684.446.195,00
		531.500.882.403,60	131.783.363.925,00	339.885.000,00	117.126.536.527,00

Ilamung, 28 Agustus 2024
P. BUPATI BOALEMO
D. SHIRMAN MORIDU, S.Pd. MM





Lampiran II PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun
Anggaran 2023
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REF	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	30.677.911.688,79	53.419.023.615,55
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	30.677.911.688,79	53.419.023.615,55
3	Sub total		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	45.037.135.810,16	30.677.911.688,79
5	Sub total		45.037.135.810,16	30.677.911.688,79
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	45.037.135.810,16	30.677.911.688,79

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tjamuta, 23 Agustus 2024
Pi. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Lampiran III PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	PENDAPATAN DAERAH - LO	5.4.1	773.252.123.587,87	705.959.686.982,72	67.292.436.605,15	9,53
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	71.133.528.277,08	46.330.913.842,92	24.802.614.434,16	53,53
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	7.900.888.204,25	6.846.327.171,00	1.054.561.033,25	15,40
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	1.875.052.991,00	5.611.095.060,00	(3.736.042.069,00)	(66,58)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	8.478.040.721,00	5.712.369.797,00	2.765.670.924,00	48,42
6	Lain-lain PAD yang sah - LO	5.4.1.1.4	52.879.546.360,83	28.161.121.814,92	24.718.424.545,91	87,77
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	655.290.151.084,00	636.585.054.537,00	18.705.096.547,00	2,94
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1	630.821.794.426,00	611.122.391.583,00	19.699.402.843,00	3,22
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	5.4.1.2.2	24.468.356.658,00	25.462.662.954,00	(994.306.296,00)	(3,90)
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO	5.4.1.3	46.828.444.226,79	23.043.718.602,80	23.784.725.623,99	103,22
11	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	46.828.444.226,79	12.985.616.365,00	33.842.827.861,79	260,62
12	Dana Darurat - LO	5.4.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3.3	0,00	10.058.102.237,80	(10.058.102.237,80)	(100,00)
14	BEBAN DAERAH	5.4.2	730.303.421.442,63	749.838.936.065,09	-19.535.514.622,46	(2,61)
15	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	332.488.692.217,60	326.585.636.803,00	5.903.055.414,60	1,81
16	Beban Barang	5.4.2.1.2	60.136.412.120,34	71.506.473.600,95	(11.370.061.480,61)	(15,90)
17	Beban Jasa	5.4.2.1.3	105.988.995.484,41	111.515.769.337,00	(5.526.773.852,59)	(4,96)
18	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	5.191.273.294,00	9.310.970.151,00	(4.119.696.857,00)	(44,25)
19	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	36.434.286.245,00	47.930.008.797,00	(11.495.722.552,00)	(23,98)
20	Beban Bunga	5.4.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Beban Subsidi	5.4.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beban Hibah	5.4.2.1.8	16.139.480.470,00	1.593.029.976,00	14.546.450.494,00	913,13
23	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.10	615.785.874,46	1.151.627.890,05	(535.842.015,59)	(46,53)
25	Beban Lain-lain	5.4.2.1.11	1.407.503.973,02	3.085.911.936,48	(1.678.407.963,46)	(54,39)
26	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	44.185.379.794,00	52.832.512.088,02	(8.647.132.294,02)	(16,37)
27	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	13.489.129.315,00	10.745.656.445,00	2.743.472.870,00	25,53
28	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.3	66.755.081.171,00	68.831.268.700,79	(2.076.187.529,79)	(3,02)
29	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.4	161.627.252,00	58.012.361,00	103.614.891,00	178,61
30	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Beban Amortisasi Tidak Berwujud	5.4.2.2.6	1.525.815.786,80	1.413.500.086,80	112.315.700,00	7,95
32	Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.4.2.3.1	125.703.332,00	0,00	125.703.332,00	0,00
33	Beban Bagi Hasil	5.4.2.4.1	1.236.743.013,00	934.274.892,00	302.468.121,00	32,37
34	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.4.2	44.421.512.100,00	42.344.283.000,00	2.077.229.100,00	4,91
35	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASIONAL	5.4.3	42.948.702.145,24	(43.879.249.082,37)	86.827.951.227,61	197,88
36	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
37	Suplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1	0,00	225.522.000,00	(225.522.000,00)	(100,00)
38	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.3	0,00	(24.821.256,00)	24.821.256,00	100,00
40	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.5	0,00	200.700.744,00	(200.700.744,00)	100,00
42	SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.6	42.948.702.145,24	(43.678.548.338,37)	86.627.250.483,61	198,33
43	POS LUAR BIASA	5.4.7				
44	Beban Tak Terduga	5.4.7.1	339.885.000,00	2.083.119.354,00	(1.743.234.354,00)	(83,68)
45	SURPLUS /DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.8	(339.885.000,00)	(2.083.119.354,00)	1.743.234.354,00	(83,68)
46	SURPLUS / DEFISIT - LO	5.4.9	42.608.817.145,24	(45.761.667.692,37)	88.370.484.837,61	193,11

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tila Wuta, 23 Agustus 2024
D. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM

Lampiran IV PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023

Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.456.442.680.956,57	1.502.520.147.251,94
SURPLUS / DEFISIT - LO	5.6.3	42.608.817.145,24	(45.761.667.692,37)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.2	(2.816.325.701,32)	(315.798.603,00)
Koreksi Ekuitas - Piutang	5.6.2.1	159.780.965,90	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan	5.6.2.2	157.865.117,78	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.2.3	93.478.191,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.2.4	(515.118.500,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.2.5	(2.712.331.476,00)	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.2.6	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.6.2.7	0,00	-315.798.603,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.496.235.172.400,49	1.456.442.680.956,57

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Tilamuta, 23 Agustus 2024
BUPATI BOALEMO

Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM

Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REF	2023	2022
1	ASET	5.3.1		
2	Aset Lancar	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	38.468.403.568,67	29.730.283.696,52
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	8.209.000,00	67.286.500,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	985.206,00	0,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	3.932.536.278,00	540.736.670,00
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.5	0,00	153.579.675,20
8	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.5	1.912.862.496,00	0,00
9	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.6	868.843.052,99	1.183.363.334,44
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	39.164.345,00	21.255.945,00
11	Setara Kas	5.3.1.1.8	0,00	0,00
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	4.914.938.942,00	4.831.732.190,00
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.10	273.593.227,00	851.533.717,00
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.3.1.1.11	0,00	0,00
15	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.12	194.392.626,00	302.313,80
16	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.13	0,00	0,00
17	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.14	2.407.356.654,00	1.165.799.712,00
18	Piutang Lainnya	5.3.1.1.15	11.769.260.648,21	10.110.958.092,04
19	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.16	(6.406.888.690,56)	(5.801.028.589,74)
20	Belanja Dibayar di Muka	5.3.1.1.17	0,00	0,00
21	Persediaan	5.3.1.1.18	8.642.070.883,37	13.636.420.973,05
22	Jumlah Aset Lancar		67.025.728.236,68	56.492.224.229,31
23	Investasi Jangka Panjang	5.3.1.2		
24	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
25	Jumlah Investasi Non permanen		0,00	0,00
26	Investasi Permanen	5.3.1.2.2	61.471.282.911,30	62.749.129.418,32
27	Jumlah Investasi Permanen		61.471.282.911,30	62.749.129.418,32
28	Jumlah Investasi Jangka Panjang		61.471.282.911,30	62.749.129.418,32
29	Aset Tetap	5.3.1.3		
30	Tanah	5.3.1.3.1	153.565.178.951,80	153.978.124.526,80
31	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	474.197.580.389,53	488.769.788.521,39
32	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	582.878.738.490,19	545.746.471.739,19
33	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.510.356.051.093,32	1.375.430.281.903,32
34	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	33.050.125.702,55	28.349.452.513,55
35	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	17.986.888.357,00	49.959.925.705,00
36	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.420.952.395.137,07)	(1.325.535.714.679,41)
37	Jumlah Aset Tetap		1.351.082.167.847,32	1.316.698.330.229,84
38	Aset Lainnya	5.3.1.4		
39	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	9.188.585.867,71	9.188.585.867,71
40	Aset Tidak Berwujud (neto)	5.3.1.4.2	4.165.663.942,40	4.953.893.229,20
41	Aset Lain-Lain (neto)	5.3.1.4.3	25.835.659.553,08	24.073.196.558,56
42	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.6	-	-
43	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.7	3.572.936.000,00	1.246.498.563,00
44	Jumlah Aset Lainnya		42.762.845.363,19	39.462.174.218,47
45	Properti Investasi	5.3.1.5		
46	Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1	482.181.900,00	0,00
47	Properti Investasi Bangunan Gedung	5.3.1.5.2	5.918.016.529,00	0,00
48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	5.3.1.5.3	0,00	0,00
49	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.4	(1.145.273.827,00)	0,00
50	Jumlah Properti Investasi		5.254.924.602,00	0,00
51	JUMLAH TOTAL ASET		1.527.596.948.960,49	1.475.401.858.095,94

52	KEWAJIBAN	5.3.2		
53	Kewajiban Jangka Pendek	5.3.2.1		
54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	193.868.136,50	1.018.594.132,37
55	Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
56	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	0,00	0,00
57	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	117.083.333,00	30.000.000,00
58	Utang Belanja	5.3.2.1.5	10.284.653.402,00	1.549.054.094,00
59	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	20.766.171.688,50	16.361.528.913,00
60	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		31.361.776.560,00	18.959.177.139,37
61	Kewajiban Jangka Panjang	5.3.2.2		
62	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.3.2.2.1	0,00	0,00
63	Utang Dalam Negeri - Obligasi	5.3.2.2.2	0,00	0,00
64	Premium (Diskonto) Obligasi	5.3.2.2.3	0,00	0,00
65	Utang Jangka Panjang Lainnya (Utang Pemerintah Pusat)	5.3.2.2.4	0,00	0,00
66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
67	JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN		31.361.776.560,00	18.959.177.139,37
68	EKUITAS	5.3.3		
69	Ekuitas		1.496.235.172.400,49	1.456.442.680.956,57
70	JUMLAH TOTAL EKUITAS		1.496.235.172.400,49	1.456.442.680.956,57
71	JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.527.596.948.960,49	1.475.401.858.095,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Tilamuta, 23 Agustus 2024
 Di: BUPATI BOALEMO

Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	7.817.681.452,25	6.707.510.440,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	2.599.421.824,00	4.844.139.560,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	8.478.040.721,00	5.712.369.797,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.1.4	51.537.660.774,72	24.867.802.618,44
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	701.030.290.389,00	687.265.248.753,00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	23.226.799.716,00	24.296.863.242,00
9	Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	419.997.100,00	1.500.000.000,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.1.8	0,00	0,00
11	Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.9	0,00	10.058.102.237,80
12	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.10	0,00	0,00
13	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	5.5.1.1	795.109.891.976,97	765.252.036.648,24
14	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
15	Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	329.257.000.657,60	326.529.165.149,00
16	Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	186.104.401.276,00	226.781.428.562,00
17	Belanja Hibah	5.5.1.2.3	16.139.480.470,00	1.593.029.976,00
18	Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	0,00	0,00
19	Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.5	339.885.000,00	2.083.119.354,00
20	Belanja Bagi Hasil	5.5.1.2.6	207.684.603,00	934.274.892,00
21	Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.7	116.918.851.924,00	119.733.638.733,00
22	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	5.5.1.2	648.967.303.930,60	677.654.656.666,00
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		146.142.588.046,37	87.597.379.982,24
24	Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
25	Arus Masuk Kas	5.5.2.1	0,00	0,00
26	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.1	0,00	0,00
27	Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.2	0,00	0,00
28	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.3	0,00	379.290.700,00
29	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.4	0,00	0,00
30	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.1.5	0,00	0,00
31	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.6	0,00	0,00
32	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.7	0,00	0,00
33	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.1.8	0,00	0,00
34	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.9	0,00	0,00
35	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi		0,00	379.290.700,00
37	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
38	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.1	0,00	0,00
39	Perolehan Tanah	5.5.2.2.2	94.517.300,00	561.411.000,00
40	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3	15.297.638.343,00	29.863.665.883,00
41	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4	26.560.640.766,00	31.779.801.422,00
42	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.5	84.290.911.827,00	44.350.093.675,00
43	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6	5.519.655.689,00	2.662.810.629,00
44	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.7	20.000.000,00	0,00
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8	0,00	0,00

46	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.9	0,00	0,00
47	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi		131.783.363.925,00	109.217.782.609,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(131.783.363.925,00)	(108.838.491.909,00)
49	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan	5.5.3		
50	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
51	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.1.1	0,00	0,00
52	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.3.1.2	0,00	0,00
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.1.2	0,00	0,00
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.3	0,00	0,00
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1.4	0,00	0,00
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1.5	0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.1.6	0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.1.7	0,00	0,00
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.1.8	0,00	0,00
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.1.9	0,00	0,00
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.10	0,00	0,00
62	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	0,00
63	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
64	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2.1	0,00	0,00
65	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.2	0,00	1.500.000.000,00
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya		0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
76	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	1.500.000.000,00
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	(1.500.000.000,00)
78	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
79	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
80	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	42.039.975.887,00	41.802.247.491,60
81	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran	5.5.4.1.2	18.956.000.421,00	0,00
82	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		60.995.976.308,00	41.802.247.491,60
83	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
84	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	42.864.701.882,87	43.197.621.547,91
85	Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran	5.5.4.2.2	18.956.000.421,00	0,00
86	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		61.820.702.303,87	43.197.621.547,91
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris		(824.725.995,87)	(1.395.374.056,31)
88	Kenaikan/Penurunan Kas		13.534.498.125,50	(24.136.485.983,07)

89	Saldo Awal Kas		31.696.505.821,16	55.832.991.804,23
90	Saldo Akhir Kas	5.5.5	45.231.003.946,66	31.696.505.821,16
91	terdiri dari:			
92	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		38.468.403.568,67	29.730.283.696,52
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		985.206,00	0,00
94	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		8.209.000,00	67.286.500,00
95	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	153.579.675,20
96	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		1.912.862.496,00	0,00
97	Saldo Akhir Kas di BLUD		3.932.536.278,00	540.736.670,00
98	Saldo Akhir Kas Dana BOSP		868.843.052,99	1.183.363.334,44
99	Saldo Kas Lainnya		39.164.345,00	21.255.945,00
100	Saldo Kas Setara Kas		0,00	0,00
101	Saldo Akhir Kas		45.231.003.946,66	31.696.505.821,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Tilamuta, 23 Agustus 2024
BUPATI BOALEMO

Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Perubahan penting dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, hakikat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Upaya nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Maksud dari penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ketentuan di atas, sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Secara spesifik tujuan laporan keuangan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mewujudkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikeluarkan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 - h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 - o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
- aa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 9);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 323);
- ee. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 362);
- ff. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Boalemo Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- gg. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 50 tahun 2015 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- hh. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022

Nomor 38);

- ii. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 37).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro dan kebijakan keuangan.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target, program pembangunan prioritas daerah, penanganan stunting, *mandatory spending*, dan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas, dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII: Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 18,38%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,86%;
- c. Gini *Ratio* sebesar 0,417 % (Angka Provinsi Gorontalo);
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,78%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,42%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 3,88% (Angka Provinsi Gorontalo); dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 6.586,64 miliar rupiah.

**)Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik*

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan

kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Tingkat kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Adapun garis kemiskinan (*poverty line*) yang menjadi standar pengukur kemiskinan yaitu tahun 2022 sebesar Rp450.724,00 dan tahun 2023 sebesar Rp472.906,00.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Boalemo

No.	Uraian Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kabupaten Boalemo (%)	19,00	18,74	18,38
2	Kabupaten Boalemo (Jiwa)	31,83 ribu	31,97 ribu	31,94 ribu
3	Provinsi (%)	15,61	15,42	15,15
4	Nasional (%)	9,71	9,54	9,36
5	Peringkat Provinsi	6	6	6
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin Kabupaten Boalemo pada Tahun 2022 sebesar 18,74% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin hingga menjadi 18,38% dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga angka minimal ditargetkan 16,00%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Boalemo tahun 2023 masih di atas provinsi (rata-rata 15,15%) dan nasional (9,36%), maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan pada Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Boalemo

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Boalemo	2,77	2,99	3,41
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Gorontalo	2,87	3,04	2,92
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	1,56

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Tabel 3 Tingkat Keparahahan Kemiskinan Kabupaten Boalemo

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab Boalemo	0,67	0,64	0,77
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Gorontalo	0,79	0,77	0,69
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,47	0,42	0,38

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari:

- 1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Boalemo Tahun 2023 adalah sebesar 2,07%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Boalemo

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab Boalemo (%)	3,66	3,57	2,07
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,28	3,01	2,58
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,08	6,10

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

TPT Kabupaten Boalemo tahun 2023 yaitu sebesar 2,07% dan tahun 2022 sebesar 3,57%, atau turun sebesar 1,50%. Jika dibandingkan dengan TPT tingkat Provinsi Gorontalo maka TPT Kabupaten Boalemo pada tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Gorontalo 2,58% yang terpaut beda sebesar 0,51%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini *Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran

kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Realisasi pencapaian Gini *Ratio* Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebesar 0,423 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini *Ratio* Provinsi Gorontalo

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Kabupaten Boalemo	-	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,406	0,409	0,423
3	Tingkat Nasional	0,385	0,381	0,381

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Boalemo tidak dilakukan pengukuran. Sedangkan angka Gini *Ratio* Provinsi Gorontalo 0,423 poin, kemudian dibandingkan secara nasional maka Gini *Ratio* 0,381 poin.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu: harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah (< 60);
- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);

- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- 4) Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, maka realisasi pencapaian IPM Kabupaten Boalemo Tahun 2023 adalah sebesar 68,78 poin dengan kategori sedang jika dibandingkan rata-rata provinsi yaitu sebesar 70,45 poin, dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kabupaten Boalemo	67,02	67,86	68,78
2	Provinsi	69,00	69,81	70,45
3	Indonesia/Nasional	72,29	73,77	74,39
4	Peringkat Provinsi	4	4	4

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Realisasi pencapaian IPM tahun 2023 adalah sebesar 68,78 poin, dibandingkan tahun 2022 sebesar 67,86 poin, mengalami kenaikan sebesar 0,92 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup berkaitan dengan PNB per kapita.

Peringkat Kabupaten Boalemo terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berada pada peringkat empat, dimana teratas yaitu (1) Kota Gorontalo, (2) Kabupaten Bone Bolango, (3) Kabupaten Gorontalo, (4) Kabupaten Boalemo, (5) Kabupaten Pohuwato, dan (6) Kabupaten Gorontalo Utara.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*.

Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan

pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2023.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boalemo

No.	Uraian	Kabupaten Boalemo (dalam miliar Rupiah)			Provinsi (dalam miliar Rupiah)	Nasional (dalam ribu Rupiah)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010)	3.568,35	3.677,31	3.839,70	30.286,45	11.710.397,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,04	3,05	4,42	4,50	4,13

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Selama kurun waktu tahun 2021-2023 perekonomian Kabupaten Boalemo khususnya pada tahun 2023 (4,42%) mengalami peningkatan dibandingkan angka pertumbuhan tingkat nasional (4,13%) maupun pertumbuhan tingkat Provinsi Gorontalo (4,50%).

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan, maka Kabupaten Boalemo memperlihatkan angka yang mengalami kenaikan, terakhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp3.839,70 Miliar, dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar Rp3.677,06 Miliar.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Gorontalo dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

- 1) Inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- 2) Inflasi Sedang (*Gallopig Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi

- dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- 3) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
 - 4) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran.

Secara teknis tingkat inflasi dihitung oleh BPS Provinsi, sehingga data inflasi yang ada untuk tahun 2023 hanya menyajikan inflasi Provinsi Gorontalo, sedangkan di Kabupaten/Kota lainnya menggunakan data rujukan berupa inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Gorontalo tingkat inflasi Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebesar 3,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Tingkat Inflasi

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Inflasi Gorontalo (%)	2,59	5,15	3,88
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,7	1,87	5,51

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Karakteristik kenaikan inflasi di Gorontalo terjadi pada waktu-waktu tertentu yaitu pada saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta menjelang perayaan tahun baru. Hasil evaluasi BPS menunjukkan bahwa inflasi terjadi setiap tahun karena dipengaruhi oleh faktor permintaan bahan pangan yang melonjak tinggi berupa bahan pangan terutama kategori cabe/rica, bawang dan tomat atau yang dikenal di Gorontalo dengan istilah Barito.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Boalemo

Struktur perekonomian Kabupaten Boalemo dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam miliar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan*	1.885,13	1.918,33	1.999,58
2	Pertambangan dan Penggalian*	15,87	16,53	17,45
3	Industri Pengolahan*	67,12	69,95	70,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas*	1,24	1,31	1,39
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, Daur Ulang*	0,83	0,84	0,86
6	Konstruksi*	219,85	232,02	245,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor*	463,73	504,11	543,79
8	Transportasi dan Pergudangan*	83,89	87,80	92,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum*	48,17	50,07	52,95
10	Informasi dan Komunikasi*	64,79	66,39	68,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi*	85,19	78,71	72,70
12	Real Estate*	45,98	47,24	46,52
13	Jasa Perusahaan*	1,80	1,95	1,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial*	255,20	265,44	275,81
15	Jasa Pendidikan*	141,26	146,19	151,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial*	141,90	143,67	150,84
17	Jasa Lainnya*	46,39	46,50	47,82
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB*	5.732,64	6.112,46	6.586,64
19	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK*	3.568,35	3.677,31	3.839,70

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Apabila diperoleh surplus akan ditentukan pemanfaatan surplus dalam pengeluaran pembiayaan, namun bila diperoleh defisit akan ditentukan sumber-sumber pembiayaan dalam penerimaan pembiayaan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 meliputi:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah target anggaran pendapatan tahun 2023 sejumlah Rp789.298.821.774,00. Pemerintah Kabupaten Boalemo terus melakukan reformasi kebijakan dalam upaya mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Target sumber pendapatan daerah tahun 2023 terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah
 - b) Retribusi Daerah
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 2) Pendapatan Transfer
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 sebesar Rp819.976.733.463,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Boalemo terdiri atas pendanaan:

- 1) Pendanaan Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintah terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi:
 - a) SPM Pendidikan;
 - b) SPM Kesehatan;
 - c) SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) SPM Trantibumlinmas; dan
 - f) SPM Sosial.
- 2) Pendanaan untuk dukungan alokasi Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Kebijakan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

- b) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
 - c) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
 - d) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
 - e) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 - f) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
 - g) Memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.
- 3) Dukungan alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Provinsi tahun anggaran 2023, meliputi:
- a) Pendidikan yang berkualitas;
 - b) Kesehatan yang prima;
 - c) Infrastruktur yang merata;
 - d) Ekonomi yang lebih meningkat;
 - e) Pemerintah yang lebih melayani;
 - f) Agama dan budaya lebih semarak;
 - g) Pariwisata yang mendunia; dan
 - h) Lingkungan yang lebih lestari.
- 4) Kebijakan alokasi anggaran yang berkesesuaian dengan prioritas daerah Kabupaten Boalemo tahun 2023 yang mengacu pada RKPD kabupaten Boalemo tahun 2023.
- 5) Kebijakan pendanaan penanganan pasca pandemi *Covid-19*.

Pendanaan urusan pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*), yaitu:

- 1) Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan
Jumlah alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan pada APBD Perubahan Tahun 2023 sejumlah Rp234.112.964.501,00 atau sejumlah 27,65% dari rasio APBD Perubahan Tahun 2023 yang berjumlah Rp819.976.733.463,00.
- 2) Alokasi Anggaran Kesehatan
Jumlah alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan pada APBD Perubahan Tahun 2023 sejumlah Rp167.913.940.173,00 atau sejumlah 27,86%

dari rasio APBD Perubahan Tahun 2023 yang berjumlah Rp819.976.733.463,00.

- 3) Alokasi Anggaran yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum
Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Sejumlah Rp438.308.937.000,00. Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah pada APBD Tahun 2023 Sejumlah Rp272.110.978.477,00 atau sejumlah 33,19%.
- 4) Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- 5) Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 6) Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.

Selain hal di atas penyediaan anggaran belanja Pemerintah Daerah untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek berupa Belanja Operasi, Belanja dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria memiliki masa manfaat 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah berupa Belanja Modal, Belanja pengeluaran atas belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berupa Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan).

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdasar pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target

Secara umum capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan - LRA

Anggaran Pendapatan-LRA setelah perubahan sebesar Rp789.298.821.774,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp795.109.891.976,97 atau 100,74% dari total anggaran pendapatan-LRA, dengan rincian menurut kelompok pendapatan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LRA dengan realisasi Rp70.432.804.771,97 atau 92,16% dari target Anggaran Pendapatan sebesar Rp76.427.488.262,00;
- 2) Pendapatan transfer-LRA dari pusat dengan realisasi Rp724.257.090.105,00 atau 101,60% dari target Anggaran Pendapatan sebesar Rp712.871.333.512,00; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA dengan realisasi Rp419.997.100,00.

3.1.2 Belanja

Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah sebesar Rp819.976.733.463,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp780.750.667.855,00 atau 95,22% dari total anggaran belanja, dengan rincian menurut bagian dan jenis belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi dengan realisasi Rp531.500.882.403,00 atau 94,38% dari Anggaran sebesar Rp563.142.528.847,00. Adapun capaian realisasi menurut jenis Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut :
 - a) Belanja Pegawai dengan capaian realisasi sebesar Rp329.257.000.657,60 atau 101,28% dari target anggaran sebesar Rp325.107.729.095,00;

- b) Belanja Barang dan Jasa dengan capaian realisasi sebesar Rp186.104.401.276,00 atau 82,30% dari target anggaran sebesar Rp226.139.269.776,00;
 - c) Belanja Hibah dengan capaian realisasi sebesar Rp16.139.480.470,00 atau 135,68% dari target anggaran sebesar Rp11.895.529.976,00.
 - d) Belanja Modal dengan capaian realisasi Rp131.783.363.925,00 atau 95,82% dari target anggaran sebesar Rp137.537.503.421,00 dengan rincian capaian realisasi menurut jenis belanja sebagai berikut:
 - (1) Belanja Modal Tanah dengan capaian realisasi sebesar Rp94.517.300,00 atau 30,40% dari target anggaran sebesar Rp310.872.566,00;
 - (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan capaian realisasi sebesar Rp15.297.638.343,00 atau 101,28% dari target anggaran sebesar Rp15.104.154.437,00;
 - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan capaian realisasi sebesar Rp26.560.640.766,00 atau 90,27% dari target anggaran sebesar Rp29.423.723.644,00;
 - (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan capaian realisasi sebesar Rp84.290.911.827,00 atau 96,54% dari target anggaran sebesar Rp87.309.051.233,00;
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan capaian realisasi sebesar Rp5.519.655.689,00 atau 102,79% dari target anggaran sebesar Rp5.369.701.541,00; dan
 - (6) Belanja Modal Aset Lainnya dengan capaian realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp20.000.000,00.
 - e) Belanja Tak Terduga dengan capaian realisasi Rp339.885.000,00 atau 55,51% dari target anggaran sebesar Rp612.255.000,00.
- 2) Belanja Transfer dengan capaian realisasi Rp117.126.536.527,00 atau 98,69% dari target anggaran sebesar Rp118.684.446.195,00. Adapun capaian realisasi anggaran Belanja Transfer menurut jenis Belanja yaitu sebagai berikut:
- a) Belanja Bagi Hasil Pendapatan capaian realisasi sebesar Rp207.684.603,00 atau 13,43% dari target anggaran sebesar

Rp1.546.026.095,00. Adapun capaian realisasi Anggaran Belanja Bagi Hasil menurut objek belanja yaitu sebagai berikut:

- (1) Transfer Bagi hasil Pajak capaian realisasi sebesar Rp120.457.058,00 atau 9,93% dari target anggaran sebesar Rp1.213.234.902,00;
- (2) Transfer Bagi hasil Retribusi capaian realisasi sebesar Rp87.227.545,00 atau 26,21% dari target anggaran sebesar Rp332.791.193,00; dan

b) Belanja Bantuan Keuangan capaian realisasi sebesar Rp116.918.851.100,00 atau 99,81% dari target anggaran sebesar Rp117.138.420.100,00. Adapun capaian realiasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan menurut objek belanja yaitu sebagai berikut:

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa capaian realisasi sebesar Rp116.918.851.100,00 atau 99,81% dari target anggaran sebesar Rp117.138.420.100,00,

3.2 Program Pembangunan Prioritas Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023 kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Boalemo disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 Program Prioritas dalam Pembangunan Daerah, yakni:

- a. Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah;
- b. Meningkatnya status desa dan pemerataan wilayah;
- c. Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektifitas Boalemo dengan daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah Teluk Tomini;
- d. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas;
- e. Meningkatnya mitigasi dan ketahanan bencana;
- f. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan literasi masyarakat;
- g. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengentasan permasalahan sosial;
- h. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;

- i. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan publik; dan
- j. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi, keamanan dan ketertiban daerah.

Mengacu pada penjabaran tema dan unsur tema beserta titik berat dari masing-masing penjabaran dimaksud, maka dapat dipetakan bahwa untuk prioritas pembangunan Kabupaten Boalemo tahun 2023, Prioritas Daerah yang mendapatkan penguatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- d. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan optimal

Penentuan Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dirumuskan berdasarkan tema RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 yang sebelumnya telah ditetapkan. Program-program ini secara runut merupakan elaborasi langsung dari Prioritas Daerah yang memperoleh penguatan pada tahun 2023. Nomenklatur program pada tahun 2023 mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2023 adalah:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah, meningkatnya status desa dan pemerataan wilayah, meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar;
- b. Prioritas Daerah 2: Peningkatkan kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta meningkatkannya mitigasi dan ketahanan bencana.
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran meningkatnya kualitas aksesibilitas pendidikan dan literasi, meningkatnya akses dan layanan Kesehatan bagi Masyarakat, meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengentasan

permasalahan Soisal.

- d. Prioritas Daerah 4: Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan optimal, dengan sasaran meningkatnya Kualitas atata Kelola pelayanan publik, Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam demokrasi, keamanan dan ketertiban daerah.

Keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan cerminan dari harmonisasi dan sinergitas arah pembangunan di pusat dan di daerah. Hal ini menjadi penting, agar pembangunan daerah tidak menuju ke arah yang berlawanan dengan arah pembangunan nasional. Fokus dan prioritas pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RPD) Tahun 2023, mengambil tema, “Peningkatan Ekonomi dan Sumber daya Manusia Didukung oleh Infrastruktur dan Pelayanan Publik Yang Optimal”.

Dengan kembali memberikan porsi penguatan ke semua Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional), yang terdiri dari 7 (Tujuh) Prioritas. Adapun beberapa keselarasan perencanaan pembangunan Kabupaten Boalemo yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Gorontalo dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 10 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo Tahun 2023

No.	Prioritas Nasional	Program Provinsi Gorontalo		Program Kabupaten Boalemo	
1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4	Program Pengawasan Keamanan Pangan
		5	Program Penyuluhan Pertanian	5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		6	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		7	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Prioritas Nasional	Program Provinsi Gorontalo		Program Kabupaten Boalemo	
		8	Program Penanganan Kerawanan Pangan	8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		9	Program Pengawasan Keamanan Pangan	9	Program Perizinan Usaha Pertanian
		10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10	Program Penyuluhan Pertanian
		11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		12	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		13	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
		14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Tenda)	14	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		15	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Tilamuta)	15	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		16	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)	16	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	17	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		19	Program Pemberdayaan Sosial	19	Program Pemasaran Pariwisata
		20	Program Rehabilitasi Sosial	20	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				22	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				23	Program Promosi Penanaman Modal
				24	Program Pelayanan Penanaman Modal
				25	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				26	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
				27	Program Perencanaan tenaga kerja
				28	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				29	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				30	Program penempatan tenaga kerja

No.	Prioritas Nasional	Program Provinsi Gorontalo		Program Kabupaten Boalemo	
				31	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)
				32	Program Pengembangan Umkm
				33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang penting
				36	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
				37	Program Pemberdayaan Sosial
				38	Program Rehabilitasi Sosial
				39	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
					Program Perekonomian Dan Pembangunan
2	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan	1	Program pendidik dan tenaga kependidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan
		2	Program pengelolaan pendidikan	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		3	Program pengendalian perizinan pendidikan	3	Program Pengembangan Kurikulum
		4	Program Pendidikan Kurikulum	4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	5	Program Pembinaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten / Kota
		6	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman	6	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
		7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		8	Program Pengendalian Penduduk	8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	9	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		12	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	12	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

No.	Prioritas Nasional	Program Provinsi Gorontalo		Program Kabupaten Boalemo	
		13	Program Perlindungan Khusus Anak	13	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		14	Program Penguatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	14	Program Pengendalian Penduduk
		15	Program Peningkatan Kualitas keluarga	15	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		16	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	16	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		17	Program Perlindungan Perempuan	17	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		18	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	18	Program Perlindungan Perempuan
		19	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	19	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		20	Program Pengelolaan Arsip	20	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		21	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	21	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
		22	Program Pembinaan Perpustakaan	22	Program Perlindungan Khusus Anak
				23	Program Kepegawaian Daerah
				24	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				25	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				26	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				27	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
				29	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3	Penanggulangan Pengangguran disertai Peningkatan Decent Job	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Program Pelayanan Penanaman Modal
		2	Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		3	Program Promosi Penanaman Modal	3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		4	Program Pelayanan Penanaman Modal		
		5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
		6	Program Penempatan Tenaga Kerja		

No.	Prioritas Nasional	Program Provinsi Gorontalo		Program Kabupaten Boalemo	
		7	Program Hubungan Industrial		
		8	Program Pengawasan Tenaga Kerja		
		9	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		2	Program Pengolahan dan Pemasaran	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		3	Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)	3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4	Program Pengembangan UMKM
		5	Program Pemasaran Pariwisata	5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati	7	Program Pemasaran Pariwisata
		8	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	8	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		9	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	9	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		10	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		12	Program Pengembangan UMKM	12	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		13	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
		14	Program Pengembangan Ekspor		
		15	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
5	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		4	Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha		

No.	Prioritas Nasional	Program Provinsi Gorontalo		Program Kabupaten Boalemo	
6	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi dan Respon Terhadap Perubahan Iklim	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		5	Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan Hidup untuk Masyarakat	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		7	Program Pengelolaan Hutan	7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		8	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		9	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	9	Program Penanggulangan Bencana
		10	Program Pengelolaan DAS	10	Program Penanganan Bencana
		11	Program Penanggulangan Bencana	11	
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		2	Program Penyelenggaraan Jalan	2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		3	Program Penataan Bangunan Gedung	3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		4	Program Pengembangan Permukiman	4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		5	Program Penataan Bangunan	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

No.	Prioritas Nasional	Program Provinsi Gorontalo		Program Kabupaten Boalemo	
		6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6	Program Pengembangan Permukiman
		7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7	Program Penataan Bangunan Gedung
		8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	9	Program Penyelenggaraan Jalan
		10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		11	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	12	Program Kawasan Permukiman
		13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	13	Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh
		14	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		15	Program Pengelolaan Persampahan	15	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman
		16	Program Kawasan Permukiman	16	Program Pengembangan Perumahan
		17	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	17	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		18	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	18	Program Aplikasi Informatika
		19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		20	Program Pengelolaan Pelayaran	20	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		21	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	21	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		22	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	22	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
		23	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	23	Program Pengelolaan Tanah Kosong

No.	Prioritas Nasional	Program Provinsi Gorontalo	Program Kabupaten Boalemo
			24 Program Pengelolaan Persampahan

Keselaran prioritas pembangunan antara RKP 2022, RKPD 2022 Provinsi Gorontalo, dan RKPD 2022 Kabupaten Boalemo merupakan keseragaman pola pikir dalam menentukan prioritas pembangunan mana yang mendapatkan penguatan pada Tahun 2023. Keseragaman tersebut dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Tabel 11 Keselaran Prioritas Pembangunan RKPD 2023 Kabupaten Boalemo

No.	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
Sasaran: Meningkatkan agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah.		
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
10	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan
12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Kelautan
13	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
14	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
15	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
16	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
17	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
19	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
20	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
22	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral
23	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral
24	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
25	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral
26	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral
27	Program Perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
29	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
32	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
33	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
34	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
35	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
36	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
37	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
38	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
39	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
40	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
41	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran: Meningkatnya status desa dan pemerataan wilayah.		
1	Program Penataan Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sasaran: Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektivitas Boalemo dengan daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah teluk tomini.		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan
13	Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan
14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan
15	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan
Sasaran: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas		
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
9	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Sasaran: Meningkatnya Mitigasi dan Ketahanan Bencana		
1	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan
Sasaran: Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan literasi masyarakat		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Program Pembinaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
9	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Sasaran: Meningkatnya akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat.		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Program Pengendalian Penduduk	Dinas P2KBP3A
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas P2KBP3A
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas P2KBP3A
Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak serta pengentasan permasalahan sosial		
1	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas P2KBP3A
2	Program Perlindungan Perempuan	Dinas P2KBP3A
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas P2KBP3A
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas P2KBP3A
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas P2KBP3A
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas P2KBP3A
7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan		

No.	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sasaran: Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik.		
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
13	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
16	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
17	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
18	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan
20	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan
21	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
22	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
23	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
24	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
25	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
26	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
27	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan

No.	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
28	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan
29	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan
30	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan
31	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan
32	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan
33	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
36	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi, keamanan dan ketertiban daerah.		
1	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

Pembahasan capaian kinerja, kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Boalemo telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 12 Target dan Realisasi Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat	1.1	Presentase penyelesaian Gangguan Kantibmas	%	100	100	100
		1.2	Persentase Permasalahan Hukum yang terselesaikan	%	95	0	0
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam memberikan Pelayanan bagi masyarakat	2.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	Sangat Tinggi	n/a	n/a
		2.2	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100
		2.3	Maturitas SPIP	Nilai	3	n/a	n/a
		2.4	Persentase OPD yang menerapkan teknologi informasi	%	95	100	105,26
		2.5	Opini/Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	n/a	n/a
		2.6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75	56,22	74,96
		2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala	4	4	100
3	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	3.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,2	69,63	100,62
		3.2	Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 KH)	%	121	228,5	52,95
		3.3	Angka Kematian Bayi (/1.000 KH)	%	8,1	15,6	51,92
		3.4	Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	%	0,14	4,2	3,33
4	Terwujudnya kawasan perumahan, permukiman yang sehat	4.1	Persentase Lingkungan Perumahan yang Sehat di Dukung PSU.	%	75	70	100
		4.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Makin Menurun	%	0,50	0,60	100
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	5.1	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	53	13,66	25,77
		5.2	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	%	70	49,7	71

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		5.3	Cakupan Luas Areal Sawah yang bisa dialiri	%	83,5	97,07	116,25
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	6.1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	10	7,3	73
		6.2	Persentase Kelulusan	%	100	100	100
7	Terbinanya Pemberdayaan UMKM	7.1	Persentase peningkatan omzet UMKM	%	70	65	92,86
8	Meningkatkan Pendapatan dan daya beli masyarakat Petani dan Nelayan	8.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	107	104,37	97,54
		8.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	109,01	100,92	92,57
9	Menurunnya Angka kemiskinan	9.1	Persentase Angka Kemiskinan	%	19,86	18,74	105,97
10	Meningkatnya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata	10.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	350.000	74.161	21,19
11	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	11.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,69	3,05	45,59
12	Meningkatnya aktifitas Peribadatan	12.1	Persentase Sarana Peribadatan yang makmur	%	100	100	100
13	Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dengan Sistem Non-Formal yang berbasis masyarakat	13.1	Persentase Siswa Tingkat SD dan Menengah yang Melek Huruf Al-Quran	%	80	99,2	124
		13.2	Jumlah Santri	Santri	7.000	1977	28,24

Adapun PAGU dan realisasi anggaran yang terkait langsung dengan pencapaian target sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boalemo yang diperjanjikan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp321.011.809.475,00. Sementara realisasi anggaran terkait dengan pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 adalah sebesar Rp211.233.154.985,00 atau sebesar 65,80%.

3.3 Penanganan *Stunting*

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan *stunting* tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka *stunting* di Indonesia.

Pada Tahun 2022 angka *stunting* di Kabupaten Boalemo berada pada posisi 29,9%. Hal ini disebabkan belum terfokusnya penanganan *stunting*, belum tuntas pada keluarga sasaran dan masih rendahnya intervensi sensitif seperti rumah layak huni, jamban, dan sanitasi.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo pada Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan anggaran dalam upaya penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Boalemo. Adapun alokasi dan realisasi anggaran penanganan *stunting* Kabupaten Boalemo sebagai berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi *Stunting* Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Realisasi Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
DINAS KESEHATAN						

No.	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Realisasi Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	68	70.850.000,00	70.850.000,00	100,00
2	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	100	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00
3	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	100	17.760.000,00	17.760.000,00	100,00
4	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Jumlah penduduk usia produktif yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00
5	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	Terlaksana pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	100	18.360.000,00	18.360.000,00	100,00
DINAS SOSIAL						
6	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten	100	237.375.000,00	237.375.000,00	100,00
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten	9.351	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten	9.351	9.120.000,00	9.120.000,00	100,00
DINAS KESEHATAN						

No.	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Realisasi Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
9	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	100	498.006.630,00	498.006.630,00	100,00
10	Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	85	104.955.000,00	104.955.000,00	100,00
DINAS KB						
11	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.225	365.187.000,00	311.900.000,00	3,57
12	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	75.240.000,00	75.240.000,00	100,00
DINAS KESEHATAN						
13	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Seluruh anak usia 6-23 bulan mendapat makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	48	23.664.000,00	23.664.000,00	100,00
14	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Terlaksananya anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	100	9.680.000,00	9.680.000,00	100,00
15	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	100	43.905.000,00	43.905.000,00	100,00
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Terlaksananya anak berusia di bawah lima tahun (balita) dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	85	114.240.000,00	114.240.000,00	100,00
17	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86	145.200.000,00	145.200.000,00	100,00
18	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	85	118.528.000,00	118.528.000,00	100,00
19	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	80	101.617.355,00	101.617.355,00	100,00
DINAS PERIKANAN						

No.	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Realisasi Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
20	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Persentase penyediaan dan penyaluran bahan baku pengolahan ikan	16	318.079.988,00	278.079.988,00	3,65
21	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan	2	254.864.375,00	254.864.375,00	100,00
22	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Persentase penyediaan dan penyaluran bahan baku pengolahan ikan	16	179.840.000,00	159.840.000,00	88,88
23	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Persentase penyediaan dan penyaluran bahan baku pengolahan ikan	3	900.000.000,00	767.798.179,00	3,56
24	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	7	840.000.000,00	839.822.974,00	99,98
DINAS KB						
25	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	75.240.000,00	75.240.000,00	100,00
26	Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	75.240.000,00	75.240.000,00	100,00
DINAS PERTANIAN						
27	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00

No.	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Realisasi Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
28	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Persentase Hasil Pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	945.000.000,00	931.639.500,00	4,12
29	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Persentase Hasil Pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	135.252.000,00	135.252.000,00	100,00
30	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	0	19.000.000,00	-	0,00
DINAS PU / CIPTA KARYA						
31	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Jumlah Penambahan Sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1	200.000.000,00	199.722.500,00	99,86
32	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1	22.750.000,00	22.664.500,00	99,62
33	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1	120.000.000,00	65.939.775,00	54,95
34	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1	120.000.000,00	119.933.400,00	99,94
35	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1	120.000.000,00	119.877.800,00	99,90
36	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1	120.000.000,00	119.789.000,00	99,82

No.	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Realisasi Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
37	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1	120.000.000,00	119.796.200,00	99,83
38	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1	120.000.000,00	119.900.000,00	99,92
DINAS KETAHANAN PANGAN						
39	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten / Kota	400	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
DINAS SOSIAL						
40	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten	9.351	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00
41	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten	9.351	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
42	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten	9.351	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
DINAS KB						
43	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	40.000.000,00	10.610.000,00	1,12
44	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	40.000.000,00	10.610.000,00	1,12
DINAS KESEHATAN						
45	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Terlaksananya desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	80	36.672.000,00	36.672.000,00	100,00

No.	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Realisasi Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
46	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	Terlaksana desa mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	100	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
47	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	Terlaksana Desa tebebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	76	86.453.000,00	86.453.000,00	100,00
48	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	Terlaksana sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	100	3.905.000,00	3.905.000,00	100,00
49	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	terlaksana sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	100	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00
DINAS KB						
50	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	2	80.000.000,00	61.025.000,00	3,19
DINAS KESEHATAN						
51	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	Tersediannya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	100	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
52	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	112	16.170.000,00	16.170.000,00	100,00

No.	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Realisasi Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
53	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	112	40.956.400,00	40.956.400,00	100,00
54	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	82	0,00	0,00	0,00
55	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	82	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
56	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	82	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
57	Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting	jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	112	16.170.000,00	16.170.000,00	100,00
58	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	82	16.170.000,00	16.170.000,00	100,00
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						

No.	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Realisasi Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
59	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	270	113.026.990,00	113.026.990,00	100,00
60	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	83	171.707.750,00	171.707.750,00	100,00
DINAS KB						
61	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	75.240.000,00	75.240.000,00	100,00
62	Tersedianya data risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	8	342.000.000,00	235.100.000,00	68,74
63	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4	91.000.000,00	87.499.000,00	4,01
64	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30	360.000.000,00	352.440.000,00	97,90
TOTAL				8.821.125.488,00	8.292.256.316,00	3,84

3.4 Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran Negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *Mandatory Spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah. *Mandatory*

Spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi belanja daerah fungsi Pendidikan telah dialokasikan dalam pada APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2023 sebesar Rp234.112.964.501,00 dari total belanja daerah sebesar Rp819.976.733.463,00 atau 27,65%, persentase alokasi belanja daerah tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adapun realisasinya sebesar Rp218.394.697.478,00 atau 93,29%.
- b. Alokasi belanja daerah fungsi Kesehatan telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2023 sebesar Rp167.913.940.173,00 dari total belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.602.682.189.469,00 atau 27,86%, dengan presentase tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tetap konsisten dan berkomitmen untuk memprioritaskan anggaran fungsi kesehatan, walaupun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 409 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, dengan adanya ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah tidak diwajibkan lagi mengalokasikan dalam APBD atas belanja fungsi kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah setiap tahun. Adapun realisasi belanja fungsi kesehatan tahun 2023 sebesar Rp154.778.108.770,00 atau 92,18%
- c. Alokasi belanja dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp5.786.706.703 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam, yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula sebesar Rp3.560.779.663,00 atau 0,43% dari total belanja daerah; dan
 - 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat diluar belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp2.225.927.040,00 atau 0,27% dari total belanja daerah;

Alokasi anggaran ini senyatanya belum memenuhi ketentuan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo, sekurang-kurangnya paling sedikit sebesar

1,00% (satu persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 tentang Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boalemo akan berupaya untuk mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah. Kondisi ini disebabkan pada tahun 2023 Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan Hibah Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) kepada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dalam rangka pendanaan Pilkada Serentak sesuai ketentuan, sehingga fokus Pemerintah Daerah dalam APBD tahun 2023 masih diprioritaskan pada pemenuhan pendanaan dimaksud. Terkait pengalokasian anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk memaksimalkan fungsi pengawasan di tahun mendatang yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah.

- d. Alokasi Belanja Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2023 telah dialokasikan sejumlah Rp272.110.978.477,00 atau 39,04% dari APBD Kabupaten Boalemo di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan Desa sebesar Rp696.932.129.363,00, hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40,00% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dengan Realisasi belanja tahun 2023 Sebesar 97,62%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah, dari alokasi sebesar Rp310.872.566,00 terealisasi sebesar Rp94.517.300,00 atau 30,40% lebih kecil dibanding TA 2022 dari alokasi sebesar Rp562.000.000,00 terealisasi sebesar Rp561.411.000,00 atau 99,90%.
- 2) Peralatan dan Mesin, dari alokasi sebesar Rp15.104.154.437,00 terealisasi sebesar Rp15.297.638.343,00 atau 101,28% lebih kecil dibanding TA 2022 dari alokasi sebesar Rp31.802.964.672,00 terealisasi sebesar Rp29.863.665.883,00 atau 93,90%.
- 3) Gedung dan Bangunan, dari alokasi sebesar Rp29.423.723.644,00 terealisasi sebesar Rp26.560.640.766,00 atau 90,27% lebih kecil

- dibanding TA 2022 dari alokasi sebesar Rp35.363.919.880,00 terealisasi sebesar Rp31.779.801.422,00 atau 89,87%.
- 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi dari alokasi sebesar Rp87.309.051.233,00 terealisasi sebesar Rp84.290.911.827,00 atau 96,54% lebih besar dibanding TA 2022 dari alokasi sebesar Rp57.464.261.432,00 terealisasi sebesar Rp44.350.093.675,00 atau 77,18%.
 - 5) Aset Tetap Lainnya, dari alokasi sebesar Rp5.369.701.541,00 terealisasi Rp5.519.655.689,00 atau 102,79% lebih besar dibanding TA 2022 dari alokasi sebesar Rp2.893.506.734,00 terealisasi Rp2.662.810.629,00 atau 92,03%.
 - 6) Aset Lainnya Alokasi sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100%
 - 7) Belanja Pemeliharaan, dari alokasi sebesar Rp5.539.295.980,00 terealisasi sebesar Rp5.111.008.995,00 Atau 92,27%.
 - 8) Belanja Hibah, dari alokasi sebesar Rp11.895.529.976,00 terealisasi sebesar Rp16.139.480.470,00 atau 135,68%.
 - 9) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Rp117.138.649.100,00 terrealisasi sebesar Rp116.918.851.924,00 atau 99,81%.

Dari alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja infrastruktur yang belum memenuhi porsi 40% sebagaimana diuraikan di atas, dimana Pemda hanya memenuhi 39,04% dari APBD Kabupaten Boalemo diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan desa. Hal ini disebabkan keterbatasan ruang fiskal daerah untuk dapat memenuhi porsi alokasi belanja infrastruktur, serta turut dipengaruhi dengan adanya transformasi penggunaan DAU yang terbagi menjadi 2 jenis, yakni : (1) DAU yang ditentukan penggunaannya dan (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sehingga fleksibilitas penggunaan Dana Alokasi Umum ini diakui sangat berpengaruh terhadap pemenuhan anggaran infrastruktur, namun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 147 ayat (3) yang menyebutkan dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang HKPD diundangkan, namun Pemerintah Daerah ditahun mendatang akan berupaya untuk memenuhi pengalokasian anggaran tersebut sesuai amanat UU HKPD.

Sebagai gambaran untuk belanja wajib lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagi hasil dan retribusi kepada desa, dengan alokasi sebesar Rp123.044.604.100,00 dengan realisasi sebesar Rp127.667.913.625,00 atau 103,97%.
- b. Dana Alokasi Khusus Fisik, dari alokasi sebesar Rp87.852.407.000,00 terealisasi sebesar 93,36% atau Rp82.015.800.451,00.
- c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dari alokasi sebesar Rp82.699.780.512,00, terealisasi sebesar 101,62% atau Rp84.042.906.061,00.
- d. Program Dukungan Pendanaan Kesehatan dan Belanja Kesehatan Prioritas Lainnya Alokasi Dana DAU sebesar Rp1.427.095.985,00 terealisasi sebesar 100% atau Rp1.427.095.985,00.
- e. Total jenis belanja dalam APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Belanja Operasi, dari alokasi sebesar Rp563.142.528.847,00 dapat terealisasi Rp531.500.882.403,60 atau 94,38%.
 - 2) Belanja Modal, dari alokasi sebesar Rp137.537.503.421,00 dapat terealisasi sebesar Rp131.783.363.925,00 atau 95,82%.
 - 3) Belanja Tidak Terduga, dari alokasi sebesar Rp612.255.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp339.885.000,00 atau 55,51%.
 - 4) Transfer, Bantuan Keuangan, dan Bagi Hasil, dari alokasi sebesar Rp118.684.446.195,00 dapat terealisasi Rp117.126.536.527,00 atau 98,69%.

3.5 Hambatan dan Kendala

Secara umum penerimaan APBD tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan baik dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, demikian juga halnya dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum belum mencapai target.

Namun ada beberapa objek pajak dan retribusi mencapai lebih dari target namun tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap seluruh realisasi penerimaan. Adapun beberapa objek penerimaan tidak lagi dipungut disebabkan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk kedepan akan meningkatkan penerimaan pendapatan baik dari objek pajak maupun retribusi.

Selanjutnya pada Belanja Daerah, penyerapannya mencapai 94,77% dari jumlah anggaran yang ditargetkan. Tidak ada hambatan yang signifikan terhadap penyerapan belanja pada APBD Tahun 2023.

3.6 Upaya Mengatasi Hambatan dan Kendala

Pemerintah Kabupaten Boalemo telah melakukan upaya dalam mengatasi hambatan dan kendala antara lain :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan cara sosialisasi dan mendata objek objek pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo meningkatkan target pendapatan daerah yang realisasinya tercapai bahkan lebih, menggantikan Target – target pendapatan yang sudah tidak bisa di tagih akibat adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019.

BAB IV

KEBIJAKAN YANG PENTING

Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Boalemo telah disusun dan dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Boalemo nomor 49 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting dapat diuraikan sebagai berikut:

Penyajian laporan keuangan adalah untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antarentitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi khusus lainnya.

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
3. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Boalemo merupakan entitas tunggal, sedangkan entitas akuntansi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang menyusun laporan keuangan SOPD untuk dikonsolidasikan dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Laporan keuangan SOPD tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Boalemo menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan SKPD, SKPKD selaku BUD, serta Laporan Keuangan BUMD dan Laporan Keuangan BLUD.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Boalemo menyajikan saldo akun-akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan yaitu:

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah

basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

- b. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
- c. Mengacu kepada PSAP Nomor 02 dan Nomor 03 yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Boalemo tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boalemo pengertian saat diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah diperluas menjadi bukan semata-mata ditentukan saat diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah tetapi ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas atas Kas Daerah. Oleh karena itu pendapatan seperti pendapatan murni dari operasional BLUD yang dapat langsung digunakan, pendapatan dividen berupa dividen dikapitalisasi, atau penerimaan hibah berupa barang/jasa yang secara substansi merupakan pendapatan tetapi tidak pernah diterima di Kas Daerah akan diakui sebagai pendapatan dan pada saat bersamaan diakui juga belanja/pengeluaran pembiayaan berkaitan hal tersebut.
- d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Akuntansi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
- b. Pendapatan Transfer-LO;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
- d. Pendapatan Non Operasional-LO; dan
- e. Pos Luar Biasa-LO.

Pendapatan LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas, yaitu:

- a. PAD dengan mekanisme *self assessment* (retribusi, pajak hotel);
- b. PAD dengan mekanisme *official assessment* yang karena ketetapannya dibuat bersamaan dengan dilakukannya penerimaan kas (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
- c. Dana Perimbangan.

Pendapatan-LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas, yaitu:

- a. PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui sebelum penerimaan kas (pajak air bawah tanah); dan
- b. PAD dengan mekanisme *official assessment* yang diakui setelah penerimaan kas (pajak reklame).

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.7 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan beban dilakukan apabila:

- a. Beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.
- b. Beban yang diakui tidak bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah signifikan.
- c. Beban yang diakui sebelum pengeluaran kas (Beban yang didahului dengan tagihan).
- d. Beban yang diakui setelah pengeluaran kas (Beban dibayar dimuka yang telah jatuh tempo)
- e. Beban yang tidak berhubungan dengan pengeluaran kas (Non Kas) seperti Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang.

4.8 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (PSAP 02 Paragraf 7)

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.9 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. (PSAP 02 Paragraf 7). Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos lain-lain PAD yang sah.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. (PSAP 03 Paragraf 8). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
- b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (PSAP 06 paragraf 6).

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP No. 6 Paragraf 6). Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

4.13 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No. 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada Bagan Akun Standar, piutang terbagi menjadi Piutang pendapatan dan Piutang Lainnya.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian Daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Pengukuran Piutang

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - 1) Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - 2) dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; dan
 - 3) dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
- b. Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
- c. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang.

Tabel 14 Persentase Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan dan Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	≤ 1 Tahun	> 1 s.d. 3 Tahun	> 3 s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
Piutang Pendapatan	0,5 %	10%	50%	100%
Piutang Pajak	0,5 %	10%	50%	100%

Tabel 15 Persentase Perhitungan Penyisihan Piutang Selain Piutang Pendapatan dan Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	≤ 1 Bulan	> 1 s.d. 3 Bulan	> 3 s.d. 5 Bulan	> 5 Bulan
Piutang Retribusi	0,5 %	10%	50%	100%
Piutang Lainnya Selain pendapatan dan Pajak	0,5 %	10%	50%	100%

Definisi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- b. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
- c. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian

atau sebab apapun.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

4.14 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Persediaan telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 Tanggal 26 November 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo, dalam penjelasan pos ini disajikan perbandingan antara saldo persediaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (PSAP 05 Paragraf 1).

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik (periodic method) berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya

berpindah.

Pengakuan Persediaan pada akhir periode Akuntansi, dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan:

Harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
- b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan (PSAP No. 6 Paragraf 6).

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 105 Tahun 2019 Tanggal 26 November 2019 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo, dalam penjelasan pos ini disajikan perbandingan antara saldo persediaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (PSAP 07 Paragraf 4).

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pengukuran Aset Tetap

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau

harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Definisi Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).
- b. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
- c. Masa manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. (PSAP 07 Paragraf 4).

Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran Penyusutan Aset Tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	<i>Radiation Application and Non-Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Amunisi	10
1	3	2	34	Senjata Sinar	5
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	36	Rambu-Rambu	50
1	3	2	37	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	2	38	Alat Olahraga Lainnya	2
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Bangunan Fasilitas Umum	25
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Instalasi Listrik	40
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02	Barang Bercorak Lainnya	3
1	3	5	04	Aset Tetap Renovasi	5

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung sejak bulan perolehan aset tetap dan pencatatannya dilakukan dua kali setahun yakni secara semesteran. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama

Kapitalisasi Aset Tetap

Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap

- a. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).
- b. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olahraga, dan hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi;
 - 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk gedung dan bangunan dan atau pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penambahan masa manfaat setelah perolehan pertama untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Daftar Penambahan Masa Manfaat Setelah Perolehan Pertama

NO	URAIAN		RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMA				KE T
			≥20% 30%	s.d.	>30% 50%	s.d.	>50% 80%
A	PERALATAN DAN MESIN						
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	1		3		5
		Alat-Alat Besar Apung	1		2		4
		Alat-alat Bantu	1		2		3
2	Alat -alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	1		2		3
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1		2		3
		Alat Angkut Apung Bermotor	1		2		3
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1		2		3
		Alat Angkut Bermotor Udara	1		3		5
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	1		3		5
		Alat Bengkel Tak Bermesin	0		1		2
		Alat Ukur	0		1		2
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	0		1		2
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0		1		2
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	0		1		2
		Alat Rumah Tangga	0		1		2
		Komputer	0		1		2
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0		1		2
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	0		1		2
		Alat Komunikasi	0		1		2
		Peralatan Pemancar	0		1		2
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran	0		1		2
		Alat Kesehatan	0		1		2
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	0		1		2
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	0		1		2
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0		1		2
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0		1		2
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0		1		2
		Radiation Application and Non-Destructive	0		1		2

NO	URAIAN	RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMA						KE T
			≥20% 30%	s.d.	>30% 50%	s.d.	>50% 80%	
		Testing Laboratory (BATAM)						
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0		1		2	
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0		1		2	
9	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	Senjata Api	1		3		4	
		Persenjataan Non Senjata Api	0		1		2	
		Amunisi	0		1		2	
		Senjata Sinar	0		1		2	
		Alat Keamanan dan Perlindungan	0		1		2	
B	GEDUNG DAN BANGUNAN							
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5		10		15	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5		10		15	
		Bangunan Menara	5		10		15	
2	Monumen	Bangunan Bersejarah	5		10		15	
		Tugu Peringatan	5		10		15	
		Candi	5		10		15	
		Monumen/Bangunan Bersejarah	5		10		15	
		Tugu Peringatan	5		10		15	
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	5		10		15	
		Rambu-Rambu	5		10		15	
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5		10		15	
		Bangunan Fasilitas Umum	5		10		15	
C	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN							
1	Jalan dan Jembatan	Jalan	1		3		5	
		Jembatan	1		3		5	
2	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi	2		5		10	
		Bangunan Air Pasang Surut	2		5		10	
		Bangunan Air Rawa	2		5		10	
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	2		3		5	

NO	URAIAN	RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMA						KE T
		>20% 30%	s.d.	>30% 50%	s.d.	>50% 80%	s.d.	
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2	4	8			
		Bangunan Air Bersih/Baku	2	4	8			
		Bangunan Air Kotor	2	4	8			
		Bangunan Air	2	4	8			
3	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih	2	4	8			
		Instalasi Air Kotor	2	4	8			
		Instalasi Pengolahan Sampah	2	3	5			
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	2	3	5			
		Instalasi Pembangkit Listrik	2	5	10			
		Instalasi Gardu Listrik	2	5	10			
		Instalasi Pertahanan	2	4	8			
		Instalasi Gas	2	4	8			
		Instalasi Pengaman	2	3	5			
		Instalasi Listrik	2	5	10			
4	Jaringan	Jaringan Air Minum	2	4	8			
		Jaringan Listrik	2	5	10			
		Jaringan Telepon	2	3	5			
		Jaringan Gas	2	4	8			

4.17 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- Digunakan untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau
- Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan properti investasi diakui jika dan hanya jika:

- Biaya perolehan dapat diukur dengan andal.
- Manfaat ekonomi mengalir ke entitas.

Secara khusus Pemerintah Kabupaten Boalemo belum mengatur tentang Properti Investasi sebagaimana penjelasan diatas, tetapi dalam prakteknya Pemerintah Kabupaten Boalemo telah melakukan identifikasi terkait hal tersebut

dan telah diungkap ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 18 Aset Tetap Yang Disewakan

Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)	Dokumen Perjanjian	Masa Perjanjian	Pendapatan yang diperoleh (Rp)
Gedung dan Bangunan	474.984.000,00	05/A/TLMT/IX/2020 970/PKS-BOALEMO/IX/2020	5 Tahun	75.000.000,00
Gedung dan Bangunan	542.700.000,00	02/A/PKS-TLMT/III/2023 23/04/PKS/III/2023	5 Tahun	125.000.000,00

4.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (PSAP 09 paragraf 5).

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Kewajiban Jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:

- Utang Dalam Negeri;
- Utang Luar Negeri; dan
- Utang Jangka Panjang Lainnya.

4.19 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD/BLUD sebagai entitas akuntansi.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seluruh angka anggaran dalam penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran di bawah ini adalah angka-angka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023.

5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan Daerah - LRA

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo TA 2023 ditargetkan sebesar Rp789.298.821.774,00 dengan realisasi hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp795.109.891.976,97 atau 100,74%. Nilai Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.478.564.628,73 atau 3,85% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp765.631.327.348,24.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp70.432.804.771,97 atau 92,16%. Nilai Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.921.691.656,53 atau 65,68% dibanding dengan realiasi Tahun 2022 sebesar Rp42.511.113.115,44. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp724.257.090.105,00 atau 101,60%. Nilai Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.694.978.110,00 atau 1,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp711.562.111.995,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp419.997.100,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.138.105.137,80 atau 96,37% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.558.102.237,80.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 76.427.488.262,00	Rp 70.432.804.771,97	92,16	Rp 42.511.113.115,44	65,68
Pendapatan Transfer	Rp 712.871.333.512,00	Rp 724.257.090.105,00	101,60	Rp 711.562.111.995,00	1,78
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 0,00	Rp 419.997.100,00	0,00	Rp 11.558.102.237,80	(96,37)
Jumlah	Rp 789.298.821.774,00	Rp 795.109.891.976,97	100,74	Rp 765.631.327.348,24	3,85

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 sebesar Rp70.432.804.771,97 atau 92,16% dari anggaran yang ditetapkan APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp76.427.488.262,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp42.511.113.115,44 mengalami kenaikan sebesar Rp27.921.691.656,53 atau 65,68%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, uraian lebih lanjut atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pendapatan Pajak Daerah -LRA	Rp 10.913.012.729,00	Rp 7.817.681.452,25	71,64	Rp 6.707.510.440,00	16,55
Retribusi Daerah	Rp 2.444.944.030,00	Rp 2.599.421.824,00	106,32	Rp 4.844.139.560,00	(46,34)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp 8.478.040.721,00	Rp 8.478.040.721,00	100,00	Rp 5.712.369.797,00	48,42
Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 54.591.490.782,00	Rp 51.537.660.774,72	94,41	Rp 25.247.093.318,44	104,13
Jumlah	Rp 76.427.488.262,00	Rp 70.432.804.771,97	92,16	Rp 42.511.113.115,44	65,68

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.817.681.452,25 atau 71,64% dari anggarannya sebesar Rp10.913.012.729,00, dengan demikian realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 tidak mencapai target sebesar Rp3.095.331.276,75 atau 28,36%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.110.171.012,25 atau 16,55% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang mencapai Rp6.707.510.440,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pajak Hotel - LRA	Rp 762.198.981,00	Rp 152.487.177,00	20,01	Rp 137.123.371,00	11,20
Pajak Restoran - LRA	Rp 949.400.000,00	Rp 686.105.205,25	72,27	Rp 1.125.888.290,00	(39,06)
Pajak Hiburan - LRA	Rp 5.629.244,00	Rp 3.200.000,00	56,85	Rp 10.012.500,00	(68,04)
Pajak Reklame - LRA	Rp 277.762.500,00	Rp 283.613.553,00	102,11	Rp 316.662.765,00	(10,44)
Pajak Penerangan Jalan - LRA	Rp 4.200.000.000,00	Rp 3.881.182.065,00	92,41	Rp 3.546.892.866,00	9,42
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	Rp 37.760.000,00	Rp 4.176.000,00	11,06	Rp 5.000.000,00	(16,48)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	Rp 1.008.920.000,00	Rp 1.355.608.828,00	134,36	Rp 281.725.000,00	381,18
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	Rp 1.346.904.644,00	Rp 1.250.513.571,00	92,84	Rp 1.099.535.075,00	13,73
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB-LRA	Rp 2.324.437.360,00	Rp 200.795.053,00	8,64	Rp 184.670.573,00	8,73
Jumlah	Rp 10.913.012.729,00	Rp 7.817.681.452,25	71,64	Rp 6.707.510.440,00	16,55

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp7.817.681.452,25 atau 71,64% dari anggarannya sebesar Rp10.913.012.729,00. Yang terdiri dari :

1. Pendapatan Pajak Hotel realisasi sebesar Rp152.487.177,00 yaitu 20,01% dari target anggaran Rp762.198.981,00 yang mengalami kenaikan dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar 11,20%;
2. Pendapatan Pajak Restoran realisasi sebesar Rp686.105.205,25 yakni 72,27% dari target anggaran Rp949.400.000,00, yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 39,06%;
3. Pendapatan Pajak Hiburan realisasi sebesar Rp3.200.000,00 yaitu 56,85% dari target anggaran Rp5.629.244,00, yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 68,04%;
4. Pendapatan Pajak Reklame realisasi sebesar Rp283.613.553,00 yaitu 102,11% dari target anggaran Rp277.762.500,00, yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,44%;
5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp3.881.182.062.065,00 yaitu 92,41% dari target anggaran Rp4.200.000.000,00, yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,42%;
6. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet realisasi sebesar Rp4.176.000,00 yaitu 11,06% dari target anggaran Rp37.760.000,00, yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 16,48%;
7. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi sebesar Rp1.355.608.828,00 yaitu 134,36% dari target anggaran Rp1.008.920.000,00, yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 381,18%;
8. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan realisasi sebesar Rp1.250.513.571,00 yaitu 92,84% dari target anggaran Rp1.346.904.644,00, yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 13,73%; dan
9. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB realisasi sebesar Rp200.795.053,00 yaitu 8,64% dari target anggaran Rp2.324.437.360,00, yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,73%.

Berdasarkan pada tabel diatas terdapat beberapa objek pajak dengan realisasi yang dicapai jauh dari target yang dianggarkan seperti Pajak Hotel disebabkan menurunnya kapasitas tamu untuk setiap penginapan dan hotel yang ada, Pajak restoran realisasi tidak sesuai target anggaran sebab pendapatan rumah makan yang menurun, realisasi Pajak Hiburan juga tidak mencapai target anggaran sebab bukan merupakan kegiatan rutin dan hanya pada waktu-waktu tertentu, realisasi pajak sarang burung walet tidak mencapai target anggaran sebab pemungutan hanya berdasarkan transaksi penjualan para pemilik sarang burung walet yang dikenakan pajak 2% dari total transaksi yang dilakukan, realisasi BPHTB yang tidak mencapai target anggaran yang ditujukan untuk perusahaan terkendala oleh pengurusan ijin atas perusahaan tersebut sehingga target tidak tercapai.

Berdasarkan atas beberapa kendala dan penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan maka Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Bidang Pendapatan daerah Kabupaten Boalemo diharapkan dapat mencari peluang sumber-sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan pencapaian target pendapatan daerah yakni melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berupa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp2.599.421.824,00 atau 106,32% dari target Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.444.944.030,00. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah mencapai target sebesar Rp154.477.794,00 atau 6,32%. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.244.717.736,00 atau 46,34% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.844.139.560,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	Rp 720.016.750,00	Rp 782.360.142,00	108,66	Rp 2.705.677.066,00	(71,08)
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	Rp 121.440.000,00	Rp 152.608.000,00	125,67	Rp 3.838.000,00	3.876,24
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	Rp 765.600.000,00	Rp 577.600.000,00	75,44	Rp 846.783.500,00	(31,79)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 186.612.500,00	(100,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 3.500.000,00	(100,00)
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 6.625.000,00	(100,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	Rp 0,00	Rp 22.288.000,00	0,00	Rp 94.920.000,00	(76,52)
Jumlah Retribusi Jasa Umum	Rp 1.607.056.750,00	Rp 1.534.856.142,00	95,51	Rp 3.847.956.066,00	(60,11)

2. Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	Rp 148.287.500,00	Rp 281.637.500,00	189,93	Rp 175.830.000,00	60,18
Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan - LRA	Rp 78.000.000,00	Rp 52.800.000,00	67,69	Rp 31.500.000,00	67,62
Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	Rp 110.880.000,00	Rp 113.559.550,00	102,42	Rp 230.280.925,00	(50,69)
Retribusi Terminal - LRA	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 168.800.000,00	(100,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA	Rp 321.748.000,00	Rp 330.665.000,00	102,77	Rp 239.738.000,00	37,93
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Rp 658.915.500,00	Rp 778.662.050,00	118,17	Rp 846.148.925,00	(7,98)

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung - LRA	Rp 178.971.780,00	Rp 285.903.632,00	159,75	Rp 150.034.569,00	90,56
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 178.971.780,00	Rp 285.903.632,00	159,75	Rp 150.034.569,00	90,56
Jumlah Retribusi Daerah	Rp 2.444.944.030,00	Rp 2.599.421.824,00	106,32	Rp 4.844.139.560,00	(46,34)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1.534.856.142,00 atau 95,51% dari target sebesar Rp1.607.056.750,00. mengalami penurunan sebesar Rp2.313.099.924,00 atau 60,11% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.847.956.066,00. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target sebesar Rp72.200.608,00 atau 4,49%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Anggaran Retribusi Jasa Usaha ditetapkan sebesar Rp658.915.500,00 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp778.662.050,00 atau 118,17%, dengan demikian realisasi retribusi jasa usaha mencapai target sebesar Rp119.746.550,00 atau 18,17%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp67.486.875,00 atau 7,98% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp846.148.925,00. kalau dilihat pada tabel diatas bahwa retribusi jasa usaha mencapai target walaupun ada obyek retribusi jasa usaha yang belum mencapai target yaitu retribusi pasar Grosir dan / atau Pertokoan, Untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Bidang Pendapatan Daerah tetap mendorong untuk lebih meningkatkan dalam pencapaian target retribusi jasa usaha.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp178.971.780,00 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2023 mencapai Rp285.903.632,00 atau 159,75% dengan demikian realisasi retribusi perizinan tertentu mencapai target sebesar Rp106.931.852,00 atau 59,75%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp135.869.063,00 atau 90,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp150.034.569,00.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik	Rp 8.478.040.721,00	Rp 8.478.040.721,00	100,00	Rp 5.712.369.797,00	48,42
Jumlah	Rp 8.478.040.721,00	Rp 8.478.040.721,00	100,00	Rp 5.712.369.797,00	48,42

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boalemo pada PT Bank SulutGo. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.478.040.721,00 atau 100% dari target yang dianggarkan sebesar Rp8.478.040.721,00, dengan demikian realisasi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal mencapai target 100%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.765.670.924,00 atau 48,42% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 tercatat sebesar Rp5.712.369.797,00. Realisasi Bagian laba atas Penyertaan Modal sebesar Rp8.478.040.721,00 merupakan pendapatan Dividen tunai atas Laba PT Bank SulutGo Tahun 2022, sesuai surat PT Bank SulutGo Nomor 084./A/AKT/DIR/II/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Perihal Posisi Modal disetor setelah RUPS 09 Februari 2023.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah - LRA

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp51.901.319.834,38 atau 95,07% dari target yang anggarkan Tahun 2023 sebesar Rp54.591.490.782,00, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tidak mencapai target sebesar Rp2.690.170.947,62 atau 4,93%, Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp26.654.226.515,94 atau 105,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 tercatat sebesar Rp25.247.093.318,44 untuk lebih jelas dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 379.290.700,00	(100,00)
Penerimaan Jasa Giro - LRA	Rp 4.618.209.396,00	Rp 782.223.308,00	16,94	Rp 1.330.806.035,00	(41,22)
Pendapatan Bunga - LRA	Rp 2.500.000.000,00	Rp 679.374.023,66	27,17	Rp 164.832.437,92	312,16
Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA	Rp 5.000.000.000,00	Rp 3.434.954.156,06	68,70	Rp 3.631.435.050,52	(5,41)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 1.258.510.110,00	(100,00)
Pendapatan Dari Pengembalian	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	0,00	Rp 1.200.443,00	(100,00)
Pendapatan BLUD - LRA	Rp 24.000.000.000,00	Rp 28.629.487.295,34	119,29	Rp 18.481.018.542,00	54,91
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LRA	Rp 18.423.281.386,00	Rp 18.011.621.991,66	97,77	Rp 0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

JUMLAH	Rp	54.591.490.782,00	Rp	51.537.660.774,72	94,41	Rp	25.247.093.318,44	104,13

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp51.537.660.774,72 atau 94,41% dari target yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp54.591.490.782,00 secara keseluruhan tidak mencapai target, untuk itu kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo akan lebih meningkatkan pencapaian target pada obyek-obyek penerimaan Lain-lain PAD yang sah melalui bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.

Pada tabel di atas diketahui bahwa terdapat pula Realisasi penerimaan yang berasal dari pendapatan BLUD sebesar Rp47.005.217.438,66 atau 109,94% dari target yang dianggarkan Tahun 2023 sebesar Rp42.423.281.386,00, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif sejak Tahun 2012, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang **Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah,

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tanpa harus disetor ke Kas Daerah.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp42.423.281.386,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.641.109.287,00 atau 110,80%, dengan demikian realisasi Pendapatan BLUD telah melampaui target sebesar Rp4.581.936.052,66 atau 10,80 %. BLUD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo yaitu BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSUD-TN) dan BLUD dari Jasa Layanan merupakan BLUD yang baru dibentuk pada Tahun 2023 yang terdiri dari Rumah Sakit Dr. Iwan Bokings dan 11 (sebelas) Puskesmas yang tersebar pada 7 (tujuh) Kecamatan. Pendapatan BLUD RSUD-TN dari target Anggaran sebesar Rp24.000.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp28.993.595.447,00 atau 120,81%, dan BLUD dari Jasa Layanan pada RSIB dan 11 (sebelas) Puskesmas dari target yang dianggarkan sebesar Rp18.423.281.386,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp17.647.513.840,00 atau 95,79%

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi baik peruntukannya sudah ditentukan maupun bebas digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 yang diterima mencapai Rp724.257.090.105,00 atau 101,60% dari anggarannya sebesar Rp712.871.333.512,00, dengan demikian realisasi Pendapatan Transfer mencapai target sebesar Rp11.385.756.593,00 atau 1,60% dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.694.978.110,00 atau 1,78% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp711.562.111.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	Rp 687.484.333.512,00	Rp 701.030.290.389,00	101,97	Rp 687.265.248.753,00	2,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 25.387.000.000,00	Rp 23.226.799.716,00	91,49	Rp 24.296.863.242,00	(4,40)
Jumlah	Rp 712.871.333.512,00	Rp 724.257.090.105,00	101,60	Rp 711.562.111.995,00	1,78

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp618.628.103.989,00 atau 100,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp614.767.308.512,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp604.673.639.020,00, menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp13.954.464.969,00 atau 2,31%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp614.767.308.512,00 tidak semuanya mencapai target. Adapun Dana Perimbangan yang melebihi target yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp5.906.184.000,00, realisasi mencapai Rp11.080.425.563,00 atau 187,61%. Kemudian Dana Alokasi Khusus Fisik yang ditargetkan sebesar Rp87.852.407.000,00 dengan realisasi mencapai Rp82.015.800.451,00 atau 93,36%. Realisasi DAK Non Fisik sebagian mencapai target namun dibagian lain tidak mencapai target seperti Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, BOP PAUD, BOS Reguler dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Pengawasan Obat dan Makanan, BOKKB. Transfer Pemerintah Pusat merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
DANA PERIMBANGAN	Rp 614.767.308.512,00	Rp 618.628.103.989,00	100,63	Rp 604.673.639.020,00	2,31

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL (DBH)	Rp 5.906.184.000,00	Rp 11.080.425.563,00	187,61	Rp 12.074.505.288,00	(8,23)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 1.753.352.000,00	Rp 2.478.287.946,00	141,35	Rp 7.301.103.202,00	(66,06)
Bagi Hasil dari PPh Ps1 21 - LRA	Rp 2.030.002.000,00	Rp 2.324.480.665,00	114,51	Rp 2.553.028.157,00	(8,95)
Bagi Hasil dari PPh 25, PPh 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri - LRA	Rp 106.148.000,00	Rp 115.774.698,00	109,07	Rp 207.705.097,00	(44,26)
Bagi Hasil Cukai Tembakau - LRA	Rp 0,00	Rp 4.700,00	0,00	Rp 2.871,00	63,71
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara - Landrenti	Rp 86.000,00	Rp 120.918,00	140,60	Rp 2.128.961,00	(94,32)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp 94.629.000,00	Rp 4.028.019.225,00	4.256,64	Rp 52.226.000,00	7.612,67

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	Rp 1.921.967.000,00	Rp 2.133.737.411,00	111,02	Rp 1.958.311.000,00	8,96
Dana Alokasi Umum (DAU) LRA	Rp 438.308.937.000,00	Rp 441.488.971.914,00	100,73	Rp 421.966.077.434,00	4,63
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 87.852.407.000,00	Rp 82.015.800.451,00	93,36	Rp 98.950.869.976,00	(17,11)
DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler	Rp 14.741.298.000,00	Rp 12.331.035.000,00	83,65	Rp 35.225.289.707,00	(64,99)
DAK Fisik Bidang Kesehatan - Reguler	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 3.521.097.646,00	(100,00)
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI dan AKB	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 5.382.986.550,00	(100,00)
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler KB Pengendalian Penyakit	Rp 687.784.000,00	Rp 595.764.000,00	86,62	Rp 551.145.750,00	8,10
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan	Rp 2.079.980.000,00	Rp 2.078.000.000,00	99,90	Rp 0,00	0,00
DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	Rp 7.209.373.000,00	Rp 6.550.863.705,00	90,87	Rp 4.439.572.593,00	47,56
DAK Fisik Bidang Jalan - Reguler - Penugasan Jalan	Rp 58.935.426.000,00	Rp 56.898.656.200,00	96,54	Rp 28.797.716.000,00	97,58
DAK Bidang Air Minum - Penugasan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 6.265.841.717,00	(100,00)
DAK Bidang Sanitasi - Penugasan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 5.353.820.192,00	(100,00)
DAK Fisik Bidang Irigasi - Penugasan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 6.298.662.750,00	(100,00)
DAK Bidang Pertanian - LRA	Rp 4.198.546.000,00	Rp 3.561.481.546,00	84,83	Rp 3.114.737.071,00	14,34
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 82.699.780.512,00	Rp 84.042.906.061,00	101,62	Rp 71.682.186.322,00	17,24
DAK NON FISIK-BOS REGULER	Rp 17.914.336.098,00	Rp 18.436.658.181,00	102,92	Rp 19.395.020.263,00	(4,94)
DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Rp 2.515.000.000,00	Rp 2.515.000.000,00	100,00	Rp 0,00	0,00
DAK Non Fisik - TPG - PNSD	Rp 35.882.667.000,00	Rp 35.628.592.000,00	99,29	Rp 33.132.135.700,00	7,53
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	Rp 1.140.000.000,00	Rp 1.897.500.000,00	166,45	Rp 1.155.000.000,00	64,29
DAK Non Fisik - TKG PNSD	Rp 2.815.076.000,00	Rp 2.837.333.000,00	100,79	Rp 2.430.150.225,00	16,76
DAK Non Fisik BOP PAUD	Rp 4.558.720.000,00	Rp 4.716.503.833,00	103,46	Rp 4.492.339.000,00	4,99
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp 186.820.000,00	Rp 466.315.682,00	249,61	Rp 325.000.000,00	43,48
DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Rp 13.469.044.763,00	Rp 3.200.706.714,00	23,76	Rp 10.034.666.134,00	(68,10)
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 178.374.000,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	Rp 0,00	Rp 10.743.354.000,00	0,00	Rp 0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Rp 0,00	Rp 2.192.286.096,00	0,00	Rp 0,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp 466.234.785,00	Rp 466.234.785,00	100,00	Rp 328.375.300,00	41,98
DAK Non Fisik - BOKB - KB	Rp 2.631.086.096,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rp 433.537.770,00	Rp 433.537.770,00	100,00	Rp 0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp 508.884.000,00	Rp 508.884.000,00	100,00	Rp 389.499.700,00	30,65

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Daerah (DID) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kriteria Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo yaitu karena tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5.202.254.000,00 dengan realisasi Tahun 2022 mencapai Rp5.202.254.000,00 atau 100%. Pada tahun 2023, Dana Insentif Daerah berubah menjadi Dana Insentif Fiskal.

Dana Insentif Fiskal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dana Insentif Fiskal adalah Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal. Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di Tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. Dana Insentif Fiskal Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp9.867.253.000,00 Dana tersebut tidak ditargetkan dalam APBD Perubahan karena Dana tersebut masuk ke Kas Daerah setelah APBD Perubahan di Sahkan oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Boalemo. Realisasi Dana Insentif Fiskal tahun 2023 sebesar Rp9.867.253.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.664.999.000,00 atau 89,67% dari realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2022 sebesar Rp5.202.254.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Dana Insentif Fiskal	Rp 0,00	Rp 9.867.253.000,00	0,00	Rp 5.202.254.000,00	89,67
JUMLAH DANA INSENTIF DAERAH	Rp 0,00	Rp 9.867.253.000,00	0,00	Rp 5.202.254.000,00	89,67

5.1.1.2.1.3 Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp72.534.933.400,00 atau 99,75% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp72.717.025.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.854.422.333,00 atau 6,27% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp77.389.355.733,00. Dana Desa merupakan transfer yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo atas pengalokasian Dana Desa Tahun 2023 namun Dana Desa tidak ditransfer ke Kas Daerah melainkan ditransfer langsung ke Rekening masing-masing bendahara Dana Desa melalui KPPN Marisa dan telah tersalurkan ke desa-desa di Kabupaten Boalemo.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Dana Desa	Rp 72.717.025.000,00	Rp 72.534.933.400,00	99,75	Rp 77.389.355.733,00	(6,27)
Dana Desa	Rp 72.717.025.000,00	Rp 72.534.933.400,00	99,75	Rp 77.389.355.733,00	(6,27)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 687.484.333.512,00	Rp 701.030.290.389,00	101,97	Rp 687.265.248.753,00	2,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan sebesar Rp23.226.799.716,00 atau 91,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.387.000.000,00. Penerimaan Dana Transfer Antar Daerah (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi) Tahun 2023 dengan demikian Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak mencapai target sebesar Rp2.160.200.284,00. atau 8,51%. Realisasi Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah (Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi) mengalami penurunan sebesar Rp1.070.063.526,00 atau 4,40% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp24.296.863.242,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah (Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi) terdiri dari Dana Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 25.387.000.000,00	Rp 23.226.799.716,00	91,49	Rp 24.296.863.242,00	(4,40)
Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	Rp 4.200.000.000,00	Rp 4.076.251.361,00	97,05	Rp 3.641.028.832,00	11,95
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	Rp 5.000.000.000,00	Rp 3.787.714.873,00	75,75	Rp 3.771.409.790,00	0,43
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA	Rp 12.000.000,00	Rp 4.989.476,00	41,58	Rp 6.534.059,00	(23,64)
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	Rp 7.000.000.000,00	Rp 7.495.725.750,00	107,08	Rp 7.726.533.510,00	(2,99)
Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA	Rp 9.000.000.000,00	Rp 7.687.118.256,00	85,41	Rp 9.151.357.051,00	(16,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	Rp 25.212.000.000,00	Rp 23.051.799.716,00	91,43	Rp 24.296.863.242,00	(5,12)

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan - LRA

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp175.000.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditargetkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp175.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 Bantuan keuangan tidak ada Realisasi, Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi-LRA	Rp 175.000.000,00	Rp 175.000.000,00	100,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp 175.000.000,00	Rp 175.000.000,00	100,00	Rp 0,00	0,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp419.997.100,00 dan tidak terdapat anggaran tahun 2023. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.138.105.137,80 atau 96,37% dibanding dengan realisasi Tahun 2022 tercatat sebesar Rp11.558.102.237,80 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp 0,00	Rp 419.997.100,00	0,00	Rp 11.558.102.237,80	(96,37)

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 1.500.000.000,00	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri - LRA	Rp 0,00	Rp 419.997.100,00	0,00	Rp 0,00	100,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 419.997.100,00	0,00	Rp 1.500.000.000,00	(72,00)

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Tidak terdapat realisasi maupun Anggaran Pendapatan Lainnya Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 tercatat sebesar Rp10.058.102.237,80.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pendapatan Hibah Dana BOS	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Pada FKTP	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 10.058.102.237,80	(100,00)
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 10.058.102.237,80	(100,00)

5.1.2 Belanja

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp563.142.528.847,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp531.500.882.403,60 atau 94,38%. Dengan demikian Belanja Operasi tidak mencapai target atau tidak terealisasi sebesar Rp31.641.646.443,40 atau 5,62%. Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.402.741.283,40 atau 4,22% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp554.903.623.687,00. Rincian lebih lanjut Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	Rp 325.107.729.095,00	Rp 329.257.000.657,60	101,28	Rp 326.529.165.149,00	0,84
Belanja Barang dan Jasa	Rp 226.139.269.776,00	Rp 186.104.401.276,00	82,30	Rp 226.781.428.562,00	(17,94)
Belanja Bunga	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Belanja Subsidi	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Belanja Hibah	Rp 11.895.529.976,00	Rp 16.139.480.470,00	135,68	Rp 1.593.029.976,00	913,13
Belanja Bantuan Sosial	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 563.142.528.847,00	Rp 531.500.882.403,60	94,38	Rp 554.903.623.687,00	(4,22)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp329.257.000.657,60 atau 101,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp325.107.729.095,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.727.835.508,60 atau 0,84% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp326.529.165.149,00. Kenaikan realisasi belanja Pegawai karena adanya kenaikan Pangkat dan Jabatan serta kenaikan berkala dan tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri sipil serta belanja Pegawai BLUD RSUD Tani dan Nelayan, BLUD dari Jasa Layanan seperti RSUD Dr.Iwan Bokings serta Puskesmas-puskesmas yang sudah menjadi BLUD, dan untuk belanja Pegawai Dana BOS Tahun 2023 sudah tidak dianggarkan. Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 11.422.807.945,00	Rp 10.903.007.379,00	95,45	Rp 11.076.136.480,00	(1,56)
Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 293.787.759,00	Rp 128.653.745,00	43,79	Rp 144.626.099,00	(11,04)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 217.294.543.994,00	Rp 213.379.880.030,00	98,20	Rp 204.914.752.218,00	4,13
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 43.892.855.632,00	Rp 39.877.694.251,00	90,85	Rp 53.634.722.496,00	(25,65)
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Rp 377.380.000,00	Rp 337.991.992,00	89,56	Rp 335.807.992,00	0,65
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Layanan ASN	Rp 42.698.517.952,00	Rp 41.943.630.103,00	98,23	Rp 41.484.368.248,00	1,11
Belanja Pegawai Dana BOS	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 817.645.000,00	(100,00)
Belanja Pegawai BLUD	Rp 9.127.835.813,00	Rp 22.686.143.157,60	248,54	Rp 14.121.106.616,00	60,65
Jumlah	Rp 325.107.729.095,00	Rp 329.257.000.657,60	101,28	Rp 326.529.165.149,00	0,84

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 mencapai Rp186.104.401.276,00 atau 82,30% dari anggarannya sebesar Rp226.139.269.776,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp40.677.027.286,00 atau 17,94% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp226.781.428.562,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Belanja Bahan Habis Pakai	Rp 48.957.364.189,00	Rp 42.009.083.144,00	85,81	Rp 58.180.919.755,00	(27,80)
Belanja Bahan Tak Habis Pakai	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 6.090.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Kantor	Rp 56.419.190.243,00	Rp 50.279.220.338,00	89,12	Rp 65.769.441.880,00	(23,55)
Belanja luran Jaminan Asuransi	Rp 9.451.335.824,00	Rp 5.059.669.848,00	53,53	Rp 4.485.495.680,00	12,80
Belanja Sewa Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 168.500.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp 1.100.100.000,00	Rp 982.200.000,00	89,28	Rp 1.942.329.081,00	(49,43)
Belanja Sewa Gedung dan Banqunan	Rp 4.407.345.166,00	Rp 3.826.969.999,00	86,83	Rp 4.387.958.720,00	(12,78)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp 17.250.000,00	Rp 17.200.000,00	99,71	Rp 24.500.000,00	(29,80)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp 2.094.961.813,00	Rp 1.840.509.138,00	87,85	Rp 1.747.522.550,00	5,32

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp 400.000.000,00	Rp 242.300.720,00	60,58	Rp 1.300.345.111,00	(81,37)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	Rp 574.125.684,00	Rp 527.322.912,00	91,85	Rp 1.510.926.604,00	(65,10)
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp 1.168.745.065,00	Rp 1.114.586.194,00	95,37	Rp 318.810.000,00	249,61
Belanja Pemeliharaan Tanah	Rp 25.000.000,00	Rp 24.955.000,00	99,82	Rp 92.900.000,00	(73,14)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 1.002.450.338,00	Rp 769.684.691,00	76,78	Rp 2.011.610.906,00	(61,74)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 1.051.243.485,00	Rp 880.259.428,00	83,74	Rp 2.184.205.441,00	(59,70)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 3.460.602.157,00	Rp 3.436.109.876,00	99,29	Rp 5.050.268.804,00	(31,96)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 40.939.858.343,00	Rp 36.382.786.245,00	88,87	Rp 47.917.638.797,00	(24,07)
Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 7.630.640.000,00	Rp 2.305.370.000,00	30,21	Rp 6.598.154.000,00	(65,06)
Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 308.250.000,00	Rp 303.250.000,00	98,38	Rp 295.200.000,00	2,73
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	Rp 15.073.820.826,00	Rp 16.533.659.691,00	109,68	Rp 13.904.011.563,00	18,91
Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp 32.056.986.643,00	Rp 19.569.264.052,00	61,05	Rp 8.884.599.670,00	120,26
Jumlah	Rp 226.139.269.776,00	Rp 186.104.401.276,00	82,30	Rp 226.781.428.562,00	(17,94)

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp16.139.480.470,00 atau 135,68% dari anggaran sebesar Rp11.895.529.976,00, mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp14.546.450.494,00 atau 913,13% dari realisasi Tahun 2022 yang mencapai Rp1.593.029.976,00, kenaikan tersebut disebabkan adanya beberapa bantuan belanja Hibah kepada Badan lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan mengalami kenaikan ditahun 2023. Pemerintah Kabupaten Boalemo pada Tahun 2023 telah menganggarkan Bantuan Hibah di masing-masing SOPD, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan	Rp 10.420.000.000,00	Rp 12.074.000.000,00	115,87	Rp 747.500.000,00	1.515,25
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp 730.000.000,00	Rp 130.000.000,00	17,81	Rp 100.000.000,00	30,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP	Rp 0,00	Rp 3.189.950.494,00	0,00	Rp 0,00	100,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 745.529.976,00	Rp 745.529.976,00	100,00	Rp 745.529.976,00	0,00
Jumlah	Rp 11.895.529.976,00	Rp 16.139.480.470,00	135,68	Rp 1.593.029.976,00	913,13

5.1.2.1.4 Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Bantuan Sosial	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp131.363.366.825,00 atau 95,82% dari anggaran sebesar Rp137.537.503.421,00, mengalami kenaikan sebesar Rp22.565.581.316,00 atau 20,66% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp109.217.782.609,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Belanja Modal - Tanah	Rp 310.872.566,00	Rp 94.517.300,00	30,40	Rp 561.411.000,00	(83,16)
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	Rp 15.104.154.437,00	Rp 15.297.638.343,00	101,28	Rp 29.863.665.883,00	(48,78)
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	Rp 29.423.723.644,00	Rp 26.560.640.766,00	90,27	Rp 31.779.801.422,00	(16,42)
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 87.309.051.233,00	Rp 84.290.911.827,00	96,54	Rp 44.350.093.675,00	90,06
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	Rp 5.369.701.541,00	Rp 5.519.655.689,00	102,79	Rp 2.662.810.629,00	107,29
Belanja Modal - Aset Lainnya	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	100,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 137.537.503.421,00	Rp 131.783.363.925,00	95,82	Rp 109.217.782.609,00	20,66

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp94.517.300,00 atau 30,40% dari anggaran sebesar Rp310.872.566,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp466.893.700,00 atau 85,16% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp561.411.000,00. Belanja Modal pengadaan tanah untuk Pembebasan Lahan SMPN 3 Manangu dan Pembebasan Lahan TK/Paud Paguyaman Kabupaten Boalemo rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah Persil	Rp 310.872.566,00	Rp 94.517.300,00	30,40	Rp 561.411.000,00	(83,16)
Jumlah	Rp 310.872.566,00	Rp 94.517.300,00	30,40	Rp 561.411.000,00	(83,16)

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp15.297.638.343,00 atau 101,28% dari anggaran yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar Rp15.104.154.437,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp14.566.027.540,00 atau 48,78% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp29.863.665.883,00. Nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sudah termasuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BLUD dan BOS, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
B.M. - Pengadaan Alat Bantu	Rp 2.000.000,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
B.M. - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 167.587.700,00	Rp 155.412.000,00	92,73	Rp 1.869.244.500,00	(91,69)
B.M. - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Khusus	Rp 0,00	Rp 419.997.100,00	0,00	Rp 0,00	100,00
B.M. - Pengadaan Alat Ukur	Rp 52.350.000,00	Rp 46.829.600,00	89,45	Rp 17.503.750,00	167,54
B.M. - Pengadaan Alat Pengolahan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
B.M. - Pengadaan Alat Kantor	Rp 277.801.300,00	Rp 737.557.500,00	265,50	Rp 4.265.405.040,00	(82,71)
B.M. - Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp 2.477.024.000,00	Rp 2.441.520.122,00	98,57	Rp 1.990.845.978,00	22,64
B.M. - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp 525.575.000,00	Rp 500.793.400,00	95,28	Rp 502.570.000,00	(0,35)
B.M. - Pengadaan Alat Studio	Rp 184.480.000,00	Rp 173.479.000,00	94,04	Rp 284.879.500,00	(39,10)
B.M. - Pengadaan Peralatan Pemancar	Rp 2.079.980.000,00	Rp 2.078.000.000,00	99,90	Rp 0,00	0,00
B.M. - Pengadaan Alat Kedokteran	Rp 1.053.978.329,00	Rp 642.796.504,00	60,99	Rp 4.402.554.648,00	(85,40)
B.M. - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	Rp 644.130.090,00	Rp 483.089.718,00	75,00	Rp 0,00	0,00
B.M. - Pengadaan Unit Alat Laboratorium	Rp 73.364.651,00	Rp 49.895.252,00	68,01	Rp 855.848.000,00	(94,17)
B.M. - Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah	Rp 1.861.600.000,00	Rp 2.057.322.332,00	110,51	Rp 533.526.200,00	285,61
B.M. - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 30.000.000,00	(100,00)
B.M. - Pengadaan Komputer Unit	Rp 1.755.916.800,00	Rp 1.748.726.544,00	99,59	Rp 13.872.435.180,00	(87,39)
B.M. - Pengadaan Peralatan Komputer	Rp 3.948.366.567,00	Rp 3.762.219.271,00	95,29	Rp 1.160.843.087,00	224,09
B.M. - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
B.M. - Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
B.M. - Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
B.M. - Pengadaan Alat SAR	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 10.000.000,00	(100,00)
B.M. - Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 11.900.000,00	(100,00)
B.M. - Pengadaan Peralatan Olah Raga	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 56.110.000,00	(100,00)
Jumlah	Rp 15.104.154.437,00	Rp 15.297.638.343,00	101,28	Rp 29.863.665.883,00	(48,78)

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp26.560.640.766,00 atau 90,27% dari anggaran yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar Rp29.423.723.644,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.219.160.656,00 atau 16,42% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp31.779.801.422,00. Nilai Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan sudah termasuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
B.M Bangunan Gedung Kantor	Rp 2.864.699.294,00	Rp 2.267.980.074,00	79,17	Rp 2.026.202.293,00	11,93
B.M Bangunan Kesehatan	Rp 5.120.081.250,00	Rp 5.159.352.954,00	100,77	Rp 3.197.780.785,00	61,34
B M Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 150.000.000,00	Rp 149.720.600,00	99,81	Rp 6.500.000,00	2.203,39
B.M Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp 20.418.693.100,00	Rp 18.045.282.348,00	88,38	Rp 20.879.367.950,00	(13,57)
B.M Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi / Pasar	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 398.700.000,00	(100,00)
B.M Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Rp 0,00	Rp 77.181.860,00	0,00	Rp 957.044.940,00	(91,94)
B.M Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 406.065.274,00	(100,00)
B M Bangunan Terbuka	Rp 181.000.000,00	Rp 180.817.858,00	99,90	Rp 148.842.250,00	21,48
B M Bangunan Peternakan/Perikanan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 783.509.680,00	(100,00)
B.M Bangunan Fasilitas Umum	Rp 271.250.000,00	Rp 262.587.174,00	96,81	Rp 1.357.465.950,00	(80,66)
B.M Taman	Rp 218.000.000,00	Rp 217.790.000,00	99,90	0,00	0,00
B.M Pagar	Rp 200.000.000,00	Rp 199.927.898,00	99,96	0,00	0,00
B.M Bangunan Gedung Parkir	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
B.M.Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 99.791.500,00	(100,00)
B M Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 46.400.000,00	(100,00)
B.M Tugu/Tanda Batas Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 1.472.130.800,00	(100,00)
B.M Gedung dan Bangunan BLUD	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 29.423.723.644,00	Rp 26.560.640.766,00	90,27	Rp 31.779.801.422,00	(16,42)

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) Tahun 2023 sebesar Rp84.290.911.827,00 atau 96,54% dari anggaran yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar Rp87.309.051.233,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp39.940.818.152,00 atau 90,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp44.350.093.675,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sudah termasuk Belanja Modal JIJ BLUD. Rincian Belanja Modal JIJ dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
B. M. Jalan	Rp 75.920.114.786,00	Rp 73.107.797.207,00	96,30	Rp 27.876.219.547,00	162,26
B. M. Jembatan	Rp 2.284.600.000,00	Rp 2.279.889.413,00	99,79	Rp 3.990.527.388,00	(42,87)
B. M. Bangunan Air Irigasi	Rp 1.590.019.840,00	Rp 1.589.819.840,00	99,99	Rp 4.869.362.560,00	(67,35)
B. M. Bangunan Pengaliran Pasang Surut	Rp 772.928.520,00	Rp 627.433.185,00	81,18	Rp 0,00	0,00
B. M. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp 5.852.225.900,00	Rp 5.801.968.575,00	99,14	Rp 5.317.866.180,00	9,10
B. M. Bangunan Air Bersih/Air Baku	Rp 50.000.000,00	Rp 45.389.000,00	90,78	Rp 98.530.000,00	(53,93)
B.M. Bangunan Air Kotor	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
B M Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp 18.000.000,00	Rp 17.890.000,00	99,39	Rp 399.843.000,00	(95,53)
B. M. Instalasi Pengadaan Pengolahan Sampah	Rp 675.000.000,00	Rp 674.700.000,00	99,96	Rp 0,00	0,00
B. M. Pengadaan Jaringan Pipa Gas	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 587.745.000,00	(100,00)
B. M. Bangunan Instalasi Pembangkit Listrik	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 1.210.000.000,00	(100,00)
B. M. Bangunan Instalasi Gardu Listrik	Rp 146.162.187,00	Rp 146.024.607,00	99,91	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 87.309.051.233,00	Rp 84.290.911.827,00	96,54	Rp 44.350.093.675,00	90,06

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp5.519.655.689,00 atau 102,79% dari anggaran yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar Rp5.369.701.541,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.856.845.060,00 atau 107,29% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.662.810.629,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.519.655.689,00 terdapat pada beberapa SKPD antara lain : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa B.M Bahan Perpustakaan sebesar Rp4.178.797.689,00, B.M Barang Bercorak Kesenian Rp691.558.000,00, Belanja Aset Tidak Berwujud terdiri dari Belanja di Dinas BPM-PTSP Rp49.800.000,00 dan Dinas Kesehatan berupa B.M Software Rp49.500.000,00, dan Bappeda berupa B.M Kajian Rp550.000.000,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

U R A I A N	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
B.M. Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp 4.026.701.541,00	Rp 4.178.797.689,00	103,78	Rp 1.917.264.459,00	117,96
B.M. Aset Tidak Berwujud	Rp 650.000.000,00	Rp 649.300.000,00	99,89	Rp 670.581.170,00	(3,17)
B.M. Barang Bercorak Kesenian	Rp 693.000.000,00	Rp 691.558.000,00	99,79	Rp 74.965.000,00	822,51
B.M. Aset Tetap Lainnya BOS	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

Jumlah	Rp 5.369.701.541,00	Rp 5.519.655.689,00	102,79	Rp 2.662.810.629,00	107,29

5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Terdapat Realisasi Belanja Aset Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp20.000.000,00 dan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 yang tidak terdapat realisasi belanja modal Aset Lainnya sebesar 100% dari anggaran yang targetkan tahun sebelumnya. Belanja modal Aset Tidak Berwujud-Software terdapat pada Inspektorat Daerah senilai Rp20.000.000,00.

U R A I A N	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
B.M Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud-Software	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	100,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	100,00	Rp 0,00	0,00

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp339.885.000,00 atau 55,51% dari anggaran yang ditargetkan Tahun 2023 sebesar Rp612.255.000,00 dengan demikian realisasi belanja tak Terduga tidak mencapai target sebesar Rp272.370.000 atau 44,49%.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Belanja Tak Terduga	Rp 612.255.000,00	Rp 339.885.000,00	55,51	Rp 2.083.119.354,00	(83,68)
Jumlah	Rp 612.255.000,00	Rp 339.885.000,00	55,51	Rp 2.083.119.354,00	(83,68)

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp612.255.000,00 digunakan untuk sebagai berikut:

1. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahap I Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Kekeringan Di
Rp 200.565.000,00
2. Pembayaran Belanja Tidak Terduga tahap II Atas Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023
Rp 139.320.000,00

Jumlah Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023

Rp 339.885.000,00

5.1.3 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 sebesar Rp117.126.536.527,00 atau 98,69% dari anggaran yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar Rp118.684.446.195,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp3.541.377.098,00 atau 2,93% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp120.667.913.625,00. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Transfer	Rp 118.684.446.195,00	Rp 117.126.536.527,00	98,69	Rp 120.667.913.625,00	(2,93)
Jumlah	Rp 118.684.446.195,00	Rp 117.126.536.527,00	98,69	Rp 120.667.913.625,00	(2,93)

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Boalemo menganggarkan belanja bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Boalemo telah merealisasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Boalemo sebesar Rp207.684.603,00 atau 13,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.546.026.095,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp726.590.289,00 atau 77,77% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mencapai sebesar Rp934.274.892,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	Rp 1.213.234.902,00	Rp 120.457.058,00	9,93	Rp 541.879.431,00	(77,77)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa	Rp 332.791.193,00	Rp 87.227.545,00	26,21	Rp 392.395.461,00	(77,77)
Jumlah	Rp 1.546.026.095,00	Rp 207.684.603,00	13,43	Rp 934.274.892,00	(77,77)

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp116.918.851.924,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp117.138.420.100,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.814.786.809,00 atau 2,35% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp119.733.638.733,00. Transfer Bantuan Keuangan tersebut merupakan bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa baik bantuan dari APBD berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp44.421.283.100,00 dengan realisasi sebesar Rp44.383.918.524,00 atau 99,92%. Selain itu, terdapat bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa (DD) dengan anggaran sebesar Rp72.717.137.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.534.933.400,00 atau 99,75%. Dana Desa yang ditransfer Pemerintah Pusat langsung ke rekening masing-masing desa dan digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Kabupaten Boalemo, dalam rangka mendukung operasional Pemerintah Desa, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Keuangan ke Desa:					
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa	Rp 44.421.283.100,00	Rp 44.383.918.524,00	99,92	Rp 42.252.003.000,00	5,05
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa	Rp 72.717.137.000,00	Rp 72.534.933.400,00	99,75	Rp 77.481.635.733,00	(6,38)
Jumlah	Rp 117.138.420.100,00	Rp 116.918.851.924,00	99,81	Rp 119.733.638.733,00	(2,35)

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

5.1.4 Surplus / (Defisit)

Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo mengalami surplus sebesar Rp14.359.224.121,37 atau 46,81% dari anggaran defisit yang ditetapkan sebesar Rp30.677.911.689,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp35.600.336.048,13 atau 167,60% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 defisit sebesar Rp21.241.111.926,76.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Total Pendapatan	Rp 789.298.821.774,00	Rp 795.109.891.976,97	100,74	Rp 765.631.327.348,24	3,85
Total Belanja dan Transfer	Rp 819.976.733.463,00	Rp 780.750.667.855,60	95,22	Rp 786.872.439.275,00	(0,78)
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (30.677.911.689,00)	Rp 14.359.224.121,37	(46,81)	Rp (21.241.111.926,76)	(167,60)

5.1.5 Pembiayaan

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

5.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2023 yang berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp30.677.911.688,79 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp30.677.911.689,00. Penggunaan SiLPA mengalami penurunan sebesar Rp22.741.111.926,76 atau 42,57% dari realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp53.419.023.615,57, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 30.677.911.689,00	Rp 30.677.911.688,79	100,00	Rp 53.419.023.615,55	(42,57)
Koreksi SiLPA (Lain-lain)	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Koresi SiLPA Tahun Sebelumnya	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 30.677.911.689,00	Rp 30.677.911.688,79	100,00	Rp 53.419.023.615,55	(42,57)

5.1.5.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Tidak terdapat Realisasi Pencairan Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pencairan Dana Cadangan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

5.1.5.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tidak terdapat Realisasi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

5.1.5.1.4 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Tidak terdapat Realisasi Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

5.1.5.1.5 Penerimaan Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Penerimaan Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Penerimaan Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

5.1.5.2.1 Pembentukan Dana

Tidak terdapat Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2023.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pembentukan Dana Cadangan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

5.1.5.2.2 Penyertaan Modal

Tidak terdapat Realisasi Pengeluaran pembiayaan dalam Tahun 2023.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Penyertaan Modal Pemda	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 1.500.000.000,00	62,50

Kepada Pemerintah Daerah

Tidak terdapat Realisasi Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00	0,00

5.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA atau sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp45.037.135.810,16** dan mengalami kenaikan sebesar Rp14.359.224.121,37 atau 46,81% dibandingkan dengan realisasi sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun 2022 yang mencapai Rp30.677.911.688,79.

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 0,00	Rp 45.037.135.810,16	0,00	Rp 30.677.911.688,79	46,81

Rincian SiLPA dapat diuraikan sebagai berikut :

Sisa DAU (BG)	: Rp	3.197.822.000,00
Sisa DAU (SG)	: Rp	3.949.163.262,00
Sisa DAU (PPPK)	: Rp	11.225.946.119,97
Sisa DAK Fisik	: Rp	2.327.860.537,70
Sisa DAK Non Fisik	: Rp	2.683.902.347,00
Sisa DID	: Rp	1.261.771.210,00
Sisa Dana Insentif Fiskal	: Rp	9.867.253.000,00
Sisa Dana Bagi Hasil	: Rp	3.927.743.000,00
Sisa PAD	: Rp	449.092,00
Sisa Bantuan Hibah Provinsi	: Rp	26.493.000,00
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp	8.209.000,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp	985.206,00
Sisa Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	: Rp	3.932.536.278,00
Sisa Kas di Bendahara FKTP	: Rp	0,00
Sisa Kas di Bendahara Dana BOSP	: Rp	1.912.862.496,00
Sisa Kas di Bendahara Dana BOK	: Rp	868.843.052,99
Sisa Kas Lainnya	: Rp	39.164.345,00
Sisa Pajak Yang Belum disetor	: Rp	(193.868.136,50)
	Rp	45.037.135.810,16

5.2 PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Nilai Laporan Perubahan SAL Tahun 2023 sebesar **Rp45.037.135.810,16** dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya sebesar **Rp 30.677.911.688,79**

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar **Rp 30.677.911.688,79**

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA Tahun 2023 sebesar **Rp 45.037.135.810,16** tersebut sudah termasuk saldo Kas di:

1. Kas di Kas Daerah.....	Rp	38.468.403.568,67
2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	Rp	8.209.000,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar.....	Rp	985.206,00
4. BLUD RSUD-TN per 31 Desember 2023 sebesar.....	Rp	3.932.536.278,00
5. Kas di Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2023	Rp	1.912.862.496,00
6. Kas Dana BOSP Tahun 2023 sebesar.....	Rp	868.843.052,99
7. Kas Lainnya sebesar.....	Rp	39.164.345,00
8. Setara Kas sebesar.....	Rp	0,00
9. Pajak PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	(193.868.136,50)

adapun rincian SiLPA sebagai berikut :

- Surplus/Defisit Anggaran	Rp	14.359.224.121,37
- Pembiayaan Netto	Rp	30.677.911.688,79
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp	45.037.135.810,16

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

5.2.5 Lain-lain

Transaksi lain-lain yang memengaruhi perubahan SAL sebesar Rp0,00.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar **Rp45.037.135.810,16** dengan perhitungan sebagai berikut :

- Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	30.677.911.688,79
- Penggunaan SiLPA TA Yang Lalu	Rp	30.677.911.688,79
Sub Total	Rp	0,00
 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	 Rp	 45.037.135.810,16
Sub Total	Rp	45.037.135.810,16
 - Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	 Rp	 0,00
- Lain-lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	45.037.135.810,16

5.3 RINCIAN DAN PENJELASAN POS NERACA

5.3.1 Aset

5.3.1.1 Aset Lancar

5.3.1.1.1 Kas

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp38.468.403.568,67 dan Rp29.730.283.696,52. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 dan saldo Tahun 2022 yang telah direkonsiliasi antara saldo buku dengan saldo rekening koran bank, terdiri atas:

U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas di Kas Daerah	Rp 38.468.403.568,67	Rp 29.730.283.696,52

Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:	NOMOR REKENING	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1. Rekening Kas Umum Daerah (Bank SulutGo Cab Tilamuta)	01501120000001	Rp 38.467.954.476,67	Rp 28.935.466.348,02
2. Rekening Kas PFK (Bank SulutGo Cab. Tilamuta)	01501120000002	Rp 0,00	Rp 794.817.348,50
3. Deposito Bank SulutGo Cab. Tilamuta	0150921202056-7	Rp 0,00	Rp 0,00
4. Deposito Bank Muamalat Cab. Gorontalo	0000246703	Rp 0,00	Rp 0,00
5. Deposito Bank BRI Unit Tilamuta	515101000048307	Rp 0,00	Rp 0,00
6. Deposito Bank BRI Capem Tilamuta	22760100002199-2	Rp 0,00	Rp 0,00
7. Deposito Bank BNI KCP Tilamuta	0253478568	Rp 449.092,00	Rp 0,00
8. Rekening Bunga Deposito Bank Mandiri KCP Marisa	1500066666007	Rp 0,00	Rp 0,00
SALDO KAS DI KAS DAERAH		Rp 38.468.403.568,67	Rp 29.730.283.696,52

Rincian Saldo Kas di Kas Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Sisa DAU (BG)	:	Rp 3.197.822.000,00
2. Sisa DAU (SG)	:	Rp 3.949.163.262,00
3. Sisa DAU (PPPK)	:	Rp 11.225.946.119,97
4. Sisa DAK Fisik	:	Rp 2.327.860.537,70
5. Sisa DAK Non Fisik	:	Rp 2.683.902.347,00
6. Sisa DID	:	Rp 1.261.771.210,00
7. Sisa Dana Insentif Fiskal	:	Rp 9.867.253.000,00
8. Sisa Dana Bagi Hasil	:	Rp 3.927.743.000,00
9. Sisa PAD	:	Rp 449.092,00
10. Sisa Bantuan Hibah Provinsi	:	Rp 26.493.000,00
		Rp 38.468.403.568,67

Rincian nomor rekening pada tabel di atas sesuai dengan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 023/397/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Bank Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah Tahun Anggaran 2023. Terdapat adanya kenaikan saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp8.738.119.872,15 atau 29,39% dibandingkan dengan saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.730.283.696,52, per 31 Desember 2023 saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp38.468.403.568,67.

Khusus untuk sisa DAU PPPK seharusnya masih terdapat saldo sebesar Rp15.965.386.477,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.739.440.357,03 yang telah digunakan untuk membiayai belanja yang seharusnya bersumber dari PAD.

1. Rekening Nomor 015.01120000001 (Kas Umum Daerah)

Saldo Kas Umum Daerah pada Neraca	Rp 38.468.403.568,67
Saldo Kas Umum Daerah pada Buku Bank	Rp 38.457.025.988,67
Selisih	Rp 11.377.580,00

1. Selisih antara Rekening Koran RKUD dan Saldo Kas pada Neraca terdiri dari :

a. Tanggal 26 Desember 2022 Nomor SP2D 11536/BKAD/SP2D-LS/XII/2022 pihak bank kurang debet Rp20,00;

Pada SP2D Nomor :31.01/04.0/000702/ LS/1.01.2.19.2.22.02.0000/P.13/12/2023 sebesar Rp.8.387.100,00 telah dibayarkan dua kali kepada an. RIZAL LAIYA, Namun telah b. dikembalikan oleh pihak ketiga Rp7.417.608 tanggal 9 Januari 2024, untuk biaya RTGS telah dipotong dan potongan pajak terlanjur di bayarkan ke Kas Negara sebesar Rp969.492,00 telah dipulihkan ke kas daerah pada tanggal 20 Mei 2024.

c. Pada SP2D Nomor 31.01/04.0/000664 /LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/P.13/12/2023 sebesar Rp2.990.500,00 telah dibayarkan dua kali kepada an. SRIFONI DIAN EKAWATY SAIDI, telah dikembalikan tanggal 13 Februari 2024 ke Kas RKUD sebesar Rp2.653.733,00 untuk biaya RTGS telah dipotong dan pajak terlanjur dibayarkan ke Kas Negara sebesar Rp336.767,00 telah dipulihkan ke kas daerah pada tanggal 20 Mei 2024.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang berasal dari uang persediaan yang masih tersisa di akhir Tahun Anggaran yang dikelola secara tunai maupun non tunai ,rekening bendahara pengeluaran sesuai Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 023/397/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Bank SulutGo sebagai Bank Penempatan Rekening Kas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp985.206,00 mengalami kenaikan sebesar Rp985.206,00 atau 100,00% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 985.206,00	Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 sebesar Rp985.206,00 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

No.	NAMA SKPD	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 370.000,00	Rp 0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Rp 306,00	Rp 0,00
3	Kecamatan Dulupi	Rp 1.000,00	Rp 0,00
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	Rp 613.900,00	Rp 0,00
	JUMLAH	Rp 985.206,00	Rp 0,00

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp8.209.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp59.077.500,00 atau 87,80% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp67.286.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 8.209.000,00	Rp 67.286.500,00

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

No.	NAMA SKPD	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Dinas Kesehatan	Rp 0,00	Rp 1.083.500,00
2	Puskesmas Tilamuta	Rp 185.000,00	Rp 0,00
3	Puskesmas Dulupi	Rp 1.848.000,00	Rp 0,00
4	Puskesmas Pangi	Rp 465.500,00	
5	Puskesmas Bongo Noi	Rp 45.000,00	Rp 0,00

No.	NAMA SKPD	Rp	Rp
6	Puskesmas Mananggu	Rp 5.058.500,00	Rp 0,00
7	Puskesmas Paguyaman	Rp 587.000,00	Rp 0,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Rp 0,00	Rp 66.203.000,00
9	RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings	Rp 0,00	Rp 0,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 20.000,00	Rp 0,00
JUMLAH		Rp 8.209.000,00	Rp 67.286.500,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 merupakan saldo Penerimaan yang telah disetorkan melalui QRIS namun masuk ke RKUD pada Bulan Januari 2024.

5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD merupakan saldo kas BLUD yang masih tersisa di akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.932.536.278,00 yang dikelola secara tunai dan non tunai sesuai Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Nomor 52/SK/DIR/VIII/2018 tentang penunjukan Bank sebagai tempat Penyimpanan uang Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kas dibadan Layanan Umum Daerah Saldo Kas per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp4.290.168.841,26 mengalami kenaikan sebesar Rp3.391.799.608,00 atau 627,26% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp540.736.670,00. Kas tersebut merupakan Kas yang dikelola oleh BLUD yang tidak wajib disetor kembali ke Kas Daerah karena BLUD sudah menerapkan PPK-BLUD penuh sejak Tahun 2012 sampai dengan saat ini, dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Rp 3.932.536.278,00	Rp 540.736.670,00

Rincian Kas di Bendahara BLUD RSUD-TN adalah sebagai berikut:

NO.	U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BLUD Rumah Sakit Tani dan Nelayan	Rp 3.058.619.756,00	Rp 540.736.670,00
2	BLUD Puskesmas Berlian	Rp 10.812.153,00	Rp 0,00
3	BLUD Puskesmas Bongo Nol	Rp 74.995.451,00	Rp 0,00
4	BLUD Puskesmas Pangli	Rp 14.642.660,40	Rp 0,00
5	BLUD Puskesmas Sari Tani	Rp 61.200.385,80	Rp 0,00
6	BLUD RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings	Rp 399.520.252,00	Rp 0,00
7	BLUD Puskesmas Pguyaman	Rp 30.613.502,00	Rp 0,00
8	BLUD Puskesmas Tilamuta	Rp 95.098.905,00	Rp 0,00
9	BLUD Puskesmas Dulupi	Rp 51.551.310,00	Rp 0,00
10	BLUD Puskesmas Mananggu	Rp 2.836.061,80	Rp 0,00
11	BLUD Puskesmas Botumoitto	Rp 58.547.563,00	Rp 0,00
12	BLUD Puskesmas Paguyaman Pantai	Rp 61.013.600,00	Rp 0,00
13	BLUD Puskesmas Bongo II	Rp 13.084.678,00	Rp 0,00
JUMLAH		Rp 3.932.536.278,00	Rp 540.736.670,00

5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas di Bendahara FKTP Tahun 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp153.579.675,20 atau 100,00% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp153.579.675,20. Kas di Bendahara FKTP merupakan Kas Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada 11 (sebelas) Puskesmas di Kabupaten Boalemo sebelum beralih status menjadi BLUD. Realisasi Kas di Bendahara FKTP telah dialihkan menjadi saldo Kas di Bendahara BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp 0,00	Rp 153.579.675,20

Rincian Kas dana FKTP adalah sebagai berikut:

No.	PUSKESMAS (FKTP)	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	FKTP BPJS PKM Mananggu	Rp 0,00	Rp 1.907.828,80
2	FKTP BPJS PKM Saritani	Rp 0,00	Rp 24.557.967,80
3	FKTP BPJS PKM Bongo II	Rp 0,00	Rp 6.821.721,20
4	FKTP BPJS PKM Paguyaman	Rp 0,00	Rp 19.025.318,00
5	FKTP BPJS PKM Botumoitto	Rp 0,00	Rp 18.208.370,00
6	FKTP BPJS PKM Berlian	Rp 0,00	Rp 3.665.948,00
7	FKTP BPJS PKM Paguyaman Pantai	Rp 0,00	Rp 1.069.550,00
8	FKTP BPJS PKM Bongo Nol	Rp 0,00	Rp 74.009.616,00
9	FKTP BPJS PKM Pangli	Rp 0,00	Rp 1.996.457,40
10	FKTP BPJS PKM Dulupi	Rp 0,00	Rp 2.305.801,00
11	FKTP BPJS PKM Tilamuta	Rp 0,00	Rp 11.097,00
Jumlah		Rp 0,00	Rp 153.579.675,20

5.3.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2023 sebesar Rp1.912.862.496,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.912.862.496,00 atau 100,00% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Kas Dana BOK merupakan transfer yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo atas pengalokasian Dana BOK Tahun 2023 namun Dana BOK tidak ditransfer ke Kas Daerah melainkan ditransfer langsung ke Rekening masing-masing bendahara Puskesmas melalui KPPN Marisa dan telah tersalurkan ke puskesmas-puskesmas di Kabupaten Boalemo, dengan rincian sebagai berikut:

Kas Dana BOK Puskesmas:

No.	PUSKESMAS (BOK)	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BOK PKM Mananggu	Rp 171.678.804,00	Rp 0,00
2	BOK PKM Saritani	Rp 211.581.122,00	Rp 0,00
3	BOK PKM Bongo II	Rp 149.159.206,00	Rp 0,00
4	BOK PKM Paguyaman	Rp 174.746.865,00	Rp 0,00
5	BOK PKM Botumoitto	Rp 209.693.976,00	Rp 0,00
6	BOK PKM Berlian	Rp 145.546.754,00	Rp 0,00
7	BOK PKM Paguyaman Pantai	Rp 160.554.963,00	Rp 0,00
8	BOK PKM Bongo Nol	Rp 228.296.638,00	Rp 0,00
9	BOK PKM Pangli	Rp 147.633.260,00	Rp 0,00
10	BOK PKM Dulupi	Rp 139.961.364,00	Rp 0,00
11	BOK PKM Tilamuta	Rp 174.009.544,00	Rp 0,00
Jumlah		Rp 1.912.862.496,00	Rp 0,00

5.3.1.1.7 Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP merupakan saldo kas yang berada di bawah pengelolaan Bendahara Dana BOSP yang masih tersisa di akhir Tahun Anggaran 2023 yang dikelola secara tunai maupun Non Tunai sesuai dengan Keputusan Bupati Boalemo **Nomor 004/362/XI/2021 tanggal 15 November 2021** tentang Penetapan Rekening dan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022. Saldo Kas di Bendahara Dana BOSP Tahun 2023 sebesar Rp868.843.052,99 mengalami penurunan sebesar Rp314.520.281,45 atau 26,58% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.183.363.334,44. Saldo Kas BOSP Tahun 2023 tersebut terdiri dari saldo Kas BOS, saldo Kas BOP PAUD, dan saldo Kas BOP Dana Kesenjangan Tahun 2023. Sedangkan saldo Kas BOSP Tahun 2022 merupakan saldo Kas BOS tahun 2022. Dana BOS dan BOP PAUD serta Dana BOP Kesenjangan yang diterima oleh bendahara SD dan SMP, Paud, serta PKBM di Kabupaten Boalemo berasal dari Pemerintah Pusat tanpa melalui Kas Daerah dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing Bendahara Dana BOS SD dan SMP, BOP PAUD, serta BOP Dana Kesenjangan di Kabupaten Boalemo termasuk pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp180.436.585,00.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas Dana BOSP	Rp 868.843.052,99	Rp 1.183.363.334,44

Rincian Kas di Bendahara Dana BOSP Tahun 2023 disajikan atau dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp39.164.345,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.908.400,00 atau 84,25% dari Saldo Tahun 2022 sebesar Rp21.255.945,00. Kas Lainnya merupakan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PKM Sari Tani, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas Lainnya	Rp 39.164.345,00	Rp 21.255.945,00

Rincian Kas Lainnya sebagai berikut:

5.3.1.1.9 Kas Lainnya

No.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BPKPD	Rp 0,00	Rp 5.006.832,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 18.139.325,00	Rp 16.249.113,00
3	Puskesmas Saritani	Rp 21.025.020,00	Rp 0,00
JUMLAH		Rp 39.164.345,00	Rp 21.255.945,00

5.3.1.1.10 Setara Kas

Tidak terdapat saldo Setara Kas Tahun 2023 maupun Tahun 2022.

No.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BPKPD	Rp 0,00	Rp 0,00
JUMLAH		Rp 0,00	Rp 0,00

Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp7.790.281.449,00 mengalami kenaikan sebesar Rp940.913.516,20 atau 13,74% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp6.849.367.932,80 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Piutang Pajak Daerah	Rp 4.914.938.942,00	Rp 4.831.732.190,00
2	Piutang Retribusi	Rp 273.593.227,00	Rp 851.533.717,00
3	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 0,00	Rp 0,00
4	Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Piutang Deviden)	Rp 0,00	Rp 0,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 2.407.356.654,00	Rp 1.165.799.712,00
6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Piutang Bunga Deposito)	Rp 194.392.626,00	Rp 302.313,80
JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN		Rp 7.790.281.449,00	Rp 6.849.367.932,80

Piutang Pendapatan tersebut merupakan total dari seluruh Piutang Pendapatan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.11 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp4.914.938.942,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.206.752,00 atau 1,72% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp4.831.732.190,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Piutang Pendapatan Pajak Hotel	Rp 32.024.315,00	Rp 44.262.315,00
2	Piutang Pendapatan Pajak Restoran	Rp 0,00	Rp 0,00
3	Piutang Pendapatan Pajak Reklame	Rp 181.643.400,00	Rp 181.643.400,00
4	Piutang Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	Rp 0,00	Rp 0,00
5	Piutang Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 173.646.723,00	Rp 173.646.723,00
6	Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 4.527.624.504,00	Rp 4.432.179.752,00
Jumlah		Rp 4.914.938.942,00	Rp 4.831.732.190,00

Rincian pada **Lampiran 2**.

5.3.1.1.12 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp273.593.227,00 mengalami penurunan sebesar Rp577.940.490,00 atau 67,87% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp851.533.717,00. Rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Piutang Pendapatan Retribusi Pasar Grosir	Rp 21.700.000,00	Rp 11.500.000,00
2	Piutang Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp 251.893.227,00	Rp 192.548.217,00
3	RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings	Rp 0,00	Rp 647.485.500,00
Jumlah		Rp 273.593.227,00	Rp 851.533.717,00

Rincian pada **Lampiran 2**.

5.3.1.1.13 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tidak terdapat saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Piutang Deviden) Tahun 2023 dan Tahun 2022.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Piutang Deviden)	Rp 0,00	Rp 0,00
JUMLAH	Rp 0,00	Rp 0,00

5.3.1.1.14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Piutang Remunerasi TDF sebesar Rp59.726,00, Piutang dari Pengembalian sebesar Rp20.384.900,00, dan Piutang Klaim BPJS bulan Desember 2023 yang belum diterima yaitu sebesar Rp173.948.000,00. Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp194.392.626,00 mengalami kenaikan sebesar Rp194.090.312,20 atau 64.201,61% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp302.313,80. Rincian sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023		TAHUN 2022	
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Piutang Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah)	Rp	59.726,00	Rp	302.313,80
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan dari Pengembalian)	Rp	20.384.900,00	Rp	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)	Rp	173.948.000,00	Rp	0,00
JUMLAH	Rp	194.392.626,00	Rp	302.313,80

5.3.1.1.15 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Tidak terdapat saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember Tahun 2023.

URAIAN	TAHUN 2023		TAHUN 2022	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp	0,00	Rp	0,00
JUMLAH	Rp	0,00	Rp	0,00

5.3.1.1.16 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya atau Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.407.356.654,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.241.556.942,00 atau 106,50% dibandingkan dengan saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya atau Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp1.165.799.712,00 dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	TAHUN 2023		TAHUN 2022	
Piutang Pendapatan atas Dana Bagi Hasil - PKB/PKAA	Rp	582.161.378,00	Rp	470.439.329,00
Piutang Pendapatan atas Dana Bagi Hasil - BBN KB/BBN KAA	Rp	327.677.504,00	Rp	288.884.607,00
Piutang Pendapatan atas Dana Bagi Hasil - PBB KB	Rp	1.486.556.835,00	Rp	401.486.300,00
Piutang Pendapatam atas Dana Bagi Hasil - Pajak Rokok	Rp	0,00	Rp	0,00
Piutang Pendapatan atas Dana Bagi Hasil - Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp	10.960.937,00	Rp	4.989.476,00
JUMLAH	Rp	2.407.356.654,00	Rp	1.165.799.712,00

5.3.1.1.17 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.769.260.648,21 mengalami kenaikan sebesar Rp1.658.302.556,17 atau 16,40% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp10.110.958.092,04 dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	TAHUN 2023		TAHUN 2022	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	4.784.044.061,21	Rp	3.786.294.829,04
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD (Piutang BLUD RSUD-TN)	Rp	5.874.074.687,00	Rp	6.240.533.353,00
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD (Piutang BLUD RSIB)	Rp	691.144.800,00	Rp	0,00
Piutang Lainnya (Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa)	Rp	419.997.100,00	Rp	0,00
Piutang Lainnya (Piutang Gaji Pensiunan)	Rp	0,00	Rp	24.784.900,00
Piutang Lainnya (Piutang Denda Retribusi Pengendalian Menara)	Rp	0,00	Rp	59.345.010,00
JUMLAH PIUTANG LAINNYA	Rp	11.769.260.648,21	Rp	10.110.958.092,04

Rincian Piutang TGR pada Lampiran 3.

Saldo Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023 sebesar Rp4.624.263.095,31, dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Rp	3.786.294.829,04
- Penambahan TGR Tahun 2023	Rp	3.354.846.464,65 +
- Jumlah Piutang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2023	Rp	7.141.141.293,69
- Pembayaran Piutang TGR tahun 2023	Rp	2.357.097.232,48
Jumlah Piutang TGR sampai dengan Tahun 2023	Rp	4.784.044.061,21

Saldo Piutang Lainnya Piutang BLUD RSUD-TN Tahun 2023 sebesar Rp5.874.074.687,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Usaha	Rp	5.843.619.762,00
- Piutang JKN/BPJS	Rp	4.927.000,00
- Piutang Layanan Umum	Rp	5.848.546.762,00
2. Piutang Lain-Lain		
- Piutang Obat dan BMHP dengan Faskes Lain pada RSTN	Rp	25.527.925,00
	Rp	5.874.074.687,00

5.3.1.1.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan estimasi atas potensi tidak tertagihnya piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 sebesar Rp(6.406.888.690,84) mengalami kenaikan sebesar Rp605.860.101,10 atau 10,44% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp(5.801.028.589,74).

U R A I A N	2023		2022	
- Penyisihan Piutang	Rp	(6.406.888.690,56)	Rp	(5.801.028.589,74)

1. Penyisihan Piutang Pendapatan

NO.	JENIS PIUTANG	UMUR PIUTANG				JUMLAH
		LANCAR 0 - 365	KURANG LANCAR 366 - 1095	DIRAGUKAN 1096 - 1825	MACET > 1826	
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(631.504,23)	(15.326.795,50)	(620.372.325,50)	(3.394.625.491,00)	(4.030.956.116,23)
2	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	(273.593.227,00)	(273.593.227,00)
5	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(101.924,50)	0,00	0,00	0,00	(101.924,50)
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN	(733.428,73)	(15.326.795,50)	(620.372.325,50)	(3.668.218.718,00)	(4.304.651.267,73)

Berdasarkan Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer Akruai, Piutang Transfer tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih dengan demikian tidak terdapat beban penyisihan atas Piutang Transfer.

2. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

Atas nilai Penyisihan Piutang Lainnya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dilakukan penilaian kualitas piutang untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS PIUTANG	UMUR PIUTANG				JUMLAH
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0 - 365	366 - 1095	1096 - 1825	> 1826	
1	Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.825.935,73)	(219.005.543,10)	(428.734.906,87)	(1.371.331.670,04)	(2.020.898.055,74)
2	Penyisihan Piutang BLUD RSTN	(27.206.073,81)	(40.733.200,00)	(9.944.369,28)	0,00	(77.883.643,09)
	Penyisihan Piutang BLUD RSIB	(3.455.724,00)	0,00	0,00	0,00	(3.455.724,00)
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	(32.487.733,54)	(259.738.743,10)	(438.679.276,15)	(1.371.331.670,04)	(2.102.237.422,83)

5.3.1.1.19 Persediaan

Kebijakan akuntansi terkait Persediaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 105 tanggal 23 Desember 2019 tentang perubahan ketiga Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boalemo. Pada tabel di bawah ini disajikan saldo persediaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.642.070.883,37 mengalami penurunan sebesar Rp4.994.350.089,68 atau 36,63% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp13.636.420.973,05. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode periodik, kecuali untuk persediaan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Medis dicatat dengan menggunakan metode perpetual, setelah dilakukan stock opname persediaan obat-obatan dan BHP pada Puskesmas-Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Tani dan Nelayan, serta RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings dan pada beberapa OPD tersebut terdapat obat-obatan dan BHP Medis yang sudah kedaluarsa (*expired date*) sebesar Rp417.757.113,14.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Persediaan	Rp 8.642.070.883,37	Rp 13.636.420.973,05

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

PERSEDIAAN BARANG TAHUN 2023					
NO	U R A I A N	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2023	MUTASI TAHUN 2023		SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH	BERKURANG	
I	Obat - Obatn	8.300.262.691,86	24.999.603.774,79	25.587.781.527,30	7.712.084.939,36
1	BLUD RSTN	2.179.068.931,12	8.751.984.527,08	8.156.864.370,76	2.774.189.087,44
2	RSIB	296.327.711,46	1.309.778.221,04	1.143.092.582,28	463.013.350,22
3	Dinas Kesehatan	3.782.047.413,00	6.752.154.113,89	7.398.122.806,05	3.136.078.720,84
4	PKM Paguyaman	199.862.765,00	598.568.825,63	583.967.520,44	214.464.070,19
5	PKM Tilamuta	102.532.483,00	1.052.302.064,57	1.024.459.849,79	130.374.697,78
6	PKM Bongo Nol	80.329.306,36	285.478.786,24	292.944.092,09	72.864.000,51
7	PKM Bongo II	183.644.096,25	2.073.010.791,57	2.092.768.872,00	163.886.015,82
8	PKM Dulupi	136.308.389,45	485.757.437,66	529.797.640,52	92.268.186,59
9	PKM Mananggu	193.174.368,76	1.201.749.478,64	1.209.328.163,70	185.595.683,70
10	PKM Botumoito	117.245.250,34	618.484.001,56	657.039.951,79	78.689.300,11
11	PKM Paguyaman Pantai	308.845.807,00	285.042.706,31	518.621.386,97	75.267.126,34
12	PKM Berlian	96.399.630,71	294.098.799,58	325.532.515,10	64.965.915,19
13	PKM Pangi	64.838.799,31	331.305.757,37	326.791.565,07	69.352.991,61
14	PKM Sari Tani	342.072.863,10	476.555.025,37	678.008.825,45	140.619.063,02
15	DPPKBP3A	177.779.702,00	483.333.238,29	610.656.210,29	50.456.730,00
16	Dinas Pertanian	39.785.175,00	0,00	39.785.175,00	0,00
II	Obat-Obatan Lainnya	0,00	198.624.203,01	0,00	198.624.203,01
1	RSTN	0,00	143.758.003,00	0,00	143.758.003,00
2	Labkesda	0,00	54.866.200,01	0,00	54.866.200,01
II	Bahan	66.418.515,00	186.392.353,00	244.212.243,00	8.598.625,00
1	Dinas Pertanian	18.578.580,00	2.100.000,00	20.678.580,00	0,00
2	RSTN	16.557.985,00	31.060.863,00	47.618.848,00	0,00
3	RSIB	29.643.200,00	151.556.490,00	174.276.065,00	6.923.625,00
4	BPKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Kependudukan Dan Capil	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PKM Mananggu	1.638.750,00	1.675.000,00	1.638.750,00	1.675.000,00
II	Suku Cadang	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1	RSIB	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
III	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	2.694.090.550,00	5.235.674.012,00	7.578.800.955,00	350.963.607,00
1	Dinas Pertanian	138.930.000,00	4.121.571.980,00	4.121.571.980,00	138.930.000,00
2	Kantor Kesbangpol dan Linmas	0,00	1.114.102.032,00	902.068.425,00	212.033.607,00
3	DPPKBP3A	326.943.750,00	0,00	326.943.750,00	0,00
4	Dinas PUPR	595.800.000,00	0,00	595.800.000,00	0,00
5	Dinas Perkimhubtan	1.632.416.800,00	0,00	1.632.416.800,00	0,00

IV	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	434.746.661,19	3.697.598.556,80	3.820.248.121,99	312.097.096,00
1	BLUD RSTN	29.649.287,00	1.933.595.740,00	1.936.977.129,00	26.267.898,00
2	RSIB	93.654.704,00	189.804.564,00	249.286.202,00	34.173.066,00
3	BKAD	279.506.469,00	852.394.512,00	908.238.012,00	223.662.969,00
4	Dinas Perkimhubtan	3.788.611,19	0,00	3.788.611,19	0,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.524.295,00	542.453.760,00	542.601.490,00	20.376.565,00
6	Dinas Kumperindag	1.062.117,50	13.794.000,00	14.782.967,50	73.150,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	311.520,00	11.275.000,00	11.430.320,00	156.200,00
8	Dinas Pariwisata	1.944.607,50	10.587.500,00	10.417.082,50	2.115.025,00
9	Dinas Pertanian	22.550,00	550.000,00	572.550,00	0,00
10	PKM Mananggu	4.282.500,00	124.958.480,80	126.990.980,80	2.250.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	0,00	18.185.000,00	15.162.777,00	3.022.223,00
V	Natura dan Pakan	26.579.643,00	1.007.115.533,00	1.006.541.363,00	27.153.813,00
1	RSTN	14.711.404,00	501.887.361,00	501.991.772,00	14.606.993,00
2	RSIB	11.868.239,00	505.228.172,00	504.549.591,00	12.546.820,00
VI	Persediaan dalam Proses	2.109.072.912,00	30.400.000,00	2.106.924.312,00	32.548.600,00
1	Dinas PUPR	2.148.600,00	0,00	0,00	2.148.600,00
2	Dinas Pertanian		30.400.000,00	0,00	30.400.000,00
3	Dinas Perkimhubtan	2.106.924.312,00	0,00	2.106.924.312,00	0,00
	JUMLAH	13.636.420.973,05	35.355.408.432,60	40.349.758.522,29	8.642.070.883,37

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Tidak terdapat saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember Tahun 2023.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Investasi Non Permanen	Rp 0,00	Rp 0,00
Saldo Investasi Non Permanen	Rp 0,00	Rp 0,00

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.471.282.911,30, mengalami penurunan sebesar Rp1.277.846.507,02 atau 2,04% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp62.749.129.418,32. Penurunan saldo Investasi Permanen disebabkan oleh kerugian investasi pada PDAM Tirta Boalemo sebesar Rp1.277.846.507,02.

Rincian Investasi Permanen adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta	Rp 12.630.022.574,83	Rp 13.907.869.081,85
Penyertaan Modal pada Bank SolutGo	Rp 48.161.278.435,00	Rp 48.161.278.435,00
Penyertaan Modal BUMD PT Boalemo Idaman Gorontalo	Rp 679.981.901,47	Rp 679.981.901,47
Saldo Investasi Permanen	Rp 61.471.282.911,30	Rp 62.749.129.418,32

1. Penyertaan Modal pada PDAM Boalemo

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kabupaten Boalemo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo dengan jumlah modal disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu sesuai dengan Neraca Permulaan Perusahaan. Neraca Permulaan PDAM disusun sebagai hasil asistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Tirta Kabupaten Boalemo Tahun Buku 2001 sampai dengan 2005 Nomor Lap-764/PW184/2007 Tanggal 2 Maret 2007 yang didalamnya antara lain menyebutkan bahwa jumlah Kekayaan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang Dipisahkan per 31 Desember 2005 sebagai bagian modal PDAM Kabupaten Boalemo adalah Rp250.000.000,00. Kemudian pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Boalemo merubah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Pendirian PDAM untuk menambah Penyertaan Modal menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00. PDAM Tirta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan kepemilikan sebesar 27,98% sehingga metode pencatatan investasi dilakukan dengan metode ekuitas. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boalemo pada PDAM Tirta Kabupaten Boalemo Tahun 2023, sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemda pada PDAM s.d. 31 Desember 2022	Rp 13.907.869.081,85
Perhitungan Kerugian sampai dengan Tahun 2023	Rp 1.277.846.507,02 -
Jumlah	Rp 12.630.022.574,83
Penambahan Penyertaan Pemda Boalemo ke PDAM Tahun 2023	Rp 0,00 +
Total Penyertaan Modal Pemda pada PDAM setelah dikurangi kerugian s.d. Tahun 2023	Rp 12.630.022.574,83

2. Penyertaan Modal pada Bank SolutGo

Pemerintah Kabupaten Boalemo memiliki saham pada PT Bank SolutGo sebesar 6,30%. Metode pencatatan investasi dilakukan dengan menggunakan metode biaya. Berdasarkan surat pemberitahuan dari PT Bank SolutGo tentang posisi modal yang disetor setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank SolutGo, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo memperoleh dividen tunai sebesar Rp8.478.040.721,00 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 22 Maret Februari 2023. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Boalemo belum memperoleh Dividen Saham atau Dana Setoran Modal (DSM). Rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boalemo pada PT Bank SolutGo adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemda Pada PT Bank SolutGo s.d. 31 Desember 2022	Rp 48.161.278.435,00
Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp 0,00 +
Penyertaan Modal Pemda pada PT Bank SolutGo s.d. 31 Desember 2023	Rp 48.161.278.435,00

3. Penyertaan Modal pada PT Boalemo Idaman Gorontalo

PT Boalemo Idaman Gorontalo (PT BIG) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kepemilikan sebesar 98,52% sehingga metode pencatatan investasi yang digunakan adalah metode ekuitas. PT BIG didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga, Akta Perseroan terbatas Nomor 48 tanggal 27 September 2013 dan dipertegas kembali oleh Notaris Hasna Mokoginta SH, dengan akta pendirian Nomor 74 tanggal 19 Desember 2014 sekaligus telah mendapat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-40954.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Boalemo Idaman Gorontalo tanggal 22 Desember 2014. Sejak bulan Agustus Tahun 2018 PT BIG sudah tidak beroperasi sehingga khusus Laporan Keuangan PT BIG untuk Tahun 2021 tidak disajikan dalam laporan ini. Rincian penyertaan modal pada PT BIG adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal pada PT BIG s.d. Tahun 2022	Rp 679.981.901,47
Penyertaan Modal pada PT BIG s.d. Tahun 2023	Rp 679.981.901,47

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2023 dan 2022. Perolehan Aset Tetap yang berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap Tahun Anggaran berkenaan. Nilai perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.772.034.562.984,39 mengalami kenaikan sebesar Rp129.800.518.075,14 dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp2.642.234.044.909,41 atau 4,91% dengan rincian sebagai berikut:

NO.	U R A I A N	KODE AKUN	DAFTAR ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2023			
			SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2023	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER TAHUN 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Tanah	1.3.1	153.978.124.526,80	98.962.300,00	511.907.875,00	153.565.178.951,80
2	Peralatan dan Mesin	1.3.2	488.769.788.521,39	15.135.929.243,00	29.708.137.374,86	474.197.580.389,53
3	Gedung dan Bangunan	1.3.3	545.746.471.739,19	44.149.754.740,00	7.017.487.989,00	582.878.738.490,19
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.3.4	1.375.430.281.903,32	136.391.786.724,00	1.466.017.534,00	1.510.356.051.093,32
5	Aset Tetap Lainnya	1.3.5	28.349.452.513,55	5.591.520.189,00	890.847.000,00	33.050.125.702,55
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.6	49.959.925.705,00	0,00	31.973.037.348,00	17.986.888.357,00
	JUMLAH ASET TETAP		2.642.234.044.909,25	201.367.953.196,00	71.567.435.120,86	2.772.034.562.984,39
7	Akumulasi Penyusutan	1.3.7	(1.325.535.714.679,41)	(122.124.463.942,00)	0,00	(1.447.660.178.621,41)
	JUMLAH		1.316.698.330.229,84	79.243.489.254,00	71.567.435.120,86	1.324.374.384.362,98

5.3.1.3.1 Tanah

Nilai perolehan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp153.565.178.951,80 mengalami penurunan sebesar Rp412.945.575,00 atau 0,27% Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp153.978.124.526,80,00.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Tanah	Rp 153.565.178.951,80	Rp 153.978.124.526,80

Penurunan saldo Tanah disebabkan adanya mutasi penambahan/pengurangan dari Belanja Modal, Reklasifikasi Aset Tetap Tanah dan Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 153.978.124.526,80
Mutasi Tambah	Rp
Belanja Modal Tahun 2023	Rp 94.517.300,00
Mutasi Masuk : Tanah Hibah dari Masyarakat di 14 Desa, untuk pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) /Base Tranceiver Station di 5 Desa 3 Kec.di Kab Boalemo sesuai Keputusan Bupati No.023/466/XII/2022	Rp 4.445.000,00
Hasil Reklasifikasi	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 98.962.300,00
Mutasi Kurang	Rp
Hasil Reklasifikasi karena tidak bisa dikelompokkan ke Aset	Rp 0,00
Penghapusan Aset Tetap Tanah (sertifikat No. 84/DD-VII/1990 tanggal 19 April 1990) Untuk Pembangunan Asr	Rp 29.725.975,00
Hasil Reklasifikasi Aset Tanah ke Properti Investasi	Rp 482.181.900,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp 511.907.875,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 153.565.178.951,80

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp474.197.580.389,53 mengalami penurunan sebesar Rp14.572.208.131,86 atau 2,98% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp488.769.788.521,39.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Peralatan dan Mesin	Rp 474.197.580.389,53	Rp 488.769.788.521,39

Penurunan ini disebabkan oleh adanya mutasi penambahan/pengurangan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 dan Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja BOS dan BOPP Tahun 2023 berdasarkan hasil Reviu Inspektorat, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 488.769.788.521,39
Mutasi Tambah	Rp
- Belanja Modal Tahun 2023	Rp 14.877.641.243,00
- Reklasifikasi Aset Tetap/Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang salah Rekening dari Sekolah-Sekolah sesuai hasil reviu inspektorat	Rp 209.488.000,00
- Relasifikasi Aset Tetap JJJ ke Peralatan Mesin	Rp 48.800.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 15.135.929.243,00
Mutasi Kurang	Rp
- Reklasifikasi/Extra Kompatabel dan Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 123.571.967,00
- Relasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	Rp 29.584.565.407,86
Jumlah Mutasi Kurang	Rp 29.708.137.374,86
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 474.197.580.389,53

Laporan Hasil Inventarisasi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 menunjukkan terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.584.565.407,86 tidak diketahui keberadaannya. Pemerintah Kabupaten Boalemo telah membentuk Tim Peneliti sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 023/103/II/2024 tentang Tim Peneliti Laporan Hasil Inventarisasi Barang yang Tidak Ditemukan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Inventarisasi Tahun 2023.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp582.878.738.490,19 terdapat kenaikan sebesar Rp37.132.266.751,00 atau 6,80% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp545.746.471.739,19.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Gedung dan Bangunan	Rp 582.878.738.490,19	Rp 545.746.471.739,19

Kenaikan ini antara lain adanya mutasi penambahan/pengurangan dari pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi gedung-gedung perkantoran dan Sekolah, Pengakuan KDP Gedung dan Bangunan dan Hibah dari Pemerintah Pusat dan reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke dalam Properti Investasi, rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 545.746.471.739,19
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal Tahun 2023	Rp 26.560.640.766,00
- Mutasi Masuk : Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari KDP Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan yang sudah menjadi Aset Tetap	Rp 3.893.652.374,00
- pengakuan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tempat Kerja dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata sesuai BAST No.12/BA/DC/2023 dan No.032/BKAD/56.a/II/2023	Rp 12.895.782.000,00
- Pemindah Bukuan Aset Tetap Gedung Tempat Olah Raga Yaitu Revitalisasi Gedung Olah Raga & Perencanaan (DED) Revitalisasi Gedung Olah Raga Dari Diknas Ke Dinas Pariwisata Akibat Dinas Yang Sudah Dimerger Tahun 2022	Rp 799.679.600,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 44.149.754.740,00
Mutasi Kurang	
- Mutasi Keluar : Pemindah Bukuan Aset Tetap Gedung Tempat Olah Raga Yaitu Revitalisasi Gedung Olah Raga & Perencanaan (DED) Revitalisasi Gedung Olah Raga Pada Diknas Ke Dinas Pariwisata Akibat Dinas Yang Dimerjer Tahun 2022	Rp 876.861.460,00
- Mutasi Keluar : Extra Kontabel pada BKD DIKLAT Kab. Boalemo Tahun 2023	Rp 12.950.000,00
- Mutasi Keluar : Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya	Rp 209.660.000,00
- Mutasi Keluar : Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Properti Investasi	Rp 5.918.016.529,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp 7.017.487.989,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 582.878.738.490,19

Mutasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp44.149.754.740,00 terdiri dari:

- Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 senilai Rp26.560.640.766,00
- Pengakuan atas Gedung dan Bangunan KDP yang sudah menjadi Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.893.652.374,00 dari pemindah bukuan Aset dari Dinas Perkim ke dinas PUPR akibat dinas dinas yang dimerger sebesar Rp799.679.600,00 dan Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp12.895.782.000,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.510.988.256.093,32 terdapat kenaikan sebesar Rp134.925.769.190,00 atau 9,81% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.375.430.281.903,32.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.510.356.051.093,32	Rp 1.375.430.281.903,32

Kenaikan ini antara lain karena Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 menganggarkan Pembangunan Jalan dan Jembatan serta KDP JIJ yang sudah menjadi Aset JIJ tahun 2023 dan Hibah dari Pemerintah Pusat, rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 1.375.430.281.903,32
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal Tahun 2023	Rp 84.290.911.827,00
- Mutasi Masuk: Pengakuan Aset Tetap JIJ Jalan Kab (Pemeliharaan berkala/Peningkatan Jln SP3, trans Hulawa dan Pemeliharaan Berkala Jalan Ibu Kota sesuai BAST Pekerjaan terlampir	Rp 819.168.875,00
- Konstruksi Dalam Penkerjaan atas Pekerjaan Jalan yang sudah selesai pekerjaan BAST Pekerjaan pada Dinas PUPR Kab Boalemo tahun 2023 Terlampir	Rp 19.854.878.600,00
- Konstruksi Dalam Penkerjaan atas Pekerjaan Jaringan irigasi atau pengambilan Irigasi yang sudah selesai Pekerjaannya sesuai BAST Pekerjaan pada Dinas PUPR Kab Boalemo tahun 2023 Terlampir	Rp 4.919.162.560,00
- Pengakuan Aset tetap Jalan dan Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya dari Pemerintah Pusat sesuai BAST No.12/BA/DC/2023 dan No.032/BKAD/56.a/II/2023 Jalan	Rp 25.305.948.775,00
- Pengakuan Aset tetap Jalan dan Saluran Drainase dserta Jembatan Plat Deker dari Pemerintah Provinsi sesuai BAST No.033/PUPR-PKP/1573 dan No.800/37.a/BKAD/VI/2023	Rp 1.117.082.012,00
- Reklasifikasi Atas Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang tercatat pada Aset Tetap GB-Bangunan Pembuangan Pengaman Sungai Sesuai Surat Permohonan Reklas pada Dinas PUPRKP No.600/PUPRKP/254/XII/2023 tgl	Rp 84.634.075,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 136.391.786.724,00
Mutasi Kurang	
- Jurnal balik atas otomatisasi korolari dari pembayaran hutang (Retensi 5%)atau Aset Tetap JIJ Jembatan Kab (Penggantian Jembatan Sp3 Tran Hulawa - Balate (SD- DAK Penugasan) Pada Dinas PUPR Atas Hutang Jangka Pendek Yang Asetnya Sudah diakui tahun 2022	Rp 621.572.084,00
- Jurnal Pemindah bukuan Aset Tetap Jalan Desa dan Perencanaan (DED) atas Pembangunan Rabat Beton pada Dinas Perkim ke Dinas PUPR akibat Dinas yang dimerger Tahun 2023	212.240.450,00
- Reklasifikasi Aset Tetap JIJ ke Aset Lainnya	632.205.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp 1.466.017.534,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 1.510.356.051.093,32

Mutasi Tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp136.391.786.724,00 terdiri dari:

- Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 senilai Rp84.290.911.827,00.
- Pengakuan Aset Tetap JIJ atas KDP Pekerjaan Jalan dan Jaringan pada Dinas PUPR senilai Rp24.774.041.160,00, Pengakuan hibah dari pemerintah Pusat sebesar Rp26.423.030.787,00, serta reklasifikasi atas bangunan pembuangan pengaman sungai sebesar Rp84.634.075,00

Mutasi Kurang Aset Tetap Jaringan Irigasi dan jalan senilai Rp1.466.017.534,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi Aset Tetap Jaringan Irigasi dan Jalan yang sudah di akui tahun 2022 pada Dinas PUPR senilai Rp621.572.084,00
- Reklasifikasi biaya Perjalanan Dinas Biasa yang tercatat pada Aset Tetap JIJ Jalan Kabupaten sesuai Permohonan Reklas pada Dinas PUPR/No.600/PUPR/254/XII/2023 tgl 31 Desember 2023 sebesar Rp212.240.450,00 dan Reklasifikasi JIJ ke Aset Lainnya Rp632.205.000,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah serta dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, hewan, ikan, dan tanaman. Selain itu yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik Pemda dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemda. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.050.125.702,55 mengalami kenaikan sebesar Rp4.700.673.189,00 atau 16,58% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp28.349.452.513,55.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Aset Tetap Lainnya	Rp 33.050.125.702,55	Rp 28.349.452.513,55

Kenaikan ini disebabkan oleh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 dan Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja BOS Tahun 2023 berdasarkan hasil Reviu Inspektorat, rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 28.349.452.513,55
Mutasi Tambah	
Belanja Modal Tahun 2023	Rp 5.519.655.689,00
Reklasifikasi Kesalahan Pencatatan Aset Tetap Lainnya (Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya) pada Sekolah SDN 3 Botumoto sesuai Hasil Reviu Inspektorat kab.Boalemo Tahun 2023	Rp 6.864.500,00
Penerimaan atas Penyerahan Buku Umum dari Dinas Pendidikan ke Dinas Perpustakaan sebanyak 500 buku sesuai BAST No.800/19/BAPB/DIKPORA/IX/2023	Rp 65.000.000,00
Mutasi Masuk	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 5.591.520.189,00
Mutasi Kurang	
Mutasi Keluar Jurnal atas Koreksi/Reklasifikasi Kesalahan Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Alat Kantor Lainnya) pada Sekolah TK Negeri Sekab.Boalemo sesuai Hasil Reviu Inspektorat Kab.Boalemo Tahun 2023	Rp 176.547.000,00
Penyerahan Buku Umum dari Dinas Pendidikan ke Dinas Perpustakaan sebanyak 500 buku sesuai BAST No.800/19/BAPB/DIKPORA/IX/2023	Rp 65.000.000,00
Realisasi Aset Tetap Lainnya yang sudah pindah secara otomatis akibat mapping di ke aset Lainnya	Rp 649.300.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp 890.847.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 33.050.125.702,55

- Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya senilai Rp5.591.520.189,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi Kesalahan Pencatatan Aset Tetap Lainnya Bahan Perpustakaan tercetak sesuai hasil Reviu Inspektorat senilai Rp6.864.500,00, dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya senilai Rp5.519.655.689,00 serta penerimaan buku dari Dikpora ke Dinas Perpustakaan sejumlah Rp65.000.000,00
- Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya senilai Rp890.847.000,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya yang salah pencatatan di Sekolah sekolah sesuai hasil Reviu Inspektorat senilai Rp176.547.000,00 dan penyerahannya ke Dinas Perpustakaan dari dinas Pendidikan senilai Rp65.000.000,00 serta Realisasi Aset tetap lainnya yang keluar dari realisasi ke Aset lainnya akibat mapping Akrua pada Aplikasi senilai Rp649.300.000,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.986.888.357,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.973.037.348,00 atau 64,00% dari nilai Tahun 2022 sebesar Rp49.959.925.705,00.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 17.986.888.357,00	Rp 49.959.925.705,00

Penurunan disebabkan oleh adanya pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) GB dan JIJ menjadi Aset Tetap GB dan JIJ Tahun 2023, rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 49.959.925.705,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal Tahun 2023	Rp 0,00
Mutasi Masuk : Tidak Terdaftar tambah Realisasi	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 0,00
Mutasi Kurang	
Mutasi Kurang Aset berupa konstruksi Dalam Penkerjaan atas bangunan Puskesmas Mananggu yang sudah selesai Pekerjaannya sesuai BAST Pekerjaan No.01/BAST-KONSTRUKSI/DAU/PPK/DIKES/IX/2023 tgl. 22 September 2023 pada dinas Kesehatan tahun 2022 senilai	Rp 3.893.652.374,00
Konstruksi Dalam Penkerjaan atas Pekerjaan Jalan dan Jaringan yang sudah selesai Pekerjaannya sesuai BAST Pekerjaan pada Dinas PUPR Kab Boalemo tahun 2023 Terlampir	Rp 28.079.384.974,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp 31.973.037.348,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 17.986.888.357,00

- Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp31.973.037.348,00 terdiri dari:
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan atas pekerjaan Gedung Puskesmas Mananggu yang sudah selesai fisiknya Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.893.652.374,00
 - Mutasi kurang KDP jalan dan jembatan serta jaringan pada Dinas PUPR yang selesai pekerjaannya Tahun 2023 sebesar Rp28.079.384.974,00.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.420.952.395.137,07 mengalami kenaikan sebesar Rp95.416.680.457,66 atau 6,71% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.325.535.714.679,41. Rincian Akumulasi Penyusutan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER 01 JAN 2023	MUTASI TAHUN 2023		JUMLAH PENAMBAHAN	SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER 31 DES 2023
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	Akumulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(367.853.053.199,92)	(44.243.263.419,00)	(28.004.856.804,34)	(16.238.406.614,66)	(384.091.459.814,58)
2	Akumulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(90.853.975.508,00)	(13.696.811.841,00)	(1.263.242.255,00)	(12.433.569.586,00)	(103.287.545.094,00)
3	Akumulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(863.989.079.308,49)	(214.722.435,00)	(66.797.799.440,00)	(67.012.521.875,00)	(930.572.156.313,49)
4	Akumulasi Aset Tetap Lainnya	(2.839.606.663,00)	(161.627.252,00)	0,00	(161.627.252,00)	(3.001.233.915,00)
	JUMLAH	(1.325.535.714.679,41)	(58.316.424.947,00)	(96.065.898.499,34)	(95.846.125.327,66)	(1.420.952.395.137,07)

5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.762.845.363,19 mengalami kenaikan sebesar Rp3.300.671.144,72 atau 8,36% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp39.462.174.218,47 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp 9.188.585.867,71	Rp 9.188.585.867,71
5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud	Rp 19.102.885.028,00	Rp 17.850.180.028,00
5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain (neto)	Rp 141.212.581.937,88	Rp 111.418.356.530,02
5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp (14.937.221.085,60)	Rp (12.896.286.798,80)
5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp (115.376.922.384,80)	Rp (87.345.159.971,46)
5.3.1.4.7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp 3.572.936.000,00	Rp 1.246.498.563,00
Jumlah Aset Lainnya	Rp 42.762.845.363,19	Rp 39.462.174.218,47

Aset Lainnya terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF), dengan uraian sebagai berikut.

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan nilai TGR yang tidak memiliki Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan belum dibayarkan pada Tahun 2023. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.188.585.867,71 tidak mengalami kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal	Rp 9.188.585.867,71
SKTJM Aset Lainnya - TGR Jatuh Tempo setelah Tahun 2023	Rp 0,00
Jumlah Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Rugi tahun 2023	Rp 9.188.585.867,71

Dari nilai di atas tidak terdapat TGR Jatuh tempo setelah Tahun 2023

5.3.1.4.2 Tagihan Jangka Panjang

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Tagihan Jangka Panjang.

5.3.1.4.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

5.3.1.4.4 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.102.885.028,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.252.705.000,00 atau 7,02% dari saldo tahun 2022 sebesar Rp17.850.180.028,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Goodwill
- Hak Cipta
- Software
- Kajian
- Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Kebudayaan
- Aset Tidak Berwujud Lainnya

	2023	2022
Rp	4.173.849.160,00	Rp 4.173.849.160,00
Rp	71.740.000,00	Rp 71.740.000,00
Rp	1.470.886.220,00	Rp 1.351.586.220,00
Rp	12.341.609.648,00	Rp 11.208.204.648,00
Rp	75.000.000,00	Rp 75.000.000,00
Rp	969.800.000,00	Rp 969.800.000,00
Rp	19.102.885.028,00	Rp 17.850.180.028,00

5.3.1.4.5 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Jumlah Aset Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp141.212.581.937,88 mengalami kenaikan sebesar Rp29.794.225.407,86 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp111.418.356.530,02. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Aset Rusak Berat / Usang
- Aset Tetap Yang Tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintah
- Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintah

	2023	2022
Rp	110.126.161.530,02	Rp 109.951.431.530,02
Rp	31.086.420.407,86	Rp 1.466.925.000,00
Rp	-	Rp -
Rp	-	Rp -
Rp	141.212.581.937,88	Rp 111.418.356.530,02

Laporan Hasil Inventarisasi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 menunjukkan terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.584.565.407,86 tidak diketahui keberadaannya yang telah direklasifikasi ke Aset Lain-Lain. Pemerintah Kabupaten Boalemo telah membentuk Tim Peneliti sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 023/103/II/2024 tentang Tim Peneliti Laporan Hasil Inventarisasi Barang yang Tidak Ditemukan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Inventarisasi Tahun 2023. Atas LHI tersebut telah dilakukan jurnal reklasifikasi dari Aset Peralatan Mesin ke Aset Lain-Lain.

5.3.1.4.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp14.937.221.085,60 mengalami kenaikan sebesar Rp2.040.934.286,80 atau 15,83% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp12.896.286.798,80 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud- Lisensi dan *Franchise*
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud- Hak Cipta
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud- *Software*
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud- Kajian
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud- *Goodwill*
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya

	2023	2022
Rp	(607.277.500,00)	Rp (607.277.500,00)
Rp	(3.178.031.788,10)	Rp (3.063.065.017,80)
Rp	(20.428.515,00)	Rp (20.428.515,00)
Rp	(2.613.417.780,00)	Rp (2.039.958.780,00)
Rp	(3.868.548.072,50)	Rp (3.485.554.333,00)
Rp	(4.649.517.430,00)	Rp (3.680.002.653,00)
Rp	(14.937.221.085,60)	Rp (12.896.286.798,80)

5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp115.376.922.384,80 mengalami kenaikan sebesar Rp28.031.762.513,34 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp87.345.159.871,46 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah

	2023	2022
Rp	-	-
Rp	(87.369.913.388,46)	Rp (87.345.159.971,46)
Rp	(28.007.008.996,34)	Rp 0,00
Rp	(115.376.922.384,80)	Rp (87.345.159.971,46)

5.3.1.4.7 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* diatur dalam Permenkeu Nomor 19 Tahun 2023.

Pada akhir Tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda dengan Nomor Rekening 519000657980 a.n. Rek Lain BI TDF TKD Kab Boalemo sesuai Nota Dinas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor S-292/WBP.29/2023 tanggal 22 Februari 2023 hal Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* ke Daerah (TDF-TKD). Tahun 2023 jumlah TDF Pemerintah Kabupaten Boalemo sebesar Rp3.572.936.000,00.

	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
- Dana Transfer TDF Tahun 2023	Rp 3.572.936.000,00	Rp 0,00	Rp 3.572.936.000,00

Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.572.936.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.326.437.437,00 atau 186,64% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.246.498.563,00, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022
Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp 3.572.936.000,00	Rp 1.246.498.563,00
Saldo Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp 3.572.936.000,00	Rp 1.246.498.563,00

5.3.1.5 Properti Investasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi menjelaskan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Nilai Properti Investasi Tahun 2023 sebesar Rp6.400.198.429,00 yang terdiri atas Properti Investasi Tanah dan Properti Investasi Bangunan Gedung. Adapun nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.145.273.827,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	AKUN	SALDO AWAL PROPERTI INVESTASI PER 01 JAN 2023	MUTASI TAHUN 2023		SALDO AKHIR PROPERTI INVESTASI PER 31 DES 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1	0,00	482.181.900,00	0,00	482.181.900,00
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5.2	0,00	5.918.016.529,00	0,00	5.918.016.529,00
	JUMLAH		0,00	6.400.198.429,00	0,00	6.400.198.429,00
1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5.2	0,00	(1.145.273.827,00)	0,00	(1.145.273.827,00)
	JUMLAH		0,00	(1.145.273.827,00)	0,00	(1.145.273.827,00)
	PROPERTI INVESTASI NETO		0,00	5.254.924.602,00	0,00	5.254.924.602,00

5.3.2 Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.361.776.560,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.402.599.420,63 atau 65,42% dari saldo Tahun 2022 sebesar RpRp18.959.177.139,37 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp 193.868.136,50	Rp 1.018.594.132,37
5.3.2.1.2 Utang Bunga	Rp 0,00	Rp 0,00
5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp 0,00	Rp 0,00
5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 117.083.333,00	Rp 30.000.000,00
5.3.2.1.5 Utang Belanja	Rp 10.284.653.402,00	Rp 1.549.054.094,00
5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 20.766.171.688,50	Rp 16.361.528.913,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 31.361.776.560,00	Rp 18.959.177.139,37

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp193.868.136,50 mengalami penurunan sebesar Rp824.725.995,87 atau 80,97% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.018.594.132,37. Utang PFK Tahun 2023 merupakan Utang PFK di BUD sebesar Rp0,50, Bendahara Pengeluaran sebesar Rp613.900,00 dan Bendahara Dana BOS dan Dana BOP Paud sebesar Rp180.436.585,00 dan dari jumlah PFK di Bendahara BLUD sebesar Rp12.817.651,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp 193.868.136,50	Rp 1.018.594.132,37

Utang PFK di BUD Tahun 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PER 31 DES 2023
1	Iuran Wajib Pegawai	Rp 0,00	Rp 13.279.871.902,00	Rp 13.279.871.902,00	Rp 0,00
2	Taperum	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
3	BPJS Kesehatan PNS	Rp 59.467.792,00	Rp 405.479.808,00	Rp 464.947.600,00	Rp 0,00
4	Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	Rp 238.686.637,00	Rp 8.195.520.652,00	Rp 8.434.207.289,00	Rp 0,00
5	Pajak Penghasilan PPh Pasal 22	Rp 30.879.697,50	Rp 510.746.716,00	Rp 541.626.413,00	Rp 0,50
6	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	Rp 18.789.646,00	Rp 119.120.312,00	Rp 137.909.958,00	Rp 0,00
7	Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 ayat 2	Rp 31.373.114,00	Rp 3.005.185.252,00	Rp 3.036.558.366,00	Rp 0,00
8	Pajak Penghasilan PPh Pasal 26	Rp 0,00	Rp 2.393.153,00	Rp 2.393.153,00	Rp 0,00
9	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 406.060.872,00	Rp 15.260.027.146,00	Rp 15.666.088.018,00	Rp 0,00
10	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	Rp 9.559.590,00	Rp 1.077.126.014,00	Rp 1.086.685.604,00	Rp 0,00
	JUMLAH	Rp 794.817.348,50	Rp 41.855.470.955,00	Rp 42.650.288.303,00	Rp 0,50

Utang PFK di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PER 31 DES 2023
1	Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	Rp 0,00	Rp 613.900,00	Rp 0,00	Rp 613.900,00
2	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
3	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	JUMLAH	Rp 0,00	Rp 613.900,00	Rp 0,00	Rp 613.900,00

Utang PFK di Bendahara Dana BOS Tahun 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PER 31 DES 2023
1	Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	Rp 4.371.882,00	Rp 17.495.673,00	Rp 3.575.955,00	Rp 18.291.600,00
2	Pajak Penghasilan PPh Pasal 22	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp -
3	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	Rp 9.355.631,00	Rp 20.157.049,00	Rp 7.590.534,00	Rp 21.922.146,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 178.520.174,27	Rp 121.410.397,00	Rp 174.054.614,27	Rp 125.875.957,00
5	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	Rp 29.081.745,00	Rp 12.010.262,00	Rp 26.745.125,00	Rp 14.346.882,00
	JUMLAH	Rp 221.329.432,27	Rp 171.073.381,00	Rp 211.966.228,27	Rp 180.436.585,00

Utang PFK di Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PER 31 DES 2023
1	BPJS Kesehatan PNS	Rp 228.488,60	Rp 1.994.476,00	Rp 228.488,60	Rp 1.994.476,00
2	Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	Rp 1.267.882,00	Rp 6.622.607,00	Rp 1.267.882,00	Rp 6.622.607,00
3	Pajak Penghasilan PPh Pasal 22	Rp 0,00	Rp 3,00	Rp 0,00	Rp 3,00
4	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	Rp 213.761,00	Rp 3.682.277,00	Rp 213.761,00	Rp 3682277,00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 737.220,00	Rp 518.288,00	Rp 737.220,00	Rp 518.288,00
	JUMLAH	Rp 2.447.351,60	Rp 12.817.651,00	Rp 2.447.351,60	Rp 12.817.651,00

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp117.083.333,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp87.083.333,00 atau 290,28% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp30.000.000,00. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	Pendapatan Diterima Dimuka		
1	BPKPD	Rp 102.083.333,00	Rp 0,00
2	Kantor Camat Wonosari	Rp 15.000.000,00	Rp 30.000.000,00
	JUMLAH	Rp 117.083.333,00	Rp 30.000.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp130.000.000,00 berasal dari pendapatan sewa ruangan Kantor Camat Wonosari oleh Bank SolutGo dengan Kontrak selama 5 Tahun sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2018. Kontrak selesai Tahun 2023 dan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 023/431/IX/2020 tentang Sewa Gedung Kantor Camat Wonosari dengan Bank SolutGo Cabang Tilamuta selama 5 Tahun sebesar Rp30.000.000,00 dan sewa Kantor Kas di kompleks kantor Bupati Boalemo sebesar Rp100.000.000,00 sesuai PKS No. dengan kontrak selama 5 tahun.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.284.653.402,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.735.599.308,00 atau 563,93% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.549.054.094,00. Kenaikan Utang Belanja yang signifikan disebabkan oleh adanya Utang Belanja luran Kepesertaan BPJS bagi ASN dan Non ASN, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rp 0,00	Rp 0,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 0,00	Rp 92.123.678,00
Inspektorat Daerah	Rp 0,00	Rp 2.250.000,00
Kecamatan Mananggu	Rp 0,00	Rp 42.199.068,00
Dinas Kesehatan	Rp 0,00	Rp 3.378.483,00
RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings	Rp 0,00	Rp 144.576.996,00
Kantor Kesbang POL dan Linmas	Rp 50.186.500,00	Rp 0,00
BPKPD	Rp 9.069.812.638,00	Rp 0,00
BPKPD PPKD	Rp 1.066.651.986,00	Rp 0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Rp 1.566.318,00	Rp 0,00
Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 75.410.940,00	Rp 12.423.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan	Rp 0,00	Rp 1.252.102.869,00
PKM Sari Tani	Rp 21.025.020,00	Rp 0,00
JUMLAH	Rp 10.284.653.402,00	Rp 1.549.054.094,00

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.766.171.688,50 mengalami kenaikan sebesar Rp4.404.642.775,50 atau 26,92% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp16.361.528.913,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA :		
Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 3.664.796.298,00	Rp 6.780.270.971,00
Dinas Kesehatan	Rp 0,00	Rp 1,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 40.589.450,00	Rp 117.771.310,00
SDN 04 Botumoito	Rp 2.604.938,00	Rp 2.604.938,00
SDN 10 Botumoito	Rp 2.748.652,00	Rp 2.748.652,00
SDN 05 Tilamuta	Rp 5.693.500,00	Rp 5.693.500,00
SDN 08 Tilamuta	Rp 6.762.974,00	Rp 6.762.974,00
SDN 13 Tilamuta	Rp 1.354.260,00	Rp 1.354.260,00
SDN 05 Paguyaman	Rp 3.895.252,00	Rp 3.895.252,00
SDN 08 Paguyaman	Rp 6.360.400,00	Rp 6.360.400,00

U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
SDN 11 Paguyaman	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00
SDN 01 Paguyaman Pantai	Rp 2.080.000,00	Rp 2.080.000,00
SDN 08 Paguyaman Pantai	Rp 1.280.000,00	Rp 1.280.000,00
SDN 09 Paguyaman Pantai	Rp 640.000,00	Rp 640.000,00
SMP NEGERI 5 Paguyaman	Rp 2.621.630,00	Rp 2.621.630,00
BLUD RSUD-TN	Rp 15.857.077.006,50	Rp 9.372.901.075,00
BLUD RSIB	Rp 1.120.380.728,00	Rp 0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 47.126.600,00	Rp 47.126.600,00
Dinas Perkimhubtan	Rp 0,00	Rp 7.257.350,00
DPPKBP3A	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 20.766.171.688,50	Rp 16.361.528.913,00

Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari kontrak-kontrak pada satuan kerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya (100%) namun pembayaran atau realisasi keuangan belum mencapai 100% dari nilai kontrak (Retensi). Selain itu, Utang Jangka Pendek Lainnya juga berasal dari Utang Jangka Pendek Lainnya pada BLUD RSUD-TN dan BLUD RSIB sebesar Rp.16.977.457.734,00 sebagai hasil proses konsolidasi pada Tahun 2023 dan utang dari sekolah-sekolah berupa buku yang belum ada pertanggungjawabannya sebesar Rp36.201.606,00.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022.

U R A I A N	TAHUN 2023	TAHUN 2022
5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya (Utang Pemerintah Pusat)	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp 0,00	Rp 0,00

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.496.235.172.400,49 mengalami kenaikan sebesar Rp39.792.491.443,92 atau 2,73% dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.456.442.680.956,57. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022
5.3.3. Ekuitas	Rp 1.496.235.172.400,49	Rp 1.456.442.680.956,57
Jumlah	Rp 1.496.235.172.400,49	Rp 1.456.442.680.956,57

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Kabupaten Boalemo Tahun 2023 adalah Laporan Operasional untuk menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Boalemo diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

KEGIATAN OPERASIONAL

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Boalemo. Selama periode Tahun 2023, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Boalemo tercatat sebesar **Rp42.608.817.144,96**. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar **Rp773.252.123.587,87** dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar **Rp730.303.421.442,91**. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp773.252.123.587,87 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp71.133.528.277,08, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp655.290.151.084,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sebesar Rp46.828.444.226,79. Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 digambarkan pada tabel berikut :

NO.URUT	U R A I A N	PENDAPATAN - LO		KENAIKAN / PENURUNAN	%
		TAHUN 2023	TAHUN 2022		
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp 71.133.528.277,08	Rp 46.330.913.842,92	Rp 24.802.614.434,16	53,53
2	Pendapatan Transfer - LO	Rp 655.290.151.084,00	Rp 636.585.054.537,00	Rp 18.705.096.547,00	2,94
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	Rp 46.828.444.226,79	Rp 23.043.718.602,80	Rp 23.784.725.623,99	103,22
JUMLAH		Rp 773.252.123.587,87	Rp 705.959.686.982,72	Rp 67.292.436.765	9,53

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp71.133.528.277,08 mengalami kenaikan sebesar Rp24.802.614.434,16 atau 53,53% dari realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp46.330.913.842,92. Rincian lebih lanjut Pendapatan Asli Daerah - LO dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
Pendapatan Pajak Daerah - LO	Rp 7.900.888.204,25	Rp 6.846.327.171,00	Rp 1.054.561.033,25	15,40
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp 1.875.052.991,00	Rp 5.611.095.060,00	Rp (3.736.042.069,00)	(66,58)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Rp 8.478.040.721,00	Rp 5.712.369.797,00	Rp 2.765.670.924,00	48,42
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	Rp 52.879.546.360,83	Rp 28.161.121.814,92	Rp 24.718.424.545,91	87,77
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp 71.133.528.277,08	Rp 46.330.913.842,92	Rp 24.802.614.434,16	53,53

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Boalemo pada Tahun 2023 sebesar Rp7.900.888.204,25 mengalami kenaikan sebesar Rp1.054.561.033,25 atau 15,40% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.846.327.171,00. Pendapatan Pajak- LO Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Pajak Hotel - LO	Rp 140.249.177,00	Rp 181.385.686,00	Rp (41.136.509,00)	(22,68)
2	Pajak Restoran - LO	Rp 686.105.205,25	Rp 1.125.888.290,00	Rp (439.783.084,75)	(39,06)
3	Pajak Hiburan - LO	Rp 3.200.000,00	Rp 10.012.500,00	Rp (6.812.500,00)	(68,04)
4	Pajak Reklame - LO	Rp 283.613.553,00	Rp 315.734.515,00	Rp (32.120.962,00)	(10,17)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	Rp 3.881.182.065,00	Rp 3.546.892.866,00	Rp 334.289.199,00	9,42
6	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 4.176.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp (824.000,00)	(16,48)
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	Rp 1.355.608.828,00	Rp 281.725.000,00	Rp 1.073.883.828,00	381,18
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	Rp 1.345.958.323,00	Rp 1.195.017.741,00	Rp 150.940.582,00	12,63
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	Rp 200.795.053,00	Rp 184.670.573,00	Rp 16.124.480,00	8,73
JUMLAH		Rp 7.900.888.204,25	Rp 6.846.327.171,00	Rp 1.054.561.033,25	15,40

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Boalemo pada Tahun 2023 sebesar Rp1.875.052.991,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.736.042.069,00 atau 66,58% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.611.095.060,00. Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rincian Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	Rp 134.874.642,00	Rp 3.353.162.566,00	Rp (3.218.287.924,00)	(95,98)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	Rp 152.608.000,00	Rp 3.838.000,00	Rp 148.770.000,00	3.876,24
3	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	Rp 570.350.000,00	Rp 780.580.500,00	Rp (210.230.500,00)	(26,93)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	Rp 0,00	Rp 186.612.500,00	Rp (186.612.500,00)	(100,00)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	Rp 0,00	Rp 3.500.000,00	Rp (3.500.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	Rp 0,00	Rp 6.625.000,00	Rp (6.625.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	Rp 22.288.000,00	Rp 181.140.000,00	Rp (158.852.000,00)	(87,70)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	Rp 194.554.167,00	Rp 205.830.000,00	Rp (11.275.833,00)	(5,48)
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	Rp 70.250.000,00	Rp 100.953.000,00	Rp (30.703.000,00)	(30,41)
10	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	Rp 113.559.550,00	Rp 230.280.925,00	Rp (116.721.375,00)	(50,69)
11	Retribusi Terminal - LO	Rp 0,00	Rp 168.800.000,00	Rp (168.800.000,00)	(100,00)
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	Rp 330.665.000,00	Rp 239.738.000,00	Rp 90.927.000,00	37,93
13	Retribusi Izin Perasetujuan Bangunan Gangguan - LO	Rp 285.903.632,00	Rp 150.034.569,00	Rp 135.869.063,00	90,56
JUMLAH		Rp 1.875.052.991,00	Rp 5.611.095.060,00	Rp (3.736.042.069,00)	(66,58)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan pendapatan deviden tunai yang diterima Pemerintah Kabupaten Boalemo atas Penyertaan Modal pada Bank SulutGo Cabang Tilamuta berupa dividen tunai dari hasil laba Tahun 2022 sebesar Rp8.478.040.721,00 berdasarkan surat dari PT Bank SulutGo Nomor 084/A/AKT/DIR/II/2023 tanggal 23 Maret tahun 2023 tentang Posisi Modal Disetor setelah Rups 09 Februari 2023, dan telah diakui sebagai pendapatan-LO Tahun 2022. Bagian laba tersebut terdiri dari pendapatan dividen tunai atas Laba penyertaan modal pada Bank SulutGo Tahun 2022 dan telah dipindahbukan pada tanggal 22 Februari 2023 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 8.478.040.721,00	Rp 5.712.369.797,00	Rp 2.765.670.924,00	48,42
	JUMLAH	Rp 8.478.040.721,00	Rp 5.712.369.797,00	Rp 2.765.670.924,00	48,42

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Kelompok penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah - LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.879.546.360,83 dan Rp28.161.121.814,92. Realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini antara lain sebagai berikut:

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Jasa Giro Kas Daerah - LO	Rp 782.223.308,00	Rp 1.330.806.035,00	Rp (548.582.727,00)	(41,22)
2	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP - LO	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
4	Pendapatan Bunga Deposito - LO	Rp 679.131.435,86	Rp 165.134.751,72	Rp 513.996.684,14	311,26
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO	Rp 4.272.922.422,33	Rp 4.536.761.561,52	Rp (263.839.139,19)	(5,82)
6	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	Rp 0,00	Rp 1.258.510.110,00	Rp (1.258.510.110,00)	(100,00)
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	Rp 5.525.773,64	Rp 20.308.167,68	Rp (14.782.394,04)	(72,79)
8	Pendapatan dari BLUD - LO	Rp 29.318.281.581,00	Rp 20.849.601.189,00	Rp 8.468.680.392,00	40,62
9	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	Rp 17.821.461.840,00	Rp 0,00	Rp 17.821.461.840,00	0,00
	JUMLAH	Rp 52.879.546.360,83	Rp 28.161.121.814,92	Rp 24.718.424.545,91	87,77

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp52.879.546.360,83 terjadi kenaikan sebesar Rp24.718.424.545,91 atau 87,77% dari tahun sebelumnya. Pada tabel Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO, terdapat Pendapatan dari BLUD dan Jasa Layanan Umum BLUD - LO sebesar Rp47.329.601.189,00 merupakan pendapatan yang diterima oleh BLUD RSUD-TN, RSIB, dan 11 (sebelas) puskesmas di Kabupaten Boalemo berdasarkan laporan triwulan yang disampaikan kepada BPKPD dan telah dicatat melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Pendapatan BLUD RSUD-TN dan BLUD RSIB serta BLUD 11 (sebelas) puskesmas dapat langsung digunakan tanpa harus menyetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer LO Tahun 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Jumlah Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat Lainnya dan/atau Pemerintah Provinsi baik peruntukannya yang sudah ditentukan maupun belum yang bebas digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai kebutuhan. Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp655.290.151.084,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.705.096.547,00 atau 2,94% dari pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp636.585.054.537,00. Selain itu, Pendapatan Transfer Pusat Lainnya berupa Dana Desa sebesar Rp77.389.355.733,00 tidak diakui sebagai Pendapatan Transfer-LO berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akruel. Rincian Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	Rp 630.821.794.426,00	Rp 611.122.391.583,00	Rp 19.699.402.843,00	3,22
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	Rp 24.468.356.658,00	Rp 25.462.662.954,00	Rp (994.306.296,00)	(3,90)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	Rp 655.290.151.084,00	Rp 636.585.054.537,00	Rp 18.705.096.547,00	2,94

Rincian Pendapatan Transfer-LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO terdiri dari :

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diantaranya berupa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	Rp 13.406.863.000,00	Rp 13.321.003.851,00	Rp 85.859.149,00	0,64
2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	Rp 441.488.971.914,00	Rp 421.966.077.434,00	Rp 19.522.894.480,00	4,63
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	Rp 82.015.800.451,00	Rp 98.950.869.976,00	Rp (16.935.069.525,00)	-17,11
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - LO	Rp 84.042.906.061,00	Rp 71.682.186.322,00	Rp 12.360.719.739,00	17,24
	JUMLAH	Rp 620.954.541.426,00	Rp 605.920.137.583,00	Rp 15.034.403.843,00	2,48

5.4.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO				
1	Dana Insentif Fiskal - LO	Rp 9.867.253.000,00	Rp 5.202.254.000,00	Rp 4.664.999.000,00	89,67
	JUMLAH	Rp 9.867.253.000,00	Rp 5.202.254.000,00	Rp 4.664.999.000,00	89,67

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2023 sebesar Rp9.867.253.000,00 merupakan Dana Insentif Fiskal dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.5.202.254.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp.4.664.999.000,00 atau 89,67%

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yaitu Dana Bagi Hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, serta Pajak Rokok Tahun 2023 sebesar Rp24.468.356.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp994.306.296,00 atau 3,90% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp25.462.662.954,00 dengan rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	Rp 24.293.356.658,00	Rp 25.462.662.954,00	Rp (1.169.306.296,00)	(4,59)
1	Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	Rp 4.187.973.410,00	Rp 4.111.468.161,00	Rp 76.505.249,00	1,86
2	Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	Rp 3.826.507.770,00	Rp 4.060.294.397,00	Rp (233.786.627,00)	-5,76
3	Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	Rp 8.580.796.285,00	Rp 8.128.019.810,00	Rp 452.776.475,00	5,57
4	Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	Rp 10.960.937,00	Rp 11.523.535,00	Rp (562.598,00)	-4,88
5	Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	Rp 7.687.118.256,00	Rp 9.151.357.051,00	Rp (1.464.238.795,00)	-16,00
	Bantuan Keuangan - LO	Rp 175.000.000,00	Rp -	Rp 175.000.000,00	-
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi - LO	Rp 175.000.000,00	Rp 0,00	Rp 175.000.000,00	0,00
	JUMLAH	Rp 24.468.356.658,00	Rp 25.462.662.954,00	Rp (994.306.296,00)	(3,90)

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp46.828.444.226,79, yang terdiri dari antara lain pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa infrastruktur Jalan dan Jaringan untuk Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata sebesar Rp39.318.812.787,00, dan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan berupa tanah untuk pembangunan BTS pada Dinas Kominfo sebesar Rp4.445.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH - LO

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Rp 39.318.812.787,00	Rp 11.575.616.365,00	Rp 27.743.196.422,00	239,67
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	Rp 5.663.209.339,79	Rp 0,00	Rp 5.663.209.339,79	0,00
Pendapatan Hibah Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	Rp 0,00	Rp 1.410.000.000,00	Rp (1.410.000.000,00)	-100,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	Rp 4.445.000,00	Rp 0,00	Rp 4.445.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO	Rp 1.841.977.100,00	Rp 0,00	Rp 1.841.977.100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN HIBAH-LO	Rp 46.828.444.226,79	Rp 12.985.616.365,00	Rp 33.842.827.861,79	260,62

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LO

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Lainnya - LO tahun 2023

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	Rp 0,00	Rp 10.058.102.237,80	Rp 0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN LAINNYA - LO	Rp 0,00	Rp 10.058.102.237,80	Rp (10.058.102.237,80)	(100,00)

5.4.2 Beban Daerah

Realisasi Beban Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp730.303.421.442,91. Beban tersebut terdiri dari:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil. Beban Pegawai pada Tahun 2023 sebesar Rp332.488.692.217,60 mengalami kenaikan sebesar Rp5.903.055.414,60 atau 1,81% dari Tahun 2022 sebesar Rp326.585.636.803,00. Kenaikan Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp2.553.989.437,00 disebabkan adanya kenaikan Gaji berkala, Kenaikan Pangkat dan Tunjangan Jabatan selama Tahun 2023. Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	Rp 160.262.436.037,00	Rp 152.088.483.034,00	Rp 8.173.953.003,00	5,37
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	Rp 15.008.372.048,00	Rp 14.457.111.320,00	Rp 551.260.728,00	3,81
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	Rp 4.876.375.000,00	Rp 5.197.880.000,00	Rp (321.505.000,00)	-6,19
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	Rp 10.746.015.000,00	Rp 9.977.961.000,00	Rp 768.054.000,00	7,70
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp 2.646.199.840,00	Rp 2.518.024.000,00	Rp 128.175.840,00	5,09
6	Beban Tunjangan Beras ASN	Rp 9.952.519.313,00	Rp 9.571.823.820,00	Rp 380.695.493,00	3,98
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp 108.009.742,00	Rp 115.466.135,00	Rp (7.456.393,00)	-6,46
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	Rp 2.364.733,00	Rp 2.217.560,00	Rp 147.173,00	6,64
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp 11.774.032.404,00	Rp 9.746.279.560,00	Rp 2.027.752.844,00	20,81
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp 337.698.162,00	Rp 309.876.311,00	Rp 27.821.851,00	8,98
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp 1.013.097.037,00	Rp 929.629.478,00	Rp 83.467.559,00	8,98
12	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp 8.806.127.034,00	Rp 9.567.657.445,00	Rp (761.530.411,00)	-7,96
13	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp 1.338.890.000,00	Rp 1.917.589.608,00	Rp (578.699.608,00)	-30,18
14	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp 29.596.104.471,00	Rp 42.205.947.097,00	Rp (12.609.842.626,00)	-29,88
15	Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp 196.111.613,00	Rp 196.764.357,00	Rp (652.744,00)	-0,33
16	Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 57.594.305,00	Rp 57.117.500,00	Rp 476.805,00	0,83
17	Beban TPG PNSD	Rp 29.728.176.300,00	Rp 34.294.681.100,00	Rp (4.566.504.800,00)	-13,32
18	Beban TKG PNSD	Rp 2.833.144.800,00	Rp 2.562.246.400,00	Rp 270.898.400,00	10,57
19	Beban Tamsil Guru PNSD	Rp 6.963.744.700,00	Rp 1.233.750.000,00	Rp 5.729.994.700,00	464,44
20	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	Rp 1.879.063.405,00	Rp 2.974.676.891,00	Rp (1.095.613.486,00)	-36,83
21	Beban Honorarium	Rp 306.820.000,00	Rp 165.132.000,00	Rp 141.688.000,00	85,80
22	Beban Uang Representasi DPRD	Rp 561.540.000,00	Rp 553.665.000,00	Rp 7.875.000,00	1,42
23	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	Rp 40.086.900,00	Rp 41.649.300,00	Rp (1.562.400,00)	-3,75
24	Beban Tunjangan Beras DPRD	Rp 47.362.680,00	Rp 50.983.680,00	Rp (3.621.000,00)	-7,10
25	Beban 'Uang Paket DPRD	Rp 48.132.000,00	Rp 47.659.500,00	Rp 472.500,00	0,99
26	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	Rp 814.233.000,00	Rp 802.814.250,00	Rp 11.418.750,00	1,42
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD	Rp 79.474.500,00	Rp 78.515.325,00	Rp 959.175,00	1,22
28	Beban Tunjangan Komunikasi Intensip Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 1.890.000.000,00	Rp 1.871.100.000,00	Rp 18.900.000	1,01
29	Beban Tunjangan Reses DPRD	Rp 157.500.000,00	Rp 466.200.000,00	Rp (308.700.000)	-66,22
30	Beban Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 238.624.359,00	Rp 236.293.057,00	Rp 2.331.302,00	0,99
31	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 3.741.893.940,00	Rp 3.675.691.368,00	Rp 66.202.572,00	1,80
32	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	Rp 3.284.160.000,00	Rp 3.246.840.000,00	Rp 37.320.000,00	1,15
33	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp 0,00	Rp 4.725.000,00	Rp (4.725.000,00)	-100,00
34	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp 0,00	Rp 12.600.000,00	Rp (12.600.000,00)	-100,00
35	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp 0,00	Rp 1.764.000,00	Rp (1.764.000,00)	-100,00
36	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp 52.920.000,00	Rp 52.920.000,00	Rp 0,00	0,00
37	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp 0,00	Rp 1.448.400,00	Rp (1.448.400,00)	-100,00
38	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp 0,00	Rp 165.414,00	Rp (165.414,00)	-100,00
39	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp 0,00	Rp 400,00	Rp (400,00)	-100,00
40	Beban Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp 58.541.415,00	Rp 58.734.135,00	Rp (192.720,00)	-0,33
41	Beban Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 17.192.330,00	Rp 16.993.750,00	Rp 198.580,00	1,17
42	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	Rp 107.992.000,00	Rp 105.808.000,00	Rp 2.184.000,00	2,06
43	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	Rp 229.999.992,00	Rp 229.999.992,00	Rp 0,00	0,00
44	Beban Pegawai BOS	Rp 0,00	Rp 817.645.000,00	Rp (817.645.000,00)	-100,00
45	Beban Pegawai BLUD	Rp 22.686.143.157,60	Rp 14.121.106.616,00	Rp 8.565.036.541,60	60,65
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI	Rp 332.488.692.217,60	Rp 326.585.636.803,00	Rp 5.903.055.414,60	1,81

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp60.136.412.120,34 digunakan untuk operasional dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.370.061.480,61 atau 15,90% dari Beban Barang Tahun 2022 sebesar Rp71.506.473.600,95, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp 0,00	Rp 163.435.700,00	Rp (163.435.700,00)	-100,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	Rp 94.969.016,99	Rp 51.692.125,00	Rp 43.276.891,99	83,72
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.800.363.024,00	Rp 2.377.646.769,00	Rp (577.283.745,00)	-24,28
4	Beban Bahan-Bahan Baku	Rp 0,00	Rp 11.905.345,00	Rp (11.905.345,00)	-100,00
5	Beban Bahan-Barang dalam Proses	Rp 36.038.000,00	Rp 46.989.000,00	Rp (10.951.000,00)	-23,31
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp 0,00	Rp 55.185.350,00	Rp (55.185.350,00)	-100,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp 443.250,00	Rp 6.751.576,00	Rp (6.308.326,00)	-93,43
8	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	Rp 39.277.420,00	Rp 776.469.649,00	Rp (737.192.229,00)	-94,94
9	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp 0,00	Rp 137.664.580,00	Rp (137.664.580,00)	-100,00
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp 1.884.186.962,00	Rp 1.267.331.796,00	Rp 616.855.166,00	48,67
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 282.009.800,00	Rp 287.400.044,00	Rp (5.390.244,00)	-1,88
12	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Rp 49.020.000,00	Rp 450.000,00	Rp 48.570.000,00	10.793,33
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp 3.000.000,00	Rp 0,00	Rp 3.000.000,00	0,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 903.993.316,00	Rp 1.587.865.835,00	Rp (683.872.519,00)	-43,07
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 678.993.604,00	Rp 1.087.983.545,00	Rp (408.989.941,00)	-37,59
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 1.483.326.290,19	Rp 2.661.824.439,81	Rp (1.178.498.149,62)	-44,27
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp 97.212.500,00	Rp 211.160.500,00	Rp (113.948.000,00)	-53,96
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp 34.835.500,00	Rp 25.000.000,00	Rp 9.835.500,00	39,34
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 717.021.596,00	Rp 815.924.355,00	Rp (98.902.759,00)	-12,12
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 216.690.355,00	Rp 567.330.495,00	Rp (350.640.140,00)	-61,81
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 169.040.530,00	Rp 223.477.950,00	Rp (54.437.420,00)	-24,36
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Rp 24.254.000,00	Rp 56.500.000,00	Rp (32.246.000,00)	-57,07
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	Rp 0,00	Rp 40.074.000,00	Rp (40.074.000,00)	-100,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp 131.340.000,00	Rp 295.825.750,00	Rp (164.485.750,00)	-55,60
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 94.882.102,00	Rp 1.140.720.807,00	Rp (1.045.838.705,00)	-91,68
27	Beban Obat-Obatan-Obat	Rp 15.996.818.096,16	Rp 17.023.786.705,14	Rp (1.026.968.608,98)	-6,03
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp 173.359.935,00	Rp 6.500.000,00	Rp 166.859.935,00	2.567,08
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 18.694.298.857,00	Rp 23.117.569.253,00	Rp (4.423.270.396,00)	-19,13
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp 1.587.694.213,00	Rp 4.304.682.751,00	Rp (2.716.988.538,00)	-63,12
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	Rp 2.369.606.060,00	Rp 2.142.144.849,00	Rp 227.461.211,00	10,62
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	Rp 0,00	Rp 138.897.000,00	Rp (138.897.000,00)	-100,00
33	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
34	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	Rp 2.106.924.312,00	Rp (2.106.924.312,00)	Rp 4.213.848.624,00	-200,00
35	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp 6.600.110.550,00	Rp 6.238.346.675,00	Rp 361.763.875,00	5,80
36	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 1.775.653.632,00	Rp 3.392.458.000,00	Rp (1.616.804.368,00)	-47,66
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Rp 371.920.000,00	Rp 97.854.000,00	Rp 274.066.000,00	280,08
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp 792.568.368,00	Rp 1.814.199.858,00	Rp (1.021.631.490,00)	-56,31
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	Rp 0,00	Rp 1.650.000,00	Rp (1.650.000,00)	-100,00
40	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 137.769.331,00	Rp 207.390.400,00	Rp (69.621.069,00)	-33,57
41	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp 14.000.000,00	Rp 50.155.000,00	Rp (36.155.000,00)	-72,09
42	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 10.000.000,00	Rp 411.750.000,00	Rp (401.750.000,00)	-97,57
43	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp 144.900.000,00	Rp 52.950.000,00	Rp 91.950.000,00	173,65
44	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp 38.640.000,00	Rp 137.376.000,00	Rp (98.736.000,00)	-71,87
45	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp 94.950.000,00	Rp 74.725.200,00	Rp 20.224.800,00	27,07
46	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	Rp 0,00	Rp 3.000.000,00	Rp (3.000.000,00)	-100,00
47	Beban Pakaian Adat Daerah	Rp 118.908.000,00	Rp 103.675.000,00	Rp 15.233.000,00	14,69
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	Rp 30.400.000,00	Rp 27.055.000,00	Rp 3.345.000,00	12,36
49	Beban Pakaian Olahraga	Rp 321.993.500,00	Rp 313.532.611,00	Rp 8.460.889,00	2,70
50	Beban Pakaian Jas/Safari	Rp 15.000.000,00	Rp 51.000.000,00	Rp (36.000.000,00)	-70,59
51	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	Rp 0,00	Rp 6.090.000,00	Rp (6.090.000,00)	-100,00
	JUMLAH	Rp 60.136.412.120,34	Rp 71.506.473.600,95	Rp -11.370.061.480,61	(15,90)

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp105.988.995.484,41 digunakan untuk operasional dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah. Beban Jasa pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.526.773.852,59 atau 4,96% dari Beban Jasa Tahun 2022 sebesar Rp111.515.769.337,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD Yang tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp 0,00	Rp 159.991.000,00	Rp (159.991.000,00)	-100,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 1.964.432.994,00	Rp 2.724.350.500,00	Rp (759.917.506,00)	-27,89
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 1.076.162.500,00	Rp 3.393.145.000,00	Rp (2.316.982.500,00)	-68,28
4	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi, dan Beracara	Rp 192.000.000,00	Rp 201.000.000,00	Rp (9.000.000,00)	-4,48
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp 889.850.000,00	Rp 1.696.675.000,00	Rp (806.825.000,00)	-47,55
6	Beban Honorarium Rohaniwan	Rp 4.000.000,00	Rp 4.400.000,00	Rp (400.000,00)	-9,09
7	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp 9.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp (6.000.000,00)	-40,00
8	Beban Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 3.100.000,00	Rp 376.100.000,00	Rp (373.000.000,00)	-99,18
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Rp 352.200.000,00	Rp 274.800.000,00	Rp 77.400.000,00	28,17
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	Rp 12.127.080.500,00	Rp 10.001.567.206,00	Rp 2.125.513.294,00	21,25

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 7.688.444.266,00	Rp 14.469.083.530,00	Rp (6.780.639.264,00)	-46,86
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp 617.655.000,00	Rp 719.315.000,00	Rp (101.660.000,00)	-14,13
13	Beban Jasa Tenaga Ketenitraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 1.908.063.916,00	Rp 2.559.303.500,00	Rp (651.239.584,00)	-25,45
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp 398.075.930,00	Rp 508.580.000,00	Rp (110.504.070,00)	-21,73
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp 0,00	Rp 16.500.000,00	Rp (16.500.000,00)	-100,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Rp 6.500.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 5.250.000,00	420,00
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	Rp 55.080.000,00	Rp 81.600.000,00	Rp (26.520.000,00)	-32,50
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	Rp 306.440.325,00	Rp 411.792.525,00	Rp (105.352.200,00)	-25,58
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Rp 58.775.000,00	Rp 77.575.000,00	Rp (18.800.000,00)	-24,23
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp 149.474.000,00	Rp 211.724.000,00	Rp (62.250.000,00)	-29,40
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp 7.642.232.027,00	Rp 9.979.309.021,00	Rp (2.337.076.994,00)	-23,42
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 260.478.568,00	Rp 342.195.000,00	Rp (81.716.432,00)	-23,88
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 369.293.088,00	Rp 410.048.006,00	Rp (40.754.918,00)	-9,94
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp 1.187.677.000,00	Rp 1.754.600.000,00	Rp (566.923.000,00)	-32,31
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 2.382.563.857,00	Rp 3.296.630.465,00	Rp (914.066.608,00)	-27,73
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp 90.000.000,00	Rp 58.825.000,00	Rp 31.175.000,00	53,00
27	Beban Jasa Tenaga Caraka	Rp 11.750.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp (3.250.000,00)	-21,67
28	Beban Jasa Tenaga Sopir	Rp 1.012.828.998,00	Rp 1.335.281.100,00	Rp (322.452.102,00)	-24,15
29	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	Rp 135.772.568,00	Rp 98.120.150,00	Rp 37.652.418,00	38,37
30	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	Rp 162.000.000,00	Rp 10.800.000,00	Rp 151.200.000,00	1.400,00
31	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp 31.500.000,00	Rp 33.300.000,00	Rp (1.800.000,00)	-5,41
32	Beban Jasa Tata Rias	Rp 5.000.000,00	Rp 4.870.000,00	Rp 130.000,00	2,67
33	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp 17.100.000,00	Rp 0,00	Rp 17.100.000,00	0,00
34	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	Rp 31.070.010,00	Rp 108.300.732,00	Rp (77.230.722,00)	-71,31
35	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp 2.352.098.029,00	Rp 2.286.518.241,00	Rp 65.579.788,00	2,87
36	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	Rp 2.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp (4.000.000,00)	-66,67
37	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp 0,00	Rp 124.473.000,00	Rp (124.473.000,00)	-100,00
38	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp 39.582.600,00	Rp 40.000.000,00	Rp (417.400,00)	-1,04
39	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp 0,00	Rp 35.000.000,00	Rp (35.000.000,00)	-100,00
40	Beban Jasa Kalibrasi	Rp 54.146.500,00	Rp 126.284.500,00	Rp (72.138.000,00)	-57,12
41	Beban Jasa Pengolahan Sampah	Rp 24.975.000,00	Rp 0,00	Rp 24.975.000,00	0,00
42	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Rp 10.808.000,00	Rp 13.800.000,00	Rp (2.992.000,00)	-21,68
43	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp 1.302.517.525,00	Rp 1.334.483.000,00	Rp (31.965.475,00)	-2,40
44	Beban Tagihan Telepon	Rp 19.280.900,00	Rp 0,00	Rp 19.280.900,00	0,00
45	Beban Tagihan Air	Rp 399.799.003,00	Rp 548.786.731,00	Rp (148.987.728,00)	-27,15
46	Beban Tagihan Listrik	Rp 2.616.234.062,00	Rp 3.943.053.331,00	Rp (1.326.819.269,00)	-33,65
47	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 5.400.000,00	Rp 120.600.000,00	Rp (115.200.000,00)	-95,52
48	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 1.135.540.777,00	Rp 392.926.635,00	Rp 742.614.142,00	189,00
49	Beban Paket/Pengiriman	Rp 4.049.650,00	Rp 22.405.000,00	Rp (18.355.350,00)	-81,93
50	Beban Penambahan Daya	Rp 13.000.000,00	Rp 380.525.438,00	Rp (367.525.438,00)	-96,58
51	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 96.705.188,00	Rp 124.272.846,00	Rp (27.567.658,00)	-22,18
52	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	Rp 1.048.638.886,00	Rp 0,00	Rp 1.048.638.886,00	0,00
53	Beban Medical Check UP	Rp 6.466.500,00	Rp 0,00	Rp 6.466.500,00	0,00
54	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 30.765.006,00	Rp 0,00	Rp 30.765.006,00	0,00
55	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 1.394.169.388,00	Rp 838.658.480,00	Rp 555.510.908,00	66,24
56	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	Rp 3.169.803.496,00	Rp 3.404.906.400,00	Rp (235.102.904,00)	-6,90
57	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 3.010.241.876,00	Rp 0,00	Rp 3.010.241.876,00	0,00
58	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	Rp 220.788.236,00	Rp 107.524.800,00	Rp 113.263.436,00	105,34
59	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp 274.908.728,00	Rp 134.406.000,00	Rp 140.502.728,00	104,54
60	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	Rp 0,00	Rp 168.500.000,00	Rp (168.500.000,00)	-100,00
61	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00	Rp 1.000.000,00	0,00
62	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp 696.900.000,00	Rp 1.113.450.000,00	Rp (416.550.000,00)	-37,41
63	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 17.100.000,00	Rp 42.400.000,00	Rp (25.300.000,00)	-59,67
64	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rp 0,00	Rp 5.000.000,00	Rp (5.000.000,00)	-100,00
65	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Rp 3.000.000,00	Rp 0,00	Rp 3.000.000,00	0,00
66	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu	Rp 2.000.000,00	Rp 0,00	Rp 2.000.000,00	0,00
67	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp 4.800.000,00	Rp 345.421.581,00	Rp (340.621.581,00)	-98,61
68	Beban Sewa Mebel	Rp 11.000.000,00	Rp 26.050.000,00	Rp (15.050.000,00)	-57,77
69	Beban Sewa Alat Dapur	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00	0,00
70	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp 235.400.000,00	Rp 409.007.500,00	Rp (173.607.500,00)	-42,45
71	Beban Sewa Sumber Tenaga	Rp 10.000.000,00	Rp 0,00	Rp 10.000.000,00	0,00
72	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 3.458.950.000,00	Rp 1.972.385.000,00	Rp 1.486.565.000,00	75,37
73	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Rp 0,00	Rp 35.000.000,00	Rp (35.000.000,00)	-100,00
74	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Rp 54.999.999,00	Rp 21.280.000,00	Rp 33.719.999,00	158,46
75	Beban Sewa Hotel	Rp 204.520.000,00	Rp 2.333.293.720,00	Rp (2.128.773.720,00)	-91,23
76	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Rp 100.000.000,00	Rp 0,00	Rp 100.000.000,00	0,00
77	Beban Sewa Motel	Rp 0,00	Rp 30.000.000,00	Rp (30.000.000,00)	-100,00
78	Beban Sewa Audio Visual	Rp 0,00	Rp 10.000.000,00	Rp (10.000.000,00)	-100,00
79	Beban Sewa Pagar	Rp 8.500.000,00	Rp 0,00	Rp 8.500.000,00	0,00
80	Beban Sewa Alat Musik	Rp 5.000.000,00	Rp 14.500.000,00	Rp (9.500.000,00)	-65,52
81	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Rp 12.200.000,00	Rp 0,00	Rp 12.200.000,00	0,00
82	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	Rp 0,00	Rp 315.908.000,00	Rp (315.908.000,00)	-100,00
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitek	Rp 214.755.500,00	Rp 0,00	Rp 214.755.500,00	0,00
84	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Jasa Nasihat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	Rp 799.461.813,00	Rp 0,00	Rp 799.461.813,00	0,00
85	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Rp 429.947.575,00	Rp 0,00	Rp 429.947.575,00	0,00
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Rp 125.065.175,00	Rp 0,00	Rp 125.065.175,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
87	Beban Jasa Konsltansi Perencanaan Rekayasa -Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Rp 99.900.000,00	Rp 0,00	Rp 99.900.000,00	0,00
88	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Rp 20.900.000,00	Rp 0,00	Rp 20.900.000,00	0,00
89	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Rp 6.000.000,00	Rp 0,00	Rp 6.000.000,00	0,00
90	Beban Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan	Rp 194.747.000,00	Rp 0,00	Rp 194.747.000,00	0,00
91	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei	Rp 99.900.000,00	Rp 563.884.411,00	Rp (463.984.411,00)	-82,28
92	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp 49.870.000,00	Rp 420.552.700,00	Rp (370.682.700,00)	-88,14
93	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layana-Jasa Khusus	Rp 92.530.720,00	Rp 0,00	Rp 92.530.720,00	0,00
94	Beban Jasa Ketersediaan Layanan - (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	Rp 18.260.000,00	Rp 7.499.250,00	Rp 10.760.750,00	143,49
95	Beban Jasa Ketersediaan Layanan - (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	Rp 312.182.228,00	Rp 520.587.578,00	Rp (208.405.350,00)	-40,03
96	Beban Jasa Ketersediaan Layanan - (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Rp 97.226.684,00	Rp 884.806.976,00	Rp (787.580.292,00)	-89,01
97	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	Rp 99.654.000,00	Rp 66.500.000,00	Rp 33.154.000,00	49,86
98	Beban Bimbingan Teknis	Rp 394.041.194,00	Rp 133.970.000,00	Rp 260.071.194,00	194,13
99	Beban Diklat Kepemimpinan	Rp 141.945.000,00	Rp 51.000.000,00	Rp 90.945.000,00	178,32
100	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Rp 578.600.000,00	Rp 19.200.000,00	Rp 559.400.000,00	2.913,54
101	Beban Sosialisasi	Rp 0,00	Rp 114.640.000,00	Rp (114.640.000,00)	-100,00
102	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp 180.150.000,00	Rp 208.290.000,00	Rp (28.140.000,00)	-13,51
103	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp 99.750.000,00	Rp 0,00	Rp 99.750.000,00	0,00
104	Beban Beasiswa	Rp 838.350.000,00	Rp 594.625.000,00	Rp 243.725.000,00	40,99
105	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp 1.372.426.891,00	Rp 1.683.700.000,00	Rp (311.273.109,00)	-18,49
106	Beban Transfer Keuangan Daerah Dan Desa (TKDD)	Rp 1.167.120.000,00	Rp 4.923.539.000,00	Rp (3.756.419.000,00)	-76,30
107	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	Rp 0,00	Rp 13.000.000,00	Rp (13.000.000,00)	-100,00
108	Beban Uang yang diberikan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Rp 20.000.000,00	Rp 0,00	Rp 20.000.000,00	0,00
109	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp 3.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp (2.000.000,00)	-40,00
110	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Rp 300.250.000,00	Rp 290.200.000,00	Rp 10.050.000,00	3,46
111	Beban Barang dan Jasa BOS	Rp 16.500.718.691,00	Rp 13.904.011.563,00	Rp 2.596.707.128,00	18,68
112	Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp 18.528.353.117,41	Rp 10.931.910.921,00	Rp 7.596.442.196,41	69,49
	JUMLAH	Rp 105.988.995.484,41	Rp 111.515.769.337,00	Rp -5.526.773.852,59	(4,96)

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp5.191.273.294,00 digunakan untuk operasional dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.119.696.857,00 atau 44,25% dari Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 sebesar Rp9.310.970.151,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil -Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Rp 24.955.000,00	Rp 0,00	Rp 24.955.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Lapangan Olahraga	Rp 0,00	Rp 92.900.000,00	Rp (92.900.000,00)	-100,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	Rp 0,00	Rp 164.946.000,00	Rp (164.946.000,00)	-100,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	Rp 0,00	Rp 10.000.000,00	Rp (10.000.000,00)	-100,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	Rp 0,00	Rp 4.500.000,00	Rp (4.500.000,00)	-100,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp 347.939.514,00	Rp 946.576.546,00	Rp (598.637.032,00)	-63,24
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 145.207.326,00	Rp 32.639.425,00	Rp 112.567.901,00	344,88
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 0,00	Rp 8.840.000,00	Rp (8.840.000,00)	-100,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Rp 101.165.460,00	Rp 131.433.479,00	Rp (30.268.019,00)	-23,03
10	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Rp 0,00	Rp 92.905.000,00	Rp (92.905.000,00)	-100,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp 0,00	Rp 35.025.000,00	Rp (35.025.000,00)	-100,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp 1.085.500,00	Rp 800.000,00	Rp 285.500,00	35,69
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp 0,00	Rp 9.313.500,00	Rp (9.313.500,00)	-100,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 126.740.000,00	Rp 201.122.000,00	Rp (74.382.000,00)	-36,98
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp 0,00	Rp 56.954.600,00	Rp (56.954.600,00)	-100,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruang Pejabat	Rp 0,00	Rp 3.425.000,00	Rp (3.425.000,00)	-100,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	Rp 0,00	Rp 16.000.000,00	Rp (16.000.000,00)	-100,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	Rp 0,00	Rp 37.962.000,00	Rp (37.962.000,00)	-100,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	Rp 0,00	Rp 8.500.000,00	Rp (8.500.000,00)	-100,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	Rp 0,00	Rp 12.871.100,00	Rp (12.871.100,00)	-100,00
24	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp 0,00	Rp 33.662.500,00	Rp (33.662.500,00)	-100,00
25	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 67.655.000,00	Rp 131.138.756,00	Rp (63.483.756,00)	-48,41
26	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp 29.445.000,00	Rp 45.996.000,00	Rp (16.551.000,00)	-35,98
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer	Rp 0,00	Rp 27.000.000,00	Rp (27.000.000,00)	-100,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 452.893.349,00	Rp 1.521.067.801,00	Rp (1.068.174.452,00)	-70,23
29	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rp 50.980.000,00	Rp 99.884.000,00	Rp (48.904.000,00)	-48,96
30	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 0,00	Rp 99.950.000,00	Rp (99.950.000,00)	-100,00
31	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Rp 391.375.079,00	Rp 0,00	Rp 391.375.079,00	0,00
32	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	Rp 0,00	Rp 99.850.000,00	Rp (99.850.000,00)	-100,00

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
33	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	Rp 0,00	Rp 335.438.640,00	Rp (335.438.640,00)	-100,00
34	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	Rp 478.003.931,00	Rp 1.734.132.529,00	Rp (1.256.128.598,00)	-72,44
35	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jembatan -Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rp 49.792.735,00	Rp 0,00	Rp 49.792.735,00	0,00
36	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	Rp 399.650.000,00	Rp 0,00	Rp 399.650.000,00	0,00
37	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp 2.125.691.500,00	Rp 2.864.546.000,00	Rp (738.854.500,00)	-25,79
38	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	Rp 0,00	Rp 149.900.000,00	Rp (149.900.000,00)	-100,00
39	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Rp 285.049.900,00	Rp 22.000.000,00	Rp 263.049.900,00	1.195,68
40	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	Rp 33.855.000,00	Rp 0,00	Rp 33.855.000,00	0,00
41	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	Rp 79.789.000,00	Rp 0,00	Rp 79.789.000,00	0,00
42	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	Rp 0,00	Rp 100.250.000,00	Rp (100.250.000,00)	-100,00
43	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	Rp 0,00	Rp 74.900.000,00	Rp (74.900.000,00)	-100,00
44	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Rp 0,00	Rp 54.643.000,00	Rp (54.643.000,00)	-100,00
45	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp 0,00	Rp 49.897.275,00	Rp (49.897.275,00)	-100,00
	JUMLAH	Rp 5.191.273.294,00	Rp 9.310.970.151,00	Rp -4.119.696.857,00	(44,25)

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp36.434.286.245,00 digunakan untuk operasional dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.495.722.552,00 atau 23,98% dari Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar Rp47.930.008.797,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp 26.822.765.745,00	Rp 37.991.755.739,00	Rp (11.168.989.994,00)	-29,40
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	Rp 1.279.120.000,00	Rp 418.001.904,00	Rp 861.118.096,00	206,01
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 8.142.565.500,00	Rp 9.494.601.154,00	Rp (1.352.035.654,00)	-14,24
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 189.835.000,00	Rp 25.650.000,00	Rp 164.185.000,00	640,10
	JUMLAH	Rp 36.434.286.245,00	Rp 47.930.008.797,00	Rp -11.495.722.552,00	(23,98)

5.4.2.1.6 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp16.139.480.470,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.546.450.494,00 atau 913,13% dari Beban Hibah Tahun 2022 sebesar Rp1.593.029.976,00, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 12.074.000.000,00	Rp 747.500.000,00	Rp 11.326.500.000,0	1.515,25
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp 130.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 30.000.000,0	30,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 745.529.976,00	Rp 745.529.976,00	Rp 0,00	0,00
4	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	Rp 2.890.760.494,00	Rp 0,00	Rp 2.890.760.494,00	0,00
5	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraa	Rp 299.190.000,00	Rp 0,00	Rp 299.190.000,00	0,00
	JUMLAH	Rp 16.139.480.470,00	Rp 1.593.029.976,00	Rp 14.546.450.494,00	913,13

5.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Bantuan Sosial	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
	JUMLAH	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang adalah beban untuk mencatat estimasi piutang yang tidak tertagih pada suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp615.785.874,46 mengalami Penurunan sebesar Rp535.842.015,59 atau 46,53% dari Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.151.627.890,05 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	Rp 76.750.179,95	Rp 574.903.003,03	Rp (498.152.823,08)	-86,65
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Rp 32.865.572,50	Rp 66.507.702,45	Rp (33.642.129,95)	-50,58
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 14.720.869,00	Rp 0,00	Rp 14.720.869,00	0,00
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	Rp 491.449.253,01	Rp 454.947.870,22	Rp 36.501.382,79	8,02
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp 0,00	Rp 55.269.314,35	Rp (55.269.314,35)	-100,00
	Jumlah	Rp 615.785.874,46	Rp 1.151.627.890,05	Rp (535.842.015,59)	(46,53)

5.4.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset. Beban Penyusutan Aset Tahun 2023 sebesar 126.242.736.650,80 mengalami penurunan sebesar Rp7.638.213.030,81 atau 5,71% dari Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp133.880.949.681,61 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 124.591.217.532,00	Rp 132.467.449.594,81	Rp (7.876.232.062,81)	(5,95)
2	Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
3	Beban Amortisasi Tidak Berwujud	Rp 1.525.815.786,80	Rp 1.413.500.086,80	Rp 112.315.700,00	7,95
4	Beban Penyusutan Properti Investasi	Rp 125.703.332,00	Rp 0,00	Rp 125.703.332,00	0,00
	Jumlah	Rp 126.242.736.650,80	Rp 133.880.949.681,61	Rp (7.638.213.030,81)	(5,71)

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	Rp 1.510.824.039,00	Rp 973.568.637,00	Rp 537.255.402,00	55,18
2	Beban Penyusutan Alat Besar Apung	Rp 81.972.000,00	Rp 65.577.600,00	Rp 16.394.400,00	25,00
3	Beban Penyusutan Alat Bantu	Rp 37.067.510,00	Rp 580.402.306,00	Rp (543.334.796,00)	-93,61
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.511.945.625,00	Rp 13.266.208.941,12	Rp (7.754.263.316,12)	-58,45
5	Beban Penyusutan Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp 0,00	Rp 1.155.000,00	Rp (1.155.000,00)	-100,00
6	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	Rp 367.719.533,00	Rp 796.931.691,00	Rp (429.212.158,00)	-53,86
7	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	Rp 77.243.137,00	Rp 74.060.387,00	Rp 3.182.750,00	4,30
8	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp 49.684.262,00	Rp 6.464.160,00	Rp 43.220.102,00	668,61
9	Beban Penyusutan Alat Ukur	Rp 50.379.508,00	Rp 136.794.345,00	Rp (86.414.837,00)	-63,17
10	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	Rp 54.035.500,00	Rp 67.838.936,00	Rp (13.803.436,00)	-20,35
11	Beban Penyusutan Alat Kantor	Rp 3.337.123.229,00	Rp 1.502.164.400,00	Rp 1.834.958.829,00	122,15
12	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	Rp 1.723.157.233,00	Rp 2.748.747.563,00	Rp (1.025.590.330,00)	-37,31
13	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp 81.849.647,00	Rp 334.225.462,00	Rp (252.375.815,00)	-75,51
14	Beban Penyusutan Alat Studio	Rp 893.455.990,00	Rp 233.936.640,00	Rp 659.519.350,00	281,92
15	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	Rp 14.960.000,00	Rp 42.274.381,00	Rp (27.314.381,00)	-64,61
16	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	Rp 102.286.800,00	Rp 146.968.202,00	Rp (44.681.402,00)	-30,40
17	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	Rp 17.922.458.494,00	Rp 16.921.726.030,00	Rp 1.000.732.464,00	5,91
18	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	Rp 3.379.666,00	Rp 4.788.201.571,90	Rp (4.784.821.905,90)	-99,93
19	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	Rp 1.428.802.031,00	Rp 1.405.056.588,00	Rp 23.745.443,00	1,69
20	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	Rp 41.723.334,00	Rp 17.181.566,00	Rp 24.541.768,00	142,84
21	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	Rp 1.003.957.642,00	Rp 863.561.615,00	Rp 140.396.027,00	16,26
22	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp 3.364.024,00	Rp 8.933.020,00	Rp (5.568.996,00)	-62,34
23	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp 7.773.667,00	Rp 27.462.357,00	Rp (19.688.690,00)	-71,69
24	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp 12.582.221,00	Rp 642.858,00	Rp 11.939.363	1.857,23
25	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp 0,00	Rp 73.623.119,00	Rp (73.623.119,00)	-100,00
26	Beban Penyusutan Komputer Unit	Rp 8.836.820.866,00	Rp 6.129.799.210,00	Rp 2.707.021.656,00	44,16
27	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	Rp 612.099.974,00	Rp 1.509.960.987,00	Rp (897.861.013,00)	-59,46
28	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	Rp 0,00	Rp 874.166,00	Rp (874.166,00)	-100,00
29	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
30	Beban Penyusutan Alat Pelindung	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
31	Beban Penyusutan Alat SAR	Rp 279.616.069,00	Rp 36.802.235,00	Rp 242.813.834,00	659,78
32	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
33	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Rp 38.626.441,00	Rp 4.990.000,00	Rp 33.636.441,00	674,08
34	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	Rp 100.471.352,00	Rp 66.378.114,00	Rp 34.093.238,00	51,36
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	Rp 44.185.379.794,00	Rp 52.832.512.088,02	Rp (8.647.132.294,02)	(16,37)

BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 13.094.323.712,00	Rp 10.027.047.912,00	Rp 3.067.275.800,00	30,59
2	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	Rp 17.904.540,00	Rp 357.232.346,00	Rp (339.327.806,00)	-94,99
3	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	Rp 21.123.294,00	Rp 22.123.294,00	Rp (1.000.000,00)	-4,52
4	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	Rp 9.637.600,00	Rp 9.637.600,00	Rp 0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	Rp 346.140.169,00	Rp 329.615.293,00	Rp 16.524.876,00	5,01
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 13.489.129.315,00	Rp 10.745.656.445,00	Rp 2.743.472.870,00	25,53

BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Jalan	Rp 50.516.740.003,00	Rp 52.400.216.977,79	Rp (1.883.476.974,79)	-3,59
2	Beban Penyusutan Jembatan	Rp 211.914.516,00	Rp 2.007.736.887,00	Rp (1.795.822.371,00)	-89,45
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	Rp 4.687.706.735,00	Rp 1.427.951.948,00	Rp 3.259.754.787,00	228,28
4	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	Rp 4.689.908.142,00	Rp 13.314.142,00	Rp 4.676.594.000,00	35.125,01
5	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Rp 7.126.520,00	Rp 10.482.520,00	Rp (3.356.000,00)	-32,02
6	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penangk	Rp 337.917.899,00	Rp 6.205.113.656,00	Rp (5.867.195.757,00)	-94,55
7	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Ta	Rp 205.867.749,00	Rp 215.656.728,00	Rp (9.788.979,00)	-4,54
8	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	Rp 934.665.879,00	Rp 239.054.431,00	Rp 695.611.448,00	290,98
9	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	Rp 16.315.991,00	Rp 345.434.866,00	Rp (329.118.875,00)	-95,28
10	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp 380.538.244,00	Rp 798.883.449,00	Rp (418.345.205,00)	-52,37
11	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	Rp 80.699.527,00	Rp 480.257.364,00	Rp (399.557.837,00)	-83,20
12	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	Rp 9.589.000,00	Rp 86.429.000,00	Rp (76.840.000,00)	-88,91
13	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	Rp 8.763.700,00	Rp 19.088.221,00	Rp (10.324.521,00)	-54,09
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	Rp 119.738.731,00	Rp 27.394.713,00	Rp 92.344.018,00	337,09
15	Beban Penyusutan Instalasi Gas	Rp 0,00	Rp 3.490.250,00	Rp (3.490.250,00)	-100,00
16	Beban Penyusutan Instalasi Lain	Rp 44.891.416,00	Rp 56.932.671,00	Rp (12.041.255,00)	-21,15
17	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	Rp 528.171.595,00	Rp 3.021.458.273,00	Rp (2.493.286.678,00)	-82,52
18	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	Rp 3.969.910.358,00	Rp 592.299.630,00	Rp 3.377.610.728,00	570,25
19	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	Rp 0,00	Rp 109.554.150,00	Rp (109.554.150,00)	-100,00
20	Beban Penyusutan Jaringan Gas	Rp 4.615.166,00	Rp 770.518.824,00	Rp (765.903.658,00)	-99,40
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Rp 66.755.081.171,00	Rp 68.831.268.700,79	Rp (2.076.187.529,79)	(3,02)

BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	Rp 113.288.085,00	Rp 2.082.361,00	Rp 111.205.724,00	5.340,37
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 48.339.167,00	Rp 55.930.000,00	Rp (7.590.833,00)	-13,57
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	Rp 161.627.252,00	Rp 58.012.361,00	Rp 103.614.891,00	178,61
	TOTAL BEBAN PENYUSUTAN	Rp 124.591.217.532,00	Rp 132.467.449.594,81	Rp (7.876.232.062,81)	(5,95)

Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tidak terdapat Beban Penyusutan Aset Lainnya pada Tahun 2023.

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00

Beban Amortisasi Tidak Berwujud

Beban amortisasi merupakan beban yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.467.475.286,80 mengalami Penurunan sebesar Rp53.975.200,00 atau 3,82 % dari Beban Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.413.500.086,80 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Amortisasi Aset Tak berwujud	Rp 1.525.815.786,80	Rp 1.413.500.086,80	Rp 112.315.700,00	7,95
	JUMLAH BEBAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	Rp 1.525.815.786,80	Rp 1.413.500.086,80	Rp 112.315.700,00	7,95

Beban Penyusutan Properti Investasi**Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi menjelaskan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung merupakan beban yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi untuk aset properti investasi. Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung Tahun 2023 sebesar Rp125.703.332,00, sedangkan pada tahun 2022, Aset Properti Investasi belum tercatat pada Neraca sehingga tidak terdapat Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung juga pada tahun 2022.

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	Rp 125.703.332,00	Rp 0,00	Rp 125.703.332,00	0,00
2	Beban Penyusutan Properti Investasi Monumen	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/ Pasti	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
	Jumlah	Rp 125.703.332,00	Rp 0,00	Rp 125.703.332,00	0,00

5.4.2.3.1 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp45.658.255.113,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.379.697.221,00 atau 5,50% dari realisasi beban transfer tahun 2022 sebesar Rp43.278.557.892,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Bagi Hasil	Rp 1.236.743.013,00	Rp 934.274.892,00	Rp 302.468.121,00	32,37
2	Beban Bantuan Keuangan	Rp 44.421.512.100,00	Rp 42.344.283.000,00	Rp 2.077.229.100,00	4,91
	Jumlah	Rp 45.658.255.113,00	Rp 43.278.557.892,00	Rp 2.379.697.221,00	5,50

Beban Bagi Hasil**Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hal tersebut pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Boalemo telah merealisasikan dana bagi hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Boalemo dengan sebesar Rp1.236.743.013,00 jika dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp934.274.892,00 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp302.468.121,00 atau 32,37%.

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	Rp 1.148.446.206,00	Rp 541.879.431,00	Rp 606.566.775,00	111,94
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp 88.296.807,00	Rp 392.395.461,00	Rp (304.098.654,00)	-77,50
	Jumlah	Rp 1.236.743.013,00	Rp 934.274.892,00	Rp 302.468.121,00	32,37

Beban Bantuan Keuangan**Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan beban transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yaitu Alokasi Dana Desa. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Tahun 2023 sebesar Rp44.421.512.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.077.229.100 atau 4,91% dari Beban Tahun 2022 sebesar Rp42.344.283.000,00. Beban Transfer penyaluran Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp72.534.933.400,00 tetapi tidak diakui sebagai Beban Transfer Bantuan keuangan Ke Desa -LO berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Transfer Akrua.

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota	Rp 44.421.512.100,00	Rp 42.344.283.000,00	Rp 2.077.229.100,00	4,91
	Jumlah	Rp 44.421.512.100,00	Rp 42.344.283.000,00	Rp 2.077.229.100,00	4,91

5.4.2.4.1 Beban Lain-Lain

Beban Lain- Lain Tahun 2023 sebesar Rp1.407.503.973,02 merupakan ekstra kompatibel akibat aset tetap yang tidak sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah atau di bawah nilai kapitalisasi. Beban Lain-lain Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.678.407.963,46 atau 54,39% dari Beban Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp3.085.911.936,48 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	Rp 0,00	Rp 899.823.296,48	Rp (899.823.296,48)	-100,00
2	Beban Lain-lain	Rp 1.407.503.973,02	Rp 2.186.088.640,00	Rp (778.584.666,98)	-35,62
	Jumlah	Rp 1.407.503.973,02	Rp 3.085.911.936,48	Rp (1.678.407.963,46)	(54,39)

5.4.3 Surplus / Defisit Dari Kegiatan Operasional

Realisasi Surplus dari kegiatan Operasional sebesar Rp42.948.702.144,96, nilai ini merupakan hasil penjumlahan dari Pendapatan-LO dan Beban-LO Tahun 2023, hal ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp86.827.951.227,33 atau 197,88%, jika dibandingkan dengan Defisit Kegiatan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp43.879.249.082,37, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Total Pendapatan - LO	Rp 773.252.123.587,87	Rp 705.959.686.982,72	Rp 67.292.436.605,15	9,53
2	Total Beban - LO	Rp 730.303.421.442,63	Rp 749.838.936.065,09	Rp (19.661.217.954,46)	-2,62
	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	Rp 42.948.702.145,24	Rp (43.879.249.082,37)	Rp 86.827.951.227,61	197,88

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

Tidak terdapat realisasi kegiatan non operasional tahun 2023.dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
5.4.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	Rp. 0,00	Rp. 225.522.000,00	Rp. (225.522.000,00)	-100,00
5.4.4.2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
5.4.4.3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	Rp. 0,00	Rp. (24.821.256,00)	Rp. 24.821.256,00	100,00
5.4.4.4	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 0,00	Rp. 200.700.744,00	Rp. (200.700.744,00)	100,00
5.4.6	SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp. 42.948.702.145,24	Rp. (43.678.548.338,37)	Rp. 86.627.250.483,61	198,33

5.4.7 Beban Tak Terduga

Realisasi Beban Luar Biasa Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp339.885.000,00 jika dibandingkan realisasi beban tak terduga tahun 2022 sebesar Rp.2.083.119.354,00 atau turun sebesar 83,68% , dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Beban Tak Terduga	Rp 339.885.000,00	Rp 2.083.119.354,00	Rp (1.743.234.354,00)	-83,68
	Jumlah	Rp (339.885.000,00)	Rp (2.083.119.354,00)	Rp 1.743.234.354,00	(83,68)

Beban Luar Biasa Lainnya atau beban tak terduga terdiri dari :

1. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahap I Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Rp 200.565.000,00
Kekeringan DiKabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023
2. Pembayaran Belanja Tidak Terduga tahap II Atas Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Rp 139.320.000,00
Kekeringan di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023

Jumlah Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023

Rp 339.885.000,00

5.4.9 SURPLUS / DEFISIT - LO (50 + 53)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dengan Beban. Surplus-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp42.608.817.144,96 mengalami kenaikan sebesar Rp88.370.484.837,33 atau 193,11% dari Defisit - LO Tahun 2022 sebesar Rp45.761.667.692,37.

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	SURPLUS / DEFESIT - LO	Rp 42.608.817.145,24	Rp (45.761.667.692,37)	Rp 88.370.484.837,61	193,11
	SURPLUS / DEFESIT - LO	Rp 42.608.817.145,24	Rp (45.761.667.692,37)	Rp 88.370.484.837,61	193,11

5.5 PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	146.142.588.046,37	87.597.379.982,24

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp146.142.588.046,37 untuk Tahun Anggaran 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp87.597.379.982,24. Aktivitas operasi terutama terdiri dari:

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.1 Arus Masuk Kas	795.109.891.976,97	765.252.036.648,24

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah	7.817.681.452,25	6.707.510.440,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan 2023 sebesar Rp7.817.681.452,25 dan tahun 2022 sebesar Rp6.707.510.440,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel / Penginapan	152.487.177,00	137.123.371,00
2	Pajak Restoran	686.105.205,25	1.125.888.290,00
3	Pajak Hiburan	3.200.000,00	10.012.500,00
4	Pajak Reklame	283.613.553,00	316.662.765,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.881.182.065,00	3.546.892.866,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	4.176.000,00	5.000.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.355.608.828,00	281.725.000,00
8	PBB-P2	1.250.513.571,00	1.099.535.075,00
9	BPHTB	200.795.053,00	184.670.573,00
Jumlah		7.817.681.452,25	6.707.510.440,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.1.2 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah	2.599.421.824,00	4.844.139.560,00

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan 2023 sebesar Rp2.599.421.824,00 dan 2022 sebesar Rp4.844.139.560,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	782.360.142,00	2.705.677.066,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	152.608.000,00	3.838.000,00
3	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	577.600.000,00	846.783.500,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	186.612.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	3.500.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	6.625.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	22.288.000,00	94.920.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	281.637.500,00	175.830.000,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan - LRA	52.800.000,00	31.500.000,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	113.559.550,00	230.280.925,00
11	Retribusi Terminal	0,00	168.800.000,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	330.665.000,00	239.738.000,00
13	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha - LRA	285.903.632,00	150.034.569,00
Jumlah		2.599.421.824,00	4.844.139.560,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.1.3 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.478.040.721,00	5.712.369.797,00

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yaitu Pendapatan Dividen tunai tahun 2023 pada Bank SulutGo sebesar Rp8.478.040.721,00 dan tahun 2022 sebesar Rp5.712.369.797,00.

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.1.4 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	51.537.660.774,72	24.867.802.618,44

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetorkan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan 2023 sebesar Rp51.537.660.774,72 dan tahun 2022 sebesar Rp24.867.802.618,44 yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LRA	782.223.308,00	1.330.806.035,00
3	Pendapatan Bunga - LRA	679.374.023,66	164.832.437,92
4	Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA	3.434.954.156,06	3.631.435.050,52
5	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	1.258.510.110,00
6	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	1.200.443,00
7	Pendapatan BLUD	28.629.487.295,34	18.481.018.542,00
8	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LRA	18.011.621.991,66	0,00
Jumlah		51.537.660.774,72	24.867.802.618,44

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.1.5 Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	701.030.290.389,00	687.265.248.753,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak-Pemerintah Pusat	4.918.543.309,00	10.061.836.456,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan 2023 sebesar Rp4.918.543.309,00 dan tahun 2022 sebesar Rp10.061.836.456,00 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil PBB	2.478.287.946,00	7.301.103.202,00
2	Bagi Hasil dari PPh PsI 21 - LRA	2.324.480.665,00	2.553.028.157,00
3	Bagi Hasil dari PPh 25, PPh 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri - LRA	115.774.698,00	207.705.097,00
Jumlah		4.918.543.309,00	10.061.836.456,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam	6.161.877.554,00	2.012.665.961,00

Arus masuk kas dari penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan 2023 sebesar Rp6.161.877.554,00 dan 2022 sebesar Rp2.012.665.961,00 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara-Royalti	120.918,00	2.128.961,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan	4.028.019.225,00	52.226.000,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.133.737.411,00	1.958.311.000,00
Jumlah		6.161.877.554,00	2.012.665.961,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.700,00	2.871,00

Arus masuk kas dari penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan 2023 sebesar Rp4.700,00 dan tahun 2022 sebesar Rp2.871,00 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.700,00	2.871,00
Jumlah		4.700,00	2.871,00

	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum	441.488.971.914,00	421.966.077.434,00
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan 2023 sebesar Rp441.488.971.914,00 dan tahun 2022 sebesar Rp421.966.077.434,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus	82.015.800.451,00	98.950.869.976,00
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan 2023 sebesar Rp82.015.800.451,00 dan tahun 2022 sebesar Rp98.950.869.976,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	84.042.906.061,00	71.682.186.322,00
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan pada tahun 2023 sebesar Rp84.042.906.061,00 dan tahun 2022 sebesar Rp71.682.186.322,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Kas Masuk dari Dana Insentif Fiskal	9.867.253.000,00	5.202.254.000,00
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian adalah penerimaan yang berasal dari Transfer pemerintah Pusat lainnya yang merupakan Dana Insentif Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp9.867.253.000,00 dan arus masuk kas dari Dana Insentif Daerah tahun 2022 sebesar Rp5.202.254.000,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Kas Masuk dari Dana Desa	72.534.933.400,00	77.389.355.733,00
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Desa dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten tahun 2023 sebesar Rp72.534.933.400,00 dan tahun 2022 sebesar Rp77.389.355.733,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.1.6 Arus Kas Masuk dari Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.226.799.716,00	24.296.863.242,00
Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Pemerintah Provinsi		
	23.051.799.716,00	24.296.863.242,00
Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang merupakan bagi hasil yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar Rp23.051.799.716,00 dan tahun 2022 sebesar Rp24.296.863.242,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	175.000.000,00	0,00
Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Gorontalo yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang merupakan Pendapatan atas Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar Rp175.000.000,00 dan tahun 2022 tidak terdapat arus kas masuk.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hibah	419.997.100,00	1.500.000.000,00
Arus Masuk dari Penerimaan Hibah Tahun 2023 merupakan Hibah Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dari PT Pertamina tahun 2023 sebesar Rp419.997.100,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lainnya	0,00	10.058.102.237,80
Arus Masuk dari Penerimaan Penerimaan Lainnya Tahun 2023 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada FKTP sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp10.058.102.237,80.		

		Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.2	Arus Keluar Kas	648.967.303.930,60	677.654.656.666,00

		Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.2.1	Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai	329.257.000.657,60	326.529.165.149,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp329.257.000.657,60 dan tahun 2022 sebesar Rp326.529.165.149,00. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.903.007.379,00	11.076.136.480,00
2	Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	128.653.745,00	144.626.099,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	213.379.880.030,00	204.914.752.218,00
4	Tambahan Penghasilan PNS	39.877.694.251,00	53.634.722.496,00
5	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	337.991.992,00	335.807.992,00
6	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Layanan ASN	41.943.630.103,00	41.484.368.248,00
7	Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	817.645.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	22.686.143.157,60	14.121.106.616,00
Jumlah		329.257.000.657,60	326.529.165.149,00

		Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.2.2	Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang	186.104.401.276,00	226.781.428.562,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp186.110.120.114,00 dan tahun 2022 sebesar Rp226.781.428.562,00.

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Belanja Bahan Habis Pakai	42.009.083.144,00	58.180.919.755,00
2	Belanja Bahan Tak Habis Pakai	0,00	6.090.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	50.279.220.338,00	65.769.441.880,00
4	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	5.059.669.848,00	4.485.495.680,00
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	168.500.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	982.200.000,00	1.942.329.081,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.826.969.999,00	4.387.958.720,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.200.000,00	24.500.000,00
9	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.840.509.138,00	1.747.522.550,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	242.300.720,00	1.300.345.111,00
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	527.322.912,00	1.510.926.604,00
13	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.114.586.194,00	318.810.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	24.955.000,00	92.900.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	769.684.691,00	2.011.610.906,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	880.259.428,00	2.184.205.441,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.436.109.876,00	5.050.268.804,00
18	Belanja Perjalanan Dinas	36.382.786.245,00	47.917.638.797,00
19	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.305.370.000,00	6.598.154.000,00
20	Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	303.250.000,00	295.200.000,00
21	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	16.533.659.691,00	13.904.011.563,00
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.569.264.052,00	8.884.599.670,00
Jumlah		186.104.401.276,00	226.781.428.562,00

		Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.2.3	Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah	16.139.480.470,00	1.593.029.976,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp16.139.480.470,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.593.029.976,00.

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan	12.074.000.000,00	747.500.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	130.000.000,00	100.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Dana BOSP	3.189.950.494,00	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976,00	745.529.976,00
Jumlah		16.139.480.470,00	1.593.029.976,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.2.4 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00

Arus keluar kas dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00
3	Bantuan Sosial Yang Belum Direncanakan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.2.5 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga	339.885.000,00	2.083.119.354,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp339.885.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp2.083.119.354,00.

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.2.6 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke	207.684.603,00	934.274.892,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran Alokasi Dana Desa yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp207.684.603,00 dan tahun 2022 sebesar Rp934.274.892,00.

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1.2.7 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Dana Desa	116.918.851.924,00	119.733.638.733,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran Dana Desa yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp116.918.851.924,00 dan tahun 2022 sebesar Rp119.733.638.733,00.

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.2 ARUS BERSIH KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	-131.783.363.925,00	-108.838.491.909,00

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar -(Rp131.783.363.925,00) untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar (Rp108.838.491.909,00) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Arus Bersih Kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.1 Arus Masuk Kas	0,00	379.290.700,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.1.2 Arus Masuk Kas atas Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	379.290.700,00

Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang telah dihapuskan dari Neraca melalui tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp379.290.700,00.

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.2 Arus Keluar Kas	131.783.363.925,00	109.217.782.609,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.2.2 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah	94.517.300,00	561.411.000,00

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun pelaporan 2023 dengan nilai sebesar Rp94.517.300,00 dan tahun 2022 sebesar Rp561.411.000,00 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Tanah Bangunan/Gedung	0,00	0,00
2	Belanja Tanah Persil	94.517.300,00	561.411.000,00
Jumlah		94.517.300,00	561.411.000,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.2.3 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin	15.297.638.343,00	29.863.665.883,00

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin yang telah dikeluarkan dari Kas daerah dan yang disetarakan dengan Kas daerah selama tahun 2023 sebesar Rp15.297.638.343,00 dan tahun 2022 sebesar Rp29.863.665.883,00.

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	B.M. - Pengadaan Alat Bantu	0,00	0,00
2	B.M. - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	155.412.000,00	1.869.244.500,00
3	B.M. - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Khusus	419.997.100,00	0,00
4	B.M. - Pengadaan Alat - Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00
5	B.M. - Pengadaan Alat - Alat Bengkel tak Bermesin	0,00	0,00
6	B.M. - Pengadaan Alat Ukur	46.829.600,00	17.503.750,00
7	B.M. - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00
8	B.M. - Pengadaan Alat Kantor	737.557.500,00	4.265.405.040,00
9	B.M. - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.441.520.122,00	1.990.845.978,00
10	B.M. - Pengadaan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat	500.793.400,00	502.570.000,00
11	B.M. - Pengadaan Alat Studio	173.479.000,00	284.879.500,00
12	B.M. - Pengadaan Peralatan Pemancar	2.078.000.000,00	0,00
13	B.M. - Pengadaan Alat Kedokteran	642.796.504,00	4.402.554.648,00
14	B.M. - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	483.089.718,00	0,00
15	B.M. - Pengadaan Alat Laboratorium	49.895.252,00	855.848.000,00
16	B.M. - Pengadaan Alat Peraga/ Praktik Sekolah	2.057.322.332,00	533.526.200,00
17	B.M. - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	30.000.000,00
18	B.M. - Pengadaan Komputer Unit	1.748.726.544,00	13.872.435.180,00
19	B.M. - Pengadaan Peralatan Komputer	3.762.219.271,00	1.160.843.087,00
20	B M - Pengadaan Alat SAR	0,00	10.000.000,00
21	B M - Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	11.900.000,00
22	B.M. - Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00
23	B.M. - Pengadaan Peralatan Olah Raga	0,00	56.110.000,00
Jumlah		15.297.638.343,00	29.863.665.883,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.2.4 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan	26.560.640.766,00	31.779.801.422,00

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun anggaran 2023 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp26.560.640.766,00 dan TA 2022 sebesar Rp31.779.801.422,00. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	B.M Bangunan Gedung Kantor	2.267.980.074,00	2.026.202.293,00
2	B.M Bangunan Kesehatan	5.159.352.954,00	3.197.780.785,00
3	B.M Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	149.720.600,00	6.500.000,00
4	B.M Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.045.282.348,00	20.879.367.950,00
5	B.M Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar	0,00	398.700.000,00
6	B.M Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	77.181.860,00	957.044.940,00
7	B.M Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	406.065.274,00
8	B.M Bangunan Terbuka	180.817.858,00	148.842.250,00
9	B.M Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	783.509.680,00
10	B.M Bangunan Fasilitas Umum	262.587.174,00	1.357.465.950,00
11	B.M Bangunan Taman	217.790.000,00	0,00
12	B.M Bangunan Pagar	199.927.898,00	0,00
13	B.M.Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	99.791.500,00
14	B.M Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	46.400.000,00
15	B.M Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	1.472.130.800,00
Jumlah		26.560.640.766,00	31.779.801.422,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.2.5 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.290.911.827,00	44.350.093.675,00

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp84.290.911.827,00 dan TA 2022 sebesar Rp44.350.093.675,00. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	B. M. Jalan	73.107.797.207,00	27.876.219.547,00
2	B. M. Jembatan	2.279.889.413,00	3.990.527.388,00
3	B. M. Bangunan Air Irigasi	1.589.819.840,00	4.869.362.560,00
4	B. M. Bangunan Pengairan Pasang Surut	627.433.185,00	0,00
5	B. M. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.801.968.575,00	5.317.866.180,00
6	B. M. Bangunan Air Bersih/Air Baku	45.389.000,00	98.530.000,00
7	B.M. Bangunan Air Kotor	0,00	0,00
8	B.M Instalasi Air Bersih/Air Baku	17.890.000,00	399.843.000,00
9	B. M. Instalasi Pengadaan Pengolahan Sampah	674.700.000,00	0,00
10	B. M. Pengadaan Jaringan Pipa Gas	0,00	587.745.000,00
11	B. M. Bangunan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	1.210.000.000,00
12	B. M. Bangunan Instalasi Gardu Listrik	146.024.607,00	0,00
Jumlah		84.290.911.827,00	44.350.093.675,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.2.6 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.519.655.689,00	2.662.810.629,00

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa hewan, buku dan barang perpustakaan serta barang bercorak seni dan budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.519.655.689,00 dan TA 2022 sebesar Rp2.662.810.629,00. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	B.M. Bahan Perpustakaan Tercetak	4.178.797.689,00	1.917.264.459,00
2	B.M. Aset Tidak Berwujud	649.300.000,00	670.581.170,00
3	B.M. Barang Bercorak Kesenian	691.558.000,00	74.965.000,00
Jumlah		5.519.655.689,00	2.662.810.629,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya	20.000.000,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Aset Lainnya	20.000.000,00	0,00
Jumlah		20.000.000,00	0,00

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	0,00	-1.500.000.000,00
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.1 Arus Masuk Kas	0,00	0,00
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Masuk Kas dari Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	0,00	0,00
Tidak terdapat Arus Masuk Kas aktivitas Pendanaan		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.2 Arus Keluar Kas	0,00	1.500.000.000,00
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.500.000.000,00
Arus Keluar Kas merupakan Pengeluaran digunakan untuk penyertaan modal ke PDAM Tirta Boalemo pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	-824.725.995,87	-1.395.374.056,31
Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Kabupaten Boalemo. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2023 adalah (Rp824.725.995,87) dan TA 2022 sebesar (Rp1.395.374.056,31). Rincian arus kas ini terdiri dari:		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.4.1 Arus Masuk Kas	60.995.976.308,00	41.802.247.491,60
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.4.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.039.975.887,00	41.802.247.491,60
Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang diterima oleh BUD, Bendahara SKPD, Bendahara BOSP, dan Bendahara BLUD yang harus disetorkan pihak ketiga. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp42.039.975.887,00 dan tahun 2022 sebesar Rp41.802.247.491,60.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Utang PFK di BUD Tahun 2023	41.855.470.955,00	41.600.144.374,00
Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang diterima BUD yang harus disetorkan pihak ketiga. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp41.855.470.955,00 dan TA 2022 sebesar Rp41.600.144.374,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Utang PFK di SKPD Tahun 2023	613.900,00	0,00
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Utang PFK di SKDP Tahun 2023 sebesar Rp613.900,00 dan TA 2022 sebesar Rp0,00.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Arus Masuk Kas atas Utang PFK di BLUD, JKN dan BOS Tahun 2023	183.891.032,00	202.103.117,60
Arus masuk kas ini merupakan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran BOS dan JKN Tahun 2023 sebesar Rp183.891.032,00 dan TA 2022 Rp202.103.117,60.		
	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp

5.5.4.1.2	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran	18.956.000.421,00	0,00
Arus masuk kas ini merupakan penerimaan uang persediaan dan tambah uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran ke RKUD tahun 2023 sebesar Rp18.956.000.421,00.			
		Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
5.5.4.2	Arus Keluar Kas	61.820.702.303,87	43.197.621.547,91
		Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
5.5.4.2.1	Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.864.701.882,87	43.197.621.547,91
Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang diterima BUD, Bendahara SKPD, Bendahara BOSP, dan Bendahara BLUD yang harus disetorkan Kas Negara. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp42.864.701.882,87 dan tahun 2022 sebesar Rp43.197.621.547,91.			
		Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
	Arus Keluar Kas dari Utang (PFK) BUD Tahun 2023	42.650.288.303,00	43.006.559.567,00
Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang diterima BUD yang harus disetorkan Kas Negara. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp42.650.288.303,00 dan TA 2022 sebesar Rp43.006.559.567,00.			
		Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
	Arus Keluar Kas dari Utang (PFK) SKPD dan Pajak Restoran Tahun	0,00	500.524,00
Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PFK Tahun 2023 di SKPD yang disetorkan di tahun 2023.			
		Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
	Arus Keluar Kas atas Utang PFK di BLUD, JKN dan BOS Tahun 2023	214.413.579,87	190.561.456,91
Arus Keluar kas ini merupakan Utang PFK di BLUD, JKN dan BOS di Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun 2023 sebesar Rp214.413.579,87 dan TA 2022 sebesar Rp190.561.456,91.			
		Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
5.5.4.2.2	Arus Keluar Kas dari Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran	18.956.000.421,00	0,00
Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran uang persediaan dan tambah uang persediaan dari RKUD ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran SKPD tahun 2023 sebesar Rp18.956.000.421,00.			
	KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	13.534.498.125,50	-24.136.485.983,07
		Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
5.5.5	SALDO AKHIR KAS	45.231.003.946,66	31.696.505.821,16
Saldo tersebut diperoleh dari penjumlahan Kenaikan/(Penurunan) Kas berupa arus kas bersih dari seluruh aktivitas yang terjadi pada tahun yang bersangkutan ditambah saldo kas awal tahun, dengan perhitungan sebagai berikut:			
		Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
	Saldo Awal Kas di Kas Daerah	31.696.505.821,16	55.832.991.804,23
	Kenaikan/(penarikan) kas	13.534.498.125,50	-24.136.485.983,07
	Saldo Akhir Kas	45.231.003.946,66	31.696.505.821,16
terdiri dari:			
	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	38.468.403.568,67	29.730.283.696,52
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	985.206,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	8.209.000,00	67.286.500,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi	0,00	153.579.675,20
	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK	1.912.862.496,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	3.932.536.278,00	540.736.670,00
	Saldo Akhir Di Bendahara Dana BOSP	868.843.052,99	1.183.363.334,44
	Saldo Kas Lainnya	39.164.345,00	21.255.945,00
	Saldo Kas Setara Kas	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	45.231.003.946,66	31.696.505.821,16

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 **Rp 1.456.442.680.956,57** merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun Anggaran 2022

5.6.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.2.1 Koreksi Ekuitas - Piutang			
Koreksi Ekuitas - Piutang sebesar	Rp	159.780.965,90	Rp 0,00
5.6.2.2 Koreksi Ekuitas - Persediaan			
Koreksi Ekuitas - Persediaan sebesar	Rp	157.865.117,78	Rp 0,00
5.6.2.3 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap			
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap sebesar	Rp	93.478.191,00	Rp 0,00
5.6.2.4 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya			
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya sebesar	Rp	(515.118.500,00)	Rp 0,00
5.6.2.5 Koreksi Ekuitas - Kewajiban			
Koreksi Ekuitas - Kewajiban sebesar	Rp	(2.712.331.476,00)	Rp 0,00
5.6.2.6 Selisih Revaluasi Aset Tetap			
Penilaian kembali aset tetap sebesar	Rp	0,00	Rp 0,00
5.6.2.7 Koreksi Ekuitas Lainnya			
Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 sebesar	Rp	0,00	Rp (315.798.603,00)
Jumlah Nilai Koreksi Ekuitas	Rp	(2.816.325.701,32)	Rp (315.798.603,00)

5.6.3 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Surplus / Defisit - LO sebesar Rp42.608.817.145,24 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp(2.816.325.701,32) yang menambah / mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar

yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

		Tahun 2023	Tahun 2022
1. Ekuitas Awal sebesar	Rp	1.456.442.680.956,57	Rp 1.502.520.147.251,94
2. Surplus/Defisit sebesar	Rp	42.608.817.145,24	Rp (45.761.667.692,37)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Rp	(2.816.325.701,32)	Rp (315.798.603,00)
4. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00	Rp 0,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	1.496.235.172.400,49	Rp 1.456.442.680.956,57

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Boalemo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899).

Letak geografis wilayah Kabupaten Boalemo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, di sebelah selatan berbatasan dengan teluk Tomini, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato, dengan luas wilayah 2.362,58 km².

Kabupaten Boalemo dibagi menjadi 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan 84 Desa/kelurahan, dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Tilamuta.

Manajemen pemerintahan saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Sherman Moridu, S.Pd., M.M. sebagai Penjabat Bupati Boalemo yang memerintah Kabupaten Boalemo berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/75/1179 tertanggal 12 Mei 2022.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Kabupaten Boalemo tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);

Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten melaksanakan Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten merupakan urusan yang berskala kabupaten meliputi:

- a. Perencanaan dan Pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

6.3 Ketentuan Perundang-Undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Boalemo berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan operasional Tahun 2022 didasarkan pada:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu, adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi dasar pijakan Pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai wujud ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memenuhi aspek akuntabel dan transparansi seperti yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan amanat undang-undang tersebut, maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Boalemo pada Tahun Anggaran 2023 telah berupaya secara maksimal melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku, yang pembiayaannya telah dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 yang tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan dapat tercapai dengan baik dilihat realisasi pendapatan dan belanjanya di atas 90% dari target APBD yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dengan ditemukannya berbagai kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Boalemo bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, baik dari sisi penyempurnaan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan.

23 Agustus 2023
Pi BUNATI BOALEMO,
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd., M.M.

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Boalemo. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI BOALEMO" around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp and extends to the right.



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang 2022	Penambahan Piutang 2023	Pengurangan Piutang 2023	Saldo Akhir Piutang Per 2023
1	2	3	4	5	6	7
I	PIUTANG PENDAPATAN PAJAK					
1	PIUTANG PENDAPATAN PAJAK HOTEL	2022	44.262.315,00	-	12.238.000,00	32.024.315,00
3	PIUTANG PENDAPATAN PAJAK REKLAME	2022	181.643.400,00	283.613.553,00	283.613.553,00	181.643.400,00
4	PIUTANG PENDAPATAN PAJAK MINERALI BUKAN L	2022	173.646.723,00	-	-	173.646.723,00
5	PIUTANG PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUN	2022	4.432.179.752,00	1.343.480.405,00	1.248.035.653,00	4.527.624.504,00
	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH		4.831.732.190,00	1.627.093.958,00	1.543.887.206,00	4.914.938.942,00
II	PIUTANG PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK					
1	PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB)	2022	470.439.329,00	4.187.973.410,00	4.076.251.361,00	582.161.378,00
2	PAJAK BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBN-KB)	2022	288.884.607,00	3.826.507.770,00	3.787.714.873,00	327.677.504,00
3	PAJAK BAHAN BAKAR KENDERAAN BERMOTOR (PBB-KB)	2022	401.486.300,00	8.580.796.285,00	7.495.725.750,00	1.486.556.835,00
4	PAJAK PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN		4.989.476,00	10.960.937,00	4.989.476,00	10.960.937,00
	JUMLAH PIUTANG BAGI HASIL PAJAK		1.165.799.712,00	16.606.238.402,00	15.364.681.460,00	2.407.356.654,00
III	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH					
	PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	2022	647.485.500,00	-	647.485.500,00	-
	PIUTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA	2022	192.548.217,00	59.345.010,00	-	251.893.227,00
	PIUTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN FASILITAS PASAR / PERTOKOAN	2022	11.500.000,00	17.450.000,00	7.250.000,00	21.700.000,00
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH		851.533.717,00	76.795.010,00	654.735.500,00	273.593.227,00
III	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Gaji /Pensiunan	2023	24.784.900,00	25.884.900,00	30.284.900,00	20.384.900,00
2	Piutang bunga deposito pada Bank BRI Tilamuta	2022	302.313,80	59.726,00	302.313,80	59.726,00
3	PIUTANG PENDAPATAN BLUD JASA LAYANAN	2023	0,00	173.948.000,00	-	173.948.000,00
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH		25.087.213,80	199.892.626,00	30.587.213,80	194.392.626,00
IV	PIUTANG LAIN-LAIN- PIUTANG LAINNYA					
1	PIUTANG LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI	2022	3.786.294.829,04	3.354.846.464,65	2.357.097.232,48	4.784.044.061,21
2	PIUTANG LAIN-LAIN BLUD-RSTN	2022	6.240.533.353,00	5.446.853.948,00	5.813.312.614,00	5.874.074.687,00
3	PIUTANG DENDA RET PENGENDALIAN MENARA	2022	59.345.010,00		59.345.010,00	-
4	PIUTANG LAIN-LAIN BLUD-RSIB	2023		691.144.800,00		691.144.800,00
5	PIUTANG LAINNYA (UANG MUKA) RS.IB	2023		419.997.100,00		419.997.100,00
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PIUTANG LAINNYA		10.086.173.192,04	9.912.842.312,65	8.229.754.856,48	11.769.260.648,21
TOTAL PIUTANG TAHUN 2023			16.960.326.024,84	28.422.862.308,65	25.823.646.236,28	19.559.542.097,21



Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO

Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM



Lampiran IX PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG 2023	NILAI PENYISIHAN 2023	JUMLAH PIUTANG TAHUN 2023 SETELAH PENYISIHAN
1	PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH	4.914.938.942,00	(4.030.956.116,23)	883.982.825,77
2	PENYISIHAN PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	2.407.356.654,00	-	2.407.356.654,00
3	PENYISIHAN PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA	-	-	-
4	PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN RETRIBUSI	273.593.227,00	(273.593.227,00)	-
5	PENYISIHAN PIUTANG BUNGA DEPOSITO	59.726,00	-	59.726,00
6	PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	4.784.044.061,21	(2.020.898.055,74)	2.763.146.005,47
7	PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	7.179.549.487,00	(81.441.291,59)	7.098.108.195,41
		-	-	-
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN	19.559.542.097,21	(6.406.888.690,56)	13.152.653.406,65

Tilamuta, 23 Agustus 2024
BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN
PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]


 Tiamuta, 23 Agustus 2024
 P. BPPA BOALEMO
 Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM



Lampiran XI PERDA Pertanggungjawab
Anggaran 2023

Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lambaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah yang telah disertakan sampai dengan awal tahun penyertaan	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa Modal yang belum di sertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal yang akan diterima kembali tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 + 8)	10 (6 - 9)	11	12
1	2009	Penyertaan Modal Pada Bank Sulut	Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Pemda Kepada PT. Bank Sulut	Pemilikan Saham	100.000.000.000,00	48.161.278.435,00	-	48.161.278.435,00	51.838.721.565,00	0,00	0,00
2	2005	Penyertaan Modal Pada PDAM Kabupaten Boalemo	Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga	Penambahan Modal Usaha	50.000.000.000,00	13.907.869.081,85	1.277.846.507,02	12.630.022.574,83	37.369.977.425,17	0,00	0,00
3	2014	Penyertaan Modal Pada BUMD Kabupaten Boalemo	Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga	Penambahan Modal Usaha	50.000.000.000,00	679.981.901,47	-	679.981.901,47	49.320.018.098,53	0,00	0,00
JUMLAH					200.000.000.000,00	62.749.129.418,32	1.277.846.507,02	61.471.282.911,30	138.528.717.088,70	0,00	0,00


Tilamita, 23 Agustus 2024
JURAT BOALEMO
DR. SUEWMAN MORIDU, S.Pd. MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP TAHUN 2023

NOMOR URUT	UNIT ORGANISASI	SALDO AWAL	BELANJA MODAL TAHUN 2023	MUTASI ASET TAHUN 2023		SALDO PER 31 DES.2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
						-
1	ASET TETAP TANAH	153.978.124.526,80	94.517.300,00	4.445.000,00	511.907.875,00	153.565.178.951,80
2	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	488.769.788.521,39	14.877.641.243,00	258.288.000,00	29.708.137.374,86	474.197.580.389,53
3	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	545.746.471.739,19	26.560.640.766,00	17.589.113.974,00	7.017.487.989,00	582.878.738.490,19
4	ASET TETAP JARINGAN JALAN DAN IRIGASI	1.375.430.281.903,32	84.290.911.827,00	52.108.132.247,00	1.473.274.884,00	1.510.356.051.093,32
5	ASET TETAP LAINNYA	28.349.452.513,55	5.519.655.689,00	71.864.500,00	890.847.000,00	33.050.125.702,55
6	ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	49.959.925.705,00	0,00	0,00	31.973.037.348,00	17.986.888.357,00
						-
						-
	JUMLAH	2.642.234.044.909,25	131.343.366.825,00	70.031.843.721,00	71.574.692.470,86	2.772.034.562.984,39

Tilamuta, 23 Agustus 2024
BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM

Lampiran XIII PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023

Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 23 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	URAIAN ASET TETAP	SALDO AWAL ASET TETAP	MUTASI TAHUN 2019		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	ASET TETAP TANAH	153.978.124.526,80	98.962.300,00	511.907.875,00	153.565.178.951,80
2	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	488.769.788.521,39	15.135.929.243,00	29.708.137.374,86	474.197.580.389,53
3	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	545.746.471.739,19	44.149.754.740,00	7.017.487.989,00	582.878.738.490,19
4	ASET TETAP JARINGAN JALAN DAN IRIGASI	1.375.430.281.903,32	136.391.786.724,00	1.466.017.534,00	1.510.356.051.093,32
5	ASET TETAP LAINNYA	28.349.452.513,55	5.591.520.189,00	890.847.000,00	33.050.125.702,55
6	ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	49.959.925.705,00	-	31.973.037.348,00	17.986.888.357,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.325.535.714.679,41)	(95.416.680.457,66)	-	(1.420.952.395.137,07)
	JUMLAH ASET TETAP	2.642.234.044.909,25	201.367.953.196,00	71.567.435.120,86	2.772.034.562.984,39

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO
DR. GUERMAN MORIDU, S.Pd. MM



Lampiran XIV PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023

Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR PENAMBAHAN PENGURANGAN ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

KODE UNIT	UNIT ORGANISASI	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	3.893.652.374,00	-	3.893.652.374,00	-
1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.473.909.284,00	-	28.079.384.974,00	1.394.524.310,00
3.02.01.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.574.937.887,00	-	-	11.574.937.887,00
3.08.01.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.017.426.160,00	-	-	5.017.426.160,00
		-	-	-	-
	JUMLAH	49.959.925.705,00	-	31.973.037.348,00	17.986.888.357,00

Tilamuta, 23 Agustus 2024
Kepi... BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM



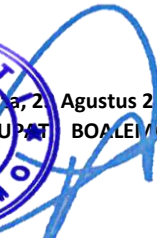
Lampiran XV PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023

Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN ASET TETAP	SALDO AWAL ASET TETAP	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	ASET LAINNYA - TUNTUTAN GANTI RUGI	9.188.585.867,71	-	-	9.188.585.867,71
2	ASET LAINNYA - ASET TAK BERWUJUD	17.850.180.028,00	1.252.705.000,00	-	19.102.885.028,00
3	ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN	74.158.837.204,29	67.088.674.733,59	34.930.000,00	141.212.581.937,88
4	DANA BAGI HASIL TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)	1.246.498.563,00	3.572.936.000,00	1.246.498.563,00	3.572.936.000,00
	JUMLAH ASET TETAP	102.444.101.663,00	71.914.315.733,59	1.281.428.563,00	173.076.988.833,59

Tilapia, 23 Agustus 2024
BUPAT BOALEMO

Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd.MM



Lampiran XVI PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023

Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang direncanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							



Timbuka, 23 Agustus 2024
P. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran XVI PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

NO.	URAIAN ASET TETAP	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	1.018.594.132,37	25.020.318.483,00	25.845.044.478,87	193.868.136,50
2	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	30.000.000,00	127.083.333,00	40.000.000,00	117.083.333,00
3	UTANG BELANJA	1.549.054.094,00	11.522.833.771,00	2.787.234.463,00	10.284.653.402,00
4	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	16.361.528.913,00	16.313.565.292,50	11.908.922.517,00	20.766.171.688,50
	JUMLAH ASET TETAP	18.959.177.139,37	52.983.800.879,50	40.581.201.458,87	31.361.776.560,00



Tamut, 23 Agustus 2024
PATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM



Lampiran XVIII PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman /Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Presentase Bunga Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								-	-	-	-



Tilamuta, 23 Agustus 2024
Pi. BUPATI BOALEMO
Dr. SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran XIX PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023

Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

No	Kode	Kegiatan Lanjutan	Jumlah anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s.d akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2023	
			APBD TA n-1	PERUBAHAN APBD TA n-1		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6		8
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tilamuta, 23 Agustus 2024
BUPATI BOALEMO
HERMAN MORIDU, S.Pd. MM

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO**

*Jln. Tirta, Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo
No. Telp. (0443) 2216454, 082195003223, email: pdamboalemo@gmail.com*

LAPORAN KEUANGAN

**PERUMDA AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2023**

AUDITED

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKTUR	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
_ Neraca	1
_ Laporan Laba (Rugi)	2
_ Laporan Perubahan Ekuitas	3
_ Laporan Arus Kas	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 19



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO**

*Jln. Tirta, Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo
No. Telp. (0443) 2216454, 082195003223, email: pdamboalemo@gmail.com*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrahman Yusuf, ST
Alamat Kantor : Jl. Tirta, Kecamatan Tilamuta
Kabupaten Boalemo.
Jabatan : Direktur

Untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo, Kabupaten Boalemo
Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo, Kabupaten Boalemo.
2. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo, Kabupaten Boalemo telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo, Kabupaten Boalemo telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo, Kabupaten Boalemo tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo, Kabupaten Boalemo sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo, Kabupaten Boalemo.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tilamuta, ... Maret 2024



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Registered Public Accountant

Mohammad Sunusi & Rekan

Epiwalk Office Suite
Lantai 5 Unit A-533
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12940, Indonesia

T : (021) 80607561,
WA : 0853 7645 7285, 0812 9964 2018
Email : kapmsdanrekan.rh@gmail.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00168/2.1392/AU.2/11/1878-2/1/III/2024

Dewan Pengawas dan Direksi

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternative yang realistis selain melaksanakannya.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN – lanjutan

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN

Epiwalk Office Suite Lantai 5 Unit A-533
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12940



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN – lanjutan

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOHAMMAD SUNUSI & REKAN**


MOHAMMAD SUNUSI & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

Rudy Hartono, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1878

Jakarta, 25 Maret 2024



LAPORAN KEUANGAN POKOK

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
NERACA
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2c, 4	145.254.422	380.980.725
Piutang Usaha Bersih	2d, 5	1.046.374.945	1.262.628.169
Piutang Lain-lain	6	105.477.700	157.181.900
Persediaan	2e, 7	336.613.816	395.683.089
Jumlah Aset lancar		1.633.720.883	2.196.473.883
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	2g, 8		
Nilai Perolehan		76.437.350.948	76.262.555.398
Akumulasi Penyusutan		(34.654.868.583)	(30.470.292.113)
Nilai Buku		41.782.482.365	45.792.263.285
Aset Lain-lain	9	2.759.402.366	3.045.539.666
Jumlah Aset Tidak Lancar		44.541.884.731	48.837.802.952
JUMLAH ASET		46.175.605.614	51.034.276.835
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	2i, 10	408.111.493	667.620.673
Utang Non Usaha		155.024.231	86.271.916
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		563.135.724	753.892.589
Kewajiban Jangka Panjang	2l, 11		
Utang Sewa Pembiayaan		106.290.104	163.564.988
Imbalan Pasca Kerja		395.367.918	418.192.918
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		501.658.022	581.757.906
Jumlah Kewajiban		1.064.793.746	1.335.650.494
Ekuitas			
Modal	2o,p,q, 13	83.975.317.291	83.975.317.291
Saldo Laba (Rugi)	13	(34.298.226.024)	(29.626.953.749)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	13	(4.566.279.399)	(4.649.737.202)
Jumlah Ekuitas		45.110.811.868	49.698.626.340
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		46.175.605.614	51.034.276.835

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun 2023	Tahun 2022
PENDAPATAN USAHA	2n, 14		
- Pendapatan Penjualan Air		9.357.630.686	9.406.409.008
- Pendapatan Penjualan Non Air		245.242.000	201.832.282
Jumlah Pendapatan Usaha		9.602.872.686	9.608.241.290
BEBAN USAHA			
- Beban Pegawai	2n, 15	5.634.503.027	5.656.074.149
- Beban Listrik	2n, 16	527.247.975	476.493.119
- Beban BBM	2n, 17	66.023.157	52.007.000
- Beban Pemakaian Bahan	2n, 18	653.203.000	675.417.846
- Beban Pemeliharaan	2n, 19	775.880.090	1.052.228.515
- Beban ATK dan Barang Cetak	2n, 20	136.852.050	61.719.000
- Beban Kantor	2n, 21	71.579.909	70.803.335
- Beban Penyisihan Piutang	2n, 22	722.843.366	614.797.334
- Beban Penyusutan/Penurunan Nilai	2n, 23	4.470.713.771	4.497.875.030
- Beban Operasional Lainnya	2n, 24	1.124.685.390	1.122.043.174
Jumlah Beban Usaha		14.183.531.735	14.279.458.502
LABA (RUGI) USAHA		(4.580.659.049)	(4.671.217.212)
- Pendapatan (Beban) Lain-lain	2n, 25	14.379.650	21.480.010
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		(4.566.279.399)	(4.649.737.202)
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		(4.566.279.399)	(4.649.737.202)

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO

KABUPATEN BOALEMO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PENYERTAAN PEMERINTAH DAERAH	MODAL HIBAH	PENYERTAAN PEMERINTAH YBDS	SALDO LABA / (RUGI)	JUMLAH EKUITAS
Saldo per 31 Desember 2021	22.000.000.000	40.751.351.079	19.723.966.212	(29.393.046.708)	53.082.270.583
Koreksi Saldo Awal	-	-	-	(233.907.041)	(233.907.041)
Penambahan Modal	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
Laba (Rugi) Tahun 2022	-	-	-	(4.649.737.202)	(4.649.737.202)
Saldo per 31 Desember 2022	23.500.000.000	40.751.351.079	19.723.966.212	(34.276.690.951)	49.698.626.340
Koreksi Saldo Awal	-	-	-	(21.535.073)	(21.535.073)
Laba (Rugi) Tahun 2023	-	-	-	(4.566.279.399)	(4.566.279.399)
Saldo per 31 Desember 2023	23.500.000.000	40.751.351.079	19.723.966.212	(38.864.505.423)	45.110.811.868

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Bersih	(4.566.279.399)	(4.649.737.202)
Penyesuaian Terhadap Laba (Rugi) Bersih		
- Beban Penyisihan Piutang	740.282.239	614.797.334
- Beban Penyusutan/Penurunan Nilai	4.184.576.471	4.211.737.729
- Koreksi laba ditahan	(21.535.073)	(233.907.041)
Laba (Rugi) Sebelum Perubahan Modal Kerja	337.044.238	(57.109.179)
Perubahan atas aset dan kewajiban operasi		
- Piutang Usaha	(524.029.015)	(213.197.959)
- Piutang Lain-lain	51.704.200	39.500.000
- Persediaan	59.069.273	122.402.781
- Utang Usaha	(259.509.180)	(227.968.057)
- Utang Non Usaha	68.752.315	(85.169.510)
- Utang Sewa Pembiayaan	(57.274.884)	(50.686.565)
- Kewajiban Imbalan Kerja	(22.825.000)	181.026.859
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(347.068.053)	(291.201.631)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
- Perolehan Aset Tetap	(174.795.550)	(1.593.700.800)
- Aset Lain-lain	286.137.300	286.137.300
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	111.341.750	(1.307.563.500)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
- Kenaikan Modal	-	1.500.000.000
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	1.500.000.000
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(235.726.302)	(98.765.131)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	380.980.725	479.745.856
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	<u>145.254.422</u>	<u>380.980.725</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2005.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Boalemo dan sekarang berubah menjadi "Perusahaan Umum Daerah Air Minum" berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo dengan Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 21 Februari 2022.

Sesuai dengan Bab III, Maksud dan Tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo adalah sebagai berikut :

- Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- Memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
- Turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, Perumda Air Minum Tirta Boalemo melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- memproduksi Air Minum;
- Mendistribusikan Air Minum kepada pelanggan;
- Mendirikan, membangun dan / atau mengelola instalasi Air Minum;
- membentuk dan mengembangkan unit usaha.

Jangkauan lokasi pelayanan Perumda Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo meliputi :

No.	Wilayah	Instalasi	Kapasitas Desain (L / D)	Pelanggan		
				Aktif	Non Aktif	Jumlah
1	Tilamuta	IPA Piloliyanga	30	1.127	676	1.803
		IPA Ayuhulalo Baru	40	3.278	1.038	4.316
		IPA Ayuhulalo	10			
		SPL Ayuhulalo	15			
2	Paguyaman	IPA Paguyaman	20	501	1.055	1.556
3	Botumoito	IPA Mebongo	10	723	1.545	2.268
		SPL Potanga	5	120	98	218
		IPA Rumbiya	15	928	344	1.272
4	Dulupi	IPA Tabongo	15	534	1.038	1.572
		IPA Dulupi	5	RUSAK		
		SPL Pangi	5	207	117	324
		SPL Tanah Putih	3	126	134	260
5	Wonosari	IPA Wonosari	20	1.078	818	1.896
6	Mananggu	IPA Mananggu	10	346	787	1.133
7	Paguyaman Pantai	IPA Limbatihu	10	346	504	850
JUMLAH				9.314	8.154	17.468

Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo beralamat di Jalan Tirta Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Perumda Air Minum Tirta Boalemo Kabuapten Boalemo adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) Tirta Boalemo KabupatenBoalemo No. 15 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Direktur, yang membawahi
 - Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - Kepala Bagian Teknik dan Perencanaan
 - SPI
- b. 3 (tiga) anggota Badan Pengawas

Direktur

Pada tahun 2020 adalah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 0015/216/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pengangkatan Direktur (PDAM) Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo Periode 2020 - 2025, memutuskan mengangkat Sdr. Abd. Rahman Yusuf, ST sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Boalemo.

Badan Pengawas

Pada tahun 2019, Badan PengawasPerumda Air Minum Tirta Boalemo Kabuapten Boalemo sesuai Keputusan Bupati Boalemo Nomor 191 Tahun 2019 Tanggal 1 April 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ketua	: Mus Moha, S. Sos, MM
2. Sekretaris	: Drs. Sukarni H. Potutu, S.Pd, MM
3. Anggota	: Ismail Amalu, S. Sos, MM. Pub

Pegawai

Jumlah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
- Pegawai Tetap	55	Orang	55	Orang
- Karyawan Tidak Tetap	42	Orang	42	Orang
Jumlah Pegawai	<u>97</u>	<u>Orang</u>	<u>97</u>	<u>Orang</u>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan.

a. Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Perusahaan memilih untuk menerapkan SAK ETAP, dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP lebih efisien bagi Perusahaan.

Meskipun persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang diterapkan sebelumnya maupun perkembangan terkini SAK tersebut, namun Perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagaimana di syaratkan oleh standar tersebut.

Oleh karena itu tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK"). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada Perusahaan.

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diisyaratkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip kesinambungan (*Going Concern*) dan berdasarkan konsep Akrua (*Accrual Basis*), kecuali laporan arus kas, dan diukur dengan konsep Biaya Historis (*Historical Cost*). Laporan arus kas disusun menggunakan metode Tidak Langsung (*Indirect Method*) dengan mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di Perusahaan dan kas di bank, serta investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan.

Kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai bukan kas dan dicatat dalam akun "Aset yang dibatasi penggunaannya".

d. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun, yaitu jumlah keseluruhan setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih yang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan individual masing-masing saldo piutang pada akhir periode.

e. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First in First Out (FIFO)*. Pencatatan persediaan dilakukan dengan *physical inventory method*.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir periode. Jumlah penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	(%)
- Bangunan Permanen	20 tahun	5%
- Bangunan Non Permanen	10 tahun	10%
- Instalasi Sumber dan pengolahan Air	20 tahun	5%
- Instalasi Pompa	20 tahun	5%
- Instalasi Transmisi dan Distribusi	16 tahun	6,25%
- Peralatan dan Perlengkapan	4 tahun	25%
- Kendaraan	8 tahun	12,5%
- Inventaris dan Perabot Kantor	4 tahun	25%

Beban perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang berjumlah signifikan yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas dikapitalisasi. Aset yang tidak digunakan lagi atau dijual, harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pencatatan. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

h. Pinjaman

Pinjaman diakui sebesar biaya perolehan dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Biaya pinjaman yang dapat distribusikan secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi aset kualifikasian (*"qualifyinh asset"*), dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai secara substansial. Pinjaman di klasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang kecuali yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

i. Hutang Usaha

Hutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

j. Perpajakan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai beban pada tahun berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan atau banding, jumlah tambahan pokok dan denda pajak tersebut ditangguhkan pembebanannya sampai keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

k. Pendapatan Tangguhan

Pendapatan tangguhan merupakan jumlah yang belum diakui sebagi pendapatan karena belum memenuhi persyaratan pengakuan pendapatan.

Uang muka yang diterima dari pelanggan-pihak ketiga merupakan penerimaan pembayaran atas penjualan yang belum diakui penjualannya, Perusahaan akan mengakui Uang muka diterima sebagai penjualan di tahun berikutnya.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

l. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah menerapkan kewajiban imbalan kerja karyawan sebagaimana diakui dalam SAK ETAP bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal pengunduran diri, pension normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 adalah program imbalan pasti.

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Pendapatan air dicatat berdasarkan pada saat Daftar Rekening Ditagih (DRD) diterbitkan.

Pendapatan non air dicatat berdasarkan pada saat diterbitkan tagihan non air.

Pendapatan diakui pada saat produk (air dan non air) telah diterima / digunakan oleh pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atas dasar akrual.

Pendapatan dan beban selama tahun berjalan diakui pada laporan laba rugi tahun bersangkutan dengan metode akrual. Pendapatan terjadi diluar usaha dimasukkan kedalam pendapatan lain-lain, sedangkan beban diluar kegiatan usaha operasional dimasukkan kedalam beban lain-lain.

o. Penyertaan Pemerintah

Penyertaan Pemerintah merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat berupa uang, aset tetap, barang, peralatan, dan biaya-biaya yang dibayar oleh Pemerintah dan bentuk lainnya yang ditetapkan sebagai Kekayaan Negara yang dipisahkan.

p. Modal Hibah

Penerimaan barang-barang, peralatan dan dana yang sifatnya sebagai sumbangan dan tidak mempunyai keterkaitan apapun dibukukan sebagai Modal Hibah. Apabila barang dan peralatan (pipa dan ascessoris) yang diterima tidak dilengkapi dengan harga, maka barang dan peralatan tersebut akan dinilai berdasarkan harga barang dan peralatan sejenis jika dibeli sendiri.

q. Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan pembiayaan untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Daerah, yang belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan atau pinjaman yang harus dikembalikan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

r. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

3. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi penjualan, beban pokok penjualan, biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa serta mata uang dari negara yang kekuatan persaingannya dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan penentuan mata uang fungsional adalah mata uang yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan dan penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah dalam Rupiah.

Penyisihan Atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi pelanggan tertentu yang menurut informasi pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah piutang guna untuk menurunkan piutang Perusahaan ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya..

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan membuat penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang dan pinjaman yang diberikan. Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Pertimbangan dan estimasi tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyisihan penurunan nilai piutang dari kemungkinan tidak tertagihnya dengan menggunakan metode yang ditetapkan.

Perusahaan tidak menerapkan penyisihan atas piutang ragu-ragu.

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan biaya imbalan kerja dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4 - 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas		
- Kas Kecil	92.100	30.000
- Kas Penerimaan	500.000	500.000
- Kas Bendahara	5.321.000	3.399.100
Bank		
- Bank Sulutgo Rek. No.01501230000013	90.101.819	56.950.676
- Bank Sulutgo Rek. No.01501230000025	6.643.035	6.883.035
- Bank BNI Rek. No.0497155480	5.186.296	56.581.914
- Bank BTN Rek. No.00110-01-30-000472-7	37.410.172	256.636.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	145.254.422	380.980.725

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
- Piutang Air Unit Pusat	935.488.336	849.879.428
- Piutang Air Unit Dulupi	779.158.225	676.861.698
- Piutang Air Unit Botumoito	1.541.491.189	1.440.632.946
- Piutang Air Unit Paguyaman	601.314.351	557.746.070
- Piutang Air Unit Wonosari	340.135.425	264.358.727
- Piutang Air Unit Mananggu	417.384.132	354.568.594
- Piutang Air Unit Paguyaman Pantai	183.034.386	129.929.566
Jumlah Piutang Usaha	4.798.006.044	4.273.977.029
- Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	(3.751.631.099)	(3.011.348.860)
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	1.046.374.945	1.262.628.169

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan piutang usaha tersebut cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha dikemudian hari.

6. PIUTANG LAIN - LAIN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
- Piutang Non Air Lainnya	85.000.000	123.500.000
- Piutang Pegawai	266.026.154	275.134.154
- Akumulasi Penyisihan Piutang Pegawai	(245.548.454)	(241.452.254)
Jumlah Piutang Lain-lain - Bersih	105.477.700	157.181.900

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan piutang lain - lain tersebut cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain dikemudian hari.

7. PERSEDIAAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
- Tawas	43.435.000	52.500.000
- Kaporit	11.250.000	12.000.000
- Pipa - pipa	54.549.816	80.834.439
- Meter Air	25.700.000	44.850.000
- Aksesoris	201.679.000	205.498.650
Jumlah Persediaan	336.613.816	395.683.089

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi adanya persediaan yang mengalami penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai persediaan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET TETAP

31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Penambahan / Reklas /	Pengurangan / Reklas /	Saldo Akhir
<u>Harga Perolehan</u>				
- Tanah	25.405.267	-	-	25.405.267
- Instalasi Sumber Air	38.590.431.922	-	-	38.590.431.922
- Instalasi Perpompaan	130.320.000	27.500.000	-	157.820.000
- Instalasi Pengolahan Air	115.728.630	-	-	115.728.630
- Instalasi Transdis	34.233.478.519	35.341.500	-	34.268.820.019
- Bangunan dan Gedung	933.822.506	41.666.000	-	975.488.506
- Alat dan Perlengkapan	274.449.516	59.047.250	-	333.496.766
- Kendaraan/Alat Pengangkutan	910.297.389	-	-	910.297.389
- Inventaris/Perabot Kantor	1.048.621.649	11.240.800	-	1.059.862.449
Jumlah	76.262.555.398	174.795.550	-	76.437.350.948
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
- Instalasi Sumber Air	14.916.179.549	1.929.521.596	-	16.845.701.145
- Instalasi Perpompaan	27.267.063	4.978.292	-	32.245.354
- Instalasi Pengolahan Air	96.440.526	5.786.432	-	102.226.958
- Instalasi Transdis	13.618.472.030	2.010.192.389	-	15.628.664.420
- Bangunan dan Gedung	276.938.451	47.732.775	-	324.671.227
- Alat dan Perlengkapan	228.692.362	23.314.341	-	252.006.704
- Kendaraan/Alat Pengangkutan	426.432.870	96.189.926	-	522.622.795
- Inventaris/Perabot Kantor	879.869.261	66.860.720	-	946.729.982
Jumlah	30.470.292.113	4.184.576.471	-	34.654.868.583
Nilai Buku	45.792.263.285			41.782.482.365

31 Desember 2022				
	Saldo Awal	/ Reklas / Koreksi	/ Reklas / Koreksi	Saldo Akhir
<u>Harga Perolehan</u>				
- Tanah	25.405.267	-	-	25.405.267
- Instalasi Sumber Air	38.590.431.922	-	-	38.590.431.922
- Instalasi Perpompaan	69.270.000	61.050.000	-	130.320.000
- Instalasi Pengolahan Air	115.728.630	-	-	115.728.630
- Instalasi Transdis	32.978.600.519	1.254.878.000	-	34.233.478.519
- Bangunan dan Gedung	778.322.506	155.500.000	-	933.822.506
- Alat dan Perlengkapan	261.965.516	12.484.000	-	274.449.516
- Kendaraan/Alat Pengangkutan	910.297.389	-	-	910.297.389
- Inventaris/Perabot Kantor	938.832.849	109.788.800	-	1.048.621.649
Jumlah	74.668.854.598	1.593.700.800	-	76.262.555.398

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Saldo Awal	/ Reklas / Koreksi	/ Reklas / Koreksi	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan				
- Instalasi Sumber Air	12.986.657.952	1.929.521.596	-	14.916.179.549
- Instalasi Perpompaan	23.549.187	3.717.875	-	27.267.063
- Instalasi Pengolahan Air	90.654.095	5.786.432	-	96.440.526
- Instalasi Transdis	11.579.539.946	2.038.932.084	-	13.618.472.030
- Bangunan dan Gedung	235.157.743	41.780.709	-	276.938.451
- Alat dan Perlengkapan	207.815.657	20.876.706	-	228.692.362
- Kendaraan/Alat Pengangkutan	330.242.944	96.189.925	-	426.432.870
- Inventaris/Perabot Kantor	804.936.859	74.932.402	-	879.869.261
Jumlah	26.258.554.383	4.211.737.729	-	30.470.292.113
Nilai Buku	48.410.300.215			45.792.263.285

Disamping mengelola aset tetap milik sendiri, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo juga mengelola aset tetap dari :

- Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan untuk Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Air minum dengan Nomor : KU.05.05/cb25/266/2020 tertanggal 20 Januari 2020 dengan nilai sebesar	13.489.265.575	13.489.265.575
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan untuk Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Air minum berupa Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan Kec. Wonsari dengan Nomor : 213/690/DISPERKIMHUBTAN/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 , namun pelaksanaannya pada bulan Februari 2023 dengan nilai sebesar	470.211.900	-
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan untuk Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Air minum berupa Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tabongo Kec. Dulupii dengan Nomor : 214/690/DISPERKIMHUBTAN/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 , namun pelaksanaannya pada bulan Februari 2023 dengan nilai sebesar	3.773.189.117	-
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan untuk Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Air minum berupa Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Suka Mulia Kec. Wonisarii dengan Nomor : 215/690/DISPERKIMHUBTAN/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 , namun pelaksanaannya pada bulan Februari 2023 dengan nilai sebesar	199.850.000	-

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan untuk Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Air minum berupa Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kaaruyan Kec. Mananggu dengan Nomor : 216/690/DISPERKIMHUBTAN/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 , namun pelaksanaannya pada bulan Februari 2023 dengan nilai sebesar

199.800.000

- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan untuk Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Air minum berupa Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mekar Jaya Kec. Wonosari dengan Nomor : 37/690/DISPERKIMHUBTAN/II/2023 tertanggal 1 Februari 2023 dengan nilai sebesar

Jumlah

1.271.600.000

19.403.916.592

13.489.265.575

9. ASET LAIN - LAIN

- Aset Tetap Tidak Dimanfaatkan
- Akumulasi Penyusutan

Jumlah Nilai Buku

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.722.746.000

5.722.746.000

(2.963.343.634)

(2.677.206.334)

2.759.402.366

3.045.539.666

10. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Usaha

- Utang Voucher
- Utang Gaji
- Utang Pihak Ketiga
 - Toko Tiga Jaya
 - PT. Tri Jaya Tangguh
 - CV. Gita Karya
 - Home Kredit
 - Toko Aditia
 - Toko Sifi
 - PT. Sugih Tirta Berkah

Jumlah Utang Usaha

31 Desember 2023

31 Desember 2022

29.789.000

53.486.000

40.822.630

53.250.000

45.000.000

318.837.243

460.719.243

1.050.000

41.050.000

2.488.000

11.342.800

2.225.000

7.200.000

-

8.000.000

472.250

-

408.111.493

667.620.673

Utang Non Usaha

- Utang Sewa Pembiayaan
- Utang Pajak Air Permukaan
- Utang Potongan Cicilan Pegawai Bank BRI

Jumlah Non Utang Usaha

57.274.884

50.686.566

70.695.578

-

27.053.769

35.585.350

155.024.231

86.271.915,69

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	31 Desember 2023	31 Desember 2022
- Utang Sewa Pembiayaan	106.290.104	163.564.988
- Imbalan Pasca Kerja	395.367.918	418.192.918
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	501.658.022	581.757.906

Utang sewa pembiayaan merupakan pembelian atas 1 (satu) mobil Toyota Innova, dengan Type TOYOTA/ATGN140R-MDMSKD31, Tahun pembuatan 2021, Warna Attitude Black, Nomor Rangka MHFJW8EM2389672 dan Nomor Mesin 1TR-A867742.

12. MODAL	31 Desember 2023	31 Desember 2022
- Penyertaan Pemerintah Daerah	23.500.000.000	23.500.000.000
- Penyertaan Pemerintah YBDS	19.723.966.212	19.723.966.212
- Modal Hibah	40.751.351.079	40.751.351.079
Jumlah Modal	83.975.317.291	83.975.317.291

Rincian Modal adalah sebagai berikut :

- Penyertaan Pemerintah Daerah		
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2022		1.500.000.000
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 26 Tahun 2021		3.000.000.000
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 25 Tahun 2019		6.000.000.000
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 27 Tahun 2018		3.000.000.000
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 23 Tahun 2017		4.750.000.000
- Sampai dengan Tahun 2016		5.250.000.000
Jumlah Modal Pemerintah Daerah		23.500.000.000

- Modal Penyertaan Pemerintah YBDS		
- Reservoir	2006	115.728.630
- Pipa Distribusi	2006	667.603.799
- Instalasi Pengolahan Air	2006	130.000.000
- Pipa Distribusi	2006	1.015.000.000
- Water Meter	2009	25.500.000
- Water Meter	2009	81.600.000
- Bangunan Instalasi Pengolahan	2017	1.457.504.000
- Pipa Distribusi	2017	3.312.481.133
- Bangunan Instalasi Pengolahan dan Pipa Distribu	2017	12.918.548.650
Jumlah Modal Penyertaan Pemerintah YBDS		19.723.966.212

- Modal Hibah		
- IPA Dulupi	2008	1.931.846.251
- IPA Botumoito	2010	3.691.869.000
- IPA Paguyaman	2013	7.217.491.912
- SPAM Tanah Putih	2013	3.614.372.855
- IPA Wonosari	2013	6.055.695.202
- IPA Mananggu	2013	6.513.287.259
- IPA Piloliyanga	2014	11.726.788.600
Jumlah Modal Hibah		40.751.351.079

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. SALDO LABA (RUGI)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
- Saldo Awal	(34.276.690.951)	(29.393.046.708)
- Koreksi Saldo Awal	(21.535.073)	(233.907.041)
Jumlah	(34.298.226.024)	(29.626.953.749)
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.566.279.399)	(4.649.737.202)
Jumlah Saldo Laba (Rugi)	(38.864.505.423)	(34.276.690.951)

14. PENDAPATAN USAHA	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Usaha Perusahaan terdiri dari:		
- Pendapatan Penjualan Air	9.357.630.686	9.406.409.008
- Pendapatan Non Air	245.242.000	201.832.282
Jumlah Pendapatan Usaha	9.602.872.686	9.608.241.290

Pendapatan usaha perusahaan masih menggunakan tarif pelayanan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 tahun 2015.

15. BEBAN PEGAWAI	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban Pegawai:		
- Beban Pegawai Sumber Air	666.286.228	642.879.428
- Beban Pegawai Pengolahan	351.841.608	352.947.865
- Beban Pegawai Transmisi & Distribusi	272.391.592	229.202.477
- Beban Pegawai Umum & Administrasi	4.343.983.599	4.431.044.379
Jumlah Beban Pegawai	5.634.503.027	5.656.074.149

16. BEBAN LISTRIK	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban Listrik:		
- Beban Listrik Sumber Air	380.417.366	343.869.837
- Beban Listrik Pengolahan	11.698.201	18.202.237
- Beban Listrik Transmisi & Distribusi	75.955.572	60.794.872
- Beban Listrik Umum dan Administrasi	59.176.836	53.626.173
Jumlah Beban Listrik	527.247.975	476.493.119

17. BEBAN BBM	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban BBM:		
- Beban BBM Pengolahan	66.023.157	52.007.000
Jumlah Beban BBM	66.023.157	52.007.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. BEBAN PEMAKAIAN BAHAN

	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban Pemakaian Bahan:		
- Beban Pemakaian Bahan Kimia Pengolahan	647.815.000	636.250.000
Sub Jumlah	647.815.000	636.250.000
- Beban Pemakaian Bahan Baku dan Pembantu :		
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu Pengolahan	5.388.000	38.115.994
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu Transdis	-	1.051.852
Sub Jumlah	5.388.000	39.167.846
Jumlah Beban Pemakaian Bahan	653.203.000	675.417.846

19. BEBAN PEMELIHARAAN

	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban Pemeliharaan:		
- Beban Pemeliharaan Sumber Air	19.396.500	18.179.000
- Beban Pemeliharaan Pengolahan	10.306.500	66.326.100
- Beban Pemeliharaan Transmisi & Distribusi	410.254.620	701.074.011
- Beban Pemeliharaan Umum & Administrasi	335.922.470	266.649.404
Jumlah Beban Pemeliharaan	775.880.090	1.052.228.515

20. BEBAN ATK DAN BARANG CETAKAN

	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban ATK dan Barang Cetakan:		
- Beban ATK & Foto Copy	47.252.700	36.227.700
- Barang Cetakan	89.599.350	25.491.300
Jumlah Beban ATK dan Barang Cetakan	136.852.050	61.719.000

21. BEBAN KANTOR

	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban Kantor:		
- Beban Hubungan Langganan	45.764.277	3.598.800
- Beban Pinjaman dan Keuangan	25.815.632	67.204.535
Jumlah Beban Kantor	71.579.909	70.803.335

22. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban Penyisihan Piutang:		
- Beban Penyisihan Piutang Usaha	718.747.166	614.797.334
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	4.096.200	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	722.843.366	614.797.334

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BOALEMO
KABUPATEN BOALEMO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN PENYUSUTAN / PENURUNAN NILAI	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban Penyusutan / Penurunan nilai:		
- Instalasi Sumber Air	1.929.521.597	1.929.521.597
- Instalasi Perpompaan	4.978.292	3.717.876
- Instalasi Pengolahan Air	5.786.432	5.786.431
- Instalasi Transmisi dan Distribusi	2.010.192.387	2.038.932.084
- Bangunan dan Gedung	47.732.776	41.780.708
- Alat dan Perlengkapan	23.314.342	20.876.705
- Kendaraan/Alat Pengangkutan	96.189.926	96.189.926
- Inventaris/Perabot Kantor	66.860.721	74.932.402
- Aset Lain-lain	286.137.300	286.137.300
Jumlah Beban Penyusutan / Penurunan Nilai	4.470.713.771	4.497.875.030
24. BEBAN OPERASI LAINNYA	Tahun 2023	Tahun 2022
Rincian Beban Operasi Lainnya:		
- Beban Operasi Lainnya Sumber Air	2.833.900	685.000
- Beban Operasi Lainnya Pengolahan	5.031.000	7.615.000
- Beban Operasi Lainnya Transmisi & Distribusi	81.476.950	39.621.100
- Beban Operasi Lainnya Umum & Administrasi	1.035.343.540	1.074.122.074
Jumlah Beban Operasional Lainnya	1.124.685.390	1.122.043.174
25. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN	Tahun 2023	Tahun 2022
- Pendapatan Lain-lain	15.879.411	23.337.643
- Beban Lain-lain	(1.499.761)	(1.857.633)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain - lain	14.379.650	21.480.010

26. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diuraikan dimuka dan telah diselesaikan pada tanggal 25 Maret 2024.



**BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO**

Alamat : Jl. Merdeka Kec. Tilamuta 96263 e-mail : bi.gorontalo@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018



PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO

(BADAN USAHA MILIK DAERAH)

KABUPATEN BOALEMO



**BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO**

Alamat : Jl. Merdeka Kec. Tilamuta 96263 e-mail : bi.gorontalo@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO

**(BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

I. PENDAHULUAN

1. Proses Pendirian :

PT. Boalemoldaman Gorontalo (Badan Usaha Milik Daerah) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 26-02-2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Kabupaten Boalemo. Bentuk Hukum sesuai amanat dalam Perda Pasal 4 adalah Perseroan Terbatas (PT), dengan struktur organisasi terdiri atas : Rups, Dewan Komisaris, Direksi & Kepala Bagian & Unit, (pasal 7). Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tersebut telah dilakukan Perubahan (Revisi) dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 khususnya pasal menyangkut pembatasan masa kerja Direksi BUMD. Sesuai Perda No. 2 Tahun 2004 dan selama- lamanya 2 tahun dan sesuai Perda No. 4 tahun 2014 masa kerja Direksi adalah 4 tahun.

Proses selanjutnya pada tanggal 27 September 2013 dibuat Akta Pendirian No 48 oleh Notaris Tommy Oroh, SH. Notaris di Kota Gorontalo. Di samping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga.

Seiring dengan perjalanan waktu Akta Pendirian ini belum memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, Akta No. 48 tersebut telah Ditegaskan kembali oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH. Dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 19 Desember 2014. Akta Penegasan tsb telah mendapat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 40954. 40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan hukum Perseroan Terbatas PT. Boalemo Idaman Gorontalo tanggal 22 Desember 2014.



BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO

Alamat : Jl. Merdeka Kec. Tilamuta 96263 e-mail : bi.gorontalo@gmail.com

2. Susunan Pengurus Perusahaan :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo No. 260 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boalemo ditetapkan pengurus PT.BIG (BUMD) dengan masa Jabatan Direksi 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan yang dimulai tanggal 30 september 2013 sampai dengan 30 september 2015. Dan ketetapan ini telah ditindaklanjuti dengan Akta Nomor 48 dari Notaris Tommy Oroh, SH notaris di Gorontalo yang mendapat Penegasan Akta Nomor 74 dari notaris Hasna Mokoginta, SH, notaris di Gorontalo. Susunan Pengurus perusahaan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Komisaris :	Drs. Rum Pagau	: Drs. Rum Pagau
Direktur Utama :	Ibrahim Darwis, SE.MM	: Ibrahim Darwis, SE.MM
Direktur :	Drs. Masri Datau	: Drs. Masri Datau
Direktur :	Ratman Daulima, ST	: Ratman Daulima, ST.

Berdasarkan pasal 4 Akta Perubahan Nomor 06 dari Notaris Gunawan Budiarto, SH notaris di Gorontalo susunan pengurus sejak 16 Februari 2015 adalah sebagai berikut :

	2015	2014
Komisaris :	Deddy Hamzah	: Drs. Rum Pagau
Direktur Utama :	Ibrahim Darwis, SE.MM	: Ibrahim Darwis, SE.MM
Direktur :	Drs. Yusuf Manto	: Drs. Masri Datau
Direktur :	Ratman Daulima, ST	: Ratman Daulima, ST.

	2017	2016
Komisaris ;	----	; ---
Direktur Utama ;	Ibraahim Darwis SE.MM	: Ibrahim Darwis, SE.MM
Direktur :	Ratman Daulima, ST	: Ratman Daulima, ST.

II. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 (Non Audit KAP)

1. Aktivitas Usaha :

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Boalemo Idaman Gorontalo (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Boalemo, maksud dan tujuan pendirian perusahaan adalah untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Pembangunan, Perdagangan, PT. Boalemo Idaman Gorontalo (BIG) sampai dengan akhir tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :



BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO

Alamat : Jl. Merdeka Kec. Tilamuta 96263 e-mail : bi.gorontalo@gmail.com

1.1 Kasdan Bank :

	31 Des 2018	31 Des 2017
• Kas	Rp. 000	Rp. 000
• Bank Sulut	Rp. 000	Rp. 737.566,-
• Bank Tabungan Negara	Rp. 000	Rp. 240.000,-
JumlahKas& Bank	Rp. 000	Rp. 977.566,-

1.2 Piutang Usaha :

CahayaIdaman, CV	Rp. 49.203.0750,-	Rp. 49.203.750,-
Yosalindo, CV	Rp.	Rp.
Putra Boliyohuto, PT	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-
EsBalok	<u>Rp. 5.230.500,-</u>	<u>Rp. 5.230.500,-</u>
Total	<u>Rp. 58.934.250,-</u>	<u>Rp. 58.934.250,-</u>

Perusahaan tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih karena perusahaan yakin bahwa semua piutang bisa tertagih dengan biaya yang tidak signifikan.

1.3 Piutang Pemegang Saham :

Pesaham – Tn. Ibrahim Darwis,	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
Pesaham – Tn. MasriDatau	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
Pesaham – Ratman Daulima,	<u>Rp. 10.000.000,-</u>	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Jumlah Piutang Lainnya	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-

1.4 PiutangLainnya :

Piutang Fiducia (Akta 49-2014)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Piutang Karyawan	Rp. 26.534.000,-	Rp. 26.534.000,-

1.5 Persediaan

Tanah dalam proses (VIB)	Rp. 504.801.750,-	Rp. 504.801.750,-
Rumah dalam proses (VIB)	<u>Rp. 277.252.992,-</u>	<u>Rp. 277.252.992,-</u>
Jumlah Persediaan	Rp. 782.054.742,-	Rp. 782.054.742,-

1.6 Aset Tetap ;

Mesin, Peralatan & Inventaris Ktr	Rp. 351.284.500,-	Rp. 351.284.500,-
Akumulasi Penyusutan	<u>Rp.(206.898.157),-</u>	<u>Rp.(156.675.490),-</u>
NilaiBuku	Rp. (144.386.343,-)	Rp (194.609.007),-

1.7 Aktiva Lain-Lain ;

Uang Muka Proyek	Rp. 99.979.914,-	Rp. 99.979.914,-

1.8HutangUsaha ;

Hutang Biaya (KAP, biaya)	Rp. 32.444.000,-	Rp. 12.444.000,-
Hutang Salary Thn 2016. 2017	Rp. 422.367.801,-	Rp. 244.750.000,-

1.8 HutangPajak :

Hutang PPN	Rp. 14.128.109,-	Rp. 14.128.109,-
HutangPPh 23	Rp. 1.871.250,-	Rp. 1.871.250,-
HutangPPhPasal 4 ayat 1	Rp. 670.149,-	Rp. 670.149,-



BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO

Alamat : Jl. Merdeka Kec. Tilamuta 96263 e-mail : bi.gorontalo@gmail.com

1.9 Hutang Lain-Lain :

Hutang Kepada Ibu Masra	Rp. 65.400.000,-	Rp. 000
Hutang PDAM & Ratman D.	Rp. 12.655.000,-	Rp. 12.655.000,-

10 Modal Saham :

Berdasarkan pada akta nomor 06 tanggal 16 Februari 2015 dari Notaris Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo, modal perseroan terbagi atas 2.030 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- per lembar saham atau senilai Rp. 2.030.000.000,-, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Boalemo, 2.000 lembar seniali	Rp. 2.000.000.000,-
Tn. Ibrahim Darwis, SE. MM, 10 lembar saham senilai	Rp. 10.000.000,-
Tn. Drs. Masri Datau, 10 lembar saham senilai	Rp. 10.000.000,-
Tn. Ratman Daulima, ST, 10 lembar saham senilai	Rp. 10.000.000,-

2. AktivitasPendapatan&Biaya :

2.1Pendapatan

Trading Semen	Rp. 000	Rp. 000
Trading Besi	Rp. 000	Rp. 000
Trading Kakao	Rp. 000	Rp. 000
Pendapatan Proyek	Rp. 000	Rp. 000
Pendapatan Es Balok	Rp. 000	Rp. 000

2.2 Harga Pokok Pendapatan:

Trading Semen, Besi, Kakao	Rp. 000	Rp. 000
Pendapatan Proyek	Rp. 000	Rp. 000
Pendapatan Es Balok	Rp. 000	Rp. 000

2.3. Biaya Administrasi dan Umum

Biaya Tenaga Kerja Direksi	Rp. 000	Rp. 138.000.000,-
Biaya Gaji Kantor Pusat	Rp. 000	Rp. 117.000.000,-
Biaya Gaji Unit Usaha	Rp. 000	Rp. 000,-
Honor Tenaga Ahli KAP & BPJS	Rp. 000	Rp. 21.885.000,-
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan	Rp. 000	Rp. 350.000,-
Biaya Telepon & Internet	Rp. 000	Rp. 7.500,-
Biaya Sewa Kendaraan	Rp. 000	Rp. 000,-
Biaya Foto copy, ATK, BHP	Rp. 000, -	Rp. 465.500,-
Biaya BBM & Transportasi	Rp. 000	Rp. 925.000,-
Biaya Perijinan	Rp. 000	Rp. 000
Biaya Jamuan & Sumbangan	Rp. 000	Rp. 198.000,-
Biaya Rumah Tangga & Lain2	Rp. 000	Rp. 000
Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 000,-	Rp. 710.000,-
Biaya Penystn Mesin & Perltn	Rp. 37.371.375,-	Rp. 37.371.375,-
Biaya Penyustn Inventaris Ktor	Rp. 12.851.292,-	Rp. 12.851.292,-
Sumbangan	Rp. 000	Rp. 10.000,-
Jumlah Biaya Adm & Umum	Rp. 50.222.667,-	- Rp. 329.428.667,-

14. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Bunga Jasa Giro	Rp. 000	Rp. 000
Pendapatan Lain-lain	Rp. 000	Rp. 000



**BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO**

Alamat : Jl. Merdeka Kec. Tilamuta 96263 e-mail : bi.gorontalo@gmail.com

15 Biaya Lain-lain :

Biaya Adm Bank

Rp. 977.566,-

Rp. 000

16. Rugi Tahun 2018

Rp. 51.200.233,-

Rp. 329.765.520,-

17. Rugi Tahun2 Lalu

Rp. 1.286.446.827,- Rp. 956.690.307,-

III. PENUTUP

Penyampaian Laporan Keuangan (Non Audit KAP) Tahun Buku 2018 adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pasal 66 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 4 pasal 67 dan pasal 68.

Demikian. Laporan ini akan ditindaklanjuti ke Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk di Audit lebih lanjut.

Tilamuta, Maret 2019

**Pengurus non aktif
PT. Boalemo Idaman Gorontalo
(Badan Usaha Milik Daerah)**

Ratman Daulima, ST

Ibrahim Darwis, SE.MM

PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO

NERACA (Non Audit KAP)

31 DESEMBER 2018 & 2017

Keterangan		NON AUDIT 2018	NON AUDIT 2017
AKTIVA			
1. Kas	Rp.	-	0
2. Bank Sulut	Rp.	-	737.566
3. Bank Tabungan Negara (BTN)	Rp.	-	240.000
4. Piutang Usaha		-	
- Piutang Semen	Rp.	34.600.000	34.600.000
- Piutang Besi	Rp.	19.103.750	19.103.750
- Piutang Es Balok	Rp.	5.230.500	5.230.500
5. Piutang Pemegang Saham	Rp.	30.000.000	30.000.000
6. - Piutang Lain-lain (Fiducia & Kry, D Talangan)	Rp.	126.534.000	126.534.000
7. Persediaan		-	
- Semen	Rp.	-	
- Besi	Rp.	-	
- Kakao	Rp.	-	
- Tanah dalam Proses	Rp.	504.801.750	504.801.750
- Rumah dalam Proses	Rp.	277.252.992	277.252.992
8. Uang Muka		-	
- Uang Muka Pembelian	Rp.	-	
- Uang Muka Pajak (PPN Masukan)	Rp.	-	
9. Inventaris :			
- Tanah	Rp.		
- Bangunan	Rp.		
- Akumulasi Penyusutan	Rp.		
- Kendaraan	Rp.		
- Akumulasi Penyusutan	Rp.		
- Mesin & Peralatan, Inventar	Rp.	351.284.500	351.284.500
- Akumulasi Penyusutan	Rp.	(206.898.157)	(156.675.490)
10. Aktiva Lain-Lain			
- Uang Muka Proyek	Rp.	99.979.914	99.979.914
- Lain-Lain	Rp.	-	-
TOTAL AKTIVA	Rp.	1.241.889.249	1.293.089.482
PASSIVA			
1. - Hutang Usaha			
- Hutang Usaha	Rp.	-	
- Hutang Biaya	Rp.	32.444.000	32.444.000
- Hutang Biaya Gaji		422.367.801	422.367.801
2. - Uang Muka / Titipan Biaya	Rp.		
3. - Hutang Pajak			
- Hutang PPN		14.128.109	14.128.109
- Hutang PPh 21	Rp.	1.871.250	1.871.250
- Hutang PPh Pasal 4 ayat 1		670.149	670.149
4. - Hutang Lain-Lain			
- Hutang Pemegang Saham Ibu Masra	Rp.	65.400.000	65.400.000
- Hutang Pemegang Saham Pemda			
- PDAM & Ratman Daulima ST.	Rp.	12.655.000	12.655.000
5. - Ekuitas			
- Modal Saham			
- Pemda Boalemo	Rp.	2.000.000.000	2.000.000.000
- Tuan Ibrahim	Rp.	10.000.000	10.000.000
- Tuan Ratman	Rp.	10.000.000	10.000.000
- Tuan Masri	Rp.	10.000.000	10.000.000
Total Modal Saham	Rp.	2.030.000.000	2.030.000.000
- Laba/Rugi			
- Laba/Rugi ditahan	Rp.	(1.286.446.827)	(956.690.307)
- Laba/Rugi Tahun Berjalan	Rp.	(51.200.233)	(329.756.520)
TOTAL PASSIVA	Rp.	1.241.889.249	1.293.089.482

* belum diaudit oleh KAP
Tgl. mutasi, Februari 2019

IBRAHIM DARWIS, SE. MM

RATMAN DAULIMA, ST.

PT. BOALEMO IDAMAN GORONTALO
Laporan Laba Rugi AUDIT KAP 2017, 2018*

TH 2018

	NON AUDIT 2018*	NON AUDIT 2017*
PENDAPATAN		
Pendapatan Trading Semen :	Rp.	
Pendapatan Trading Besi :	Rp.	
Pendapatan Trading Kakao :	Rp.	
Pendapatan Proyek :	Rp.	
Pendapatan Bahan Bangunan :	Rp.	
Pendapatan Es Balok :	Rp.	
Total Pendapatan :	0	-
HARGA POKOK PENDAPATAN		
Harga Pokok Trading Semen :	Rp.	
Harga Pokok Trading Besi :	Rp.	
Harga Pokok Trading Kakao :	Rp.	
Harga Pokok Proyek :	Rp.	
Harga Pokok Bahan Bangunan :	Rp.	
Harga Pokok Es Balok :	Rp.	
Total Harga Pokok Per	0	-
Laba/Rugi Kotor		-
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM		
Biaya Gaji Direksi & Komisaris	Rp.	138.000.000
Biaya Gaji Kantor Pusat :	Rp.	117.000.000
Biaya Gaji Unit Usaha & Kry :	Rp.	
Biaya Gaji Lain (PPh 21 & BPJS, KAP):	Rp.	21.855.000
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan:	Rp.	
Biaya Telepon dan Internet :	Rp.	7.500
Biaya Sewa Kendaraan :	Rp.	
Biaya F. Copy, ATK & Bhn Habis P :	Rp.	465.500
Biaya BBM :	Rp.	925.000
Biaya Perijinan :	Rp.	
Biaya Entertaint + Konsumsi	Rp.	198.000
Biaya Perjalanan Dinas & Transport	Rp.	710.000
Biaya Promosi & Iklan :	Rp.	
Biaya Peny. Mesin & Peralatan :	37.371.375	37.371.375
Biaya Peny. Inventaris Kantor :	12.851.292	12.851.292
Sumbangan :	Rp.	
Biaya Adm lainnya :	Rp.	45.000
Total Biaya adm lainnya :	50.222.667	329.428.667
Laba/Rugi Operasi	(50.222.667)	(329.428.667)
PENDAPATAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Bunga Jasa Giro Bank	Rp.	2.147
Pendapatan lain-lain	Rp.	-
Total Pendapatan lainnya :	Rp.	2.147
BIAYA LAIN-LAIN		
Biaya Adm Bank	977.566	330.000
Biaya Lain-lain		
Total Biaya lain-lain :	977.566	330.000
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(51.200.233)	(329.756.520)
* Taksiran Pajak Penghasilan		
Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan	(51.200.233)	(329.756.520)

*Belum Audit KAP

Tgl. Laporan 2018